Laporan Tahunan

2016

Annual Report

MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

INCREASING CONTRIBUTION OF FINANCIAL SERVICES SECTOR IN SUPPORTING THE GOVERNMENT PRIORITY PROGRAMS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rumah Adat Tongkonan Toraja

Toraja's Tongkonan Traditional House

Rumah Tongkonan adalah rumah adat bagi masyarakat suku Toraja yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Rumah berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Atapnya melengkung menyerupai tanduk kerbau, terbuat dari bahan ijuk atau daun rumbia. Di depan rumah terdapat tiang yang dihiasi susunan tanduk kerbau sebagai penanda tingkat strata sosial si pemilik rumah.

Tongkonan house is the traditional house of Toraja people who live in the mountains of northern part of South Sulawesi. The house stands on a pile of wood and is decorated with red, black, and yellow carvings. The roof is curved to resemble buffalo horns, made of palm fiber or leaf. In front of the house there is a pole decorated with an arrangement of buffalo horns, serving as a marker of the social strata of the homeowner.

MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

INCREASING CONTRIBUTION OF FINANCIAL SERVICES SECTOR IN SUPPORTING THE GOVERNMENT PRIORITY PROGRAMS

Pada tahun 2016 sejalan upaya mendukung stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen, OJK meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung program prioritas pemerintah. Dukungan terhadap sektor kelautan dan perikanan, kedaulatan pangan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM, infrastruktur serta pariwisata tersebut telah memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

In 2016, in line with efforts to support the stability of the financial services sector and protect the interests of consumers, OJK enhances the contribution of the financial services sector in support of government priority programs. Support to the marine and fisheries sector, food sovereignty, the distribution of People's Business Credit to MSMEs, infrastructure and tourism has contributed to the growth of national economy.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

04

TENTANG OJK
OJK at a Glance

Misi Visi Mission Vision	6
Logo OJK OJK's Logo	8
Nilai-Nilai Strategis Strategic Values	9
Struktur Organisasi Organization Structure	10
Sambutan Ketua Dewan Komisioner Chairman Foreword	12
Profil Dewan Komisioner Board of Commissioners	22
Kebijakan Strategis Eksternal 2016 OJK Strategic Policies In 2016	34
Kebijakan Strategis dalam Rangka Memperkuat Kapasitas Organisasi Strategic Policies to Strengthen Organization Capacity	44
Peristiwa Penting 2016 2016 Event Highlights	48

60

FOKUS OJK 2016
OJK Focus in 2016

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Indonesia Financial Services Sector Master Plan	62
Optimaliasi SJK dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Optimalization of Financial Service Sector to Accelerate National Economic Growth	67
Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Landasan Pembangunan yang Berkelanjutan Maintaining Financial System Stability as a Foundation of Sustainable Development	106
Mewujudkan Kemandirian Finansial Masyarakat serta Mendukung Upaya Peningkatan Pemerataan dalam Pembangunan Realising Financial Independence and Supporting Equitable Development	120

144

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
Overview of the Financial Services Industry

Kondisi Ekonomi Global dan Makro Ekonomi Indonesia Global Economic Conditions and Macroeconomic Conditions in Indonesia	146
Perkembangan Industri Perbankan The Banking Industry Growth	156
Perkembangan Industri Pasar Modal The Capital Market Industry Growth	160
Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Nonbank Financial Industry	180
Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah Sharia Financial Services Industry	194

208

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
Governance and Strategic Management

Dewan Komisioner Board of Commissioners	210
Komite-Komite OJK OJK Committees	212
Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance	216
Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja Strategic, Budget and Performance Management	222
Komunikasi Communication	227
Hubungan Kelembagaan Institutional Relationships	230
Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Organizational and Human Capital Development	234
Insiatif Strategis Strategic Initiatives	245
Manajemen Perubahan Change Management	248
Sistem Informasi dan Logistik Information Systems and Logistics	252

256

OUTLOOK DAN ARAH STRATEGIS OJK 2017
Outlook and OJK Strategic Direction in 2017

Outlook Ekonomi 2017 Economic Outlook 2017	258
Arah Strategis OJK 2017 OJK Strategic Direction in 2017	259
Peta Strategis OJK 2017 OJK Strategic Map 2017	260

264

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 Financial Report

TENTANG OJK

OJK AT A GLANCE

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution free from external interference, mandated with regulating, supervising, inspecting and investigating the financial services sector. OJK functions as host of integrated regulation and supervision over all activity in the financial services sector. Accordingly, OJK in charge of regulating and supervising financial services activity in the banking sector, in the capital market and in the insurance industry, as well as pension funds, finance companies and other financial services institutions.

Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan
Ampera Bridge, Palembang, South Sumatra

VISI

VISION

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

To become a trusted Regulator of the financial services industry, protecting the interests of customer and the public, while creating the financial services industry as a pillar of the national economy that is globally competitive and promote public welfare.

MISI

MISSION

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

- To implement all financial services sector activities in a regulated, fair, transparent and accountable manner;
- To safeguard sustainable and stable growth of the financial system;
- To protect the interests of consumer and public.

Logo OJK mengandung filosofi yang mencerminkan:

a. Kesederhanaan, yaitu melambangkan kesederhanaan dalam bersikap namun cepat dalam bertindak dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan kepada OJK.
b. Ringan, yaitu melambangkan OJK yang akan selalu bekerja dengan kerendahan hati, ringan tangan, tidak membedabedakan dalam menunaikan kewajiban yang diamanatkan kepada OJK.
c. Garis-garis tegas, melambangkan OJK yang akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya.
d. Warna merah pada logo, melambangkan OJK yang 'hidup' selalu memiliki semangat baru atau semangat yang tidak pernah akan berhenti bekerja hingga tercapai kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diamanatkan.
e. Warna merah pada huruf OJK, melambangkan kesan kokoh dan elegan, menyiratkan bahwa OJK sebagai lembaga yang maju dan bervisi ke masa depan.
f. Gelombang berwarna merah dan putih, melambangkan OJK yang memiliki sikap dinamis dalam bekerja namun selalu dalam koridor yang diamanatkan.

OJK logo contains a philosophy that reflects:

a. Simplicity, symbolising the simplicity of the attitude yet quickness in executing the function mandated to OJK.
b. Modesty, representing self-effacement, diligence and inclusiveness in fulfilling obligations mandated to OJK.
c. Clear lines, signifying that OJK will always act decisively in carrying out its obligations.
d. Red color in the logo embodies that OJK exists with new or unwavering spirit to achieve perfect implementation of mandated duties.
e. Red color of OJK letters provides a solid and elegant impression, implying that OJK is a progressive institution with a vision for the future.
f. The red and white wave epitomises dynamism within the mandated corridor.

Susunan huruf O dan J yang tersambung serta huruf J dan K yang terputus, melambangkan OJK yang selalu menjalankan tugas dengan standar yang sama dalam kondisi apapun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan fasilitas yang lengkap maupun terbatas.

Connecting the letters 'O' and 'J' while separating the letters 'J' and 'K' symbolises that OJK will always implement its duties pursuant to the same standards under any conditions, individually and jointly, with complete or limited facilities.

Nilai-Nilai Strategis
Strategic Values

Integritas
Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Integrity
Integrity is the quality of being objective, fair and consistent pursuant to the Code of Ethics and organisation policy with honour, honesty and commitment.

Profesionalisme
Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Professionalism
Professionalism is working with full responsibility based on sound competence in order to achieve the best possible performance.

Sinergi
Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Synergy
Synergy is productive collaboration with all stakeholders, internal and external.

Inklusif
Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Inclusive
Inclusive entails openness and acceptance of diverse stakeholders as well as the endeavors undertaken to broaden public opportunities and access to the financial industry.

Visioner
Wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Visionary
Visionary is having comprehensive insight, forward looking and the ability to think outside of the proverbial box.

Sinergi
Integritas
Profesionalisme
Inklusif
Visioner

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

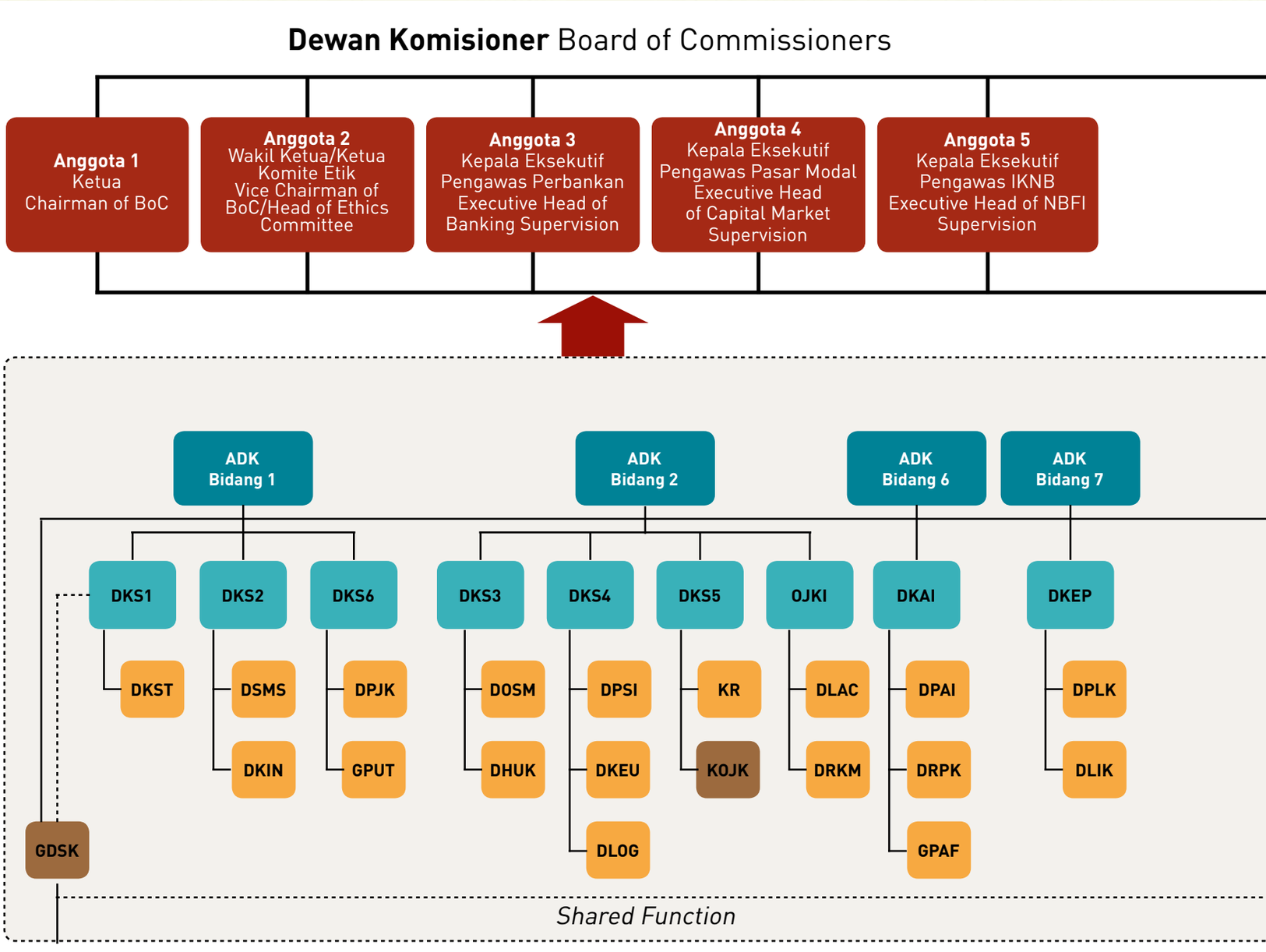

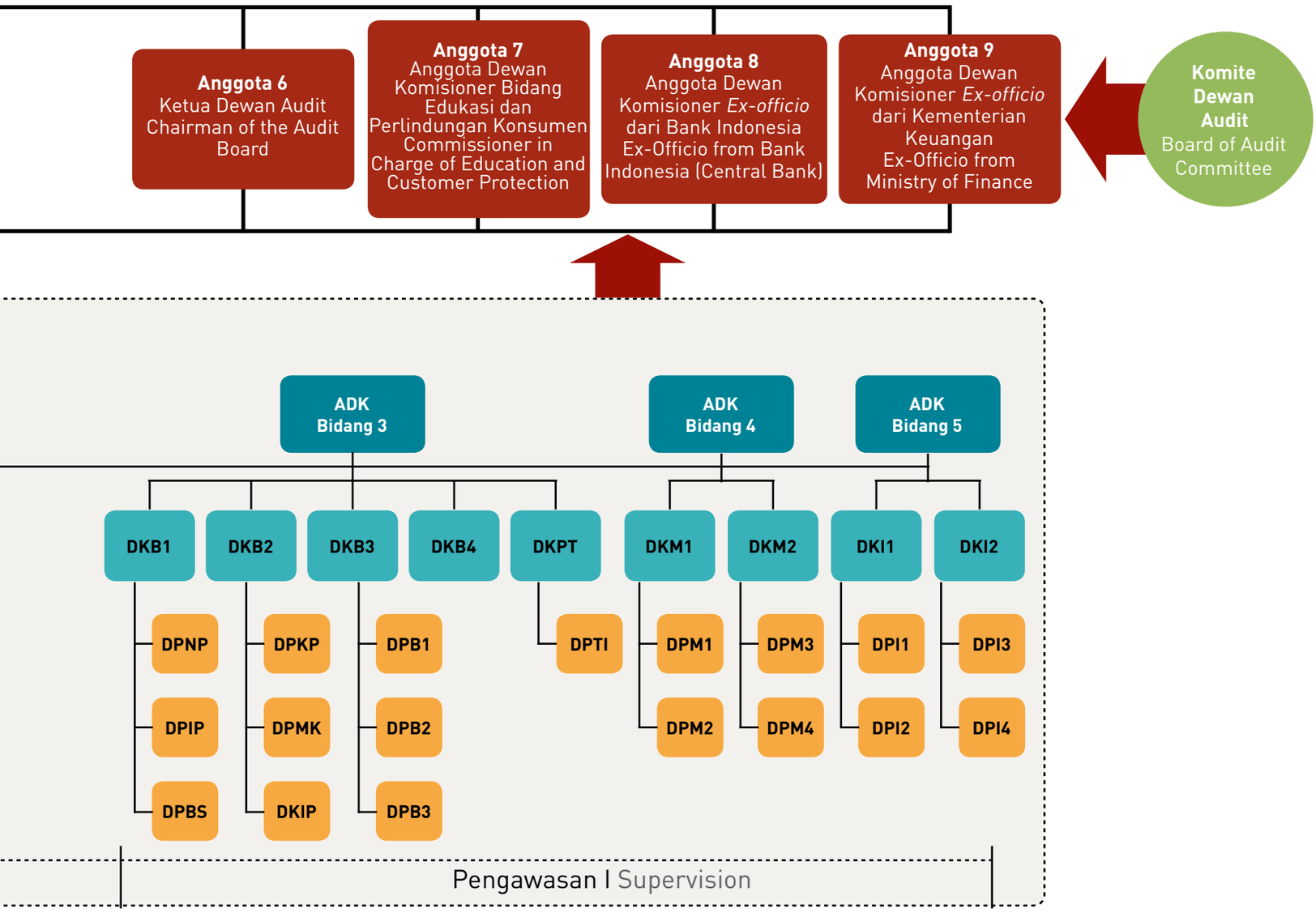
Anggota 6
Ketua Dewan Audit
Chairman of the Audit Board
Anggota 7
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioner in Charge of Education and Customer Protection
Anggota 8
Anggota Dewan Komisioner Ex-officio dari Bank Indonesia
Ex-Officio from Bank Indonesia (Central Bank)
Anggota 9
Anggota Dewan Komisioner Ex-officio dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio from Ministry of Finance
Komite Dewan Audit
Board of Audit Committee
ADK Bidang 3
ADK Bidang 4
ADK Bidang 5
DKB1
DKB2
DKB3
DKB4
DKPT
DKM1
DKM2
DKI1
DKI2
DPNP
DPIP
DPBS
DPKP
DPMK
DKIP
DPB1
DPB2
DPB3
DPTI
DPM1
DPM2
DPM3
DPM4
DPI1
DPI2
DPI3
DPI4
Pengawasan I Supervision

SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER

CHAIRMAN FOREWORD

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya OJK berhasil melalui 2016 dengan sangat baik. Sepanjang 2016, banyak pengalaman berharga yang diperoleh OJK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan. Secara berkelanjutan, OJK terus menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan dan pengembangan sektor jasa keuangan.

We would like to Praise the Lord God Almighty for His grace that OJK successfully navigated 2016. The past year of 2016 was replete with valuable lessons for OJK in terms of executing its duties and functions as the regulator and supervisor of the financial services sector. OJK sustainably formulated strategic policies to create and maintain financial system stability and financial services sector development.

Dalam rangka Optimalisasi peran SJK dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK menerbitkan serangkaian kebijakan strategis yang ditujukan untuk mendorong peran SJK dalam pendanaan Infrastruktur dan Sektor Ekonomi Prioritas seperti industri pertanian, perikanan dan Infrastruktur. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING), Program Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal, Program Asuransi Nelayan, Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP), Program Penyaluran KUR, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT Sektor Riil), serta Penawaran Umum Sektor Infrastruktur. Selain itu, beberapa kebijakan juga ditujukan untuk Penguatan Kapasitas Sektor Jasa Keuangan, antara lain melalui kebijakan dalam rangka dukungan program tax amnesty dan kebijakan dalam pengembangan *Fintech*.

Optimising the role of the financial services sector to accelerate national economic growth, OJK promulgated a series of strategic policies to expand the role of the financial services sector in terms of funding infrastructure and Priority Economic Sectors, including agriculture, fisheries and infrastructure. The policies are implemented through a range of programs, including the JARING program, ship salvage insurance, insurance for commercial fishermen, Rice Farm Insurance (AUTP), Beef Cattle Insurance (AUTS), Asset-Backed Securities in The Form of Participation Certificates (EBA-SP), People's Business Loans (KUR), real sector Private Equity Funds (RDPT) and public offerings in the infrastructure sector. In addition, several policies were also formulated to Strengthen the Capacity of the Financial Services Sector through policies to support implementation of the Tax Amnesty and support Fintech development.

SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER
CHAIRMAN FOREWORD

Sepanjang 2016, pemulihan kondisi perekonomian global melanjutkan tren yang positif. Beberapa indikator ekonomi di negara maju dan *emerging markets* menunjukkan perbaikan walaupun terdapat beberapa risiko yang berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian global. Perekonomian di Amerika Serikat menunjukan pemulihan ekonomi yang semakin solid, didukung perkembangan positif data inflasi dan ketenagakerjaan. Sementara itu, zona Euro juga menunjukkan perkembangan positif tercermin dari keputusan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk memperpanjang program stimulus walaupun terdapat peningkatan gerakan populisme yang bersikap skeptis terhadap manfaat keanggotaan negaranya di Uni Eropa (*Eurosceptic*).

The global economic recovery continues a positive trend in 2016. Several economic indicators in advanced countries and emerging market economies evidenced signs of improvement but a number of risks had the potential to derail the global recovery. The US recovery became increasingly solid, however, confirmed by the recent positive inflation and labour data. Meanwhile, the euro zone gained economic momentum, reflected by the European Central Bank's (ECB) decision to extend the stimulus program, despite growing populist sentiment amongst Eurosceptics.

Pada kawasan Asia, pemulihan perekonomian Jepang terus berlanjut, didorong oleh membaiknya permintaan domestik yang tercermin stabilnya pasar tenaga kerja. Sementara itu, di Tiongkok perekonomian terus melanjutkan pertumbuhan walaupun sedikit lebih rendah dari pertumbuhan periode sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan berlangsungnya proses *rebalancing* perekonomian, seiring beralihnya dominasi dari sektor konstruksi dan manufaktur (*Secondary Industry*), ke sektor jasa dan konsumsi dalam negeri (*Tertiary Industry*).

In Asia, the recovery in Japan continued on the back of growing domestic demand, reflected by a stable labour market. On the other hand, more muted growth in China was in line with the ongoing economic rebalancing process, as the country moved away from secondary industries in favour of tertiary industries.

Sejalan pertumbuhan ekonomi global, ekonomi domestik mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan ekspor serta membaiknya investasi seiring berlanjutnya proyek infrastruktur Pemerintah.

Congruent with the global economy, the domestic economy posted growth of 5.02%, up on the previous year due to increasing household consumption and exports, coupled with strong investment in government infrastructure projects.

Pasar keuangan domestik menunjukkan tren peningkatan, seiring perbaikan sentimen pasar keuangan global yang diiringi oleh peningkatan *capital inflow*. Optimisme

The domestic financial markets rallied as sentiment improved on global financial markets, accompanied by a surge of capital inflows. Optimism surrounding the

program *tax amnesty* dan kinerja emiten yang membaik menjadi katalis positif perkembangan pasar saham, tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 2016 yang terpantau bergerak menguat sebesar 15,32% dan merupakan rekor penutupan akhir tahun tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia, serta tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana menunjukkan peningkatan sebesar 24,55%, menjadi sebesar Rp338,75 triliun. Sejalan dengan kinerja pasar saham, kinerja pasar SBN juga menunjukkan penguatan, tercermin dari penurunan *yield* SBN di semua tenor. Selain penurunan *yield*, kinerja positif pasar SBN juga ditandai oleh investor nonresiden yang mencatat *net buy* di pasar SBN. Kondisi penguatan kinerja pasar saham domestik dan SBN berpengaruh terhadap penguatan Rupiah terhadap mata uang global. Hal ini tercermin dari penguatan nilai Rupiah sebesar 2,29% (*ytd*).

successful Tax Amnesty and sound issuer performance were catalysts for the stock market, with the Jakarta Composite Index (JCI) observed to climb 15.32% in 2016 to close at an all-time high for the capital market in Indonesia and second highest in Asia-Pacific. Furthermore, the net asset value (NAV) of investment funds soared 24.55% to Rp338.75 trillion. Congruent with stock market performance, the SBN market also rallied, reflected in lower yields of all tenors. In addition to lower yields, non-resident investors also booked a net buy on the SBN market. Consequently, the rupiah appreciated against other global currencies, indicated by a 2.29% (ytd) increase.

Pada industri perbankan Konvensional, Pertumbuhan aset, kredit dan DPK cukup baik, dimana total aset, kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama 2016 masing-masing meningkat sebesar 9,40% (*yoy*), 7,58% (*yoy*) dan 9,25% (*yoy*), menjadi sebesar Rp6.475 triliun, Rp4.199 triliun dan Rp4.630 triliun. Pertumbuhan industri perbankan tersebut didukung oleh ketahanan perbankan Indonesia yang relatif kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) Bank Umum Konvensional (BUK) yang meningkat sebesar 22,93% atau tumbuh 155 bps (*yoy*). Perkembangan positif perbankan konvensional, juga diikuti perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dimana total DPK BPR mengalami peningkatan sebesar 12,58% menjadi Rp75,72 triliun. Selain itu, kondisi kesehatan BPR juga berkembang cukup solid, ditandai kondisi permodalan yang baik dan didukung rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) yang mencapai 22,77%

The conventional banking industry reported solid growth of assets, credit and deposits, increasing respectively by 9.40% (yoy), 7.58% (yoy) and 9.25% (yoy) to Rp6,475 trillion, Rp4,199 trillion and Rp4,630 trillion. Banking industry growth was supported by solid resilience, confirmed by the 155bps bump in the Capital Adequacy Ratio (CAR) to 22.93%. Impressive conventional banking industry performance was mirrored by rural banks, where total deposits increased 12.58% to Rp75.72 trillion. Moreover, a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 22.77% was indicative of the soundness of rural banks.

SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER
CHAIRMAN FOREWORD

Sejalan dengan perkembangan Industri Perbankan, Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bergerak positif dengan nilai total aset naik 15,29% menjadi Rp1.919,52 triliun. Sektor jasa keuangan non-bank yang mengalami peningkatan terbesar adalah industri perasuransian, diikuti lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga pembiayaan.

Consistent with the banking industry, the nonbank financial industry also performed well, with total assets observed to increase 15.29% to Rp1,919.52 trillion. The insurance industry posted the strongest gains in the nonbank financial services sector, followed by special financial services institutions and finance companies.

Selama 2016, sektor jasa keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik, tercermin dari peningkatan aset perbankan dan IKNB Syariah. Aset, pembiayaan dan DPK industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 20,28%, 16,44% dan 20,83%, menjadi Rp365,66 triliun, Rp248,01 triliun dan Rp279,33 triliun. Selain itu, aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 81,78%, menjadi Rp88,67 triliun. Total NAB Reksa Dana Syariah juga meningkat 35,35% menjadi Rp14,91 triliun.

The sharia financial services sector reported solid gains on asset growth in the sharia banking and sharia nonbank financial industries. The sharia banking industry corroborated strong growth of assets, financing and deposits, increasing 20.28%, 16.44% and 20.83% respectively to Rp365.66 trillion, Rp248.01 trillion and Rp279.33 trillion. Furthermore, assets in the sharia nonbank financial industry soared 81.78% to Rp88.67 trillion. The total net asset value (NAV) of sharia investment funds also increased, climbing 35.35% to Rp14.91 trillion.

Dari sisi regulasi, sepanjang 2016, OJK telah menerbitkan 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). POJK ini meliputi 26 peraturan di sektor perbankan, 31 peraturan di sektor pasar modal, 18 peraturan di sektor industri keuangan non bank, 1 peraturan tentang edukasi dan perlindungan sektor jasa keuangan, serta 1 peraturan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Selain melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya di bidang pengaturan dan pengawasan, OJK juga fokus melakukan Optimalisasi peran SJK dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat, serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

From a regulatory perspective, OJK issued 77 regulations (POJK) concerning the financial services sector in 2016. The regulations included 26 POJK for the banking industry, 31 for the capital market, 18 for the nonbank financial industry, one regulation concerning consumer education and protection in the financial services sector and one relating to technology-based lending. In addition to the core duties of regulation and supervision, OJK also focused on optimising the role of the financial services sector to Accelerate National Economic Growth, maintain financial system stability as the basis for sustainable development, realise financial independence and support equitable development.

Dalam rangka Optimalisasi peran SJK dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK menerbitkan serangkaian kebijakan strategis yang ditujukan untuk mendorong peran SJK dalam pendanaan Infrastruktur dan Sektor Ekonomi Prioritas seperti industri pertanian, perikanan dan infrastruktur. Kebijakan tersebut diantaranya diimplementasikan melalui Program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING), Program Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal, Program Asuransi Nelayan, Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP), Program Penyaluran KUR, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT Sektor Riil), serta Penawaran Umum Sektor Infrastruktur. Selain itu, beberapa kebijakan juga ditujukan untuk Penguatan Kapasitas Sektor Jasa Keuangan, antara lain melaui kebijakan dalam rangka dukungan program *tax amnesty* dan kebijakan dalam pengembangan *Fintech*.

Optimising the role of the financial services sector to accelerate national economic growth, OJK promulgated a series of strategic policies to expand the role of the financial services sector in terms of funding infrastructure and Priority Economic Sectors, including agriculture, fisheries and infrastructure. The policies are implemented through a range of programs, including the JARING program, ship salvage insurance, insurance for commercial fishermen, Rice Farm Insurance (AUTP), Beef Cattle Insurance (AUTS), Asset-Backed Securities in The Form of Participation Certificates (EBA-SP), People's Business Loans (KUR), real sector Private Equity Funds (RDPT) and public offerings in the infrastructure sector. In addition, several policies were also formulated to Strengthen the Capacity of the Financial Services Sector through policies to support implementation of the Tax Amnesty and support Fintech development.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan, OJK melaksanakan serangkaian kegiatan strategis untuk penguatan pengawasan SJK antara lain RCAP *Assessment*, Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Terintegrasi, Penguatan Fungsi Penyidikan, Kebijakan dan Implementasi Pengawasan *Market Conduc*t, serta pengembangan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetisi SJK domestik yang berskala internasional, OJK menerbitkan kebijakan Bank Kustodian sebagai *Settlement Agent* dan kebijakan Perluasan *Single Investor Identification* (SID) Investor Surat Berharga Negara.

Maintaining financial system stability as the basis for sustainable development, OJK implemented a range of strategic activities to strengthen financial services sector oversight, including the RCAP Assessment, Integrated Supervision Infrastructure Development, Strengthening the Investigation Function, Market Conduct and S-Invest development. Furthermore, to enhance the competence of the domestic financial services sector on the international stage, OJK issued policy for Custodian Banks acting as Settlement Agents and policy to expand the Single Investor Number (SID) to tradeable government securities (SBN).

SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER
CHAIRMAN FOREWORD

Dalam rangka mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, OJK melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain pelaksanaan Transformasi BPD, Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Keuangan Mikro, Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pengembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), penggunaan *Investor Alert Portal* (IAP), Pengembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peluncuran Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta pendirian Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di berbagai macam daerah.

To realise financial independence and support equitable development, OJK implemented several strategic activities, including Regional Bank Transformation, Microfinance Institution Development, the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD), Branchless Banking, the Investor Alert Portal (IAP) and Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS). Furthermore, OJK also launched a program to strengthen community economics and opened a Centre for Education, Consumer Services and MSME Financial Access in various locations.

Sebagai upaya untuk menginformasikan berbagai upaya dan capaian yang telah diraih OJK sepanjang tahun 2016 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban OJK kepada masyarakat atas seluruh pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sesuai amanat Undang-Undang OJK, kami sampaikan Laporan Tahunan OJK 2016. Laporan Tahunan ini juga memuat Laporan Keuangan OJK beserta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK 2016 dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian.

As a tangible form of public accountability and pursuant to the mandate of the OJK Act, I would like to present the Annual Report 2016 of OJK, detailing task implementation and the range of initiatives undertaken during the past year of 2016. This edition of the Annual Report also contains the Audit Opinion of the Auditor's Report on the 2016 OJK Financial Statements, for which the Audit Board of the Republic of Indonesia concluded an unqualified opinion.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisioner menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama 2016. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada seluruh jajaran pegawai yang bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi tinggi dalam mewujudkan visi dan misi. OJK terus berupaya memperbaiki kinerjanya, meningkatkan layanan sektor jasa keuangan serta perlindungan

In closing, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my deepest gratitude to all stakeholders who have supported OJK task implementation in 2016. Sincere appreciation is also extended to all OJK employees, who have worked tirelessly and with the dedication to realise the vision and mission. OJK will constantly strive to improve performance, enhance the financial services sector and consumer protection as well as continuously strengthen coordination with the Government, House

konsumen dan senantiasa meningkatkan kerjasamanya dengan Pemerintah, DPR dan Bank Indonesia serta lembaga-lembaga terkait lainnya dalam rangka menuju industri keuangan nasional yang kontributif, stabil dan inklusif.

of Representatives (DPR) and Bank Indonesia to realise a contributive, inclusive and stable national financial industry.

Demikian pengantar kami, kiranya Laporan Tahunan OJK 2016 ini dapat memberikan informasi yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK, dan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

This edition of the Annual Report provides a range of information concerning the function and duties of OJK, which may be used as a reference by all stakeholders.

Jakarta, 10 Juli / 10th July 2017
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners of
Financial Services Authority

Muliaman D. Hadad, Ph.D

DEWAN KOMISIONER

BOARD OF COMMISSIONERS

kiri ke kanan
left to right

Berdiri - Standing

Mirza Adityaswara, SE, M.App. Fin
Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* Bank Indonesia
Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia

Nelson Tampubolon, SE, MSM
Anggota Dewan Komisioner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Member of OJK Board of Commissioners as Executive Head of Banking Supervision

Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M,Si., Ak.CPA
Anggota Dewan Komisioner Merangkap Ketua Dewan Audit
Member of OJK Board of Commissioners as Chairman of the Audit Board

Dr. Firdaus Djaelani, MA
Anggota Dewan Komisioner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Member of OJK Board of Commissioners as Executive Head of Non Bank Financial Industry Supervision

Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, Akt, QIA, CA, CFrA
Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan
Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from Ministry of Finance

kiri ke kanan
left to right

Duduk - Seated

Ir. Nurhaida, MBA.
Anggota Dewan Komisioner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Member of OJK Board of Commissioners as Executive Head of Capital Market Supervision

Muliaman D. Hadad, Ph.D
Anggota Dewan Komisioner sebagai Ketua Dewan Komisioner
Member of OJK Board of Commissioners as Chairman of the Board of Commissioners

Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D
Anggota Dewan Komisioner sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner
Member of OJK Board of Commissioners as Vice Chairman of the Board of Commissioners

Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLM
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Member of OJK Board of Commissioners in charge of Consumer Education and Protection

PROFIL DEWAN KOMISIONER

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

MULIAMAN D. HADAD, PH.D

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER SEBAGAI KETUA DEWAN KOMISIONER
MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS AS CHAIRMAN OF BOARD OF COMMISSIONERS

Muliaman Darmansyah Hadad lahir di Bekasi pada tanggal 3 April 1960 dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984. Muliaman D. Hadad memperoleh gelar Master of Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan menyandang gelar Ph.D dalam bidang Business and Economics dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1996.

Mengawali kariernya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia di Mataram pada tahun 1986, Muliaman D. Hadad pernah menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan pada tahun 2003 dan Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia pada tahun 2005. Muliaman D. Hadad kemudian diangkat dan dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006, serta diangkat dan dilantik kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2011.

Pada 18 Juli 2012, Muliaman D. Hadad ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan dilantik pada 20 Juli 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Muliaman Darmansyah Hadad was born in Bekasi on 3rd April 1960 and received his bachelor's degree in economics from the Faculty of Economics of the University of Indonesia in 1984. Muliaman D. Hadad received his Master of Public Administration from the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, United States in 1991 and his doctorate in Business and Economics from Monash University in Melbourne, Australia in 1996.

Commencing his career as a member of staff at the Bank Indonesia Office in Mataram in 1986, Muliaman D. Hadad served as Head of the Financial System Stability Bureau in 2003 and Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2005. Muliaman D. Hadad was subsequently installed and sworn in as Deputy Governor of Bank Indonesia in 2006 and serving a second term in 2011.

On 18th July 2012, Muliaman D. Hadad was appointed Chairman of BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and inaugurated on 20th July 2012 by the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure of 2012-2017.

RAHMAT WALUYANTO, MBA, PH.D

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS AS VICE CHAIRMAN OF BOARD OF COMMISSIONERS

Rahmat Waluyanto lahir di Lampung, pada tanggal 3 Oktober 1956 dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rahmat Waluyanto juga lulusan MBA bidang Corporate Finance dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat dan menyandang gelar Ph.D dalam bidang Accounting and Finance dari University of Birmingham, Inggris.

Rahmat Waluyanto mengawali karier pada tahun 1985 sebagai staf Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Selanjutnya Rahmat Waluyanto pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tahun 2005 dan setahun kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan hingga Juli 2012. Rahmat Waluyanto pernah mewakili Indonesia di IMF (International Monetary Fund) sebagai *Alternate Governor* tahun 2008-2012.

Pada 18 Juli 2012 Rahmat Waluyanto ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan pada 4 September 2012 mengambil sumpahnya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2012, Rahmat Waluyanto diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Komite Etik OJK merangkap anggota.

Rahmat Waluyanto was born in Lampung on October 3rd, 1956 and earned a bachelor's degree in accounting from Gadjah Mada University in Yogyakarta. Rahmat Waluyanto also obtained his MBA degree in Corporate Finance from the University of Denver, Colorado, United States and Ph.D degree in accounting and finance from the University of Birmingham, United Kingdom.

Rahmat Waluyanto started his career in 1985 as a member of staff of the Directorate of State-Owned Enterprises, Directorate General of Monetary Affairs, Ministry of Finance. In 2005, he served as Director of Promissory Notes Management at the Ministry of Finance's Directorate General of the Treasury and was promoted a year later as Director General of Debt Management where he served until July 2012. Rahmat Waluyanto once represented Indonesia at the International Monetary Fund, holding the position of Alternate Governor of IMF from 2008 to 2012.

On 18th July 2012, Rahmat Waluyanto was appointed as a member of BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and on 4th September, 2012 sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for his tenure of 2012-2017. Based on Presidential Decree No. 72/P of 2012, Rahmat Waluyanto was inducted concurrently as the Vice Chairman of the BoC-OJK and Head of the Committee of Ethics.

PROFIL DEWAN KOMISIONER

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

NELSON TAMPUBOLON, SE, MSM

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER SEBAGAI KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS AS EXECUTIVE HEAD OF BANKING SUPERVISION

Nelson Tampubolon dilahirkan di Balige, Sumatra Utara, pada 12 Januari 1954, dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat dan gelar Master of Science in Management (MSM) di Arthur D. Little Management Institute, Boston, Amerika Serikat.

Nelson Tampubolon mengawali kariernya sebagai Staf Umum Pengawasan Bank di Bank Indonesia pada 1982. Nelson Tampubolon pernah menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia pada 2002, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Singapura pada tahun 2005 dan selanjutnya sebagai Direktur Internasional Bank Indonesia pada 2008.

Nelson Tampubolon ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012, dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Nelson Tampubolon was born in Balige, North Sumatra, in 12th January 1954, and received a bachelor's degree in economics from the Faculty of Economics at Parahyangan University in Bandung, West Java and a Master of Science in Management (MSM) from the Arthur D. Little Management Institute, Boston, United States.

Nelson Tampubolon began his career as a member of staff at Bank Indonesia Banking Supervision Division during the year of 1982. Nelson Tampubolon served as the Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2002, the Head of Bank Indonesia Representative Office in Singapore in 2005 and then as Director of International Affairs at Bank Indonesia in 2008.

Nelson Tampubolon was appointed as a member of BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 on 18th July 2012 and sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for his tenure of 2012-2017.

IR. NURHAIDA, MBA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER SEBAGAI KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS AS EXECUTIVE HEAD OF CAPITAL MARKET SUPERVISION

Nurhaida dilahirkan di Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 27 Juni 1959 dan mendapatkan gelar Insinyur di Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung, Jawa Barat dan Master of Business Administration dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali jenjang kariernya di pemerintahan setelah bergabung di Departemen Keuangan pada 1989. Pada 2006, Nurhaida menjabat sebagai Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pada Tahun 2011, Nurhaida diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Nurhaida menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 21 Januari 2011.

Pada 18 Juli 2012 Nurhaida ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Nurhaida was born in Padang Panjang, West Sumatra, on 27th June 1959 and received her engineer's degree in textile chemicals from the Bandung Institute of Textile Technology, West Java and a master's degree in Business Administration from Indiana University, Bloomington, United States.

Nurhaida began her career in the government after joining the Ministry of Finance in 1989. In 2006, Nurhaida was designated Head of Real Sector Corporate Finance Bureau, part of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam- LK). In 2011, Nurhaida was appointed as Senior Advisor to the Minister of Finance for Financial Services and Capital Market Policy and Regulation. Nurhaida served as Chair of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency since 21st January 2011.

On 18th July 2012, Nurhaida was appointed as a member of BoC-OJK in accordance with the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and subsequently sworn in for her tenure of 2012-2017 in front of the Chief Justice of the Supreme Court.

PROFIL DEWAN KOMISIONER

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

DR. FIRDAUS DJAELANI, MA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER SEBAGAI KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS AS EXECUTIVE HEAD OF NON BANK FINANCIAL INSTITUTION SUPERVISION

Firdaus Djaelani lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1954, dan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen pada 1981. Firdaus Djaelani mendapatkan gelar master jurusan Ekonomi dari Ball State University, Indiana, Amerika Serikat, 1988 dan menyandang gelar doktor dari Universitas Gadah Mada sejak 2012.

Firdaus Djaelani mengawali karier pegawai negeri sipil sebagai staf Departemen Keuangan pada tahun 1981. Firdaus Djaelani pernah menjabat sebagai Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan sejak tahun 2000 hingga 2006, dan sebagai Direktur Penjaminan & Manajemen Risiko LPS sejak tahun 2005 hingga 2008. Selanjutnya, Firdaus Djaelani ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS pada tahun 2008 hingga April 2012.

Firdaus Djaelani diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012 dan mengucapkan sumpah atas pelantikannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Firdaus Djaelani was born in Jakarta on 17th December 1954, and graduated from the Faculty of Economics at the University of Indonesia with a degree in management in 1981. Firdaus Djaelani also received his master's degree in economics from Ball State University, Indiana, United States in 1988 and his doctorate from Gadjah Mada University in 2012.

Firdaus Djaelani started his career in the civil service as a member of staff in the Ministry of Finance in 1981. Firdaus Djaelani served as the Director of Insurance, Ministry of Finance from the year 2000 until 2006 and as the Director of Deposit Insurance and Risk Management at the Deposit Insurance Corporation (LPS) from 2005 until 2008. Firdaus Djaelani was named a member of the BoC and concurrently the Chief Executive of the LPS from 2008 until 2012.

Firdaus Djaelani was appointed as BoC-OJK on 18th July 2012 pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 and inaugurated before the Supreme Court for his tenure of 2012-2017.

DR. KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO, S.H., LLM

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS IN CHARGE OF CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION

Kusumaningtuti S. Soetiono lahir di London, Inggris pada 21 Juli 1954 dan menyelesaikan pendidikannya dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 1979, gelar Legum Magister (LL.M) dari Washington College of Law, the American University, Amerika Serikat pada 1984, serta meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada 2008.

Kusumaningtuti S. Soetiono mengawali kariernya sebagai Staf di Bagian Pemeriksaan Kredit, Urusan Perencanaan dan Pengawasan Kredit Bank Indonesia pada 1980. Selama hampir 32 tahun berkarier di Bank Indonesia, Kusumaningtuti S. Soetiono berada di Direktorat Hukum (14 tahun) dan di Direktorat Luar Negeri/International (6 tahun). Kusumaningtuti S. Soetiono juga melakukan internship selama 9 bulan di Kantor Pengacara the White & Case di New York, Amerika Serikat pada 1991-1992. Beberapa jabatan yang pernah diduduki di Bank Indonesia adalah sebagai Deputi Direktur Memimpin Direktorat Hukum pada tahun 2001-2002, menjadi Direktur Luar Negeri pada 2003-2005, menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada tahun 2006-2007, kemudian menjadi Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia pada 2007-2010, serta sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York, Amerika Serikat pada 2010-2012.

Pada 18 Juli 2012, Kusumaningtuti S. Soetiono ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P Tahun 2012 dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI untuk masa jabatan 2012-2017.

Kusumaningtuti S. Soetiono was born in London, United Kingdom on 21st July 1954. Kusumaningtuti S. Soetiono received her Bachelor Degree in Law from the University of Indonesia in 1979 and Legum Magister (LL.M) from the Washington College of Law, the American University, Washington DC, USA in 1984 and Doctorate Degree in Law from the University of Indonesia in 2008.

Starting her career as Staff in the Credit Examination Division, Credit Planning and Supervision of Bank Indonesia in 1980, Kusumaningtuti S. Soetiono has dedicated her career in Bank Indonesia for almost 32 years, and spent most in the Legal Directorate for 14 years and in the International Directorate for 6 years. During that period, she also took an internship for 9 months (1991-1992) in the White & Case Law Firm in New York, USA. Several positions that have been assigned to Kusumaningtuti S. Soetiono in Bank Indonesia were as Deputy Director leading Directorate of Legal in 2001-2002, as the Director of Directorate of International Affairs in 2003-2005, as the Director of Central Banking Study and Education Centre in 2006-2007, as the Director of Directorate of Human Resources in 2007-2010, and as the Chief of Bank Indonesia New York Representative Office, USA in 2010-2012.

On July 18th, 2012, Kusumaningtuti S. Soetiono is appointed as Member of BoC-OJK based on the Presidential Decree No. 67/P year 2012. She was sworn in before the Chief of Justice of Supreme Court for 2012-2017 term of office.

PROFIL DEWAN KOMISIONER

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

PROF. DR. ILYA AVIANTI, S.E., M,SI., AK. CPA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER MERANGKAP KETUA DEWAN AUDIT
MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS AS CHAIRMAN OF THE AUDIT BOARD

Ilya Avianti dilahirkan di Bandung pada 12 Juli 1959. Meraih gelar Sarjana Ekonomi sampai dengan gelar Doktor dalam bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Ilya Avianti memulai karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung sejak 1985 dan menjadi Guru Besar di universitas yang sama sejak 2007. Ilya Avianti pernah menjadi tenaga ahli Menteri Keuangan periode 2005 sampai 2006. Pada akhir 2006 menjadi Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dua tahun kemudian posisinya beralih menjadi Staf Ahli dan merangkap sebagai Plt. Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI. Selama 2010 – Juni 2012 yang bersangkutan menjadi Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK-RI.

Pada 18 Juli 2012, Ilya Avianti ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan membaca sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Ilya Avianti was born in Bandung, West Java, on 12th July 1959 and awarded a bachelor's degree in economics and accounting, a master of science in accounting and a doctorate in accounting from the Faculty of Economics, Padjadjaran University in Bandung.

Ilya Avianti started her career as a lecturer at the Faculty of Economics, Padjadjaran University, Bandung in 1985, and in 2007 was appointed as associate professor at the same university. Ilya Avianti was appointed as an expert staff to the Minister of Finance for the period from 2005-2006 and worked as a member of the expert staff on the Audit Board of the Republic of Indonesia at the end of 2016. Two years thereafter, Ilya Avianti was transferred to the position of Main Auditor at the State Auditorate and concurrently as a member of the expert staff. During 2010-2012, Ilya Avianti worked as a Main Auditor VII at the State Auditorate

On 18th July 2012, Ilya Avianti was appointed as a member of BoC-OJK pursuant to the Presidential Decree No. 67/P of 2012 on 18th July 2012 and sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for her tenure of 2012-2017.

PROF. DR. H. MARDIASMO, MBA, AKT, QIA, CA, CFRA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER *EX-OFFICIO* KEMENTERIAN KEUANGAN
MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS FROM MINISTRY OF FINANCE

Mardiasmo lahir di Solo, Jawa Tengah, 10 Mei 1958. Ia menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada pada 1981, Master of Business Administration (MBA) di University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat pada 1989, dan meraih Doctor of Philosophy (PhD) dalam bidang Development Administration, di University of Birmingham, Birmingham, Inggris pada 1999.

Mardiasmo mengawali karir sebagai birokrat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004 – 2006, kemudian diberikan amanah sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 2006 – 2010. Sejak 2010 - 2014, beliau diangkat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga diberikan mandat sebagai Ketua Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional (TQA RBN). Mardiasmo menerima penghargaan Bintang Jasa Utama Tahun 2014. Mardiasmo aktif sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia periode 2012 – 2014 dan periode 2014 s.d. sekarang.

Pada 27 Oktober 2014 Mardiasmo diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja 2014 – 2019 dan pada 11 Desember 2014, Mardiasmo ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2014.

Born in Solo, Central Java, on 10th May 1958, Mardiasmo graduated from the Faculty of Economics, Gadjah Mada University in 1981, majoring in Accounting. He later received a Master of Business Administration (MBA) from the University of Bridgeport, Connecticut, United States in 1989 and earned a Doctorate of Philosophy (PhD) from the University of Birmingham, Birmingham, UK in 1999.

Mardiasmo began his career as a bureaucrat when installed as Expert Staff of the Minister of Finance in the area of State Expenditure from 2004-2006 and subsequently appointed as Director General of Fiscal Balance from 2006-2010. During the four years from 2010-2014, Mardiasmo served as the Chairman of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and was mandated as Chairman of the Bureaucratic Reform Quality Assurance Team (TQA RBN). Mardiasmo was presented a First Class Medal of Honour in 2014. Furthermore, Mardiasmo also served as National Board Chairperson for the Indonesian Institute of Accountants (IAI) from 2012-2014 and then again from 2014 until the present day.

On 27th October 2014, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, instated Mardiasmo as Deputy Minister of Finance for 2014-2019. On 11th December 2014, Mardiasmo was charged as Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance based on Presidential Decree No. 143/P of 2014.

PROFIL DEWAN KOMISIONER

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

MIRZA ADITYASWARA, SE, M.APP. FIN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN *EX-OFFICIO* BANK INDONESIA
EX-OFFICIO MEMBER OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS FROM BANK INDONESIA

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia, kemudian Mirza memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia.

Beliau mengawali karir sebagai *Dealer* di Bank Sumitomo Niaga pada 1989. Sejak 2002 hingga Oktober 2005, Beliau menjabat sebagai Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Sekuritas, kemudian pada November ditahun yang sama beliau diminta menjadi Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama kurun waktu 2008 – 2010, Mirza bertugas sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisioner. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.113/P Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk periode 2013 - 2014.

Pada 20 Agustus 2015, Mirza Adityaswara ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio dari Bank Indonesia menggantikan Halim Alamsyah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015.

Mirza Adityaswara, born in Surabaya in 1965, graduated with a Bachelor of Economics from the University of Indonesia and subsequently received his Master of Applied Finance from Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza began his career as a Dealer at Bank Sumitomo Niaga in 1989. From 2002 until October 2005, however, he was installed as Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Securities and then in November of the same year he was appointed as Director, Head of Equity Research & Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia. From 2008 – 2010, Mirza served as Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Securities and simultaneously as the Chief Economist for Bank Mandiri Group.

Prior to his appointment as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, Mirza served on the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and since April 2012 he has also functioned as the Chief Executive of the Deposit Insurance Corporation and the Board of Commissioners. In accordance with Presidential Decree No. 113/P of 2013, dated 30th September 2013, Mirza was sworn in as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia on 3rd October 2013, incumbent for the period from 2013 – 2014.

On 20th August 2015, Mirza Adityaswara was appointed as the Ex-Officio member of BoC-OJK representing Bank Indonesia replacing Halim Alamsyah pursuant to the Presidential Decree No. 61/P of 2015 on 23rd July 2015.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

DEPUTI KOMISIONER DAN SENIOR ADVISOR

DEPUTY COMMISSIONERS AND SENIOR ADVISOR

kiri ke kanan
left to right

Berdiri - Standing

Hendrikus Ivo
Deputi Komisioner Manajemen Strategis I C
Deputy Commissioner of Strategic Management I C

Mulya Effendi Siregar
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I
Deputy Commissioner of Banking Supervision I

Hernawan Bekti Sasongko
Deputi Komisioner Manajemen Strategis II A
Deputy Commissioner of Strategic Management II A

Edy Setiadi
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision I

Sardjito
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I

Imansyah
Deputi Komisioner Manajemen Strategis I A
Deputy Commissioner of Strategic Management I A

Agus Edy Siregar
Deputi Komisioner Pengawas Terintegrasi
Deputy Commissioner of Integrity Supervision

Adie Soesetyantoro
Deputi Komisioner Manajemen Strategis II C
Deputy Commissioner of Strategic Management II C

Y. Santoso Wibowo
Advisor Senior Grup Dukungan Strategis Dewan Komisioner
Senior Advisor for Board of Commissioners Strategic Support Group

Dumoly F. Pardede
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision II

Boedi Armanto
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II
Deputy Commissioner of Banking Supervision II

kiri ke kanan
left to right

Duduk - Seated

Slamet Edy Purnomo
Deputi Komisioner Manajemen Strategis I B
Deputy Commissioner of Strategic Management I B

Irwan Lubis
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III
Deputy Commissioner of Banking Supervision III

Sri R.A. Faisal
Deputi Komisioner AIMRPK
Deputy Commissioner of AIMRPK

Etty Retno Wulandari
Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B
Deputy Commissioner of Strategic Management II B

Anggar B. Nuraini
Deputi Komisioner bidang EPK
Deputy Commissioner of EPK

M. Noor Rachman
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II

Heru Kristiyana
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
Deputy Commissioner of Banking Supervision IV

KEBIJAKAN STRATEGIS EKSTERNAL 2016

OJK STRATEGIC POLICIES IN 2016

8 Januari 2016

Penerbitan Aturan Relaksasi Perizinan LKM

OJK menerbitkan regulasi berisi relaksasi persyaratan perizinan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Relaksasi tersebut mempermudah perizinan dan upaya pengembangan LKM sehingga dapat meningkatkan peran LKM dalam program inklusi keuangan. Regulasi tersebut antara lain mengatur: (i) Penyederhanaan persyaratan perizinan LKM antara lain persyaratan proyeksi laporan keuangan, proyeksi neraca dan laba rugi dua tahun pertama dikecualikan bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa dan (ii) Perizinan usaha dibagi dalam dua kelompok yaitu permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai dan secara nontunai.

8th January 2016

OJK Relaxed Licensing Regulations For Microfinance Institutions

OJK relaxed licensing regulations for microfinance institutions. Deregulation has streamlined the licensing procedure and underpinned efforts to develop microfinance, thus expanding the role of microfinance institutions in the financial inclusion program. The regulations consist of: (i) simplifying the licensing requirements for microfinance institutions, including the requirements for financial projections in the financial statements, balance sheet projections as well as profit and loss projections for the first two years for microfinance institutions operating in rural areas; and (ii) separating operating licenses into two categories, namely for paid-up capital in cash and noncash.

14 Januari 2016

Aktivasi Gerai Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

OJK melakukan aktivasi gerai Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) yang berlokasi di Kantor OJK Solo. Keberadaan gerai PELAKU berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat di daerah untuk memperoleh maupun menyampaikan informasi atau pertanyaan mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa keuangan; serta sebagai sarana pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses ke sektor jasa keuangan.

14th January 2016

Ojk Activated The Centre For Education, Consumer Services and Msme Financial Access (PELAKU)

OJK activated the Centre for Education, Consumer Services and MSME Financial Access (PELAKU) at the regional office in Solo. The Centre will function as a means for local communities to obtain information and submit queries concerning financial services institutions as well as the products and services, while also empowering micro, small and medium enterprises (MSME) by facilitating access to the financial services sector.

30 Januari 2016

Pengembangan Pasar REPO di Indonesia dengan Meluncurkan GMRA (*Global Master Repurchase Agreement*)

OJK meluncurkan *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (GMRA Indonesia) dengan disertai acara penandatanganan perjanjian Transaksi Repo menggunakan GMRA Indonesia oleh empat bank nasional. Penyusunan GMRA Indonesia dilatarbelakangi kebutuhan atas standardisasi perjanjian transaksi Repo bagi seluruh sektor jasa keuangan mengingat transaksi Repo di Indonesia selama ini dilakukan dengan mekanisme maupun perjanjian yang berbeda-beda baik antar sektor maupun pelaku serta terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya.

30th January 2016

OJK Advanced The Repo Market In Indonesia Through The Global Master Repurchase Agreement (GMRA)

OJK launched the Indonesian Global Master Repurchase Agreement (GMRA Indonesia), accompanied by a signing ceremony for the GMRA Indonesia by four national banks. The Global Master Repurchase Agreement (GMRA) was formulated after the need arose for a standardised repo transaction agreement for all financial services sectors, considering that repo transactions in Indonesia had previously been settled using different agreements and mechanisms between sectors and players, leading to various implementation issues.

26 Februari 2016

Peluncuran Buku Standar Produk Perbankan Syariah dalam Kampanye Keuangan "Aku Cinta Keuangan Syariah"

Dalam rangka Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS), OJK bersama industri keuangan syariah meluncurkan Buku Standar Produk Perbankan Syariah (Produk *Murabahah* dan Produk Musyarakah termasuk Musyarakah *Mutanaqisah*) serta mendirikan laboratorium Bank Syariah Mini di Kampus bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Asbindo dan UIN.

26th February 2016

OJK launched a Book of Standards for Sharia Banking Products as part of the "I Love Sharia Finance" Campaign

As part of the "I Love Sharia Finance" Campaign, OJK, in conjunction with the sharia finance industry, launched a Book of Standards for Sharia Banking Products (Murabahah and Musyarakah, including Musyarakah Mutanaqisah) and established a Mini Sharia Bank Laboratory on campus under the auspices of the Indonesian Economists Association, Asbindo and UIN.

8 Maret 2016

Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Perijinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) dan Sistem Informasi Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (SIPP)

OJK meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Perijinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) dan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Pembiayaan (SIPP). Peluncuran aplikasi SIJINGGA dan SIPP merupakan bagian dari rangkaian pengembangan sistem informasi terintegrasi yang dilaksanakan OJK. Melalui SIJINGGA, OJK mengharapkan agar pelayanan perizinan secara elektronik dapat dilakukan lebih mudah, cepat dan terukur. Melalui SIPP, OJK juga memberikan informasi data statistik Perusahaan Pembiayaan yang akurat, lengkap, dan dapat diandalkan, sehingga dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan industri Perusahaan Pembiayaan.

8th March 2016

OJK launched the Financial Services Institution Licensing Information System Application (SIJINGGA) and the Finance Company Monthly Report Information System (SIPP)

OJK launched the Financial Services Institution Licensing Information System Application (SIJINGGA) and the Finance Company Reporting Information System (SIPP) as part of the activities to develop integrated information systems at OJK. Through SIJINGGA, OJK expects to streamline electronic licensing services. Through SIPP, OJK provides accurate and complete statistical data and information on finance companies to the benefit of all industry stakeholders.

15 Maret 2016

Peluncuran Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi

OJK meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi atau "OJK Proksi" sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia. OJK Proksi merupakan bukti komitmen OJK untuk mendukung perkembangan industri keuangan mikro yang memiliki peranan vital terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional. OJK Proksi akan mengembangkan pengetahuan dan menyediakan terobosan-terobosan model bisnis di bidang keuangan mikro dan inklusi keuangan yang tidak hanya konsep tetapi juga implementatif yang dapat digunakan baik oleh para pelaku industri, ahli keuangan, akademisi dan komunitas global.

15th March 2016

OJK launched the Centre for Microfinance Development and Inclusion

OJK launched the Centre for Microfinance Development and Inclusion, or OJK Proxy, as a centre of microfinance development and inclusion in Indonesia. OJK Proxy is a tangible form of avowed OJK commitment to support microfinance industry development, which plays a vital role in the advancement of the local and national economies. OJK Proxy shall develop knowledge and seek breakthroughs in terms of business models for microfinance and financial inclusion, not only conceptually but also for implementation by industry players, financial experts, academics and the global community.

23 Maret 2016

OJK Resmikan Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD)

OJK bersama kementerian dalam negeri serta institusi terkait membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Tujuan dibentuknya TPAKD antara lain: (i) Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, (ii) Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah dan (iii) Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah. Pengukuhan TPAKD tersebut akan dikukuhkan di masing-masing daerah.

23rd March 2016

OJK inaugurated the Regional Financial Access Acceleration Teams

In conjunction with the Ministry of Home Affairs and other relevant institutions, OJK formed the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD). TPAKD represent a coordination forum between the relevant institutions and stakeholders to accelerate regional financial access and, therefore, drive local economic growth and the betterment of local communities. The goals of establishing TPAKD include: (i) expanding broad public financial access to catalyse economic growth; (ii) seeking innovation and breakthroughs to extend more productive financial access to local communities; and (iii) urging financial services institutions to expand their contribution to regional economic development. TPAKD shall be established in each respective region.

29 April 2016

Penerbitan Aturan Revaluasi Aset BUMN/BUMD di Pasar Modal

Dalam rangka mendukung salah satu paket kebijakan ekonomi Pemerintah Jilid V, yaitu pemberian insentif keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang mengajukan revaluasi aset tetap pada 2015 dan 2016, OJK menerbitkan aturan yang memfasilitasi BUMN dan BUMD yang telah menjadi Emiten untuk mengajukan revaluasi aset tetap tersebut. Peraturan ini mengatur antara lain: (i) Pendaftaran Penilai Pemerintah untuk memberikan jasa penilaian di bidang Pasar Modal khususnya pada Emiten BUMN dan BUMD , (ii) Mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Penilai Pemerintah Pasar Modal adalah penilai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dan (iii) Ruang lingkup kegiatan Penilai Pemerintah di Pasar Modal, yaitu penilaian properti untuk tujuan revaluasi aset tetap Emiten BUMN dan BUMD.

29th April 2016

OJK issued Asset Revaluation Regulations for State-Owned Enterprises Operating on the Capital Market

Supporting one of the policies contained within the Government's economic policy packages, namely to provide tax breaks for taxpayers who submitted fixed asset revaluations in 2015 and 2016, OJK promulgated regulations to facilitate state-owned enterprises becoming issuers in order to submit the fixed asset revaluations. The regulation controls: (i) the registration of Government Appraisers to provide valuation services for the capital market industry, specifically state-owned issuers; (ii) who can register as Government Capital Market Appraisers, namely appraisers from the Directorate General of State Asset Management, under the auspices of the Ministry of Finance; and (iii) the scope of activities for government appraisers on the capital market, namely to appraise property for the revaluation of fixed assets at state-owned issuers.

4 Mei 2016

Penerbitan Aturan Perizinan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.1. Tujuan penerbitan POJK ini adalah untuk meningkatkan kualitas Penjamin Emisi Efek (PEE) dan/atau Perantara Pedagang Efek (PPE) antara lain melalui peningkatan tata kelola yang baik, peningkatan kualitas kepemilikan, pengendalian, dan kepengurusan.

4th May 2016

OJK issued Licensing Regulations for Underwriters and Broker-Dealers

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 20/POJK.04/2016, concerning the Licensing of Underwriters and Broker-Dealers, as an amendment to Regulation No. V.A.1 from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK). The regulation was designed to enhance the quality of underwriters and/or broker-dealers by improving good governance as well as the quality of leadership, control and management.

17 Mei 2016

Peluncuran Program Galeri Investasi *Mobile*

OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan program *pilot project* Galeri Investasi *Mobile* yang melibatkan beberapa perusahaan sekuritas dan Universitas. Galeri Investasi *Mobile* merupakan sebuah sarana yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengenal lebih jauh mengenai pasar modal sehingga meningkatkan pemahaman baik secara teori maupun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan simulasi transaksi secara langsung dan *real time*. Guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di pasar modal, OJK berinisiatif mendorong perusahaan sekuritas dan PT BEI untuk merevitalisasi fungsi Galeri Investasi yang telah ada untuk lebih proaktif dan dapat menjangkau masyarakat disekitar kampus, melalui program yang disebut Galeri Investasi *Mobile*.

17th May 2016

OJK launched the Mobile Investment Gallery

In conjunction with the Indonesia Stock Exchange, OJK launched a pilot project in the form of a Mobile Investment Gallery, involving various securities firms and universities. The Mobile Investment Gallery helps the public enhance their theoretical understanding of the capital market, while providing opportunities to take part in direct and real-time transaction simulations. To improve financial literacy and inclusion on the capital market, OJK urges the Indonesia Stock Exchange and securities companies to revitalise the function of the existing Investment Gallery to become more proactive and available to local communities surrounding the respective campus through the Mobile Investment Gallery.

31 Mei 2016

Peluncuran Sistem Eletronik Perizinan dan Registrasi di Pasar Modal

OJK meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi bagi perizinan, pendaftaran, perpanjangan izin dan pelaporan di Pasar Modal. Sistem ini dimaksud agar pelayanan perizinan, pendaftaran, perpanjangan izin dan pelaporan di Pasar Modal secara elektronik dapat dilakukan lebih mudah, cepat, efisien, dan terukur. Sistem Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi di Pasar Modal juga akan lebih meningkatkan keterbukaan informasi bagi pelaku industri terkait proses perizinan yang sedang diajukan.

31th May 2016

OJK launched the Electronic Licensing and Registration System for the Capital Market

OJK launched the Electronic Licensing and Registration System Application for licensing, registrations, license renewals and reporting on the Capital Market. The system is expected to facilitate a simpler, faster, more efficient and measured electronic licensing and registration system, which will also improve information disclosure for industry players in terms of the licensing process.

20 Juni 2016

OJK Terbitkan Surat Edaran tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi WMI

OJK menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Wakil Manajer Investasi. SEOJK ini merupakan amanat dari Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi. Adapun pokok pengaturan antara lain mengatur mengenai: (i) persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Asosiasi Wakil Manajer Investasi; (ii) tata cara permohonan pengakuan Asosiasi Wakil Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk jangka waktu penyampaian dokumennya; (iii) tugas, wewenang dan larangan Asosiasi yang telah mendapatkan pengakuan OJK; serta (iv) sumber pendanaan yang dapat diterima oleh Asosiasi Wakil Manajer Investasi termasuk kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya.

20th June 2016

OJK issued a Circular Letter on Recognition of the WMI Association

OJK issued Circular Letter (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2016 concerning Recognition of the Indonesian Association of Investment Manager Representatives as the realisation of the mandate pursuant to Article 19, paragraph (3) of OJK Regulation (POJK) No. 25/POJK.04/2014 concerning the Licensing of Investment Manager Representatives. The provisions of the regulation stipulate: (i) the requirements that must be met by the Indonesian Association of Investment Manager Representatives; (ii) the procedure to request recognition of the Indonesian Association of Investment Manager Representatives from the Financial Services Authority (OJK), including the delivery schedule for the required documentation; (iii) the duties, authority and restrictions of the Association recognised by OJK; and (iv) the sources of funding available to the Indonesian Association of Investment Manager Representatives, including the financial reporting obligations.

12 Juli 2016

Penerbitan Peraturan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan penambahan ketentuan dari peraturan sebelumnya. Ketentuan ini diterbitkan untuk mendukung kebijakan ekonomi Pemerintah khususnya paket kebijakan jiild 5 dan 11 mengenai Dana Investasi Real Estate, serta sejalan dengan perkembangan investasi dalam instrumen reksadana di Tanah Air yang terus menunjukkan pertumbuhan dari produk reksa dana dan nilai aktiva bersih (NAB).

12th July 2016

OJK issued a Regulation concerning Investment Funds - Collective Investment Contracts

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 23/POJK.04/2016 concerning Investment Funds in the form of Collective Investment Contracts as a supplementary provision to the existing regulations. The regulation was released to support the Government's fifth and eleventh economic policy packages on Real Estate Investment Funds, and is consistent with the recent performance of domestic investment fund instruments, which have shown growth in terms of products and net asset value (NAV).

29 Juli 2016

Penerbitan Peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

OJK menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyediaan dan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu di Indonesia yang mendukung terintegrasinya data Transaksi Produk Investasi dan data Transaksi Aset Dasar industri pengelolaan investasi serta terciptanya sentralisasi data investor di industri pengelolaan investasi yang terpadu. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (i) Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi. (ii) Kegiatan sebagai Penyedia S-INVEST hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan (iii) Kewajiban Penyedia S-INVEST antara lain untuk menetapkan peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST, menetapkan batasan akses bagi setiap Pengguna dan memastikan keamanan dan keandalan S-INVEST.

29th July 2016

OJK issued a Regulation concerning the Integrated Investment Management System

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 28/POJK.04/2016 concerning the Integrated Investment Management System, designed to provide a legal foundation for providers and users of the integrated investment management system in Indonesia, which supports the integration of Investment Product Transaction data and Asset Transaction data in the investment management industry and the creation of centralised investment data in the integrated investment management industry. The provisions of the regulation include: (i) the Integrated Investment Management System (S-INVEST) is an integrated electronic system that combines all investment product transactions, asset transactions and reporting commitments in the investment management industry; (ii) S-INVEST providers are Depository and Settlement Institutions; and (iii) the obligations of S-INVEST providers in terms of formulating regulations on S-INVEST procedures, determining access limitations for each respective User and ensuring the security and reliability of S-INVEST.

29 Juli 2016

OJK luncurkan SPRINT *Bancassurance*

OJK meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi (SPRINT) *Bancassurance*. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan terintegrasi antara sektor perbankan dan sektor industri keuangan nonbank. Penyelesaian izin *bancassurance* dapat selesai dalam waktu 19 hari kerja dari sebelumnya selama 101 hari kerja.

29th July 2016

OJK launched Bancassurance SPRINT

OJK launched the Electronic Licensing and Registration System Application (SPRINT) for Bancassurance. The application is expected to accelerate the integrated licensing process between the banking sector and nonbank financial industry. Since implementation, the processing time for Bancassurance licensing has been reduced from 101 working days to just 19.

5 Agustus 2016

Penerbitan Peraturan Produk Investasi Pasar Modal

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. POJK tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK mendukung kebijakan nasional tentang Pengampunan Pajak. Penerbitan POJK ini diharapkan pula dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh serta mampu menjawab beberapa *concern* masyarakat tentang produk investasi di Bidang Pasar Modal sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

5th August 2016

OJK issued a Regulation on Capital Market Investment Products

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 26/POJK.04/2016 concerning Investment Products on the Capital Market to Support the Tax Amnesty. The POJK represents a solid form of OJK commitment to support the national Tax Amnesty. The regulation is expected to also provide a more concrete legal foundation, while dispelling several public concerns about investment products on the capital market as part of the Tax Amnesty implementation.

18 Agustus 2016

Peluncuran Portal Perusahaan Investasi Tidak Terdaftar

OJK meluncurkan *Investor Alert Portal* (IAP) atau portal *website* berisi perusahaan investasi keuangan yang tidak terdaftar di OJK sebagai respons atas pertanyaan dari masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi. Peluncuran IAP ini merupakan upaya preventif OJK untuk meningkatkan kehati-hatian masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya sekaligus mempersempit ruang gerak penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

18th August 2016

OJK launched the Investor Alert Portal

OJK launched the Investor Alert Portal (IAP) or website portal, containing a list of financial investment companies not registered at OJK in response to public feedback concerning the legality of entities offering investment products. IAP is a preventative OJK measure to instil public caution and prudence against being misled by investment products of dubious legal standing, while simultaneously reducing the opportunities for such products to circulate and incur public losses.

23 Agustus 2016

Peluncuran Buku Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi

OJK meluncurkan buku Seri Literasi Keuangan tingkat Perguruan Tinggi sebagai bentuk implementasi dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), yang salah satu pilarnya mengamanatkan penyelenggaraan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Buku Seri Literasi Keuangan tingkat Perguruan Tinggi disusun oleh OJK, Kelompok Kerja industri jasa keuangan, praktisi terpercaya di masing-masing industri, serta Akademisi. Buku ini terdiri dari delapan buku dan satu suplemen seri perencanaan keuangan. Peluncuran seri buku ini merupakan kelanjutan dari buku literasi keuangan yang sebelumnya diluncurkan oleh OJK untuk jenjang pendidikan SD dan jenjang SMP serta SMA. Penerbitan seri buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman mahasiswa dan masyarakat atas berbagai sektor jasa keuangan yang pada akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

23rd August 2016

OJK launched a series of Financial Literacy Books for Tertiary Education

OJK launched a series of financial literacy books for tertiary education as part of the Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI), one pillar of which mandates a national financial literacy and education campaign. The financial literacy books for tertiary education were compiled by OJK, financial services industry working groups, trusted practitioners in each respective industry and academia, containing eight books and one supplementary series in the form of financial planning. The new book series expands the existing financial literacy books published by OJK for primary and secondary education. Furthermore, the book series is expected to enhance the understanding of students and the public concerning the various financial services sectors and, ultimately, ameliorate the quality of life of the Indonesian people.

30 September 2016

Penerbitan Peraturan terkait Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Penerbitan peraturan tersebut didasarkan atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Peraturan ini mengatur tentang cara penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah (i) Pendirian dana pensiun syariah, (ii) Konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah, (iii) Pembentukan unit syariah di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau (iv) Penjualan paket investasi syariah di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

30th September 2016

OJK issued a Regulation on the Sharia-Compliant Pension Program

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 33/POJK.05/2016 concerning the Sharia-Compliant Pension Program. The regulation aims to increase public demand for the sharia-compliant pension program and controls the following aspects: (i) creating a sharia-compliant pension program; (ii) converting conventional pension funds into sharia pension funds; (iii) forming a sharia unit at Employer Pension Funds (DPPK); and (iv) selling sharia investment packages at Financial Institution Pension Funds (DPLK).

4 Oktober 2016

Penerbitan Regulasi Mengenai Usaha Pergadaian

OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Penetapan POJK tersebut bertujuan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan akses terhadap pinjaman, memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, kehadiran usaha pegadaian yang sehat, dan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pergadaian.

4th October 2016

OJK issued a Regulation on Pawnbrokerage

OJK promulgated OJK Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 concerning Pawnbrokerage. The POJK aims to increase financial inclusion amongst the middle and working classes as well as micro, small and medium enterprises (MSME) by facilitating access to loans, providing a legal foundation for OJK supervision, providing a legal foundation for pawnbrokers, ensuring a healthy pawnbroker industry and protecting consumers of pawnbroker services.

14 November 2016

Peluncuran Buku "Pahami dan Hindari"

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindak pidana perbankan, OJK menggelar acara sosialisasi "Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti *Fraud*" serta peluncuran Buku "Pahami dan Hindari" (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan) di Jakarta. Kegiatan dan Peluncuran buku dilakukan untuk memperbanyak sosialisasi dan edukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan dan menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan, khususnya Perbankan.

14th November 2016

OJK launched a book entitled "Understand and Avoid"

As part of the efforts to prevent and resolve bank crime, the Financial Services Authority (OJK) hosted a socialisation event entitled "Handling Allegations of Bank Crime" and the Anti-Fraud Forum, while also launching a book entitled "Understand and Avoid" (Understanding and Preventing Bank Crime) in Jakarta. The range of activities and book launch were conducted to augment existing socialisation and education activities, while creating public awareness about bank crime and raising awareness concerning financial products and services, especially banking products and services.

19 Desember 2016

Peluncuran Perizinan dan Registrasi Penjualan Reksa Dana Melalui Bank dan Pendaftaran Akuntan Publik

OJK meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai upaya mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan. Sistem ini mampu mengintegrasikan seluruh proses perizinan serta registrasi dari berbagai kompartemen di OJK yaitu pengawas pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Melalui SPRINT, proses perizinan penjualan reksa dana melalui bank selaku APERD dipersingkat dari 105 hari menjadi 19 hari kerja saja. Sementara itu, proses pendaftaran Akuntan Publik yang sebelumnya diajukan ke masing-masing kompartemen di OJK dengan waktu pemrosesan yang berbeda-beda, dengan menggunakan SPRINT bisa diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja.

19th December 2016

OJK launched Licensing and Registration of Investment Fund Selling through Banks and Public Accountant Registrations

OJK launched the Electronic Licensing and Registration System Application (SPRINT) for sales of investment funds through banks as Investment Fund Selling Agents (APERD) and Public Accountant Registrations to expedite and streamline the licensing process. The system can integrate all licensing and registration processes for various OJK compartments, namely capital market supervision, banking supervision and nonbank financial industry supervision. Through SPRINT, the licensing process for the sale of investment funds through banks as Investment Fund Selling Agents (APERD) has been reduced from 105 working days to just 19. Meanwhile, the registration process for public accountants, which was previously separated by OJK compartment with varying lead times, can now be processed centrally through SPRINT within 20 working days.

30 Desember 2016

Peluncuran Sistem Informasi Ketentuan Perbankan *On-line* (SIKePO)

OJK meluncurkan aplikasi kodifikasi dan pencarian ketentuan perbankan yang dapat diakses secara *on-line* oleh masyarakat/ pemangku kepentingan (baik internal maupun eksternal OJK) yang diberi nama Sistem Informasi Ketentuan Perbankan *On-line* (SIKePO). Pengembangan SIKePO merupakan upaya OJK memberikan layanan kepada pemangku kepentingan, baik industri maupun masyarakat dalam menyediakan informasi ketentuan perbankan. Manfaat SIKePO antara lain memudahkan pengguna untuk mencari pengaturan atas suatu topik secara komprehensif, membantu pengguna untuk mengetahui rekam jejak atas suatu ketentuan dan menyediakan wadah bagi pengguna untuk mencari ketentuan perbankan secara mudah.

30th December 2016

OJK launched the Online Banking Regulation Information System (SiKePO)

OJK launched the banking regulation codification and search application that is accessible online to the public as well as internal and external stakeholders, known as the Online Banking Regulation Information System (SiKePO). OJK developed SiKePO to provide information to industry stakeholders and the public on banking regulations. SiKePO will facilitate comprehensive user searches, help users discover the history of a regulation and provide a user-friendly search interface.

31 Desember 2016

Penerbitan POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Untuk mendukung perkembangan *Fintech* di Indonesia, OJK menerbitkan POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi ini diharapkan mendukung pertumbuhan industri *Fintech* P2P lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak atau belum dapat dilayani secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.

31th December 2016

OJK issued POJK on IT-Based Lending Services

Supporting Fintech development in Indonesia, OJK regulated IT-based Lending Services (LPMUBTI) through POJK No. 77/ POJK.01/2016. The regulation is expected to support P2P lending growth in the Fintech industry as a new alternative source of funds for most underbanked and unbanked people in Indonesia through the conventional financial services industry, such as the banking sector, capital market, finance companies and venture capital.

KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM RANGKA MEMPERKUAT KAPASITAS ORGANISASI

STRATEGIC POLICIES TO STRENGTHEN ORGANIZATION CAPACITY

1 Januari 2016

Pembentukan Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

OJK membentuk Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang terintegrasi menangani TPPU dan TPPT terhadap 3 sektor jasa keuangan. Penanganan TPPU dan TPPT difokuskan pada tiga tugas dan fungsi utama yaitu: (1) pengendalian kualitas dan monitoring pengawasan di sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank); (2) pengaturan, pengembangan, dan penelitian terkait pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; dan (3) koordinasi dan kerjasama antar lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, terkait pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.sektor jasa keuangan.

1st January 2016

OJK Formed the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Group

OJK Formed the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Group, which is integrated and has jurisdiction over three financial services sectors. Anti-money laundering and combating the financing of terrorism focused on three main duties and functions: (i) quality control and monitoring oversight in the financial services sector (banking, capital market and nonbank financial industry); (ii) regulation, development and research relating to implementation of the anti-money laundering and combating the financing of terrorism program in the financial services sector; and (iii) inter-institutional coordination and cooperation, domestic and international, concerning program implementation.

31 Januari 2016

Penandatanganan Kesepakatan Kinerja 2016

Dalam rangka mendukung pencapaian Peta Strategi 2016 dan *Destination Statement* OJK 2017, OJK menetapkan Peta Strategi dan IKU OJK *wide* yang diturunkan ke level Satuan Kerja. Untuk meningkatkan komitmen pelaksanaan Kontrak Kinerja IKU dan IS dilakukan penandatanganan Kontrak Kinerja IKU antara Anggota Dewan Komisioner dengan Deputi Komisioner dan Deputi Komisioner dengan Kepala Departemen.

31st January 2016

OJK Signed the Performance Agreement for 2016

Supporting achievement of the Strategy Map for 2016 and Destination Statement for 2017, OJK prepared a Strategy Map and OJK-wide Key Performance Indicators (KPI), which are cascaded down to the work unit level. Seeking to enhance commitment to the KPI and IS, a Work Contract was signed between members of the Board of Commissioners and the Deputy Commissioners as well as between the Deputy Commissioners and Department Heads.

18 Maret 2016

Peluncuran Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan (SIMFOSIA)

SIMFOSIA adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK berdasarkan sistem MSDM yang memenuhi kebutuhan perencanaan, pemenuhan, pemetaan, pengembangan, dan pemeliharaan Sumber Daya Manusia. Tujuan dibangunnya SIMFOSIA adalah untuk menciptakan proses pengelolaan dan manajemen SDM yang lebih mudah, transparan, dan efisien. SIMFOSIA merupakan sistem yang berbasis data dan informasi yang akurat, terkini dan terpercaya serta dikelola secara terintegrasi.

18th March 2016

OJK Launched the Human Resources Information System (SIMFOSIA)

SIMFOSIA is an information system used to manage OJK organisational and human resources data based on the MSDM system, which meets the needs for planning, compliance, mapping, development and the culture of human resources at OJK. SIMFOSIA was developed to create a simpler as well as more transparent and efficient HR management process. SIMFOSIA is an accurate, up-to-date, trusted and integrated data and information based system.

Maret 2016

Peluncuran OJK TV

Untuk mendukung dokumentasi dan peliputan kegiatan OJK yang bersifat strategis dan nasional, telah diluncurkan OJK TV sebagai salah satu kanal media komunikasi yang digunakan OJK dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Video OJK TV dapat disaksikan di Kanal Youtube OJK (Jasa Keuangan) dan halaman depan *website* OJK. Diharapkan dengan hadirnya OJK TV dapat menjadi sarana penyampaian informasi mengenai program, kebijakan, dan kegiatan OJK bagi masyarakat.

March 2016

OJK Launched OJK TV

Documenting and reporting strategic and national OJK activities, OJK TV was launched as a media communication channel to deliver information to the public. OJK TV is available through OJK's YouTube channel (Financial Services) and the home page of the official OJK website. OJK TV provides a means to deliver public information on OJK programs, policies and activities.

11 Mei 2016

Pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi

Pembentukan tersebut diharapkan membantu pelaksanaan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan secara fokus, komprehensif, efektif dan efisien; Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pengawasan individual dan pengawasan terintegrasi; Mengefektifkan kinerja Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan dalam menjalankan tugas; dan wewenangnya; serta Mencegah terjadinya *blind spot* dan *redundancy* pada kegiatan pengawasan terintegrasi.

11th May 2016

OJK Formed the Integrated Supervision Work Unit

OJK formed the Integrated Supervision Work Unit to help implement focused, comprehensive, effective and efficient integrated supervision of financial conglomerates. Furthermore, there is a clear separation of duties and authority between individual supervision and integrated supervision. Consequently, the Risk-Based Integrated Supervision Committee is more effective, while blind spots and redundancies are prevented.

September 2016

Pengembangan Sistem Kelogistikan SISPAM (Sistem Pengamanan) dan Penyempurnaan Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS)

Untuk mendukung pelaksanaan kelogistikan di OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, telah dikembangkan SISPAM (Sistem Pengamanan) dan penyempurnaan SISPUAS. Pengembangan SISPAM bertujuan untuk mengatur pedoman, petunjuk teknis dan standar pengamanan yang akan diterapkan di lingkungan OJK Kantor Pusat maupun Kantor OJK di daerah. Sementara itu, penyempurnaan Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS) bertujuan untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK dari sisi aset tetap dan persediaan.

September 2016

OJK Developed the SISPAM (Security System) Logistics System and upgraded the Asset Administration Information System (SISPUAS)

SISPAM was developed and SISPUAS was upgraded to support logistics at OJK and, therefore, support the execution of duties and function. SISPAM regulates the guidelines, technical instructions and security standards to be applied at OJK head office as well as regional and branch offices. Meanwhile, SISPUAS supports preparations of the OJK Financial Statements in terms of fixed assets and inventory.

6 Oktober 2016

Penguatan Pedoman Manajemen Kinerja OJK

Untuk menyempurnakan pelaksanaan Manajemen Kinerja organisasi, OJK menerbitkan Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEDK.01/2016 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEDK.01/2015 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran tersebut mengatur (1) keterlibatan penilaian kinerja Satuan Kerja (Satker) oleh Anggota Dewan Komisioner yang membawahi Satker, (2) Nilai kinerja akhir Satker mempertimbangkan nilai pencapaian Inisiatif Strategis dan prestasi lainnya, (3) Pembobotan pada masing-masing perspektif, (4) Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.

6th October 2016

OJK Strengthened Performance Management Guidelines

OJK issued BOC Circular Letter (SEDK) No. 4/SEDK.01/2016 as an amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 1/SEDK.01/2015 concerning OJK Performance Management Guidelines in order to refine Performance Management at OJK. The Circular regulates: (i) BOC involvement in performance appraisals of the respective work units overseen; (ii) the final performance rating, paying due consideration to the Strategic Initiatives and other achievements; (iii) the respective weights of each perspective; and (iv) calculating the Organisation's Performance Rating.

25 Oktober 2016

Pengembangan Sistem Aplikasi *Online* Survei Persepsi Kinerja Satuan Kerja OJK (SPKSO)

Pembangunan Aplikasi Survei Persepsi Kinerja Satker OJK bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan survei dengan target responden adalah *stakeholder* internal OJK baik Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK. Hasil dari survei menjadi bahan masukan bagi OJK dalam melakukan perbaikan kinerja. Pelaksanaan survei dilakukan rutin untuk mendapatkan masukkan secara berkala bagi perbaikan OJK.

25th October 2016

OJK Developed the Online Work Unit Performance Perception Survey Application (SPKSO)

OJK developed the online work unit performance perception survey application to simplify survey implementation. The target respondents are internal stakeholders at head office, regional and branch offices. The outcome of the survey is used as an input for OJK to improve performance. The routine survey is conducted to obtain periodic inputs to improve OJK performance.

16 Desember 2016

Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Gratifikasi OJK (SiPeGa)

Untuk mendukung implementasi tata kelola yang baik,telah dibangun Sistem Informasi Pengendalian Gratifikasi OJK (SiPeGa) SiPeGa adalah aplikasi internal yang bertujuan sebagai sarana bagi pegawai OJK untuk melaporkan gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya SiPeGa, sarana pelaporan Gratifikasi menjadi elektronik dan dapat dipantau melalui sistem.

16th December 2016

OJK Developed the OJK Gratification Control Information System (SiPeGa)

OJK Developed the OJK Gratification Control Information System (SiPeGa) to support the implementation of good governance. SiPeGa is an internal application that provides a means for OJK employees to report allegations of gratification. The reporting system is now electronic and can be monitored through the system.

31 Desember 2016

Penandatanganan Kesepakatan Kinerja 2017

Dalam rangka mendukung pencapaian Peta Strategi 2017 dan *Destination Statement* OJK 2017, OJK menetapkan Peta Strategi dan IKU OJK *wide* yang diturunkan ke level Satuan Kerja. Untuk meningkatkan komitmen pelaksanaan Kontrak Kinerja IKU dan IS dilakukan penandatanganan Kontrak Kinerja IKU antara Anggota Dewan Komisioner dengan Deputi Komisioner dan Deputi Komisioner dengan Kepala Departemen.

31st December 2016

OJK Signed the Performance Agreement for 2017

Supporting achievement of the Strategy Map for 2017 and Destination Statement for 2017, OJK prepared a Strategy Map and OJK-wide Key Performance Indicators (KPI), which are cascaded down to the work unit level. Seeking to enhance commitment to the KPI and IS, a Work Contract was signed between members of the Board of Commissioners and the Deputy Commissioners as well as between the Deputy Commissioners and Department Heads.

PERISTIWA PENTING 2016

2016 EVENT HIGHLIGHTS

04 Januari | January

Pembukaan Bursa Efek 2016
Presiden Joko Widodo (Jokowi), meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Gedung Bursa Efek Indonesia. Pembukaan perdagangan ditandai dengan penekanan tombol, sebagai tanda dimulainya aktivitas di lantai bursa. Peresmian pembukaan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.

Opening Trading on The Stock Exchange For 2016
President Joko Widodo (Jokowi) officially opened trading on the Indonesia Stock Exchange at the IDX Building in Jakarta. Trading began with the striking of a gavel to commence activities on the trading floor. The opening ceremony was attended by the Chairman of OJK, Muliaman D. Hadad, the Coordinating Minister for Economic Affairs, Darmin Nasution, the Minister of Finance, Bambang Brodjonegoro, the Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, and the President Director of the Indonesia Stock Exchange, Tito Sulistio.

15 Januari | January

***Financial Executive Gathering* 2016**
OJK menyelenggarakan *Financial Executive Gathering* (FEG) 2016 sebagai forum komunikasi antara OJK dengan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan. Pada tahun 2016, OJK akan mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi nasional terutama pada sektor prioritas pemerintah. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Anggota Dewan Komisioner OJK, dan seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan baik dari sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB.

Financial Executive Gathering 2016
OJK hosted the Financial Executive Gathering (FEG) in 2016 as a communication forum between OJK and the leaders of financial services institutions. In 2016, OJK urged the financial services industry to increase its contribution to national economic growth, particularly through the Government's priority economic sectors. This event was attended by the Vice President of the Republic of Indonesia, Jusuf Kalla, members of the OJK Board of Commissioners and leaders of financial services institutions in the banking sector, capital market and nonbank financial industry.

29 Januari | January

OJK Meluncurkan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA)

OJK bersama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) Indonesia. GMRA merupakan standar perjanjian transaksi REPO yang diterima oleh seluruh pelaku pasar. Acara ini dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Pengawasan Pasar Modal Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner Ex-Officio BI Mirza Adityaswara, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Robert Pakpahan.

OJK Launched the Global Master Repurchase Agreement

In conjunction with the Ministry of Finance, OJK launched the Indonesian Global Master Repurchase Agreement (GMRA) as a standardised agreement for repo transactions acceptable to all market players. The event was attended by the Chairman of the Financial Services Authority (OJK), Muliaman D. Hadad, together with Chief Executive functioning as Capital Market Supervisor, Nurhaida, Senior Deputy Governor, Mirza Adityaswara, as Ex-Officio member of OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia, and the Director General of Budget Financing and Risk Management, Robert Pakpahan.

03 Februari | February

OJK dan Kementerian ESDM Jalin Kerja Sama Pengembangan Energi

OJK bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama program Percepatan Pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi melalui Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad bersama Menteri ESDM Sudirman Said.

OJK and the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Cooperated for Energy Development

Together with the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of New Energy, Renewable Energy and Energy Conservation by Expanding the Role of Financial Services Institutions. The event was attended by the Chairman of the Financial Services Authority (OJK), Muliaman D. Hadad, along with the Minister of Energy and Mineral Resources, Sudirman Said.

03 Maret | March

OJK gelar Keuangan Syariah *Fair* 2016

OJK menyelenggarakan Keuangan Syariah *Fair* 2016 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari usaha untuk terus mengenalkan dan mendekatkan masyarakat dengan produk dan jasa layanan keuangan syariah. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas IKNB Firdaus Djaelani dan Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

OJK hosted the Sharia Finance Fair

OJK hosted the Sharia Finance Fair in 2016 in Jakarta to introduce the public to sharia financial products and services. This event was attended by OJK Commissioner for NBFI Supervision, Firdaus Djaelani, and the regional secretary of DKI Jakarta, Saefullah.

10 Maret | March

OJK Jalin Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

OJK dan KPK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka menjalin kerja sama untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor jasa keuangan. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

OJK Cooperated with the Corruption Eradication Commission

OJK and Corruption Eradication Commission (KPK) signed a Memorandum of Understanding (MoU) to prevent and eradicate corruption in the financial services sector. The MoU was signed by the Chairman of OJK, Muliaman D. Hadad, and Chairman of KPK, Agus Rahardjo.

31 Maret | March

OJK Tingkatkan Kerja Sama di Tingkat Regional Bersama Bank of Thailand

OJK meningkatkan kerja sama di tingkat regional melalui penandatanganan *Letter of Intent* dengan Bank of Thailand (BoT) mengenai kesepakatan atas penyusunan *Bilateral Agreement* sebagai implementasi ASEAN *Banking Integration Framework* (ABIF) antara Indonesia dan Thailand. Penandatanganan LoI dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Gubernur BoT Veerathai Santiprabhob.

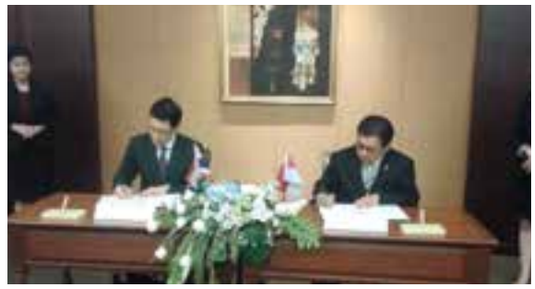

OJK improved Regional Cooperation with the Bank of Thailand

OJK improved regional cooperation through the signing of a Letter of Intent with the bank of Thailand concerning consensus to formulate a bilateral agreement as implementation of the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) between Indonesia and Thailand. The Letter of Intent was signed by the Chairman of the Financial Services Authority (OJK), Muliaman D. Hadad, and the Governor of the Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob.

08 April | April

OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia melakukan kerjasama terkait koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional

OJK, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memadai, pendalaman pasar keuangan, dan koordinasi yang baik antara lembaga terkait.

OJK, the Ministry of Finance and Bank Indonesia coordinated in terms of Financial Market Deepening and Development to Support National Development Financing

OJK, the Ministry of Finance and Bank Indonesia signed a Memorandum of Understanding (MoU) concerning coordinated financial market deepening and development to support national development financing. The MoU was required due to the growing need for development financing, financial market deepening and sound coordination between the relevant institutions.

19 April | April

OJK dan Kementerian Pariwisata Melakukan Kerja sama dalam Mengembangkan Destinasi dan Industri Pariwisata

OJK dan Kementerian Pariwisata melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan. Penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

OJK and the Ministry of Tourism Cooperated to Develop Tourist Destinations and the Tourism Industry

OJK and the Ministry of Tourism signed a Memorandum of Understanding (MoU) to develop tourist destinations and the tourism industry by expanding the role of financial services institutions. The MoU was signed by the Chairman of the Financial Services Authority (OJK), Muliaman D. Hadad, and Minister of Tourism, Arief Yahya.

21 April | April

OJK dan Japan Financial Service Authority (JFSA) Jalin Kerja Sama Bilateral

OJK menjalin kerjasama bilateral dengan JFSA. Kerjasama ini meliputi peningkatan pembiayaan infrastruktur jangka panjang di Indonesia, termasuk pembiayaan melalui keuangan syariah. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan pada sektor pariwisata, energi, industri kreatif, dan berbagai sektor lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad bersama Komisioner JFSA Nobuchika Mori.

OJK and JFSA agreed Bilateral Cooperation

OJK agreed bilateral cooperation with the Japan Financial Services Authority (JFSA). The agreement is expected to increase long-term infrastructure financing in Indonesia, including sharia financing. Infrastructure development shall be financed in the tourism sector, energy, creative industries and various other sectors. The event was attended by the Chairman of the Financial Services Authority (OJK), Muliaman D. Hadad, together with the Commissioner of the JFSA, Nobuchika Mori.

23 Mei | May

Pelatihan Jurnalis Sektor Jasa Keuangan

OJK menyelenggarakan pelatihan Jurnalis di Ambon yang bertujuan meningkatkan pemahaman jurnalis dalam rangka menulis berita terkait dengan data dan angka. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Komisaris OJK Rahmat Waluyanto yang juga sekaligus memberikan materi kepada peserta Pelatihan Jurnalis Sektor Jasa Keuangan.

Journalist Training in the Financial Services Sector

OJK organised journalist training in Ambon to build journalist understanding when authoring articles containing data and figures. The event was attended by the Deputy Chairman of the OJK Board of Commissioners, Rahmat Waluyanto, who also presented materials to the training participants.

02 Juni | June

OJK dan OECD Menyelenggarakan Seminar *High Level Regional*

OJK bersama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyelenggarakan seminar internasional terkait program literasi dan inklusi keuangan untuk UMKM. Seminar bertajuk *High-Level Regional Seminar on Empowering* MSMEs *Through Financial Literacy and Inclusion* dihadiri Pimpinan OECD, Reserve Bank of India, Bank of Thailand dan perwakilan regulator, serta akademisi dari South Afrika, UK, Australia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Brunei.

OJK and OECD hosted a High-Level Regional Seminar

In conjunction with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OJK hosted an international seminar on financial literacy and inclusion for micro, small and medium enterprises (MSME). The seminar, entitled "High-Level Regional Seminar on Empowering MSMEs through Financial Literacy and Inclusion", was attended by leaders from the OECD, Reserve Bank of India (RBI), Bank of Thailand, regulators, as well as academics from South Africa, UK, Australia, Sign, Malaysia, Hong Kong and Brunei.

21 Juli | July

OJK Melakukan Kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM

OJK melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Nota Kesepahaman antara OJK dan Kementerian Koperasi UKM ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga di sela-sela acara Perayaan Hari Koperasi Nasional ke-69 yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.

OJK coordinated with the Ministry of Cooperatives and SMEs

In conjunction with the Ministry of Cooperatives and SMEs, OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) to foster MSME development. The MoU was signed by the Chairman of OJK, Muliaman D. Hadad, and Minister of Cooperatives and SMEs, AAGN Puspayoga, during the 69th National Cooperatives Day celebrations attended by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo.

08 Agustus | August

OJK dan UNDP Dukung Pencapaian *Sustainable Development Goals*

OJK menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia. LoI tersebut merupakan langkah awal kesepakatan OJK dan UNDP atas penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia melalui peran lembaga jasa keuangan. Penandatanganan LoI antara OJK dan UNDP dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dan Country Director UNDP Indonesia, Christophe Bahuet.

OJK and UNDP Support Attainment of the Sustainable Development Goals

OJK signed a Letter of Intent (LoI) with the United Nations Development Program (UNDP) of Indonesia. The LoI represents the preliminary step of OJK and UNDP cooperation to prepare a Memorandum of Understanding (MoU) to attain the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia through financial services institutions. The Letter of Intent between OJK and UNDP was signed by the Chairman of OJK, Muliaman D. Hadad, and the Country Director of UNDP Indonesia, Christophe Bahuet.

19 Agustus | August

OJK dan BNN Melakukan Kerja sama Tingkatkan Literasi dan Edukasi Keuangan

OJK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sepakat bekerja sama dalam peningkatan literasi dan edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Kepala BNN Budi Waseso.

OJK and BNN cooperated to Improve Financial Literacy and Education

OJK and the National Narcotics Agency (BNN) agreed to cooperate to enhance financial literacy and inclusion as well as prevent the abuse of narcotics. The Memorandum of Understanding (MoU) was signed by the Chairman of OJK, Muliaman D. Hadad, and BNN Chief Budi Waseso.

29 Agustus | August

Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Daerah Kalimantan Selatan

OJK bersama dengan Pemerintahan Polda Kalsel, Pemprov Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Kanwil Agama Kalsel mengukuhkan anggota Tim Satgas Waspada Investasi. Pengukuhan ini dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan Nelson Tampubolon dan Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan.

OJK formed the Investment Watchdog in South Kalimantan Province

In conjunction with the police department, the provincial government, the prosecutor's office and religious department in South Kalimantan, OJK formed a local Investment Watchdog. The Investment Watchdog was established by the OJK Commissioner for Banking Supervision, Nelson Tampubolon, and the Deputy Governor of South Kalimantan, H. Rudy Resnawan.

31 Agustus | August

OJK dan BPS Melakukan Kerja Sama di Bidang Statistik dan Jasa Keuangan

OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati kerja sama demi terwujudnya kolaborasi yang harmonis dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak dibidang statistik dan jasa keuangan. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dengan Kepala BPS Suryamin.

OJK and BPS Cooperated in terms of Financial Statistics and Services

OJK and BPS-Statistics Indonesia agreed synergic collaboration to support task implementation in terms of financial statistics and services at both institutions. The cooperation was contained in a Memorandum of Understanding (MoU) signed by the Chairman of OJK, Muliaman D. Hadad, and the Head of BPS, Suryamin.

29 September | September

Pengukuhan Tim Satgas Waspada Investasi Kabupaten Malang

OJK bersama dengan Pemerintah Provinsi Malang melakukan penandatanganan komitmen dan pengukuhan anggota tim Satgas waspada investasi. Kegiatan OJK ini dihadiri anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti dan Bupati Malang Rendra Kresna.

OJK Formed the Investment Watchdog in Malang

In conjunction with the Provincial Government of Malang, OJK signed commitment to establish the Investment Watchdog in Malang. The event was attended by the OJK Board of Commissioners member for AIMPRK, Ilya Avianti, and Malang Regent Rendra Kresna.

13 Oktober | October

Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau

OJK bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau mengukuhkan TPAKD Provinsi Riau yang diharapkan meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Riau. Pengukuhan tim TPAKD ini dilakukan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto.

OJK formed a Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD) in Riau Province

In conjunction with the Provincial Government of Riau, OJK established the Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD) in Riau province, which is expected to augment the contribution of the financial services sector to equitable economic growth and prosperity in the region. The Regional Financial Access Acceleration Team was established by the Governor of Riau, Arsyadjuliandi Rachman and witnessed by the Deputy Chairman of the OJK Board of Commissioners, Rahmat Waluyanto.

16 Oktober | October

OJK Dorong Inklusi Keuangan Kawasan Timur

OJK mendorong perluasan program inklusi keuangan ke kawasan Timur. Hal ini diharapkan semakin membuka akses masyarakat ke sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng dan Rektor Universitas Nusa Nipa (Unipa) Angelinus Vincentius meresmikan Galeri Investasi BEI di Unipa Maumere.

OJK Promoted Financial Inclusion in Eastern Indonesia

OJK extended and expanded the financial inclusion program to Eastern Indonesia, which is expected to broaden public access to the financial services sector. The Chairman of OJK, Muliaman D. Hadad, Chairman of Commission XI of the People's Representative Council (DPR), Melchias Markus Mekeng and the Rector of Universitas Nusa Nipa (Unipa), Angelinus Vincentius, inaugurated the BEI Investment Gallery located at the Unipa campus, Maumere.

17 November | November

OJK - FINCONET International Seminar 2016
OJK bekerja sama dengan FINCONET menyelenggarakan seminar internasional terkait dengan *Fintech* dan aspek-aspek perlindungan konsumen. Kehadiran *Fintech* diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di tanah air sekaligus tetap memenuhi aspek perlindungan konsumen.

OJK – FINCONET International Seminar 2016
OJK collaborated with FINCONET to organise the international seminar on Fintech and aspects of consumer protection. Fintech is expected to enhance financial inclusion in Indonesia, while fulfilling aspects of consumer protection.

01 Desember | December

OJK bersama IFC – World Bank menggelar Forum Internasional Keuangan Berkelanjutan
OJK bekerja sama dengan the International Finance Corporation (IFC – World Bank) menggelar rangkaian Forum Internasional Keuangan Berkelanjutan. Kegiatan ini berguna mendukung kebijakan pemerintah terkait pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs).

OJK and IFC – World Bank Hosted an International Forum on Sustainable Finance
OJK, under the auspices of the International Finance Corporation – World Bank, organised an International Forum on Sustainable Finance to support government policy to accelerate attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs).

30 Desember | December

Penutupan Bursa Efek 2016

Ketua Komisioner OJK Muliaman D.Hadad, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Anggota Dewan Komisioner OJK merangkap Kepala Eksekutif Pasar Modal Nurhaida bersama menutup Bursa Efek Indonesia (BEI) di Main Hall BEI, Jakarta. Penutupan tersebut merupakan capaian transaksi tertinggi dalam 10 tahun terakhir dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan tertinggi di antara bursa-bursa utama dunia.

Closing Trading on the Indonesia Stock Exchange 2016

The Chairman of the Financial Services Authority (OJK), Muliaman D. Hadad, Coordinating Minister for Economic Affairs, Darmin Nasution, President Director of the Indonesia Stock Exchange, Tito Sulistio, Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, OJK Commissioner for Capital Market Supervision, Nurhaida, together closed trading on the Indonesia Stock Exchange in the Main Hall of the IDX Building in Jakarta. Trading closed at its highest level in the past decade, while the Jakarta Composite Index (JCI) outperformed other global bourses.

FOKUS OJK 2016

OJK FOCUS IN 2016

Sektor jasa keuangan memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. OJK berupaya memajukan Sektor Jasa Keuangan melalui serangkaian kebijakan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi. Sebagai bagian dari upaya dalam memacu pertumbuhan, OJK mengeluarkan serangkaian kebijakan strategis demi menciptakan SJK yang berkontribusi aktif dalam mendorong perekonomian nasional, menciptakan sistem keuangan yang stabil sebagai landasan keuangan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan. Kebijakan strategis yang ditempuh OJK sepanjang 2016 untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif akan dipaparkan dalam bab "Fokus 2016 " ini.

The financial services sector plays an important role in advancing the national economy. OJK strives to strengthen the financial services sector through structured, measured and integrated policies. As part of the efforts to stimulate growth, OJK promulgated a series of strategic policies to create a financial services sector that actively contributes to the national economy, to create a stable financial system as a sustainable financial foundation, and to realise financial independence and public betterment. The strategic policies issued by OJK in 2016 to realise a contributive, stable and inclusive financial services sector are presented in this chapter.

Panen Padi, Bogor, Jawa Barat
Paddy Harvest, Bogor, West Java

FOKUS OJK 2016

OJK FOCUS IN 2016

II.1 *MASTER PLAN* SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

II.1.1 Latar Belakang

Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan sektor yang mewarnai dinamika perekonomian suatu negara. Bukan hanya sebagai penyedia dana bagi kegiatan produksi ataupun konsumsi, SJK juga menjadi media penyimpanan kekayaan masyarakat. Dengan peran yang dominan, di tengah maraknya inovasi produk keuangan, kinerja SJK turut menentukan naik turunnya kegiatan ekonomi suatu negara. Peran SJK secara signifikan melonjak setelah deregulasi sektor keuangan pada 1983. Deregulasi ini bertujuan menciptakan SJK yang lebih kompetitif dalam mendukung kegiatan pertumbuhan.

Pengalaman dari beberapa krisis yang terjadi dalam dua hingga tiga dekade terakhir menunjukkan sisi lain dari pesatnya perkembangan SJK, yakni kerentanan terhadap gejolak perekonomian baik yang bersumber dari eksternal ataupun domestik. Gejolak ini rentan terjadi pada sektor keuangan yang sedang tumbuh pesat dan pertumbuhannya melebihi sektor riil. Dampak instabilitas yang ditimbulkan sangat signifikan dan mampu menimbulkan resesi sebagaimana yang dialami perekonomian global hampir satu dekade terakhir. Oleh karena itu, perkembangan SJK sebaiknya sesuai dengan perkembangan sektor riil dan selaras dengan perkembangan fundamental ekonomi.

OJK sebagai lembaga independen memiliki mandat mengatur dan mengawasi SJK berkepentingan agar perkembangan SJK nasional berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menopang kegiatan pembangunan. Proses ini harus berjalan tanpa menimbulkan riak yang berlebihan sehingga perlu dibuat rancang bangun tentang arah pengembangan SJK nasional. Dengan demikian, SJK dapat tumbuh secara teratur, memberikan keuntungan bagi pelakunya, dan menghasilkan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

II.1 INDONESIA FINANCIAL SERVICES SECTOR MASTER PLAN

II.1.1 Background

The financial services sector characterises the economic dynamics of a country, not only as a provider of funds for production and consumption activities, but also as a medium to deposit the public's wealth. With such a dominant role, and against a backdrop of rapid financial product innovation, financial services sector performance determines the economic gyrations of a country. The role of the financial services sector expanded quickly after financial sector deregulation in 1983, which aimed to create a more competitive financial services sector to support economic growth.

Crisis experience over the past 2-3 decades has exposed another side of rapid financial services sector development, namely vulnerability to external and domestic economic shocks. Such fragilities expose the financial sector, for which rapid growth can exceed the real sector. The impact of instability is significant and could trigger a recession, as has been experienced by the global economy for nearly the past decade. Therefore, financial services sector development should remain in line with the real sector and economic fundamentals.

OJK as an independent organisation, is mandated to regulate and supervise the financial services sector in order to ensure sound national financial services sector development that meets the needs of the public and supports other development activities. This process should not trigger excessive fluctuations and, thus, requires a national financial services sector master plan. Consequently, the financial services sector can achieve steady growth, reward the relevant players and provide optimal benefits in terms of ameliorating public welfare and prosperity.

Rancang bangun menjadi penting di tengah proses penyesuaian perekonomian dan reformasi sektor keuangan global. Proses ini berimbas pada arah pengembangan SJK nasional. Selain itu, rancang bangun ini mengedepankan asas sinergisme antar sektor di industri keuangan melalui pendekatan yang terintegrasi, sehingga kapasitas SJK dapat meningkat secara signifikan. Rancang bangun juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang berpotensi mengubah bentuk, cara bertransaksi, dan pola operasional SJK di masa yang akan datang, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam era digitalisasi.

A grand design is especially important during economic rebalancing and global financial sector reforms. The rebalancing process also influences the direction of national financial services sector development. In addition, the master plan should prioritise synergy between sectors in the financial industry through an integrated approach, thereby expanding financial services sector capacity significantly. The grand design must also anticipate various developments that could potentially change the form, way of transacting and operational procedures of the financial services sector.

II.1.2 Prinsip dan Tujuan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Penyusunan rancang bangun ditujukan untuk menata penguatan peran SJK dalam kegiatan ekonomi nasional, baik dalam konteks penyediaan pendanaan bagi pembangunan maupun menjadikan Indonesia sebagai sebagai salah satu tujuan utama investasi. Rancang bangun ini juga menjadi acuan pengembangan SJK nasional dan disusun secara terintegrasi sehingga diharapkan dapat memberikan efek pengganda bagi pembangunan ekonomi nasional dan secara bersamaan dapat memberikan *platform* yang lebih holistik bagi penguatan perlindungan konsumen SJK. Selain itu, diharapkan melalui rancang bangun ini tercipta SJK yang stabil dan berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

II.1.2 Principles and Objectives of Financial Services Sector Development in Indonesia

Compiling a master plan aims to strengthen the role of the financial services sector in terms of national economic activities, in the context of providing development funds and affirming Indonesia's standing as a prime global investment destination. The master plan also acts as a reference for national financial services sector development and is integrated, thus providing a multiplier effect for the national economy and simultaneously providing a holistic platform to strengthen consumer protection in the financial services sector. Furthermore, the master plan is expected to help create a stable financial services sector that contributes significantly to sustainable national economic growth.

Mengingat SJK merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perekonomian secara keseluruhan, maka tentunya penyusunannya perlu diselaraskan dengan arah pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagaimana dituangkan dalam RPJPN 2005-2025, peran SJK ditranslasikan dalam bentuk pemenuhan sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri; akses keuangan yang merata; pertumbuhan SJK yang sehat dan berkelanjutan; dan sumber daya manusia yang memadai, produktif, dan berkualitas.

Considering that the financial services sector is an integral part of the overall economy, preparations for the master plan must be harmonised with the national direction of economic development contained in the Long-Term National Development Plan (RPJPN) and Medium-Term National Development Plan (RPJMN). Pursuant to the Long-Term National Development Plan (RPJPN) 2005-2025, the role of the financial services sector was translated into fulfilling domestic sources of development financing; equitable financial access; healthy and sustainable financial services sector growth; as well as adequate, productive and quality human resources.

Sementara itu, dalam RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa poin penting yang menjadi inti dari upaya pengembangan SJK yaitu (1) Pengembangan SJK ke depan diarahkan untuk dapat menjadi salah satu penyedia pembiayaan pembangunan yang signifikan; (2) SJK harus mampu beradaptasi terhadap perubahan melalui penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kelas menengah; (3) Perluasan produk dan layanan SJK harus dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan usaha bagi usaha mikro dan kecil serta *start-up business* dengan memperkuat peran modal ventura dan perusahaan penjaminan kredit; dan (4) Pengembangan SJK nasional

Several salient points contained in the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019 represent the core features of the financial services sector master plan, including: (1) future financial services sector development will be directed towards realising the financial services sector as a significant provider of development financing; (2) the financial services sector must be able to adapt to changes by providing financial products and services appropriate to the characteristics of the nascent middle class; (3) financial services sector products and services must be affordable to all social strata through broader access to financing for micro and small enterprises as well as startups by strengthening

harus dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan melalui penyesuaian regulasi terkait SJK dan peningkatan sinergi kebijakan antar otoritas terkait.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, pengembangan SJK diharapkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui transformasi perekonomian nasional yang dirumuskan dalam RPJMN tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh rata-rata sebesar 6%-8% per tahun secara berkelanjutan dan Indonesia dapat menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas USD12.000 pada sekitar tahun 2025-2030. Untuk mencapai target tersebut diperlukan beberapa prakondisi, seperti terkendalinya laju inflasi sesuai dengan target jangka panjang dan terpenuhinya kebutuhan pembiayaan (*financing gap*) pembangunan.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang perlu dipenuhi SJK sebagaimana tercantum dalam RPJMN sangat besar. Konsekuensinya, fungsi intermediasi keuangan perlu secara signifikan meningkatkan kontribusinya. Peran ini tidak semata diemban oleh sektor perbankan, namun juga oleh pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi dunia usaha melalui penerbitan saham dan surat utang. Melihat kondisi tersebut, diperlukan perubahan paradigma perumusan dan pelaksanaan strategi pengembangan SJK. Strategi yang dilakukan seharusnya lebih dari sebatas *business as usual*, yaitu perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengembangan SJK nasional agar menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan.

the role of venture capital and credit guarantee companies; and (4) national financial services sector development must support attainment of the development goals by refining financial services sector regulations and increasing policy synergy among the relevant authorities.

Financial services sector development is expected to support attainment of the national medium-term development goals contained in the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Through national economic transformation, per RPJMN, Indonesia's economy is expected to grow sustainably by an average of 6-8% per annum, as Indonesia strives to become an advanced country with per capita income exceeding USD12,000 by 2025-2030. To achieve such targets, a number of preconditions are required, including controlled inflation within the long-term target corridor and overcoming the current financing gap.

The need for development financing from the financial services sector, as contained in the RPJMN, is large. Consequently, the contribution of the intermediation function needs to be increased significantly, not only in terms of the banking industry but also by the capital market as an alternative source of corporate financing through issuances of shares and securities. Observing such conditions, a paradigm change is required in the formulation and implementation of the financial services sector development strategy. The strategy must go beyond 'business as usual'. In other words, national financial services sector development breakthroughs and innovation are required as catalysts of growth.

Rincian Pemenuhan Pendanaan Pembangunan 2015-2019
Summary of Development Funding Sources 2015-2019

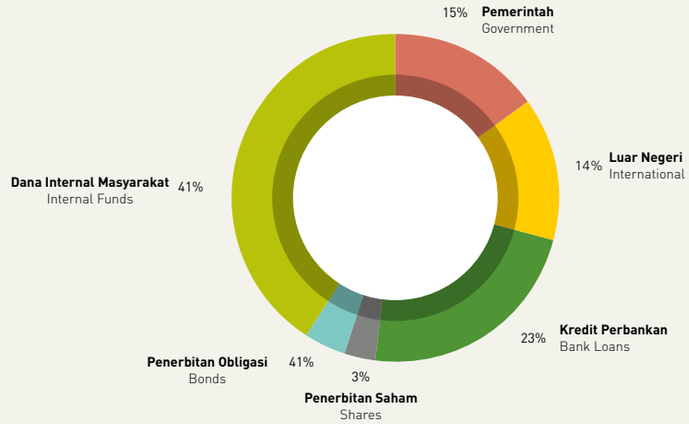

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, Bappenas
Source: Technocratic Plan, RPJMN 2015-2019, National Development Planning Agency

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, OJK menyusun sebuah rancang bangun yang komprehensif bagi pengembangan SJK nasional agar mampu mendukung upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan menjawab tantangannya. Rancang bangun ini dinamakan "*Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019".

Based on the considerations, OJK compiled a comprehensive master plan for national financial services sector development that supports efforts to boost growth and overcome the challenges, known as the Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2015-2019.

Keberadaan rancang bangun SJK domestik diarahkan untuk dapat menjadi payung bagi sejumlah *roadmap* yang dikembangkan masing-masing sektor di industri jasa keuangan seperti:

- *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019;
- *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia;
- Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI); dan *roadmap* lainnya

The domestic financial services sector master plan represents an umbrella for several roadmaps developed by each respective sector in the financial services industry as follows:

- Sustainable Finance in Indonesia Roadmap 2015-2019;
- Sharia Capital Market Roadmap 2015-2019;
- Indonesia Sharia Banking Roadmap 2015-2019;
- Indonesia Banking Development Roadmap 2015-2019;
- Indonesia Corporate Governance Roadmap;
- Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI); and other roadmaps.

Peran SJK dalam Transformasi Ekonomi Nasional
The Role of Financial Service Sector in the National Economic Transformation

II.1.3 Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, arah pengembangan SJK nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional**
   SJK nasional diarahkan untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan optimalisasi perannya dalam pembangunan ekonomi, SJK diarahkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas.
2. **Menjaga stabillitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan**
   Upaya untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi diimplementasikan tanpa menimbulkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk itu, SJK diarahkan untuk memiliki daya tahan yang memadai dalam mengantisipasi goncangan yang dapat muncul dari lingkungan domestik maupun eksternal. Stabilitas sistem keuangan ini juga merupakan landasan bagi proses pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
3. **Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan**
   Hasil akhir dari pembangunan ekonomi nasional seyogyanya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, SJK diarahkan untuk dapat mengambil peran dalam mewujudkan kemandirian finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif.

Arah pengembangan SJK nasional sebagaimana disebutkan di atas memerlukan dukungan yang memadai dari aspek sumber daya manusia dan teknologi informasi. Karena itu, perlu diimplementasikan berbagai inisiatif dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di SJK, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan di SJK.

II.1.3 Development Direction of the Financial Services Sector in Indonesia

The development direction of the financial services sector in Indonesia can be outlined as follows:

1. **Optimising the role of the financial services sector to accelerate national economic growth**
   The national financial services sector is urged to stimulate economic activities. By optimising its role in economic development, the financial services sector could enhance economic capacity and, thus, achieve robust and higher quality growth.
2. **Maintaining financial system stability as the foundation of sustainable development**
   Economic growth should be accelerated without disrupting general financial system stability. To that end, the financial services sector is directed towards becoming adequately resilient to external and domestic shocks. Financial system stability is also the foundation of healthy and sustainable growth.
3. **Realising financial independence and promoting equitable development**
   The goal of national economic development should be the betterment of all social strata and to unwind national development imbalances. To that end, the financial services sector plays an important role in realising financial independence through financial inclusion.

The development direction of the national financial services sector requires the support of adequate human resources and information technology. Therefore, several initiatives and programs are required that aim to meet the demand for competent human resources in the financial services sector, in terms of quantity and quality, as well as to optimise the benefits of information technology in the sector.

Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
Development Direction of the Financial Services Sector in Indonesia

TIGA ARAH PENGEMBANGAN *MASTER PLAN* SJKI
THREE DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE FINANCIAL SERVICES SECTOR MASTER PLAN

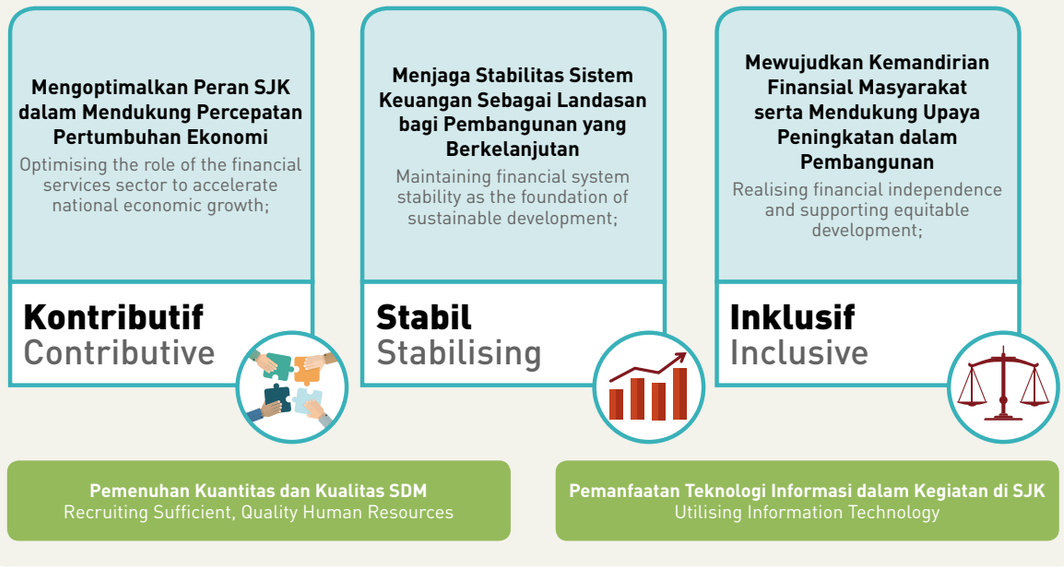

II.2 OPTIMALISASI SJK DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

II.2.1 Pendanaan Infrastruktur dan Sektor Ekonomi Prioritas

II.2.1.1 Sektor Kelautan dan Perikanan

Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan OJK dalam menjalankan program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING) sejak 11 Mei 2015. Melalui program JARING, OJK dan KKP melakukan berbagai kebijakan strategis antara lain dalam penyediaan *database* Kelautan dan Perikanan, skema pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. Sasaran utama program JARING adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Target pertumbuhan kredit ditetapkan minimal 50% dari tahun sebelumnya. Selain itu, diharapkan program JARING dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, meningkatkan pemahaman Sektor Jasa Keuangan (SJK) terhadap bisnis sektor KP, memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil, menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

II.2 OPTIMALIZATION OF FINANCIAL SERVICE SECTOR TO ACCELERATE NATIONAL ECONOMIC GROWTH

II.2.1 Infrastructure and Priority Economic Sector Financing

II.2.1.1 Maritime and Fisheries Sector

Affordable, Synergic, and Guidelines (JARING)
In conjunction with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), OJK initiated the JARING program on 11th May 2015, though which OJK and KPP institute various strategic policies, including providing a maritime and fisheries database, financing schemes, mapping business risks and regulatory support. The key targets of the JARING program are to increase financing growth to the maritime and fisheries sector by targeting stronger year-on-year financing growth. The current target is a minimum of 50% on the previous year. In addition, the JARING program is expected to broaden public access to financial services, enhance financial services sector understanding of maritime and fisheries businesses, ameliorate the welfare of fishermen as well as micro and small enterprise owners, provide additional job opportunities and accelerate national economic growth.

Pelaksanaan Program JARING

Dalam mewujudkan sasaran JARING, terdapat 15 bank partner yang merupakan Bank Partner Program JARING, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BTPN, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Bukopin, BCA, Maybank Indonesia, CIMB Niaga, Bank Sinarmas, BPD Jawa Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Utara, dan BPD Jawa Tengah. Selain dari perbankan, komitmen meningkatkan pembiayaan untuk sektor KP juga diperoleh dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) melalui Konsorsium Perusahaan Pembiayaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Penjaminan.

Pelaksanaan Program JARING oleh Bank Partner

Penyaluran kredit melalui program JARING terus meningkat hingga mencapai Rp24,2 triliun pada akhir 2016 atau tumbuh sebesar 13,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sub sektor yang mendominasi penyaluran kredit adalah perdagangan (31,4%) dan industri pengolahan (29,5%).

Peningkatan penyaluran kredit diiringi dengan perbaikan kualitas, terlihat dari NPL JARING yang turun menjadi 1,85%. Kualitas kredit yang meningkat ditopang oleh turunnya NPL pada semua sub sektor selain penangkapan. NPL sub sektor penangkapan meningkat sebesar 28 bps (*qtq*) menjadi 3,05%, besarnya NPL terutama disebabkan penangkapan ikan selain di perairan umum dan tunai.

JARING Program Implementation

Striving to attain the JARING program targets, 15 banks are involved as partners, including BNI, BRI, Bank Mandiri, BTPN, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Bukopin, BCA, Maybank Indonesia, CIMB Niaga, Bank Sinarmas, BPD Jawa Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Utara, dan BPD Jawa Tengah. In addition to bank partners, the nonbank financial industry has also affirmed its commitment to increase financing to the maritime and fisheries sector through a consortium of finance companies, life insurance, general insurance and guarantee companies.

JARING Program Implementation by Bank Partners

Lending through the JARING program increased to Rp24.2 trillion at the end of 2016, growing 13.3% on the previous year. The most dominant subsectors were the trade sector (31.4%) and the manufacturing industry (29.5%).

Credit growth was also accompanied by better quality loans, indicated by the decline (improvement) in JARING NPL to 1.85%. Credit quality improved in all subsectors, excluding fishing, which increased 28bps (qtq) to 3.05% on fishing not in public waters and cash.

Perkembangan Kredit dan NPL Program JARING
JARING Program Loans and NPL

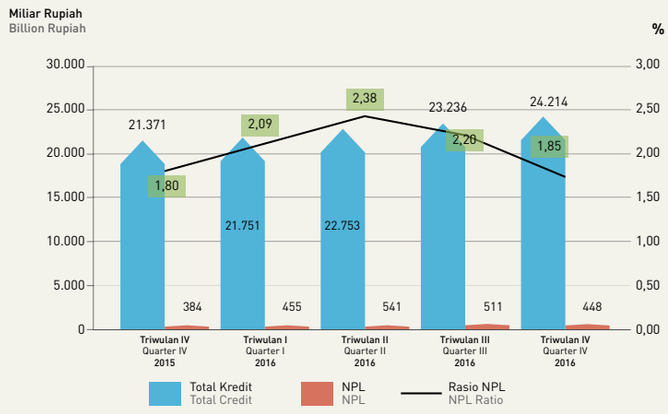

NPL Kredit JARING Berdasarkan Sektor Usaha
JARING NPL Breakdown Based On Activities

Kegiatan Usaha Business Activity	2016			
	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV
Penangkapan | Capture	2,76	2,55	2,77	3,05
Budi Daya | Aquaculture	3,40	3,37	2,63	1,96
Jasa Sarana Produksi Production Facility Services	5,82	6,76	2,68	2,21
Industri Pengolahan Manufacturing Industry	0,34	1,59	1,58	0,84
Perdagangan Trade	2,07	2,03	2,11	1,93

Pelaksanaan Program JARING oleh Perusahaan Pembiayaan

Sepanjangan tahun 2015 dan 2016, OJK bekerja sama dengan KKP melakukan survei potensi pembiayaan di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hasil survei tersebut, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi khususnya oleh pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan. Proses pengajuan permohonan pembiayaan kepada Konsorsium Perusahaan Pembiayaan yang masih menggunakan sistem manual menyebabkan terjadinya batasan pilihan bagi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Hal di atas turut menyebabkan nilai pembiayaan di sektor kemaritiman kurang optimal dan tidak meningkat secara pesat. Berdasarkan hasil survei, OJK berupaya untuk memberikan solusi atas beberapa kendala di atas. Langkah konkret yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan *workshop* bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan serta perekrutan 10.000 Sahabat Keuangan Maritim. Dengan adanya sosialisasi dan *workshop* tersebut, realisasi pembiayaan maritim sebesar Rp14,2 triliun. Realisasi pembiayaan maritim tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 129%. Pada akhir 2016, OJK mendorong Perusahaan *Start Up (Financial Technology)* untuk menyusun aplikasi khusus dalam bentuk *Marketplace Lending* yang dapat digunakan untuk para agen (Sahabat Keuangan Maritim) dalam membantu mengajukan permohonan pembiayaan secara *online* dan *real-time*. Dengan adanya *financial technology* (*Fintech*) pada sektor kelautan dan perikanan ini diharapkan para sahabat keuangan maritim dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan mudah.

Sebagai rencana ke depan, OJK akan melakukan sosialisasi dan *workshop* kepada sahabat keuangan maritim nusantara yang lebih masif, melakukan *launching* aplikasi *Fintech* khusus sektor kemaritiman, merancang usulan asuransi budidaya ikan dengan menggunakan skema yang serupa pada asuransi usaha tani padi,

JARING Program Implementation by Finance Companies

Throughout 2015 and 2016, OJK cooperated with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) to conduct a Financing Potential survey in the maritime and fisheries sector. The results revealed several constraints, in particular, faced by businesses in the maritime and fisheries sector when applying for financing. The financing application process, submitted to the Consortium of Finance Companies, still relies on a manual system, which restricts the choices available to businesses players in the maritime and fisheries sector. Consequently, the value of financing in the maritime and fisheries sector is neither optimal nor expanding quickly enough. Based on the survey results, OJK is trying to provide solutions to the constraints faced. One of the concrete measures was to organise socialisation activities and workshops in conjunction with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) concerning financing in the maritime and fisheries sector as well as recruiting 10,000 Maritime Financial Partners as agents. Through the socialisation activities and workshops, maritime financing realisation reached Rp14.2 trillion representing a large 129% increase on the previous year. At the end of 2016, OJK encouraged Fintech startups to prepare a special application in the form of Marketplace Lending for use by the agents (Maritime Financial Partners) and to help submit online financing applications in real-time. The presence of Fintech is expected to simplify financing applications in the maritime and fisheries sector.

In future, OJK plans to conduct mass socialisation activities and workshops for maritime agents, launch the special Fintech application for the maritime sector, propose aquaculture insurance schemes similar to the rice farmer schemes and create bespoke maritime Private Equity Funds (RDPT) to support business activity

membuat RDPT khusus maritim dalam rangka mendukung kegiatan usaha di sektor kemaritiman (Perusahaan Galangan Kapal, dan c*old storage*) yang telah mendapatkan kontrak dari KKP.

Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal
Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, yang mengatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, OJK menyiapkan industri asuransi untuk mendukung program Kementerian Perhubungan dengan membentuk konsorsium. Pembentukan konsorsium dilakukan untuk kesamaan dalam prosedur akseptasi dan pelayanan klaim, lebih mudah dalam pengawasan, kapasitas bersama lebih besar, dan memiliki posisi tawar kuat untuk menghadapi retrosesi/sekuritas. Jumlah kapal yang ditanggung asuransi sampai Desember 2016 adalah 3.541, meningkat sebesar 168,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Asuransi Nelayan
Program Asuransi Nelayan bertujuan untuk memberikan proteksi bagi nelayan dari risiko ketika melaut, sehingga para nelayan bisa mendapatkan kompensasi saat mengalami musibah ketika melaut, dan apabila meninggal, ahli waris akan mendapatkan santunan. KKP telah menetapkan PT Asuransi Jasa Indonesia selaku pelaksana Asuransi Nelayan. Program Asuransi Nelayan ditargetkan untuk 600.000 nelayan dengan harga pertanggungan sebesar Rp200 juta dan jumlah premi sebesar Rp175.000,- yang sepenuhnya ditanggung oleh KKP.

Jaminan pertanggungan diterima nelayan apabila mengalami kecelakaan diri, yang disebabkan oleh aktivitas melaut maupun di luar dari aktivitas penangkapan ikan. Apabila seorang nelayan meninggal saat melaut, ahli waris akan mendapat santunan Rp200 juta, sedangkan jika terluka sampai dengan mengalami cacat permanen, santunan yang akan diterima sampai dengan sebesar Rp100 juta, dan untuk biaya pengobatan mencapai Rp20 juta. Sementara itu, apabila nelayan mengalami kecelakaan di luar aktivitas penangkapan ikan, yang sampai mengakibatkan kematian, maka ahli waris akan mendapatkan Rp160 juta, sedangkan apabila mengalami cacat permanen akan menerima santunan sampai dengan sebesar Rp100 juta, dan untuk biaya pengobatan mencapai Rp20 juta. Sampai dengan 31 Desember 2016, capaian Asuransi Nelayan mencapai 40.9116 orang dengan total premi sebesar Rp71.595,3 juta, dan klaim sebesar Rp2.230,11 juta.

in the maritime sector (shipyards and cold storage) for existing contracts with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP).

Ship Removal Insurance
Ship removal insurance is required by Article 203, paragraph (5) of Act No. 17 of 2008 on Shipping, Article 119 of Government Regulation No. 5 of 2010 concerning Navigation and Article 18 of Minister of Transport Regulation No PM 71 of 2013 on Salvage and Underwater Work, which stipulate that ship owners must insure their vessels through ship removal insurance and/or protection and indemnity insurance.

Supporting policy implementation, OJK prepared the insurance industry to support the Ministry of Transportation by forming a consortium to unify acceptance procedures and claims, make supervision easier, increase joint capacity and strengthen the negotiating position through retrocession and security. The number of insured vessels totalled 3,541 in December 2016, up 168.3% on the previous year.

Insurance for Fishermen
The Insurance for Fishermen program aims to protect fishermen from risks when at sea, thereby providing compensation when faced with disaster at sea or, in the event of death, the family will receive compensation. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) has already appointed PT Asuransi Jasa Indonesia as the executor of the Insurance for Fishermen program, targeting 600,000 fishermen, with total coverage of around Rp200 million and premiums of Rp175,000 fully subsidised by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP).

Indemnity will be given in the event of accidents caused at sea and activities not associated with fishing. If a fisherman dies while at sea, dependents will receive a Rp200 million payout, while a minor injury or permanent disability shall be eligible for up to Rp100 million and up to Rp20 million for the cost of treatment. Furthermore, if a fisherman is injured through activities not associated with fishing, resulting in death, the dependents are eligible to receive a Rp160 million payout or Rp100 million for a permanent disability and up to Rp20 million for the cost of treatment. As of 31st December 2016, the Insurance for Fishermen program had covered 409,116 fishermen, with total premiums recorded at Rp71,595.3 million and claims totalling Rp2,230.11 million.

II.2.1.2 Sektor Pertanian

Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki peran yang penting bagi kehidupan. Ketahanan pangan yang lemah menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan berpotensi memicu terjadinya berbagai gejolak sosial dan politik. Mengingat pentingnya ketahanan pangan bagi stabilitas dan kesejahteraan bangsa, maka pemerintah menetapkan ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sejalan dengan program prioritas tersebut, OJK menetapkan serangkaian kebijakan strategis untuk mendorong sektor jasa keuangan dalam mendukung program ketahanan pangan dimaksud antara lain sebagai berikut:

Kredit Perbankan Sektor Pangan

Penyaluran kredit pangan di 2016 mencapai Rp648 triliun, tumbuh sebesar 9,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sub sektor pertanian dan perburuan mendominasi penyaluran kredit sebesar 43,12% dari total kredit pangan. Namun, pertumbuhan kredit sub sektor pertanian dan perburuan turun 741 bps menjadi 12,05% (yoy). Pertumbuhan kredit membaik secara signifikan untuk sub sektor perdagangan impor dari -7,25% (2015) menjadi 37,75% (2016).

Adapun kualitas kredit pangan menurun ditandai peningkatan NPL yang naik hingga mencapai 3,09% di 2016. Sub sektor perdagangan ekspor mengalami peningkatan NPL paling signifikan sebesar 305 bps menjadi 5,1%, seiring dengan menurunnya pertumbuhan kredit pada sub sektor dimaksud . Meskipun demikian, di tengah meningkatnya NPL sektor pangan, sub sektor kehutanan mengalami perbaikan dengan NPL sebesar 3,49% dari 5,37% (2015).

II.2.1.2 Agricultural Sector

Food is a basic human need and plays a crucial role in terms of wellbeing. A lack of food security creates economic instability and could potentially trigger social and political unrest. Considering its importance to ensure national stability and prosperity, food security is a designated priority government program. Congruently, OJK formulated a series of strategic policies, as follows, to help the financial services sector support food security:

Food Sector Bank Loans

Lending to the food sector in 2016 reached Rp648 trillion, growing 9.04% on the year earlier. The agricultural and hunting subsector dominated lending, accounting for 43.12% of total loans to the food sector. Nevertheless, credit growth to the subsector has fallen 741bps to 12.05% (yoy). In contrast, credit growth accelerated significantly to the import trade subsector, reversing the previous -7.25% contraction in 2015 to record 37.75% in 2016.

The quality of loans to the food sector deteriorated, evidenced by an increase in NPL to 3.09% in 2016, most notably affecting the export trade subsector, which recorded a 305bps increase in NPL to 5.1% in line with the recent credit slump in the subsector. Notwithstanding the increasing NPL of the food sector, the forestry subsector bucked the trend by recording an NPL improvement from 5.37% in 2015 to 3.49%.

Perkembangan Kredit Pangan
Credit to the Food Sector

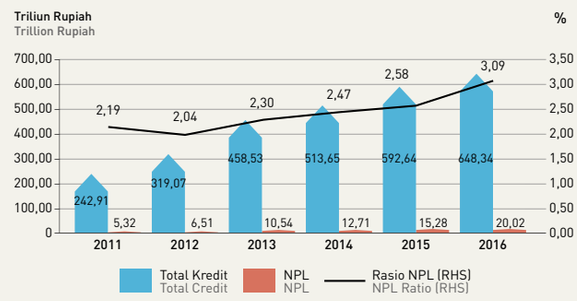

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
Sebagai bentuk implementasi amanat Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme pengganggu tanam yang menyebabkan gagal panen pertanian, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta kementerian dan lembaga terkait melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian yang menyebabkan gagal panen.

Kriteria petani yang dapat menjadi calon tertanggung AUTP Petani antara lain penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar atau petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya padi pada lahan paling luas dua hektar. Sementara itu, Kriteria lokasi yang dapat di-*cover* oleh AUTP antara lain dilaksanakan pada sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air, termasuk wilayah sentra produksi padi dan/atau wilayah penyelenggaraan Upaya Khusus (UPSUS) padi serta lokasi terletak dalam satu hamparan.

Periode awal implementasi AUTP adalah musim tanam Oktober 2015 – Maret 2016. AUTP diberikan untuk area tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp180.000/ha/MT. Sebanyak 80% dari besaran premi AUTP merupakan tanggungan pemerintah, sedangkan 20% sisanya merupakan tanggungan petani. Porsi premi AUTP yang merupakan beban pemerintah dibiayai dana APBN senilai Rp150 miliar. Luasan lahan yang terdaftar pada periode tanam AUTP tahun 2016 adalah 518.506,86 hektar atau 51,85% dari target 1 juta Ha. Jumlah petani yang ikut serta AUTP 2016 sebanyak 929.945 petani.

Selama 2016, Premi yang tercatat sebesar Rp93,33 miliar terdiri dari subsidi premi (80%) sebesar Rp74,66 miliar dan premi swadaya (20%) sebesar Rp18,66 miliar. Jumlah klaim dibayar sebesar Rp32,90 miliar dan klaim dalam proses sebesar Rp7,9miliar.

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
Di samping pelaksanaan AUTP, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta kementerian dan lembaga terkait juga melaksanakan program perlindungan kepada peternak sapi. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) merupakan amanat Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian atau kehilangan sapi sehingga usaha peternak dapat tetap berlanjut. Dalam implementasinya, PT Asuransi Jasa Indonesia telah mendapat izin produk dari OJK dan mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN sebagai pelaku AUTS. Adapun skema dari asuransi usaha ternak sapi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rice Farm Insurance (AUTP)
Pursuant to Act No. 19 of 2013 on Farmer Protection and Empowerment as well as to minimise the adverse impact of climate change and pest attacks that can cause harvest failures, OJK coordinated with the Ministry of Agriculture along with other relevant government ministries and institutions to implement farmer protection and empowerment through Rice Farm Insurance (AUTP). AUTP aims to provide indemnity in the form working capital for farmers in the event of harvest failure.

The criteria for farmers to be covered by AUTP include tenant farmers working land of no more than 2 hectares or landowners with no more than 2 hectares allocated to rice cultivation. Meanwhile, the criteria for locations covered by AUTP include irrigated and rainfed rice fields with water sources, including rice production hubs and/or areas with Special Efforts (UPSUS) rice programs as well as locations situated on one parcel of land.

Rice Farm Insurance (AUTP) was initially rolled out during the planting season from October 2015 – March 2016. AUTP was extended to rice planting areas of 1 hectare, with total coverage of Rp6 million per hectare. The premium rate was set at 3%, namely Rp180,000 per hectare per MT. The Government subsidised 80% of the AUTP premium, with the remaining 20% the responsibility of the farmer. The AUTP premiums subsidised by the Government were paid using budget funds to the tune of Rp150 billion. A total of 518,506.86 hectares of rice farm land was registered in 2016, accounting for 51.85% of the targeted 1 million hectares. Furthermore, a total of 929,945 farmers were covered by AUTP in 2016.

Premiums in 2016, recorded at Rp93.33 billion, consisted of subsidised premiums (80%) totalling Rp74.66 billion and private premiums (20%), totalling Rp18.66 billion. Total claims paid amounted to Rp32.90 billion and Rp7.9 billion of claims in process.

Beef Cattle Insurance (AUTS)
In addition to AUTP, OJK coordinated with the Ministry of Agriculture as well as other relevant ministries and institutions to protect beef cattle farmers through Beef Cattle Insurance (AUTS) pursuant to Act No. 19 of 2013 on Farmer Protection and Empowerment as well as Minister of Agriculture Regulation No. 40 of 2015. AUTS provides indemnity in the form of compensation to beef cattle farmers in the event of cattle death or loss, thereby ensuring business continuity. PT Asuransi Jasa Indonesia has been licensed by OJK, and approved by the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia, as executor of AUTS. The following AUTS schemes are available to beef cattle farmers:

Skema Asuransi Usaha Ternak Sapi
Insurance Schemes for Beef Cattle Farmers

Jaminan | Cover	**Pengecualian** | Exemptions	**Usia** | Duration	**Tarif Premi** | Premium	**Kriteria** | Criteria
• Kematian karena: penyakit, kecelakaan, melahirkan Death due to: disease, accidents, birth complications • Kehilangan karena pencurian Loss due to theft	• Kematian karena kelalaian; Death due to negligence; • Wabah; Epidemics; • Kebakaran; Fire; • Bencana Alam; Natural disaster; • Kerusuhan; Unrest; • Huru-hara; Rioting; • Potong paksa karena mandul; Euthanised; • lainnya sesuai polis Other exemptions per the policy.	Minimal 1 tahun Minimum of 1 year	2% Premi Rp200.000 2% Premium Rp200,000 Peternak = 40rb Subsidi = 160rb Farmer = Rp40k Subsidy = Rp160k	A. Peserta | Farmer • Bersedia membayar premi 20%; Able to pay 20% of the premium; • Peternak sapi skala usaha kecil pembibitan dan/atau pembiakan; dan Small-scale beef cattle farmers involved with breeding and calving; and • *Good Breeding Practice*. Good Breeding Practices B. Sapi | Beef Cattle • Potong/perah untuk pembibitan/ pembiakan; Beef or dairy cattle for husbandry; • Memiliki identitas (*ear tag, microchip*); dan Ear tagged or microchipped; and • Sehat dan produktif. Healthy and productive

AUTS dimulai sejak Juli 2016 dan dilaksanakan pada 22 provinsi dan 116 kabupaten dengan target alokasi sebanyak 120.000 sapi indukan/betina. AUTS dilaksanakan dengan harga pertanggungan sebesar Rp10.000.000,- dengan tarif premi sebesar 2%/tahun. Delapan puluh persen (80%) premi AUTS merupakan tanggungan pemerintah, sedangkan 20% sisanya merupakan tanggungan peternak. Anggaran pemerintah yang diberikan untuk program AUTS adalah sebesar Rp19,2 miliar. Sampai dengan Desember 2016, jumlah sapi yang terdaftar adalah sebanyak 27.025 ekor dengan realisasi premi sebesar Rp5,4 miliar.

AUTS began in July 2016 and has been extended to 22 provinces and 116 regencies, targeting 120,000 heads of beef cattle. AUTS has a total coverage of Rp10 million, with the premium rate set at 2% per annum. Furthermore, 80% of the AUTS premium is subsidised by the government, with the remaining 20% borne by the farmer. The Government allocated Rp19.2 billion of its budget to the AUTS program. As of December 2016, a total of 27,025 heads of beef cattle had been registered with premiums totalling Rp5.4 billion.

II.2.1.3 Sektor Infrastruktur
Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP)

Kebutuhan akan papan atau rumah merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah telah menetapkan program strategis untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut melalui Program Sejuta Rumah.

Sektor perbankan merupakan sumber pembiayaan utama dalam kegiatan penyaluran pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun demikian, pembiayaan dari sektor perbankan belum dapat memenuhi kekurangan pendanaan yang dibutuhkan, mengingat masalah *missmatch maturities* atau *funding gap* yang masih dihadapi sektor perbankan. Hal ini disebabkan kecenderungan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan mempunyai karakteristik simpanan jangka pendek (*short term deposit*) sementara penyaluran kredit, khususnya KPR mempunyai karakteristik jangka waktu yang panjang. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan pembiayaan alternatif untuk memecahkan hambatan pendanaan di sektor perumahan.

II.2.1.3 Infrastructure Sector
Asset-Backed Securities in The Form of Participation Certificates (EBA-SP)

Shelter is a basic human need. Therefore, the Government announced a strategic program to fulfil that basic requirement, namely the One Million Houses Program.

The banking sector represents the primary source of housing financing through disbursements of housing loans (KPR). Nonetheless, financing from the banking sector has failed to close the funding gap due, amongst others, to a maturity mismatch because banks accumulate short-term deposits, while disbursing long-term housing loans. To overcome the problem of a maturity mismatch, alternative sources of financing are required to bridge the funding gap in the housing sector.

Pada 2015, OJK menerbitkan POJK No 23/POJK.04/2014 tentang Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP). EBA-SP adalah Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sejumlah pemegang EBA-SP. Penerbitan EBA-SP akan menambah likuiditas pembiayaan perumahan dan mendukung pengembangan basis investor domestik.

In 2015, OJK issued POJK No. 23/POJK.04/2014 concerning Asset-Backed Securities in The Form of Participation Certificates (EBA-SP). EBA-SP are asset-backed securities issued as proof of proportional ownership of the pools of receivables jointly owned by the holders. EBA-SP issuances will increase liquidity for housing financing and support expansion of the domestic investor base.

Pada 2015, untuk pertama kalinya EBA-SP diterbitkan di Pasar Modal Indonesia senilai Rp200 miliar. Peluncuran instrumen sekuritisasi KPR dengan EBA-SP ini merupakan bentuk dukungan OJK terhadap Program Satu Juta Rumah, yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Pada 2016, terjadi peningkatan yang signifikan pada nilai EBA-SP menjadi sebesar Rp1,7 Triliun atau meningkat 7,5 kali lipat dibandingkan 2015.

In 2015, EBA-SP were issued for the first time on the capital market in Indonesia, valued at Rp200 billion. OJK launched this housing loan securitisation instrument to support the One Million Houses Program announced by the Government. In 2016, the value of EBA-SP recorded a 7.5-fold increase on the previous year to Rp1.7 trillion.

Penawaran Umum Sektor Infrastruktur

Pembiayaan untuk infrastruktur tidak hanya dilakukan melalui penyaluran kredit dari sektor perbankan namun juga melalui penawaran umum di Pasar Modal. Selama 2016, terdapat 12 Emiten yang bergerak di Infrastuktur melakukan *raising fund* melalui Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

Public Offerings in the Infrastructure Sector

Infrastructure financing not only originated from the banking sector, but also through public offerings on the capital market. In 2016, a total of 12 issuers operating in the infrastructure sector raised funds through the capital market as follows:

Jenis Penawaran Umum Public Offering	2015		2016	
	Jumlah Emiten Total Issuers	**Nilai (Rp Triliun)** Value (Rp trillions)	**Jumlah Emiten** Total Issuers	**Nilai (Rp Triliun)** Value (Rp trillions)
Initial Public Offering Initial Public Offering (IPO)	-	-	2	2,48
Penawaran Umum Terbatas Rights Issue	-	-	2	8,52
Obligasi dan atau Sukuk Bonds and/or Sukuk	-	-	3	6,00
Penawaran Umum Berkelanjutan Shelf Registration	4	12,50	5	5,49
Total	**4**	**12,50**	**12**	**22,49**

Total nilai penawaran umum Emiten sektor infrastruktur tersebut mewakili 51% dari keseluruhan total nilai Penawaran Umum selama 2016.

The value of public offerings by issuers operating in the infrastructure sector accounted for 51% of the total in 2016.

Kredit Perbankan Sektor Infrastruktur

Penyaluran kredit untuk sektor infrastruktur terus meningkat sejak tahun 2011 hingga mencapai Rp1.080 triliun dengan pertumbuhan sebesar 7,47% (yoy) pada tahun 2016. Penyaluran kredit di tahun 2016 didominasi oleh sub sektor jasa perusahaan lainnya sebesar 40,71% dari total kredit infrastruktur, khususnya untuk pemilikan rumah tinggal.

Infrastructure Sector Bank Loans

Lending to Infrastructure Sector increasing over the year since 2011 reached Rp1.080 trillion, growing 7,47% in 2016. Other services subsector dominated lending, accounting for 40.71% of total loans to the infrastructure sector, especially for home ownership.

Pertumbuhan sub sektor angkutan udara meningkat secara signifikan dari -15,08% (yoy) di 2015 menjadi 23,57% (yoy) di 2016. Di sisi lain, kualitas kredit menurun terlihat dari peningkatan NPL sebesar 77 bps menjadi 3,73% (yoy). Peningkatan NPL terbesar dialami oleh industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi

The growth of the air transportation sub-sector increased significantly from -15.08% (yoy) in 2015 to 23.57% (yoy) in 2016. In contrast, the quality of loans deteriorated, evidenced by an increase in NPL for 77 bps to 3,73%. Radio, television and communication equipment industry experienced the largest increase NPL for 544

sebesar 544 bps menjadi 9,19%. Selain itu, terdapat dua sub sektor dengan NPL > 5% yaitu pertambangan dan angkutan air masing-masing sebesar 6,46% dan 8,37%. Peningkatan pertumbuhan pada sub sektor angkutan udara seiring dengan pembaikan kualitas kredit, dimana NPL turun menjadi 0,54% dari 2,92% pada tahun sebelumnya.

bps to 9.19%. Furthermore, there are two sub-sectors with NPL> 5% namely mining and water transportation respectively by 6.46% and 8.37%. Increased growth in air transport sub-sectors in line the improvements of credit quality, with NPLs decrease to 0.54% from 2.92% in the previous year.

Kredit Infrastruktur
Infrastrcuture Credit

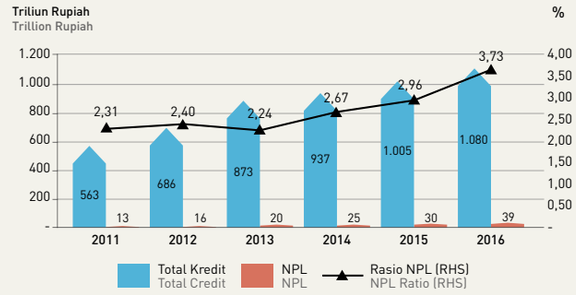

Total Credit NPL
NPL Ratio (RHS)

	Pertumbuhan Kredit (yoy) Credit Growth (yoy)		NPL	
	2015	2016	2015	2016
Jasa Perusahaan Lainnya Other Services	6,87	7,55	2,49	2,62
Konstruksi Construction	17,41	24,20	4,05	3,86
Real Estate Real Estate	19,38	22,46	1,84	2,15
Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Mining and Mining Services for Oil and Gas	(13,23)	(17,55)	2,86	6,46
Angkutan Udara Air Transportation	(15,08)	23,57	2,92	0,54
Angkutan Air Water Transportation	(0,86)	(7,38)	7,61	8,37
Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya Radio, Television and Communication Equipment Industry	14,35	(10,49)	3,75	9,19

II.2.1.4 Sektor UMKM

Penyaluran KUR 2016

Pemerintah bekerja sama dengan OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga dari pemerintah. Program KUR terdiri atas KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR Penempatan TKI. Penyaluran KUR melibatkan 33 Bank dan empat Lembaga Keuangan Non Bank Sampai akhir 2016, target penyaluran KUR adalah sebesar Rp103,67 triliun.

II.2.1.4 MSME Sector

KUR Disbursements in 2016

The Government collaborated with the Financial Services Authority (OJK) and financial services industry to launch subsidised People's Business Loans (KUR). The KUR program consists of Micro Kur, Retail KUR and Indonesian Migrant Worker (TKI) KUR. People's Business Loans (KUR) are disbursed by 33 banks and four non-bank financial institutions. As of yearend 2016, the KUR target totalled Rp103.67 trillion.

Sebesar 90,67% dari target penyaluran KUR tersebut didominasi oleh tiga bank BUMN, yaitu masing-masing oleh BRI (67,04%), Bank Mandiri (12,54%), dan BNI (11,09%). Target alokasi KUR terbesar terdapat pada jenis KUR Mikro yang mencapai Rp67,95 triliun, diikuti KUR Ritel dan KUR TKI masing-masing sebesar Rp33,60 triliun dan Rp2,12 triliun.

As much as 90.67% of targeted KUR lending was dominated by three state-owned banks, namely BRI (67.04%), Bank Mandiri (12.54%) and BNI (11.09%). Furthermore, Micro KUR dominated KUR allocation, reaching Rp67.95 trillion, followed by Retail KUR at Rp33.60 trillion and TKI KUR at Rp2.12 trillion.

Skema KUR
KUR Scheme

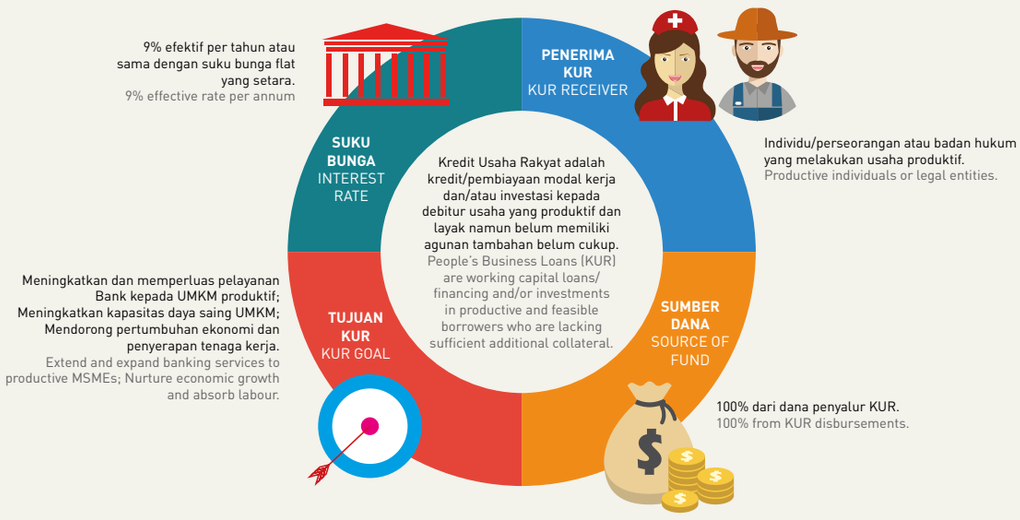

Realisasi KUR sampai akhir 2016 mencapai Rp94,41 triliun (91,06% dari target). Berdasarkan jenisnya, realisasi KUR terbesar berada pada KUR Mikro (Rp65,61 triliun), diikuti KUR Retail (Rp28,61 triliun), dan KUR TKI (Rp180 miliar). Dari sisi jumlah debitur penerima KUR, KUR Mikro memiliki jumlah debitur terbanyak dibandingkan jenis KUR lainnya yaitu mencapai 4.144.126 debitur atau 95% dari total debitur penerima KUR secara keseluruhan.

KUR realisation per the end of 2016 reached Rp94.41 trillion (91.06% of the target), dominated by micro KUR (Rp65.61 trillion), followed by Retail KUR (Rp28.61trillion) and TKI KUR (Rp180 billion). In terms of borrowers, Micro KUR was once again dominant with 4,144,126 debtors, equivalent to 95% of the total.

Penyaluran KUR masih didominasi di provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah:
1. Jawa Tengah (Rp16,4 triliun);
2. Jawa Timur (Rp13,6 triliun); dan
3. Jawa Barat (Rp11,5 triliun)

KUR disbursements in the reporting period were still dominated by provinces located on the island of Java as follows:
1. Central Java (Rp16.4 trillion);
2. East Java (Rp13.6 trillion); and
3. West Java (Rp11.5 trillion).

Sedangkan untuk provinsi di luar pulau Jawa dengan penyaluran KUR yang tinggi adalah:
1. Sulawesi Selatan (Rp5,1 triliun); dan
2. Sumatera Utara (Rp4,3 triliun)

Meanwhile, the most dominant provinces outside of Java were as follows:
1. South Sulawesi (Rp5.1 trillion); and
2. North Sumatra (Rp4.3 trillion).

Penyaluran KUR Berdasarkan Sebaran Pulau Per 31 Desember 2016
KUR Disbursements by Island per 31st December 2016

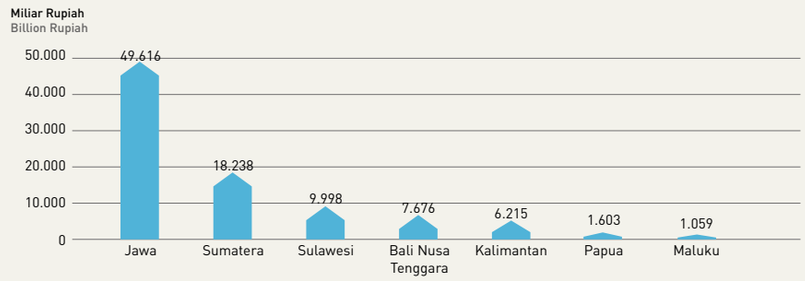

Penyaluran KUR per sektor masih didominasi oleh perdagangan 66%, sedangkan untuk sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri) terus meningkat, dengan porsi total penyaluran sebesar 22%.

By sector, KUR realisation was still dominated by the trade sector (66%), while the share of production-based sectors (agriculture, fisheries and industry) continued to rise, accounting for 22%.

Realisasi Penyaluran per Sektor Ekonomi
KUR Realisation by Economic Sector

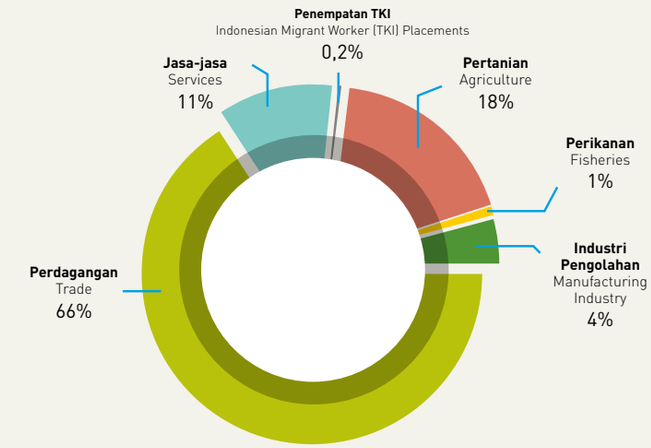

II.2.1.5 Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT Sektor Riil)

RDPT adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek yang berbasis kegiatan sektor riil.

II.2.1.5 Private Equity Funds (RDPT Real Sector)

Private Equity Funds (RDPT) are used to accumulate funds from professional investors for further investment by a dedicated Investment Manager in a securities portfolio based on real sector activities.

Sampai akhir 2016 jumlah Manajer Investasi yang mengelola RDPT sebanyak 22 MI (delapan MI mengelola RDPT Proyek dan Non Proyek) dengan total produk RDPT mencapai 73 Produk dan nilai dana kelolaan sebesar Rp17,64 Triliun.

As of year end 2016, a total of 22 Investment Managers were handling Private Equity Funds (RDPT) (eight investment managers handling project and non-project RDPT) that numbered 73 products worth Rp17.64 trillion.

Perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT Sektor Riil)
Private Equity Funds (RDPT Real Sector) Development

Tahun Year	RDPT Proyek Project RDPT		RDPT Non Proyek Non-Project RDPT		Jumlah RDPT Total RDPT	
	Jumlah RDPT Total RDPT	Total Nilai (Triliun Rp) Total Value (Rp trillions)	Jumlah RDPT Total Value (Rp trillions)	Total Nilai (Triliun Rp) Total Value (Rp trillions)	Jumlah RDPT Total Value (Rp trillions)	Total Nilai (Triliun Rp) Total Value (Rp trillions)
2010	9	1,24	78	26,83	87	28,07
2011	11	1,85	78	33,33	89	35,18
2012	20	3,01	72	31,08	92	34,09
2013	23	2,02	69	24,56	92	26,58
2014	23	4,09	53	23,98	76	28,07
2015	28	5,54	41	14,23	69	19,77
2016	41	8,52	32	9,12	73	17,64

RDPT Non Proyek menunjukkan penurunan baik jumlah RDPT maupun nilai dana kelolaannya, hal ini sejalan dengan implementasi dari POJK No. 37/2014. Sejak POJK tersebut diterbitkan, selama periode 2014-2016 telah terjadi penurunan jumlah RDPT Non Proyek sebesar 39,62% dan penurunan dana kelolaan RDPT Non Proyek 61,97%. Penurunan RDPT Non Proyek dibarengi dengan Kenaikan RDPT Proyek yang terus meningkat pada periode waktu yang sama.

Non-Project Private Equity Funds (RDPT) declined in terms of both the number of products available and the value of funds managed in line with promulgation of OJK Regulation (POJK) No. 37 of 2014. After enforcement of the regulation, the number of non-project RDPT fell 39.62% and the value of managed funds 61.97% during the period from 2014-2016. The decline was accompanied by a continuous increase of project RDPT during the same period.

Sampai akhir 2016, masih terdapat 32 RDPT Non Proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp9,12 triliun yang wajib dibubarkan paling lambat akhir 2017.

At the end of 2016, a total of 32 non-project RDPT remained, valued at Rp9.12 trillion, which must be redeemed no later than 2017.

Kondisi RDPT Non-Proyek di 2016
Non-Project RDPT Remained in 2016

Jenis RDPT Private Equity Fund	Tahun 2016		
	Tercatat Recorded	Telah Memiliki Dana Kelolaan With a Managed Fund	Nilai (Rp Miliar) Value (Rp billions)
A. Proyek Project	25	11	Rp 2.000
- Infrastruktur Infrastructure	3	1	100
- Multisektoral Multi-sectoral	11	4	535
- Properti Property	10	6	1.365
- Pembiayaan Mikro Microfinancing	1	-	-
B. Tax Amnesty	5	-	-

Selama 2016, terdapat 30 RDPT yang dicatatkan OJK. Dari jumlah tersebut, 11 RDPT telah memiliki dana kelolaan dengan total dana kelolaan sebesar Rp2,00 triliun.

In 2016, OJK recorded 30 Private Equity Funds (RDPT), of which 11 already had a managed fund totalling Rp2.00 trillion.

RDPT Berdasarkan Sektor
RDPT by Sector

Sektor Sector	Tahun 2015		Tahun 2016	
	Nilai (Rp Miliar) Value (Rp billions)	Persentase (%)	Nilai (Rp Miliar) Value (Rp billions)	Persentase (%)
Telekomunikasi	341	7%	1.459	18%
Properti	1.530	31%	3.553	43%
Pembiayaan UKM	471	10%	720	8%
Infrastruktur	969	20%	1.110	13%
Multisektoral	1.609	32%	1.490	18%
Total	**4.921**	**100%**	**8.334**	**100%**

Sektor properti menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan pendanaan RDPT, yaitu sebesar Rp3,55 triliun atau 43% dari total seluruh dana kelolaan RDPT Proyek, selanjutnya diikuti oleh sektor multisektoral sebesar Rp1,49 triliun (18%) dan sektor telekomunikasi sebesar Rp1,46 triliun (18%).

The property sector received most RDPT funding, totalling Rp3.55 trillion or 43% of the total managed funds of project RDPT, followed by multi-sectoral RDPT with Rp1.49 trillion (18%) and the telecommunications sector with Rp1.46 trillion (18%).

II.2.2 Penguatan Kapasitas Sektor Jasa Keuangan

II.2.2.1 Kebijakan OJK Dalam Rangka Relaksasi Sektor Jasa Keuangan dalam Mengahadapi Kondisi Ekonomi yang Kurang Stabil

Kebijakan Relaksasi pada Sektor Perbankan

OJK menerbitkan kebjakan stimulus di 2015, secara khusus pada sektor perbankan melalui penerbitan POJK No.11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan POJK No.12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kedua POJK tersebut ditetapkan berlaku dua tahun dan berakhir di 2017.

Dalam kondisi pemulihan dan selama masa relaksasi, OJK mengeluarkan beberapa kebijakan yang bersifat memberi insentif bagi perbankan dalam hal pembukaan jaringan kantor. Regulasi dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain:

1. POJK Nomor 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank.
2. SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti.

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Perubahan regulasi tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi yang akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit dan akhirnya meningkatkan daya

II.2.2 Strengthening Financial Services Sector Capacity

II.2.2.1 OJK Relaxation Policy for the Financial Services Sector to Overcome Economic Instability

Relaxation Policy in the Banking Sector

OJK released stimulus policy in 2015, specifically targeting the banking sector, through OJK Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2015 on Prudential Regulations to Stimulate the National Economy for Commercial Banks and OJK Regulation (POJK) No. 12/POJK.03/2015 on Prudential Regulations to Stimulate the National Economy for Sharia Banks and Sharia Business Units. Both regulations are effective for two years until 2017.

During the recovery and while the relaxation period is active, OJK also promulgated several policies to incentivise the banking sector to expand its office network.
Accordingly, OJK issued a regulation and corresponding circular letter as follows:

1. OJK Regulation (POJK) No. 2/POJK.03/2016 concerning Office Network Development at Sharia Banks to Stimulate the National Economy for Banks.
2. Circular Letter (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2016 concerning Opening a Commercial Bank Office Network based on Core Capital.

The circular letter represents the implementation regulations for OJK Regulation (POJK) No. 6/POJK.03/2016 concerning the Business Activities and Office Network based on Bank Core Capital. The amendment to the regulation is expected to enhance efficiency and, thus, lower lending rates in order to ultimately

saing bank dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Melalui insentif berupa kemudahan pembukaan jaringan kantor, bank diharapkan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bank dan meningkatkan ekspansi penyaluran kredit kepada UMKM/UMK. Ketentuan dari SEOJK ini diantaranya:

a. Batasan rasio BOPO yang memperoleh insentif:
   1. bagi bank BUKU 4 adalah bank yang memiliki:
      a) rasio BOPO lebih rendah dari 70% dan NIM kurang dari 4,5%; dan
      b) rasio BOPO lebih rendah dari 75% dan NIM kurang dari 4%.
   2. bagi bank BUKU 3 adalah bank yang memiliki rasio BOPO lebih rendah dari 75%.
   3. bagi bank BUKU 1 dan BUKU 2 adalah bank yang memiliki rasio BOPO lebih rendah dari 85%.
b. Batasan rasio NIM yang memperoleh insentif adalah bank yang memiliki rasio NIM lebih rendah dari 4,5%, yang berlaku bagi BUKU 1, BUKU 2, dan BUKU 3.
c. Semakin rendah rasio BOPO dan semakin rendah rasio NIM maka semakin besar insentif penurunan perhitungan alokasi modal inti untuk membuka jaringan kantor yang dapat diperoleh oleh bank tersebut.

Kebijakan Relaksasi pada Industri Keuangan Non Bank

Pada tahun 2015, dampak kondisi keuangan global mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat utang, pasar investasi surat berharga syariah yang dimiliki perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan pasar investasi surat berharga bagi dana pensiun menunjukkan nilai yang tidak wajar. Sehubungan dengan hal tersebut, diberikan stimulus bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun dengan menerbitkan peraturan sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
2. SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga bagi Dana Pensiun.

Sepanjang 2016, Kondisi keuangan global sudah menunjukkan nilai yang wajar bagi pasar investasi surat utang, pasar investasi surat berharga syariah, dan pasar Investasi Surat Berharga Bagi Dana Pensiun sehingga dilakukan pencabutan ketiga peraturan tersebut yaitu:

1) SEOJK Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Investasi Surat Utang Dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;
2) SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015

improve bank competiveness in the face of the ASEAN Economic Community. Through incentives, in the form of facilitating office network expansion, the banks are expected to improve management efficiency and extend lending to MSMEs and MSEs.

The main provisions of the circular letter are as follows:

a. Limitations on the BOPO efficiency ratio as an incentive:
   1. For BUKU 4 banks with a:
      a) BOPO efficiency ratio of below 70% and NIM of less than 4.5%; and
      b) BOPO efficiency ratio of below 75% and NIM of less than 4%.
   2. For BUKU 3 banks with a BOPO efficiency ratio of less than 75%.
   3. For BUKU 1 and 2 banks with a BOPO efficiency ratio of less than 85%.
b. Limitations on the NIM as an incentive for banks with a NIM ratio of less than 4.5%, effective for BUKU 1, 2 and 3 banks.
c. Lower NIM and BOPO efficiency ratios will lead to larger incentives in terms of allocating core capital to expand the office network by banks.

Relaxation Policy for the Nonbank Financial Industry

In 2015, inauspicious global financial dynamics led to an unfair market value for debt security investments, sharia securities investment market for the insurance industry and reinsurance industry, as well as the securities investments for the pension funds industry. Consequently, stimuli were offered to the insurance industry, reinsurance industry and pension funds industry through the following regulations:

1. Circular Letter (SEOJK) No. 24/SEOJK.05/2015 concerning Assessments of Bond Investments and Adjustments for Risk-Based Capital Adequacy for Insurance and Reinsurance Companies;
2. Circular Letter (SEOJK) No. 25/SEOJK.05/2015 concerning Assessments of Sharia Security Investments and Fund Calculation to Anticipate the Risk of Wealth Management Failure and/or Sharia Insurance and Reinsurance Company Obligations.
3. Circular Letter (SEOJK) No. 26/SEOJK.05/2015 concerning Assessments of Securities for the Pension Funds Industry.

In 2016, global financial conditions began to show a fair market value for the debt securities investment market, the sharia securities investment market and the securities investment market for the pension funds industry, hence all three aforementioned circular letters were repealed as follows:

1) Circular Letter (SEOJK) No. 21/SEOJK.05/2016 to repeal Circular Letter (SEOJK) No. 24/SEOJK.05/2015 concerning Assessments of Bond Investments and Adjustments for Risk-Based Capital Adequacy for Insurance and Reinsurance Companies;
2) Circular Letter (SEOJK) No. 22/SEOJK.05/2016 to repeal Circular Letter (SEOJK) No. 25/SEOJK.05/2015 concerning Assessments of Sharia Security Investments and Fund Calculation to Anticipate

Tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah Dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

3. SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga bagi Dana Pensiun.

II.2.2.2 Kebijakan OJK Dalam Rangka Penguatan Lembaga Jasa Keuangan

Kebijakan Penguatan Lembaga Jasa Keuangan Sektor Perbankan

OJK senantiasa mengeluarkan berbagai kebijakan agar dapat memperkuat ketahanan LJK sehingga mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi. Sepanjang 2016, OJK mengeluarkan beberapa kebijakan terkait permodalan dan manajemen risiko secara khusus bagi sektor perbankan diantaranya:

1. POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

   Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank sehingga Bank mampu menyerap potensi kerugian dengan lebih baik lagi akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan kredit yang berlebihan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecukupan modal Bank dengan standar internasional. Penyesuaian yang dilakukan mengacu pada "*Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System*" atau yang lebih dikenal dengan Basel III.

   Untuk memastikan kualitas atau tingkat permodalan Bank memadai, dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio modal inti dan rasio modal inti utama. Selain itu, Bank diwajibkan untuk membentuk tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer*, dan tambahan modal berupa *Capital Surcharge* khusus bagi Bank Sistemik.
2. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal bisnis perbankan, Bank harus mampu beradaptasi agar dapat menghadapi risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank diharapkan dapat menerapkan manajemen risiko sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basel Committee on Banking Supervision*. Melalui penerapan manajemen risiko, Bank diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan perbankan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh OJK.

the Risk of Wealth Management Failure and/or Sharia Insurance and Reinsurance Company Obligations.

3. Circular Letter (SEOJK) No. 23/SEOJK.05/2016 to repeal Circular Letter (SEOJK) No. 26/SEOJK.05/2015 concerning Assessments of Securities for the Pension Funds Industry.

II.2.2.2 OJK Policy to Strengthen Financial Services Institutions

Policy to Strengthen Financial Services Institutions in the Banking Sector

OJK regularly institutes policy to strengthen the resilience of financial services institutions in anticipation of the risks faced. In 2016, OJK promulgated several policies concerning capital and risk management specifically for the banking sector as follows:

1. OJK Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 concerning Mandatory Minimum Capital Requirements for Commercial Banks

   Improving the quality and quantity of capital to ensure a Bank can better absorb potential losses due to financial and economic crises or to excessive credit growth, an adjustment was needed to the capital requirements and instruments as well as calculation of capital adequacy based on international standards. The adjustment referred to the "Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems", otherwise known as Basel III.

   To ensure adequate bank capital quality or quantity, the core capital ratios were adjusted. Furthermore, the Banks are now required to establish additional capital in the form of a Capital Conservation Buffer and Countercyclical Buffer, as well as a Capital Surcharge for systemically important banks (SIB).

2. OJK Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and OJK Regulation (POJK) No. 38/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Information Technology at Commercial Banks.

Confronting the rapid advancement of the internal and external business environment of the banking industry, the Banking Industry must be able to adapt to mitigate the inherent risks of the intermediation function. Banks are therefore expected to apply risk management in line with the recommendations issued by the Bank for International Settlements (BIS) through the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Through risk management, Banks are expected to measure and mitigate the risks faced in their operating activities. Risk management in the banking sector will support the effectiveness of the risk-based bank supervision framework applied by OJK.

Bank dituntut pula untuk mengantisipasi kebutuhan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang memadai dalam rangka menghadapi implementasi kerangka Basel (*Basel framework*). Mengingat penyelenggaraan TI dapat menimbulkan berbagai risiko dan untuk melindungi kepentingan Bank dan juga nasabah, Bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sehingga Bank dapat melakukan pengendalian dari kemungkinan penambahan risiko yang terjadi. Penetapan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko. Dengan ketentuan ini, Bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

The banks are also required to anticipate their requirement for information technology to implement the Basel framework. Considering that IT contains various risks and also to protect the interests of the Bank and its customers, Banks are required to apply effective risk management to control the possibility of additional risks that might emerge. The application of this regulation represents a minimum standard that must be attained by banks in Indonesia concerning risk management. Through this regulation, Banks are expected to implement all operating activities in an integrated risk-management system that is accurate and comprehensive.

Kebijakan Penguatan Lembaga Jasa Keuangan Industri Keuangan Non Bank

Sepanjang 2016, OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Penetapan POJK tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, menciptakan usaha pergadaian yang sehat, dan memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pergadaian.

Policy to Strengthen Financial Services Institutions in the Nonbank Financial Industry

In 2016, OJK enacted OJK Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 concerning Pawnbrokerage. The regulation was designed to increase financial inclusion amongst the middle and working classes as well as micro, small and medium enterprises (MSME), to facilitate access to loans, provide a legal foundation for OJK supervision, provide legal assurance in the pawnbroker industry, create a healthy pawnbroker industry and provide consumer protection in the pawnbroker industry.

Secara umum, POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian mengatur hal permodalan, persyaratan dan prosedur perizinan usaha, kegiatan usaha yang diperkenankan, pelaporan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengawasan dan pemeriksaan perusahaan pergadaian, dan pengenaan sanksi bagi perusahan pergadaian yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut.

In general, OJK Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 concerning Pawnbrokerage regulates capital, the requirements and operating license procedure, permitted operating activities, reporting, mergers, consolidation, acquisitions and liquidation or dissolution, supervision and inspections as well as sanctions for violations of the POJK.

Dalam prosedur perizinan usaha, terdapat ketentuan yang berbeda bagi pelaku usaha pergadaian yang sudah eksisting sebelum POJK diundangkan dan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha setelah POJK diundangkan, yaitu:

a. Bagi pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum Peraturan ini diundangkan diberikan opsi berupa permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran diajukan kepada OJK paling lama dua tahun sejak Peraturan ini diundangkan. Mekanisme pendaftaran memberikan kemudahan bagi pelaku usaha pergadaian mengingat persyaratan bentuk badan hukum, permodalan dan lingkup wilayah usaha dikecualikan serta persyaratan administratif yang disampaikan relatif lebih mudah dan sedikit. Bagi pelaku usaha pergadaian yang telah memperoleh pendaftaran dari OJK, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian swasta dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Peraturan ini diundangkan.
b. Bagi pelaku usaha pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha setelah Peraturan OJK ini diundangkan harus mengajukan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian kepada OJK.

In terms of the operating license procedure, there are several different provisions for existing pawnbrokers operating before the regulation was enacted and for pawnbrokers operating after the POJK was enacted as follows:

a. Pawnbrokers operating prior to the enactment of this regulation were given an option to register. The registration application could be submitted to OJK no later than two years after enactment of the new regulation. The registration mechanism provides greater convenience for pawnbrokers because the incorporation, capital and business area requirements have been omitted and the administrative requirements were simplified and streamlined. Pawnbrokers already registered at OJK are required to apply for an operating license as a private pawnbroker no later than three years after the regulation was enacted.
b. Pawnbrokers established after enactment of this OJK regulation are required to apply to OJK for an operating license as a Pawnbroker.

II.2.2.3 Kebijakan OJK dalam rangka Mendukung *Tax Amnesty*

Dalam upaya mendukung penerapan Undang-Undang RI No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat Indonesia, OJK menerbitkan dua POJK yaitu POJK No. 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust)* dan POJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. Kedua POJK ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* melalui Perbankan dan Pasar Modal

POJK No. 25/POJK.03/2016 merupakan landasan hukum bagi Bank untuk menerima nasabah peserta *tax amnesty* baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan. Dana repatriasi yang masuk baik dari dalam dan luar negeri, ditempatkan oleh Pemerintah di 77 bank persepsi sebagai penerima uang tebusan amnesti pajak, yang terdiri dari 52 Bank Umum dan 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Masuknya dana repatriasi dapat melalui kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*trust*). Kegiatan ini merupakan kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip harta *trust* berdasarkan perjanjian tertulis antara bank sebagai penerima dan pengelola harta *trust* (*trustee*) dengan penitip harta *trust* (*settlor*) untuk kepentingan penerima manfaat. Kegiatan trust wajib dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari *Settlor*. Bank yang ditunjuk pemerintah bertindak sebagai agen pembayar (*paying agent*) dengan kegiatan sebagai berikut: (i) Membuka dan menutup rekening untuk dan atas nama *Settlor*, (ii) Menerima dan menyimpan dana ke dalam rekening *Settlor*, (iii) Melakukan pembayaran dari rekening *Settlor* kepada *Beneficiary* dan/atau pihak lain, (iv) Mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dokumen terkait dengan rekening *Settlor*, dan/atau (v) Melakukan kegiatan lain dalam rangka menjalankan fungsi sebagai agen pembayar (*paying agent)*.

Pada industri Pasar Modal, POJK Nomor 26/POJK.04/2016 merupakan bentuk komitmen konkret OJK untuk mendukung kebijakan nasional Pengampunan Pajak melalui Pasar Modal serta memberikan landasan hukum yang kokoh serta mampu menjawab beberapa *concern* masyarakat tentang produk investasi di bidang Pasar Modal sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Pokok-pokok isi POJK adalah sebagai berikut: (i) Penyederhanaan proses pembukaan rekening Efek oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan Pengampunan Pajak; (ii) Relaksasi kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama; (iii) Relaksasi berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Kontrak Pengelolaan Dana/KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar; (iv) Selama dana nasabah RDPT maupun KPD belum diinvestasikan

II.2.2.3 OJK Support for Tax Amnesty

Supporting implementation of Act No. 11 of 2016 concerning the Tax Amnesty that aims to boost state revenues and stimulate economic growth, while raising awareness of and compliance to tax laws in Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) promulgated two regulations, namely OJK Regulation (POJK) No. 25/POJK.03/2016 as an amendment to OJK Regulation (POJK) No. 27/POJK.03/2015 on Bank Business Activity in the Form of Trust and OJK Regulation (POJK) No. 26/POJK.04/2016 regarding Capital Market Product Innovation to support Tax Amnesty Implementation. Both OJK regulations form a legal basis to implement the tax amnesty through the banking industry and capital market.

OJK Regulation (POJK) No. 25/POJK.03/2016 represents a legal foundation for Banks to receive tax amnesty participants, both corporations and individuals, as customers. Repatriated funds from abroad and within the country shall be placed by the Government at 77 perception banks as receivers of the repatriated funds, consisting of 52 commercial banks and 25 regional banks. Repatriated funds can be received through trust business activities, which represent custody with management activities for the wealth of the beneficiary based on a written agreement between the bank as the trustee and the settlor in the interest of the beneficiary. Trust activities must be conducted based on a written instruction from the settlor. Banks are appointed by the Government as the paying agent, consisting of the following salient activities: (i) opening and closing accounts on behalf and in the name of the settlor; (ii) receiving and placing funds into the settlor's account; (iii) making payments from the settlor's account to the beneficiary and/or other party; (iv) recording, documenting and administrating all documentation pertaining to the settlor's account; and/or (v) conduct other activities as a paying agent.

In terms of the capital market, OJK Regulation (POJK) No. 26/POJK.04/2016 represents a concrete form of commitment to the national tax amnesty through the capital market, while providing a solid legal basis and addressing several public concerns about investment products on the capital market as part of the tax amnesty implementation. The main provisions of the OJK Regulation (POJK) include: (i) simplification of the process to open securities accounts by taxpayers who have obtained a tax amnesty certificate; (ii) relaxation of requirements concerning the presence of target companies for private equity investment funds (RDPT), from the time when the RDPT is first registered until one year thereafter; (iii) adjustments to the minimum investment amount required from customers of Customised Securities Portfolio Management (discretionary funds - KPD) from Rp10 billion to Rp5 billion; (iv) while the funds belonging to RDPT or KPD customers have not been invested in a target company or securities portfolio, investment managers of private

pada Perusahaan Sasaran atau Portofolio Efek, Manajer Investasi yang mengelola RDPT diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 10% dari NAB serta KPD diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 25% dari dana Nasabah KPD; (v) Penyederhanaan dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Dana Investasi Real Estate, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP); (vi) Produk investasi di bidang Pasar Modal yang diatur dalam POJK ini tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi konvensional, tetapi dapat juga digunakan sebagai instrumen investasi berbasis syariah; (vii) POJK ini memberikan keleluasaan bagi Pemodal untuk tetap menginvestasikan dananya pada produk investasi di Pasar Modal, meskipun jangka waktu wajib (holding period) yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berakhir; (viii) Batas waktu penempatan dana pada deposito bagi RDPT yang belum melakukan investasi pada perusahaan sasaran yang semula paling lama enam bulan diperpanjang menjadi paling lama satu tahun sejak RDPT dicatatkan.

equity investment funds (RDPT) are granted discretion to place the funds in a term deposit at the Perception Bank, for an amount that represents more than 10% of the NAV. Investment managers of discretionary funds (KPD) are granted discretion to place the funds in a term deposit at the Perception Bank, for an amount that represents more than 25% of the funds; (v) simplification of the documents pertaining to the Registration Statements of Collective Investment Contract Asset-Backed Securities, Collective Investment Contract Real Estate Investment Trust, and Asset-Backed Securities with a Participant Letter (EBA SP); (vi) capital market investment products regulated pursuant to this POJK may be used not only as conventional investment instruments but also as sharia-compliant investment instruments; (vii) the POJK also provides flexibility to investors to continue investing their funds in capital market investment products even if the holding period required by the Tax Amnesty Law has ended; (viii) the maximum period for fund placements in term deposits for private equity investment funds not invested in a target company has been extended from six months to one year after registration.

Kontribusi SJK Terhadap Program Tax Amnesty
Financial Service Contribution to Tax Amnesty Program

Dalam rangka mengawal implementasi atas POJK tersebut, OJK membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus *Tax Amnesty* yang melibatkan seluruh jajaran fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Satgas bertugas memformulasikan kebijakan strategis yang mendukung program Tax Amnesty seperti instrumen apa yang dapat dipilih oleh wajib pajak serta memperjelas langkah-langkah dalam melakukan investasi dana repatriasi pajak. Selain

Overseeing implementation of the POJK, the Financial Services Authority (OJK) established a special Tax Amnesty Task Force employing the full gamut of financial services sector supervision and regulation. The task force is charged with formulating strategic policies to support the tax amnesty, such as the instruments available to taxpayers, as well as explaining repatriated fund investments. In addition, the task force also actively conducts socialisation activities

itu, Satgas juga aktif dalam melakukan sosialisasi kepada IJK yang ditunjuk sebagai *payment gateway* maupun bank persepsi.

Sampai akhir 2016, dana repatriasi amnesti pajak yang masuk di sektor jasa keuangan adalah sebesar Rp98,79 milliar. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan pada sektor perbankan (73,31%), diikuti oleh pasar modal (17,45%) dan non keuangan (9,24%). Berikut detail komposisi dana repatriasi *tax amnesty* yang telah masuk di sektor jasa keuangan:

to financial services institutions appointed as payment gateways or perception banks.

Per yearend 2016, repatriated funds from the tax amnesty entering the financial services sector totalled Rp98.79 billion, the majority of which was placed in the banking sector (73.31%), followed by the capital market (17.45%) and the nonbank financial industry (9.24%). The composition of repatriated funds from the tax amnesty entering the financial services sector is as follows:

Komposisi Dana Repatriasi *Tax Amnesty* Pada Sektor Jasa Keuangan
Per 31 Desember 2016
Composition of Tax Amnesty Repatriated Funds Entering the Financial Services Sector
as at 31 December 2016

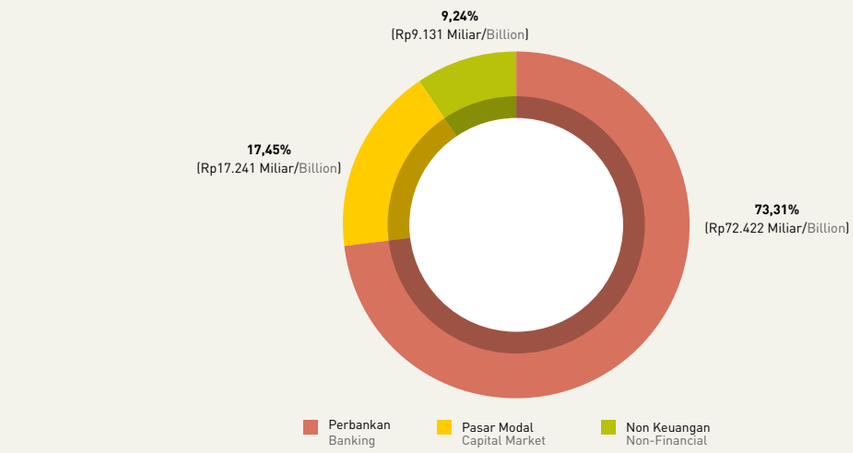

II.2.2.4 Kebijakan OJK dalam Mendukung Pengembangan *Fintech*

Di tingkat global, perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan dalam mengembangkan layanan jasa keuangan berbasis teknologi atau dikenal dengan nama *financial technology* (*Fintech*). Arner et al., (2015) membagi perkembangan industri *Fintech* menjadi tiga fase. Fase pertama, yaitu *Fintech* 1.0 (1866-1987) yang ditandai dengan kegiatan analog yang saling terhubung dan dipelopori perusahaan telekomunikasi. Fase kedua, yaitu *Fintech* 2.0 (1987-2008) di mana perkembangan *Fintech* didominasi oleh digitalisasi kegiatan analog terutama oleh lembaga jasa keuangan dengan produk inovasi seperti *Automated Teller Machines* (ATM) dan *internet banking*. Fase ketiga (2008 – sekarang) dipelopori perusahaan rintisan (*start-up*). Fase ini dibagi menjadi *Fintech* 3.0 yang berkembang di negara maju dan *Fintech* 3.5 yang berkembang di negara berkembang.

II.2.2.4 Financial Technology Policy

Globally, technological development is currently being exploited to advance technology-based financial services, otherwise known as financial technology or Fintech. Arner et al. (2015) divided Fintech industry development into three distinct stages. The first stage, namely Fintech 1.0 (1866-1987), was characterised by interconnected analogue activities and spearheaded by telecommunications companies. The second stage, Fintech 2.0 (1987-2008), was dominated by the digitalisation of existing analogue Fintech development and pioneered by financial services institutions through product innovation such as automated teller machines (ATM) and internet banking. The third stage (2008-present day) has been led by start-ups and is itself divided into two, namely Fintech 3.0 in advanced countries and Fintech 3.5 in developing countries.

Perkembangan *Fintech*
The Evolution of Fintech

Periode | Periode	1866 - 1987	1987 - 2008	2008 - Sekarang	
Versi | Versi	Fintech 1.0	Fintech 2.0	Fintech 3.0	Fintech 3.5
Wilayah | Region	Seluruh Dunia Global	Seluruh Dunia Global	Negara Maju Advanced Countries	Negara Berkembang Developing Countries
Pelaku Utama | Main Players	Perusahaan Telco Telecommunications Companies	Lembaga Jasa Keuangan (e.g. Digital Banking) Financial Services Institutions	Perusahaan *Start-up* Start-Up Companies	
Motivasi Perubahan | Motivation for Change	Penghubung kegiatan analog Linking analogue activities	Digitalisasi kegiatan analog Digitalisation of analogue activities	Financing Gap pasca krisis keuangan 2008 Post 2008 global financial crisis financing gap	Manfaat Ekonomi Economic benefits

Fintech hadir memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dilayani, maupun yang tidak ingin menggunakan jasa industri keuangan tradisional. Kondisi masyarakat yang tidak dapat dilayani industri jasa keuangan tradisional, antara lain disebabkan adanya keraguan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain dalam menyalurkan kredit pasca krisis ekonomi global, serta sulitnya penyediaan kredit oleh perbankan yang melakukan *deleveraging*, mendorong kehadiran *Fintech*. Sementara itu, kondisi masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa industri keuangan tradisional antara lain disebabkan adanya pandangan bahwa *Fintech* mampu mengubah model industri keuangan, yang selama ini dimonopoli oleh perbankan, menjadi industri yang lebih demokratis, transparan, murah, dan mampu melayani lebih banyak konsumen. Selain itu, *Fintech* dianggap mampu menurunkan biaya program inklusi keuangan menjadi lebih efisien sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen di daerah terpencil .

Industri *Fintech* berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terlihat dengan meningkatnya investasi yang dilakukan perusahaan besar terhadap industri *Fintech*. Di tingkat global, perkembangan *Fintech* tumbuh dari 1.379 perusahaan pada Triwulan I-2016 menjadi mencapai sekitar 2.056 perusahaan pada Triwulan IV-2016. Perusahaan tersebut terdiri dari 16 kategori yang tersebar di 59 negara dengan total penyaluran dana sebesar USD58 miliar (Venture Scanner, 2016).

Fintech arrived to meet the needs of the unbanked as well as those unwilling to use traditional financial industry services. The large potential market of the unbanked, due to prudent lending and more stringent lending standards applied by banks and other financial institutions after the global financial crisis as well as difficulties encountered by the banks in terms of disbursing loans while deleveraging, precipitated the emergence of Fintech. Meanwhile, communities are unwilling to use traditional financial industry services because of the view that Fintech could change the financial industry's model, which has hitherto been dominated by the banking industry, into a more democratic, transparent and inexpensive industry that could serve many consumers. In addition, Fintech is expected to reduce the cost of financial inclusion programs through greater efficiency, thereby reaching more consumers in remote areas.

The Fintech industry has developed with rapidity in recent years, as evidenced by the explosion of investment in Fintech by large companies. Globally, Fintech grew from 1,379 firms to around 2,056 in 2016, consisting of 16 different categories spread over 59 countries and with disbursed funds totalling USD58 billion (Venture Scanner, 2016).

Fintech di Tingkat Global
Fintech at The Global Level

Jumlah Perusahaan Fintech Indonesia
Total Fintech Companies in Indonesia

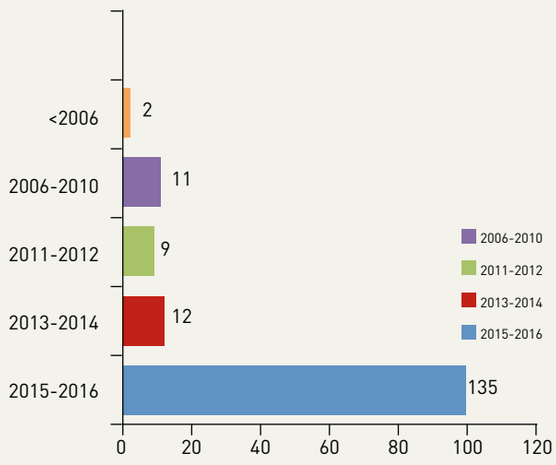

Profil Perusahaan Fintech berdasarkan Sektor
Fintech Company Profile by Sector

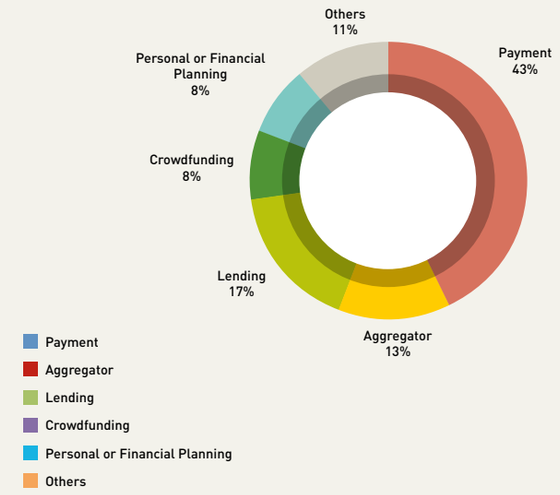

Fintech di Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat. Asosiasi *Fintech* Indonesia (2016) mencatat pertumbuhan jumlah Penyelenggara *Fintech start-up* 2016 meningkat hampir tiga kali lipat dari 51 perusahaan pada triwulan I-2016 menjadi 135 perusahaan pada triwulan IV-2016. Jenis *Fintech* di Indonesia didominasi oleh *Fintech payment* dan *lending*.

Di Indonesia, *Fintech* yang lebih dulu berkembang adalah kelompok *Fintech* 2.0 yang dikembangkan oleh industri jasa keuangan, disusul dengan perkembangan *Fintech* 3.0 dan *Fintech* 3.5 oleh perusahaan start-up sampai saat ini. Dalam hal regulasi, *Fintech* 2.0 telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan mengikuti peraturan di bidang sektor jasa keuangan yang berlaku. Sementara itu, *Fintech* 3.0-3.5 perlu memperhatikan beberapa regulasi terkait, yang mencakup aspek penyelenggaraan sektor jasa keuangan, produk, teknologi informasi, hukum, dan sebagainya.

Fintech has also enjoyed rapid development in Indonesia. The Indonesia Fintech Association (2016) recorded growth of Fintech start-ups in 2016, showing a three-fold increase from 51 to 135 Fintech firms in 2016. Payment and lending dominate Fintech in Indonesia.

In Indonesia, Fintech development began with Fintech 2.0, pioneered by the financial services industry, followed by Fintech 3.0 and 3.5, which has been spearheaded by start-ups. In terms of regulations, Fintech 2.0 is regulated and supervised by the Financial Services Authority (OJK) pursuant to prevailing financial services sector regulations. Fintech 3.0 and 3.5, however, demand greater attention concerning several related regulations, covering financial services sector management, the products, information technology, legal aspects and so on.

Ekosistem dan Regulasi *Fintech* di Indonesia
FinTech Ecosystem and Regulation in Indonesia

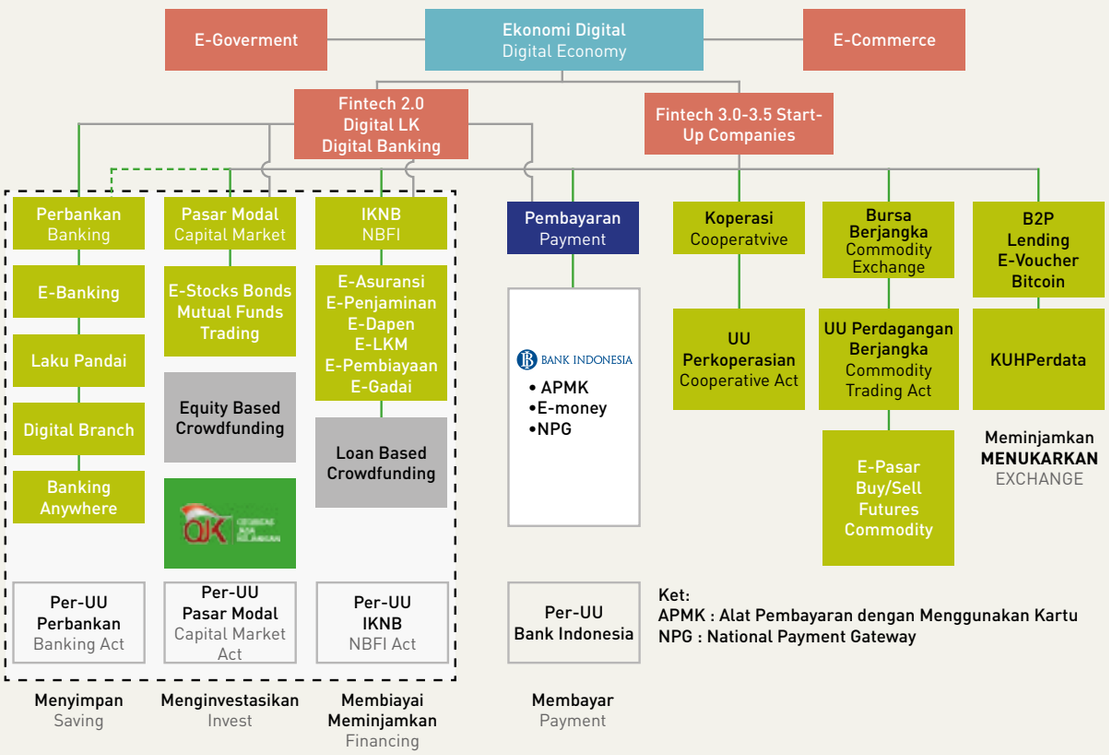

Untuk mendukung perkembangan *Fintech* di Indonesia, OJK menerbitkan peraturan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. POJK tersebut memuat ketentuan terkait: (i) Penyelenggara yang meliputi aturan tentang badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, skema pendaftaran dan perizinan, dan kualifikasi SDM, (ii) Pengguna, (iii) Perjanjian Para Pihak, (iv) Mitigasi Risiko, (v) Tata Kelola Sistem Informasi, (vi) Edukasi dan Perlindungan Pengguna, (vii) Tanda Tangan Elektronik, (viii) Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, (ix) Larangan, (x) Laporan Berkala, dan (xi) Sanksi. Aturan teknis dari POJK ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK (SE-OJK). Regulasi ini diharapkan mendukung pertumbuhan industri *Fintech P2P lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pelosok nusantara dan tidak atau belum dapat dilayani secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.

Supporting Fintech development in Indonesia, OJK promulgated legislation concerning IT-based Lending Services (LPMUBTI) through OJK Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016. The OJK regulation contains provisions relating to: (i) Fintech providers, including regulations on legal entities, ownership, capital, business activities, credit ceilings, registration and licensing schemes as well as HR qualifications; (ii) users; (iii) agreements; (iv) risk mitigation; (v) IS governance; (vi) consumer education and protection; (vii) electronic signatures; (viii) KYC principles; (ix) restrictions; (x) periodic reports; and (xi) sanctions. The technical provisions will be contained in an OJK circular letter (SE-OJK). The regulation is expected to support growth of the Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending industry as a new financing alternative for communities scattered throughout the Indonesia archipelago who are yet to enjoy optimal services from conventional financial services industries, including banks, the capital market, finance companies and venture capital firms.

POJK ini sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam rangka mendukung program Nawacita, Program Gerakan 1.000 *start-up*, dan Paket Kebijakan Ekonomi 14 yang dicanangkan oleh pemerintah. POJK ini juga menerapkan ketentuan mengenai pendaftaran dan perizinan agar sesuai dengan semangat *regulatory sandbox* di berbagai negara. Penyelenggara diwajibkan melakukan pendaftaran sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin. Dalam masa pendaftaran ini, *Fintech* dapat melakukan aktivitas secara penuh dengan mendapat pendampingan dari OJK yang secara terus menerus melakukan evaluasi. Paling lama satu tahun setelah terdaftar, *Fintech* wajib mengajukan permohonan memperoleh izin kepada OJK.

The OJK regulation is also consistent with the various efforts undertaken by the Team to Accelerate Regional Financial Access (TPAKD), and support the Nawacita Program, the 1,000 Start-Ups Movement and the 14th Economic Policy Package launched by the Government. The OJK regulation also applies provisions concerning registration and licensing in pursuance of the spirit of the regulatory sandbox implemented in various other countries. Fintech providers are required to register before applying for a license. During the registration process, however, providers may conduct a full scope of activities under continuous OJK supervision, including evaluations. No later than one year after successful registration, however, Fintech providers are required to apply to OJK for a license.

Untuk melindungi kepentingan konsumen, POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini mewajibkan Penyelenggara antara lain menyediakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan, melakukan mitigasi risiko, serta menempatkan *data center* di dalam negeri. Guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, pemberian jumlah pinjaman dibatasi maksimal Rp2.000.000.000 dalam mata uang Rupiah. Melalui peraturan ini, OJK juga memfasilitasi dukungan bagi perkembangan inovasi ekonomi digital di masa mendatang dengan menyiapkan infrastruktur berupa *Fintech Incubator Center*.

To protect consumer interests, the new regulation requires Fintech providers open escrow accounts and virtual accounts in the banking sector, conduct risk mitigation as well as establish a data centre within the country. In the interest of protecting financial system stability, loans are capped at Rp2,000,000,000 and denominated in rupiah. Through this regulation, the Financial Services Authority (OJK) also supports and facilitates future digital economy innovation by preparing the necessary infrastructure in the form of a Fintech Incubator Centre.

II.2.3 Pengembangan Produk dan Layanan SJK serta Peningkatan Literasi Keuangan

II.2.3 Financial Services Sector Product and Services Development as well as Increased Financial Literacy

II.2.3.1 Survei Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

II.2.3.1 Financial Literacy and Inclusion Survey 2016

Kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur secara fisik, namun juga menyangkut pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penyokong

Economic headway is not only determined by physical infrastructure development but also by the quality of human resources as the cornerstone of development. When advancing the economy, the

utama pembangunan. Dalam memajukan perekonomian, kualitas sumber daya manusia seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan dengan melakukan berbagai program dan upaya peningkatan kompetensi masyarakat.

Dalam sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh tingkat literasi keuangan masyarakat dengan harapan masyarakat mampu dan terampil mengelola keuangannya serta membentengi diri dari barbagai kejahatan keuangan. Masyarakat yang *well literate* (melek keuangan) lebih mudah memahami dan mengerti mengenai seluk-beluk sektor jasa keuangan yang pada akhirnya akan mengoptimalkan produk dan layanan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Semakin banyak masyarakat yang *financially inclusive*, maka pembangunan ekonomi akan lebih luas dinikmati oleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan masyarakat terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri dalam implementasinya. Untuk menyusun strategi dimaksud, pada tahun 2013, OJK melakukan survei nasional terhadap 8.000 responden yang tersebar di 40 wilayah pada 20 provinsi. Hasil survei dimaksud menjadi masukan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang di dalamnya juga terdapat aspek inklusi keuangan, yang menjadi pedoman bagi OJK dan industri jasa keuangan dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

a. Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator bersama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan Indonesia. Berbagai program tersebut difokuskan kepada peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), keyakinan (*confidence*) dan sikap (*attitude*) serta perilaku (*behavior*) keuangan yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan keuangan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan 2013 (SNLK 2013), tingkat literasi keuangan Indonesia adalah sekitar 21,8% yang berarti dari 100 penduduk indonesia, terdapat 22 penduduk yang memiliki pemahaman literasi keuangan yang baik (*well literate*). Angka indeks literasi keuangan tersebut akan menjadi acuan bagi OJK dan PUJK dalam penyusunan program-program peningkatan literasi keuangan.

quality of human resources is paramount to all stakeholders through various programs and endeavours to enhance public competence.

In the financial sector, economic growth requires the support of financial literacy to ensure the public is adequately skilled to manage their finances and protect themselves from various financial misdeeds. A well-literate public is better equipped to understand the subtleties of the financial services sector, which will ultimately optimise the financial products and services available and, therefore, ameliorate public welfare. A financially inclusive public will help the community enjoy the broader benefits of economic development.

The OJK Act (No. 21) of 2011 mandates OJK to regulate and supervise the financial services industry, while simultaneously protecting the public interest when transacting in the financial services industry. Consumer protection encompasses aspects of financial literacy and inclusion that require their own implementation strategy. To that end, OJK conducted a national survey in 2013 using a sample of 8,000 respondents spread over 40 regions in 20 provinces. The results of the survey were used as inputs when formulating the Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI), which contains financial inclusion, as guidelines for the financial services industry when undertaking activities to improve financial literacy and inclusion in Indonesia.

a. Financial Literacy

OJK as regulator of financial services providers, organises various programs and activities to improve financial literacy in Indonesia. In general, the programs focus on enhancing financial knowledge, skills, confidence, attitudes and behaviour to improve the quality of the financial decision-making process.

According to the National Financial Literacy Survey in 2013 (SNLK 2013), the financial literacy index in Indonesia was around 21.8%, meaning that for every 100 residents, 22 were considered well literate. The Financial Literacy Index is used as a reference by OJK and financial services providers when preparing programs to improve financial literacy.

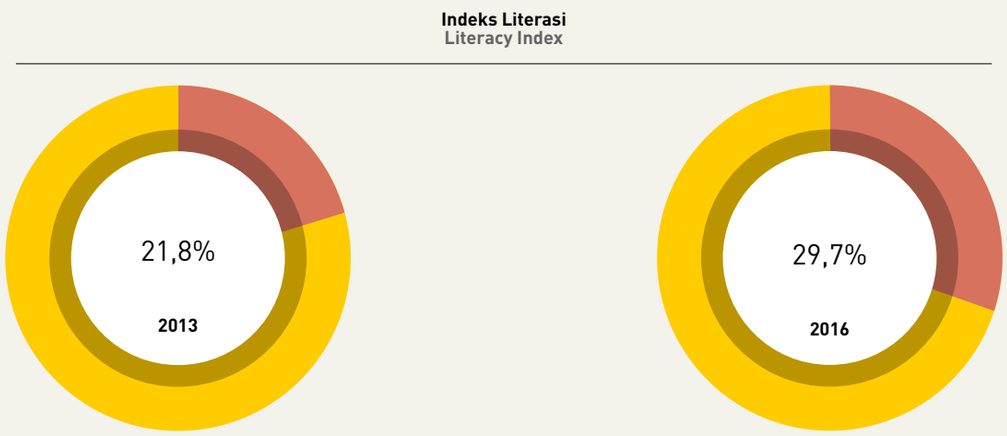

Perbandingan Tingkat Literasi *Enhanced* Tahun 2013 dan Tahun 2016
Enhanced Financial Literacy Index in 2013 and 2016

Pada tahun 2016 tingkat literasi keuangan Indonesia adalah 29,7%. Apabila dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan tahun 2013, terdapat peningkatan sebesar 7,9%. Peningkatan tersebut juga telah memenuhi target peningkatan literasi keuangan sebesar 6% selama 3 tahun (2013-2016).

b. Inklusi Keuangan

Berdasarkan *Global Financial Index* 2014, Indeks Inklusi Keuangan Indonesia mencapai 36,1%. OJK juga mengukur tingkat inklusi keuangan pada SNLK 2013 yang dihitung berdasarkan penggunaan (*usage*) produk dan/atau layanan jasa keuangan formal. Berdasarkan SNLK 2013, tingkat inklusi keuangan di Indonesia adalah sebesar 59,7%.

Pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016, di mana tingkat inklusi keuangan dihitung dengan menggunakan metode yang sama yaitu dengan menggunakan tingkat penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan formal, tingkat inklusi keuangan di Indonesia adalah sebesar 67,8% sehingga selama 2013-2016, terdapat peningkatan inklusi keuangan nasional sebesar 8,1%.

In 2016, however, the financial literacy index of Indonesia had climbed to 29.7%, representing a 7.9% increase on conditions in 2013 and exceeding the 6% target for the three years from 2013-2016.

b. Financial Inclusion

Per the Global Financial Index in 2014, the Financial Inclusion Index of Indonesia was recorded at 36.1%. OJK also measured the level of financial inclusion through the National Financial Literacy Survey in 2013 (SNLK 2013) based on usage of formal financial products and/or services. According to SNLK 2013, the Financial Inclusion Index of Indonesia stood at 59.7%.

According to SNLK 2016, using the same method, the level of financial inclusion in Indonesia was recorded at 67.8%. Therefore, the national financial inclusion index had increased by 8.1% from 2013-2016.

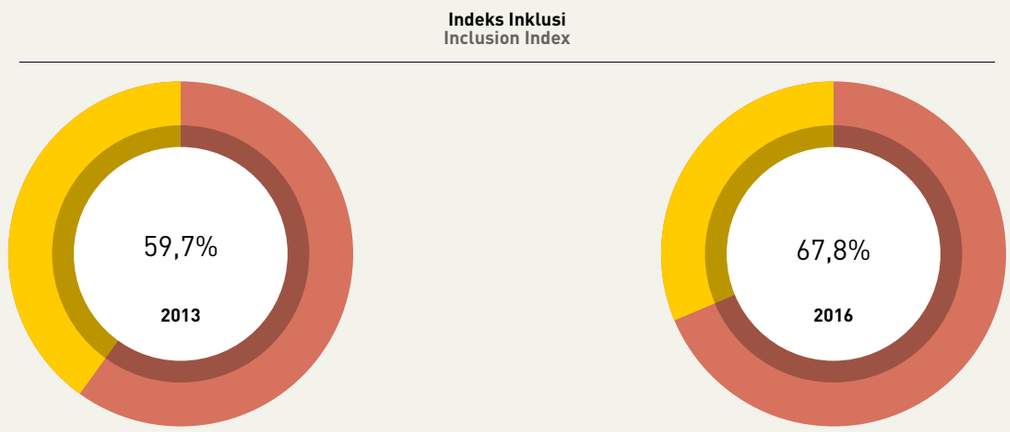

Perbandingan Tingkat Inklusi Tahun 2013 dan 2016
Financial Inclusion Index in 2013 and 2016

SNLIK merupakan upaya OJK untuk mengetahui kondisi terkini literasi dan inklusi keuangan yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan di masa yang akan datang. Salah satu upaya OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan adalah mendorong industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan lainnya dengan berkolaborasi dengan OJK untuk melaksanakan berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan tersebut diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sesuai dengan trilogi pemberdayaan konsumen yaitu literasi keuangan, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen.

The National Financial Literacy Survey is an OJK endeavour to investigate the latest dynamics concerning financial literacy and inclusion, which can subsequently be used as a reference when compiling the future National Financial Literacy Strategy. One OJK undertaking to improve financial literacy and inclusion is to encourage the financial services industry and other stakeholders to collaborate with OJK to implement various financial literacy and inclusion activities in pursuance of OJK Regulation (POJK) No. 76/POJK.07/2016 concerning Improving Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Public. Increased financial literacy and inclusion is expected to enhance consumer protection in the financial services sector in line with the trilogy of consumer empowerment, namely financial literacy, financial inclusion and consumer protection.

Untuk memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 1/PDK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Nomor 1/PDK/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEDK.07/2016 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (SLKT).

Supporting the implementation of consumer protection in the financial services sector, OJK issued BoC Regulation (PDK) No. 1/PDK.07/2016 as an amendment to BoC Regulation (PDK) No. 1/PDK/2015 on the Integrated Consumer Services System in the Financial Services Sector along with implementation guidelines in the form of BOC Circular Letter (SEDK) No. 1/SEDK.07/2016 regarding the Integrated Consumer Services System.

II.2.3.2 Keuangan Berkelanjutan

Proses pembangunan di berbagai negara di dunia, selain menimbulkan dampak positif bagi perekonomian juga mempunyai efek samping yang bersifat negatif. Efek negatif ini antara lain meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca karena pemanfaatan energi fosil berlebihan dan kebakaran hutan atau deforestasi. Efek

II.2.3.2 Sustainable Finance

Development in various countries, while realising positive economic benefits, has also precipitated a number of adverse side effects, including exacerbating the greenhouse gas effect due to excessive exploitation of fossil fuels along with deforestation. The detrimental side effects of development have been anticipated by the global

samping pembangunan yang merugikan ini telah diantisipasi oleh masyarakat dunia melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan membuat kesepakatan mengenai dokumen *"Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" melalui Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan jangka waktu 2016 – 2030. SDGs merupakan kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015.

community through United Nations (UN) consensus on the document entitled "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" through the Sustainable Development Goals (SDGs) for the horizon from 2016-2030. The SDGs are a continuation of the Millennium Development Goals (MDGs) that concluded in 2015.

Merespon hal tersebut, Indonesia melalui OJK meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan pada 5 Desember 2014. Sasaran strategis yang dilaksanakan mencakup rencana kerja yang diwujudkan secara bertahap dalam jangka pendek dan menengah (2015-2019) dan jangka panjang (2020-2024), meliputi peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan, peningkatan *demand* bagi produk keuangan ramah lingkungan serta peningkatan pengawasan dan koordinasi dalam rangka implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.

In response, Indonesia, through OJK, launched its Roadmap to Sustainable Finance on 5th December 2014. The strategic targets cover the work plan to be implemented gradually in the short-medium term (2015-2019) and long-term (2020-2024), including increasing the supply of green financing, stimulating demand for environmentally friendly financial products as well as enhancing oversight and coordination to implement sustainable finance in Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengenai konsep keuangan berkelanjutan serta sebagai sarana pertukaran informasi dalam tataran global, OJK melaksanakan Seminar Internasional ASEAN Forum dan *The 4th Annual Meeting of the Sustainable Banking Network* (SBN). Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan International Finance Corporation (IFC) yang dihadiri lebih dari 250 peserta yang berasal dari 31 negara dengan menghadirkan narasumber baik internasional maupun domestik. Topik pembahasan dalam seminar antara lain: 1) *The Future of Sustainable Finance – Innovation and Collaboration*; 2) *Mainstream Environmental, Social and Governance* (ESG) *Into Business Operations*; 3) *Climate Risk and Financial Disclosure*, serta 4) *Green financing*, *Green Bonds – Trends and Innovation*.

To improve the understanding of financial services institutions concerning the concept of sustainable finance and as a means to exchange information on the international stage, OJK organised the ASEAN Forum International Seminar and the 4th Annual Meeting of the Sustainable Banking Network (SBN) in conjunction with the International Finance Corporation (IFC), attended by 250 participants from 31 countries with national and international speakers. The main topics discussed were: (i) The Future of Sustainable Finance – Innovation and Collaboration; (ii) Mainstream Environmental, Social and Governance (ESG) into Business Operations; (iii) Climate Risk and Financial Disclosure; and (iv) Green Financing, Green Bonds – Trends and innovation.

Selain itu, dalam pelaksanaan acara tersebut juga telah diumumkan pemenang Sustainable Finance Award 2016, peluncuran *Sustainable Finance Guidelines* – untuk sektor pertanian organik, sektor perkebunan kelapa sawit dan modul *training* analis lingkungan hidup untuk LJK, serta peluncuran *Sustainable Finance Information Hub*.

In addition, the winner of the Sustainable Finance Award for 2016 was also announced at the international event, while the Sustainable Finance Guidelines were launched for the organic agricultural sector and oil palm plantation sector along with training modules on environmental analysis for financial services institutions as well as the Sustainable Finance Information Hub.

II.2.3.3 Pengembangan Industri Pergadaian

Usaha Pergadaian merupakan salah satu kegiatan usaha yang turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (gadai). Pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi yang sederhana sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan usaha.

II.2.3.3 The Pawnbroker Industry

The pawnbroker industry contributes to the national economy by providing financial services in the form of secured lending to the public using personal property as collateral. Lending through the pawn broking system helps the public meet demand for fast cash with simple administrative requirements, which is one solution that is expected to help micro, small and medium enterprises (MSME) access business funding.

Sebelum terbentuknya OJK, ketentuan yang mengatur mengenai gadai di Indonesia hanya terdapat dalam Buku Kedua Pasal 1150 s.d Pasal 1161 KUH-Perdata yang mengatur mengenai hak gadai. Namun di dalam pengaturan KUH Perdata tersebut lebih menitikberatkan kepada pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara pemberi gadai (pihak yang menggadaikan) dan penerima gadai (pihak lembaga gadai). Sementara itu, untuk pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha gadai di Indonesia hanya diberikan untuk perusahaan pergadaian milik pemerintah dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) yang diatur melalui *Pandhuis Reglement* (Aturan Dasar Pegadaian) yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1905 Nomor 490 yang kemudian diubah dengan Staatsblad tahun 1928 Nomor 81 Jo Nomor 82 dan Staatsblad tahun 1935 Nomor 596.

Prior to establishment of the Financial Services Authority (OJK), regulations for pawnbrokers were only contained in the Civil Code of Law, from Article 1150 to 1161. Nonetheless, the existing laws emphasised the civil relationship between the pledger and the pawnbroker. In contrast, business regulations for pawnbrokers in Indonesia were only applicable to state-owned enterprises, namely PT Pegadaian (Persero), regulated pursuant to Pandhuis Reglement contained in Statute No. 490 of 1905, which was later amended by Statute No. 81 and 82 of 1928 and Statute No. 596 of 1935.

Dalam perkembangan usaha pergadaian di Indonesia, selain PT Pegadaian (Persero) saat ini banyak berkembang praktik usaha pergadaian tanpa izin usaha yang jelas di masyarakat baik yang berbentuk badan usaha perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi usaha pergadaian yang demikian memiliki potensi untuk merugikan baik bagi pelaku usaha gadai itu sendiri maupun nasabah. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya melalui tenaga penaksir yang tidak memiliki standar kompetensi sehingga dapat menyebabkan penaksiran barang jaminan tidak akurat. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaran usaha pergadaian oleh swasta adalah standar tempat penyimpanan yang dimiliki oleh pelaku usaha pergadaian swasta, sehingga tempat penyimpanan tidak memadai dalam mencegah dan melindungi terjadinya kerusakan/penurunan atas nilai Barang Jaminan milik nasabah.

As the pawnbroker industry has developed in Indonesia, there are currently numerous businesses and individuals offering pawn broking services with no clear operating license throughout the Indonesian archipelago. Such developments have the potential to incur losses for the pawnbrokers themselves or for their customers through, for example, assessors without universal competence standards, which could lead to inaccurate assessments of pawned items. Another problem facing private pawnbrokers are the storage facilities, which are often inadequate to prevent and protect against damage to the pledged goods.

Kondisi-kondisi tersebut di atas, mendorong OJK menetapkan kebijakan untuk mengatur usaha pergadaian guna mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha pergadaian di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, OJK telah menetapkan standar pengaturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Secara umum, POJK tersebut mengatur mengenai bentuk badan hukum dan kepemilikan, permodalan, mekanisme pendaftaran atau perizinan usaha, kewajiban yang harus dilakukan setelah terdaftar atau memperoleh izin usaha, kegiatan usaha yang diperkenankan, hal-hal yang diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usaha, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip syariah atau penyelenggaraan sebagian usaha berdasarkan prinsip syariah, pelaporan, aksi korporasi, asosiasi perusahaan pergadaian, pengawasan dan pemeriksaan, kerja sama dengan pihak tertentu, pemberian sanksi dan pencabutan izin usaha, serta pengaturan mengenai perusahaan pergadaian pemerintah.

Such conditions compelled the OJK to formulate policy and regulate the pawnbroker industry in order to create a conducive business climate through healthy business regulations and by providing the same business assurance to all pawnbrokers operating in Indonesia. Therefore, OJK promulgated OJK Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 concerning the Pawnbroker Industry. In general, OJK regulates the formation of legal entities and ownership, capital, the registration mechanism and operating licenses, post-registration and post-license obligations, business activities, business obligations, complaint handling and dispute settlement, sharia-compliant business aspects, reporting, corporate actions, pawnbroker associations, supervision and inspections, cooperation with certain parties, imposition of sanctions and revocation of operating licenses, as well as regulations for state-owned pawnbrokers.

Dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, diharapkan masyarakat atau pihak-pihak yang telah menjalankan usaha pergadaian dapat

Through implementation of OJK Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 concerning the Pawnbroker Industry, individuals and businesses engaged in the pawnbroker industry are expected

segera melakukan pendaftaran atau perizinan kepada OJK sehingga dapat memperoleh status kejelasan kegiatan usaha pergadaian yang dijalankan.

Perkembangan Industri Pergadaian Tahun 2016

Dari penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, sampai akhir 2016, telah terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah dan satu perusahaan pergadaian swasta yang telah mendapat izin usaha dari OJK, serta dua perusahaan pergadaian swasta yang terdaftar di OJK, yaitu:

to register with the OJK and apply for an operating license, thus clarifying the business status of the pawnbroker industry.

Pawnbroker Industry Performance in 2016

Through implementation of OJK Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 concerning the Pawnbroker Industry, at yearend 2016, one state-owned pawnbroker and one private pawnbroker had been licensed by OJK, as well as two more private pawnbrokers that had registered at OJK as follows:

Perkembangan Perusahaan Pergadaian
Pawnbroker Industry Development

No.	Nama Perusahaan | Company Name	Status	Lingkup Usaha | Business Scope
1	PT Pegadaian (Persero)	Penegasan Izin Usaha | Confirmed Operating License	Nasional | National
2	PT HBD Gadai Nusantara	Izin Usaha | Operating License	DKI Jakarta
3	KSP Mandiri Seejahtera Abadi	Terdaftar | Registered	(-)
4	KSU Dana Usaha	Terdaftar | Registered	(_)

Strategi Pengembangan Industri Pergadaian

Guna melengkapi perangkat hukum penyelenggaraan usaha pergadaian, OJK pada 2017 menargetkan menyelesaikan tiga ketentuan setingkat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai aspek perizinan dan kelembagaan usaha pergadaian, penyelenggaraan usaha perusahaan Pergadaian, dan laporan berkala usaha Pergadaian.

Pawnbroker Industry Development Strategy

Complementing the legal apparatus for the pawnbroker industry, in 2017, OJK plans to issue three OJK Circular Letters concerning licensing and institutional aspects, business operations, and periodic reporting.

Dengan diterbitkannya sejumlah izin usaha dari OJK bagi perusahaan pergadaian swasta, maka perlu dibentuk wadah bagi pelaku usaha pergadaian untuk mengumpulkan aspirasi terkait pengembangan usaha pergadaian sekaligus menjadi mitra kerja OJK. Sejalan dengan hal tersebut, OJK mendorong pelaku usaha untuk membentuk asosiasi perusahaan pergadaian.

After issuing several operating licenses to private pawnbrokers, an association is required of industry players to collect the industry's development aspirations, while simultaneously functioning as a partner of the Financial Services Authority (OJK). Therefore, OJK encourages the formation of a national pawnbrokers association.

Dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan SDM di bidang penaksiran barang jaminan, OJK, dengan berlandaskan amanat pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf j yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk menunjuk pihak lain sebagai lembaga penerbit sertifikasi Penaksir, melakukan kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) sebagai Lembaga Penerbit Sertifikasi Penaksir di mana surat keputusan ini berlaku hingga Lembaga Penerbit Sertifikasi Penaksir telah diresmikan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Penaksir).

Mitigating HR constraints in terms of assessing items to be pawned as collateral, pursuant to Article 9, paragraph (2) letter j of the mandate, which gives jurisdiction to the OJK to appoint an external party as an issuer of Professional Certification, OJK cooperated with PT Pegadaian (Persero) as the issuer of assessor certification, effective until officially recognised by the National Body of Professional Certification (BNSP).

Pada akhir 2016, OJK bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) menyelenggarakan *Workshop* Pelatihan Penaksir sebanyak dua kali. Adapun kedua kegiatan workshop tersebut, yaitu *Workshop* Penaksiran Barang Elektronik dan Kendaraan Bermotor yang diikuti oleh 50 orang peserta serta *Workshop* Penaksiran Logam Emas yang diikuti oleh 32 orang peserta. Melalui *workshop* tersebut, OJK mengharapkan dapat memberikan solusi dari kendala calon

By the end of 2016, OJK had cooperated with PT Pegadaian (Persero) to host two assessor training workshops, namely a workshop on assessing electronic devices and motor vehicles, which was attended by 50 participants, and a workshop on assessing gold, attended by 32 participants. Through the workshops, OJK hopes to provide solutions to the constraints faced by prospective private pawnbrokers in terms of meeting the licensing requirements,

perusahaan pergadaian swasta dalam pemenuhan persyaratan perizinan yaitu bukti sertifikat penaksir. Selain itu, OJK mendorong PT Pegadaian (Persero) untuk dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penaksiran.

namely assessor certification. In addition, OJK also urged PT Pegadaian (Persero) to officially submit applications to BNSP as the Professional Certification Institution.

Pada 2017 program pelatihan bagi pelaku usaha pergadaian direncanakan tetap dilaksanakan sebagai bagian dari program *recycling* OJK dengan melibatkan *learning center* OJK. Pelatihan akan diselenggarakan dalam bentuk pelatihan penaksir dan pelatihan manajemen resiko bagi usaha pergadaian.

In 2017, the training program for pawnbrokers will remain part of the OJK recycling program with the involvement of the OJK Learning Centre. The program will include training for assessors as well as risk-management training.

Selain itu, koordinasi lebih lanjut antarsatuan kerja internal OJK baik di kantor pusat maupun di daerah diharapkan dapat mendorong upaya percepatan pendaftaran pelaku usaha pergadaian swasta ke OJK. Sebagai awal dari koordinasi internal tersebut akan dilakukan pemetaan pelaku usaha pergadaian swasta, sosialisasi serta pelatihan penaksiran di berbagai wilayah di Indonesia yang akan melibatkan Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah.

In addition, further coordination between internal OJK work units at head office and regional offices is expected to catalyse efforts to accelerate registrations of private pawnbrokers at OJK. Internal coordination will commence by mapping private pawnbrokers in Indonesia, socialisation activities as well as training assessors in various regions through OJK regional and branch offices.

II.2.3.4 Asuransi Mikro

Pilot project Asuransi Mikro yang dilaksanakan selama 2016 merupakan kelanjutan dari kegiatan pengembangan asuransi mikro yang telah dilaksanakan selama 2015. *Pilot project* Asuransi Mikro tahap dua dilaksanakan untuk mengetahui model pemasaran yang efektif yang dapat diterapkan dalam rangka memperluas pemasaran asuransi mikro serta meningkatkan minat masyarakat terhadap produk asuransi mikro. Untuk membantu pelaksanaan *pilot project* Asuransi Mikro tahap 2 dibentuklah tim *task force* yang terdiri dari OJK, World Bank, dan Asosiasi AAUI, AAJI, dan AASI. Selain itu, OJK juga menawarkan kepada perusahaan asuransi lainnya untuk ikut serta dalam *pilot project* dimaksud. *Pilot project* Asuransi Mikro tahap 2 dilaksanakan di beberapa kota antara lain:

II.2.3.4 Microinsurance

The microinsurance pilot project in 2016 was a continuation of activities developed the year earlier. Phase II of the microinsurance pilot project was implemented to ascertain effective marketing models to expand microinsurance, while garnering public interest in microinsurance products. Furthermore, a task force, consisting of OJK and World Bank along with the AAUI, AAJI and AASI associations, was established to help Phase II implementation. The Financial Services Authority (OJK) also invited other insurance companies to join the pilot project. Phase II of the Pilot Project was implemented in several cities as follows:

Pelaksanaan *Pilot Project* Asuransi Mikro Tahap 2 tahun 2016
Implementation of Micro Insurance Pilot Project Phase 2 in 2016

No.	Kota | City
1	Jakarta
2	Malang
3	Tigaraksa
4	Agam
5	Cileunyi
6	Bogor
7	Bandung
8	Yogyakarta
9	Surakarta
10	Lombok
11	Surabaya

Terdapat 11 produk standar Asuransi Mikro yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Produk-produk Asuransi Mikro tersebut adalah Asuransi Mikro WarisanKu, Asuransi Mikro AsuransiKu, Asuransi Mikro RumahKu, Asuransi Mikro Stop Usaha Erupsi, Asuransi Mikro Stop Usaha Gempa Tsunami, Asuransi Mikro Si Abang Erupsi, Asuransi Mikro Si Abang Gempa Tsunami, Asuransi Mikro Si Peci, Asuransi Mikro Kosmik WarisanKu, Asuransi Mikro Kosmik RumahKu, dan Asuransi Mikro Kosmik Stop Usaha. Perkembangan jumlah peserta, premi dan klaim sepanjangan 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A total of 11 standard microinsurance products have been approved by OJK, including Asuransi Mikro WarisanKu, Asuransi Mikro AsuransiKu, Asuransi Mikro RumahKu, Asuransi Mikro Stop Usaha Erupsi, Asuransi Mikro Stop Usaha Gempa Tsunami, Asuransi Mikro Si Abang Erupsi, Asuransi Mikro Si Abang Gempa Tsunami, Asuransi Mikro Si Peci, Asuransi Mikro Kosmik WarisanKu, Asuransi Mikro Kosmik RumahKu, and Asuransi Mikro Kosmik Stop Usaha. Performance in terms of policyholders, premiums and claims in 2016 are presented in the following table:

Perkembangan Asuransi Mikro
Micro Insurance Development

Uraian | Description	2015	2016	**Kenaikan | (Penurunan) |** (Decrease)
Jumlah Peserta/ Tertanggung | Policyholders	18.305.561	20.763.494	13,43%
Premi bruto (Miliar Rupiah) | Gross Premiums (Rp, billions)	782,31	1.139,16	45,61%
Klaim bruto (Miliar Rupiah) | Gross Claims (Rp, billions)	369,90	501,63	35,61%

II.2.3.5 Tabungan SIMPEL

Dalam rangka edukasi dan meningkatkan inklusi keuangan, OJK memperkenalkan SimPel/SimPel iB. SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SimPel/SimPel iB merupakan salah satu bentuk implementasi program inisiatif dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2013 yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan aktivasi SimPel/SimPel iB yang diinisiasi oleh OJK bersama dengan industri perbankan.

II.2.3.5 SIMPEL Basic Savings Accounts

OJK introduced SimPel and SimPel iB to educate the public and expand financial inclusion. SimPel and SimPel iB are basic savings accounts aimed at students issued nationally by banks in Indonesia with simple requirements and attractive features to promote a culture of saving from an early age. SimPel and SimPel iB were initiated by OJK, in conjunction with the banking industry, as part of the Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI) rolled out in 2013 by the President of the Republic of Indonesia.

Tabungan SIMPEL
SIMPEL Savings

Sejak dilakukan aktivasi program tabungan SimPel/SimPel iB tersebut, terdapat 276 Bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Sepanjang 2016, terdapat lima bank yang melakukan launching produk SimPel/SimPel iB. Jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 3.005.992 dengan volume Rp842,77 Miliar. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara Bank dan sekolah sebanyak 30.976.

A total of 276 banks have joined the SimPel and SimPel iB program since activation. In 2016, five banks launched SimPel and SimPel iB products and the total number of accounts reached 3,005,992 with a total volume of Rp842.77 billion. Thus far, as many as 30,976 Cooperation Agreements have been signed between banks and schools.

Berikut adalah perkembangan jumlah sekolah, jumlah rekening SimPel/SimPel iB, dan jumlah PKS selama 2016.

The following charts illustrate the number of schools, accounts and cooperation agreements as part of the SimPel and SimPel iB program in 2016.

Perkembangan Jumlah Bank Peserta (2016)
The Number of Participating Banks (2016)

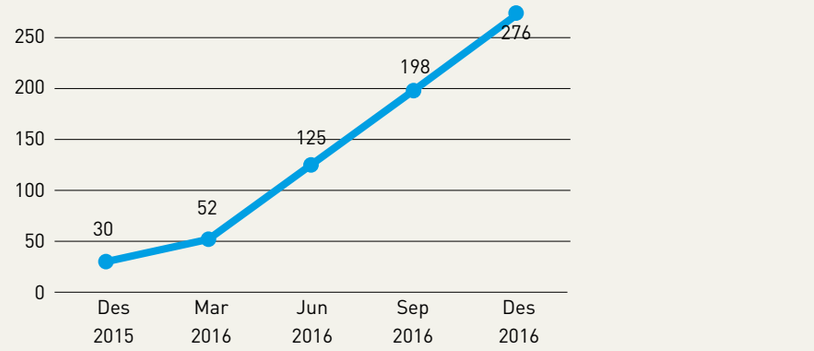

Perkembangan Jumlah PKS (2016)
The Number of School Agreements (2016)

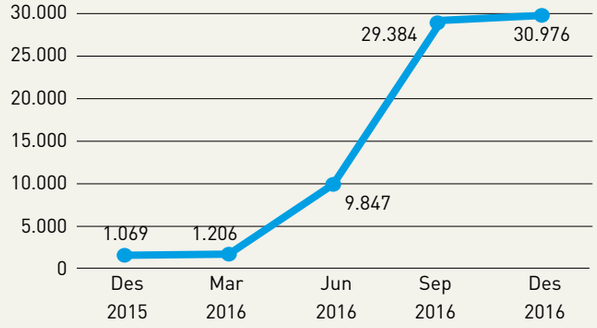

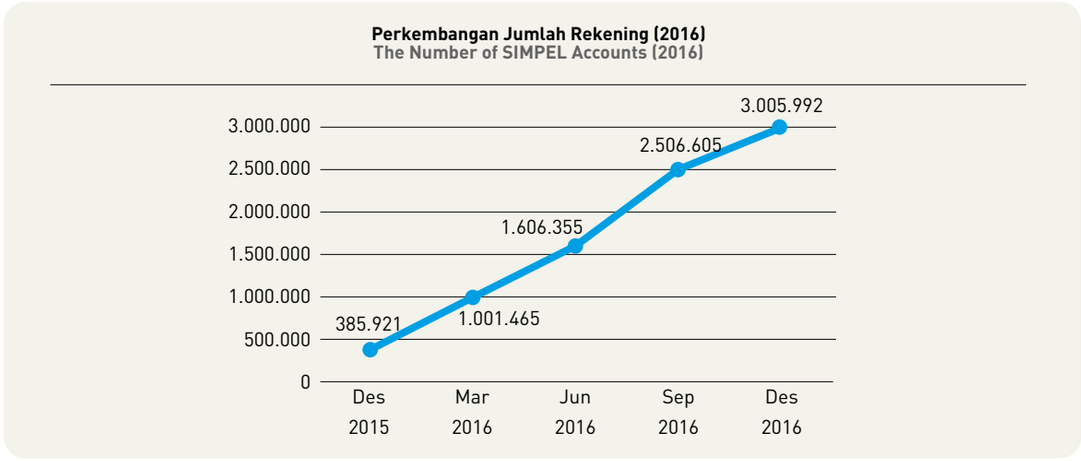

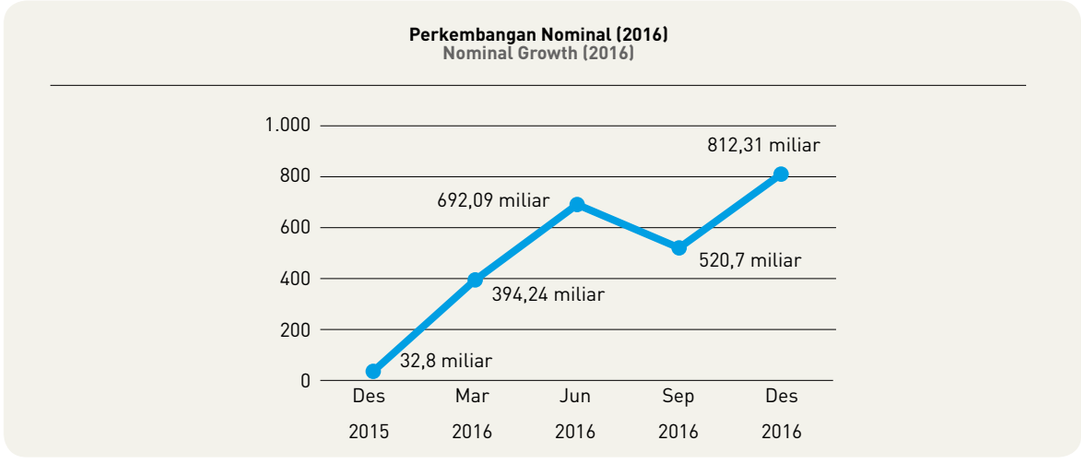

II.2.3.6 Edukasi Komunitas

OJK melakukan 28 kegiatan edukasi keuangan bagi beragam komunitas di 18 kota. Komunitas yang menjadi peserta edukasi antara lain perangkat desa, Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), TKI, anggota TNI AD yang akan memasuki masa pensiun, PNS Pemerintah Daerah, Penyandang Disabilitas (Tuna Netra), Majelis Ta'lim, Pembina Pramuka, dan lainnya.

Materi yang diterima oleh peserta mencakup pengenalan OJK, waspada investasi, produk/layanan jasa keuangan beserta manfaat, risiko, hak, kewajiban, dan fitur produk yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan berdasarkan hasil peningkatan *pre-test* dan *post-test* meningkat rata-rata sebesar 26,19%.

II.2.3.6 Community Education

OJK organised 28 financial education activities amongst various communities located in 18 regions. The education targeted villagers, prospective Indonesian migrant workers (CTKI), Indonesian migrant workers (TKI), retiring army personnel, regional civil servants, people with disabilities (impaired vision), Ta'lim, scoutmasters and so on.

The materials offered to participants include an introduction to OJK, the Investment Watchdog as well as financial products and services along with the benefits, risks, rights and responsibilities as well as features of the products. Based on a pre-test and post-test, the participants' understanding increased by an average of 26.19% after attending the educational activities.

a. Edukasi TKI dan CTKI
Edukasi keuangan bagi TKI dan CTKI merupakan kegiatan edukasi keuangan bagi para TKI yang sedang dalam masa penempatan maupun CTKI yang akan berangkat dengan tujuan memperkenalkan OJK, LJK, dan meningkatkan penggunaan produk/jasa keuangan sesuai kebutuhan (manfaat/risiko, hak dan kewajiban). Para TKI diharapkan mampu mengelola penghasilannya selama bekerja di negara penempatan dan memiliki bekal usaha untuk kembali ke tanah air.

Selama 2016, OJK melakukan kegiatan edukasi keuangan bagi TKI dan CTKI di Nunukan - Kalimantan Utara dan di Hongkong. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama OJK dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta beberapa lembaga terkait.

b. Edukasi Mahasiswa dan Pelajar
Pelajar dan mahasiswa merupakan salah satu prioritas sasaran kegiatan literasi keuangan menurut SNLKI 2013 dan menjadi target edukasi sepanjang 2016. Edukasi keuangan bagi mahasiswa dilakukan dalam bentuk *training of trainers* bagi mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja nyata (KKN) atau dalam bentuk kuliah umum. Sedangkan bagi pelajar diberikan sosialisasi mengenai OJK, LJK, tabungan SimPel, dan konsep menabung. Sampai akhir 2016, OJK melakukan edukasi mahasiswa dan pelajar sebanyak empat kali yaitu di Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, SMP Asisi Jakarta dan SD Al-Azhar Syifa Budi Jakarta.

c. *Training of Trainers* Penyuluh Lapangan dan Guru PAUD
Tranining of Trainers (ToT) merupakan kegiatan edukasi keuangan untuk membekali dan mendorong peserta untuk mengajarkan kembali kepada komunitasnya (*multiplier effect*). Selama 2016, OJK melakukan ToT bagi penyuluh lapangan keluarga berencana, penyuluh pertanian, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan kader bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). ToT juga dilakukan bagi komunitas guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari seluruh wilayah Kota Jakarta bekerja sama dengan Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

d. Masyarakat Pesisir dan Pulau Terluar
Kegiatan Edukasi Bahari yang merupakan kegiatan edukasi keuangan khusus menjangkau masyarakat di pesisir atau pulau terluar Indonesia. Sepanjang 2016 OJK melakukan ToT kepada petani, nelayan, UMKM, dan pegawai di tiga daerah yaitu Nunukan-Kalimantan Utara, Rote Ndao-Pulau Rote dan di Saketa-Halmahera Selatan. Dari kegiatan ini, diharapkan masyarakat pesisir yang sebagian besar terdiri dari nelayan, petani, dan UMKM dapat menggunakan uang untuk kegiatan produkif serta dapat menyisihkan sebagian kecil pendapatan untuk menabung.

a. TKI and CTKI Education
Financial education targeted prospective Indonesian migrant workers (CTKI) and existing Indonesian migrant workers (TKI) by introducing the OJK and financial services institutions, while increasing the utilisation of financial products and services in line with prevailing needs (benefits/risks, rights and responsibilities). Consequently, Indonesian migrant workers (TKI) are expected to manage their income during placements abroad and maintain a business at home for their return.

In 2016, OJK conducted educational activities for TKI and CTKI in Nunukan, North Kalimantan and Hong Kong in conjunction with the National Board for the Placement and Protection of Overseas Workers (BNP2TKI) along with several other relevant institutions.

b. Student Education
Students were stipulated as a priority financial education target pursuant to the Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI) in 2013 and actively targeted for education activities in 2016. Student financial education was provided in the form of training of trainers for college students on vocational courses or taking general studies. Other students attended socialisation activities concerning the Financial Services Authority (OJK), financial services institutions, SIMPEL savings accounts and the concept of saving. In 2016, OJK conducted four educational training events for students at the Bogor Agricultural University, Gadjah Mada University in Yogyakarta, Asisi Junior High School in Jakarta and the Al-Azhar Syifa Budi Primary School in Jakarta.

c. Training of Trainers for Extension Workers and Preschool Teachers
Training of Trainers (ToT) is a form of financial education to inform participants and then encourage them to pass-on what they have learned to the community (multiplier effect). In 2016, OJK conducted ToT activities for extension workers dealing with natural disasters, agricultural extension workers as well as UPPKS and BKKBN instructors. ToT was also provided to preschool teachers in all areas of Jakarta under the auspices of FOKAN and the National Narcotics Agency (BNN).

d. Coastal Communities and Periphery Islands
Nautical education activities are a form of financial education, specifically targeting communities in coastal areas and on periphery islands. In 2016, OJK offered ToT to farmers, fishermen, MSMEs and employees in three regions, namely Nunukan, North Kalimantan, Rote Ndao, Rote Island and in Saketa, South Halmahera. Such activities are expected to facilitate coastal communities, which are dominated by fishermen, farmers and MSMEs, to use currency for productive activities, while setting aside a portion for saving.

e. *Training of Trainers* Guru SD, SMP, SMA dan Dosen
Kegiatan ToT bagi tenaga pengajar di tingkat pendidikan formal merupakan edukasi keuangan yang bertujuan untuk mempersiapkan infrastruktur sumber daya manusia agar mampu mengajarkan materi pengenalan OJK dan IJK kepada para siswa di sekolahnya. Pada tahun ini, ToT dilakukan kepada Guru SD, SMP, SMA dan Dosen perguruan tinggi. Sepanjang 2016 OJK melakukan lima kali ToT yaitu di Kupang-Nusa Tenggara Timur, Palangkaraya-Kalimantan Tengah, Kuta-Bali, Sorong-Papua Barat dan Jakarta. Pemahaman guru terhadap materi yang disampaikan berdasarkan hasil peningkatan *pre-test* dan *post-test* meningkat rata-rata sebesar 24,77%.

II.2.3.7 Galeri Investasi *Mobile*

Galeri Investasi Mobile (GIM) merupakan program edukasi Pasar Modal yang dilaksanakan oleh OJK dan BEI melalui pemberdayaan Galeri Investasi yang lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat di sekitar kampus. Sejak 2000 hingga Juni 2016, BEI membentuk sekitar 200 Galeri Investasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di mana empat di antaranya merupakan Galeri Investasi Syariah. Pembentukan ini ternyata masih belum mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di pasar modal. Selain karena tujuan pembukaan galeri investasi di berbagai perguruan tinggi bersifat edukatif, dan kemampuan finansial mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal relatif kecil, akses masyarakat sekitar untuk menjangkau lingkungan perguruan tinggi tidak mudah.

Pada sisi lain, di sekitar kampus masih banyak masyarakat/komunitas yang potensial sebagai calon investor namun belum memiliki pemahaman yang cukup tentang produk/layanan jasa keuangan di pasar modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, diluncurkan program GIM sebagai upaya agar Galeri Investasi lebih proaktif melakukan edukasi kepada masyarakat di sekitar kampus.

Sepanjang 2016, dilakukan peluncuran GIM di tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Pancasila, Universitas Bunda Mulia, dan Universitas Negeri Surakarta Selanjutnya. OJK mendorong BEI untuk melakukan *monitoring* terhadap seluruh Galeri Investasi yang ada dan sekaligus menetapkan target kinerja Galeri Investasi.

II.2.3.8 Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) dan Sosialisasi Kartu Permainan Investasi Pasar Modal *Stocklab*

Sejak awal 2015, OJK menginisiasi penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal yang lebih Terpadu (SEPMT) dan efektif dalam rangka mempromosikan dan meningkatkan upaya pendalaman pasar modal dengan melibatkan kantor OJK daerah dan kantor perwakilan BEI di daerah serta para pemangku kepentingan terkait.

e. Training of Trainers for Primary and Secondary School Teachers as well as University Lecturers
The training of trainers for teachers in formal education delivers financial education that aims to prepare HR infrastructure to introduce OJK and the financial services industry to students in their respective schools. ToT was offered to primary and secondary school teachers as well as university lecturers five times in 2016, namely in Kupang, East Nusa Tenggara; Palangkaraya, Central Kalimantan; Kuta, Bali; Sorong, West Papua; and Jakarta. The pre- and post-tests showed an average 24.77% increase in the level of participant understanding of the materials presented.

II.2.3.7 Mobile Investment Gallery

The Mobile Investment Gallery (MIG) forms part of the capital market education program rolled-out by OJK and the Indonesia Stock Exchange to empower more proactive Investment Galleries to reach communities around campus. From 2000 to June 2016, the Indonesia Stock Exchange established around 200 Investment Galleries at a number of universities in Indonesia, with four set up as Sharia Investment Galleries. Nonetheless, the Investment Galleries have failed to increase financial literacy and inclusion on the capital market. In addition to opening investment galleries at various universities purely for educational purposes and because the financial capacity of students to invest on the capital market is relatively low, increasing public access to the university environment is not easy.

On the other hand, there are numerous people and communities around the campus who are potential investors but lack adequate understanding of capital market products and services. To overcome that problem, the MIG program was launched to make the existing investment galleries more proactive in terms of educating local communities around campus.

In 2016, MIGs were launched at three universities namely Pancasila University, Bunda Mulia University, and Negeri Surakarta University. Furthermore, OJK urged the Indonesia Stock Exchange to monitor all investment galleries and set performance targets.

II.2.3.8 Integrated Capital Market Socialisation and Education (SEPMT) and Socialisation of the Stocklab Card Game

At the beginning of 2015, OJK initiated effective and integrated Capital Market Socialisation and Education (SEPMT) activities to promote and increase capital market deepening, involving OJK regional offices and Indonesia Stock Exchange regional offices as well as relevant stakeholders.

Selama 2016, kegiatan SEPMT disertai pula dengan simulasi dan kompetisi permainan kartu investasi pasar modal (*Stocklab*). *StockLab* adalah sebuah alat peraga edukasi yang berbentuk kartu permainan investasi pasar modal dan merupakan satu-satunya alat peraga yang bersifat fun sejak 39 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. *StockLab* pertama kali diluncurkan pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam rangkaian peringatan HUT Pasar Modal Indonesia yang ke-39. *StockLab* ini merupakan hasil kerja sama antara OJK dengan Praktisi Pasar Modal dan *Game Maker*.

Tujuan *StockLab* adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai investasi di Pasar Modal melalui cara yang lebih menyenangkan, tidak kaku seperti Seminar dan *Workshop* pada umumnya. Dalam permainan ini terdapat puluhan istilah dan maknanya pada instrumen investasi pasar modal yang dikemas dengan lebih sederhana dan tidak serumit kelihatannya. Permainan ini diharapkan mampu meningkatkan *awareness* masyarakat tentang Pasar Modal sehingga berdampak pada peningkatan jumlah investor dan utilitas produk investasi di Pasar Modal. Sejak diluncurkan pada agustus 2016, sosialisasi dilakukan di 18 kota dengan total peserta sebanyak 1.595 partisipan.

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) dan Sosialisasi Kartu Permainan Investasi Pasar Modal *StockLab* telah berhasil meningkat jumlah investor saham dan Reksa Dana. Selama 2016, jumlah investor saham dan Reksa Dana meningkat masing-masing 23% dan 4% dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2016, SEPMT activities were accompanied by simulations and competitions using the capital market investment card game known as Stocklab. Stocklab is a teaching aid in the form of a capital market investment card game, representing the only fun teaching aid produced in the 39-year history of the capital market in Indonesia. Stocklab was first launched on 23rd August 2016, as part of the 39th anniversary celebrations of the capital market in Indonesia. Stocklab was created by OJK in conjunction with capital market practitioners and Game Maker.

The goal of Stocklab is to educate the public concerning capital market investments in a fun way, not through more traditional and rigid workshops and seminars. The game contains numerous terms and definitions of capital market investment instruments that are simply packaged and, therefore, appear less complex and are simpler to understand. The game is expected to build public awareness of the capital market, thus increasing the number of investors and utility of investment products on the capital market. Since launch in August 2016, Stocklab has been rolled out in 18 cities, involving 1,595 participants.

SEPMT and Stocklab activities have successfully increased the number of investors in stocks and investment funds by 23% and 4% respectively on the previous year.

Jumlah Pemegang Saham (SID)
Total Shareholders (SID)

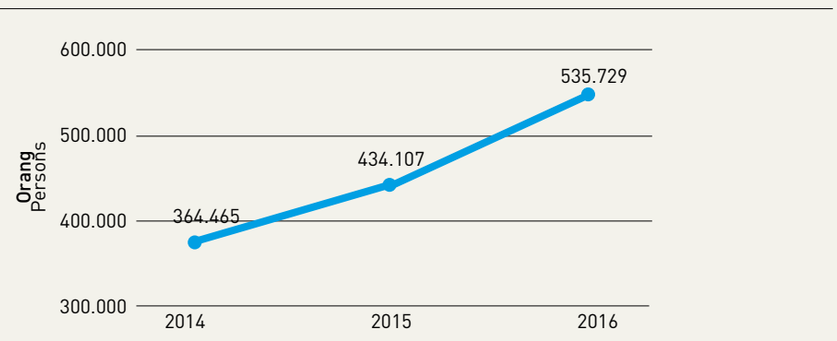

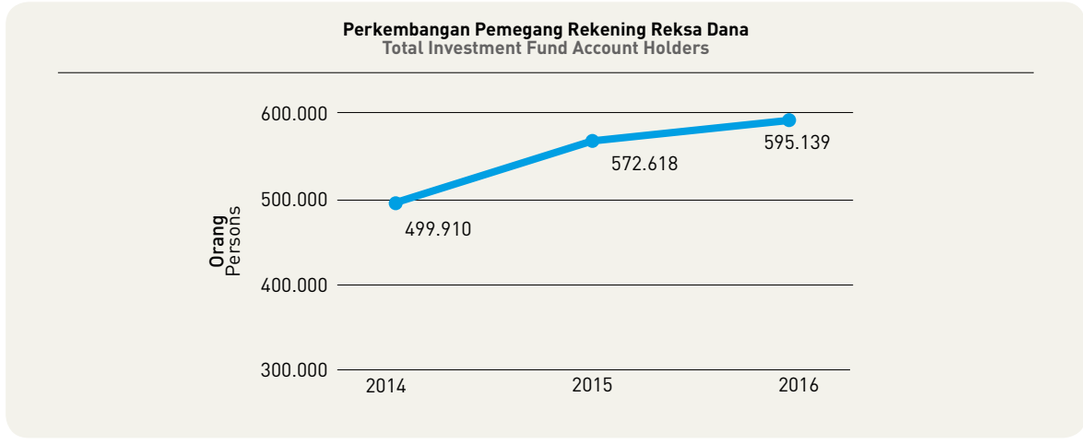

II.2.4 Penguatan Peran SJK Syariah

II.2.4.1 Kegiatan Aku Cinta Keuangan Syariah

Sepanjang 2016, OJK menyelenggarakan sosialisasi berupa Keuangan Syariah Fair (KSF) sebanyak lima kali di berbagai kota di Indonesia. KSF merupakan salah satu strategi OJK untuk mendekatkan masyarakat dengan industri keuangan syariah dan sebagai sarana memperoleh informasi tentang keunggulan produk dan jasa keuangan syariah, serta memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan *awareness*, pemahaman dan utilitas masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah.

Dalam penyelenggaraan KSF terjadi transaksi dari para pengunjung terhadap industri keuangan yang bergabung di KSF. Berikut adalah jumlah transaksi beserta besarannya pada setiap KSF selama 2016, yaitu:

II.2.4 Strengthening the Role of the Sharia Financial Services Sector

II.2.4.1 "I Love Sharia Finance" Campaign

In 2016, OJK organised socialisation activities, in the form of Sharia Finance Fairs (SFF), five times in various cities across Indonesia. Sharia Finance Fairs are one OJK strategy to introduce the public to the sharia financial industry and for the public to obtain information concerning the advantages of sharia financial products and services, while providing direct experience for the public to interact with leading sharia financial institutions in Indonesia. The activities aim to build public awareness, understanding and utility regarding sharia financial products and services.

At the Sharia Finance Fairs, visitors transact with the financial industry as follows:

Kegiatan KSF di 2016
KSF Activity in 2016

Kegiatan Activity	Peserta Participants	Pencapaian | Achievements				Tingkat Pemahaman (Terhadap Produk Perbankan) Level of Understanding (Banking Products)
		Perbankan (DPK) Banking Industry (Deposits)		NOA PMS NOA Sharia Capital Market	NOA IKNBS NOA Sharia Nonbank Financial Industry	
		NOA	Volume (Rp)			
KSF Jakarta (3-6th March 2016)	18 BUS/UUS 1 BPRS 11 IKNBS 11 PMS 18 sharia banks/sharia business units; 1 sharia rural bank; 11 sharia nonbank financial institutions; 11 sharia capital market players	4.486	106,4 miliar / billion	153	162	73% (319 sampel responden) /sample respondents)
KSF Surabaya (12-15th May 2016)	16 BUS/UUS 11 IKNBS 11 PMS 16 sharia banks/sharia business units; 11 sharia nonbank financial institutions; 11 sharia capital market players	5.662	27,7 miliar / billion	190	378	76% (382 sampel responden) /sample respondents)
KSF Tangerang (4-7th August 2016)	15 BUS/UUS 1 BPRS 11 IKNBS 11 PMS 15 sharia banks/sharia business units; 1 sharia rural bank; 11 sharia nonbank financial institutions; 11 sharia capital market players	32.529	30,8 miliar / billion	69	104	84% (333 sampel responden) /sample respondents)
KSF Aceh (26-30th August 2016)	8 BUS/UUS 3 BPRS 11 IKNBS 7 PMS 8 sharia banks/sharia business units; 3 sharia rural bank; 11 sharia nonbank financial institutions; 7 sharia capital market players	5.462	4 miliar /billion	173	160	75% (418 sampel responden) /sample respondents)
KSF Makassar (20-23rd October 2016)	14 BUS/UUS 10 IKNBS 10 PMS 14 sharia banks/sharia business units; 10 sharia nonbank financial institutions; 10 sharia capital market players	12.209	91,6 miliar / billion	64	152	82% (619 sampel responden) /sample respondents)

II.2.4.2 Pasar Rakyat Syariah dan IB Vaganza

Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui Expo iB Vaganza merupakan kerja sama OJK dan industri perbankan bertujuan memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai keunggulan produk dan layanan perbankan syariah. Selama 2016, kegiatan tersebut dilaksanakan di empat kota sebagai berikut:

II.2.4.2 Sharia Public Market and Islamic Banking (iB) Vaganza Expo

Implementation of the "I Love Sharia Finance" campaign through the iB Vaganza Expo is a form of collaboration between OJK and the banking industry to introduce sharia banking products and services and build public understanding of their advantages. In 2016, the iB Vaganza Expo was held in four cities as follows:

Kegiatan iB Vaganza di 2016
iB Vaganza Activity in 2016

Kegiatan | Activity	Peserta | Participants	Pencapaian | Achievements		Tingkat Pemahaman (terhadap Produk Perbankan) Level of Understanding (Banking Products)
		Perbankan (DPK) Banking Industry (Deposits)		
		NOA	Volume (Rp)	
iB Vaganza Palembang (24-27th March 2016)	12 BUS/UUS 2 IKNBS 12 sharia banks/sharia business units; 2 sharia nonbank financial institutions	14.128	29,8 milar/billion	70% (262 sampel responden) /sample respondents)
iB Vaganza Bekasi (28th April – 1st May 2016)	15 BUS/UUS 1 BPRS 15 sharia banks/sharia business units; 1 sharia rural bank	19.041	13,5 milar/billion	83% (218 sampel responden) /sample respondents)
iB Vaganza Padang (19-22nd May 2016)	7 BUS/UUS 1 PMS 1 IKNBS 7 sharia banks/sharia business units; 1 sharia capital market player; 1 nonbank financial institution	6.963	19 milar/billion	79% (215 sampel responden) /sample respondents)
iB Vaganza Samarinda (17-20th November 2016)	10 BUS/UUS 10 sharia banks/sharia business units	7.939	19,3 milar/billion	85% (470 sampel responden) /sample respondents)

II.2.4.3 Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XV

Dalam rangka mendorong perkembangan riset perbankan dan keuangan syariah khususnya di kalangan civitas akademika, OJK menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XV dengan tema "Mengangkat Keunikan Keuangan Syariah dalam Era Persaingan Industri Jasa Keuangan yang Semakin Ketat". Kegiatan pokok FREKS XV terdiri dari (1) kompetisi penulisan karya tulis (*Call for Paper*) di bidang ekonomi dan keuangan syariah bagi peneliti muda dan peneliti madya, dengan seleksi final dalam bentuk presentasi dan pembahasan karya tulis secara terbuka, dan pemberian penghargaan karya tulis terbaik oleh OJK; (2) *Prominent Lecture on Islamic Finance* oleh *prominent speakers* internasional; (3) dan dua *side events* terkait, yaitu (i) Forum Bersama dengan tema "Pengembangan Ekonomi Islam dan Penelitian Berstandar Internasional" dan (ii) *Workshop* Metodologi Riset dan Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah Keuangan Syariah.

Dalam FREKS XV, jumlah karya tulis yang masuk dan memenuhi persyaratan administrasi dalam kegiatan *Call for Paper* FREKS XV sebanyak 182 karya tulis yang terdiri atas 146 karya tulis kategori Muda dan 36 karya tulis kategori Madya, melebihi target sebanyak 120 karya tulis. Sedangkan peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 427 peserta melebihi target sebanyak 200 peserta.

II.2.4.4 iB *Research Grant Program* 2016

Dalam rangka mendukung pengembangan riset keuangan syariah, OJK melaksanakan penelitian dalam rangka mendukung *research-based policy* yang disebut *iB Research Grant Program* 2016. Sasaran

II.2.4.3 XV Sharia Economic and Financial Research Forum (FREKS)

Seeking to nurture sharia banking and financial research, particularly in academia, OJK hosted the XV Sharia Economic and Financial Research Forum (FREKS), with the theme of "Promoting the Uniqueness of Sharia Finance during an Era of Increased Financial Services Industry Competitiveness". The main activities of FREKS XV included (1) a Call for Papers on sharia finance and the economy from junior and associate researchers, with the final selection based on presentations and open discussions and the awards presented by OJK; (2) a lecture on Islamic Finance by prominent international speakers; and (3) two side events, namely (i) a Joint Forum on "International Islamic Economic Development and Research"; and (ii) a Workshop on Research Methodologies and Technical Writing in Sharia Finance Scientific Journals.

In 2016, the FREKS call for papers attracted 182 scientific working papers, consisting of 146 papers from junior researchers and 36 from associate researchers, which exceeded the target of 120. Furthermore, a total of 427 participants attended the event, surpassing the target of 200.

II.2.4.4 iB Research Grant Program

Supporting sharia finance research, OJK supported research-based policy, otherwise known as the iB Research Grant Program 2016. The main target of the program is to accelerate the broad research

utama dari program ini adalah percepatan pelaksanaan agenda riset yang masih panjang, serta untuk mendukung aktivitas penelitian perbankan syariah oleh mahasiswa dan peneliti eksternal yang outputnya bermanfaat untuk mendukung perumusan kebijakan OJK di bidang perbankan dan keuangan syariah.

Peserta terpilih iB *Research Grant Program* 2016 sebagai berikut:

a. Kajian "Komparasi Model Pengukuran Tingkat Stabilitas Sistem Perbankan Ganda Di Indonesia: Pendekatan *Markov Switching*" Kajian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dinilai lebih stabil dibandingkan perbankan konvensional karena memiliki nilai probabilitas yang lebih besar untuk berada pada kondisi stabil dan nilai probabilitas yang lebih kecil untuk berada pada kondisi krisis dibandingkan dengan perbankan konvensional.

b. Kajian "Analisis Peran Perbankan Syariah dan Kebutuhan Petani dalam Pembiayaan Pertanian Melalui Akad Salam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama minimnya penyaluran pembiayaan pertanian melalui akad Salam pada perbankan syariah di Indonesia adalah karena adanya risiko pembiayaan. Sedangkan penyebab utama sedikitnya petani yang mengakses pembiayaan pertanian melalui akad Salam adalah minimnya pengetahuan petani tentang akad Salam.

c. Kajian "Framing Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional Studi Eksperimen Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta". Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan *framing* informasi secara signifikan mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung di bank.

d. Kajian "Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Metode Komparasi *Islamic Social Reporting Index* dan *Global Reporting Initiative Index* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014)". Kajian ini menunjukkan bahwa jumlah proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang positif.

II.3 MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

II.3.1 Penguatan Pengawasan SJK

II.3.1.1 RCAP *Assessment*

RCAP merupakan penilaian yang dilakukan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang diterbitkan oleh Indonesia terkait kerangka Basel, baik Basel II, Basel 2.5, maupun Basel III yang dilakukan per paragraf. Seluruh negara yang menjadi anggota

agenda, while supporting sharia banking research activities by students and external researchers, the output of which will support OJK policymaking in the areas of sharia banking and finance.

The selected participants of the iB Research Grant Program in 2016 are summarised as follows:

a. "A comparison of Models to Measure the Stability of the Dual Banking System in Indonesia: Using the Markov Switching Approach". This study showed that the sharia banking industry is considered more stable than the conventional banking system due to a higher probability of stable conditions and a lower probability of crisis conditions than the conventional banking system.

b. "Analysing the Role of the Sharia Banking Industry and the Needs of Farmers through Salam Contract Agricultural Financing". The results showed that the main determinant of minimal agricultural financing through Salam contracts at Sharia Banks in Indonesia was financing risk. Meanwhile, the main cause of limited farmer access to agricultural financing through Salam contracts was shown to be the minimal understanding of farmers regarding such contracts.

c. "Framing Information and its Impact on the Decision to Save at Sharia Banks and Conventional Banks: An Experimental Study by Students of Islamic Business and Economics in the Special Region of Yogyakarta". The results showed that differences in terms of framing information significantly influenced customer decisions to save at a bank.

d. "The Impact of Good Corporate Governance on Disclosure of Social Responsibility: A Comparison between the Islamic Social Reporting Index and the Global Reporting Initiative Index (A Case Study of Islamic Banks from 2011-2014)". The study showed that the number/proportion of independent members of the Board of Commissioners had a negative correlation with disclosure of social responsibility at sharia banks in Indonesia, while business scale correlated positively.

II.3 MAINTAINING FINANCIAL SYSTEM STABILITY AS A FOUNDATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

II.3.1 Strengthening Financial Services Sector Supervision

II.3.1.1 RCAP Assessment

RCAP is an in-depth assessment conducted by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) to observe the consistency of regulations issued in Indonesia in relation to the Basel, Basel II, Basel 2.5 and Basel III frameworks. All member nations of BCBS are required to implement RCAP. Based on the results, BCBS issues

BCBS wajib menjalani RCAP. Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant, largely compliant, materially noncompliant*, dan *non-compliant*.

Secara garis besar terdapat dua kategori RCAP yang dilakukan Indonesia, yaitu terkait dengan kerangka permodalan dan kerangka likuiditas. Pelaksanaan RCAP untuk Indonesia mencakup RCAP untuk *Capital* dan RCAP untuk *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Prosesnya dimulai dengan penyampaian hasil *self-assessment* kepada BCBS. Berdasarkan hasil *self-assessment*, asesor menilai sejauh mana konsistensi pengaturan perbankan di Indonesia dibandingkan dengan kerangka Basel.

Selama proses asesmen berlangsung, telah dilakukan diskusi antara tim asesor dan perwakilan OJK dan BI, perwakilan beberapa bank, maupun kantor akuntan publik. Koordinasi dengan instansi lain dilakukan melalui penyampaian *update* perkembangan RCAP dalam berbagai forum pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam pelaksanaan RCAP, telah dilakukan tindak lanjut berupa penerbitan ketentuan baru maupun perubahan ketentuan atas beberapa ketentuan yang dinilai belum konsisten dengan kerangka Basel. Dalam melakukan penerbitan ketentuan baru maupun perubahan ketentuan kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama.

Pada akhir November, BCBS telah menetapkan hasil penilaian RCAP dengan nilai *Compliant* (C) untuk RCAP *Liquidity Coverage Ratio* dan *Largely Compliant* (LC) untuk RCAP *Capital*.

Hasil tersebut merupakan hasil optimal yang dapat diraih oleh Indonesia saat ini, karena untuk aspek Capital Indonesia memilih untuk mengutamakan kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu dengan mempertahankan (i) pengenaan bobot risiko 0% untuk SUN (Surat Utang Negara) dalam denominasi mata uang asing (sementara sesuai kerangka Basel, eksposur tersebut dikenakan bobot risiko berdasarkan *country rating* Indonesia yaitu 50%) dan (ii) pengenaan bobot risiko untuk tagihan kepada pegawai dan pensiunan dengan bobot risiko 50% (sementara sesuai kerangka Basel eksposur tersebut dikenakan bobot risiko 75%) dengan pertimbangan bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan yang dijamin sehingga risikonya lebih rendah dibandingkan dengan tagihan lain.

Hasil tersebut membuktikan bahwa regulasi perbankan Indonesia telah sesuai dengan standar perbankan internasional yang berlaku. Diharapkan hasil tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan di Indonesia.

a statement consisting of compliant, largely compliant, materially noncompliant and noncompliant.

In general, there are two RCAP categories in Indonesia, namely the capital framework and liquidity framework. Therefore, RCAP implementation in Indonesia covers RCAP for Capital and RCAP for the Liquidity Coverage Ratio (LCR). The process begins with the submission of a self-assessment to BCBS. Based on the results of the self-assessment, assessors appraise how consistent banking sector regulations are in Indonesia compared to the Basel framework.

During the assessment process, discussions are held between the team of assessors and representatives from Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK), representatives from several banks and public accounting firms. Coordination with other institutions is achieved through updates concerning RCAP developments at various forums of the Financial System Stability Committee. Through RCAP implementation, follow-up actions have been taken in the form of issuing new regulations and regulatory amendments to existing regulations that were deemed inconsistent with the Basel framework. The national interest was the overarching consideration when issuing new regulations or amending existing regulations.

At the end of November, BCBS affirmed Indonesia's RCAP assessment as Compliant (C) for the Liquidity Coverage Ratio and Largely Compliant (LC) for Capital.

The results were the best Indonesia could have achieved at that time because, with respect to capital, Indonesia prefers to prioritise the national interest by maintaining (i) a 0% risk weight for government debt securities (SUN) denominated in a foreign currency (while, pursuant to the Basel Framework, such exposure has a risk weight of 50% based on the country rating of Indonesia); and (ii) a 50% risk weight for claims on employees and retirees (while, pursuant to the Basel Framework, such exposure has a risk weight of 75%) considering that such claims are guaranteed, therefore the risks are lower.

The results confirmed that banking regulations in Indonesia are consistent with prevailing international standards. Furthermore, the results are expected to build public confidence in the banking industry of Indonesia.

II.3.1.2 Penguatan Protokol Manajemen Krisis Lintas Institusi

Dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan, Komisi XI DPR RI telah mengesahkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 15 April 2016. UU PPKSK bertujuan menetapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kondisi krisis sistem keuangan. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat diwujudkan.

Berdasarkan Pasal 4 UU PPKSK, telah dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan anggota terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Dalam rangka menguji implementasi UU PPKSK, mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan antar lembaga anggota KSSK, telah diadakan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Nasional pada 15 September 2016 bertempat di Jakarta. Simulasi ini diselenggarakan dalam satu hari pelaksanaan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh Pimpinan Lembaga Anggota KSSK. Rentang waktu yang digunakan dalam skenario Simulasi adalah antara bulan Agustus 2016 – Januari 2017.

Skenario yang dirumuskan oleh tim penyusun skenario simulasi merepresentasikan analisis lintas Lembaga (OJK, BI, Kemenkeu dan LPS). Skenario dimulai dari pemburukan yang terjadi di perekonomian global dan domestik yang berimbas pada kondisi fiskal Indonesia dan pada gilirannya mempengaruhi lembaga jasa keuangan domestik. Pemburukan tersebut berdampak pada semakin meningkatnya gangguan pada salah satu bank sistemik milik Pemerintah dan kemudian mempengaruhi salah satu bank sistemik lainnya. Pada saat yang sama, terdapat pula permasalahan yang dihadapi oleh sebuah Bank Non-Sistemik yang turut memperburuk kondisi perekonomian. Pasar saham domestik juga tertekan signifikan, dan mempengaruhi harga saham lembaga-lembaga jasa keuangan terkait. Skenario tersebut disusun sedemikan rupa sehingga seluruh Lembaga dapat saling berkoordinasi dalam pengambilan keputusan.

Simulasi ini dihadiri oleh observer yang berasal dari World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) untuk memperoleh masukan dari pihak eksternal yang kompeten. Secara umum, para *observer* menyatakan apresiasi atas pelaksanaan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Nasional 2016 yang berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan tujuannya.

II.3.1.2 Strengthening Interinstitutional Crisis Management Protocol (CMP)

Seeking to create and maintain financial system stability, Commission XI of the People's Representative Council (DPR) of the Republic of Indonesia enacted Act No. 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK), signed by the President of the Republic of Indonesia on 15th April 2016. The PPKSK Act contains measures to prevent and mitigate crisis conditions in the financial system. Therefore, solid financial system stability in the face of domestic and external threats, can be realised.

Pursuant to Article 4 of the PPKSK Act, the Financial System Stability Committee (KSSK) was established with members consisting of the Minister of Finance, Governor of Bank Indonesia, Chairman of the OJK Board of Commissioners and Chairman of the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). To test PPKSK implementation as well as the interinstitutional coordination and decision-making mechanisms of KSSK, a National Financial System Crisis Prevention and Mitigation simulation was held on 15th September 2016 in Jakarta. The comprehensive simulation was run in a day and involved all leaders of the KSSK member institutions. The timeframe of the simulation was between August 2016 and January 2017.

The scenario of the simulation represented interinstitutional analysis (OJK, BI, MoF and IDIC). The scenario began with a global and domestic economic downturn, which undermined fiscal conditions in Indonesia and, in turn, spilled over to affect domestic financial services institutions. The downturn increased distress and disruptions at a state-owned systemically important bank (SIB) and subsequently propagated to another systemically important bank. At the same time, a non-systemic bank also faced problems, which exacerbated economic dynamics. The domestic stock market encountered significant pressures, which depressed the share prices of related financial institutions. Furthermore, the scenario was arranged in such a way that all member institutions could coordinate in the decision-making process.

The simulation was also attended by competent external observers from the World Bank, International Monetary Fund (IMF) and Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), who provided input as required. In general, the observers expressed their appreciation for the successful National Financial System Crisis Prevention and Mitigation simulation in 2016.

II.3.1.3 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Terintegrasi (Peraturan/Sistem/Unit Kerja) serta Implementasi Pengawasan Terintegrasi

Berdasarkan amanat Pasal 5 UU OJK No. 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan hal tersebut, OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan dimaksud sesuai dengan POJK No.17/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan dan/atau pengendalian.

Proses pengembangan pengawasan terintegrasi telah berjalan mulai tahun 2013 hingga saat ini.

II.3.1.3 Integrated Supervision Infrastructure Development and Integrated Supervision Implementation

Pursuant to Article 5 of the OJK Act (No. 21) of 2011, the Financial Services Authority (OJK) performs integrated regulation and supervision of all activities in the financial services sector. Consequently, OJK also conducts integrated regulation and supervision of Financial Conglomerates. According to OJK Regulation (POJK) No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, financial conglomerates are financial services institutions operating as part of a group due to linkages and/or controls.

The development of integrated supervision began in 2013 and continues to the present.

***Key Milestone* Pengawasan Terintegrasi**
Integrated Supervision Key Milestone

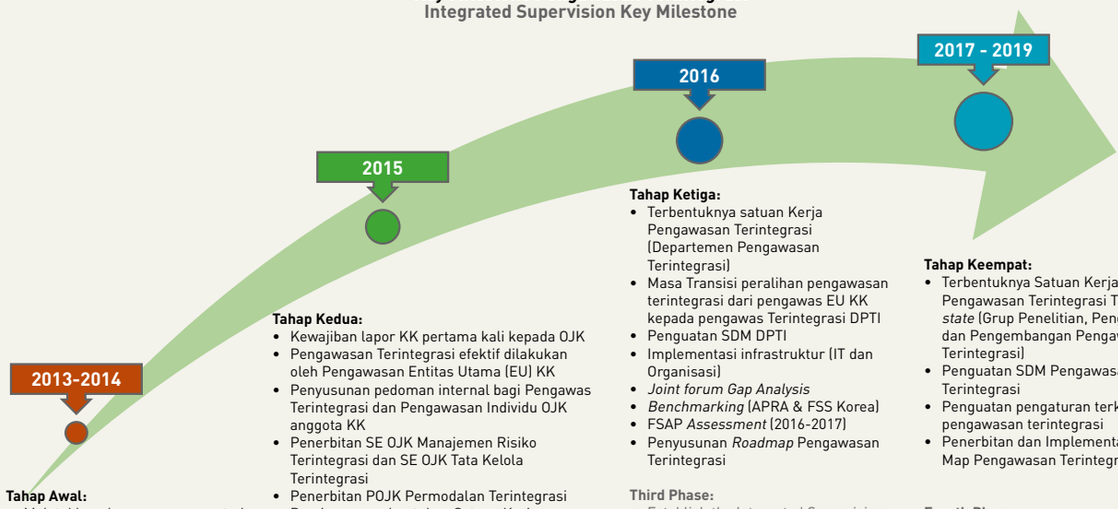

Tahap Awal:
- Meletakkan dan menyusun metode pengawasan dan pengaturan terintegrasi terhadap KK
- Uji coba metode pengawasan terintegrasi
- Persiapan infrastruktur awal pengawasan terintegrasi
- Penerbitan PJOK Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK Tata Kelola Terintegrasi

Preliminary Phase (2013-2014):
- Determine and compile integrated supervision and regulation methods for financial conglomerates;
- Trial the integrated supervision methods;
- Prepare preliminary infrastructure for integrated supervision;
- Issue OJK regulations (POJK) concerning integrated risk management and integrated governance.

Tahap Kedua:
- Kewajiban lapor KK pertama kali kepada OJK
- Pengawasan Terintegrasi efektif dilakukan oleh Pengawasan Entitas Utama (EU) KK
- Penyusunan pedoman internal bagi Pengawas Terintegrasi dan Pengawasan Individu OJK anggota KK
- Penerbitan SE OJK Manajemen Risiko Terintegrasi dan SE OJK Tata Kelola Terintegrasi
- Penerbitan POJK Permodalan Terintegrasi
- Persiapan pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi
- Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi

Second Phase:
- Mandatory reporting by financial conglomerates to OJK for the first time;
- Effective integrated supervision of the main entity of the financial conglomerate;
- Compile internal guidelines for integrated supervisors and individual supervision of financial services institutions as members of financial conglomerates;
- Issue OJK circular letters (SEOJK) concerning integrated risk management and integrated governance;
- Issue an OJK regulation (POJK) concerning Integrated Capital Requirements;
- Prepare to establish an Integrated Supervision Task Force; and
- Development of Integrated Supervision Information System.

Tahap Ketiga:
- Terbentuknya satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi (Departemen Pengawasan Terintegrasi)
- Masa Transisi peralihan pengawasan terintegrasi dari pengawas EU KK kepada pengawas Terintegrasi DPTI
- Penguatan SDM DPTI
- Implementasi infrastruktur (IT dan Organisasi)
- *Joint forum Gap Analysis*
- *Benchmarking* (APRA & FSS Korea)
- FSAP *Assessment* (2016-2017)
- Penyusunan *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi

Third Phase:
- Establish the Integrated Supervision Task Force (Department of Integrated Supervision);
- Transition period from main entity supervisors to Department of Integrated Supervision (DIS) supervisors;
- Strengthen human resources in the Department of Integrated Supervision (DIS);
- Infrastructure implementation (IT and Organisation);
- Joint Forum Gap Analysis;
- Benchmarking (APRA and FSS Korea);
- FASP Assessment (2016-2017)
- Compile the Integrated Supervision Roadmap.

Tahap Keempat:
- Terbentuknya Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi Tahap 2/*end state* (Grup Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi)
- Penguatan SDM Pengawasan Terintegrasi
- Penguatan pengaturan terkait pengawasan terintegrasi
- Penerbitan dan Implementasi Road Map Pengawasan Terintegrasi

Fourth Phase:
- Establish the Phase II Integrated Supervision Task Force (Integrated Supervision Research, Regulation and Development Group);
- Strengthen Integrated Supervision human resources;
- Strengthen regulations relating to Integrated Supervision; and
- Issue and implement the Integrated Supervision Roadmap.

Terkait pengaturan terhadap Konglomerasi Keuangan, OJK telah mengeluarkan beberapa ketentuan antara lain:

1. POJK No.17/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
2. POJK No.18/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
3. POJK No.26/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
4. SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
5. SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Relating to the regulations on financial conglomerates, OJK also issued several other regulations as follows:

1. OJK Regulation (POJK) No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;
2. OJK Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;
3. OJK Regulation (POJK) No. 26/POJK.03/2015 concerning Integrated Capital Requirements for Financial Conglomerates;
4. OJK Circular Letter (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates; and
5. OJK Circular Letter (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.

Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan yang dilakukan OJK merupakan pengawasan dengan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas untuk mendeteksi potensi risiko signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terintegrasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang disebut juga dengan siklus pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan. Siklus dimaksud merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling memiliki keterkaitan antar masing-masing tahapan. Periode pelaksanaan siklus pengawasan dilaksanakan selama satu tahun.

Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates by OJK is a form of oversight using a risk-based strategy and methodology that allows supervisors to detect potential significant risks early and, thus, take pertinent and timely supervisory actions. Integrated supervision is conducted through a number of phases, otherwise known as the cycle of integrated risk-based supervision of financial conglomerates. The cycle is a continuous process and the phases are mutually interconnected with a duration of one year.

Dalam rangka memperkuat penerapan pengawasan terintegrasi, OJK telah menyusun rencana jangka menengah - panjang dengan fokus utama pada tiga aspek pengawasan terintegrasi yaitu penguatan pengaturan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, pengembangan tools dan metodologi pengawasan terintegrasi dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan.

To strengthen integrated risk-based supervision, OJK prepared a medium-long term plan with a primary focus on three aspects, namely strengthening the integrated regulations concerning financial conglomerates; developing the tools and methodologies of integrated supervision; and strengthening the implementation of integrated supervision of financial conglomerates.

Selain itu secara internal OJK juga terus memperkuat infrastruktur baik IT, SDM, dan tata kelola dalam rangka melakukan pengawasan terintegrasi. Penguatan pengawasan terintegrasi dilakukan secara berkelanjutan agar sektor keuangan dapat terus tumbuh, stabil dan memiliki daya saing yang tinggi.

Internally, OJK also strengthened infrastructure, including information technology, human resources and governance, in order to perform integrated supervision. Furthermore, integrated supervision is constantly being improved to ensure the financial sector can continue to grow, remain stable and competitive.

Pengawasan Terintegrasi Selama 2016

Dalam pelaksanaan pengawasan terintegrasi, selama 2016 telah dilakukan penyusunan/pengkinian Pemahaman KK [*Know Your Financial Conglomerate* (KYFC)], penyusunan Penilaian Risiko dan Tingkat Kondisi KK [*Integrated Risk Rating* (IRR)] dan Perencanaan Pengawasan Terintegrasi [*Integrated Supervisory Plan* (ISP)] terhadap 44 Grup KK.

Integrated Supervision in 2016

In 2016, OJK prepared or updated the following aspects of integrated supervision: Know your Financial Conglomerate (KYFC), Integrated Risk Rating (IRR) and Integrated Supervisory Plans (ISP) for 44 financial conglomerate groups.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, pembangunan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) telah memasuki tahap II berupa penyempurnaan fitur-fitur aplikasi SIPT, antara lain penambahan modul berisi kumpulan data dan rasio keuangan yang diberi nama *Financial Conglomerate Ratios* (FICOR). Pengembangan FICOR akan menjadi fokus utama *enhancement* SIPT di 2017.

To support integrated supervision task implementation, OJK entered Phase II of Integrated Supervision Information System (SIPT) development by honing the application's features, including an additional module for data sets and financial ratios, known as Financial Conglomerate Ratios (FICOR). FICOR development will be the overarching focus of SIPT enhancement in 2017.

Total aset dari 44 Grup KK sebesar Rp5.521,6 triliun. Sementara itu, total aset industri perbankan dan industri jasa keuangan Indonesia masing-masing sebesar Rp6.574,6 triliun dan Rp8.377,3 triliun, sehingga persentase perbandingan total aset 44 Grup KK terhadap total aset industri perbankan dan industri jasa keuangan cukup signifikan, yaitu masing-masing sebesar 83,98% dan 65,91%.

The total assets of the 44 financial conglomerate groups amount to Rp5,521.6 trillion. In comparison, the total assets of the banking industry and financial services industry in Indonesia stand at Rp6,574.6 trillion and Rp8,377.3 trillion respectively. Consequently, the total assets of the 44 financial conglomerates account for 83.98% and 65.91% respectively of the banking industry and financial services industry, a significant portion.

Jenis Konglomerasi Keuangan
Financial Conglomerate Type

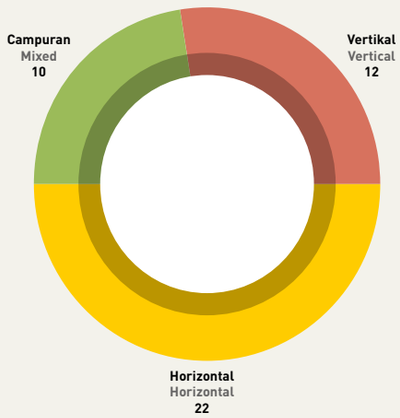

Jenis LJK | Type of Financial Services	Total EU
Bank | Banks	33
Perusahaan Efek | Securities Companies	2
Asuransi/Reasuransi | Insurance/Reinsurance	6
Perusahaan Pembiayaan | Finance Companies	2
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya | Other Special Financial Institutions	1
Total	**44 KK**

Total Aset dan Perbandingan Konglomerasi Keuangan
Total Assets and Financial Conglomerate Comparison

44 KK Lintas Sektor | 44 Cross-Sector Financial Conglomerates	Desember 2016 | December 2016
Total Aset | Total Assets	Rp5.793 T
% terhadap Total Aset Sektor Jasa Keuangan | % of Financial Services Sector Total Assets	66,12%

II.3.1.4 Penguatan Fungsi Penyidikan terhadap Pelaku di SJK

Dalam rangka mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK secara berkesinambungan berupaya memenuhi infrastruktur baik dari segi sumber daya manusia dan pendukung kebijakan di bidang tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Sepanjang 2016, OJK mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan penyidikan melalui penempatan enam perwira menengah dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan dua orang Pegawai Negeri Sipil di OJK untuk memenuhi formasi penyidik di OJK. Sehingga total jumlah penyidik di OJK hingga Desember 2016 sebanyak 11 Polri dan delapan PPNS.

OJK juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian dan/atau Lembaga terkait lainnya untuk mendatangkan Penyidik dan/atau Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi formasi Penyidik OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penyusunan Perangkat Peraturan

OJK telah mempersiapkan beberapa langkah untuk menyediakan perangkat peraturan untuk mendukung efektifnya pelaksanaan fungsi penyidikan. Langkah dimaksud berupa membangun piranti lunak, perangkat regulasi, maupun standar operasional prosedur. Perangkat regulasi tersebut terdiri atas penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, serta OJK telah menetapkan SEOJK Nomor: 1/SEDK.01/2016 tentang Mekanisme Koordinasi Pemeriksaan dan/atau Investigasi dengan penyidik OJK, SEOJK Nomor 3/SEDK.01/2016 tentang Perubahan Atas SEDK OJK Nomor 3/SEDK.01/2015 tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 5/SEDK.01/2016 tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Hubungan Kelembagaan

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara OJK dengan Polri tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, OJK menggelar koordinasi pelaksanaan Nota Kesepahaman dimaksud. Dalam koordinasi dimaksud juga dilakukan penandatanganan Pedoman Kerja antara OJK dan Polri tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Pedoman kerja ini diharapkan dapat mewujudkan kerja sama pencegahan, penegakan hukum, dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif.

Menyadari pentingnya hal tersebut, OJK telah melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bareskrim Mabes Polri serta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kejaksaan Republik Indonesia

II.3.1.4 Strengthening the Investigative Function

As mandated by the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK constantly strives to fulfil the need for infrastructure in terms of human resources and supporting policies to investigate crime in the financial services sector.

In 2016, OJK supported investigation activities by recruiting six investigators from the national police and two civil servants to OJK, bringing the number of investigators at OJK to 11 police officers and eight civil servants.

OJK also coordinated with other relevant ministries and institutions to bring in additional investigators and civil servants pursuant to the OJK Act.

Formulating Regulatory Tools

OJK has prepared several measures to provide regulatory tools to support the effective implementation of the investigation function. The measures include software, regulatory tools and standard operating procedures (SOP). The regulatory tools include formulation of standard operating procedures for task implementation at the Financial Services Sector Investigation Department as well as promulgating Circular Letter (SEOJK) No. 1/SEDK.01/2016 concerning the Inspection Coordination Mechanism and/or Investigations by OJK Investigators, Circular Letter (SEOJK) No. 3/SEDK.01/2016, as an amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 3/SEDK.01/2015 on Administrating Criminal Investigations in the Financial Services Sector, and BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.01/2016 on Administrating Criminal Investigations in the Financial Services Sector.

Institutional Relationships

Following-up on the Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the national police concerning Cooperation to Solve Crime in the Financial Services Sector, OJK organised coordinated implementation of the MoU. Furthermore, as part of the coordination, work guidelines were also signed between OJK and the police regarding Prevention, Law Enforcement and Coordination to Solve Crime in the Financial Services Sector. The work guidelines are expected to facilitate effective cooperation in terms of prevention, law enforcement and coordination to solve crime in the financial services sector.

Acknowledging the importance of such matters, OJK also coordinates with the Deposit Insurance Corporation and the Criminal Investigation Division (Bareskrim) of the national police, and signed a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK

terkait Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dalam Penanganan Perkara di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya perangkat peraturan dimaksud diharapkan kegiatan penyidikan dapat terselenggara secara lebih teratur, objektif, akuntabel serta sejalan dengan prosedur dan mekanisme kerja aparat penegak hukum lain, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebagai satu kesatuan *criminal justice* system di Indonesia.

Pelaksanaan Penanganan Perkara
Selama 2016, berdasarkan kriteria prioritas, OJK menerbitkan 14 Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) yang terdiri dari 10 perkara perbankan dan empat perkara pasar modal. Selanjutnya terdapat tujuh berkas perkara yang dikirim kepada JPU Kejaksaan RI yang terdiri dari empat perkara BPR dan tiga perkara BPD. Modus dari perkara tersebut adalah pencatatan palsu, transaksi tanpa adanya perubahan kepemilikan, penyajian informasi yang tidak benar, dan klaim asuransi yang melebihi nilai dari jumlah penilaian (*appraisal*).

Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
Pemahaman bersama terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan oleh OJK bagi instansi/aparat penegak hukum maupun satuan kerja OJK baik di pusat maupun di daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan agar terwujud penegakan hukum yang sinergis, baik antara OJK dan instansi/aparat penegak hukum lain maupun internal OJK. Selama 2016, OJK melakukan koordinasi dengan 12 kepolisian di daerah yaitu dengan Polda Riau, Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Jawa Timur, Polda Banten, Polda Bali, Polda Jawa Tengah, Polresta Malang, Polda Kalimantan Tengah, Polda Maluku, Polda Aceh dan Polda Sumatera Barat. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk koordinasi penanganan kasus maupun sosialisasi mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan dan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum.

II.3.1.5 Kebijakan dan Implementasi Pengawasan *Market Conduct (Market Conduct, Thematic Surveillance, Laporan Self Assessment* dan Pemantauan Iklan Triwulan)

Kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen merupakan faktor penting bagi upaya OJK untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen dalam memanfaatkan produk dan layanan sektor jasa keuangan. Salah satu upaya OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan *market conduct*. Pengawasan *Market Conduct* sangat penting dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian masyarakat atas produk yang ditawarkan penyedia jasa keuangan yang disebabkan ketidaktahuan konsumen atas fitur atau *benefit* produk yang ditawarkan maupun karena ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pengawasan *market conduct* di OJK dilakukan tiga metode, yaitu Penilaian Mandiri (*Self Assessment*), Pemantauan Tematik (*Thematic Surveillance*) dan pemantauan iklan triwulanan.

and the Attorney General of the Republic of Indonesia concerning coordinated task implementation, functions and authorities when handling criminal cases in the financial services sector. The regulatory tools are expected to facilitate more regular, objective and accountable investigations in line with the procedures and mechanisms of other law enforcement agencies, in this case the public prosecutor, as part of the overall criminal justice system in Indonesia.

Case Handling
In 2016, based on priority criteria, OJK issued 14 Investigation Directives (SPRINDIK), involving 10 banking cases and four capital market cases. Furthermore, seven cases were referred to the public prosecutor, consisting of four rural bank cases and three regional bank cases. The modus operandi included faking records, transactions without a transfer of ownership, providing erroneous or misleading information, and insurance claims exceeding the appraisal value.

Socialisation of Criminal Activities in the Financial Services Sector
Joint understanding regarding implementation of the investigation function at OJK for law enforcers and OJK work units at head office as well as regional offices is necessary to realise synergic law enforcement between OJK and law enforcement officers as well as internally at OJK. In 2016, OJK coordinated with 12 police departments in Riau, East Nusa Tenggara, East Kalimantan, East Java, Banten, Bali, Central Java, Malang, Central Kalimantan, Maluku, Aceh and West Sumatra to resolve criminal cases and to conduct socialisation activities regarding crime in the financial services sector, including illegal fund accumulation and investment management.

II.3.1.5 Market Conduct Supervision Policy and Implementation (Thematic Surveillance, Self-Assessments and Quarterly Advertisement Monitoring)

Public confidence in consumer protection is a critical factor in OJK's efforts to nurture consumer confidence in financial services sector products and services. One way OJK strengthens consumer confidence is through market conduct supervision. Market conduct supervision is crucial to reduce potential public losses from the products offered by financial services providers caused by consumer ignorance of the features and benefits of the products on offer as well as by the noncompliance of financial services providers to consumer protection principles. Market conduct supervision at OJK consists of three different methods, namely self-assessments, thematic surveillance and quarterly advertisement monitoring.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengawas *market conduct*, diselenggarakan *Workshop Market Conduct Supervision* bekerja sama dengan AIPEG dan World Bank dengan mendatangkan tenaga ahli World Bank. Peserta dibekali dengan pengetahuan dasar tentang *market conduct*, *best practices* di beberapa negara, *sharing session*, praktik *on site thematic surveillance*, dan *games market conduct*.

To build employee understanding and competence concerning market conduct supervision, OJK hosted a Market Conduct Supervision Workshop under the auspices of the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) and World Bank, bringing in World Bank experts. The participants were equipped with basic knowledge regarding market conduct, best practices in several countries, on-site thematic surveillance practices and market conduct games.

Dalam rangka implementasi pengawasan *market conduct*, OJK melakukan *pilot project* sosialisasi model pengawasan *market conduct* untuk memperkenalkan dan menerapkan konsep pengawasan *market conduct* secara sederhana kepada para pengawas di daerah, melalui kegiatan *on-site supervision* PUJK yang ada di wilayahnya. Pelaksanaan *pilot project* pengawasan *market conduct* dilakukan dengan memberikan pemaparan beberapa materi tentang pengenalan pengawasan *market conduct* berdasarkan risiko dan strategi implementasinya, praktik pengawasan *market conduct* di beberapa negara, penyampaian hasil Operasi Intelijen Pasar (OIP) dan *Thematic Surveillance* (TS) serta penjelasan kertas kerja *self assessment* yang terdiri dari pedoman pemeriksaan Fungsi Penanganan Pengaduan Nasabah dan Perjanjian Baku.

In terms of market conduct supervision, OJK initiated a pilot project socialising market conduct supervision models to introduce and apply simple market conduct supervision to regional supervisors through on-site supervision activities at financial services providers located nearby. The pilot project introduced risk-based market conduct supervision and the implementation strategies along with practices in various countries, and delivered the results of market intelligence operations and thematic surveillance as well as explained the working paper on self-assessments, consisting of inspection guidelines for handling customer complaints and standard agreements.

Detail pelaksanaan pengawasan *market conduct* selama 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

The implementation details for market conduct supervision in 2016 are as follows:

a. *Thematic Surveillance* (TS) dan Operasi Intelijen Pasar (OIP)

Thematic surveillance merupakan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen berdasarkan tema tertentu terkait produk dan/atau layanan PUJK yang berpotensi merugikan konsumen. Sepanjang 2016, pelaksanaan kegiatan *thematic surveillance* (TS) mengambil dua tema yaitu penanganan pengaduan melalui mekanisme *internal dispute resolution* (IDR) di sektor jasa keuangan dan perjanjian baku. Dalam pelaksanaan TS, metodologi yang digunakan meliputi *Open Source Intelligence* (OSINT), *Mystery Shopping* (MS), *Customer Testimony* (CT) dan *In-Depth Interview* (IDI).

Pelaksanaan TS dengan tema penanganan pengaduan melalui mekanisme IDR di sektor jasa keuangan mengambil sampling sebanyak 14 PUJK di sektor perbankan, dan masing-masing 10 PUJK di industri asuransi dan pembiayaan di empat kota besar. Tujuan TS ini untuk memenuhi kebutuhan informasi profil pengaduan dan pemetaan proses penanganan pengaduan sektor jasa keuangan sekaligus mengidentifikasi kebijakan dan proses penanganan pengaduan yang berpotensi merugikan konsumen. Hal-hal yang dinilai dalam kegiatan TS ini antara lain ketersediaan fungsi dan kualitas SDM, kualitas infrastruktur dan prosedur penanganan pengaduan. Hasil TS memberi dukungan dalam perumusan kebijakan standardisasi penanganan pengaduan sektor jasa keuangan, di samping itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur penerapan prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

a. Thematic Surveillance and Market Intelligence

Thematic surveillance is the monitoring and evaluation of consumer protection, based on certain themes related to the products and services of financial services providers that are potentially detrimental to consumers. In 2016, thematic surveillance took two themes, complaint handling through internal dispute resolution (IDR) in the financial services sector and standard agreements. The methods used to implement thematic surveillance include open source intelligence (OSINT), Mystery Shopping (MS), Consumer Testimony (CT) and In-depth Interviews (IDI).

Thematic surveillance implementation in terms of complaint handling through the IDR mechanism in the financial services sector used a sample of 14 financial services providers in the banking sector and 10 each in the insurance industry and financing industry in four large cities. The objective of the thematic surveillance is to fulfil the need for complaint profile information and mapping the complaint handling process in the financial services sector, while identifying complaint handling processes and policies that could potentially incur losses for consumers. The quality and function of human resources are assessed per thematic surveillance, together with infrastructure quality and complaint handling procedures. The results of thematic surveillance support policy standardisation for complaint handling in the financial services sector, and are used as a measure of consumer protection principles, as applied in the financial services sector.

Sementara itu, TS bertema perjanjian baku dilaksanakan di empat kota besar dengan sampling sebanyak 13 bank, 10 perusahaan asuransi dan 10 perusahaan pembiayaan. Perjanjian baku yang diriset meliputi produk KPR, asuransi jiwa/unit link dan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat/dua. Tujuan TS mengenai Perjanjian Baku antara lain untuk kepentingan pemetaan kepatuhan penerapan perjanjian baku sesuai ketentuan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sekaligus memastikan bahwa perjanjian baku yang disusun telah mempertimbangkan aspek *suitability* dan *fairness* konsumen, kesesuaian implementasi dari perjanjian tersebut, dan menjadi salah satu alat ukur penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh PUJK. Pokok pengamatan TS ini antara lain meliputi aspek transparansi, implementasi dan konten perjanjian. Hasil kegiatan TS mendukung perumusan kebijakan standarisasi penerapan perjanjian baku di sektor keuangan.

OJK juga melakukan Operasi Intelijen Pasar (OIP) yang merupakan respon terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Selama 2016, OJK melaksanakan lima kali OIP dengan fokus pengamatan pada praktik pergadaian swasta, produk KPR perbankan, dugaan penghimpunan dana secara ilegal pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), pemetaan dugaan penawaran investasi ilegal, dan kerawanan penawaran produk jasa keuangan melalui iklan. Melalui kegiatan OIP, OJK memetakan proses bisnis sekaligus mendeteksi kerawanan praktik bisnis yang berpotensi merugikan masyarakat. Potret hasil kegiatan OIP bermanfaat untuk mendukung langkah pengawasan, perumusan kebijakan, dan bahkan penindakan di sektor jasa keuangan.

b. *Self Assessment*

Pendekatan *Self Assessment* dilakukan melalui pengisian kertas kerja kebijakan, implementasi dan evaluasi atas lima prinsip perlindungan konsumen oleh PUJK meliputi prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kelima prinsip tersebut dijabarkan dalam beberapa lingkup antara lain pelaksanaan edukasi, penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk, penyusunan perjanjian baku, kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen oleh PUJK, dan pelayanan dalam rangka penyelesaian sengketa.

OJK mencatat bahwa PUJK yang menyampaikan laporan *Self Assessment* melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) adalah sebanyak 1.855 PUJK dari 2.797 (66%) PUJK yang diwajibkan menyampaikan laporan. Pelaporan *Self Assessment* oleh PUJK ini dilaksanakan dengan tujuan:

- Meningkatkan *awareness* dan kepatuhan PUJK terhadap Ketentuan Perlindungan Konsumen yang telah dikeluarkan oleh OJK.
- Mengukur sejauh mana penerapan ketentuan Perlindungan Konsumen telah dilaksanakan oleh PUJK.

The theme of standard agreements was implemented in four large cities using a sample of 13 banks, 10 insurance companies and 10 finance companies. The standard agreements researched included housing loan products, life/unit linked insurance and automotive financing for two and four-wheeled vehicles. The objectives of the standard agreements theme included mapping compliance to standard agreements pursuant to prevailing OJK regulations on consumer protection in the financial services sector, while simultaneously ensuring that the standard agreements pay due consideration to aspects of consumer suitability and fairness as well as suitable implementation of the agreement. Furthermore, the final objective is to become a measure of consumer protection principles, as applied by financial services providers. Thematic surveillance observations include aspects of transparency, implementation and content and the results of thematic surveillance support policy to adopt standard agreements in the financial sector.

OJK also conducts market intelligence in response to developing issues in the public sphere. In 2016, OJK initiated market intelligence on five occasions, with a focus on observing private pawnbroker services, bank housing loan products, allegations of illegal fund accumulation at Saving and Loan Cooperatives (KSP) as well as mapping illegal investment products and vulnerable financial products and services offered through advertisements. Through market intelligence, OJK maps the business processes and simultaneously detects vulnerable business practices that could be detrimental to consumers. The market intelligence portrait supports supervision, policymaking and acting upon violations in the financial services sector.

b. Self-Assessment

The self-assessment approach entails completing working papers on policy, implementation and evaluation of the five consumer protection principles by financial services providers, including transparency, fairness, reliability, data security and confidentiality, complaint handling and dispute resolution. The five principles translate into various scopes, such as education, information delivery for product marketing, compiling standard agreements, personal consumer data security and confidentiality, consumer complaint services and resolution, and dispute settlement services.

OJK recorded that 1,855 out of 2,797 (66%) financial services providers required to submit reports delivered their self-assessments through the Consumer Protection and Education Reporting System (SiPEDULI). The self-assessments reported by financial services providers have the following aims:

- Build awareness and increase compliance among financial services providers regarding the Consumer Protection regulations issued by the Financial Services Authority (OJK).
- Measure how far the Consumer Protection regulations have been applied by financial services providers.

- Sebagai tambahan informasi bagi Pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap implementasi perlindungan Konsumen oleh PUJK.

Berdasarkan sektor, persentase penyampaian laporan *Self Assessment* sektor pasar modal mendominasi dengan jumlah 85% telah menyampaikan isian kuisioner diikuti sektor perbankan sebanyak 69% dan sektor IKNB sebanyak 52%. Salah satu penyebab belum semua PUJK melakukan *Self Assessment* antara lain PUJK dalam tahap penyesuaian implementasi peraturan perlindungan konsumen dan belum sepenuhnya memahami isi dari pertanyaan kuisioner *Self Assessment*.

Dari lima Kertas Kerja *Self Assessment* Edukasi dan Perlindungan Konsumen didapatkan hasil nilai Kertas Kerja terendah adalah Kerahasian Data, Pelaksanaan Edukasi, dan Penyelesaian Pengaduan, sedangkan hasil tertinggi terdapat pada Kertas Kerja Perjanjian Baku.

c. Pemantauan Iklan

Salah satu sumber data dan informasi untuk mendukung kegiatan market intelijen adalah pemantauan iklan serta penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). Cakupan *monitoring* iklan dan penawaran yang dilakukan secara triwulanan tersebut meliputi iklan yang dimuat di media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kriteria iklan yang baik meliputi akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan diatur berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Pemantauan iklan dengan Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI) dilakukan dengan menghimpun iklan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan pada sekitar 45 media massa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemantauan iklan ini merupakan salah satu alat ukur PUJK dalam melaksanakan kedua POJK tersebut.

Sepanjang 2016, terdapat 2.391 iklan berkaitan dengan produk dan/atau jasa keuangan dengan grafik jumlah iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan per sektor sebagai berikut:

- As supplementary information for supervisors to oversee the implementation of consumer protection by financial services providers.

By sector, the capital market dominated submissions of self-assessments, with 85% of the industry submitting questionnaires, followed by the banking industry (69%) and the nonbank financial industry (52%). One reason why not all financial services providers have delivered a self-assessment is that financial services providers are still in the implementation phase of the new consumer protection regulations and, therefore, do not fully understand the self-assessment questionnaire.

Of the five Consumer Protection and Education Self-Assessment Working Papers, the aspects that scored lowest were Data Confidentiality, Education, and Complaint Handling, while the strongest aspect was Standard Agreements.

c. Monitoring Advertisements

One source of data and information to support market intelligence originates from monitoring advertisements as well as offers of financial products and services through the Market Intelligence Reporting Information System (SIPMI). The scope of quarterly monitoring involves advertisements contained in national and local print media throughout Indonesia. The criteria for a good advertisement include accurate, clear, honest and not misleading pursuant to OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Circular Letter (SEOJK) No. 12/SEOJK.07/2014 concerning Information Delivery for Product Marketing and/or Financial Services.

Advertisements are monitored through the Market Intelligence Reporting Information System (SIPMI) by collecting advertisements for financial products and services from around 45 mass media spread throughout Indonesia. Monitoring advertisements provides a way to measure financial services provider compliance to the previously mentioned OJK regulations.

In 2016, a total of 2,391 advertisements for financial products and services were monitored as follows:

Jumlah Iklan Produk dan/atau layanan Jasa Keuangan 2016
Total Advertisements for Financial Products and Services Monitored in 2016

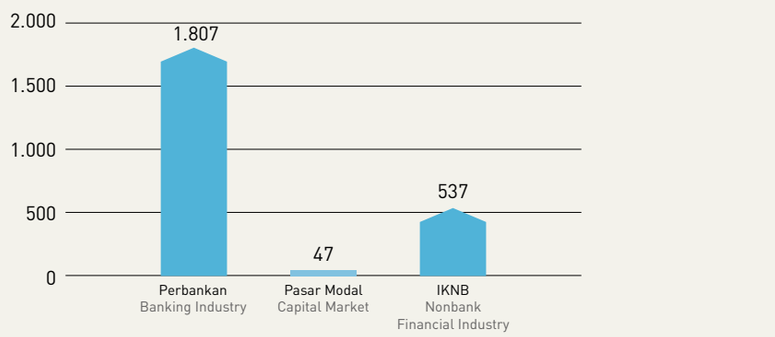

Dari jumlah tersebut, sebanyak 662 iklan diduga melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Of the total, 662 advertisements were suspected of violating the provisions of OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Circular Letter (SEOJK) No. 12/SEOJK.07/2014 concerning Information Delivery for Product Marketing and/or Financial Services.

Tren dugaan pelanggaran iklan per bulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

The monthly trend of suspected infractions is presented in the following chart.

Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per bulan sepanjang tahun 2016
Monthly Trend of Suspected Infractions in 2016

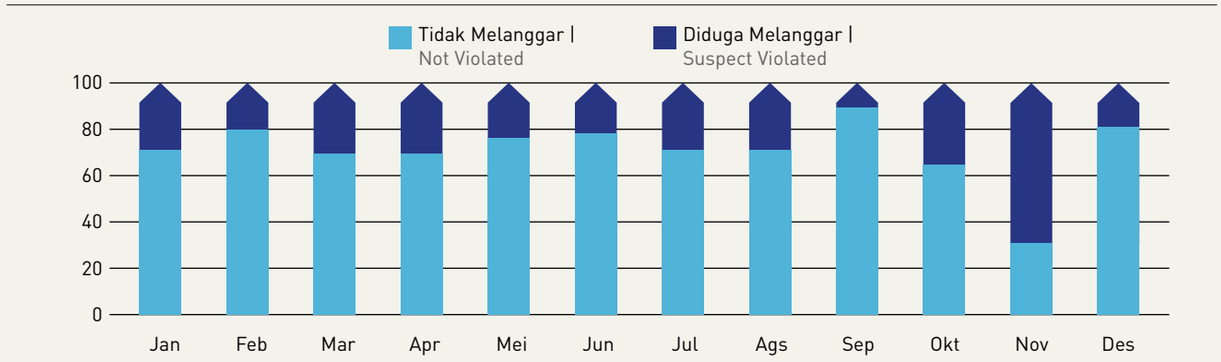

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tren pelanggaran iklan meningkat menjelang akhir tahun. Hal ini diduga terjadi karena PUJK melakukan berbagai promo untuk pencapaian target tahunan, sehingga cenderung mengabaikan prinsip perlindungan konsumen dalam memberikan informasi penawaran. Kategori paling banyak dilanggar sesuai dengan beleid yang berlaku dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

According to the chart above, the trend of suspected violations peaked towards yearend. OJK suspects the trend occurred due to various promotional activities undertaken by financial services providers to hit their annual targets, thus neglecting consumer protection principles when providing product and service information. The categories of most common suspected violations are presented in the following chart:

Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per Kategori Pelanggaran tahun 2016
Categories of Suspected Infractions in 2016

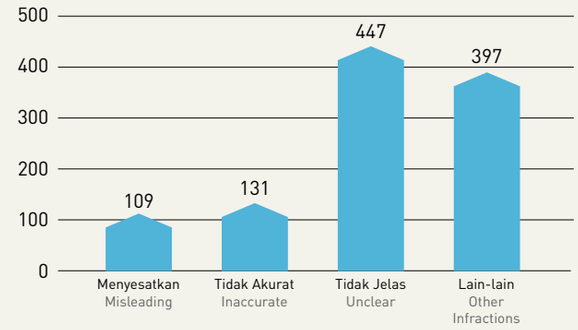

Berdasarkan grafik, masih banyak PUJK yang tidak memberikan informasi lengkap dalam penawaran yang dilakukan melalui iklan di media massa. Hal ini terjadi diduga karena PUJK memang memiliki maksud menyembunyikan sebagian informasi atau atas dasar estetika. Namun, dapat diamati dari pola dugaan pelanggaran bahwa iklan cenderung melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Hal ini dapat mengindikasikan keterbatasan pemahaman PUJK terkait *beleid* yang mengatur iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan lebih tegas terhadap penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa serta pedoman teknis beleid dimaksud agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

According to the chart above, many financial services providers are still failing to provide complete information in their advertisements posted in the mass media, possibly because financial services providers are deliberately hiding information or purely for aesthetic reasons. Nonetheless, it is also clear that the same mistakes are being committed repeatedly, indicating a lack of understanding by financial services providers concerning the regulations governing advertisements for financial products and services. Therefore, more aggressive supervision of financial products and services is required in the mass media along with the technical guidelines in order to prevent repeat violations in the future.

Sementara itu, dugaan pelanggaran kategori tidak akurat dan menyesatkan cenderung rendah. Hal ini diduga terjadi karena maraknya klaim produk dan/atau layanan keuangan terbaik oleh PUJK serta persaingan yang semakin ketat. *Rating* dan penilaian sebagai yang terbaik mulai dilakukan oleh PUJK dengan mencantumkan referensi valid untuk menarik kepercayaan konsumen.

Notwithstanding, violations in the form of inaccurate and misleading advertisements were low, possibly due to claims by financial services providers to offer the best financial products and services and/or tighter competition. Ratings and assessments have begun at financial services providers through valid references to build consumer confidence.

Total pelanggaran per kategori adalah 1.084 pelanggaran, lebih banyak dari jumlah iklan yang diduga melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa iklan melanggar lebih dari satu kategori. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kepatuhan PUJK, 10 besar produk yang diduga melakukan pelanggaran terbanyak sepanjang 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Total violations in 2016 amounted to 1,084, more than the number of suspect advertisements, which shows that some advertisements violated more than one category. Furthermore, to identify financial services provider compliance, the 10 major products most often suspected of violating prevailing regulations in 2016 are presented as follows:

Tren pelanggaran per produk tahun 2016
Violations by Product in 2016

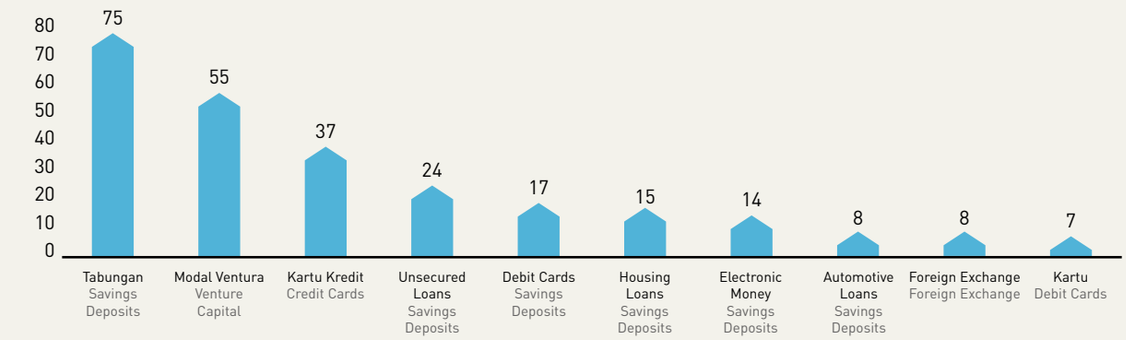

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dugaan pelanggaran didominasi oleh produk perbankan. Hal ini diduga terjadi karena selain variasi produk perbankan lebih beragam, intensitas iklan produk sektor perbankan juga lebih tinggi dari pada sektor lain. Meski demikian, modal ventura sebagai produk IKNB justru menempati urutan kedua pelanggaran sepanjang 2016.

From the chart, banking products dominated suspected violations, not only because of the diversity of banking products, but also because the intensity of advertisements for banking products is much higher than any other financial industry. Nonetheless, venture capital, as a product of the nonbank financial industry, placed second in 2016.

II.3.1.6 Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan (Stabil), beberapa infrastruktur dibangun khususnya untuk membantu pengawasan SJK. Selama 2016, telah dikembangkan sistem pengelolaan investasi terpadu.

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis reksa dana yang otomatis, *on-line*, dan terpadu serta meningkatkan efisiensi dalam transaksi produk pengelolaan investasi termasuk didalamnya terdapat sentralisasi data investor dan pelaporan. Melalui integrasi ini, proses transaksi Reksa Dana lebih cepat dan efisien dikarenakan tidak adanya *paper work load* dan pelaksanaan *monitoring* menjadi lebih efisien secara waktu dan tidak menunggu adanya laporan oleh pelaku.

Ketentuan mengenai penggunaan S-Invest diatur dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dan diresmikan (*go live*) pada 30 Agustus 2016.

Melalui S-Invest data mengenai pengelolaan investasi dapat diperoleh secara lebih cepat dan efisien. Jumlah investor yang tercatat per akhir Desember 2016 mencapai 886.574.

II.3.1.6 Integrated Investment Management System (S-Invest)

To maintain financial system stability as the foundation of sustainable (stable) development, several forms of infrastructure were developed to enhance financial services sector oversight. In 2016, OJK developed the integrated investment management system.

The Integrated Investment Management System (S-Invest) combines all automated, on line and integrated investment fund business processes, thereby improving the transaction efficiency of investment management products, including centralised investor and reporting data. Integration has expedited the transaction process for investment funds and improved efficiency after obviating the need for a paper workload, while also streamlining the monitoring process and eliminating the waiting times for reports from industry players.

The usage of S-Invest arranged through POJK number 28/POJK/04/2016 concerning Integrated Investment Management System and launched in August 30th, 2016.

Through S-Invest, data on investment management can be accessed more quickly and efficiently. The number of investors registered at the end of December 2016 totalled 886,574.

II.3.2 Penguatan dan Penataan SJK Sesuai Standar Internasional

Sebagai regulator yang mengawasi berbagai macam sektor jasa keuangan, penguatan dan penataan SJK diperlukan agar sesuai standar internasional. Beberapa inisiatif dilakukan oleh OJK bersama dengan SJK untuk penguatan SJK antara lain melalui Bank Kustodian sebagai *Settlement Agent* dan Perluasan *Single Investor Identification* (SID) Investor Surat Berharga Negara. Detail pelaksanaan inisiatif dapat dijabarkan sebagai berikut:

II.3.2.1 Bank Kustodian sebagai *Settlement Agent*

Perubahan infrastruktur kliring dan penyelesaian untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam proses penyelesaian transaksi bursa dengan memfasilitasi kemudahan mutasi Efek nasabah institusi di Bank Kustodian dan menurunkan biaya fasilitas *funding cash* bagi Anggota Bursa. Saat ini, penyelesaian Transaksi Bursa untuk nasabah yang menyimpan aset di Bank Kustodian, penyelesaian transaksi dilakukan terlebih dahulu melalui Perusahaan Efek sebelum diserahkan atau diterima di KPEI sehingga akan memerlukan *funding* terlebih dahulu. Dengan menggunakan SA, efisiensi penyelesaian untuk transaksi tersebut akan terjadi, karena penyelesaian dilakukan secara langsung dari Bank Kustodian ke KPEI sehingga menghilangkan beban *funding intraday* Perusahaan Efek yang dikeluarkan untuk menebus aset yang ada di Bank Kustodian.

II.3.2.2 Perluasan *Single Investor Identification* (SID) Investor Surat Berharga Negara

Dalam rangka konsolidasi data kepemilikan dan penyelesaian transaksi serta penguatan pengawasan transaksi di pasar sekunder SBN, OJK telah menerbitkan persetujuan kepada KSEI sebagai Generator SID SBN. Implementasi SID untuk settlement transaksi SBN tersebut, memudahkan investor dalam mengkonsolidasi portofolio yang dimilikinya. Pada tahun 2016 penerapan SID SBN dilakukan secara wajib untuk semua investor baik yang ada di Sub Registry maupun di Bank Indonesia.

II.4 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FINANSIAL MASYARAKAT SERTA MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN PEMERATAAN DALAM PEMBANGUNAN

II.4.1 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

II.4.1.1 Pelaksanaan Transformasi BPD

Program Transformasi BPD diluncurkan pada 26 Mei 2015 oleh Presiden RI dengan visi mewujudkan BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Visi tersebut akan diwujudkan melalui tiga sasaran yakni: (i)

II.3.2 Strengthening and Regulating the Financial Services Sector pursuant to International Standards

As regulator of the various financial services sectors, strengthening and regulating the financial services sector is required in line with international standards. Several initiatives were implemented by OJK in conjunction with the financial services sector to strengthen the sector, including through custodian banks as Settlement Agents and expanding the Single Investor Identification (SID) to tradeable government securities (SBN). Details of the various initiatives are summarised as follows:

II.3.2.1 Custodian Banks as Settlement Agents

A change in clearing and settlement infrastructure was made to enhance cost efficiency in the transaction settlement process on the stock exchange by facilitating the transfer of institutional customers' securities at Custodian Banks and lowering the cost of the funding cash facilities for stock exchange members. Currently, stock exchange transactions are first settled for customers with assets at custodian banks through Securities Companies, before being transferred to KPEI, thus requiring intraday funding. By using Settlement Agents (SA), such transactions will be more efficient because settlement will be processed directly from the custodian bank to KPEI, thus eliminating the intraday funding issued by securities companies to redeem assets held at the custodian bank.

II.3.2.2 Extending the Single Investor Identification (SID) to Government Bond Investors

To consolidate data on holdings and transaction settlement, as well as to strengthen oversight of the secondary SBN market, OJK approved the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as the SBN SID Generator. The implementation of SID for SBN transactions will facilitate investors to consolidate their portfolios. In 2016, the SBN Single Investor Identification (SID) was required for all investors in the sub-registry and registered at Bank Indonesia.

II.4 REALISING FINANCIAL INDEPENDENCE AND SUPPORTING EQUITABLE DEVELOPMENT

II.4.1 Regional Economic Potential Development

II.4.1.1 Regional Bank Transformation

The regional bank transformation program was launched by the President of the Republic of Indonesia on 26th May 2015, with a vision to make regional banks competitive and solid, while contributing significantly to sustainable and equitable local economic growth. That vision shall be realised through three

meningkatnya daya saing BPD; (ii) menguatnya ketahanan kelembagaan; dan (iii) meningkatnya kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut digambarkan dalam bagan berikut.

outcomes, namely: (i) enhancing regional bank competitiveness; (ii) strengthening institutional resilience; and (iii) expanding the contribution of regional banks to local economies. That vision is illustrated as follows:

Kerangka Holistik Program Transformasi
Holistic Framework of the Transformation Program

Untuk mencapai visi tersebut, Program Transformasi BPD akan diimplementasikan melalui tiga tahapan yaitu: (i) Pembangunan Fondasi (*Foundation Building*); (ii) Percepatan Pertumbuhan (*Growth Acceleration*); dan (iii) Pemimpin Pasar (*Market Leadership*). Dalam penerapannya, masing-masing BPD akan memasuki setiap tahapan dan menetapkan sasaran dan target bisnis sesuai dengan kapasitas dan kesiapannya masing-masing, yang digambarkan sebagai berikut.

To achieve that vision, the Regional Bank Transformation Program will be implemented in three phases as follows: (i) Foundation Building; (ii) Growth Acceleration; and (iii) Market Leadership. The respective regional banks will enter each phase and set the outcomes and business targets appropriate to the capacity and preparedness of each bank, illustrated as follows:

Implementasi Transformasi BPD
Transformation BPD Implementation

Keberhasilan Program Transformasi BPD akan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komitmen dan kepemimpinan yang dari pengurus BPD dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), project management yang berkualitas, dukungan kuat dan koordinasi dari pemangku kepentingan, serta program komunikasi dan manajemen perubahan (*change management*) yang efektif.

Adapun pencapaian Program Transformasi BPD sampai dengan saat ini, diantaranya: (a) Telah terbentuk *Project Management Office* (PMO) yang akan menjadi penggerak BPD dalam melakukan transformasi; (b) PMO telah menerbitkan pedoman dalam bidang SDM yang dapat dipergunakan secara bersama-sama; dan (c) telah diluncurkan *platform* BPDNet *Online* dan program Laku Pandai oleh BPD Kalimantan Timur pada akhir 2015 lalu, diikuti oleh BPD Jabar & Banten pada Mei 2016 serta BPD Jateng pada Juni 2016.

Platform BPDNet *Online* merupakan *platform* bersama BPD dalam teknologi informasi yang dikembangkan oleh Asbanda sejak 2013 untuk memfasilitasi interkoneksi antar BPD dan juga nasabah BPD se-Indonesia. Melalui BPDNet, nasabah BPD akan dapat bertransaksi di BPD lainnya di seluruh Indonesia secara murah dan efisien.

Oleh karena itu, OJK sangat mendukung terlaksananya Program Transformasi BPD, antara lain melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengembangan BPD. OJK dan Asbanda juga telah menjalin kerja sama dengan

The success of the Regional Bank Transformation Program will be determined by four factors, namely (i) commitment and leadership from regional bank management and the Regional Bank Association (ASBANDA); (ii) quality project management; (iii) avowed support and coordination from the stakeholders; and (iv) an effective change management and communication program.

Thus far, the salient achievements of the regional bank transformation program include: (a) establishment of a Project Management Office (PMO) to motivate regional banks to transform; (b) promulgation of universal HR guidelines by the project management office; and (c) launch of the BPDNet Online Platform and Branchless Banking by the Regional Bank of East Kalimantan at the end of 2015, followed by the Regional Bank of West Java and Banten in May 2016 and the Regional Bank of Central Java in June 2016.

The BPDNet Online Platform is IT-based and has been developed by the Regional Bank Association (ASBANDA) since 2013 to facilitate interconnectedness between regional banks and their customers nationwide. Through BPDNet, regional bank customers can transact at other regional banks throughout Indonesia, affordably and efficiently.

Therefore, OJK enthusiastically supports the Regional Bank Transformation Program, through cooperation with the Ministry of Home Affairs to develop regional banks, amongst others. OJK and the Regional Bank Association (ASBANDA) have also

beberapa lembaga internasional antara lain Sparkassenstiftung fur International Kooperation (*Savings Banks Foundation for International Cooperation*) dan World Bank dalam rangka bantuan teknis untuk Program Transformasi BPD.

II.4.1.2 Pengembangan BPR

Perkembangan IJK yang cepat berdampak pada perubahan peta persaingan antar lembaga keuangan di Indonesia, termasuk di pasar keuangan mikro. Persaingan yang semakin tinggi menuntut pelaku bisnis untuk lebih berkreasi menawarkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. BPR sebagai salah satu pelaku dalam pasar keuangan mikro harus siap menghadapi kompetisi tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya dimaksud harus tetap diwujudkan untuk mencapai visi pengembangan BPR yaitu "Industri BPR yang berdaya saing dalam melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan masyarakat setempat, serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah".

Dalam rangka mencapai visi pengembangan BPR tersebut, strategi umum pengembangan BPR dijabarkan dalam tiga aspek yaitu:

1. Aspek Posisi BPR
   BPR diarahkan untuk menjadi bank yang memiliki kegiatan usaha dan wilayah operasional (penyebaran jaringan kantor dan penyaluran kredit) secara terbatas, dibandingkan dengan Bank Umum (BU). Dalam hal ini, skala usaha BPR berbeda dengan BU dan tidak diarahkan untuk menjadi BU;
2. Aspek Pasar BPR
   BPR didorong untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya dengan tetap fokus pada penyediaan produk dan jasa perbankan kepada UMK, utamanya pembiayaan kepada usaha produktif UMK dan masyarakat setempat serta berperan dalam program keuangan inklusi di daerah; dan
3. Aspek Pengawasan Terhadap BPR
   Kebijakan pengawasan BPR diarahkan pada penyempurnaan metode pengawasan berdasarkan risiko yang penerapannya disesuaikan dengan skala modal dan kompleksitas usaha BPR. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (GCG) dan manajemen risiko bagi BPR sudah menjadi kebutuhan dan akan segera diimplementasikan.

Sepanjang 2016 kebijakan pengembangan BPR difokuskan pada upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri dengan mendorong penguatan kelembagaan melalui penerbitan ketentuan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor berdasarkan modal inti, rencana bisnis, penilaian kemampuan dan kepatutan, serta transformasi Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

cooperated with several international institutions, including Sparkassenstiftung fur International Kooperation (Savings Banks Foundation for International Cooperation) and the World Bank to provide technical assistance for the regional bank transformation program.

II.4.1.2 Rural Banks

Rapid financial services industry development has changed the structure of competition between financial institutions in Indonesia, including microfinance. Increasing competition demands products and services that meet the needs of the consumer. Rural banks, as microfinance players, must be prepared to face stiffer competition, based on sound bank management principles and compliance to prevailing laws and regulations. Such endeavours must be realised to achieve the vision of rural bank development, namely to create a competitive rural banking industry to serve micro and small enterprises (MSEs) and local communities, while contributing to regional economic growth.

Striving to meet the vision of rural bank development, the general rural bank development strategy has been translated into three salient aspects as follows:

1. Position of Rural Banks
   Rural banks have limited business activities and operational scope (office network and lending) compared to commercial banks. In this case, the business scale of rural banks is also different to commercial banks and rural banks are not directed towards becoming commercial banks;
2. Rural Banking Market
   Rural banks are encouraged to enhance business capacity by focusing on providing banking products and services to MSEs, primarily in the form of financing to productive MSEs and local communities as well as actively participating in regional financial inclusion programs; and
3. Rural Bank Supervision
   Rural bank supervision policy is directed towards honing risk-based supervision methods applicable to the capital scale and complexity of rural banks. The application of Good Corporate Governance and risk management is already necessary at rural banks and will be implemented immediately.

In 2016, rural bank development policy focused on enhancing industry resilience and competitiveness by strengthening institutional arrangements through regulations governing business activities and office networks based on core capital, business plans, compliance audits as well as the transformation of Village Credit Institutions (BKD) and microfinance institutions.

Penataan industri BPR menurut kapasitas permodalan dilakukan agar BPR dapat fokus pada kegiatan usaha, penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan dan pengelolaan risiko, sehingga setiap BPR dapat berkembang dan berperan optimal menurut kelompok permodalannya. Batasan wilayah jaringan kantor BPR juga disesuaikan dengan kemampuan BPR dalam menjalankan fungsi intermediasi dalam wilayah tertentu. Dengan demikian, masing-masing BPR dapat memposisikan pada kelompoknya yang diperhitungkan berdasarkan jumlah modal inti. Pengelompokkan BPR berdasarkan modal inti ditetapkan dalam tiga strata yaitu:

a. BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp15 M;
b. BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp15 M sampai dengan kurang dari Rp50 M; dan
c. BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50 M.

BPR hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan membuka Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan kelompok Modal Inti.

Selanjutnya, salah satu sarana untuk mencapai visi dan misi BPR dan BPRS serta strategi pengawasan terhadap individual BPR dan BPRS adalah kewajiban menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Bisnis adalah sebagai berikut:

a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
b. Prinsip kehati-hatian; dan
c. Asas perbankan yang sehat

Penguatan kelembagaan BPR dan BPRS dimaksud juga didukung dengan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui kerjasama OJK, asosiasi, dan Praktisi BPR, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berupa penerbitan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk mendukung peningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional BPR dan BPRS telah diterbitan POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi BPR dan BPRS. Dengan adanya standar teknologi informasi ini, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan.

II.4.1.3 Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Keuangan Mikro

Dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan untuk meningkatkan pertumbuhan LKM di Indonesia, OJK telah menyelenggarakan sosialisasi UU LKM tersebut dan peraturan pelaksanaannya serta

The rural banking industry has been structured based on capital capacity to ensure that rural banks can focus on their business activities, thereby offering products and services in line with capital and risk management capacity and, therefore, each rural bank can develop and act optimally according to its respective capital group. Office network limitations have also been refined based on rural bank intermediation capacity in given areas. Consequently, each respective rural bank can position itself in a group based on core capital. Three strata of core capital are used to categorise rural banks as follows:

a. BPRKU 1 are rural banks with a core capital of less than Rp15 billion;
b. BPRKU 2 are rural banks with a core capital of between Rp15 billion and Rp50 billion; and
c. BPRKU 3 are rural banks with a core capital of more than Rp50 billion.

Rural banks shall only be licensed to conduct business activities and open branch offices within the operational scope based on core capital.

One means by which to achieve the vision and mission of rural banks and sharia rural banks as well as the supervision strategy of individual rural banks and sharia rural banks is through the mandatory preparation of a realistic annual business plan. The business plans compiled by rural banks and sharia rural banks encompass a short-term plan, medium-term plan and/or long-term strategic plan. The following aspects must be taken into consideration when preparing the Business Plan:

a. External and internal factors that could influence business continuity at rural banks and sharia rural banks;
b. Prudential principles; and
c. Sound banking principles.

Institutional strengthening at rural banks and sharia rural banks must also be supported by efforts to improve the quality and competences of human resources through cooperation with OJK, relevant associations and rural bankers as well as the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to agree National Competence Standards for Rural Banks.

OJK Regulation (POJK) No. 75/POJK.03/2016, concerning IT Implementation Standards for Rural Banks and Sharia Rural Banks, was issued to improve the operating effectiveness and efficiency of rural banks and sharia rural banks. The regulation is expected to enhance the quality of banking services offered to the public.

II.4.1.3 Development and Expansion of Microfinance Institutions

As mandated by Act No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (LKM) and to accelerate LKM growth in Indonesia, OJK socialised the LKM Act and implementation guidelines, while providing mentoring and supervision training for microfinance

pelatihan dasar pembinaan dan pengawasan LKM bagi pelaku LKM yang telah memperoleh izin usaha, yang telah diselenggarakan 39 Kota di Indonesia. Selain itu, dalam rangka mendukung proses pendirian/asistensi LKM baik secara tunai maupun non tunai, OJK telah melakukan pendampingan ke sembilan daerah.

Dalam mendukung aktivitas pembinaan dan pengawasan LKM, OJK mengembangkan Sistem Informasi LKM (SI LKM) yang dirancang di 2015. Pengembangan sistem informasi di 2016 dilakukan karena terdapat perubahan ketentuan POJK, yaitu:

a) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 yang mengubah POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM untuk fitur *e-licensing*.
b) POJK Nomor 62/POJK.05/2015 yang mengubah POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro untuk fitur *e-reporting*.

Sampai akhir tahun, pengembangan fitur pada SI LKM yang telah diselesaikan adalah Fitur *E-reporting* yang merupakan fitur aplikasi yang digunakan oleh LKM untuk menyampaikan laporan keuangan dan digunakan oleh pembina dan pengawas untuk melakukan analisis laporan keuangan tersebut.

II.4.1.4 Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Inklusi keuangan menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN disebutkan bahwa salah satu sasaran penguatan sektor keuangan dalam lima tahun mendatang yaitu meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan khususnya yang berskala mikro dapat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produktif.

Oleh karena itu, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan. Seluruh elemen di daerah, mulai dari pemerintah daerah, industri keuangan daerah, dan instansi terkait lainnya perlu bersama-sama mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih luas dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung kegiatan produktif. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

institutions with an operating license, held in 39 cities throughout Indonesia. Furthermore, supporting the establishment of cash and noncash microfinance institutions, OJK offered mentoring services in nine regions.

To support LKM mentoring and supervision, OJK developed the LKM Information System (IS LKM) designed in 2015. Information system development in 2016 was necessary due to several regulatory amendments as follows:

a) OJK Regulation (POJK) No. 61/POJK.05/2015 amended OJK Regulation (POJK) No. 12/POJK.05/2014 on Operating Licenses and Institutional Arrangements at Microfinance Institutions for e-Licensing.
b) OJK Regulation (POJK) No. 62/POJK.05/2015 amended OJK Regulation (POJK) No. 13/POJK.05/2014 on e-Reporting for Microfinance Institutions.

By yearend, the e-reporting feature of the LKM information system was complete, as an application feature used by microfinance institutions to submit financial statements and by supervisors and mentors to analyse the financial statements.

II.4.1.4 Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD)

Financial inclusion is government policy to support national development in Indonesia as contained in the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019. The Medium-Term National Development Plan stipulates that one target of strengthening the financial sector during the upcoming five years is to expand public and MSME access to formal financial services towards inclusive and equitable economic development.

The availability of financial products and services, particularly microfinance, can help the middle and working classes to ameliorate their quality of life through financial products, such as micro business loans or savings to invest in productive assets.

Therefore, the program to accelerate financial access in rural areas must become a priority to all stakeholders. All regional elements, from the local government to the local financial industry and other relevant institutions, must seek breakthroughs together to expand financial access and exploit existing sources of funds to support productive activities. This is congruent with the government's desire to strengthen local economies to support national economic growth.

Terkait hal tersebut, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pembentukan TPAKD merupakan tindak lanjut atas adanya radiogram dari Menteri Dalam Negeri terkait permintaan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota, serta memorandum Ketua Dewan Komisioner OJK kepada seluruh Kepala Kantor OJK di daerah terkait pembentukan TPAKD.

In conjunction with the Ministry of Home Affairs and other relevant institutions, OJK created the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) as a communication forum among relevant institutions and stakeholders to accelerate and expand financial access in rural areas to foster economic growth for the betterment of local communities. Establishment of the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) was a follow-up action to the radiogram from the Ministry of Home Affairs concerning a request for the local leaders, in this case the governor, regent and mayor to form TPAKD in the province/regency/city and the memorandum from the Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) to all regional office heads to establish TPAKD.

TPAKD dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

a. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
b. Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
c. Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
d. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
e. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start-up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.

TPAKD were created to:

a. Promote broad public financial access to support regional economic growth;
b. Seek innovative breakthroughs to expand more productive financial access for local communities;
c. Urge financial services institutions to expand their role in terms of regional economic development;
d. Explore the potential of local economies that could be developed using financial products and services; and
e. Optimise potential regional sources of funds to expand productive funding and develop micro, small and medium enterprises (MSME) as well as start-ups, while financing other priority economic sectors.

Penyusunan program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan bersama produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif serta pengembangan UMKM dan *start-up business* lainnya.

The TPAKD program was prepared paying due consideration to regional characteristics and needs, regional economic potential that could be developed using financial products and services as well as the proliferation of productive sector businesses, MSMEs and other start-up businesses.

Sepanjang 2016, OJK melakukan peresmian TPAKD di 26 provinsi, dua kota dan 1 (satu) kabupaten. Pembentukan TPAKD pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

In 2016, OJK inaugurated Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) in 26 provinces, two cities and one regency. Ultimately, the regional financial access acceleration teams are expected to realise equitable gains in public prosperity.

Sampai akhir 2016, tercatat sebanyak 45 Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan TPAKD yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan SK pembentukan TPAKD tersebut, 35 TPAKD di dalam Radiogram serta sepuluh TPAKD di luar Radiogram berhasil dikukuhkan pada 2016 ini.

At the end of 2016, a total of 45 directives to establish TPAKD had been signed by regional heads at the provincial/regency/city level, of which 35 in the Radiogram and 10 outside the Radiogram were confirmed in 2016.

Untuk meningkatkan kapasitas KR/KOJK di daerah dalam rangka mengawal dan meningkatkan efektivitas akselerasi program TPAKD, OJK menyelenggarakan *coaching clinic* di berbagai daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan arah pengembangan (*roadmap*) TPAKD yang selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2016 terutama dalam mendukung pencapaian target Indeks Inklusi Keuangan menjadi 75% pada tahun 2019. Selama tahun 2016, telah dilaksanakan empat kali *coaching clinic* TPAKD.

Increasing the capacity of OJK regional and branch offices to oversee and enhance the effectiveness of the TPAKD program, OJK organised coaching clinics in various regions. The coaching clinics are expected to provide a TPAKD roadmap that is aligned with the National Financial Inclusion Strategy in 2016, particularly in terms of supporting the financial inclusion index target of 70% by 2019. OJK held four coaching clinics in 2016.

II.4.2 Perluasan Akses Keuangan dan Penguatan Perlindungan Konsumen

II.4.2.1 Strategi Nasional Keuangan Inklusif – Dukungan OJK pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016

Keuangan inklusif merupakan komponen penting proses inklusi sosial yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia saat ini belum diikuti oleh akses masyarakat yang memadai kepada layanan keuangan. Berdasarkan data Global Findex 2014, baru sekitar 36% penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal.

Perluasan akses keuangan dan pendalaman sektor keuangan serta stabilitas sistem keuangan domestik perlu dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di 2019. Upaya perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dalam RPJMN 2015-2019 merupakan penjabaran dari Nawa Cita untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sasarannya adalah meningkatkan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut diperlukan adanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Implementasi SNKI diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir 2019.

Dokumen SNKI diluncurkan pertama kali pada tahun 2012. Revisi dokumen dilakukan dalam rangka menampung arah kebijakan pemerintahan Jokowi-JK sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Implementasi SNKI dengan kelembagaan yang kuat diperlukan untuk mencapai target yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang mempunyai akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir 2019 dan sebesar 90% pada akhir 2023.

II.4.2 Expansion of Financial Access and Strengthening Consumer Protection

II.4.2.1 The National Financial Inclusion Strategy – OJK Support for Presidential Decree No. 82 of 2016

Financial inclusion represents an important component of the social inclusion process, which drives economic growth, creates financial system stability, supports poverty eradication programs and reduces gaps between individuals and between regions. A financially inclusive system manifests through public access to financial services, thus enhancing the economy's ability to bridge the economic gaps. Financial sector growth in Indonesia has, thus far, not been accompanied by adequate public access to financial services. Based on Global Findex data for 2014, only around 36% of adults in Indonesia have access to formal financial services.

Broader financial access, financial market deepening and domestic financial system stability are all required to achieve the economic growth target. Per the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019, the Government targeted 8% economic growth in 2019. Efforts to expand public access to financial services in the RPJMN 2015-2019 represent an interpretation of Nawa Cita to realise economic independence by stimulating strategic economic sectors. The goal is to expand public access along with access for micro, small and medium enterprises (MSME) to formal financial services towards inclusive and equitable economic development.

A National Financial Inclusion Strategy is required to expand public access to financial services. The strategy is intended as guidelines for government ministries/agencies, provincial governments, regencies/cities as well as relevant institutions to expand public access to financial services. Implementation of the National Financial Inclusion Strategy is required to attain the financial inclusion target, namely 75% of adults with access to formal financial institutions by the end of 2019.

The National Financial Inclusion Strategy document was first launched in 2012. The document was subsequently revised to accommodate the policy direction of the Jokowi Administration, as stipulated in the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Institutionally solid National Financial Inclusion Strategy implementation is required to achieve the target, namely 75% of adults with access to formal financial institutions by the end of 2019 and 90% by the end of 2023.

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Payung hukum resmi Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Financial inclusion is defined as a condition where all members of society have access to affordable, quality and safe formal financial services as required to the betterment of public prosperity and welfare. The financial services offered must be acceptable to the public in line with their needs, and simple to access in terms of the requirements and services. In 2016, President Joko Widodo launched the National Financial Inclusion Strategy. The official legal umbrella of the National Financial Inclusion Strategy is Presidential Decree No. 82 of 2016 concerning the National Financial Inclusion Strategy.

Dalam mendukung implementasi SNKI ini OJK berperan aktif sebagai bagian dari Kelompok Kerja (POKJA) untuk lima pilar SNKI yaitu (1) edukasi keuangan, (2) hak properti masyarakat, (3) fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, (4) layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta (5) perlindungan konsumen.

In order to support the implementation of SNKI, OJK plays an active role as part of Working Group (POKJA) for five pillars of SNKI namely (1) financial education, (2) community property rights, (3) facilitation of intermediation and financial distribution channel, (4) Financial services in the government sector, and (5) consumer protection.

II.4.2.2 Pengembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Program Laku Pandai diluncurkan pada tahun 2014 dan menunjukkan perkembangan yang baik. Pada akhir 2016, terdapat 20 Bank yang merealisasikan penyelenggaraan Laku Pandai melalui peluncuran produk tabungan berkarakteristik *Basic Saving Account* (BSA).

Jumlah Agen Laku Pandai sampai akhir 2016 mencapai 275.916 agen (264.724 agen perorangan dan 11.192 *outlet* badan hukum), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 60.805 agen. Sementara itu, jumlah nasabah yang membuka tabungan berkarakteristik BSA dan jumlah dana yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar 3.700.215 nasabah dan Rp216,5 miliar.

II.4.2.2 Financial Inclusion through Branchless Banking

The branchless banking program was launched in 2014 and has performed well. At the end of 2016, a total of 20 banks were offering branchless banking services through a Basic Savings Account (BSA).

The number of branchless banking agents at the end of 2016 totalled 275,916, consisting of 264,724 individuals and 11,192 outlets, increasing significantly on the 60,805 agents the year earlier. Meanwhile, 3,700,215 customers have opened a BSA, totalling Rp216.5 billion in accumulated funds. Of the 275,916 branchless banking agents, 68.02% are located on the island of Java, 18.31%

Dari 275.916 Agen Laku Pandai tersebut, sebesar 68,02% tersebar di wilayah pulau Jawa, 18,31% di pulau Sumatera, 5,01% di pulau Sulawesi, 3,45% di pulau Kalimantan, 1,98% di pulau Maluku dan Papua, dan sisanya 3,23% berada di pulau NTB-NTT-Bali.

on Sumatra, 5.01% on Sulawesi, 3.45% on Kalimantan, 1.98% on Maluku and in Papua and the remaining 3.23% spread over West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara and Bali.

Persebaran Laku Pandai berdasarkan Wilayahnya
Branchless Banking Distribution by Region

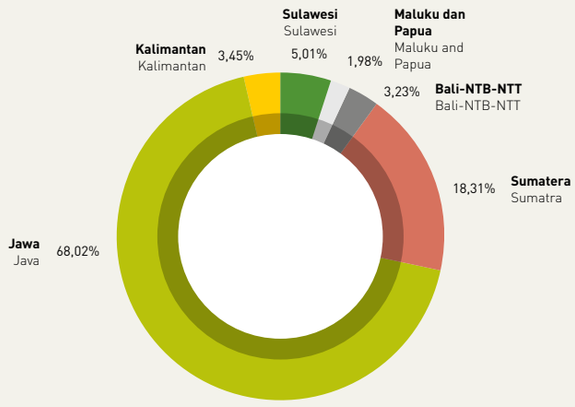

Perkembangan Laku Pandai
Branchless Banking Development

Periode Period	Agen Laku Pandai Branchless Banking Agents		Periode	Nasabah Laku Pandai Branchless Banking Customers	
	Perorangan Individual Agents	Outlet Badan Hukum Outlets		Jumlah Rekening Total Accounts	Outstanding Tabungan BSA Outstanding BSA
2015	59.354	1.451	2015	1.216.952	Rp67,5 miliar/billion
2016	264.724	11.192	2016	3.700.215	Rp216,5 miliar/billion

II.4.2.3 Pengembangan Produk dan Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro.

II.4.2.3 Microfinance Products and Services

Microfinance represents integrated services with fast and simple processes, easy access and affordable prices, consisting of SiPINTAR services, microfinance products and services as well as education and consultation services for the public. SiPINTAR is an integrated microfinance product that encompasses savings products, investment products and microinsurance.

Laku Mikro pertama kali diluncurkan di 2014. Sampai saat ini, terdapat 11 lembaga jasa keuangan yang menjadi *entry gate* dan 14 mitra bisnis dengan total rekening SiPINTAR tercatat 1.007.513 dengan nominal Rp9.336.714.996. Adapun jumlah *outlet* yang melayani Laku Mikro sebanyak 8.848 *outlet*.

Dalam rangka mengoptimalisasi program Laku Mikro, sepanjang 2016 telah dilakukan *capacity buiding* bagi pegawai maupun tenaga pemasar *entry gate*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agen-agen Laku Mikro. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan terkait program Laku Mikro, Laku Pandai, Asuransi Mikro, Emas Mikro, serta Reksa Dana.

Microfinance was first launched in 2014. There are currently 11 financial services institutions acting as an entry gate and 14 business partners, with total outstanding SiPINTAR accounts recorded at 1,007,513 and a nominal value of Rp9,336,714,996. Furthermore, a total of 8,848 outlets now offer microfinance services.

Seeking to optimise microfinance, throughout 2016, capacity building was implemented for employees and marketers working at the entry gates. Capacity building aimed to enhance the capacity and knowledge of microfinance agents, with participants briefed on various programs, including microfinance, branchless banking, micro insurance MicroGold and Investment Funds.

Jumlah *Outlet* Pelaksana Laku Mikro (2016)
Total Microfinance Outlets (2016)

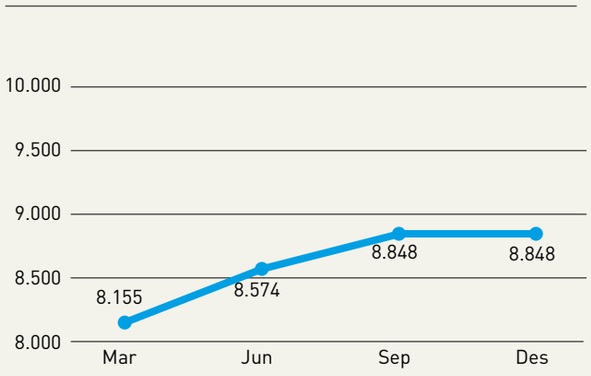

Nominal SiPINTAR (2016)
Total Outstanding SiPINTAR Accounts (2016)

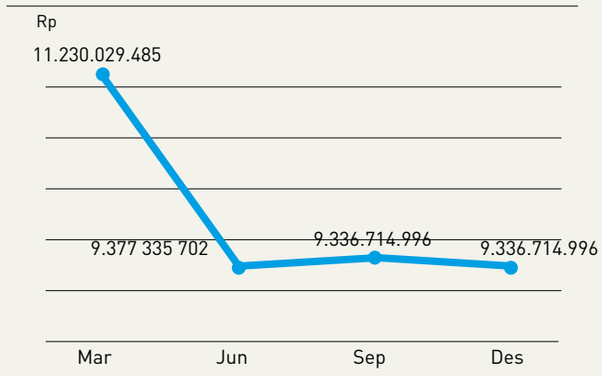

II.4.2.4 *Outreach* Program Desa Siaga Aktif Inklusif Keuangan (Pro-Desiku) dan Pembiayaan Mikro Sanitasi

Outreach Program Desa Siaga Aktif Inklusi Keuangan (Pro-Desiku) merupakan program literasi, edukasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat desa yang belum terjangkau informasi keuangan maupun produk dan jasa keuangan melalui pendampingan yang dilakukan oleh perangkat kesehatan desa (bidan, perawat, mantri dan petugas posyandu) selaku agen literasi dan inklusi keuangan. Program Pembiayaan Mikro Sanitasi merupakan bentuk inklusi keuangan dari Pro-Desiku yang ditujukan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pembangunan sarana sanitasi melalui pembiayaan mikro.

Rangkaian kegiatan *pilot project* Outreach Pro-Desiku dan Pembiayaan Mikro – Sanitasi dilaksanakan di dua desa di Kabupaten Malang yang terdiri:

a. *Training of Trainers* (ToT)
   ToT merupakan kegiatan pembekalan kepada 23 agen literasi dan inklusi keuangan terdiri dari empat pegawai Dinas Kesehatan, 12 Kader Kesehatan, lima Perangkat Kesehatan Desa, dan dua Bidan Desa dari Desa Ngadireso dan Desa Karanganyar. Dasar pertimbangan pemilihan dua desa tersebut adalah karena desa tersebut merupakan desa dengan sanitasi paling rendah, yaitu hampir 50% warganya belum memiliki sarana sanitasi di rumah. Pada ToT, disampaikan materi mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan dan kesehatan sebagai persiapan dalam melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat.

b. *Training of Community* (ToC)
   ToC merupakan kegiatan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada 116 masyarakat Desa mengenai pengelolaan keuangan, produk/layanan jasa keuangan, dan kesehatan.

   Monitoring dan Pendampingan dilakukan kepada peserta ToC untuk mengukur perubahan perilaku keuangan dari masyarakat khususnya dalam hal melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan keluarga, penggunaan produk/jasa keuangan termasuk melakukan monitoring terhadap pembiayaan kredit mikro sanitasi. Berdasarkan hasil *monitoring*, pada November 2016 terdapat 45 orang yang memanfaatkan pembiayaan mikro sanitasi untuk membangun sarana.

II.4.2.4 Active Standby Village Outreach Program (Pro-Desiku) and Microfinance - Sanitisation

The Pro-Desiku Outreach Program is a financial literacy, education and inclusion program targeting rural areas without access to financial information or financial products and services, through mentoring activities by village medical staff (midwives, nurses, paramedics and local health centre officers) as financial literacy and inclusion agents. The Microfinance - Sanitisation Program is a part of Pro-Desiku financial inclusion aimed at the public to ameliorate health through the development of sanitation facilities using microfinance.

A pilot project was conducted in two villages of Malang regency, incorporating:

a. Training of Trainers (ToT)
   ToT involved briefing 23 financial literacy and inclusion agents, including four health department employees, 12 health workers, five village medical staff and two paramedics from Ngadireso and Karanganyar villages. The two villages were selected based on the low levels of sanitation, namely around 50% of villagers without access to sanitation facilities in their homes. Through the ToT, materials were delivered concerning financial management, financial products and services as well as health in preparation to train and mentor the public.

b. Training of the Community (ToC)
   ToC consisted of educational activities to bring greater understanding to 116 villagers on financial management, financial products and services as well as health.

   The ToC participants were monitored and mentored to measure any behavioural changes, especially in terms of family financial management and bookkeeping as well as utilising financial products and services, including monitoring microfinancing for sanitisation. Based on the monitoring, in November 2016, 45 people utilised microfinance to construct sanitation facilities.

Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan Pembiayaan Mikro Sanitasi
Number of Residents Utilising Microfinance for Sanitation Facilities

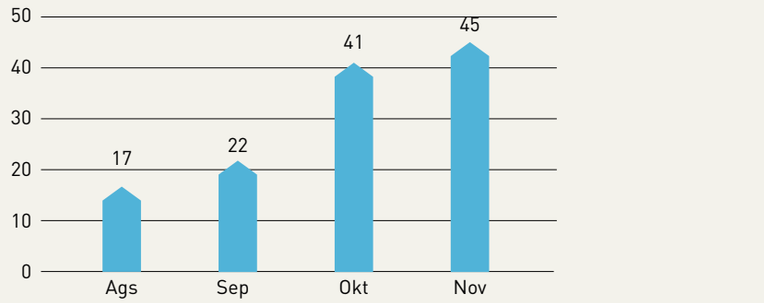

Hasil kunjungan menunjukkan masyarakat lebih giat menabung apabila pihak LJK aktif mengunjungi warga yang akan menabung mengingat jarak ke kantor cabang LJK yang relatif jauh dari rumah warga. Selanjutnya, para agen akan tetap melakukan *monitoring* kepada komunitas dan peserta pembiayaan mikro sanitasi terkait pembayaran, serta membantu para komunitas yang membutuhkan bimbingan dalam hal perencanaan keuangan.

II.4.2.5 Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

Sebagai bentuk implementasi pilar 2 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yaitu upaya untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK meresmikan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) secara nasional pada Desember 2015. PELAKU merupakan gerai informasi yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM.

Tujuan dibentuknya PELAKU adalah:
a. Menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk memperoleh informasi mengenai LJK serta produk dan jasa keuangan.
b. Menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, dan pengaduan di sektor jasa keuangan.
c. Fasilitasi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses ke sektor jasa keuangan.

Visits revealed that the public could be more active savers if visited regularly by representatives from financial services institutions, considering the distance from the village to the branch office is often relatively far. Furthermore, agents will continue to monitor their respective communities and successful microfinance – sanitisation applicants in terms of financing, as well as assisting any communities that require guidance in terms of financial planning.

II.4.2.5 Centre of Education, Consumer Services and MSME Financial Access (PELAKU)

As part of pillar 2 of the National Financial Inclusion Strategy, namely to strengthen infrastructure that supports financial literacy and inclusion, OJK officially opened the Centre of Education, Consumer Services and MSME Financial Access (PELAKU) in December 2015. PELAKU is an information outlet located at OJK regional and branch offices to deliver financial information and handle complaints, while also improving MSME access to financial products and services.

The goals of PELAKU are:
a. Provide a means for consumers and members of the public to acquire information on financial services institutions as well as financial products and services.
b. Provide a means for consumers and members of the public in rural areas to submit information, questions and complaints concerning the financial services sector.
c. Facilitate MSME empowerment and access to the financial services sector.

Di samping tujuan tersebut, Gerai PELAKU hadir dengan tiga fungsi utama. Pertama, fungsi edukasi dengan kegiatan utama berupa penyusunan dan pelaksanaan program edukasi berikut memastikan ketersediaan materi dan informasi edukasi serta operasionalisasi Si Mobil Literasi Keuangan (SiMolek). Fungsi kedua yaitu layanan konsumen dengan kegiatan utama seperti menerima informasi, menjawab pertanyaan, penanganan pengaduan, dan mengarahkan penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sementara itu, fungsi ketiga yaitu fungsi akses keuangan UMKM dengan kegiatan utama antara lain berupa edukasi dalam rangka pemberdayaan UMKM serta memfasilitasi akses pemberian kredit/pembiayaan bagi UMKM.

PELAKU menjalankan fungsi pusat kajian di KR/KOJK di daerah melalui penyediaan layanan informasi dan edukasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan seluruh *stakeholders* OJK di daerah. Dalam rangka memperkuat infrastruktur PELAKU di kantor OJK di daerah, selama 2016 telah diresmikan delapan gerai PELAKU di beberapa kota, yaitu Solo, Tasikmalaya, Purwokerto, Tegal, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.

II.4.2.6 Materi Edukasi Formal dan Non Formal (Tingkat Perguruan Tinggi)

OJK bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisetdikti), Kelompok Kerja (POKJA) industri jasa keuangan, dan akademisi menyusun buku seri literasi keuangan bagi pelajar tingkat Perguruan Tinggi yang terdiri dari sembilan buku yaitu:

- Buku 1: OJK dan Pengawasan Mikroprudensial
- Buku 2: Perbankan
- Buku 3: Pasar Modal
- Buku 4: Perasuransian
- Buku 5: Lembaga Pembiayaan
- Buku 6: Dana Pensiun
- Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah
- Buku 9: Perencanaan Keuangan bagi Mahasiswa

In addition to those goals, PLEAKU centres also have three main functions. First, education, which is dominated by preparing and implementing education programs along with ensuring the availability of educational materials and information, while also being responsible for operationalisation of the Financial Literacy Cars (SiMolek). Second, consumer services, which entail receiving information, answering questions, handling complaints and guiding the use of Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS). Third, MSME financial access, which involves education to empower micro, small and medium enterprises (MSME) as well as facilitating MSME access to loans/financing.

PELAKU also functions as a centre of research for OJK regional and branch offices through the provision of information and education services that are easily accessible by the public and all regional OJK stakeholders. Strengthening PELAKU infrastructure at OJK regional and branch offices, in 2016, OJK officially opened eight PELAKU centres in several cities, namely Solo, Tasikmalaya, Purwokerto, Tegal, Bengkulu, Lampung, East Nusa Tenggara and Central Sulawesi.

II.4.2.6 Formal and Non-Formal Tertiary Education Materials

In conjunction with the Ministry of Research, Technology and Higher Education, working groups from the financial services industry and academics, OJK compiled a book series on financial literacy for university students consisting of nine books as follows:

- Book 1: OJK and Microprudential Supervision
- Book 2: The Banking Industry
- Book 3: The Capital Market
- Book 4: The Insurance Industry
- Book 5: Finance Companies
- Book 6: Pension Funds
- Book 7: Other Financial Services Institutions
- Book 8: The Sharia Financial Services Industry
- Book 9: Financial Planning for Students

Buku Edukasi Formal Tingkat Perguruan Tinggi
Formal Education Book for Tertiary Level

Peluncuran buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi dilakukan di Universitas Pelita Harapan dan dihadiri 1.000 orang yang berasal dari Direksi serta perwakilan LJK, asosiasi sektor jasa keuangan, akademisi meliputi dosen, mahasiswa, dan guru ekonomi SMA.

Selain buku seri dimaksud, OJK juga menerbitkan buku praktis seri literasi keuangan untuk segmen profesional dan pensiunan, masing-masing segmen terdiri dari lima buku (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, dan Dana Pensiun).

Dalam rangka mendukung edukasi bagi kaum disabilitas, OJK juga mengkonversi Buku Perencanaan Keuangan Keluarga dalam versi braille bagi kaum tuna netra.

II.4.2.7 Layanan Konsumen OJK *Financial Customer Care* (FCC)

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care* – FCC) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Selama 2016, Layanan Konsumen OJK menerima 20.968 layanan yang terdiri dari: 6.700 informasi (31,95%), 14.167 pertanyaan (67,57%) , dan 101 pengaduan (0,48%). Kanal yang digunakan oleh Konsumen dan masyarakat dalam menyampaikan layanan ke OJK adalah sebagai berikut:

The financial literacy book series for tertiary education was launched at the Pelita Harapan University, with 1,000 people in attendance, including directors and representatives from financial services institutions, financial services sector associations and academics, consisting of lecturers, students and high school economics teachers.

In addition to the book series, OJK also published a practical book series on financial literacy for professionals and retirees, with each series consisting of five books (Banking Industry, Capital Market, Insurance Industry, Finance Companies and Pension Funds).

Supporting financial education for the disabled, OJK also published a Braille version of the Family Financial Planning book for the visually impaired.

II.4.2.7 OJK Financial Customer Care (FCC)

OJK integrated Financial Customer Care (FCC) serves consumers in the financial services sector and the public. In 2016, Financial Customer Care (FCC) received 20,968 services requests, consisting of: 6,700 receipts of information (31.95%), 14,167 requests for information (67.57%) and 101 complaints (0.48%). The main channels used by consumers and the public to submit service requests at OJK were as follows:

Perkembangan FCC di 2016
FCC Development in 2016

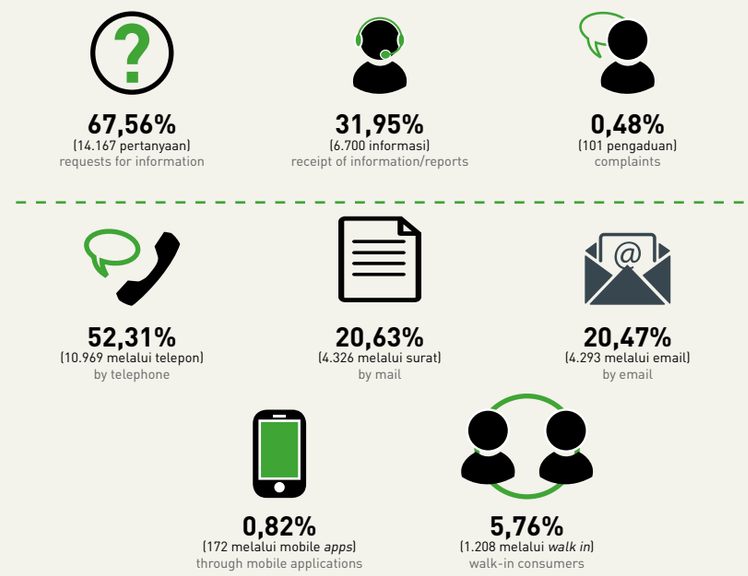

Dari total 6.700 layanan informasi yang diterima selama 2016, 3.995 layanan (59,63%) terkait sektor Perbankan, yang sebagian besar berhubungan dengan masalah restrukturisasi kredit/pembiayaan, keberatan lelang agunan, dan keberatan atas tagihan; 859 layanan (12,82%) terkait sektor Asuransi, yang sebagian besar berhubungan dengan kesulitan melakukan klaim dan penolakan pencairan klaim; 835 layanan (12,46%) terkait sektor Lembaga Pembiayaan, yang sebagian besar berhubungan dengan masalah penarikan objek pembiayaan (fidusia), restrukturisasi kredit/pembiayaan, dan keberatan atas biaya tambahan/denda; 750 layanan (11,19%) terkait Non LJK, yang sebagian besar berhubungan dengan masalah legalitas produk dan lembaga; 184 layanan (2,75%) terkait Pasar Modal, yang sebagian besar berhubungan dengan peraturan pasar modal, pemindahan Efek, serta perizinan profesi dan jasa penunjang 47 layanan (0,70%) terkait IKNB Lainnya, yang berhubungan dengan atas keberatan penawaran produk dan layanan; serta 30 layanan (0,45%) terkait Dana Pensiun, yang sebagian besar berhubugan dengan kesulitan pencairan manfaat pensiun dan ketidaksesuaian perhitungan manfaat.

Of the total 6,700 receipts of information/reports received in 2016, a total of 3,995 (59.63%) were related to the banking industry, predominantly loan/financing restructuring, objections to collateral auctions and billing objections; 859 service requests (12.82%) related to the insurance industry, concerning difficulties making claims and claim rejections; 835 service requests (12.46%) related to Finance Companies, dominated by fiduciary problems, loan/financing restructuring and objections to additional charges and fines; 750 service requests (11.19%) related to non-financial services institutions, primarily concerning the legality of products and institutions; 184 service requests (2.75%) related to the capital market, mostly regarding capital market regulations, transferring securities as well as licensing supporting professions and services; 47 service requests (0.70%) related to the nonbank financial industry, dominated by objections to the supply of products and services; as well as 30 service requests (0.45%) related to pension funds, dominated by difficulties liquidating accrued pension benefits and benefit calculation irregularities.

Terkait dengan layanan pertanyaan, Dari total 14.167 layanan pertanyaan yang diterima sebanyak 4.292 layanan (30,30%) terkait Perbankan, yang sebagian besar berhubungan dengan peraturan perbankan, permintaan data perbankan, dan restrukturisasi kredit/pembiayaan; 5.581 layanan (39,39%) terkait non Lembaga Jasa Keuangan, yang sebagian besar berhubungan dengan aspek legalitas non LJK dan pertanyaan terkait ke-OJK; 2.036 layanan

Of the total 14,167 requests for information, a total of 4,292 service requests (30.30%) were related to the banking industry, dominated by banking regulations, requests for banking data and loan/financing restructuring; 5,581 service requests (39.39%) related to non-financial services institutions, dominated by legal aspects of non-financial services institutions and questions about the Financial Services Authority (OJK); 2,036 service requests (14.37%)

(14,37%) terkait Perasuransian, yang sebagian besar berhubungan dengan legalitas lembaga dan produknya, kesulitan melakukan klaim, dan peraturan perasuransian; 1.063 layanan (7,50%) terkait pasar modal, yang sebagian besar berhubungan peraturan Pasar Modal, perizinan profesi dan jasa penunjang, legalitas LJK dan produknya; 1.013 layanan (7,15%) terkait Lembaga Pembiayaan, yang sebagian besar berhubungan dengan peraturan lembaga pembiayaan, penarikan objek pembiayaan, keberatan atas biaya tambahan atau denda; 120 layanan (0,85%) terkait Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang sebagian besar berhubungan dengan peraturan IKNB Lainnya, perizinan usaha dan produk, legalitas LJK dan produknya dan 62 layanan (0,44%) terkait Dana Pensiun, yang sebagian besar berhubungan dengan peraturan dana pensiun, ketidaksesuaian perhitungan manfaat, dan edukasi produk/layanan.

Selain melakukan layanan informasi dan pertanyaan, terdapat layanan pengaduan jika hasil klarifikasi menunjukkan bukti yang mencukupi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan OJK. Selama 2016, tercatat 101 layanan pengaduan yang diterima di mana sebanyak 38 layanan (37,62%) terkait perbankan, yang berhubungan dengan permasalahan produk yang tidak sesuai dengan penawaran, jaminan/agunan yang belum dikembalikan, dan pembobolan rekening bank; 24 layanan (23,76%) terkait asuransi, yang berhubungan dengan permasalahan produk yang tidak sesuai penawaran serta kesulitan dan penolakan klaim; 36 layanan (35,64%) terkait lembaga pembiayaan, yang berhubungan dengan belum diterimanya BPKB meski pembayaran telah lunas dan perilaku PUJK; satu layanan (0,99%) terkait LJK lainnya, yang berhubungan dengan kesulitan pencairan jaminan; dan dua layanan (1,98%) terkait pasar modal yang berhubungan dengan wanprestasi pembayaran kewajiban atas surat utang.

Dari keseluruhan jumlah layanan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK, jika dikategorikan per masing-masing sektor industri jasa keuangan, sebagian besar merupakan layanan sektor perbankan yaitu 8.325 layanan (39,70%), diikuti oleh layanan terkait non Lembaga Jasa Keuangan sebanyak 6.331 layanan (30,19%), sektor Perasuransian sebanyak 2.919 layanan (13,92%), Lembaga Pembiayaan sebanyak 1.884 layanan (8,99%), pasar modal sebanyak 1.249 layanan serta Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan Dana Pensiun masing-masing sebanyak 168 layanan (0,80%) dan 92 layanan (0,44%).

II.4.2.8 *Investor Alert Portal* (IAP)

Maraknya penawaran investasi diduga ilegal dengan berbagai modus telah mendorong OJK mengambil langkah preventif agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya sekaligus mempersempit ruang gerak penawaran investasi tersebut sehingga dapat mencegah potensi kerugian masyarakat yang lebih besar. Pada Agustus 2016, OJK meluncurkan IAP untuk merespon pertanyaan dari masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi dengan skema tertentu. IAP dapat diakses masyarakat kapan saja melalui minisite sikapiuangmu.ojk.go.id

related to the insurance industry, dominated by the legality of institutions and their products, difficulties making a claim and insurance regulations; 1,063 service requests (7.50%) related to the capital market, dominated by capital market regulations, licensing supporting professions and services as well as the legality of financial services institutions and their products; 1,013 service requests (7.15%) related to finance companies, dominated by FC regulations, financing withdrawals, objections to additional charges and fines; 120 service requests (0.85%) related to other financial services institutions, dominated by other NBFI regulations, business and product licenses as well as the legality of financial services institutions and their products; and 62 service requests (0.44%) related to pension funds, dominated by pension fund regulations, benefit calculation irregularities and product/service education.

In addition to information requests and receipts, a complaints service is also available if the clarification process proves sufficient evidence for follow-up actions pursuant to prevailing OJK regulations. In 2016, a total of 101 complaints were received, of which 38 (37.62%) related to the banking industry, in terms of products sold not as offered, unreturned collateral, embezzlement of bank account funds; 24 (23.76%) related to the insurance industry, concerning products sold not as offered as well as claim difficulties and rejections; 36 (35.64%) related to finance companies, concerning unreturned registration documents despite settled repayments and the behaviour of financial services providers; 1 (0.99%) related to other financial services institutions, concerning difficulties liquidating the guarantee, and 2 (1.98%) related to the capital market, concerning payment defaults on debt obligations.

When categorised by each respective sector of the financial services industry, of all the service requests received by OJK Financial Customer Care (FCC), the banking sector was dominant with 8,325 service requests (39.70%), followed by non-financial services institutions with 6,331 service requests (30.19%), the insurance industry with 2,919 service requests (13.92%), finance companies with 1,884 service requests (8.99%), the capital market with 1,249 service requests as well as other financial services institutions and pension funds with 168 service requests (0.80%) and 92 service requests (0.44%) respectively.

II.4.2.8 Investor Alert Portal (IAP)

The proliferation of illegal investment products compelled OJK to implement preventive measures so that the public acts more cautiously and is not easily tempted by investment products with dubious legal status, while simultaneously narrowing the opportunity for illegal investment products to circulate, thus preventing potential losses. In August 2016, OJK launched the Investor Alert Portal (IAP) in response to questions from the public regarding the legal status of entities offering certain investment products.

Website IAP
IAP Website

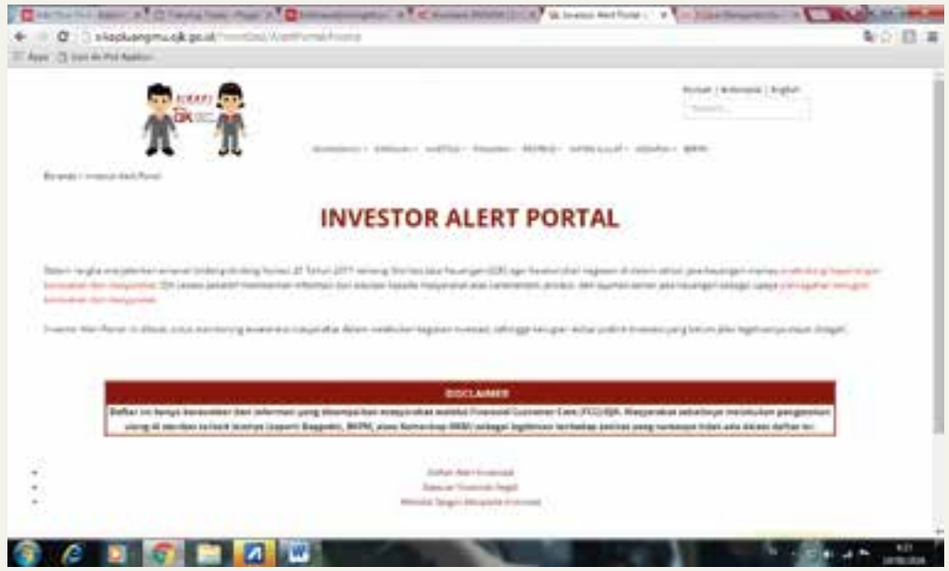

Dalam pembuatan dan pengkinian daftar dalam IAP, OJK berkoordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi yang antara lain melibatkan Kementerian Perdagangan, Bappebti, serta Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengklarifikasi legalitas atas tawaran investasi dimaksud. IAP yang berisi daftar kegiatan investasi yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK ini dapat menjadi rujukan masyarakat sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

When registering and updating the IAP list, OJK coordinated with the Investment Watchdog that consists of the Ministry of Trade, the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) as well as the Ministry of Cooperatives and MSMEs to clarify the legality of the investment products offered. IAP, which lists unregistered and, therefore, unsupervised investment activities, is a reference for the public before taking any investment decisions.

OJK melakukan pembaruan daftar IAP secara berkala. Sampai Desember 2016, OJK memasukkan 73 entitas ke dalam daftar investasi yang patut diwaspadai masyarakat. Selanjutnya, agar menjaga kesinambungan eksistensi IAP, OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi yang mencurigakan melalui telepon 1500-655, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

OJK regularly updates the IAP list. As of December 2016, OJK had included 73 entities on the publicly available investment list. Furthermore, maintaining the IAP, OJK also encouraged active public participation in terms of submitting information concerning suspicious investment products by telephone 1500-655 and email konsumen@ojk.go.id or waspadainvestasi@ojk.go.id.

II.4.2.9 Pengembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

II.4.2.9 Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS)

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penanganan pengaduan antara konsumen dan PPUJK melalui IDR, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan.

Pursuant to OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2014 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and OJK Regulation (POJK) No. 1/POJJ.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the Financial Services Sector, in the event of failure to settle a dispute between a consumer and financial services provider through IDR, external dispute resolution should be sought through an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector.

Sepanjang 2016, OJK menetapkan dan mengumumkan enam LAPS di sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya adalah bergabungnya modal ventura (BAVI) dengan Pembiayaan dan Pegadaian (BMPPI) menjadi Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK adalah sebagai berikut:

In 2016, OJK approved six Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) to operate in the financial services sector, including the merger of the Indonesian Venture Arbitration Board (BAVI) with Financing and Pawnbrokers (BMPPI) to become the Indonesia Financing, Pawnbrokerage and Venture Mediation Board (BMPPVI). A list of OJK-approved LAPS is presented as follows:

Alamat LAPS
LAPS Address

No.	LAPS	Sektor | Sector	Alamat | Address
1	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI)	Perasuransian Insurance	Gedung Menara Duta lantai 7 Wing A JL H.R. Rasuna Said, Kav. B-9 Jakarta 12910
2	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI)	Pasar Modal Capital Market	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28, Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
3	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) Pension Funds Mediation Board (BMDP)	Dana Pensiun Pension Funds	Gedung Arthaloka Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta
4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Indonesian Banking Alternative Dispute Resolution Institution (LAPSPI)	Perbankan Banking	Griya Perbanas Lt.1 Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta
5	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) Indonesian Guarantee Company Arbitration and Mediation Board (BAMPPI)	Penjaminan Guarantee Companies	Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat
6	Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) Indonesia Financing, Pawnbrokerage and Venture Mediation Board (BMPPVI)	Pembiayaan, Pergadaian, dan Modal Ventura Financing, Pawnbrokers and Venture Capital	Gedung Yarnati Lt.2 Ruang 206 Jl. Proklamasi No.42 – 44 Jakarta Pusat 10320

Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK memenuhi prinsip-prinsip LAPS yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektivitas serta memiliki layanan penyelesaian sengketa sekurang-kurangnya berupa mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.

The LAPS list maintained by OJK contains LAPS that fulfil the guiding principles, namely accessibility, independence, fairness, efficiency and effectiveness, as well as provide dispute settlement services in the form of mediation, adjudication and arbitration.

Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPS menyampaikan laporan kepada OJK setiap 6 bulan sekali. Laporan LAPS tersebut digunakan oleh OJK untuk melakukan monitoring terhadap LAPS. Selain melakukan monitoring pelaporan LAPS, OJK juga melakukan *monitoring* pemenuhan prinsip-prinsip LAPS yang dilakukan dengan cara meminta dokumen dan/atau informasi mengenai prinsip-prinsip LAPS dan/atau kunjungan (*on site visit*) kepada LAPS.

As required by OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the Financial Services Sector, LAPS submit reports to OJK every six months. The LAPS reports are used by OJK for monitoring purposes. In addition to monitoring LAPS reports, OJK also oversees LAPS compliance to LAPS principles through requests for corresponding documents and/or information and/or through on-site visits to Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS).

Laporan yang disampaikan oleh LAPS kepada OJK termasuk laporan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh LAPS. Berikut data penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LAPS sepanjang 2016:

The LAPS reports submitted to OJK include dispute settlement reports, the 2016 data for which is as follows:

Total 94 Pemohon Penyelesaian Sengketa
94 Requests for Dispute Settlement

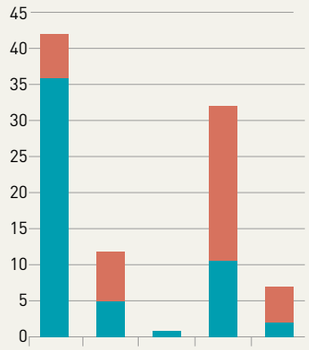

38% dari Jakarta
38% from Jakarta

Progress 49 Permohonan Penyelesaian Sengketa 49 Dispute Settlement Progress	
13	Mediasi Telah Mencapai Akta Kesepakatan | Mediation has Reached Agreement
7	Proses Mediasi | Mediation Process
1	Ajudikasi dan Telah Ada Keputusan | Adjudication and Decision has been Issued
2	Proses Ajudikasi | Adjudication and Decision has been Issued
1	Ditutup/ditarik oleh Permohonan | Closed/Withdrawn by Applicant
1	Selesai dalam Tahap Pra Mediasi | Finished in Pre-mediation process
10	Selesai karena PJIK (Asuransi) Membayar Klaim | Finished because Insurance Pay the Claim
14	Menunggu Jawaban | Waiting Feedback

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPS harus memenuhi nilai pemenuhan prinsip paling sedikit 75. Pada periode pelaporan, sesuai hasil monitoring, semua LAPS telah memenuhi prinsip-prinsip LAPS.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM LAPS, OJK melaksanakan sertifikasi mediator dan *capacity building* bagi ajudikator dan arbiter LAPS, uji coba LAPS, serta *workshop* dengan narasumber internasional mengenai LAPS. OJK juga bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) untuk melakukan *benchmarking* ke Financial Ombudsman Service (FOS) Australia yang diikuti oleh perwakilan dari enam LAPS.

Peminjaman ruang kantor OJK untuk penyelesaian sengketa oleh LAPS dilakukan sebanyak tiga kali yaitu di Surabaya, Semarang, dan Medan. Permohonan peminjaman ruangan OJK dan proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh BMAI.

Sebagai upaya OJK menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman industri jasa keuangan dan masyarakat mengenai LAPS, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar pengenalan LAPS, sosialisasi pengenalan LAPS kepada PUJK di Jakarta dan DI Yogyakarta, serta Pertemuan OJK dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan. Selain melalui berbagai kegiatan komunikas, OJK juga mempublikasikan Daftar LAPS dan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui iklan dan advertorial di berbagai surat kabar serta *talkshow* radio.

According to Circular Letter (SEOJK) No. 7/SEOJK.07/2015 concerning Assessment Guidelines for Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) operating in the Financial Services Sector, LAPS must attain at least 75 credits in terms of fulfilling the LAPS principles. In the reporting period, congruent with the results of monitoring, all Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) adhered to the LAPS principles.

Striving to enhance the key competences of LAPS human resources, OJK certified mediators and provided capacity building for LAPS adjudicators and arbiters, conducted LAPS trials and held workshops with international speakers on Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS). OJK also cooperated with the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) for benchmarking purposes at the Financial Ombudsman Service (FOS) of Australia, accompanied by representatives from six Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS).

Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) used OJK office space for dispute settlement three times in 2016, once in Surabaya, Semarang and Medan. The requests for OJK office were submitted by the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI).

As part of OJK's efforts to disseminate information and improve financial services industry and public understanding about LAPS, OJK organised several activities in the form of seminars introducing LAPS, socialisation activities introducing LAPS to financial services providers in Jakarta and Yogyakarta, as well as OJK meetings through the Bank Compliance Director Communication Forum. In addition to the communication and socialisation activities, OJK also published the LAPS register and dispute settlement mechanism in the financial services sector through advertisements and advertorials in various newspapers and radio talk shows.

II.4.2.10 Peningkatan Peran Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi – Satgas Waspada Investasi Daerah

Maraknya ajakan kepada masyarakat untuk berinvestasi melahirkan produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk serta sasarannya. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan diterbitkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/KDK.04/2013 diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) tersebut, OJK diamanatkan untuk mengemban tugas sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) yang beranggotakan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemendag, Kemenkop dan UKM, Kemenkominfo, dan BKPM.

Untuk menguatkan fungsi Satgas Waspada Investasi, dilakukan penandatangan Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi oleh pimpinan 7 tujuh kementerian dan/atau lembaga. Nota Kesepakatan tersebut disusun sebagai payung hukum Satgas Waspada Investasi untuk memperkokoh komitmen bersama antara Kementerian dan/atau Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) menyepakati Kerja Sama Pencegahan dan Penanganan Dugaan Praktek Investasi Ilegal Dengan Sistem Skema Piramida.

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi melakukan kegiatan sosialisasi mengenai tawaran penempatan dana dengan janji tingkat keuntungan yang tinggi dan perlu diwaspadai.

Kegiatan dilaksanakan di beberapa wilayah yang diprioritaskan dengan pertimbangan maraknya kegiatan investasi di wilayah tersebut. Kegiatan sosialisasi di masing-masing wilayah dihadiri segenap unsur masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI dan mahasiswa.

Sampai dengan Desember 2016, Satgas Waspada Investasi telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat di 11 daerah yakni Pekanbaru, Kupang, Balikpapan, Surabaya, Serang, Semarang, Malang, Palangkaraya, Ambon, Aceh dan Padang.

II.4.2.10 Expanding the Role of the Investment Watchdog

The rapid proliferation of public solicitation for investment products has spurred increasingly diverse products and facilities. Such conditions were considered when issuing OJK BoC Decree No. 01/KDK.04/2013, which was updated per OJK BoC Decree No. 01/KDK.01/2016, dated 1st January 2016, concerning the Establishment of the Investment Watchdog.

Based on that OJK BoC Decree, OJK is mandated with chairing the investment watchdog, consisting of the public prosecutors office, national police, Ministry of Commerce, Ministry of Cooperatives and SMEs, Ministry of Communications and Informatics as well as the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) as members.

Strengthening the role of the Investment watchdog, a Memorandum of Understanding (MoU) on Coordinated Prevention and Mitigation of Alleged Criminal Acts in the Investment Management Industry was signed by seven ministries and/or institutions. The Memorandum of Understanding (MoU) acts as a legal umbrella for the Investment Watchdog to strengthen joint commitment between Ministries and/or Institutions when executing its duties.

In addition, the Investment Watchdog and Indonesian Direct Selling Association (APLI) agreed cooperation to Prevent and Mitigate Illegal Pyramid Investment Schemes.

Investment Watchdog Socialisation Activities

Striving to prevent illegal investment products, the Investment Watchdog conducted socialisation activities about investment opportunities offered that promise high returns and, therefore, demand vigilance.

Socialisation activities were implemented in various regions, based on the rapid rise of investment activities in such areas. The socialisation activities in each respective location were attended by all societal elements, including public figureheads, religious leaders, academics and students.

As of December 2016, the Investment Watchdog had conducted socialisation activities in 11 regions, namely Pekanbaru, Kupang, Balikpapan, Surabaya, Serang, Semarang, Malang, Palangkaraya, Ambon, Aceh and Padang.

Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Daerah (Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah)

Tindak lanjut dari Penandatangan Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi adalah pembentukan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah. Tujuannya untuk memberi rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan investasi keuangan dan masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap tawaran investasi yang diduga ilegal, serta dalam rangka percepatan penanganan kasus investasi ilegal.

Pembentukan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Di Daerah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) di 35 daerah yang terdapat Kantor Regional (KR) atau Kantor OJK (KO). Mengingat maraknya kegiatan Investasi Ilegal, terutama terkait dengan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin, di KOJK Malang di bentuk empat Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah sehingga pada 2016 telah dibentuk 38 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah.

Penanganan Permasalahan Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Rekomendasi hasil koordinasi Satgas Waspada Investasi terkait dengan pembahasan investasi ilegal ditindaklanjuti dengan pembahasan dan/atau penanganan lebih lanjut oleh masing-masing kementerian dan/atau lembaga dan/atau antar kementerian dan/atau lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan kegiatan investasi yang diduga ilegal.

Berdasarkan email yang diterima Satgas Waspada Investasi melalui waspadainvestasi@ojk.go.id, selama 2016, terdapat 426 pengaduan dan/atau pertanyaan yang terdiri atas 121 Entitas. Selanjutnya yang telah dilakukan penanganan sejumlah 31 Entitas dan yang diproses hukum oleh Kepolisian sebanyak empat Entitas. Modus dari kasus tersebut adalah penawaran investasi berkedok emas dan haji, penawaran investasi berkedok *direct selling* (MLM), penawaran surat pelunasan hutang dan penawaran simpan pinjam dana berkedok koperasi.

II.4.2.11 Peluncuran Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah memiliki program nasional Penguatan Ekonomi Kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.

Sesuai dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

Creation of the Investment Watchdog

A follow-up action to the Memorandum of Understanding (MoU) on Coordinated Prevention and Mitigation of Alleged Criminal Acts in the Investment Management Industry was to form Regional Investment Watchdogs, which aims to provide peace of mind for members of the public when investing and help the public anticipate illegal investment products earlier, while accelerating the settlement of illegal investment cases.

A Regional Investment Watchdog has been set up through an OJK BoC Decree in 35 regions where an OJK office is present. Considering the rapid growth of illegal investment products, particularly in terms of unlicensed public fund accumulation, four Regional Investment Watchdogs were set up at the OJK regional office in Malang, bringing the total in 2016 to 38 as follows:

Mitigating Investment Issues by the Investment Watchdog

The recommendations put forward by the coordinated Investment Watchdogs concerning illegal investments were followed-up with further discussions between the respective ministries and/or institutions authorised to handle illegal investment activities.

Based on the emails received by the Investment Watchdog (waspadainvestasi@ojk.go.id), 426 complaints and/or requests for information were received in 2016 from 121 different entities. Hitherto, 31 requests have been resolved, with four cases referred to the national police for processing. The cases involved investment under the guise of gold or hajj funds, direct selling (MLM), as well as offering debt settlement certificates as well as saving and loan funds under the guise of a cooperative.

II.4.2.11 Launch of the Strengthening Economic Democracy Program

The Government has a program to strengthen economic democracy. Economic democracy is an economic system that provides broad opportunities for public participation, thus ensuring sound economic development.

Economic democracy is in pursuance of the Nawacita program launched by the President of the Republic of Indonesia, namely to build Indonesia from the periphery by strengthening regions

kesatuan serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Program penguatan ekonomi kerakyatan dengan *tagline* "Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat" diluncurkan oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia di Stasiun Terminal Agribisnis (STA) Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Peluncuran "Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat" oleh Presiden Republik Indonesia.

and villages under a united country as well as to realise economic independence by mobilising strategic domestic economic sectors.

The program to strengthen economic democracy with the tagline "Synergic Action for the People's Economy" was launched by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, at the Agribusiness Terminal Station in Larangan, Brebes.

Launch of Synergic Action for the People's Economy" by the President of Indonesia

Dalam mendukung Program Ekonomi "Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat" tersebut, terdapat beberapa program utama atau kebijakan yang akan disinergikan dari berbagai program yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya, yaitu terdiri dari:

a. Peningkatan nilai aset dengan pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)
b. Program inklusi keuangan;
c. Peningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian, antara lain, pemberian bibit, pupuk, pestisida
d. Pengenalan layanan digital untuk memasarkan produk pertanian/nelayan
e. Peningkatkan pola distribusi barang melalui peningkatan logistik (gudang, pasar dan kurir), dan sarana transportasi desa
f. Pemberian sertifikat hak cipta dan perizinan usaha kecil dan mikro (IUMK).

Dalam program tersebut, OJK memiliki peran khusus terkait dengan akses keuangan melalui program inklusi keuangan dalam mendukung "Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat" yakni melalui:

a. Penguatan infrastruktur, melalui peresmian (*launching*) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
b. Pembiayaan mikro melalui:
   1) Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR);
   2) Program Jangkauan, Sinergi dan *Guideline* (Jaring) budidaya dan pengelolaan ikan;

To support the Economic Program, "Synergic Action for the People's Economy", several major programs and policies run by government ministries and relevant institutions will be synergised, including:

a. Increasing asset value through Land Rights Certificates (SHAT);
b. Implementing the Financial inclusion program;
c. Expanding agricultural production means and facilities, including the provision of seeds, fertilisers and pesticides;
d. Introducing digital services to market products aimed at farmers/fishermen;
e. Enhancing the distribution of goods by improving logistics (warehousing, markets and couriers) and local transportations means; and
f. Providing copyright certificates as well as licensing MSEs.

OJK plays a special role in the program, relating to financial access through financial inclusion to support "Synergic Actions for the People's Economy", as follows:

a. Infrastructure strengthening by launching the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD);
b. Microfinance through:
   1) Disbursements of People's Business Loans (KUR);
   2) The Jaring program in the Maritime Sector;

3) Kredit Mitra Jateng 25 (bunga 7%);
4) Pembiayaan mikro produktif;
5) Penjaminan kredit mikro.

c. Perluasan akses keuangan, yakni melalui:
1) Program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
2) Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) untuk siswa di Brebes;
3) Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) oleh Jasindo;
4) Kampanye asuransi mikro oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
5) Tabungan emas.

Dalam rangkaian acara tersebut telah diselenggarakan pula pameran ekonomi kerakyatan di lokasi acara yang melibatkan OJK, BI, Kementerian/instansi terkait dan 14 Lembaga Jasa Keuangan (LJK)/Asosiasi. Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat diharapkan mampu meningkatkan usaha serta kesejahteraan para petani melalui siklus kegiatan dari hulu ke hilir.

II.4.2.12 Pengembangan Akses dan Jalur Distribusi bagi Produk-Produk Jasa Keuangan (Kemudahan Pembukaan Rekening Efek dan Segmentasi WPPE)

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Agen Perantara Pedagang Efek (APPE) dilatarbelakangi oleh rendahnya pertumbuhan jumlah investor di Pasar Modal Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Dengan skema keagenan APPE, PPE dapat melakukan kerjasama dengan individu maupun kelembagaan (PUJK) untuk melakukan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah PPE. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah investor Pasar Modal, tersedianya SDM Pasar Modal terutama yang bertindak sebagai *frontliner* fungsi pemasaran PPE, terciptanya efektivitas pengawasan praktik jasa pemasaran Efek serta penyesuaian struktur jaring kegiatan pemasaran produk keuangan dengan *best practices* yang ada. Untuk mendukung hal tersebut, selama 2016, OJK menerbitkan POJK terkait APPE.

II.4.2.13 Segmentasi WPPE

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek dilatarbelakangi kurangnya tenaga pemasaran Perusahaan Efek yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Penyusunan Peraturan bertujuan mendukung pengaturan terkait Agen Pemasaran Efek sekaligus peningkatan jumlah pemegang izin melalui segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek pada fungsi pemasaran. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mempermudah perluasan jaringan pemasaran Perusahaan Efek untuk meningkatkan jumlah nasabah ritel.

Pada 2016, OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

3) Central Java Partnership Loans (7% interest rate);
4) Productive microfinance; and
5) Micro loan guarantees.

c. Broadening financial access through:
1) Branchless banking;
2) Student Deposits (SimPel/SimPel iB) for students in Brebes;
3) Rice Farm Insurance (AUTP) and Beef Cattle Insurance (AUTS) by Jasindo;
4) Microinsurance campaign by the General Insurance Association of Indonesia; and
5) Gold savings;

Furthermore, economic democracy exhibitions have been organised at event locations involving OJK, Bank Indonesia, relevant government ministries and agencies as well as 14 financial services institutions/associations. The program is expected to enhance the businesses and prosperity of farmers through a cycle of upstream to downstream activities.

II.4.2.12 Developing Access and Distribution Channels for Financial Products and Services (Ease of Opening a Securities Account and Segmentation of Broker-Dealer Representatives)

OJK formulated regulations relating to broker-dealer agents (APPE) due to low growth of the investor base on the capital market in Indonesia over the past few years. Per the broker-dealer agent scheme, broker-dealers can collaborate with individuals or institutions (financial services providers) to initiate offerings to prospective customers in order to expand the investor base on the capital market, to enhance capital market human resources, especially marketing front liners, to create effective oversight of securities marketing services, and to adjust the structure of marketing activities for financial products consistent with existing best practices. Consequently, OJK issued regulations pertaining to broker-dealer agents in 2016.

II.4.2.13 Segmentation of Broker-Dealer Representatives

OJK formulated legislation concerning licensing segmentation of broker-dealer representatives due to a lack of marketing personnel at securities companies licensed by the Financial Services Authority (OJK). The regulations aim to strengthen securities marketing agents, while boosting the number of license holders through segmentation of individual broker-dealer representatives in terms of the marketing function. The regulation is expected to expand the marketing network of securities companies and, thus, increase the number of retail customers.

In 2016, OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 22/POJK.04/2017 concerning the Licensing Segmentation of Securities Companies Representatives.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Perekonomian global 2016 melanjutkan pertumbuhan dengan risiko ketidakpastian yang menurun. Sejalan membaiknya pertumbuhan global, ekonomi domestik mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) domestik masih terjaga tercermin dari tingkat kesehatan SJK yang memadai, serta pasar keuangan domestik yang mengalami peningkatan seiring perbaikan pasar keuangan global yang didiringi peningkatan capital inflow serta optimisme program *tax amnesty*. Melihat kondisi perekonomian yang tumbuh baik, OJK tetap memantau perkembangan terkini pasar dan perekonomian global maupun domestik yang berpotensi mempengaruhi kondisi sektor jasa keuangan dan memastikan agar lembaga jasa keuangan melakukan langkah-langkah antisipasi yang memadai dalam menjaga agar risiko likuiditas, kredit, dan pasar agar tetap *manageable*. Dinamika perkembangan industri sektor jasa keuangan sepanjang 2016 dipaparkan dalam Bab ini.

The global economy continued to expand in 2016, while the uncertainties eased. In line with stronger global growth, the domestic economy accelerated on the previous year. Domestic financial services sector stability was maintained, reflected by a sound financial services sector and deeper domestic financial markets congruent with global financial market gains, accompanied by an influx of non-resident capital and optimism surrounding the Tax Amnesty. Observing favourable economic dynamics, OJK remained vigilant of the latest global and domestic market and economic developments that could influence financial services sector conditions and to ensure that financial services institutions take adequate anticipatory measures to maintain manageable liquidity, credit and market risks. The dynamics of financial services sector performance in 2016 are presented in this chapter.

Menenun, Lombok
Traditional Weaving, Lombok

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.1 KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN MAKRO EKONOMI INDONESIA

III.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global sepanjang 2016 masih cenderung lambat dengan risiko ketidakpastian yang menurun. Beberapa indikator ekonomi di negara maju dan negara berkembang menunjukkan perbaikan walaupun terdapat beberapa risiko yang berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian global di antaranya, kebijakan Pemerintah baru AS, kenaikan FFR yang lebih cepat, serta gerakan populisme di Eropa.

Secara keseluruhan, perekonomian global 2016 tumbuh melambat sejalan dengan proyeksi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global 2016. Di sisi lain, pertumbuhan 2017 diperkirakan akan lebih positif diindikasikan oleh membaiknya beberapa indikator, antara lain data ekonomi negara-negara maju dan kinerja eksternal *emerging markets*.

III.1 GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS AND MACROECONOMIC CONDITIONS IN INDONESIA

III.1.1 The Global Economy Development

The global economic recovery remained sluggish throughout 2016 but uncertainty risk dissipated. Several economic indicators for advanced countries and emerging market economies demonstrated gains but risks persisted with the potential to stifle the global recovery, including the policy direction of the new US Administration, more aggressive FFR hikes and populist sentiment in Europe.

In general, the global economy grew more slowly in 2016 in line with the projections of international financial institutions, such as the International Monetary Fund (IMF) and World Bank, which revised down global growth projections for 2016. In contrast, growth in 2017 is expected to accelerate based on several indicators, including economic data from advanced countries and external performance in emerging market economies (EME).

Proyeksi Pertumbuhan Global (%)
Global Growth Projections (%)

IMF					Bank Dunia | World Bank				
Edisi | Edition	2014	2015	2016	2017	**Edisi** | Edition	2014	2015	2016	2017
Jan-15	3,3	3,5	3,7		Jan-15	2,6	3,0	3,0	3,2
Apr-15	3,4	3,5	3,8						
Jul-15	3,4	3,3	3,8		Jun-15	2,6	2,8	2,8	3,2
Okt-15	3,4	3,1	3,6						
Jan-16		3,1	3,4	3,6	Jan-16	2,6	2,4	2,4	3,1
Apr-16		3,1	3,2	3,5					
Jul-16		3,1	3,1	3,5	Jun-16	2,6	2,4	2,4	2,8
Okt-16		3,1	3,1	3,4					

Sumber / Source : WEO

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara/Kawanan
Economic Growth in Several Countries/Regions

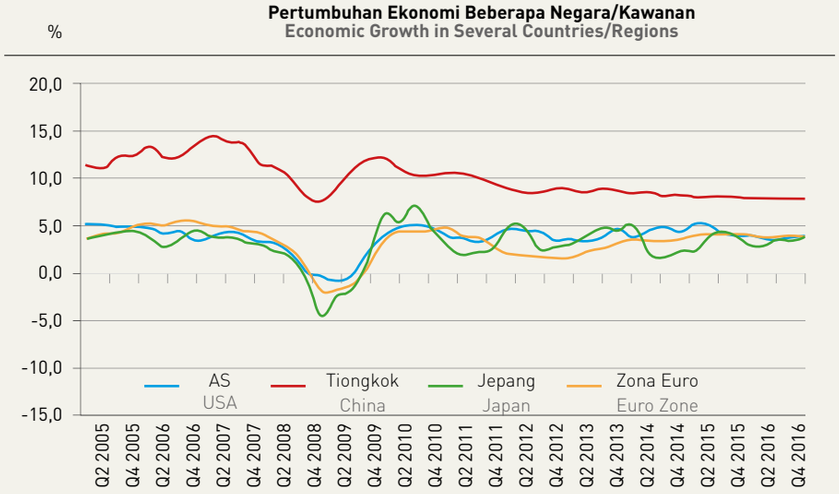

Sepanjang 2016, Amerika Serikat menunjukan perbaikan ekonomi yang semakin solid didukung oleh perkembangan positif data inflasi dan ketenagakerjaan. Inflasi AS membaik ditopang oleh penguatan konsumsi dan investasi. Sejalan hal tersebut, kinerja pasar tenaga kerja membaik diindikasikan dengan menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya data *non-farm payroll*. Sampai akhir 2016, tingkat pengangguran menurun menjadi 4,7%.

Sejalan hal tersebut, Federal Open Market Committee (FOMC) Meeting memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 0,50% - 0,75%. Rencana kebijakan fiskal yang ekspansif di tengah kenaikan FFR akan mendorong penguatan USD terhadap mata uang global sehingga The Fed diprediksi menaikkan FFR lebih cepat dengan frekuensi yang lebih banyak di 2017. Di satu sisi, ekspektasi perbaikan ekonomi AS mendongkrak pertumbuhan global. Di sisi lain, laju normalisasi kebijakan moneter yang cepat berpotensi mendorong *outflow* dari EM ke AS dan *safe haven countries*.

The US economy gained momentum in 2016, supported by positive inflation and unemployment data. US inflation increased on strong consumption and investment. Congruently, lower unemployment and higher non-farm payroll pointed to improving labour market performance. At the end of 2016, the unemployment rate had fallen to 4.7%.

Considering the latest developments, the Federal Open Market Committee (FOMC) decided to hike the Federal Funds Rate (FFR) 25bps to 0.50-0.75%. The planned fiscal expansion, coupled with the FFR hike, drove USD appreciation against other hard currencies with the Fed predicted to raise the FFR more aggressively and more often in 2017. On one hand, the expected US economic gains boosted global growth. On the other hand, however, the aggressive pace of monetary policy normalisation has the potential to trigger capital outflows from EMEs to the US and safe haven countries.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

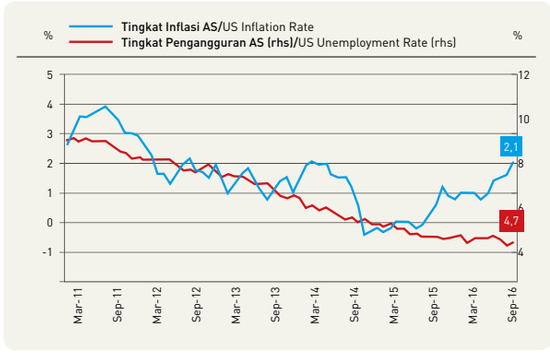

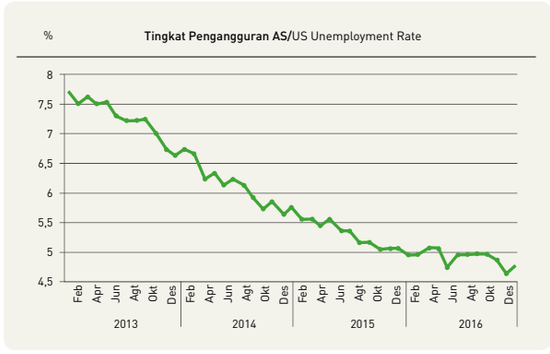

Sejalan dengan pemulihan Amerika Serikat, pemulihan perekonomian kawasan Zona Eropa menunjukkan perkembangan positif. Tingkat inflasi menanjak dan mendekati target 2%, sementara tren pengangguran menurun. Dalam rangka mempertahankan momentum, Bank Sentral Eropa (ECB) memperpanjang program stimulus sampai Desember 2017, dengan jumlah pembelian obligasi diturunkan menjadi EUR60 miliar per bulan.

Di tengah perkembangan tersebut, Uni Eropa dihadapkan pada tantangan berat. Menyusul referendum Brexit, hasil referendum Italia menunjukkan mayoritas pemilih menolak reformasi konstitusional. Selain itu, gerakan populisme menguat di sejumlah negara Uni Eropa, yang bersikap skeptis terhadap manfaat keanggotaan negaranya di Uni Eropa (*Eurosceptic*). Partai-partai politik sayap kanan di Prancis, Jerman, dan Belanda memperoleh dukungan yang semakin kuat menjelang pemilu yang diselenggarakan pada 2017.

In line with the US recovery, the Euro Zone also gained momentum. Inflation was observed to increase towards the 2% target, while unemployment fell. Striving to maintain the momentum, the European Central Bank (ECB) extended its stimulus program through to December 2017, with monthly bond purchases reduced to EUR60 billion.

Against that backdrop, the European Union confronted a number of onerous challenges. Following the Brexit referendum, a referendum in Italy voted against constitutional reforms. Furthermore, the populism movement gained traction in Europe, with the rise of Euroscepticism. Right-wing political parties in France, Germany and the Netherlands have garnered stronger support in the run up to elections in 2017.

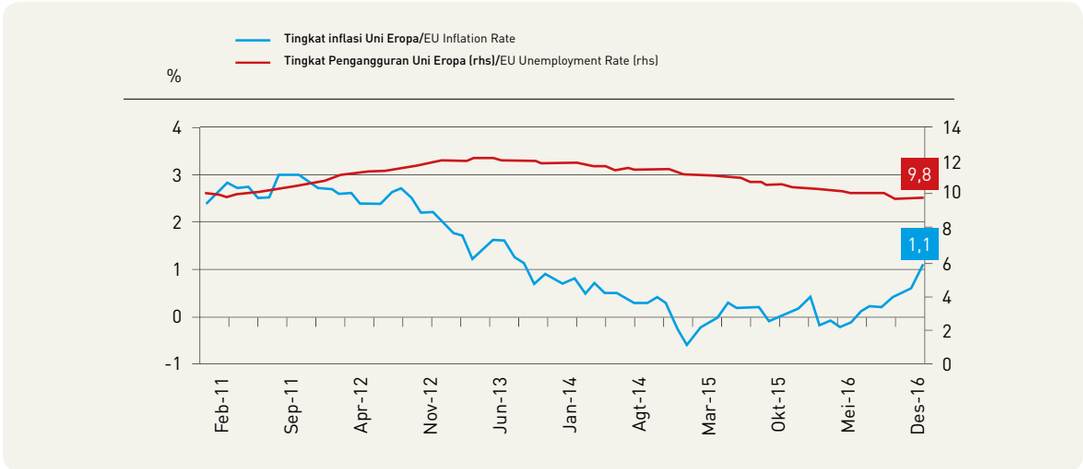

Di Jepang, pemulihan perekonomian terus berlanjut, didorong oleh membaiknya permintaan domestik yang tercermin dari menurunnya penjualan ritel dan stabilnya pasar tenaga kerja.

The economic recovery persisted in Japan, underpinned by stronger domestic demand, indicated by lower retail sales and a stable labour market.

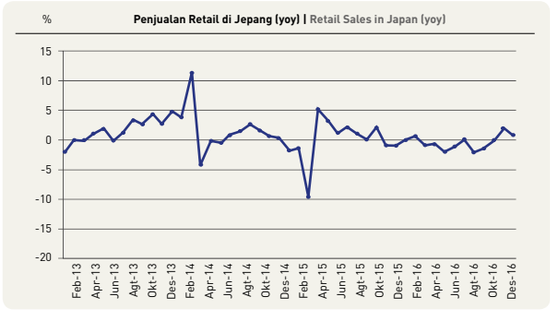

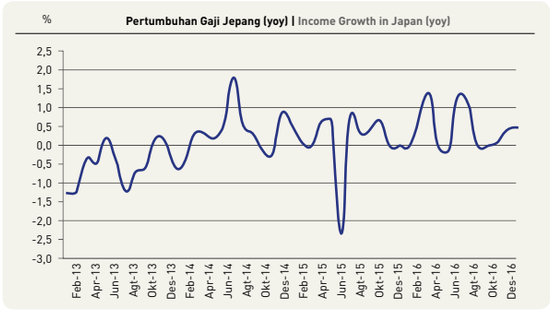

Sejalan membaiknya permintaan domestik, kinerja manufaktur terus ekspansif seiring meningkatnya permintaan baru. Selain itu, inflasi Jepang juga sudah memasuki zona positif dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 1,5% (yoy) pada akhir 2016

In line with higher domestic demand, manufacturing performance remained expansive, while new orders increased. Furthermore, inflation in Japan also entered positive territory with economic growth accelerating to 1.5% (yoy) at the end of 2016.

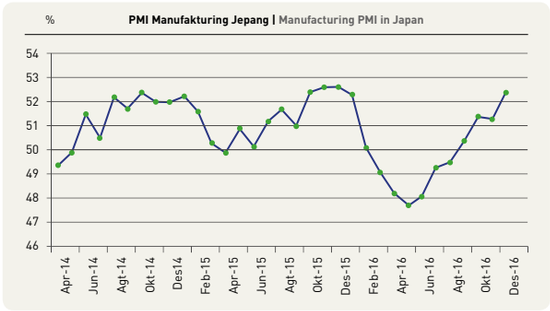

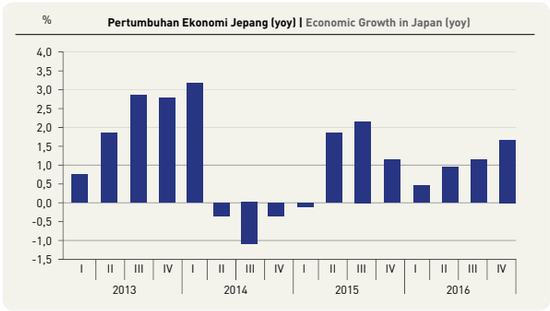

Perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 6,7% (yoy), sedikit lebih rendah dari pertumbuhan periode sebelumnya sebesar 6,8% (yoy). Hal ini sejalan dengan berlangsungnya proses *rebalancing* perekonomian seiring beralihnya dominasi dari sektor konstruksi dan manufaktur (*Secondary Industry*) ke sektor jasa dan konsumsi dalam negeri (*Tertiary Industry*). Kontribusi sektor jasa dan konsumsi mencapai lebih dari 50% PDB sedangkan kontribusi sektor manufaktur menurun di bawah 40% PDB pada akhir 2016.

China's economy recorded growth at 6.7% (yoy), down from 6.8% (yoy) in the previous period in line with the ongoing economic rebalancing process, moving away from the dominance of manufacturing and construction (secondary industries) towards the services sector and domestic consumption (tertiary sector). At the end of 2016, the contribution of the services and consumption sectors had topped 50% of GDP, while the manufacturing industry accounted for less than 40%.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

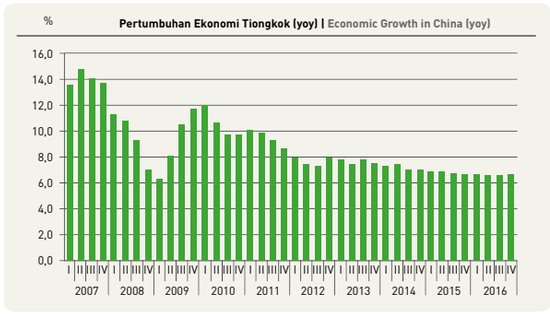

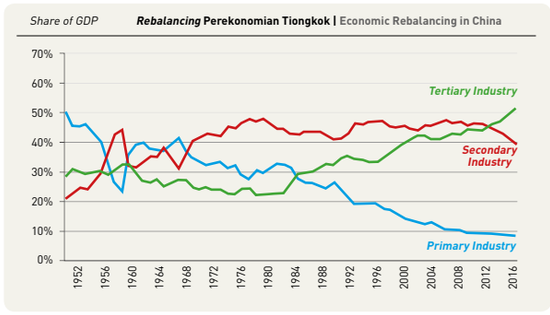

Kuatnya perekonomian Tiongkok juga tercermin dari mulai meningkatnya kinerja ekspor-impor serta meningkatnya industrial profit sejalan dengan kinerja manufaktur yang mulai ekspansi.

The strength of the Chinese economy was also reflected by improving export—import performance and growing industrial profit as the manufacturing industry began to expand.

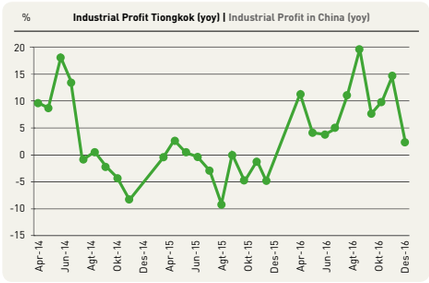

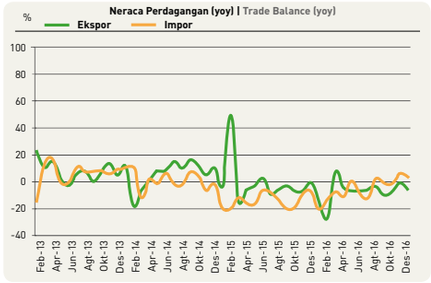

Perbaikan ekonomi Tiongkok yang cukup konklusif terindikasi dari membaiknya performa sektor riil seperti pejualan eceran dan menurunnya harga properti

Real sector performance gains, such as retail sales and lower property prices, were indicative of conclusive economic improvements in China.

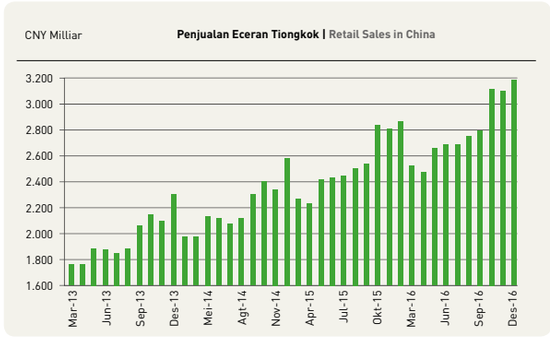

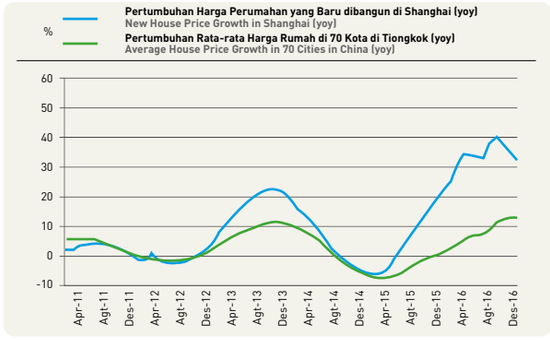

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di sebagian negara-negara berkembang menunjukkan perbaikan meski masih terbatas. Hal ini dilatarbelakangi perbaikan kinerja eksternal seiring dengan meningkatnya harga komoditas global. Selanjutnya, perbaikan kinerja ekspor dan impor negara-negara berkembang diperkirakan akan berlanjut, namun perlu dicermati potensi dampak kebijakan proteksionisme yang akan diterapkan oleh pemerintahan baru AS.

Economic growth in some developing countries recorded gains, albeit limited. Such developments were explained by stronger external performance as international commodity prices began to rise. Furthermore, the export and import gains reported in developing countries are expected to endure, but the potential impact of protectionism by the new US Administration demands vigilance.

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Berkembang
Economic Growth in Developing Countries

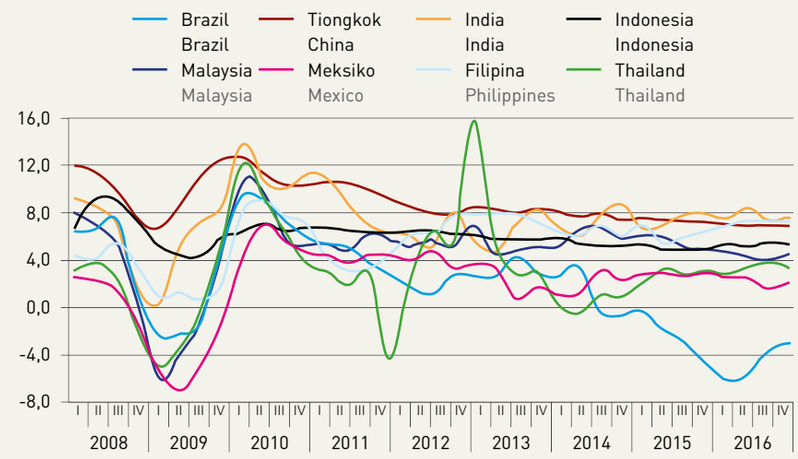

Pertumbuhan ekonomi global yang membaik berkontribusi pada meningkatnya harga komoditas. Setelah menunjukkan tren penurunan pada 2014-2015, pada 2016 harga minyak mulai meningkat, demikian juga dengan beberapa komoditas yang lain. Bank Dunia memperkirakan bahwa kenaikan harga komoditas akan berlanjut pada 2017, meskipun dibayangi ketidakpastian di antaranya terkait implementasi kesepakatan OPEC untuk mengurangi produksi di awal 2017.

Improving global economic growth contributed to rising international commodity prices. After a protracted decline from 2014-2015, the oil price began to rebound in 2016 along with several other commodities. The World Bank predicted that rising commodity prices would persist in 2017, despite being overshadowed by uncertainty relating to the OPEC pact to reduce production at the beginning of 2017.

Harga Komoditas Dunia
World Commodity Prices

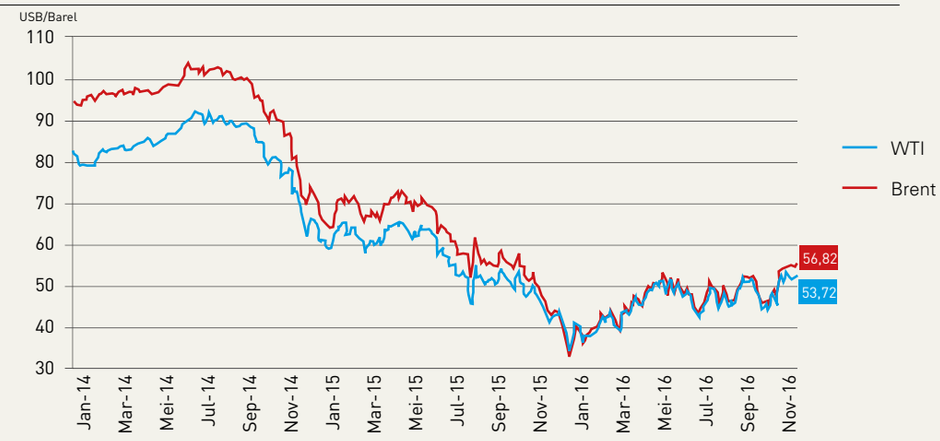

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Selama 2016, Pertumbuhan ekonomi domestik tercatat lebih tinggi terutama didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, membaiknya investasi serta peningkatan ekspor. Selain itu, stabilitas makroekonomi juga terjaga dengan baik tercermin dari terkendalinya inflasi, menyempitnya transaksi berjalan dan menguatnya indikator sektor riil. Prospek perekonomian domestik membaik sejalan dengan keberhasilan program *Tax Amnesty*.

Pertumbuhan ekonomi domestik sepanjang 2016 meningkat didorong oleh masih meningkatnya konsumsi rumah tangga dan ekspor serta membaiknya investasi seiring berlanjutnya proyek infrastruktur Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,88% (yoy).

III.1.2 Financial Market Development

At home, domestic economic growth accelerated in 2016, driven by robust household consumption, more investment and rising exports. Furthermore, macroeconomic stability was maintained in the form of controlled inflation, a narrower current account deficit and stronger real sector indicators. The domestic economic outlook also improved in line with the successful Tax Amnesty.

Domestic economic growth accelerated throughout 2016 on the back of increasing household consumption and exports, as well as more investment as government infrastructure projects remained ongoing. Economic growth stood at 5.02% (yoy) in 2016, up from 4.88% (yoy) the year earlier.

Pertumbuhan Ekonomi (yoy)
Economic Growth (yoy)

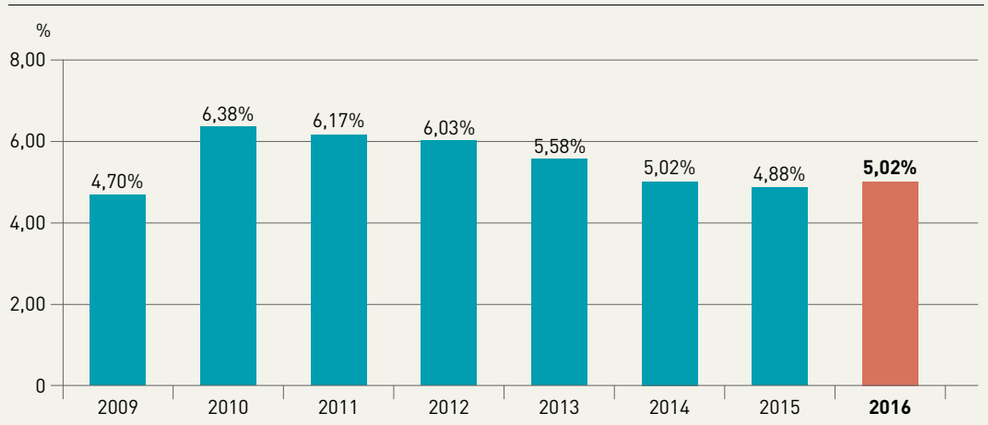

Perkembangan inflasi tetap terkendali mendekati batas bawah sasaran inflasi 4±1%, yaitu sebesar 3,02% (yoy) yang merupakan terendah sejak 2009. Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh harga-harga di kelompok *administered price*, sementara inflasi inti terpantau masih terus menurun.

Kenaikan harga komoditas berdampak pada berlanjutnya tren pemulihan kinerja eksternal Indonesia, tercermin dari kinerja ekspor tumbuh 21,3% (yoy), sementara impor tumbuh 9,9% (yoy). Hal ini sejalan dengan perbaikan kinerja eksternal negara-negara mitra dagang utama (khususnya Tiongkok).

Inflation was controlled towards the floor of the 4±1% target corridor at 3.02% (yoy), the lowest rate since 2009. Low inflation stemmed from administered prices (AP), while core inflation was observed to continue declining.

Rising commodity prices drove external performance in Indonesia, as exports grew at 21.3% (yoy) and imports at 9.9% (yoy) in line with external performance gains in Indonesia's major trading partners (particularly China).

Neraca Perdagangan
Trade Balance

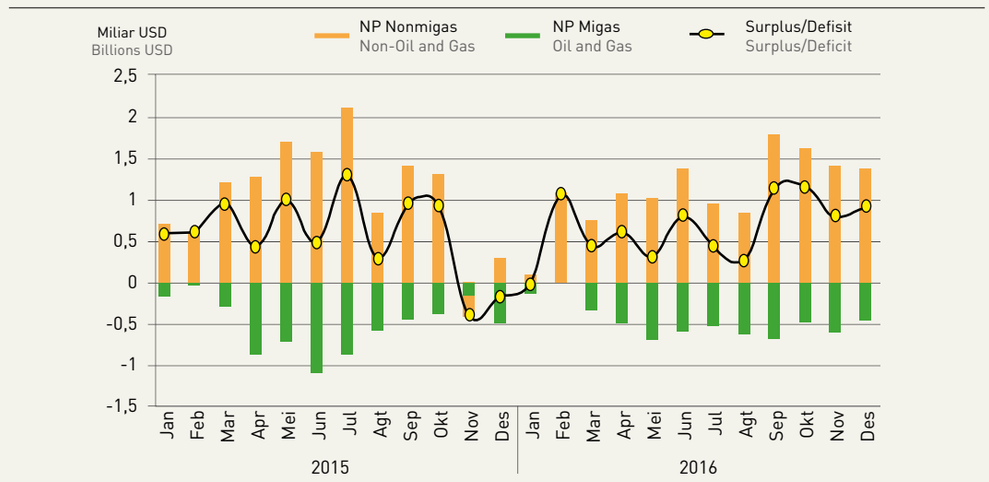

Peningkatan kinerja eksternal mampu mempertahankan surplus transaksi berjalan di tengah impor dan pembayaran *transfer* pendapatan juga yang meningkat. Selain itu, seiring *inflow* di pasar keuangan domestik, neraca transaksi modal dan finansial mencatat surplus, tercermin dari aliran modal asing masuk dalam bentuk investasi langsung (FDI) yang meningkat di samping investasi dalam bentuk portofolio yang juga meningkat. Posisi cadangan devisa tercatat USD116,4 miliar, meningkat dibanding posisi yang sama tahun sebelumnya. Posisi tersebut cukup untuk membiayai 8,8 bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah serta berada di atas standar internasional sekitar 3 bulan impor.

Improving external performance maintained the current account surplus despite rising imports and transfer payments. In addition, congruent with capital inflow to the domestic financial markets, the capital and financial account recorded a significant surplus on an influx of foreign direct investment (FDI) and portfolio investment. Consequently, the position of reserve assets stood at USD116.4 billion, increasing on the year earlier, equivalent to 8.8 months of imports and servicing government external debt, which is well above the international standard of around three months.

Cadangan Devisa
Reserve Assets

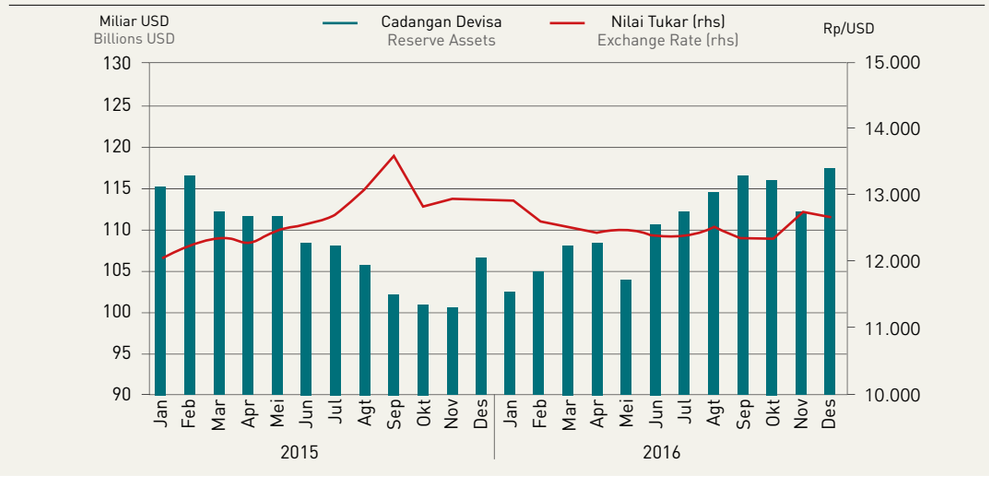

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Selama 2016, risiko pasar keuangan domestik terpantau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sejalan berkurangnya ketidakpastian kenaikan FFR dan relatif terbatasnya dampak Brexit. Hasil pemilu AS sempat memberi tekanan terhadap pasar namun dengan peningkatan volatilitas yang terbatas. Perbaikan sentimen pasar keuangan global tersebut turut mendorong penguatan pasar keuangan domestik yang didiringi oleh peningkatan *capital inflow*.

Pasar keuangan domestik selama 2016 mengalami penguatan sejalan dengan perbaikan sentimen global dan domestik. Meski sempat tertekan pada paruh akhir 2016 akibat isu kenaikan FFR, pemilu AS dan volatilitas harga minyak dunia, sentimen domestik terkait optimisme program *tax amnesty* dan kinerja emiten yang membaik menjadi katalis positif terhadap perkembangan pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 2016 terpantau bergerak menguat sebesar 15,32% ytd, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2015: 12,13%). Penguatan tersebut diikuti oleh *net buy* nonresiden di pasar saham sebesar Rp15,08 triliun setelah pada tahun sebelumnya mencatatkan *net sell* sebesar Rp22,59 triliun.

III.1.3 Financial Market Development

The risks on domestic financial markets were observed to dissipate in 2016 as uncertainty surrounding the proposed FFR hikes eased and the impact of the Brexit was relatively contained. The unexpected results of the US election intensified market pressures but volatility increased only slightly. Improved global financial market sentiment helped to strengthen the domestic markets, accompanied by a surge of capital inflow.

The domestic financial markets rallied in 2016 in line with improving global and domestic sentiment. Despite the pressures felt in the latter half of 2016 due to the planned FFR hike, US election and international oil price volatility, domestic sentiment improved due to optimism surrounding the tax amnesty and issuer performance, which catalysed stock market performance. The Jakarta Composite Index (JCI) rallied in 2016 by 15.32% (ytd), up from 12.13% in 2015. Furthermore, the stock market rally was accompanied by a net buy booked by non-residents totalling Rp15.08 trillion, reversing the net sell of Rp22.59 trillion recorded the year earlier

Perkembangan Indeks Saham 30 Desember 2016 vs 31 Desember 2015
Stock Market Performance 30th December 2016 vs 31st December 2015

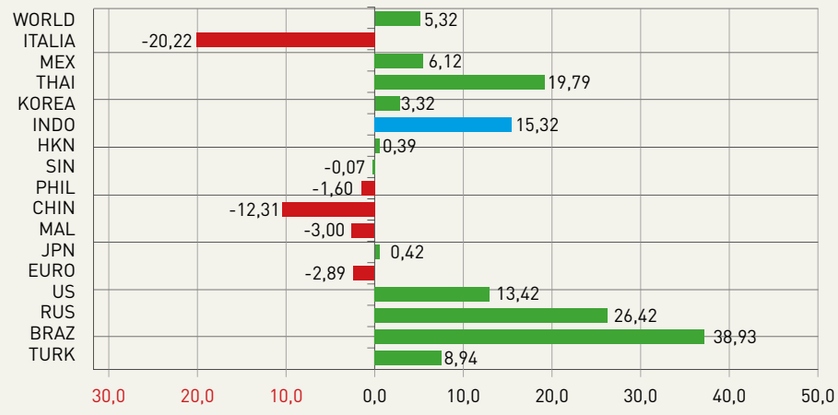

Perkembangan Nilai Tukar 30 Desember 2016 vs 31 Desember 2015
Global Exchange Rate Performance 30th December 2016 vs 31st December 2015

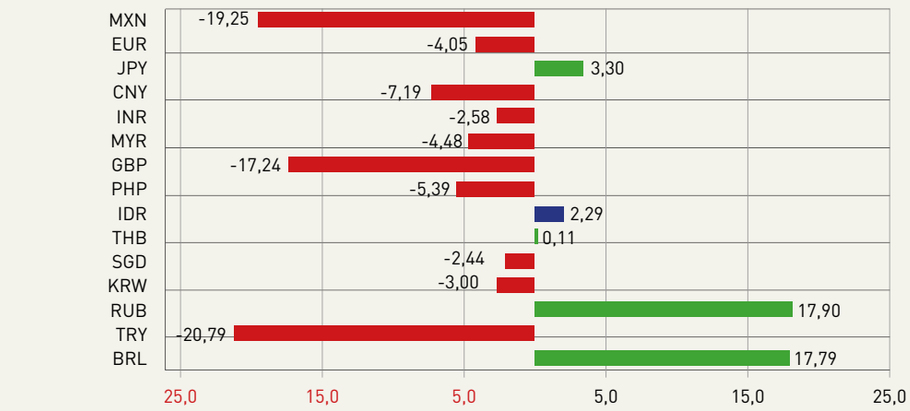

Seiring perbaikan sentimen di pasar keuangan global, tekanan di pasar keuangan domestik cenderung menurun, yang meningkatkan aliran modal masuk nonresiden serta membaiknya prospek ekonomi domestik yang berdampak positif terhadap penguatan nilai tukar Rupiah. Kinerja nilai tukar Rupiah sepanjang 2016 menguat sebesar 2,29% (ytd).

Sejalan kinerja pasar saham, kinerja pasar SBN menunjukkan penguatan tercermin dari penurunan *yield* SBN di semua tenor. Dibandingkan tahun sebelumnya, imbal hasil SBN secara keseluruhan mengalami penurunan rata-rata sebesar 86 bps. Adapun imbal hasil jangka pendek, menengah, dan panjang turun masing-masing sebesar 125 bps, 85 bps, dan 70 bps. Sejalan dengan penurunan *yield*, investor nonresiden mencatat *net buy* di pasar SBN sebesar Rp107,28 triliun, meningkat dari *net buy* tahun sebelumnya sebesar Rp97,17 triliun.

In line with improving sentiment on global financial markets, milder pressures were reported on the domestic financial markets, which drove non-resident capital inflows and improved the domestic economic outlook, thus feeding through to rupiah appreciation. Accordingly, the rupiah appreciated 2.29% (ytd) in 2016.

Congruous with stock market performance, the SBN market also rallied on lower yields for all tenors. Compared to conditions the year earlier, average SBN yield fell by 86bps, while the yields of short, medium and long tenors fell respectively by 125bps, 85bps and 70bps. Consistent with lower yields, non-resident investors booked a net buy of tradeable government securities (SBN) totalling Rp107.28 trillion, increasing from Rp97.17 trillion in the previous year.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Perkembangan *Yield* SBN
SBN Yield

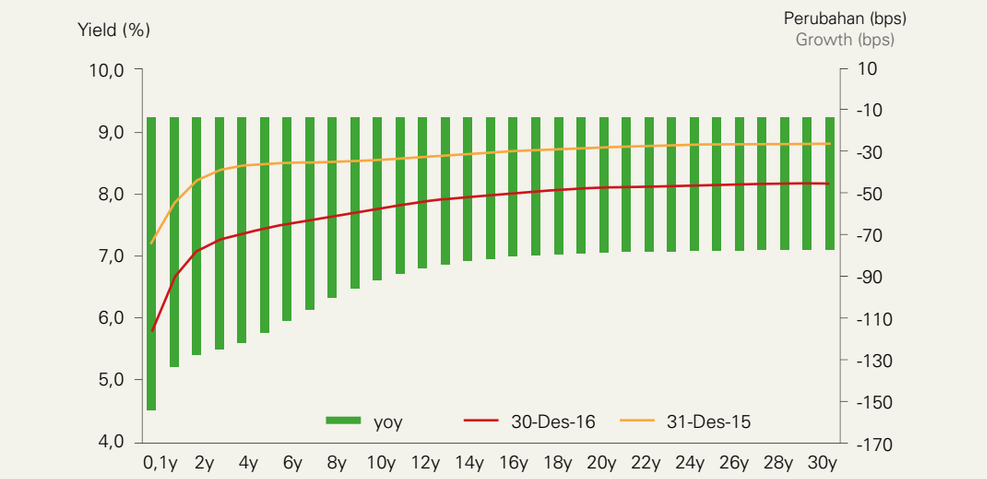

III.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

III.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

III.2 THE BANKING INDUSTRY GROWTH

III.2.1 Conventional Commercial Banks Growth

Kondisi Umum Perbankan Konvensional
General Conditions of Conventional Banks

Rasio | Ratio	2012	2013	2014	2015	2016	yoy
Bank Umum Konvensional **Conventional Commercial Banks**						
Total Aset (Rp miliar) | Total Assets (Rp billions)	4.115.003	4.773.892	5.410.098	5.919.390	6.475.602	⬆ 9,40%
Kredit (Rp miliar) | Credit (Rp billions)	2.597.026	3.158.099	3.526.364	3.903.936	4.199.713	⬆ 7,58%
Dana Pihak Ketiga (Rp miliar) | Deposits (Rp billions)	3.107.385	3.w520.616	3.943.697	4.238.349	4.630.352	⬆ 9,25%
CAR | CAR (%)	17,43	18,13	19,57	21,39	22,93	⬆ 1,55
ROA | ROA (%)	3,11	3,08	2,85	2,32	2,23	⬇ (0,10)
NIM | NIM (%)	5,49	4,89	4,23	5,39	5,63	⬆ 0,24
BOPO | BOPO (%)	74,10	74,08	76,29	81,49	82,22	⬆ 0,73
NPL Gross | Gross NPL (%)	1,82	1,82	2,04	2,39	2,86	⬆ 0,47
NPL Net | Net NPL (%)	0,86	0,86	0,98	1,14	1,20	⬆ 0,06
LDR | LDR (%)	83,58	89,70	89,42	92,11	90,70	⬇ (1,41)

Keterangan : ⬆ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik Denotes increased growth with a positive impact
Notes : ⬇ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik Denotes decreased growth with an adverse impact
⬇ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik Denotes decreased growth with a positive impact
⬆ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik Denotes increased growth with an adverse impact

Secara umum kondisi Bank Umum Konvensional (BUK) masih terjaga baik tercermin dari kondisi permodalan yang kuat ditopang rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) sebesar 22,93% atau tumbuh 155 bps (yoy). Meski demikian, kondisi perlambatan

In general, conventional commercial banks showed maintained performance, reflecting robust capital conditions and a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 22.93%, up 155bps (yoy). Nevertheless, economic moderation for the past two years has undermined

ekonomi yang terjadi dua tahun terakhir turut mempengaruhi penyaluran kredit perbankan, hal ini tercermin dari perlambatan Kredit diiringi peningkatan NPL sehingga perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

NPL *gross* dan NPL *net* tercatat meningkat masing-masing menjadi 2,86% dan 1,20% di 2016. Selain itu, ROA juga mengalami penurunan menjadi 2,23% meskipun NIM relatif stabil sebesar 5,63%. Efisiensi intermediasi perbankan belum membaik tercermin dari BOPO tercatat sebesar 82,22% di akhir 2016.

credit growth, evidenced by slower credit growth and rising non-performing loans (NPL), which made the banks less inclined to lend through increased prudence.

Gross and net non-performing loans (NPL) increase to 2.86% and 1.20% respectively in 2016. In addition, the return on assets (ROA) experienced a decline to 2.23%, while the net interest margin (NIM) was relatively stable at 5.63%. Bank intermediation efficiency, however, did not improve in 2016, reflecting a BOPO efficiency ratio of 82.22% at year end.

III.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

III.2.2 Rural Banks Growth

Kinerja BPR
Rural Bank Performance Indicators

Rasio | Ratio	2012	2013	2014	2015	2016	yoy
Total Aset (Rp miliar) | Total Assets (Rp billions)	67.397	77.376	89.878	101.713	113.510	⬆ 11,59%
Kredit (Rp miliar) | Credit (Rp billions)	49.818	59.176	68.391	74.807	81.684	⬆ 9,19%
Dana Pihak Ketiga (Rp miliar) | Deposits (Rp billions)	44.870	50.520	58.750	67.266	75.725	⬆ 12,58%
NPL Gross | Gross NPL (%)	4,75	4,41	4,75	5,37	5,38	⬆ 0,46
NPL Net | Net NPL (%)	3,25	3,05	2,88	3,34	4,20	⬆ 0,86
ROA | ROA (%)	3,46	3,44	2,98	2,71	2,59	⬇ (0,12)
LDR | LDR (%)	78,63	84,34	79,79	77,81	76,24	⬇ (1,57)
CR | CR (%)	20,04	18,50	19,30	19,41	19,01	⬇ (0,13)
KAP | KAP (%)	3,25	3,13	3,31	3,68	4,02	⬆ 0,34
ROE | ROE (%)	32,63	32,14	27,89	24,76	23,61	⬇ (1,15)
BOPO | BOPO (%)	77,77	78,15	80,21	81,59	81,19	⬇ (0,40)
CAR | CAR (%)	27,55	21,53	22,34	21,93	22,77	⬆ 0,84

Keterangan / Notes :
⬆ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik Denotes increased growth with a positive impact
⬇ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik Denotes decreased growth with an adverse impact
⬇ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik Denotes decreased growth with a positive impact
⬆ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik Denotes increased growth with an adverse impact

Selama 2016, kondisi BPR cukup solid dengan kondisi permodalan yang baik didukung rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/ CAR) mencapai 22,77%. Selain itu, DPK mengalami pertumbuhan sebesar 12,58%. Di sisi lain, perlambatan terjadi pada penyaluran kredit yang hanya tumbuh 9,19%. Kondisi tersebut mempengaruhi fungsi intermediasi BPR yang melambat, tercermin dari rasio LDR pada posisi 76,24%.

Perlambatan kredit tersebut dipengaruhi oleh peningkatan NPL *gross* dan NPL *net* menjadi 5,83% dan 4,20%. Hal tersebut mempengaruhi rentabilitas dengan penurunan ROA menjadi 2,59% meskipun BOPO sedikit membaik tercatat sebesar 81,29% pada akhir 2016.

Rural banks maintained sound performance in 2016 with a solid capital base, reflecting a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 22.77%. In addition, deposit growth was reported at 12.58%, while credit growth decelerated to 9.19%. Such developments slowed the intermediation function of rural banks, with the loan-to-deposit ratio (LDR) standing at 76.24%.

Credit growth slowed as non-performing loans (NPL) increased, rising to 5.83% gross and 4.20% net, which eroded profit with the return on assets (ROA) decreasing to 2.59%, while the BOPO efficiency ratio improved to 81.29% as of the end of 2016.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.2.3 Penyaluran Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi **III.2.3 Bank Loans by Economic Sector**

Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi 2016
Bank Loan Concentration by Economic Sector in 2016

Sektor Ekonomi Economic Sector	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Rp billions)					Porsi Portion	Pertumbuhan (yoy) Growth (yoy)			
	2012	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016
Pertanian | Agriculture	142.451	177.162	212.386	254.954	283.827	6,5%	24,4%	19,9%	20,0%	11,3%
Perikanan | Fisheries	5.492	6.391	7.698	8.843	9.479	0,2%	16,4%	20,5%	14,9%	7,2%
Pertambangan dan Penggalian | Mining and Quarrying	104.207	126.826	141.824	135.273	126.335	2,9%	21,7%	11,8%	-4,6%	-6,6%
Industri Pengolahan | Manufacturing Industry	445.807	577.880	660.536	760.048	781.765	17,9%	29,6%	14,3%	15,1%	2,9%
Listrik, Gas dan Air | Utilities	59.073	79.493	81.130	99.447	135.461	3,1%	34,6%	2,1%	22,6%	36,2%
Konstruksi | Construction	95.921	116.090	147.266	172.934	214.757	4,9%	21,0%	26,9%	17,4%	24,2%
Perdagangan Besar dan Eceran | Wholesale and Retail	499.567	644.047	716.733	792.503	841.384	19,2%	28,9%	11,3%	10,6%	6,2%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Accommodation and Food/Beverages	44.640	59.306	73.583	85.861	93.390	2,1%	32,9%	24,1%	16,7%	8,8%
Transportasi | Transportation	122.235	163.418	171.805	177.546	171.795	3,9%	33,7%	5,1%	3,3%	-3,2%
Perantara Keuangan | Financial Intermediation	124.958	151.154	166.182	164.681	193.946	4,4%	21,0%	9,9%	-0,9%	17,8%
Real Estate | Real Estate	150.568	193.182	165.466	184.755	209.999	4,8%	28,3%	-14,3%	11,7%	13,7%
Administrasi Pemerintahan | Government Administration	2.793	12.475	11.002	12.914	14.702	0,3%	346,7%	-11,8%	17,4%	13,8%
Jasa Pendidikan | Education Services	4.612	5.477	6.648	8.129	8.553	0,2%	18,7%	21,4%	22,3%	5,2%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Health Services and Social Activities	8.671	10.153	12.325	21.488	16.966	0,4%	17,1%	21,4%	74,3%	-21,0%
Jasa Kemasyarakatan | Community Services	45.006	53.861	67.744	57.989	58.707	1,3%	19,7%	25,8%	-14,4%	1,2%
Jasa Perorangan | Individual Services	711	1.537	2.220	2.708	2.644	0,1%	116,1%	44,4%	22,0%	-2,4%
Badan Internasional | International Bodies	501	318	211	110	231	0,0%	-36,5%	-33,6%	-47,8%	109,5%
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya | Undefined Activities	50.396	3.984	15.889	11.960	10.611	0,2%	-92,1%	298,9%	-24,7%	-11,3%
Rumah Tangga | Households	619.265	688.051	832.752	916.252	980.338	22,4%	11,1%	21,0%	10,0%	7,0%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya | Non-Commercial	180.987	222.068	180.908	189.508	222.306	5,1%	22,7%	-18,5%	4,8%	17,3%
Total	**2.707.862**	**3.292.874**	**3.674.308**	**4.057.904**	**4.377.195**	**100,0%**	**21,6%**	**11,6%**	**10,4%**	**7,9%**

Pada akhir 2016, kredit perbankan didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor industri pengolahan (17,9%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,2%), dan sektor rumah tangga (22,4%). Pertumbuhan kredit sebesar 7,9% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 10,4% (yoy). Perlambatan terjadi pada sektor pertambangan, yang turun -6,6% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi harga komoditas yang tertekan selama dua tahun terakhir sehingga menyulitkan ekspansi pertambangan.

Di sisi lain, sektor yang tumbuh cukup baik adalah sektor listrik (36,2%, yoy), yang ditopang berjalannya proyek Pemerintah untuk pembangunan pembangkit listrik. Selain itu, sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik (24,2%, yoy) didukung oleh perkembangan proyek infrastruktur Pemerintah dengan nilai proyek mencapai Rp1.529 triliun.

At the end of 2016, three economic sectors dominated bank loans, namely the manufacturing industry (17.9%), wholesale and retail (19.2%) as well as households (22.4%). Loan growth slowed in 2016 from 10.4% (yoy) to 7.9% (yoy), primarily affected by contraction in mining sector (-6,6%, yoy) due to low commodity prices over the past two years and expansion constraints.

On the other hand, the electricity sector posted solid growth (36.2%, yoy) supported by government projects on building power plants. In addition, construction sector is also showing significant progress (2,4%, yoy) supported by infrastructure projects valued at Rp1,529 trillion.

III.2.4 Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada akhir 2016, kredit UMKM tumbuh 8,42% (yoy) menjadi Rp802,1 triliun. Jumlah tersebut setara 18,32% dari total kredit perbankan, jauh lebih tinggi dari minimal 10% terhadap total kredit 2016. Secara umum, kualitas kredit UMKM mengalami peningkatan tercermin dari penurunan NPL UMKM menjadi 3,96%.

Penyaluran kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran (53,93%), diikuti oleh industri pengolahan (10,50%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (8,35%). Pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar 10,03% (yoy) dengan NPL sebesar 3,77% paling rendah dibandingkan dua sektor lainnya. Peningkatan penyaluran kredit UMKM kepada industri pengolahan seiring dengan mulai membaiknya perekonomian domestik

III.2.4 MSME Loans

At the end of 2016, micro, small and medium enterprises (MSME) loan credit growth reached 8.42% (yoy), with disbursed loans totalling Rp802.1 trillion and accounting for 18.32% of total bank loans, which is well above the 10% threshold required. In general, NPL on MSME loans declined to 3.96%, indicating improved loan quality.

MSME loan concentrated on the wholesale and retail sector (53.93%), followed by the manufacturing industry (10.50%) as well as the agricultural, hunting and forestry sector (8.35%). Meanwhile, the manufacturing industry achieved the strongest growth of MSME loans at 10.03% (yoy) with NPL at 3.77%, the lowest of the three sectors. Increased bank lending to MSMEs was in line with domestic economic momentum.

Konsentrasi Penyaluran UMKM (Rp Miliar)
MSME Loan Concentration (Rp billions)

Jenis Type	2012	2013	2014	2015	Porsi Portion	2016	Porsi Portion	Δ yoy
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | Agricultural, Hunting and Forestry Sector								
Baki Debet | Outstanding Loans	40.709	48.193	54.506	61.083	8,26%	67.014	8,35%	9,71%
NPL | NPL	1.492	1.615	2.146	2.520	4,13%	2.587	3,86%	2,68%
Industri Pengolahan | Manufacturing Industry								
Baki Debet | Outstanding Loans	59.500	60.087	67.558	76.518	10,34%	84.196	10,50%	10,03%
NPL | NPL	1.798	1.736	2.140	2.759	3,61%	3.177	3,77%	15,17%
Perdagangan Besar dan Eceran | Wholesale and Retail								
Baki Debet | Outstanding Loans	248.870	323.056	355.198	395.843	53,51%	432.560	53,93%	9,28%
NPL | NPL	8.458	10.621	13.004	15.125	3,82%	16.555	3,83%	9,46%
Lainnya | Others								
Baki Debet | Outstanding Loans	177.318	177.487	194.458	206.357	27,89%	218.344	27,22%	5,81%
NPL | NPL	5.262	5.543	7.869	9.389	4,55%	9.415	4,31%	0,28%
Total Kredit UMKM | Total MSMEs Credit								
Baki Debet UMKM | Outstanding MSME Loans	526.397	608.823	671.721	739.801		802.113		8,42%
NPL UMKM | MSME NPL	17.011	19.515	25.159	29.792	4,03%	31.734	3,96%	6,52%

Sumber: SPI Desember 2016
Source: Indonesian Banking Statistics December 2016

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Penyebaran penyaluran kredit UMKM sebagian besar terpusat di pulau Jawa yaitu 57,66%, dengan penyaluran terbesar berada di provinsi DKI Jakarta (14,66%). Selain itu, untuk pulau Sumatera sebagian besar kredit UMKM berada di provinsi Sumatera Utara yaitu 5,89%.

MSME loan distribution was centred on the island of Java, accounting for 57.66%, with most loans disbursed in Jakarta (14,66%). In addition, MSME loans on Sumatra tended to concentrate in North Sumatra, accounting for 5.89%.

Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah
MSME Loan Distribution by Region

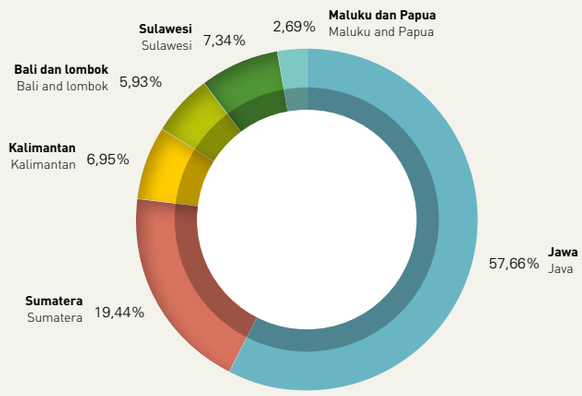

Sumber: SPI Desember 2016
Source: SPI December 2016

III.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

III.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Keputusan Bank Sentral AS menaikkan suku bunga menjadi 0,75%, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, serta hasil referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa merupakan faktor global yang berdampak pada kinerja Pasar Modal Indonesia. Selain itu, faktor domestik yang mempengaruhi antara lain keputusan Bank Indonesia (BI) mengubah suku bunga acuan dari BI *rate* menjadi BI 7-*day Repo Rate*. Pada akhir periode laporan, BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-*day Reverse Repo Rate* (BI 7-*day RR Rate*) tetap sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 4,00% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,50% serta Pengesahan UU Amnesti Pajak oleh DPR.

III.3 THE CAPITAL MARKET INDUSTRY GROWTH

III.3.1 Securities Trading Growth

Capital market performance was affected by several global factors, including the Federal Reserve's decision to raise the Federal Funds Rate (FFR) to 0.75%, the election of Donald Trump as US President and the Brexit referendum, which has paved the way for the UK to leave the European Union. Notwithstanding the international factors, a number of domestic considerations also influenced capital market performance, including Bank Indonesia's decision to replace the BI Rate with the BI 7-Day (Reverse) Repo Rate along with enactment of the Tax Amnesty by the People's Representative Council (DPR). At the end of the reporting period, Bank Indonesia voted to hold the BI 7-Day (Reverse) Repo Rate at 4.75%, while maintaining the Deposit Facility and Lending Facility rates at 4.00% and 5.50% respectively.

Pada akhir 2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada posisi 5.296,711 atau mengalami kenaikan sebesar 703,703 poin (15,32%) jika dibandingkan posisi 2015. Secara regional Indonesia berada pada posisi kedua setelah Thailand dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,32% (ytd).

At the end of 2016, the Jakarta Composite Index (JCI) closed at a level of 5,296.711, up 703.703 points (15.32%) on the position recorded in 2015. Regionally, Indonesia placed second after Thailand and recorded growth of 15.32% (ytd).

Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (ytd)
Performance of Leading Stock Exchanges (ytd)

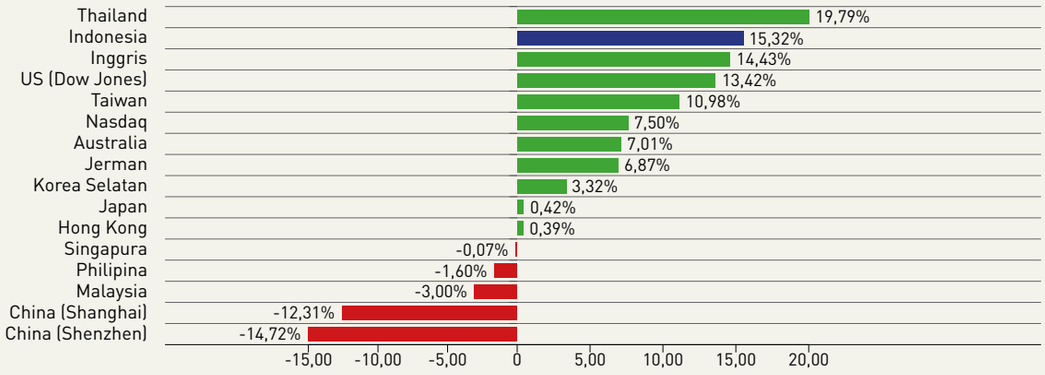

Kenaikan IHSG diikuti kenaikan seluruh indeks konstituen, dengan kenaikan tertinggi pada sektor pertambangan sebesar 70,73%. Kenaikan harga minyak dunia disebabkan terjadinya kesepakatan pemangkasan produksi minyak oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Anggota OPEC sepakat untuk menahan produksi minyaknya untuk mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kesepakatan pemangkasan produksi dilakukan sebanyak dua kali selama 2016.

The JCI rally was accompanied by gains on all constituent indexes, most significantly the mining sector at 70.73%. The recent global oil price surge was attributed to the pacts signed by OPEC members to cut production. OPEC members agreed to restrict production in order to raise the global oil price. Such pacts to cut production were signed twice in 2016.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai kapitalisasi pasar saham dan rata-rata nilai perdagangan harian mengalami kenaikan masing-masing sebesar 18,08% dan 30,09% menjadi Rp5.753,61 triliun dan Rp7,50 triliun per hari.

In addition, compared to conditions one year earlier, stock market capitalisation value and the daily average trading value of stock increased respectively by 18.08% and 30.09% to Rp5,753.61 trillion and Rp7.50 trillion per day.

Rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari meningkat sebesar 19,20%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan transaksi pada investor lokal.

The daily average trading frequency of stock climbed 19.20% in 2016 on increasing local investor transactions.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Perkembangan Indeks Industri (ytd)
Industry Indexes (ytd)

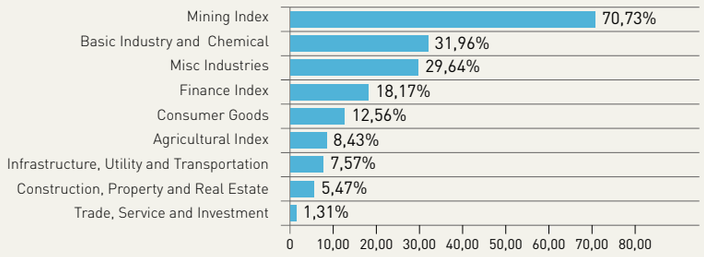

Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian
Jakarta Composite Index (JCI) Performance and Average Daily Value of Stock Trading

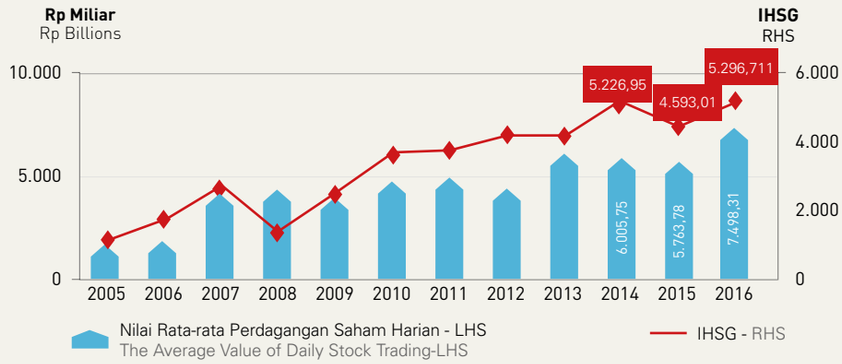

Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik
Stock Trading by Foreign and Domestic Investors

Indikator (Rata-rata harian) | Indicator (Daily Average)	2014	2015	2016
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar rupiah) Average Daily Value of Stock Trading (Rp billions)	6.005,75	5.763,78	7.498,32
Investor Asing (dalam miliar rupiah) Foreign Investors (Rp billions)			
Beli | Buy Value	2.524,86	2.443,97	2.798,75
Jual | Sell Value	2.348,84	2.536,55	2.733,02
Investor Domestik (dalam miliar rupiah) Domestic Investors (Rp billions)			
Beli | Buy Value	3.480,89	3.319,81	4.699,58
Jual | Sell Value	3.656,92	3.227,23	5.765,30
Frekuensi Perdagangan Saham Harian Daily Stock Trading Frequency	212.635	221.583	264.127

Selama 2016, transaksi investor asing membukukan *net buy* sebesar Rp16,17 triliun. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang membukukan *net sell* sebesar Rp22,59 triliun.

In 2016, foreign investors booked a net buy totalling Rp16.17 trillion, contrasting the Rp22.59 trillion net sell recorded the year earlier.

Perkembangan IHSG dan Net Asing
JCI Performance and Foreign Net Buying/Selling

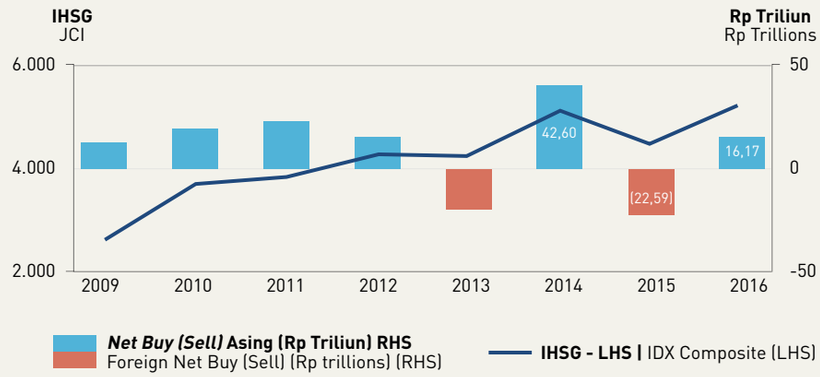

Secara umum kinerja pasar Obligasi, baik pemerintah maupun korporasi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari pergerakan *Indonesia Bond Indexes* (INDOBeX). INDOBeX *Composite Total Return* pada penutupan 2016 mencatatkan *positive return* sebesar +13,76% (ytd) yaitu dari level 183,2759 menjadi 208,4964. Secara spesifik, kinerja obligasi pemerintah dilihat dari pergerakan INDOBeXG-*Total Return* yang mencatatkan *positive return* tahun berjalan sebesar +13,95% (ytd) menuju 205,5487. Kinerja Obligasi Korporasi dapat dilihat dari pergerakan INDOBeXC-*Total Return* yang mencatatkan *positive return* tahun berjalan sebesar +12,65% (ytd) menjadi 221,3525. Pergerakan *yield* INDOBeX-*Effective yield* mencatatkan penurunan sebesar -11,49% (ytd) menjadi 8,081.

In general, bond market performance, both government and corporate bonds, rallied on the previous year, as reflected by movements in the Indonesia Bond Indexes (INDOBeX). The INDOBeX Composite Total Return at the close of 2016 recorded a positive return of +13.76% (ytd), increasing from 183.2759 to 208.4964. More specifically, the INDOBeXG - Total Return Index, which recorded a positive return of +13.95% (ytd) to close at 205.5487, was indicative of government bond performance. Similarly, the INDOBeXC - Total Return Index, which recorded a positive return of +12.65% (ytd) to close at 221.3525, demonstrated robust corporate bond performance. The INDOBeX – Effective yield posted a -11.49% (ytd) decline on the previous year to 8.081.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Indonesia Bond Index - Composite - Total Return
Indonesia Composite Bond Index (ICBI)

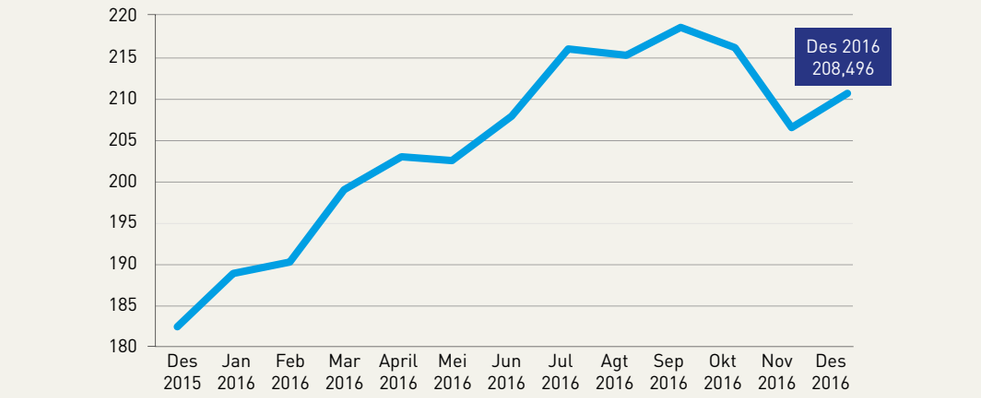

Indonesia Bond Index - Effective Yield
INDOBeX - Composite - Effective Yield

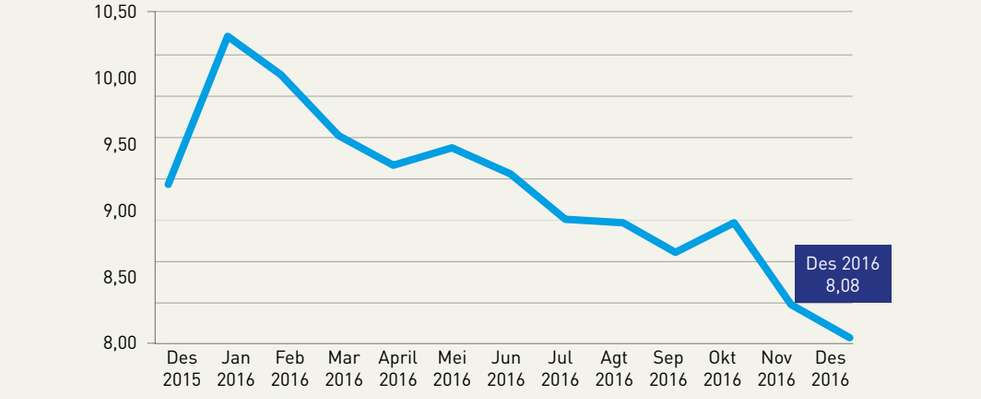

Keterangan:
1. *Total Return* (TR) : Menggambarkan pergerakan tingkat pengembalian (*rate of return*) keseluruhan obligasi yang dihitung berdasarkan kenaikan/penurunan harga obligasi, akumulasi perolehan bunga berjalan (*accrued interest*) dan perolehan kupon tahunan yang reinvestasikan kembali.
2. Effective yield (EY) : Menggambarkan pergerakan tingkat imbal hasil (*yield*) keseluruhan obligasi yang dihitung berdasarkan kenaikan/penurunan tingkat *yield* obligasi dan telah memperhitungkan akumulasi perolehan bunga berjalan (*accrued interest*).

Notes:
1. Total Return (TR) indicates the rate of return on all bonds based on increases/decreases in bond price, accrued interest and reinvested annual coupon.
2. Effective Yield (EY) indicates the yield of all bonds based on increases/decreases in yield and accrued interest.

Selama 2016, volume dan nilai perdagangan obligasi pemerintah mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp253,36triliun (7,45%) dan Rp348,45 triliun (10,25%) menjadi Rp3.653,30 triliun dan Rp3.749,57 triliun. Sementara itu, volume dan nilai perdagangan Obligasi Korporasi masing-masing meningkat sebesar Rp36,64 triliun (19,52%) dan Rp39,09 triliun (21,01%) masing-masing menjadi Rp224,30 triliun dan Rp225,14 triliun.

In 2016, volume and value of government bonds trading increased Rp253.36 trillion (7.45%) and Rp348.45 trillion (10.25%) to Rp3,653.30 and Rp3,749.57 trillion. Likewise, volume and value of corporate bonds trading increased Rp36.64 trillion (19.52%) and Rp39.09 trillion (21,01%) to Rp224.30 trillion and Rp225.14 trillion.

Perkembangan Transaksi Surat Hutang
Bond Trading Transactions

Jenis Transaksi Transaction Type	2015		2016	
	Volume (dalam triliun rupiah) Volume (Rp trillions)	Nilai (dalam triliun rupiah) Value (Rp trillions)	Volume (dalam triliun rupiah) Volume (Rp trillions)	Nilai (dalam triliun rupiah) Value (Rp trillions)
Obligasi | Bonds				
• Korporasi | Corporate	187,66	186,05	224,30	225,14
• SUN | SUN	3.399,94	3.401,12	3.653,30	3.749,57
Total	3.587,60	3.587,17	3.877,60	3.974,71
Repo	144,44	133,88	272,18	263,17

Pergerakan positif tersebut disebabkan oleh beberapa fundamental ekonomi global maupun domestik antara lain keputusan The Federal Open Market Committee (FOMC) menaikkan kisaran target suku bunga serta penurunan BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* sebanyak tujuh kali.

Positive bond performance was driven by global and domestic economic fundamentals, including the FOMC decision to raise its policy rate target and the seven reductions to the BI 7-Day (Reverse) Repo Rate.

III.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek (PE)

Sampai akhir 2016, jumlah PE di OJK sebanyak 132 Perusahaan dan selama 2016 OJK mencatat pelaporan pembukaan 75 lokasi kantor dan penutupan 38 lokasi kantor.

III.3.2 Securities Companies Growth

As of yea rend 2016, the number of securities companies registered at OJK totalled 132, with 75 new branches opened and 38 existing securities companies closed.

Jumlah Perusahaan Efek
Number of Securities Companies

No	Jenis Izin Usaha Operating License	Jumlah Total
1	Perantara Pedagang Efek | Broker-Dealer	36
2	Penjamin Emisi Efek | Underwriter	3
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek | Broker-Dealer + Underwriter	88
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi | Broker-Dealer + Investment Manager	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi | Underwriter + Investment Manager	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi | Broker-Dealer + Underwriter + Investment Manager	3
	Jumlah | Total	132

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
Number of Securities Companies' Branches

Periode Period	2015	2016
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat Total (excluding head office)	626	663

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, selama 2016, OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 459 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 42 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 8.965 WPPE dan 2.018 WPEE.

In terms of representative licenses, OJK issued 459 individual broker-dealer representative licenses and 42 underwriter representatives licenses in 2016, bringing the respective totals to 8,965 individual broker-dealer representatives and 2,018 underwriter representatives.

Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Licensing of Individual Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

Jenis Izin Business Type	2015		2016	
	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Ijin Licenses Granted	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Ijin Licenses Granted
WPPE | Individual Broker-Dealer Representatives	1.106	568	793	459
WPEE | Underwriter Representatives	115	53	62	42
Total	1.221	621	855	501

III.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Selama 2016 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana menunjukkan peningkatan sebesar 24,55% menjadi sebesar Rp338,75 triliun. Pada akhir 2016, tiga Reksa Dana mengalami peningkatan NAB terbesar adalah Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp26,94 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp21,05 triliun, dan Reksa Dana Saham sebesar Rp8,64 triliun.

III.3.3 Investment Management

The Net Asset Value (NAV) of the investment funds industry increased 24.55% in 2016 to Rp338.75 trillion. At the end of 2016, three mutual funds dominated the largest increase in NAV, namely protected funds at Rp26.94 trillion, followed by fixed-income funds at Rp21.05 trillion and equity funds at Rp8.64 trillion.

Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
NAV Growth per Mutual Fund

Jenis Produk Investasi (dalam triliun rupiah) NAV per Investment Fund (in trillion rupiah)	2015				2016			
	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV
RD Pasar Uang | Money Market Funds	26,36	29,11	31,11	27,24	33,61	26,96	30,51	28,54
RD Pendapatan Tetap | Fixed Income Funds	37,80	43,41	45,96	48,51	55,18	62,94	68,67	69,56
RD Saham | Equity Funds	107,55	103,87	89,67	104,46	109,31	112,41	101,89	113,10
RD Campuran | Discretionary Funds	19,87	18,44	17,10	18,46	19,87	21,15	22,16	21,05
RD Terproteksi | Protected Funds	46,68	52,72	54,15	57,98	61,35	70,57	75,40	84,92
RD Indeks | Index Funds	0,50	0,55	0,57	0,81	0,89	0,86	0,51	0,60
ETF | Exchange Traded Funds (ETF)	2,72	3,11	3,03	3,48	3,67	4,65	5,49	6,06
RD Syariah | Sharia Funds	11,65	11,39	9,85	11,02	9,43	9,90	12,09	14,92
Total	256,14	262,59	251,45	271,97	293,31	309,44	316,72	338,75

Selama 2016, di tengah fluktuasi pergerakan IHSG dan harga Efek yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana, kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana tetap tinggi, tercermin dari *net subscription* sebesar Rp47,6 triliun. Sementara itu, Reksa Dana yang unit penyertaannya tidak ditawarkan melalui penawaran umum yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas, sampai akhir 2016 terdapat 73 Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dana kelolaan sebesar Rp17,64 triliun. Jumlah tersebut menurun 10,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

Despite a backdrop of JCI and securities price fluctuations throughout 2016, investor confidence in mutual funds remained high, reflecting a net subscription of Rp47.6 trillion for the year. Meanwhile, regarding investment funds offered through public offering securities, namely Private Equity Funds (RDPT), 73 investment funds were available with managed funds totalling Rp17.64 trillion, down 10.77% on the year earlier.

Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya
Mutual Fund Performance and Other Investment Products

Jenis Produk Investasi (dalam triliun rupiah) Investment Product Type (in trillion rupiah)	2015				2016			
	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV
Reksa Dana Mutual Fund	929	986	1.021	1.091	1.150	1.226	1.347	1.425
Jumlah NAB Total NAV	256,14	262,59	251,45	271,97	293,31	309,44	316,72	338,75
RDPT Private Equity Funds	81	71	76	69	67	63	69	73
Jumlah NAB Total NAV	27,36	20,02	17,64	19,77	19,49	20,47	19,19	17,64
EBA Asset-Backed Securities in The Form of Participation Certificates (EBA-SP)	7	7	7	7	7	7	7	7
Jumlah Nilai Sekuritisasi Total Securitisation Value	3,26	3,01	2,80	2,59	2,38	2,13	1,96	1,96
EBA-SP Asset-Backed Securities in The Form of Participation Certificates (EBA-SP)	-	-	-	1	1	1	2	3
Jumlah Nilai Sekuritisasi Total Securitisation Value	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,70	1,70
DIRE Real Estate Investments	1	1	1	1	1	1	2	2
Jumlah Nilai Total Value	0,44	0,44	0,44	0,53	0,53	0,56	0,56	0,56
KPD Fund Management Contracts	277	280	278	281	279	279	317	372
Jumlah Nilai Total Value	145,05	131,08	119,63	130,36	138,36	144,59	165,62	164,01

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Selama 2016, OJK menerbitkan dua izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) dengan nilai Rp 1,5 triliun dan satu izin Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (DIRE). Terkait Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), tidak terdapat penambahan sehingga berjumlah tujuh dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp 1,96 triliun atau menurun sebesar 24,32%.

Pada akhir 2016, nilai dan jumlah kontrak Pengelolaan Dana (KPD) masing-masing mengalami peningkatan 25,81% dan 32,38% menjadi sebesar Rp164,01 triliun dan 372 kontrak. OJK juga menerbitkan 437 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum. Selain itu, OJK juga menerbitkan 103 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 100 Reksa Dana Konvensional dan tiga Reksa Dana Syariah.

In 2016, OJK granted two new licenses for asset-backed securities – participation note, valued at Rp1.5 trillion and one license for real estate investments. Nonetheless, no new licenses were granted for asset-backed securities – collective investment contracts, so that totaled seven and with a securitisation value of Rp1.96 trillion, down 24.32% on the previous year.

At the end of 2016, the value and total of fund management contracts increased respectively by 25.81% and 32.38% to Rp164.01 trillion and 372 contracts. OJK also issued 437 effective statements to register investment funds through public offerings. In addition, OJK also terminated 103 investment funds, consisting of 100 conventional investment funds and three sharia investment funds.

Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif
Mutual Funds with Effective Statements

Jenis Reksa Dana Investment Fund	Jumlah Surat Efektif Total Effective Statements
Reksa Dana Saham | Equity Funds	46
Reksa Dana Campuran | Discretionary Funds	27
Reksa Dana Pendapatan Tetap | Fixed-Income Funds	57
Reksa Dana Pasar Uang | Money Market Funds	27
Reksa Dana Terproteksi | Protected Funds	230
Reksa Dana Indeks | Index Funds	3
Reksa Dana ETF-Saham | Equity Exchange Traded Funds	1
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap | Sharia Fixed-Income Funds	9
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri | Sharia Foreign Security Funds	3
Reksa Dana Syariah Campuran | Sharia Discretionary Funds	2
Reksa Dana Syariah Saham | Sharia Equity Funds	15
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk | Sukuk-Based Funds	5
Reksa Dana Syariah Terproteksi | Sharia Protected Funds	8
Reksa Dana Syariah Pasar Uang | Sharia Money Market	4
Jumlah | Total	**437**

Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
Licensed Investment Managers

Pelaku | Institutional	2015				2016			
INDIVIDU INDIVIDUALS	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV
Wakil Manajer Investasi (WMI) Investment Manager Representatives	2.654	2.742	2.776	2.811	2.864	2.932	2.959	3.043
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) Investment Fund Selling Agent Representatives	22.588	18.399	18.987	19.788	20.094	20.912	21.672	22.271
Penasehat Investasi Investment Advisors	5	5	4	3	4	4	4	4
INSTITUSI INSTITUTIONS								
Manajer Investasi (MI) Investment Managers	80	82	82	83	84	84	84	85
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Investment Fund Selling Agents	23	24	25	27	28	30	30	32
Penasehat Investasi Investment Advisors	2	2	2	2	2	2	2	3

Terkait dengan institusi pelaku Pengelolaan Investasi, selama 2016, OJK memberikan dua izin kepada Manajer Investasi (MI) dan lima Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), sehingga jumlah MI dan APERD masing-masing meningkat sebesar 2,41% dan 18,52%. Selain itu, OJK juga memberikan dua izin dan satu pencabutan izin Penasihat Investasi (PI) Institusi, sehingga jumlah Penasihat Investasi meningkat sebesar 50%.

Terkait dengan pelaku individu industri Pengelolaan Investasi, selama 2016, OJK memberikan 232 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan 2.483 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), sehingga jumlah WMI dan WAPERD masing-masing meningkat sebesar 8,25% dan 12,55%. Selain itu, OJK memberikan satu izin PI Perorangan, sehingga jumlah PI Perorangan meningkat sebesar 33,33%.

The number of institutional investment managers increased in 2016, with OJK licensing two investment managers and approving five Investment Fund Selling Agents, thus raising the respective totals by 2.41% and 18.52%. In addition, OJK also granted two licenses and revoked one of institutional investment advisors, thereby increasing the total by 50%.

Regarding individuals, OJK granted 232 licenses for investment manager representatives and 2,483 licenses for investment fund selling agent representatives, representing growth of 8.25% and 12.55% respectively on the previous year. Furthermore, OJK also licensed one individual investment advisor, raising the total by 33.33%.

III.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, jumlah penawaran umum meningkat 45,2% menjadi 122 penawaran umum yang terdiri dari 14 perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham, 34 perusahaan melakukan penawaran umum terbatas, dan 15 perusahaan yang melakukan penawaran umum efek bersifat hutang serta 59 perusahaan yang melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi/sukuk dengan nilai emisi sebesar Rp195,4triliun atau meningkat 69,64%.

III.3.4 Issuers and Public Companies

During the reporting period, the number of public offerings increased 45.2% to 122, consisting of 14 initial public offerings (IPO), 34 rights issues and 15 public offerings of debt securities and 59 shelf registrations of bonds/sukuk, raising the total 69.64% to Rp195.4 trillion.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)
Public Offerings

Jenis Penawaran Efek Offering Type	2015		2016		Δ (%) Jumlah Emisi Δ (%) Number of Issuances	Δ % Nilai Emisi Δ % Issuance Value
	Jumlah Emisi Number of Issuances	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah) Issuance Value (Rp, billions)	Jumlah Emisi Number of Issuances	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah) Issuance Value (Rp, billions)		
Penawaran Umum Saham (IPO) | Initial Public Offerings (IPO)	16	11.305	14	12.074	-12,5%	6,80%
Penawaran Umum Terbatas | Rights Issues	19	42.093	34	67.121	78,9%	59,46%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang | Public Offerings of Debt Securities	49	61.771	74	116.182	51,0%	88,09%
a. Obligasi/ Sukuk+Subordinasi | Bonds/Sukuk + Subordination	6	3.650	15	14.188,9	150,0%	288,74%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I | Phase I Shelf Registrations of Bonds/Sukuk	17	24.879	28	43.980	64,7%	76,78%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II | Phase II Shelf Registrations of Bonds/ Sukuk	26	33.242	31	58.013,25	19,2%	74,52%
Total Emisi | Total Issuances	**84**	**115.170**	**122**	**195.377**	**45,2%**	**69,64%**

III.3.4.1 Penawaran Umum Perdana Saham

III.3.4.1 Initial Public Offerings

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
List of Companies Registering Initial Public Offerings (IPO)

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Penawaran Umum (Dalam Rupiah) Value (in rupiah)
1	PT Mitra Pemuda Tbk	29-Jan-16	31.450.000.000
2	PT Mahaka Radio Integra Tbk	29-Jan-16	78.789.675.000
3	PT Bank Ganesha Tbk	03-Mei-16	553.348.960.000
4	PT SIllo Maritime Perdana Tbk.	07-Jun-16	70.000.000.000
5	PT Cikarang Listrindo Tbk.	07-Jun-16	2.413.074.000.000
6	PT Duta Intidaya Tbk.	15-Jun-16	86.047.380.000
7	PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.	17-Jun-16	322.000.000.000
8	PT Protech Mitra Perkasa Tbk	28-Jun-16	30.400.000.000
9	PT Capital Financial Indonesia Tbk	28-Jun-16	715.000.000.000
10	PT Waskita Beton Precast Tbk.	08-Sep-16	5.166.786.870.000
11	PT Paramita Bangun Sarana Tbk	16-Sep-16	360.000.000.000
12	PT Aneka Gas Industri Tbk.	16-Sep-16	843.326.000.000
13	PT Prodia Widyahusada Tbk	29-Nov-16	1.218.750.000.000
14	PT Bintang Oto Global Tbk	08-Des-16	185.400.000.000
Jumlah | Total			**12.074.372.885.000**

Selama periode pelaporan, terdapat 14 perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp12,1 triliun.

During the reporting period, 14 companies registered initial public offerings (IPO) valued at Rp12.1 trillion.

III.3.4.2 Penawaran Umum Terbatas

Selama periode pelaporan, terdapat 34 perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dan mendapatkan Pernyataan Efektif untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dengan nilai emisi Rp67 triliun.

III.3.4.2 Rights Issue

During the reporting period, 34 companies registered and received effective statements to initiate rights issues, amounting to Rp67 trillion.

Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Terbatas
List of Companies Registering Rights Issues

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Penawaran Umum (Dalam Rupiah) Right Issues Value (in rupiah)
1	PT Equity Development Investment Tbk	29-Jan-2016	1.200.000.000.000,00
2	PT Bank Sinarmas Tbk	28-Mar-2016	500.000.000.000,00
3	PT Bank Yudha Bakti Tbk	27-Apr-2016	188.637.000.000,00
4	PT XL Axiata Tbk	2-Mei-2016	6.733.415.067.750,00
5	PT Bank Permata Tbk	4-Mei-2016	5.499.906.013.132,00
6	PT Ascet indonusa Tbk	19-Mei-2016	600.000.000.000,00
7	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.	27-Mei-2016	492.156.426.000,00
8	PT Bank Windu Kentjana International Tbk	30-Mei-2016	1.126.053.993.800,00
9	PT Bank Ina Perdana Tbk	1-Jun-2016	150.000.000.000,00
10	PT MNC Investama Tbk	2-Jun-2016	1.439.377.944.385,00
11	PT Graha Layar Prima Tbk.	22-Jun-2016	650.487.305.450,00
12	PT Bank Pundi Indonesia Tbk	24-Jun-2016	649.894.624.404,75
13	PT Pool Advista Indonesia Tbk	24-Jun-2016	393.739.507.000,00
14	PT Bank MNC Internasional Tbk	29-Jun-2016	523.956.372.900,00
15	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	29-Jul-2016	201.436.922.920,00
16	PT Pacific Strategic Financial Tbk	5-Agt-2016	926.257.106.250,00
17	PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.	1-Sep-2016	1.499.023.604.120,00
18	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14-Sep-2016	6.149.183.490.960,00
19	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	23-Sep-2016	1.002.314.656.210,00
20	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	30-Sep-2016	1.785.697.680.000,00
21	PT Siloam International Hospitals Tbk	30-Sep-2016	1.300.612.500.000,00
22	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	26-Okt-2016	300.578.987.688,00
23	PT BPD Banten Tbk	31-Okt-2016	329.157.022.888,65
24	PT PP (Persero) Tbk.	4-Nov-2016	4.411.747.775.500,00
25	PT BRI Agroniaga Tbk	8-Nov-2016	449.979.495.860,00
26	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.	10-Nov-2016	2.078.897.660.000,00
27	PT Sierad Produce Tbk	18-Nov-2016	400.000.000.000,00
28	PT Bentoel Internasional Investama	22-Nov-2016	13.997.343.000.000,00
29	PT Astra Agro Lestari Tbk.	23-Nov-2016	3.998.102.579.525,00
30	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	24-Nov-2016	4.853.101.000.000,00
31	PT Berlina Tbk	24-Nov-2016	220.110.000.000,00
32	PT Alam Karya Unggul Tbk	25-Nov-2016	626.048.500.000,00
33	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	20-Des-2016	1.874.983.372.500,00
34	PT Sekar Bumi Tbk.	28-Des-2016	568.420.072.560,00
JUMLAH | TOTAL			**67.120.619.681.803,40**

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.3.4.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama periode pelaporan, terdapat 15 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi dan 59 perusahaan yang melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi (PUB) obligasi/sukuk.

III.3.4.3 Public Offerings of Bonds

In the reporting period, 15 companies undertook public offerings of bonds and 59 companies that implemented shelf registrations of bonds/sukuk.

Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
List of Companies Registering Public Offerings of Bonds

No.	Nama Emiten Issuer	Jenis Bond Type	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Emisi (Dalam Rupiah) Value (in rupiah)
1.	PT Pelindo I (Persero)	Obilgasi	10-Jun-2016	1.000.000.000.000
2.	PT Intiland Development Tbk	Obligasi	23-Jun-2016	590.000.000.000
3.	PT Angkasa Pura II	Obligasi	23-Jun-2016	2.000.000.000.000
4.	PT PP Properti Tbk	Obligasi	23-Jun-2016	600.000.000.000
5.	PT Indonesia Infrastructure Finance	Obligasi	29-Jun-2016	1.500.000.000.000
6.	PT BPD Sulsel dan Sulbar	Obligasi dan Sukuk	29-Jun-2016	550.000.000.000
7.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Sukuk	30-Jun-2016	1.200.000.000.000
8.	PT Fast Food Indonesia Tbk.	Obligasi	24-Okt-2016	200.000.000.000
9.	PT Bank BRI Syariah	Sukuk	8-Nov-2016	1.000.000.000.000
10.	PT Angkasa Pura I	Obligasi dan Sukuk	10-Nov-2016	3.000.000.000.000
11.	PT Impack Pratama Industri Tbk.	Obligasi	24-Nov-2016	500.000.000.000
12.	PT Sinar Mas Multifinance	Obligasi	1-Des-2016	500.000.000.000
13.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Obligasi	15-Des-2016	500.000.000.000
14.	PT Bank KEB Hana Indonesia	Obligasi dan Obligasi USD	15-Des-2016	878.932.500.000
15.	PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	Obligasi	16-Des-2016	170.000.000.000
Subtotal				**14.188.932.500.000**

Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahap I
List of Companies Registering Phase I Shelf Registrations of Bonds or Sukuk

NO	Nama Emiten Issuer	Penawaran Umum Public Offering	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Emisi (Dalam Rupiah) Value (in rupiah)
1.	PT Bank OCBC NISP Tbk	PUB Tahap I	29-Apr-2016	2.000.000.000.000
2.	PT Astra Sedaya Finance	PUB Tahap I	3-Mei-2016	2.000.000.000.000
3.	PT Toyota Astra Financial Services	PUB Tahap I	20-Mei-2016	1.500.000.000.000
4.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PUB Tahap I	30-Mei-2016	4.000.000.000.000
5.	PT Surya Artha Nusantara Finance	PUB Tahap I	1-Jun-2016	2.000.000.000.000
6.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	PUB Tahap I	6-Jun-2016	2.000.000.000.000
7.	PT Bumi Serpong Damai Tbk	PUB Tahap I	9-Jun-2016	650.000.000.000
8.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	PUB Tahap I	16-Jun-2016	800.000.000.000
9.	PT Bank Panin Tbk	PUB Tahap I	17-Jun-2016	2.100.000.000.000
10.	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	PUB Tahap I	20-Jun-2016	200.000.000.000
11.	PT Bank DKI	PUB Tahap I	23-Jun-2016	1.000.000.000.000
12.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	PUB Tahap I	24-Jun-2016	230.000.000.000
13.	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	PUB Tahap I	27-Jun-2016	1.000.000.000.000
14.	PT Medco Energi Internasional Tbk.	PUB Tahap I	28-Jun-2016	1.500.000.000.000
15.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	PUB Tahap I	29-Jun-2016	500.000.000.000
16.	PT Hutama Karya (Persero)	PUB Tahap I	12-Sep-2016	1.000.000.000.000
17.	PT Surya Semesta Internusa Tbk.	PUB Tahap I	13-Sep-2016	900.000.000.000
18.	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	PUB Tahap I	20-Sep-2016	300.000.000.000
19.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PUB Tahap I	22-Sep-2016	5.000.000.000.000
20.	PT Mandiri Tunas Finance	PUB Tahap I	29-Sep-2016	500.000.000.000
21.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	PUB Tahap I	20-Okt-2016	1.000.000.000.000
22.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	PUB Tahap I	26-Okt-2016	1.000.000.000.000
23.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PUB Tahap I	9-Nov-2016	5.000.000.000.000
24.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk	PUB Tahap I	17-Nov-2016	800.000.000.000
25.	PT Bank UOB Indonesia	PUB Tahap I	17-Nov-2016	1.100.000.000.000
26.	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	PUB Tahap I	22-Nov-2016	1.000.000.000.000
27.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PUB Tahap I	22-Nov-2016	4.600.000.000.000
28.	PT Bima Multi Finance	PUB Tahap I	15-Des-2016	300.000.000.000
Subtotal				**43.980.000.000.000**

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahap II dst
List of Companies Registering Phase II Shelf Registrations of Bonds/Sukuk

No	Nama Emiten Issuer	Penawaran Umum Public Offering	Masa Penawaran Offering Period	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Emisi (Dalam Rupiah) Value (in rupiah)
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PUB Tahap II dst	29 Januari dan 1 Februari 2016	29-Jan-2016	4.650.000.000.000
2.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PUB Tahap II dst	15-16 Februari 2016	15-Feb-2016	4.036.250.000.000
3.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	PUB Tahap II dst	22-Feb-2016	22-Feb-2016	1.000.000.000.000
4.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	PUB Tahap II dst	24-26 Feb 16	24-Feb-2016	1.200.000.000.000
5.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB Tahap II dst	4-7 Maret 2016	4-Mar-2016	630.000.000.000
6.	PT Indomobil Finance Indonesia	PUB Tahap II dst	10-11 Maret 2016	10-Mar-2016	1.500.000.000.000
7.	PT Federal International Finance	PUB Tahap II dst	29-31 Maret 2016	29-Mar-2016	3.375.000.000.000
8.	PT Siantar Top Tbk.	PUB Tahap II dst	6-7 April 2016	6-Apr-2016	500.000.000.000
9.	PT Maybank Indonesia Finance	PUB Tahap II dst	7-8 April 2016	7-Apr-2016	1.100.000.000.000
10.	PT Bima Multi Finance	PUB Tahap II dst	3-4 Mei 2016	3-Mei-2016	150.000.000.000
11.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PUB Tahap II dst	19-20 Mei 2016	19-Mei-2016	4.350.000.000.000
12.	PT Mandiri Tunas Finance	PUB Tahap II dst	25-27 Mei 2016	25-Mei-2016	1.400.000.000.000
13.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	PUB Tahap II dst	6-7 Juni 2016	6-Jun-2016	1.500.000.000.000
14.	PT Sarana Multigriya Financial (Persero)	PUB Tahap II dst	13-14 Juni 2016	13-Jun-2016	945.000.000.000
15.	PT BCA Finance	PUB Tahap II dst	16 Juni 2016	16-Jun-2016	1.250.000.000.000
16.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	PUB Tahap II dst	20-21 Juli 2016	20-Jul-16	1.786.000.000.000
17.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PUB Tahap II dst	19-22 Agustus 2016	19-Agust-16	4.331.000.000.000
18.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PUB Tahap II dst	23 – 25 Agustus 2016	23-Agust-16	3.000.000.000.000
19.	PT Indosat Tbk.	PUB Tahap II dst	29 & 30 Agustus 2016	29-Agust-16	3.460.000.000.000
20.	PT Federal International Finance	PUB Tahap II dst	20 – 22 September 2016	20-Sep-16	2.125.000.000.000
21.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB Tahap II dst	21 – 22 September 2016	21-Sep-16	1.500.000.000.000
22.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	PUB Tahap II dst	22-23 September 2016	22-Sep-16	900.000.000.000
23.	PT Medco Energi Internasional Tbk	PUB Tahap II dst	26-27 September 2016	26-Sep-2016	1.250.000.000.000
24.	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	PUB Tahap II dst	11-Okt-2016	11-Okt-16	700.000.000.000
25.	PT Astra Sedaya Finance	PUB Tahap II dst	12-13 Oktober 2016	12-Okt-16	1.700.000.000.000
26.	PT Bank Pan Indonesia Tb	PUB Tahap II dst	21-24 Oktober 2016	21-Okt-1	2.125.000.000.000
27.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	PUB Tahap II dst	27,28 dan 31 Oktober 2016	27-Okt-16	1.500.000.000.000
28.	PT Maybank Indonesia Finance	PUB Tahap II dst	28-31 Oktober 2016	28-Okt-16	1.100.000.000.000
29.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	PUB Tahap II dst	28-31 Oktober 2016	28-Okt-16	450.000.000.000
30.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PUB Tahap II dst	15-17 Nov 2016	15-Nop-16	3.500.000.000.000
31.	PT Medco Energi Internasional Tbk	PUB Tahap II dst	15-16 Desember 2016	15-Des-2016	1.000.000.000.000
Subtotal					**58.013.250.000.000**

III.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

III.3.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro A dministrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Selama periode laporan terdapat satu penerbitan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat dan terdapat satu pencabutan Surat Persetujuan sebagai Bank Kustodian serta satu pencabutan Surat Perizinan Biro Administrasi Efek, dengan detail sebagai berikut:

III.3.5 Capital Market Supporting Institutions and Professions

III.3.5.1 Capital Market Supporting Institutions

Capital market supporting institutions provide supporting services in accordance with the operating license held, including Securities Administration Agencies (SAA), Custodian Banks, Trust Agents and Securities Ratings Agencies. During the reporting period, OJK registered one trust agent, revoked the approval of one custodian bank and terminated the license of one securities administration agency as follows:

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
Number of Capital Market Supporting Institutions

Lembaga Penunjang Supporting Institution	Tahun Year		Jenis Type
	2015	2016	
Biro Administrasi Efek | Securities Administration Agencies	11	10	Surat Perizinan | Licensed
Bank Kustodian | Custodian Banks	22	21	Surat Persetujuan | Approved
Wali Amanat | Trust Agents	11	12	Surat Tanda Terdaftar | Registered
Pemeringkat Efek | Securities Ratings Agencies	2	2	Surat Perizinan | Licensed

III.3.5.1.1 Biro Administrasi Efek (BAE)

III.3.5.1.1 Securities Administration Agencies (SAA)

BAE Berdasarkan Jumlah Klien
Securities Administration Agencies by Number of Clients

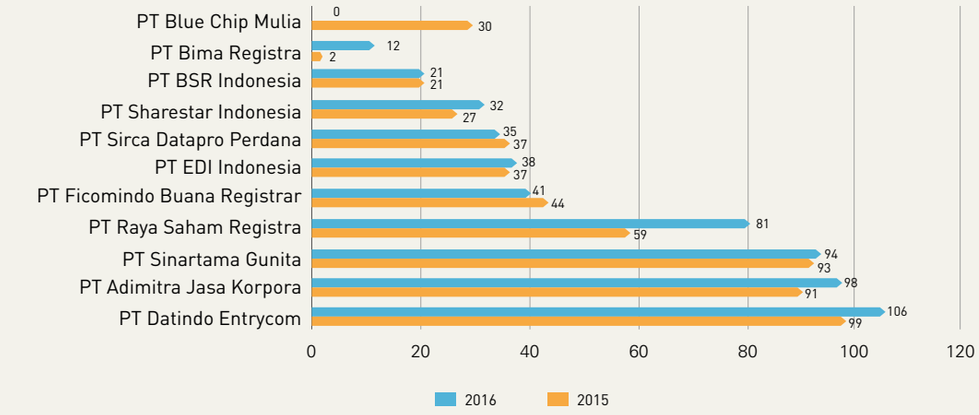

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. Selama 2016, OJK menerbitkan satu SK pencabutan izin usaha sebagai BAE yaitu PT Blue Chip Mulia. Permohonan pencabutan izin ini dilakukan secara sukarela dari Perusahaan kepada OJK.

Securities Administration Agencies (SAA) are contracted by issuers to record holdings of securities and distribute rights in relation to the securities. In 2016, OJK terminated one SAA operating license, namely PT Blue Chip Mulia. The operating license was voluntarily returned to the OJK.

III.3.5.1.2 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Sepanjang 2016, OJK menerbitkan satu SK pembatalan persetujuan sebagai Bank Kustodian, sehingga terdapat 21 Bank Kustodian yang memiliki izin OJK dengan detail sebagai berikut:

III.3.5.1.2 Custodian Banks

Custodian banks are entrusted to hold securities and other assets linked to securities as well as provide other services, including receiving dividend, interest payments and other claims, settling securities transactions and representing client account holders. In 2016, OJK revoked one custodian bank approval. Therefore, OJK had 21 licensed custodian banks by the end of 2016 as follows:

Daftar Bank Kustodian
List of Licensed Custodian Banks

No	Nama Bank Kustodian | Custodian Bank	No	Nama Bank Kustodian | Custodian Bank
1	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk	13	PT Bank Panin Tbk
3	PT Bank Bukopin Tbk	14	PT Bank Permata Tbk
4	PT Bank Central Asia Tbk	15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5	PT Bank CIMB Niaga Tbk	16	PT Bank Sinarmas Tbk
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	17	PT Bank UOB Indonesia
7	PT Bank DBS Indonesia	18	Citibank
8	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	19	Deutsche Bank AG Jakarta
9	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	20	HSBC
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21	Standard Chartered Bank
11	PT Bank Mega Tbk		

III.3.5.1.3 Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau Sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Sepanjang 2016, OJK menerbitkan satu Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai Wali Amanat. Berikut pangsa pasar industri wali amanat di Indonesia:

III.3.5.1.3 Trust Agents

Trust agents represent the interests of bond/sukuk holders when prosecuting in or outside the court system without special dispensation. In 2016, OJK issued registered one trust agent. The market share of the trust agent industry in Indonesia is as follows:

Pangsa Pasar Wali Amanat
Market Share of Trust Agents

No	Nama Wali Amanat Trust Agent	Efek yang Diwaliamanati (2015) Number of Securities Represented (2015)	%	Efek yang Diwaliamanati (2016) Number of Securities Represented (2016)	%
1	PT Bank BRI Syariah	0	0,00%	0	0,00%
2	PT Bank Bukopin Tbk	0	0,00%	18	2,80%
3	PT Bank CIMB Niaga Tbk	69	18,65%	52	8,10%
4	PT Bank DKI	0	0,00%	0	0,00%
5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	39	10,54%	196	30,53%
6	PT Bank Mega Tbk	129	34,86%	161	25,08%
7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17	4,59%	25	3,89%
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	0	0,00%	9	1,40%
9	PT Bank Permata Tbk	33	8,92%	73	11,37%
10	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	77	20,81%	99	15,42%
11	PT Bank Sinarmas Tbk	3	0,81%	1	0,16%
12	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3	0,81%	8	1,25%
Total		**370**	**100,00%**	**642**	**100,00%**

III.3.5.1.4 Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat baik untuk Efek yaitu Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat maupun Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sampai akhir 2016, terdapat dua perusahaan pemeringkat efek terdaftar di OJK yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia.

III.3.5.1.4 Securities Rating Agencies

Securities Rating Agencies are investment advisors in the form of a limited liability company that affirm ratings for various securities, including debt securities, sukuk, asset-backed securities and other rateable securities as well as company ratings, including investment funds and real estate investments. At yearend 2016, two securities ratings agencies were registered at OJK, namely PT Pemeringkat Efek Indonesia and PT Fitch Ratings Indonesia.

Pangsa Pasar Pemeringkat Efek di Indonesia
Market Share of Securities Rating Agencies in Indonesia

Nama Perusahaan Pemeringkat Efek Name	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (2015) Number of Companies Rated (2015)	%	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (2016) Number of Companies Rated (2016)	%
PT Pemeringkat Efek Indonesia | PT Pemeringkat Efek Indonesia	46	36,5%	84	49,7%
PT Fitch Ratings Indonesia | PT Fitch Ratings Indonesia	80	63,5%	85	50,3%
Total	**126**		**169**	

III.3.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Sepanjang 2016, OJK menerbitkan STTD kepada 385 Profesi Penunjang Pasar Modal dan 32 Surat Keputusan pemberian izin sebagai ASPM. Selain itu, telah diterbitkan 179 Surat Keputusan pembatalan STTD berdasarkan permohonan yang bersangkutan karena selama ini tidak aktif berkegiatan di Pasar Modal atau alasan lainnya

III.3.5.2 Capital Market Supporting Professions

In 2016, OJK registered 385 capital market supporting professionals and licensed 32 sharia capital market experts. In addition, OJK cancelled 179 registrations upon request due to inactivity or other reasons.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Permohonan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Professions

Profesi Profession	Periode Desember 2016 As of December 2016		Jumlah STTD yang Aktif s.d. 30 Desember 2015 Number of Active Registrations as of December 2015	Jumlah STTD yang Aktif s.d. 31 Desember 2016* Number of Active Registrations as of December 2016*
	Penerbitan STTD Baru New Registrations	Pencabutan/Pembatalan STTD Revoked/Cancelled Registrations		
Akuntan | Accountant	74	6	546	604
Konsultan Hukum | Legal Consultant	30	26	721	721
Penilai | Appraiser	23	-	176	199
Notaris | Notary	7	147	1.543	1.378
Penilai Pemerintah | Government Appraiser	251	-	-	251
Ahli Syariah Pasar Modal Sharia Capital Market Expert	32	-	-	32

* Jumlah STTD Profesi yang aktif di tahun 2015 merupakan total STTD yang telah diterbitkan dikurangi dengan jumlah STTD Profesi yang telah mengundurkan diri, pensiun dan meninggal dunia.

* The number of registered professionals in 2015 is the total minus those who resigned, retired or deceased.

III.3.5.2.1 Akuntan

Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) telah menyelenggarakan dua kali Pendidikan Profesi dan delapan kali PPL Akuntan Pasar Modal di 2016 dengan detail sebagai berikut:

III.3.5.2.1 Accountants

The Capital Market Accountant Forum (FAPM) organised two Professional Training courses, and eight Continuing Professional Education (CPE) programs in 2016 follows:

Daftar Kegiatan FAPM di tahun 2016
Capital Market Accountant Forum (FAPM) Activities in 2016

Judul Kegiatan | Activity	Jumlah | Credits
Lokakarya Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) Isu Kritis Akuntansi dan Audit terkait Penerapan Retrospektif PSAK Terkini terhadap Pelaporan Keuangan Emiten Capital Market Accountant Forum (FAPM) workshop on Critical Issues for Accounting and Auditing in relation to The Retrospective Application of the Latest PSAK for Issuer Financial Reporting.	5
Workshop Forum Akuntan Pasar Modal | Capital Market Accounting Forum Workshop.	30
Dampak Perubahan Kurs Valuta Asing Pada Aset Keuangan dan Non-Keuangan serta Evaluasi Isu Pelaporan Valas Terkait KPPK Sesuai Peraturan Bank Indonesia Terkini The Impact of Exchange Rate Fluctuations on Financial and Non-Financial Assets as well as Evaluating the Issues of Foreign Exchange Reporting in relation to the Application of Prudential Principles pursuant to the latest Bank Indonesia regulations.	5
Critical Overview Perkembangan SPAP Terbaru Critical Overview of the Latest Professional Standards for Public Accountants (SPAP).	5
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan *Holding Company* Holding Company Financial Reporting and Management.	5
Peran Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal The Role of Public Accountants as Capital Market Supporting Professionals.	5
Critical Overview Perkembangan SPAP Terbaru Terkait ED Standar Perikatan Asuransi dan Standar Jasa Terkait Critical Overview of the Latest Professional Standards for Public Accountants (SPAP) in relation to ED Standards for the Insurance Industry and Standards for Related Services.	5
Workshop Forum Akuntan Pasar Modal Capital Market Accountants Forum Workshop.	30
Overview Penerapan Peraturan No. VIII.G.17 Dan Pemeriksaan MKBD Tentang Modal Kerja Bersih Disesuaikan Pada Perusahaan Efek Overview of Regulation No. VIII.G.17 and MKBD Inspections concerning Net Working Capital adjusted for Securities Companies.	5
Sharing Professions: Penerapan Tingkat Diskonto Pada Penilaian Aset Dan Penilaian Bisnis oleh Penilai Sharing Professions: Application of Discount Rate for Asset Valuations and Business Appraisals by Appraisers.	5

III.3.5.2.2 Konsultan Hukum

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan PPL sebanyak 11 kali selama 2016 dengan detail sebagai berikut:

III.3.5.2.2 Legal Consultants

The Association of Capital Market Legal Consultants (HKHPM) organized 11 Continuing Professional Education (CPE) programs in 2016 as follows:

Kegiatan FPPM
Legal Consultant Activities

Judul Kegiatan | Activity	Jumlah | Credits
Seminar HKHPM & AKHI tentang Peran Konsultan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyumpahan | HKHPM and AKHI Seminar on the Role of Legal Consultants After the Circular Letter from the Supreme Court concerning Swearing-In Ceremonies.	2,5
Diklat Transaksi Berbasis Syariah Untuk Konsultan Hukum Pasar Modal Training on Sharia-based Transactions for Capital Market Legal Consultants.	3,5
Workshop Arbiter Tingkat I | Level I Arbiter Workshop.	5
Role of Indonesian Lawyer in Cross-Border Transactions in The ASEAN Region dan Kunjungan ke Bursa dan Securities Commission Malaysia Role of Indonesian Lawyers in Cross-Border Transactions in the ASEAN Region and Visit to the Stock Exchange and Securities Commission in Malaysia.	5
Kesiapan OJK dalam Menerapkan Konsep Pengelola Statuter Dalam Rangka *Asset Recovery* Bagi Investor OJK Preparations to apply the Concept of Statutory Managers in terms of Asset Recovery for Investors.	2,5
Konsep Whistle Blower dalam Penegakan Kode Etik Mungkinkah? Is it Possible to establish the Whistleblower Concept in the Code of Ethics?	2,5
Manajemen Risiko dan Analisis Risiko dalam Prospektus | Risk Management and Risk Analysis in the Prospectus.	1,5
Perkembangan Teknologi IT dan Aspek Hukum di Pasar Modal | IT Development and Legal Aspects on the Capital Market.	2,5
Praktek Pelatihan dan Penyusunan Prospektus | Practical Training and Compiling a Prospectus.	6
Peran Konsultan Hukum dalam Industri Perbankan | Role of Legal Consultants in the Banking Industry.	1,5
Kedudukan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Peran Konsultan Hukum Act No. 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) and the Role of Legal Consultants.	5

III.3.5.2.3 Penilai

Forum Penilai Pasar Modal (FPPM) telah menyelenggarakan sebanyak satu kali Pendidikan Profesi, dua kali PPL dan tiga kali *workshop* selama 2016 dengan detail sebagai berikut:

III.3.5.2.3 Appraisers

The Capital Market Appraiser Forum (FPPM) organised one Professional Education course, two Continuing Professional Education (CPE) programs and three workshops in 2016 as follows:

Daftar Kegiatan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Appraiser Activities

Judul Kegiatan | Activity	Jumlah | Credits
Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 dan No. 38/POJK.05/2015. OJK Regulation (POJK) No. 32/POJK.04/2015 and No. 38/POJK.05/2015.	8
Workshop Penilaian Properti dan Bisnis Berbasis Kontrak Workshop on Appraising Property and Contract-based Business.	20
Update temuan-temuan pada laporan penilaian properti dan bisnis serta perkenalan DIRE pada Penilai properti" Update the findings on the property and business appraisal as well as introducing real estate investments to Property Appraisers.	5
Analisis dan Implementasi Perhitungan Teknis Tingkat Diskonto pada Penilaian Bisnis dan Properti Dalam Penggunaan Metode DCF Technical Analysis and Implementation of Calculating the Discount Rate using DCF for Business and Property Appraisals.	20
Pendidikan Profesi 30 SKP | Professional Education.	30
Workshop Review Proyeksi dalam Penilaian Properti dan Penilaian Bisnis Workshop Review of Projections in the Property and Business Appraisals.	20

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB)

Kinerja IKNB selama 2016 bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset sebesar 15,29% menjadi Rp1.919,51 triliun. Sektor yang mengalami peningkatan terbesar yaitu perasuransian, diikuti lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga pembiayaan. Proporsi aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian, diikuti oleh lembaga pembiayaan dan dana pensiun. Total jumlah pelaku sebanyak 1.063 entitas di mana terdapat 113 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 20 perusahaan dalam bentuk *full fledge* dan 93 dalam bentuk unit syariah.

III.4 NONBANK FINANCIAL INDUSTRY

The nonbank financial industry performed well in 2016, achieving a 15.29% increase in total assets to Rp1,919.51 trillion, with the insurance industry enjoying the largest gains, followed by special financial services institutions and finance companies. Furthermore, the insurance industry also accounted for the largest share of assets, followed by finance companies and pension funds. A total of 1,063 business entities were operating in the nonbank financial industry in 2016, of which 113 were operating according to sharia principles, including of 20 full fledge and 93 sharia business units.

Perkembangan Aset IKNB tahun 2012-2016
NBFI Assets from 2012-2016

No	Jenis Industri | Industry	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perasuransian | Insurance	584,02	659,73	807,68	853,42	977,82
2	Dana Pensiun | Pension Funds	158,37	162,44	187,52	206,59	238,30
3	Lembaga Pembiayaan | Finance Companies	356,30	420,17	443,74	473,42	510,31
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus | Special Financial Services Institutions	75,79	96,37	116,70	147,83	185,55
5	Industri Jasa Penunjang IKNB | Supporting Services	3,49	4,29	5,42	6,04	7,25
6	Lembaga Keuangan Mikro | Microfinance Institutions	-	-	-	0,05	0,28
	Total Aset | Total Aset	**1.177,97**	**1.343,00**	**1.561,06**	**1.687,35**	**1.919,51**

*) Berdasarkan data keuangan unaudited per 31 Desember 2016
- Aset Perasuransian per 31 Desember 2016;
- Aset Dana Pensiun per 31 Desember 2016;
- Aset Lembaga Pembiayaan per 31 Desember 2016;
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus per 31 Desember 2016;
- Aset Lembaga Keuangan Mikro per 31 Desember 2016;
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2016.

•) Based on unaudited financial data as of 31st December 2016
- Insurance Assets as of 31st December 2016;
- Pension Fund Assets as of 31st December 2016;
- Finance Company Assets as of 31st December 2016;
- Special Financial Services Institution Assets as of 31st December 2016;
- Microfinance Institution Assets as of 31st December 2016;
- Other Supporting Services Assets as of 31st December 2016;

Jumlah Pelaku IKNB per 31 Desember 2016
Number of NBFI Players as of 31st December 2016

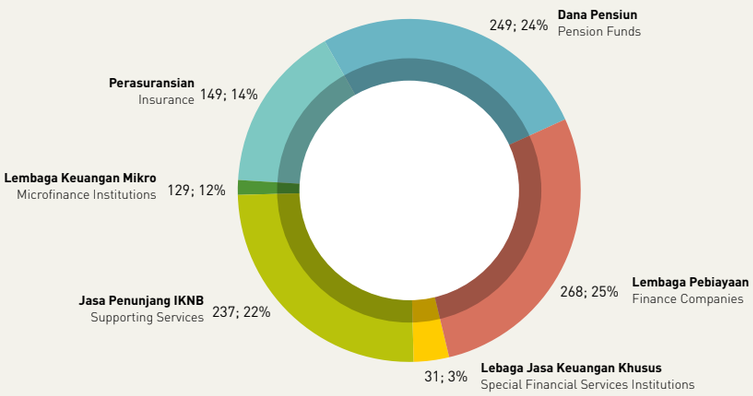

III.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian

III.4.1 Insurance Industry

Premi Bruto, Aset, Investasi dan Klaim Industri Asuransi
Gross Premiums, Assets, Investments and Claims of the Insurance Industry

Produk Asuransi Insurance Product	Premi bruto Gross Claims			Aset Assets			Investasi Investments			Klaim Claims		
	2014	2015*	2016**	2014	2015*	2016**	2014	2015*	2016**	2014	2015*	2016**
Asuransi Jiwa Life Insurance	112,88	135,13	147,24	368,06	378,03	422,19	318,49	327,68	367,83	71,82	82,83	82,37
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reinsurance	54,67	60,25	65,94	126,75	138,82	145,64	63,61	70,40	73,95	27,93	33,22	33,62
Asuransi Wajib (JR, TASPEN, dan ASABRI) Compulsory Insurance	10,29	11,21	11,73	103,46	109,65	120,01	72,77	77,04	94,28	7,01	6,70	9,91
Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) Social Insurance (BPJS Health and Employment Insurance)	69,44	88,97	116,28	209,41	226,92	289,98	193,49	211,00	273,15	56,66	75,00	86,83
Total | Total	247,28	295,56	341,19	807,68	853,42	977,82	648,36	686,12	809,23	163,42	197,75	212,73

*) Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2015 ;
**) Berdasarkan laporan keuangan bulanan (*unaudited*) per 31 Desember 2016

*) Based on audited financial reports as of 31st December 2015;
**) Based on unaudited monthly financial reports as of 31st December 2016.

Selama 2016, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi per tahun naik sebesar 19,6% menjadi Rp1.274.261,-. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,84% atau naik 0,46% Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan premi asuransi dibanding tahun lalu. Pada 2016, industri asuransi memiliki saldo investasi sebesar Rp809,23 triliun dengan sebagian besar investasinya pada SBN.

Insurance density in 2016, which indicates average annual per capita spending on insurance premiums increased 19.6% to Rp1,274,261. Meanwhile, insurance penetration, which indicates the ratio of premiums underwritten in a given year to GDP, increased 0.46% to 2.84%, representing an increase in insurance premiums income on the previous year. In 2016, the insurance industry maintained an insurance balance totalling Rp809.23 trillion, most of which was placed in tradeable government securities (SBN).

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Distribusi Investasi Industri Asuransi per 31 Desember 2016 (dalam triliun Rupiah)
Investment Distribution of the Insurance Industry as of 31st December 2016 (Rp, trillions)

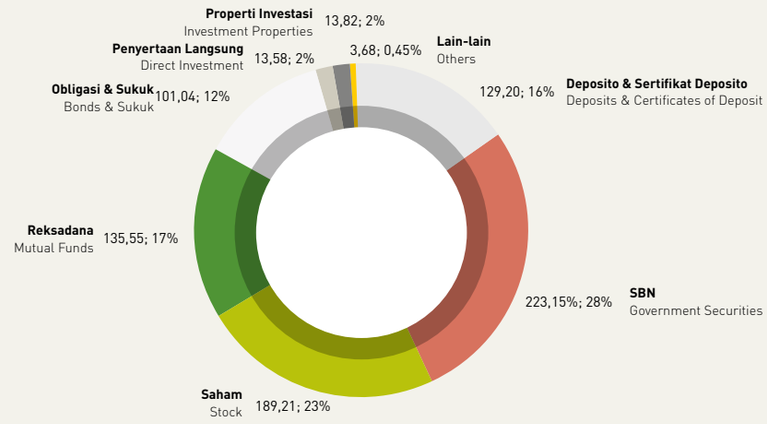

III.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Industri Dana Pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sampai akhir 2016, aset industri Dana Pensiun meningkat 15,35% menjadi Rp238,3 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan sebesar 14,92% (yoy) menjadi Rp228,8 triliun. Peningkatan nilai investasi terjadi pada semua program Dana Pensiun, yaitu DPPK PPMP meningkat sebesar 7,58% (yoy), DPPK PPIP sebesar 20,19% (yoy), dan DPLK sebesar 32,66% (yoy).

III.4.2 Pension Funds Industry

The pension funds industry consists of employer pension funds – defined benefit plans (DPPK PPMP), employer pension funds – defined contribution plans (DPPK PPIP) and financial institution pension funds (DPLK). At the end of 2016, the assets of the pension funds industry had increased 15.35% to Rp238.3 trillion, consistent with the 14.92% (yoy) growth of investment value to Rp228.8 trillion. The increase of investment value affected all pension fund programs, with employer pension funds – defined benefit plans (DPPK PPMP) increasing 7.58% (yoy), employer pension funds – defined contribution plans (DPPK PPIP) by 20.19% (yoy) and financial institution pension funds (DPLK) by 32.66% (yoy).

Investasi Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun Periode 2012 s.d. 2016 (dalam triliun Rupiah)
Investment Distribution in the Pension Funds Industry from 2012-2016 (Rp trillions)

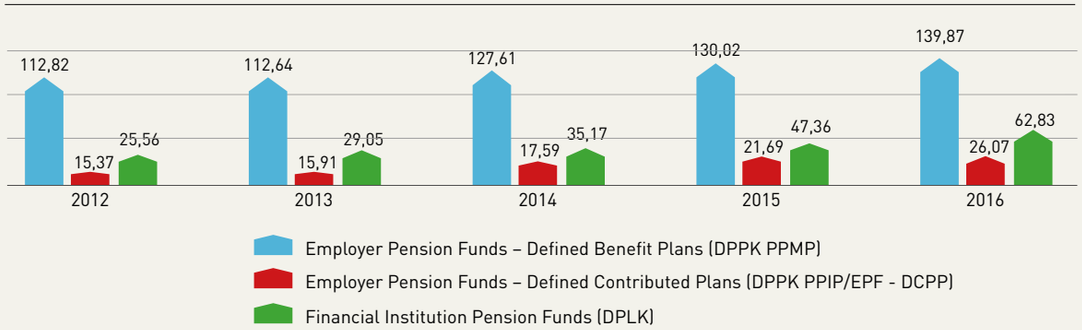

Berdasarkan portofolio investasi, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri Dana Pensiun yaitu Deposito, SBN, obligasi dan sukuk, dan saham dengan proporsi masing-masing sebesar 26,9%, 23,7%, 21,2% dan 12,6%. Sepanjang 2016, investasi SBN tumbuh rata-rata sebesar 3,6%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pemenuhan kepemilikan SBN oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja berdasarkan peraturan OJK terkait Investasi SBN Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Four investments dominated the investment portfolio of the pension funds industry in 2016, namely term deposits, tradeable government securities (SBN), bonds & sukuk, as well as stocks, accounting for 26.9%, 23.7%, 21.2% and 12.6%. SBN investments grew by an average of 3.6% to meet the SBN holdings provisions of the OJK regulation on SBN Investments by Nonbank Financial Services Institutions.

Perbandingan Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun tahun 2015 dan 2016
Comparison between the Investment Portfolio Composition of the Pension Funds Industry in 2015 and 2016

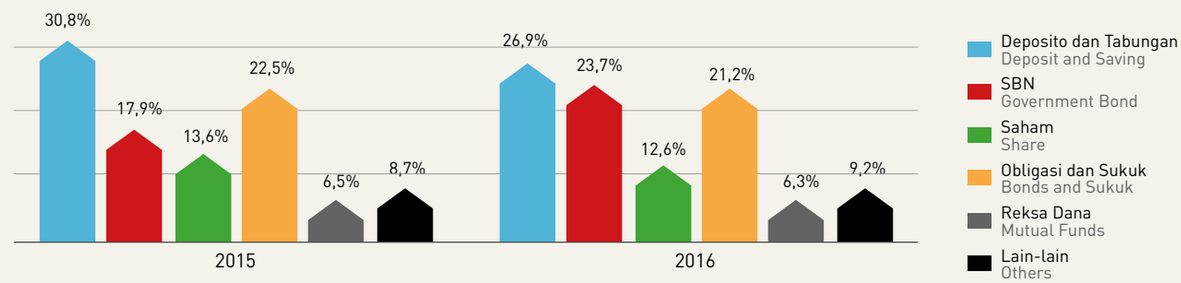

III.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Selama 2016, aset, ekuitas dan laba bersih perusahaan pembiayaan masing-masing tumbuh sebesar 4,01%, 7,48% dan 12,27% dibandingkan tahun sebelumnya.

III.4.3 Finance Companies

In 2016, the assets, equity and net profit of finance companies grew respectively by 4.01%, 7.48% and 12.27% on the previous year.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Lembaga Pembiayaan 2016 (dalam triliun Rupiah)
Assets, Liabilities and Equity Growth of Finance Companies (Rp trillions)

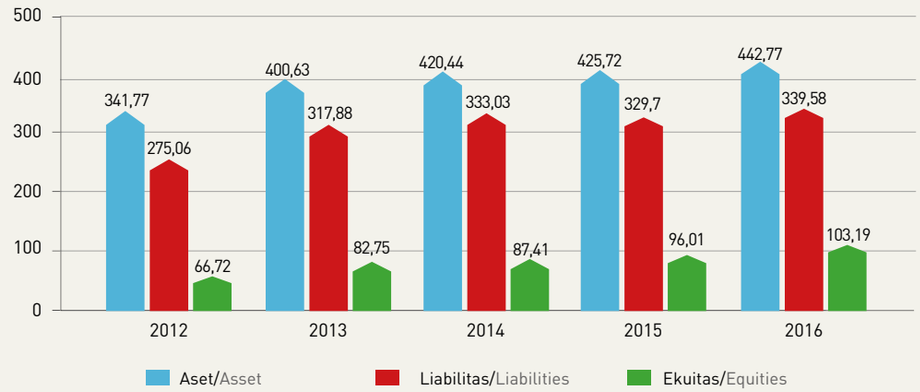

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan
Profit/Loss of Finance Companies

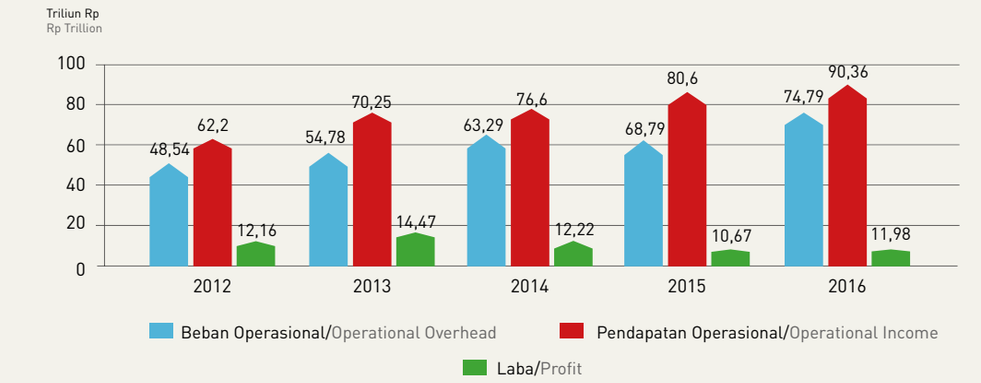

Kegiatan usaha industri perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh pembiayaan multiguna dan investasi masing-masing sebesar 59% dan 27%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan tercermin dari naiknya piutang pembiayaan sebesar 6,67% menjadi Rp387,50 triliun.

Finance companies are engaged in investment financing, working capital financing, multipurpose financing and other OJK-approved financing as well as sharia-compliant financing, with multipurpose financing and investment financing dominating financing receivables in 2016, accounting for 59% and 27% respectively. Furthermore, financing receivables increased 6.67% in the reporting period to Rp387.50 trillion.

Piutang Perusahaan Pembiayaan
Finance Company Receivables

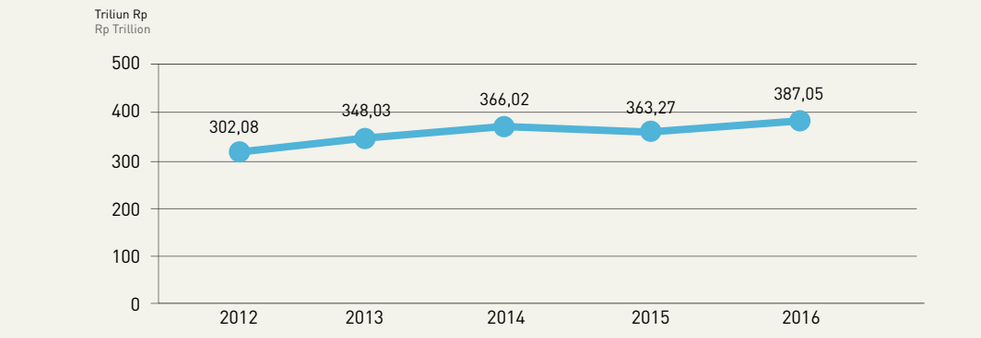

Jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan sebesar Rp242,95 triliun dengan komposisi 53,90% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 33,27% dan Yen Jepang 12,83%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan melakukan *natural hedging* melalui pendekatan *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *cross-currency swap* dan *interest rate swap*.

Total loans received by finance companies in 2016 amounted to Rp242.95 trillion, with 53.90% denominated in rupiah, 33.27% in USD and 12.83% in JPY. Exposure to currency risk at finance companies was relatively low due to natural hedging through currency matching between sources of funds and financing as well as through cross-currency and interest rate swaps.

Jenis Valuta Pinjaman Perusahaan Pembiayaan
Currency of Finance Company Loans

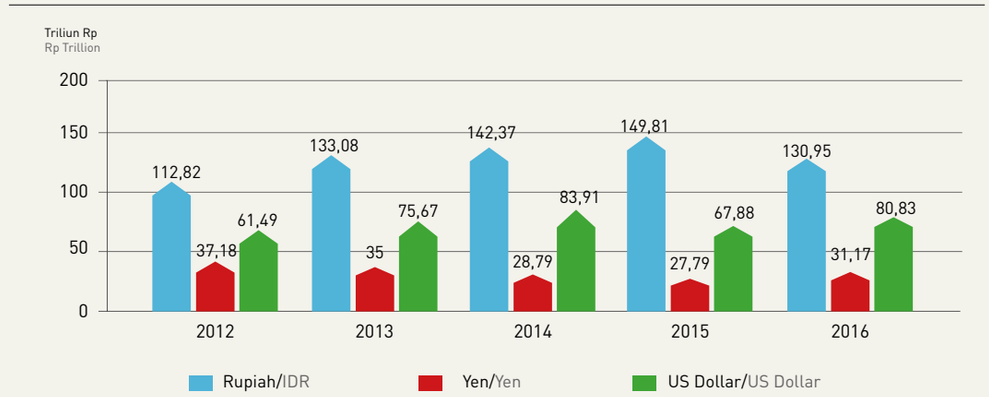

III.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah lembaga pembiayaan dengan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Selama 2016, aset dan ekuitas industri perusahaan modal ventura naik masing-masing sebesar 30,87% dan 27,95%

III.4.4 Venture Capital Firms Industry

Venture capital firms are involved in equity participation, investment through purchases of convertible bonds and financing based on profit sharing. In 2016, the assets and equity of the venture capital industry increased respectively by 30.87% and 27.95%.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura
Assets, Liabilities and Equity Growth of Venture Capital Firms

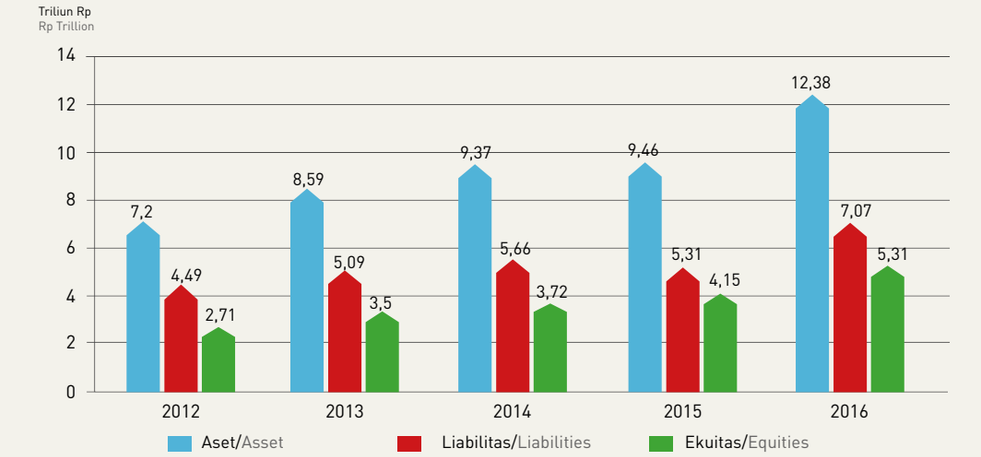

Sampai akhir 2016, pembiayaan/penyertaan modal industri modal ventura tumbuh 21,95% menjadi Rp8,89 triliun di mana porsi dengan skema pembagian atas hasil usaha mencakup 71,69% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

At the end of 2016, capital financing/investment in the venture capital industry expanded 21.95% to Rp8.89 trillion, with profit sharing schemes accounting for 71.69% of the total.

Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
Financing/Capital Investment Growth

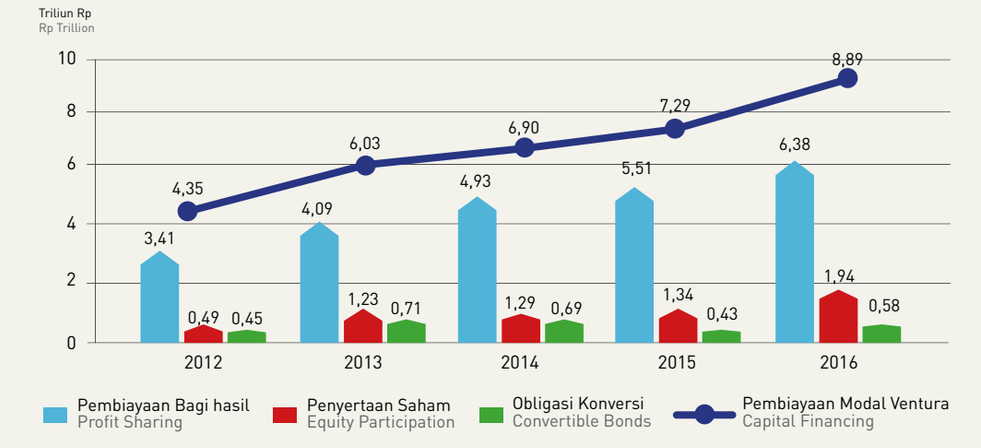

Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan yaitu Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) di mana rasio masing-masing adalah 97,30%; 72,10%; 1,90%; dan 4,30%.

Venture capital performance is gauged using financial ratios, namely the BOPO operational efficiency ratio, the ratio of investment to total assets (IFAR), the return on assets (ROA) and the return on equity (ROE) with each ratio recorded at 97.30%, 72.10%, 1.90% and 4.30% respectively in 2016.

Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura Konvensional
Financial Ratios of Conventional Venture Capital Firms

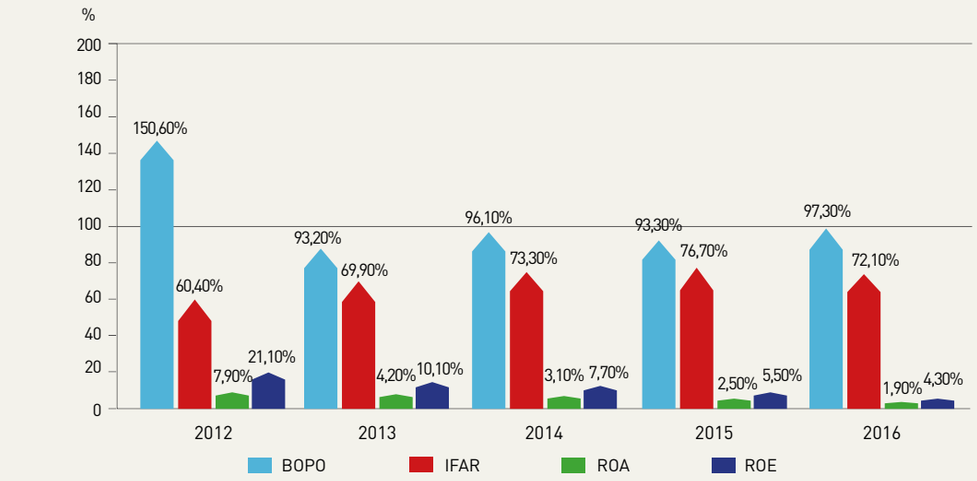

III.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mengemban amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Sampai akhir 2016, total aset dan total liabilitas dari kedua perusahaan tersebut masing-masing meningkat sebesar 44,27% dan 107,65% menjadi Rp55,17 triliun dan Rp21,99 triliun.

III.4.5 Infrastructure Finance Companies

In line with the mandate to develop infrastructure, the government established two companies to finance infrastructure development, namely PT Sarana Multi Infrastructure (Persero) and PT Indonesia Infrastructure Finance. At yearend 2016, the total assets and total liabilities of both companies increased respectively by 44.27% and 107.65% to Rp55.17 trillion and Rp21.99 trillion.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur
Equity, Liabilities and Assets of Infrastructure Finance Companies

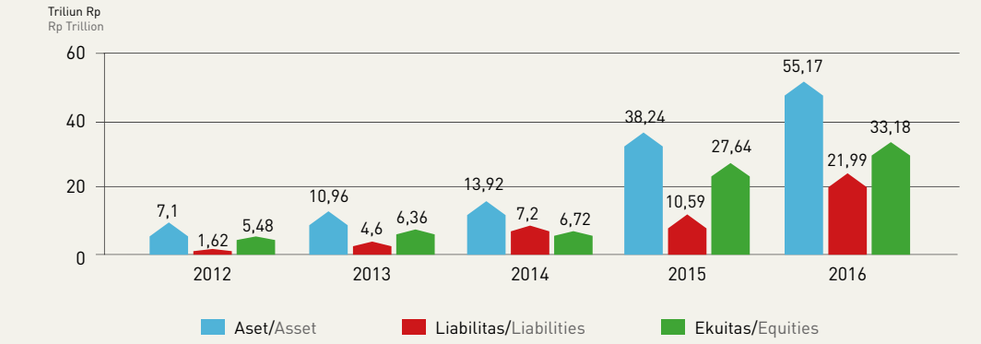

III.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total aset Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Pegadaian pada 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aset paling tinggi dimiliki oleh SMF, yaitu sebesar 30,42%. Aset Pegadaian, lembaga penjamin, serta LPEI juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 19,99%, 18,18%, dan 16,52%.

III.4.6 Special Financial Services Institutions

The total assets of guarantee companies, Indonesia Eximbank, Sarana Multigriya Finansial (SMF) and Pegadaian expanded in 2016 on the previous year. SMF enjoyed the strongest gains at 30.42%, followed by Pegadaian at 19.99%%, guarantee companies at 18.18% and Indonesia Eximbank at 16.52%.

Pertumbuhan Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus
Asset Growth at Special Financial Services Institutions

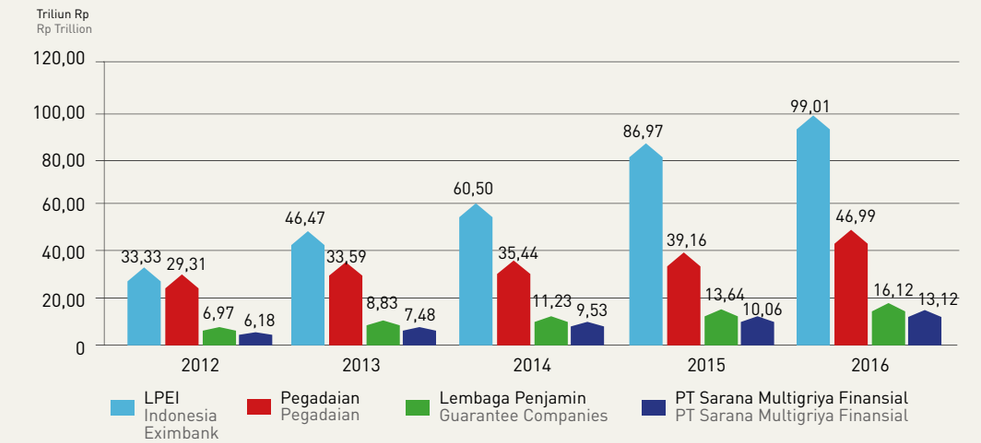

Keterangan:
- Data per Desember 2016 (*unaudited*);
- Aset lembaga penjaminan termasuk perusahaan penjaminan syariah

Notes:
- Unaudited data per December 2016;
- Asset data for guarantee companies includes sharia guarantee companies

Selama 2016, kegiatan penjaminan mengalami kenaikan *outstanding* penjaminan sebesar 31,30% menjadi Rp133,55 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp30,66 triliun dan Rp1,17 triliun.

In 2016, outstanding guarantees increased 31.30% to Rp133.55 trillion, stemming from a Rp30.66 trillion increment in guarantees for productive businesses and a Rp1.17 trillion gain in guarantees for non-productive businesses.

Pertumbuhan Nilai *Outstanding* Perusahaan Penjaminan
Value Growth of Outstanding Guarantees

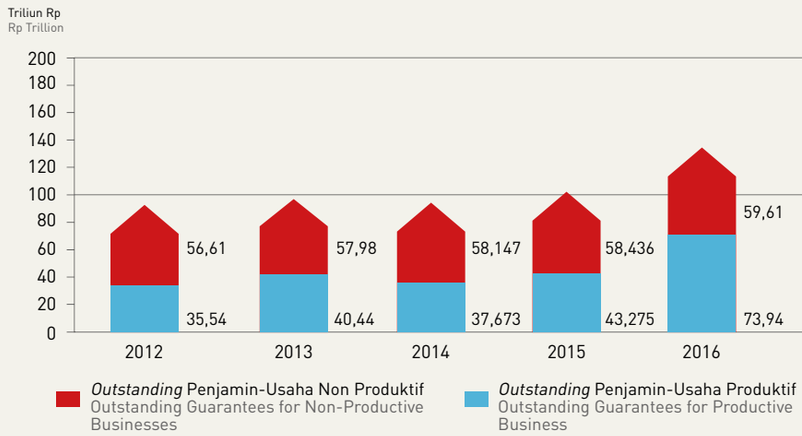

Nilai pembiayaan dan piutang syariah LPEI meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016, nilai pembiayaan dan piutang syariah tumbuh 18,24% menjadi Rp88,48 triliun.

Accordingly, in 2016, the value of sharia financing and receivables at Indonesia Eximbank climbed 18.24% to Rp88.48 trillion.

Pertumbuhan Nilai Pembiayaan dan Piutang Syariah yang Disalurkan LPEI
Sharia Financing and Receivables Growth at Indonesia Eximbank

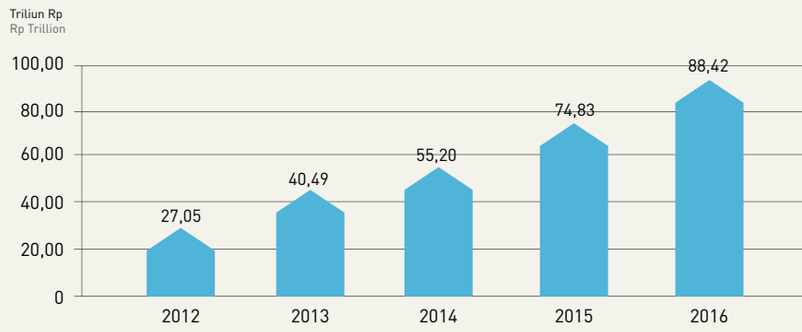

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Kegiatan penyaluran pinjaman oleh SMF juga meningkat tercermin dari peningkatan pinjaman sebesar 6,12% menjadi Rp8,32 triliun.

Loans disbursed by SMF also enjoyed solid growth, expanding 6.12% on the year earlier to Rp8.32 trillion.

Pertumbuhan Nilai Penyaluran Pinjaman oleh SMF
Loan Growth at SMF

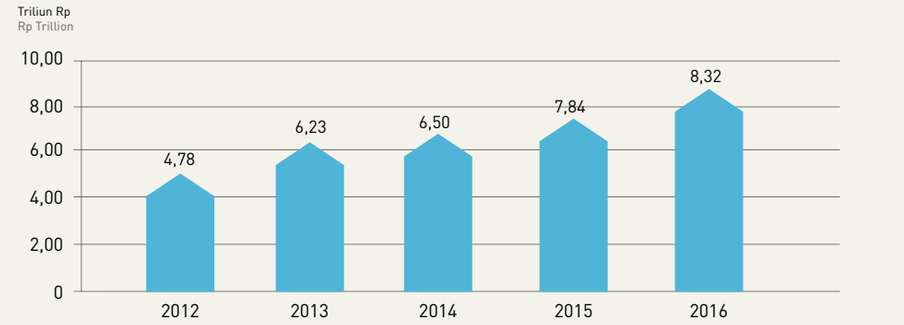

Selama 2016, Penyaluran pinjaman oleh Pegadaian juga meningkat sebesar 15,48% menjadi sebesar Rp35,59 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2016, loans extended by Pegadaian soared 15.48% on the previous year to Rp35.59 trillion.

Pertumbuhan Nilai Pinjaman yang Disalurkan oleh Pegadaian
Loan Growth at Pegadaian

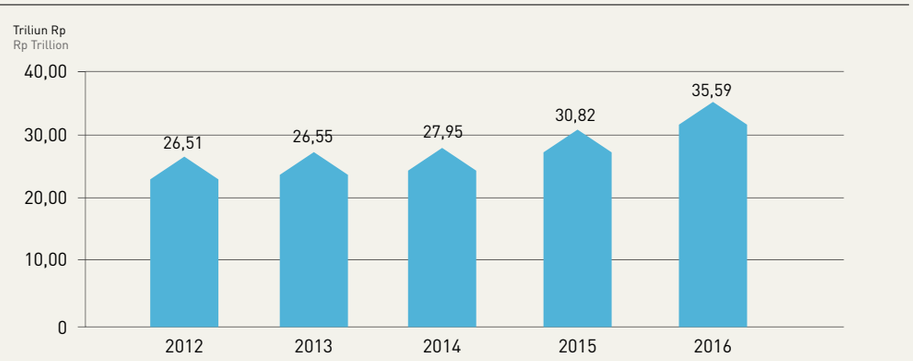

III.4.7 Perkembangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Pada akhir periode laporan, total aset perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mengalami peningkatan sebesar 26,62% menjadi 7.61 triliun.

III.4.7 PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

At the end of the reporting period, the total assets of PT Permodalan Nasonal Madani (Persero) increased 26.62% to Rp7.61 trillion.

Perbandingan Aset PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Total Assets of PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

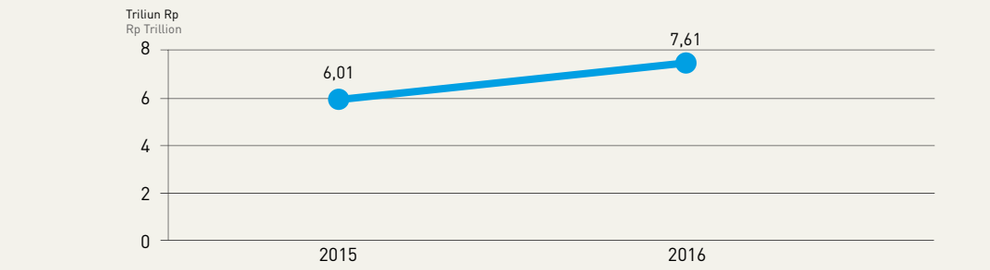

Pinjaman dan pembiayaan permodalan masing-masing meningkat sebesar 31,41% dan 41,67% Rp5,02 triliun dan Rp0,34 triliun.

Loans and financing grew respectively by 31.41% and 41.67% to Rp5.02 trillion and Rp0.34 trillion.

***Outstanding* Pinjaman dan Pembiayaan Modal PNM Persero**
Outstanding Loans and Financing at PNM Persero

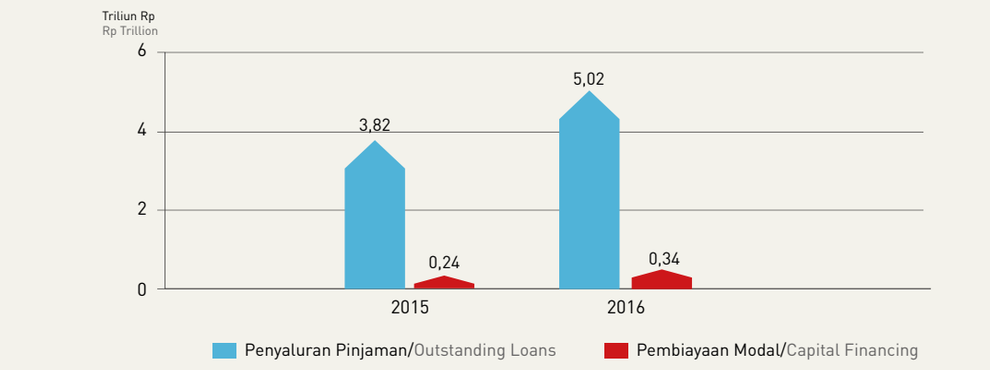

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.4.8 Perkembangan PT Danareksa (Persero)

Total aset perusahaan PT Danareksa (Persero) mengalami penurunan sebesar 8,47% menjadi Rp2,7 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

III.4.8 PT Danareksa (Persero)

The total assets of PT Danareksa (Persero) declined 8.47% to Rp2.7 trillion on the previous year.

Perbandingan Aset PT Danareksa (Persero)
Total Assets of PT Danareksa (Persero)

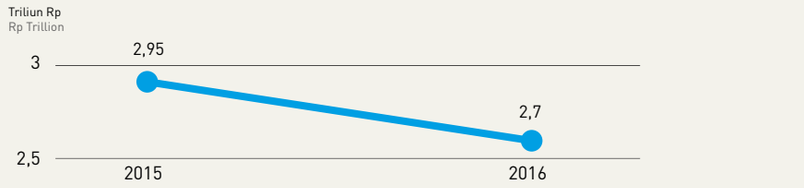

Piutang usaha PT Danareksa turun 0,32% menjadi Rp0,61 triliun. Di sisi lain, piutang afiliasi yang disalurkan oleh PT Danareksa mengalami kenaikan 0,14% menjadi Rp0,16 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan penyertaannya bernilai sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp0,73 triliun.

Receivables of PT Danareksa fell 0.32% to Rp0.61 trillion in 2016. In contrast, the affiliate receivables disbursed by PT Danareksa increased 0.14% to Rp0.16 trillion on the previous year. Meanwhile, investment remained unchanged on the year earlier at Rp0.73 trillion.

Perbandingan Piutang Usaha Bersih, Piutang Afiliasi dan Penyertaan PT Danareksa (Persero)
Net Receivables, Affiliate Receivables and Investment of PT Danareksa (Persero)

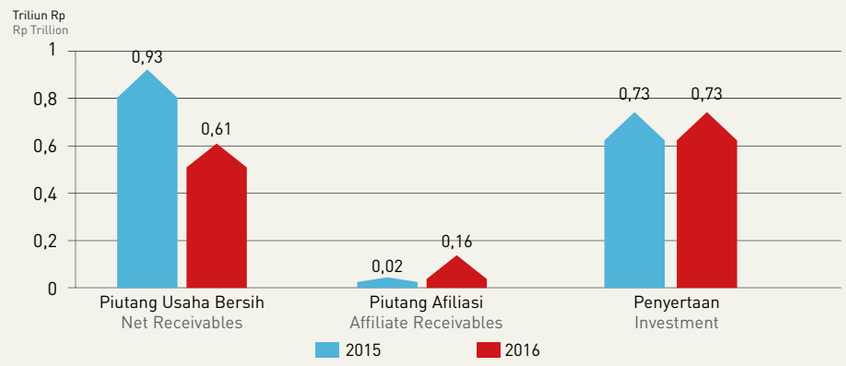

III.4.9 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Total aset perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi mengalami peningkatan 7,19% menjadi Rp7,30 triliun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

III.4.9 Supporting Industries for NBFI

The total assets of insurance and reinsurance brokers increased 7.19% on the previous year to Rp7.30 trillion.

Perbandingan Aset Industri Jasa Penunjang IKNB
Asset Comparison for NBFI Supporting Industries

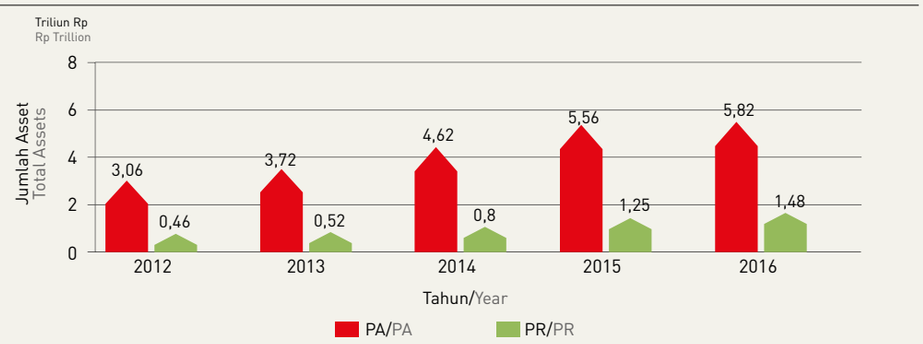

*) Berdasarkan laporan keuangan semester II per 31 Desember 2016;
**) Berdasarkan laporan keuangan semester I per 30 Juni 2016

* Based on the financial statements from semester II per 31st December 2016;
** Based on the financial statements from semester I per 30th June 2016

III.4.10 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sampai akhir 2016, total aset Lembaga Keuangan Mikro mengalami peningkatan sebesar 524% menjadi Rp283,84 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah LKM yang terdaftar di OJK.

III.4.10 Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Per year end 2016, total assets of microfinance institutions soared 524% to Rp283.84 billion in line with the increase in microfinance institutions registered at OJK.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

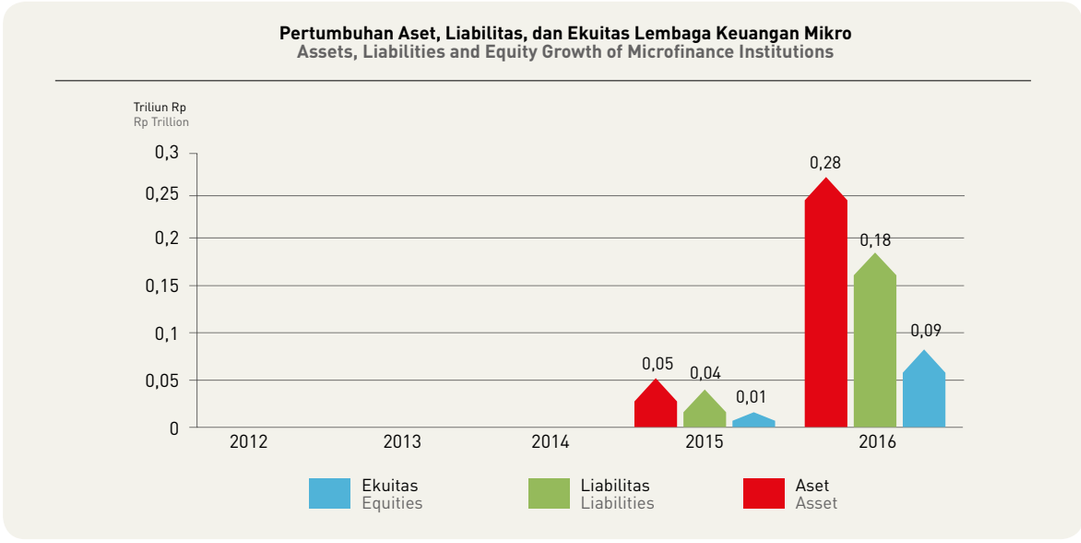

III.5 PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

III.5.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Sampai akhir 2016, secara umum kondisi perbankan syariah (Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)) terjaga baik dan menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah pelaku usaha perbankan syariah adalah 13 BUS, 21 UUS, dan 166 BPRS. Seluruh indikator kinerja perbankan syariah semakin membaik yang meliputi pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan. Selain itu, indikator rasio keuangan juga membaik, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Share BUS dan UUS mencapai 97,50% dari total industri perbankan syariah nasional, atau sebesar Rp356,5 triliun. Total aset perbankan syariah tumbuh sebesar 20,28% menjadi sebesar Rp365,66 triliun (yoy) sehingga pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,34% dari total aset perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah.

III.5 SHARIA FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.5.1 Sharia Banking

Through to the end of 2016, sharia banks and sharia business units maintained conditions and achieved positive growth. The number of sharia banks totalled 13 sharia banks, 21 sharia business unit along with 166 sharia rural credit banks. All sharia banking performance indicators improved during the reporting period, including asset growth, deposits and financing. In addition, the financial ratios also indicated gains, such as the Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Financing-to-Deposit Ratio (FDR) and BOPO (efficiency ratio).

The market share of sharia banks and sharia business units reached 97.50% of the national sharia banking industry, accounting for Rp356.5 trillion. The total assets of sharia banks increased 20.28% (yoy) to Rp365.66 trillion, securing a 5.34% share of the total assets of the national banking industry. Growth was boosted by the conversion of BPD Aceh into Bank Aceh Syariah.

Selain itu, pertumbuhan tersebut juga didorong oleh meningkatnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 20,83% (yoy), menjadi Rp 279,33 triliun yang selanjutnya juga mendorong penyaluran pembiayaan sebesar 16,44% (yoy) menjadi Rp248,01 triliun.

Kualitas pembiayaan BUS dan UUS juga turut membaik sejalan pertumbuhan pembiayaan, tercermin dari rasio NPF *gross* dan NPF *net* masing-masing tercatat sebesar 4,16% dan 2,07%, mengalami perbaikan apabila dibandingkan tahun lalu. Perbaikan tersebut disebabkan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah serta meningkatnya restrukturisasi pembiayaan. Secara likuiditas, rasio FDR perbankan syariah semakin membaik tercatat sebesar 88,78%, menurun apabila dibandingkan posisi sebelumnya. Perbaikan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi pembiayaan perbankan syariah didukung oleh likuiditas yang cukup.

OJK mencatat bahwa kondisi rentabilitas turut meningkat tercermin dari rasio ROA sebesar 0,94%, meningkat dibandingkan posisi akhir 2015. Industri perbankan syariah juga relatif semakin efisien sejalan dengan pelaksanaan proses konsolidasi jaringan kantor beberapa BUS dan UUS, yang tercermin dari rasio BOPO perbankan syariah yang menurun 0,75% (yoy) menjadi 93,63%. Hal ini juga sebagai salah satu dampak positif dari regulasi OJK yang memberikan insentif kepada bank induk yang mendukung pengembangan bank syariah dengan membuka Layanan Syariah Bank (LSB) di kantor bank konvensional.

Sharia banking industry growth was also driven by robust deposit growth, recorded at 20.83% (yoy) to Rp279.33 trillion, which also stimulated financing, growth of 16.44% (yoy) to Rp248.01 trillion.

The quality of the financing disbursed by sharia banks and sharia business units was observed to improve during the reporting period, in line with solid financing growth, as reflected by the gross and net non-performing financing (NPF) ratios at 4.16% and 2.17% respectively, which represents an improvement on the previous year in line with stronger financing growth and financing restructuring. In terms of liquidity, the financing-to-deposit ratio (FDR) of sharia banks improved on the previous year, decreasing to 88.78%, and indicating that financing expansion was supported by adequate liquidity.

OJK noted that profitability also increased, reflecting a return on assets (ROA) of 0.94%, up on the position recorded at the end of 2015. Furthermore, the sharia banking industry became more efficient in line with office network consolidation at a number of sharia banks and sharia business units, indicated by an improvement in the BOPO efficiency ratio, declining 0.75% (yoy) to 93.63%. The efficiency gains were also supported by OJK regulations that offer incentives to parent banks to support sharia banking industry development through the establishment of Sharia Banking Services (LSB) at conventional banking branches.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Indikator Perbankan Syariah
Sharia Banking Indicators

Indikator Utama Main Indicator	Triwulan Quarter IV-2015	Triwulan Quarter I-2016	Triwulan Quarter II-2016	Triwulan Quarter III-2016	Triwulan Quarter IV-2016	Pertumbuhan (yoy) Growth (yoy) Nominal	 %
SHARE TOTAL ASET BUS + UUS + BPRS Total Asset Share of Sharia Banks + Sharia Business Units + Sharia Rural Banks							
Total aset BUS + UUS (Rp Triliun) Total Assets of Sharia Banks + Sharia Business Units (Rp trillions)	296,26	297,77	306,22	331,76	356,50	60,24	20,33
Total aset BPRS (Rp. Triliun) Total Assets of Sharia Rural Banks (Rp trillions)	7,74	7,95	8,12	8,60	9,16	1,42	18,33
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR) Share of Sharia Bank Assets (sharia banks + sharia business units + Sharia Rural Banks) to Total Assets of National Banking Industry (Sharia Banks + Conventional Commercial Banks + Sharia Rural Banks + Rural Banks)	4,87	4,87	4,85	5,17	5,34		0,47
BUS + UUS | Sharia Banks + Sharia Business Units							
DPK (Rp Triliun) | Deposits (Rp trillions)	231,18	232,66	241,34	263,52	279,33	48,16	20,83
- Giro | Demand Deposits	21,19	19,71	23,84	29,07	27,97	6,78	31,99
- Tabungan | Savings Deposits	68,65	68,07	70,24	78,35	85,19	16,53	24,08
- Deposito | Term Deposits	141,33	144,88	147,25	156,10	166,17	24,85	17,58
Pembiayaan (Rp Triliun) | Financing (Rp trillions)	213,00	213,48	222,17	235,01	248,01	35,01	16,44
Jumlah NPF (Rp Triliun) | Total NPF (Rp trillions)	9,25	10,44	11,23	10,14	10,31	1,06	11,45
CAR (%) – BUS | CAR (%) – Sharia Banks	15,02	14,90	14,72	15,43	15,95		0,93
NPF Gross (%) | Gross NPF (%)	4,34	4,89	5,05	4,31	4,16		-0,19
ROA (%) | ROA (%)	0,84	1,26	1,11	1,04	0,94		0,11
BOPO (%) | BOPO Efficiency Ratio (%)	94,38	91,16	92,36	92,83	93,63		-0,75
FDR (%) | FDR (%)	92,14	91,76	92,06	89,18	88,78		-3,35
Jumlah Bank | Total Banks							
- BUS | Sharia Banks	12	12	12	13	13	-	-
- UUS | Sharia Business Units	22	22	22	21	21	-	-
Jumlah Kantor | Total Branches	2301	2230	2129	2210	2201	-100	-4,35
BPRS | Sharia Rural Banks							
DPK (Rp Triliun) | Deposits (Rp trillions)	4,80	4,97	5,00	5,44	5,82	1,02	21,28
Pembiayaan (Rp Triliun) | Financing (Rp trillions)	5,77	5,97	6,46	6,45	6,66	0,90	15,57
Jumlah NPF (Rp Triliun) | Total NPF (Rp trillions)	0,47	0,56	0,59	0,68	0,58	0,10	21,67
CAR (%) | CAR (%)	21,47	22,15	20,22	20,72	21,74		0,27
NPF Gross (%) | NPF Gross (%)	8,20	9,18	9,18	10,47	8,63		0,43
ROA (%) | ROA (%)	2,20	2,52	2,18	2,45	2,27		0,07
BOPO (%) | BOPO (%)	88,09	89,20	87,94	87,91	87,09		-0,99
FDR (%) | FDR (%)	120,06	120,25	129,35	118,63	114,40		-5,66
Jumlah Bank | Total Banks	163	165	165	164	166	3	1,84
Jumlah Kantor | Total Branches	446	454	428	430	453	7	1,57

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, Desember 2016
Source: Data from Banking Statistics Indonesia and Sharia Banking Information System, December 2016

Permodalan perbankan syariah tergolong baik yang tercermin dari rasio CAR perbankan syariah yang mengalami peningkatan sebesar 0,93% menjadi sebesar 15,95%, peningkatan tersebut karena penambahan modal disetor dan penerbitan Sukuk subordinasi serta akumulasi laba beberapa BUS selama 2016.

Sementara itu, pada BPR syariah (BPRS) total aset, DPK dan PYD masing-masing meningkat sebesar 18,33%, 21,28% dan 15,57% menjadi sebesar Rp9,16 triliun, Rp5,82 triliun dan Rp6,66 triliun apabila dibandingkan tahun sebelumnya

III.5.2 Perkembangan Pasar Modal Syaria

Selama 2016, perkembangan produk syariah di pasar modal mengalami peningkatan dalam penerbitan Sukuk korporasi dan Reksa Dana Syariah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, jumlah Saham yang masuk dalam juga terjadi pada jumlah saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah. Peningkatan juga terjadi pada indeks saham syariah beserta kapitalisasi pasarnya

III.5.2.1 Perkembangan Saham Syariah

Saham Syariah merupakan saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Selama 2016, terbit dua kali Daftar Efek Syariah Periodik. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada reviu berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 321 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 345 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sampai akhir 2016,terdapat penambahan 2 saham yang masuk dalam DES sehingga saham yang termasuk dalam DES berjumlah 347 saham.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,65%), sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi (16,71%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,99%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (10,09%) dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia, perkembangan pasar modal di Indonesia pada umumnya dan pasar modal syariah pada khususnya cukup menggembirakan. Pada akhir 2016, indeks ISSI ditutup pada level 172,08 poin atau meningkat sebesar 18,62% dengan kapitalisasi sebesar Rp3.170,06 triliun.

The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the sharia banking industry posted a 0.93% increase to 15.95% on the back of additional paid-up capital along with issuances of subordinated sukuk and profit accumulation at a number of sharia banks in 2016.

In terms of sharia rural banks, total assets, deposits and PYD recorded growth of 18.33%, 21.28% and 15.57% respectively on the previous year to Rp9.16 trillion, Rp5.82 trillion and Rp6.66 trillion.

III.5.2 Sharia Capital Market

In 2016, sharia-compliant product development on the capital market accelerated with the release of corporate sukuk and sharia investment funds. As national economic growth gained momentum in Indonesia, the number of sharia shares registered on the Sharia-Based Securities List (DES) also increased along with sharia stock indexes and market capitalisation.

III.5.2.1 Sharia Shares

Sharia shares are those registered on the Sharia-Based Securities List (DES). In 2016, OJK twice issued the periodic Sharia-Based Securities List (DES) based on a review of the financial statements and other written information collected from issuers and public companies. The number of sharia securities contained on the Sharia-Based Securities List (DES) in first Period totalled 321, increasing to 345 in the second period. At the end of 2016, two additional shares were included on the Sharia-Based Securities List (DES), thus bringing the total to 347.

The majority of sharia stocks were traded in the Trade, Services and Investment sector (25.65%), followed by the Property, Real Estate and Construction sector (16.71%), Basic Industry and Chemicals sector (14.99%), Infrastructure, Utilities and Transportation sector (10.09%), while the remaining sectors respectively accounted for less than 10% each.

Consistent with national economic growth momentum in Indonesia, the capital market and sharia capital market performed well. At the end of 2016, the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) closed at a level of 172.08 points, up 18.62% on the previous year. Meanwhile, market capitalisation increased to Rp3,170.06 trillion.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
Sharia Stocks in Indonesia by Sector

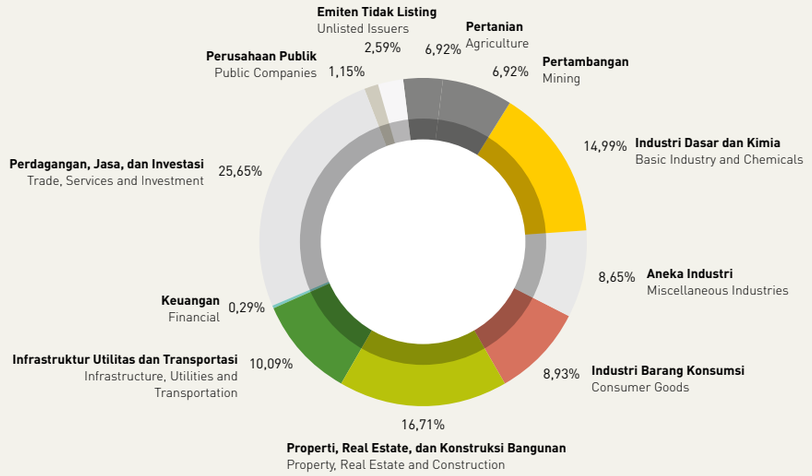

Indeks Saham Syariah Indonesia
Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)

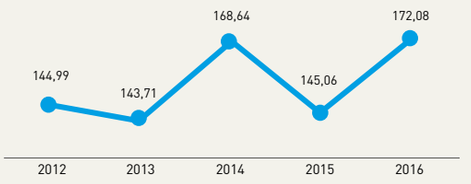

Kapitalisasi Pasar Saham Syariah Indonesia (dalam miliar Rupiah)
Indonesia Sharia Stock Market Capitalisation (Rp billion)

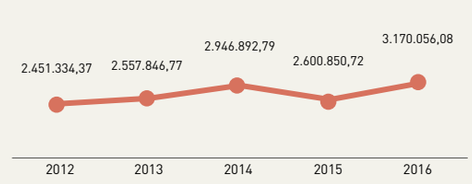

Pada periode yang sama, Jakarta Islamic Index (JII) ditutup pada level 694,127 poin atau meningkat sebesar 15,05%. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII sebesar Rp2.035,19 triliun atau 35,37% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp5.753,61 triliun. Selanjutnya, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII tersebut mengalami peningkatan sebesar 17,15% jika dibandingkan kapitalisasi Saham JII pada tahun sebelumnya

During the same period, the Jakarta Islamic Index (JII) closed at a level of 694.127 points, up 15.05% on the previous period. Meanwhile, JII stock market capitalisation totalled Rp2,035.19 trillion, accounting for 35.37% of total market capitalisation at Rp5,753.61 trillion, and increased 17.15% on the previous year

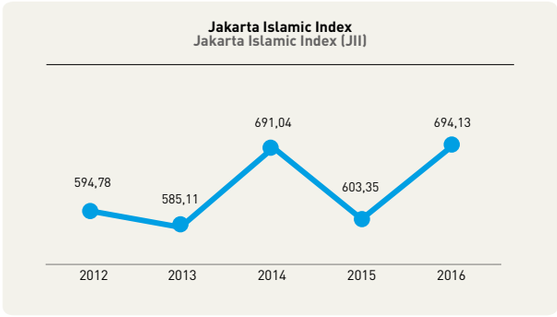

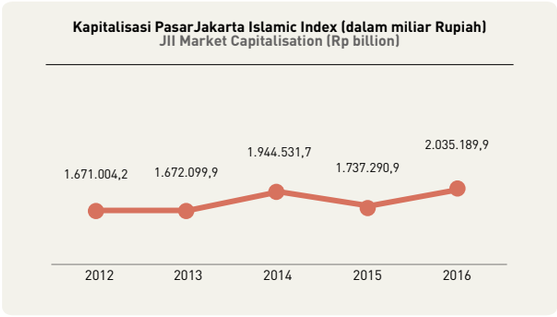

III.5.2.2 Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama 2016, terdapat penerbitan 15 seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,31 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat enam seri Sukuk Korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp1,002 triliun, sehingga jumlah Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai 53 Sukuk atau 10,58% dari total jumlah Sukuk dan Obligasi Korporasi yang berjumlah 501. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai Rp11,88 triliun dengan proporsi nilai Sukuk mencapai 3,79% dari total nilai Sukuk dan Obligasi Korporasi *outstanding*.

Sementara itu, secara kumulatif jumlah Sukuk Korporasi yang diterbitkan telah mencapai 102 Sukuk dengan total nilai emisi Sukuk mencapai Rp20,42 triliun. Ditinjau dari nilai nominal Sukuk Korporasi *outstanding*, sampai akhir Desember 2016 sebesar Rp11,88 triliun atau meningkat sebesar 19,96%.

Sukuk Korporasi baru menggunakan dua jenis akad yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*. Dari 53 Sukuk korporasi yang *outstanding* saat ini, terdapat 35 Sukuk Korporasi (66,04%) yang menggunakan akad *ijarah* dan 18 Sukuk Korporasi (33,96%) menggunakan akad *mudharabah* dengan nilai mencapai Rp5,53 triliun (46,62%) untuk *ijarah* dan Rp6,34 triliun (53,38%) untuk *mudharabah*.

III.5.2.2 Corporate Sukuk

In 2016, 15 series of Corporate Sukuk were issued worth Rp4.31 trillion. Meanwhile, during the same period, six series of Corporate Sukuk matured with a total value of Rp1,002 trillion, bringing the total of outstanding corporate sukuk to 53, which accounted for 10.58% of all corporate sukuk and bonds, totalling 501. The nominal value of outstanding corporate sukuk reached Rp11.88 trillion in 2016, accounting for 3.79% of total outstanding corporate sukuk and bonds.

Cumulatively, 102 corporate sukuk have been released to the tune of Rp20.42 trillion. Per the end of December 2016, however, outstanding corporate sukuk increased 19.96% to Rp11.88 trillion.

Two types of Corporate Sukuk are available, namely ijarah and mudharabah. Currently, of the 53 outstanding corporate sukuk, 35 (66.04%) apply ijarah contracts and the remaining 18 (33.96%) apply mudharabah contracts, valued at Rp5.53 trillion (46.62%) and Rp6.34 trillion (53.38%) respectively.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
Corporate Sukuk Issuances

Tahun Year		Emisi Sukuk Sukuk Issuances		Sukuk Outstanding Outstanding Sukuk	
		Total Nilai (dalam miliar rupiah) Total Value (Rp, billions)	Jumlah Total	Total Nilai (dalam miliar rupiah) Total Value (Rp, billions)	Jumlah Total
2010		7.815	47	6.121	32
2011		7.915	48	5.876	31
2012		9.790	54	6.883	32
2013		11.994	64	7.553	36
2014		12.956	71	7.105	35
2015		16.114	87	9.902	47
2016	Triwulan I Quarter I	16.114	87	9.516	45
	Triwulan II Quarter II	18.014	91	11.111	45
	Triwulan III Quarter III	18.925	97	11.044	51
	Triwulan IV Quarter IV	20.425	102	11.878	53

Perkembangan Sukuk Korporasi
Corporate Sukuk Performance

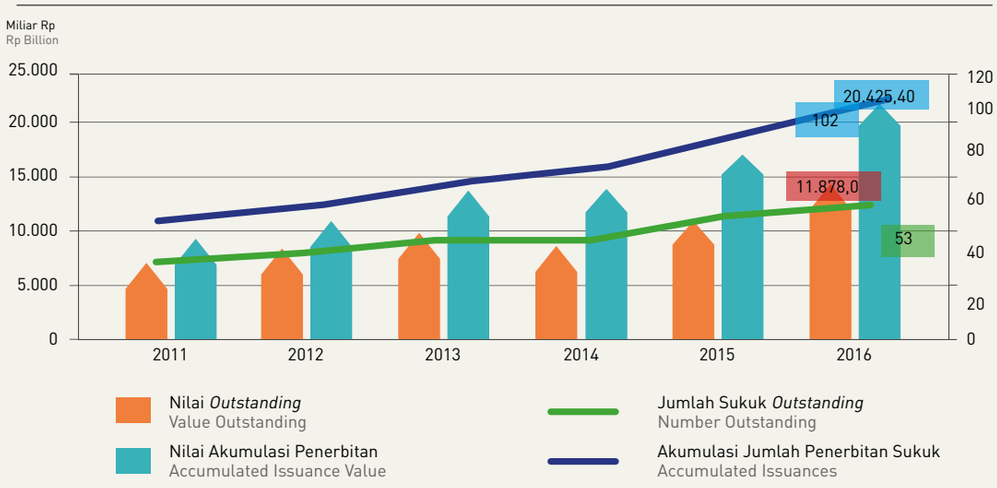

Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
Comparison of Total Outstanding Sukuk by Type

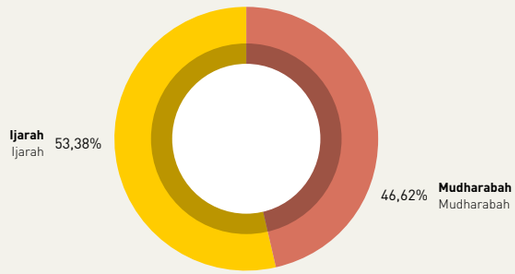

Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
Comparison of Total Outstanding Sukuk Value by Type

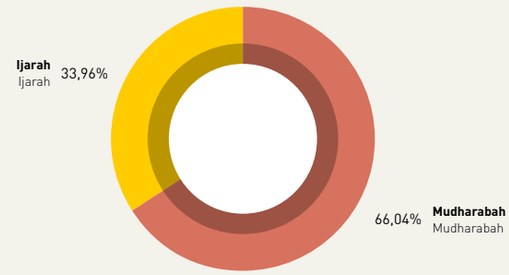

III.5.2.3 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama 2016 terdapat 43 Reksa Dana Syariah efektif terbit, sementara itu, pada periode yang sama, terdapat satu Reksa Dana Syariah efektif bubar. Secara kumulatif terdapat 136 Reksa Dana Syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total Reksa Dana, maka proporsi jumlah Reksa Dana Syariah mencapai 9,54% dari total 1.425 Reksa Dana aktif. Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB Reksa Dana Syariah mencapai Rp14,91 triliun, atau meningkat 35,35%. Apabila dibandingkan dengan total NAB Reksa Dana aktif yang berjumlah Rp338,75 triliun maka proporsi NAB Reksa Dana Syariah mencapai 4,40% dari total NAB Reksa Dana aktif.

III.5.2.3 Sharia Investment Funds

In 2016, OJK declared 43 sharia investment funds effective and liquidated one fund. Cumulatively, 136 sharia investment funds were active in 2016, accounting for 9.54% of the 1,425 total active investment funds. Total net asset value (NAV) of sharia investment funds reached Rp14.91 trillion, up 35.35% on the year earlier, and accounted for 4.40% of the NAV of total active funds at Rp338.75 trillion.

Perkembangan Reksa Dana Syariah
Sharia Investment Funds Performance

Tahun / Year		Perbandingan Jumlah Reksa Dana / Comparison of Total Investment Funds				Perbandingan NAB (Rp Miliar) / NAV Comparison (Rp billions)			
		Reksa Dana Syariah / Sharia Investment Funds	Reksa Dana Konv. / Conventional Investment Funds	Reksa Dana Total / Total Investment Funds	%	Reksa Dana Syariah / Sharia Investment Funds	Reksa Dana Konv. / Conventional Investment Funds	Reksa Dana Total / Total Investment Funds	%
2011		50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012		58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013		65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014		74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015		93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	Triwulan I / Quarter I	99	1.051	1.150	8,61%	9.433,71	283.879,95	293.313,66	3,22%
	Triwulan II / Quarter II	106	1.120	1.226	8,65%	9.901,24	299.540,37	309.441,60	3,20%
	Triwulan III / Quarter III	123	1.224	1.347	9,13%	12.087,00	304.629,57	316.716,57	3,82%
	Triwulan IV / Quarter IV	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Perkembangan Reksadana Syariah
Sharia Mutual Funds Performance

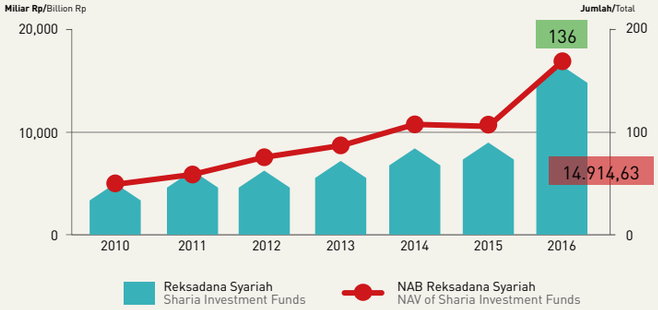

Jika dilihat dari jenisnya, Reksa Dana Syariah terbagi atas sembilan jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksa Dana Efek Luar Negeri dan Reksa Dana Berbasis Sukuk. Berdasarkan besarnya NAB, Reksa Dana Syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 29,41%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 19,12% dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 15,44%.

Sharia investment funds consist of nine types, namely sharia discretionary funds, exchange traded funds (ETF); index funds, money market funds, fixed-income funds, equity funds, protected funds, international funds, sukuk-based funds. In terms of net asset value (NAV), sharia equity funds dominated with 29.41%, followed by sharia protected funds at 19.12% and sharia fixed-income funds at 15.44%.

Jumlah dan NAB Reksadana Syariah Berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2016
Total and NAV of Sharia Investment Funds by Type per 30th December 2016

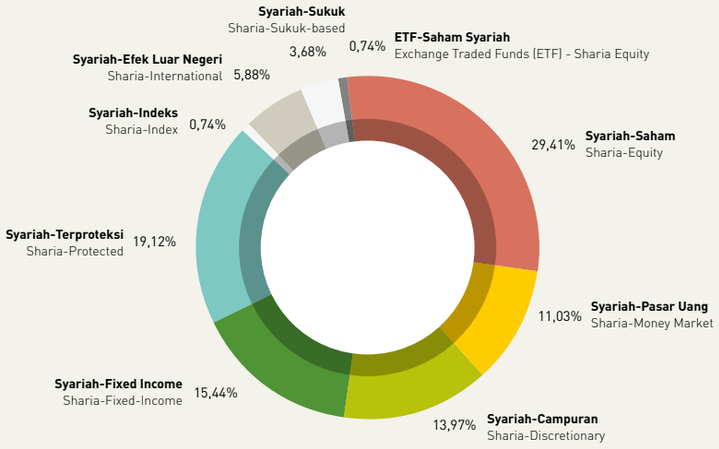

Proporsi NAB Reksadana Syariah per Jenis
Proportion of Sharia Investment Fund NAV by Type

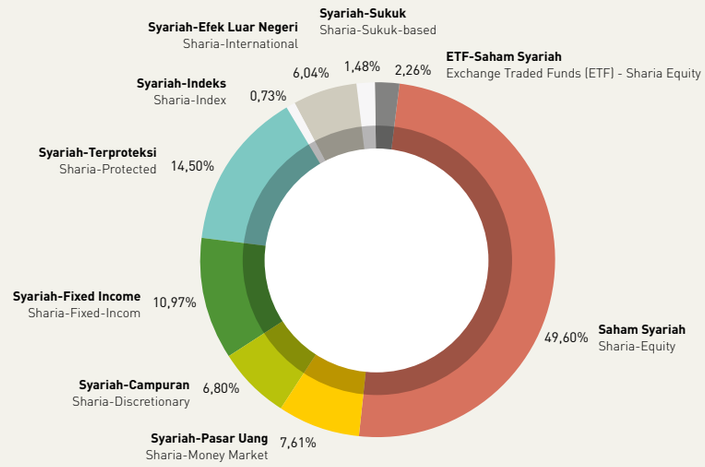

III.5.2.4 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Selanjutnya, terdapat pula Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang merupakan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara *private placement*. SDHI ini tidak diperdagangkan dan jenis akad yang digunakan adalah *Ijarah Al-Khadamat* dengan *underlying asset* berupa jasa (*services*).

Sampai akhir 2016, jumlah SBSN yang beredar sebanyak 53 SBSN atau 32,70% dari 159 total jumlah surat berharga negara *outstanding*. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN *outstanding* mencapai Rp411,37 triliun dengan proporsi mencapai 14,82% dari total nilai surat berharga negara *outstanding* sebesar Rp2.775,93 triliun.

III.5.2.4 Tradeable Sharia Government Securities (SBSN)

Government Islamic Securities (SBSN), otherwise known as Government Sukuk, are tradeable government securities issued in compliance with Islamic principles, denominated in rupiah or a foreign currency, as evidence of participation in SBSN assets.

In addition, Hajj Fund Sukuk (SDHI) are available as a private placement. SDHI are non-tradeable and apply Ijarah Al-Khadamat contracts with underlying assets in the form of services.

At the end of 2016, a total of 53 SBSN were outstanding, accounting for 32.70% of the 159 outstanding tradeable government securities (SBN). Nominally, the value of outstanding SBN amounted to Rp411.37 trillion in 2016, equivalent to 14.82% of total tradeable government securities (SBN) at Rp2,775.93 trillion.

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*
Outstanding Government Sukuk Performance

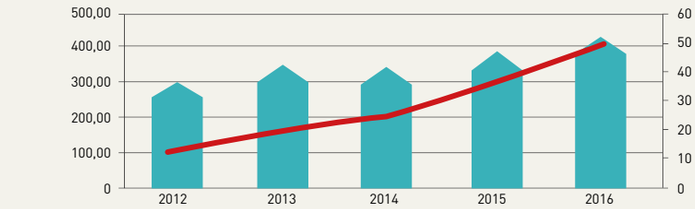

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah *Outstanding* Total Outstanding	36	42	42	47	53
Nilai *Outstanding* Value Outstanding	124,44	169,29	208,40	296,70	411,37

Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*
Outstanding Government Islamic Securities (SBSN) Performance

Tahun | Year		Nilai *Outstanding* (dalam triliun rupiah) Value Outstanding (in billion rupiah)	Jumlah *Outstanding* Total Outstanding
2010		44,34	16
2011		77,73	22
2012		124,44	36
2013		169,29	42
2014		206,10	42
2015		296,07	47
2016	Triwulan I Quarter I	367,04	51
	Triwulan I Quarter II	380,89	51
	Triwulan I Quarter III	406,12	53
	Triwulan I Quarter IV	411,37	53

II.5.2.5 Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Sampai akhir 2016, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

a. Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 41 Manajer Investasi.
b. Terdapat sembilan Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES
c. Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 11 bank

III.5.2.5 Sharia Services on the Capital Market

Issuances of sharia securities on the capital market require the services of competent and knowledgeable parties in terms of compliance to Islamic principles. Through to the end of 2016, the following parties were engaged in such services:

a. 41 investment managers;
b. Nine issuers of the Sharia-Based Securities List (DES) approved by OJK;
c. 11 custodian banks recommended by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) to provide sharia financial services;

d. Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah) berjumlah 12 Perusahaan Efek
e. Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjaminan Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 12 Penjamin Emisi Efek
f. Terdapat empat Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi
g. Terdapat 32 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, dan terdapat 29 orang-perseorangan yang sedang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal telah melapor ke OJK.

d. 12 Sharia Online Traders that has developed and implemented stock trading online based on sharia principles
e. 12 Corporate Sukuk Guarantors that participated in the issuance of Corporate Sukuk
f. Four trust fund managers as trustees of corporate sukuk issuances; and
g. 32 sharia capital market experts licensed by OJK and 29 individuals as members of the Sharia Supervisory Board and/or Sharia Expert Team for the capital market.

III.5.2.6 Perkembangan Ahli Syariah Pasar Modal

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) adalah:
a. Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b. Badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah

ASPM memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal. Selama 2016, telah diterbitkan 32 SK pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal.

III.5.2.6 Sharia Capital Market Experts (ASPM) are:

Sharia Capital Market Experts (ASPM) are:
a. Individuals with knowledge and experience in the sharia sector; and
b. Business entities with managers and employees who have knowledge and experience in the sharia sector.

ASPM are tasked with providing advice and/or overseeing the application of sharia principles on the capital market in terms of business activities and/or providing statements of sharia compliance on sharia products and services on the capital market. In 2016, a total of 32 sharia capital market experts were licensed by OJK.

III.5.3 Perkembangan IKNB Syariah

Sampai dengan akhir 2016, total aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 81,78%, menjadi Rp88,67 triliun, sebagaimana pada tabel berikut:

III.5.3 Sharia Nonbank Financial Industry

Per yearend 2016, total assets of the sharia nonbank financial industry increased 81.78% to Rp88.67 trillion, as presented in the following table:

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

(dalam miliar Rp) (Rp billions)

Perkembangan Aset Industri Jasa Keuangan Non Bank Syariah tahun 2012-2016
Sharia Nonbank Financial Industry Asset Growth from 2012-2016

Industri | Industry	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Perasuransian Syariah | Sharia Insurance Companies	13.239	16.674.55	21.742.13	25.399.08	33.243.51
Perusahaan Pembiayaan Syariah | Sharia Finance Companies	22.664.34	24.638.98	23.767.63	22.530.38	35.740.95
Perusahaan Modal Ventura Syariah | Sharia Venture Capital Firms	225.29	311.16	384.18	414.33	1.092.47
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah | Sharia Infrastructure Financing Companies	-	-	-	-	104.54
Perusahaan Penjaminan Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah Khusus | Sharia Guarantee Companies/Sharia Special Financial Institutions	-	102.84	376.89	618.29	18.428.99
LKM Syariah | Sharia Micro-finance Institutions	-	-	-	-	63.435
Jumlah | Total	**36.128.63**	**41.700.63**	**46.270.83**	**48.782.09**	**88.673.91**

Peningkatan total aset dialami seluruh IKNB syariah. Peningkatan total aset berasal dari bertambahnya jumlah pelaku pada semua industri, terutama dari perusahaan penjaminan syariah, lembaga keuangan syariah khusus, dan perusahaan modal ventura syariah.

Sampai dengan akhir 2016, total aset IKNB syariah memiliki market share sebesar 4,65% jika dibandingkan dengan total aset IKNB konvensional yang memiliki market share sebesar 95,35%.

All sharia nonbank financial industries recorded an increase in terms of total assets, originating from a proliferation of players in all industries, especially sharia guarantee companies, sharia special financial institutions and sharia venture capital firms.

As of yearend 2016, the total assets of the sharia nonbank financial industry commanded a market share of 4.65% compared to 95.35% for the conventional nonbank financial industry.

Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah tahun 2012-2016
Number of Sharia Insurance Companies from 2012 – 2016

Keterangan | Description	2012	2013	2014	2 015	2016
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah | Sharia Life Insurance Companies	3	3	3	5	6
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Usaha Syariah | Life Insurance Companies with a Sharia Business Unit	17	17	18	19	21
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah | Sharia General Insurance Company	2	2	2	3	4
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Usaha Syariah | General Insurance Company with a Sharia Business Unit	20	24	23	25	24
Perusahaan Reasuransi Syariah | Sharia Reinsurance Company	-	-		-	1
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah | Sharia Reinsurance Company with a Sharia Business Unit	3	3	3	3	2
Jumlah | Total	45	49	49	55	58

Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah tahun 2012-2016
Number of Sharia Finance Companies from 2012 – 2016

Keterangan | Description	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Pembiayaan Syariah | Sharia Finance Company	2	2	3	3	3
Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Unit Usaha Syariah | Finance Company with a Sharia Business Unit	32	42	41	37	38
Perusahaan Modal Ventura Syariah | Sharia Venture Capital Firm	-	4	4	4	4
Perusahaan Modal Ventura yang memiliki Unit Usaha Syariah | Venture Capital Firm with a Sharia Business Unit	-	-	-	2	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah yang memiliki Unit Usaha Syariah | Sharia Infrastructure Finance Company; Infrastructure Finance Company with a Sharia Business Unit	-	-		-	1
Jumlah | Total	34	48	48	46	49

Jumlah Lembaga Keuangan Syariah Khusus tahun 2012-2016
Number of Sharia Special Financial Institutions from 2012 – 2016

Keterangan | Description	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Penjaminan Syariah | Sharia Guarantee Company	-	2	2	2	2
Perusahaan Penjaminan yang memiliki Unit Usaha Syariah | Guarantee Company with a Sharia Business Unit	-	-	1	1	2
PT Pegadaian (Persero) yang memiliki Unit Usaha Syariah | PT Pegadaian (Persero) with a Sharia Business Unit	1	1	1	1	1
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang memiliki Unit Usaha Syariah | Indonesia Eximbank with a Sharia Business Unit	1	1	1	1	1
Jumlah | Total	2	4	5	5	6

Sampai akhir 2016, jumlah perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus masing-masing mengalami peningkatan sebesar 5,45%, 6,52% dan 20,00% menjadi 58 Perusahaan Asuransi Syariah, 49 Perusahaan Pembiayaan Syariah dan 6 Lembaga Keuangan Khusus Syariah.

Through to the end of 2016, the number of Sharia Insurance Companies, Sharia Finance Companies and Sharia Special Financial Institutions increased respectively by 5.45%, 6.52% and 20.00% to 58 Sharia Insurance Companies, 49 Sharia Finance Companies and 6 Sharia Special Financial Institutions.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS

GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Dalam mewujukan Visi organisasi, diperlukan pondasi tata kelola dan manajemen strategis yang baik. Selama 2016, OJK melaksanakan penguatan pondasi tata kelola dan manajemen strategis yang difokuskan pada pelaksanaan Control Self Assessment (CSA), pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK yang dikaitkan dengan Manajemen Risiko, penguatan jaringan Kantor secara mandiri di daerah dan penguatan fungsi pengawasan melalui program pengembangan pegawai oleh OJK-Institute. OJK juga mengembangkan sistem tata kelola internal yang berfungsi untuk meningkat kapasitas organisasi antara lain Sistem Informasi Pengendalian Gratifikasi OJK (SiPeGa) dan Sistem Aplikasi Online Survei Persepsi Kinerja Satuan Kerja OJK (SPKSO). Detail mengenai penguatan pondasi tata kelola dan manajemen strategis dijabarkan pada bab ini.

To realise the organisation's vision, OJK must be grounded on a solid foundation of good governance and strategic management. In 2016, OJK strengthened the foundations of good governance and strategic management, with a focus on Control Self-Assessment (CSA), SIMPEL system development linked to risk management, independently strengthened the regional office networks and strengthened the supervision function through employee development programs organised by the OJK Institute. OJK also developed an internal governance system to enhance organisational capacity through the OJK Gratification Control Information System (SiPEGa) and the Online Work Unit Performance Perception Survey Application (SPKSO). The details of how OJK strengthened the foundations of governance and strategic management are presented in this chapter.

Perahu Jukung Nelayan, Jimbaran, Bali
Jukung Fishing Boat, Jimbaran, Bali.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS

GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Tugas dan wewenang Otoritas Jasa keuangan (OJK) merupakan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mencapai tujuan tersebut, OJK mengelola struktur dan tatanan kerja organisasi yang berdasarkan pada prinsip tata kelola (*Governance*) berasaskan yaitu Tranparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi, Akuntabilitas, dan Kewajaran (*Fairness*).

Dalam pelaksanaan tata kelola, terdapat organ-organ yang akan mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi OJK agar dapat berjalan dengan baik antara lain Dewan Komisioner dan Rapat Dewan Komisioner, Audit Internal Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas dan Penanganan Anti Fraud, Komite-Komite, Kode Etik, Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) dan Komunikasi.

IV.1 DEWAN KOMISIONER

IV.1.1 Anggota Dewan Komisioner

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif kolegial dan setiap anggota Dewan Komisioner OJK memiliki hak suara yang sama. Anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Mekanisme seleksi pemilihan anggota Dewan Komisioner diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik. Di luar *Ex-officio*, ketujuh anggota Dewan Komisioner OJK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan ke Presiden dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.

The duties and authority OJK are mandated pursuant to the OJK Act (No. 11) of 2011. In pursuit of that mandate, OJK manages its organisational structure based on the principles of good governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.

The organs of OJK governance include the Board of Commissioners and Board of Commissioners' Meeting, Risk Management Internal Audit Quality Assurance and Fraud Prevention, the Ethics Committee, the Strategic, Budget and Performance Management Committee and the Communication Committee.

IV.1 BOARD OF COMMISSIONERS

IV.1.1 Members of the Board of Commissioners

OJK is headed by a collective collegial Board of Commissioners (BoC) and each Member of the Board has the same voting rights. Members of the Board of Commissioners are appointed in accordance with a Presidential Decree of the Republic of Indonesia.

The selection mechanism for members of the Board of Commissioners is contained in the OJK Act (No. 21) of 2011, which is transparent, accountable and involves public participation. Excluding the Ex-Officio members, the seven OJK board members are selected by the People's Representative Council (DPR) based on the candidates proposed by the President. A Selection Committee formed based on the Presidential Decree, consisting of nine people from the Government, Bank Indonesia, academia and those engaged in the financial services industry, is responsible for selecting

Panitia Seleksi terdiri dari sembilan orang yang berasal dari unsur Pemerintah, Bank Indonesia, akademisi maupun masyarakat yang berkecimpung di industri jasa keuangan. Selain tercermin pada keanggotaan Panitia Seleksi, partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisioner juga tercermin pada adanya kesempatan yang diberikan kepada publik untuk dalam memberikan masukan terhadap calon-calon yang dinyatakan lolos administrasi.

prospective board members. In addition to the member of Selection Committee, the public also provide input concerning the candidates who pass the administration process.

Ketujuh anggota Dewan Komisioner di luar Ex-officio ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Selama periode lima tahun masa jabatan anggota Dewan Komisioner, terjadi pergantian jabatan anggota Dewan Komisioner *Ex-officio*. Mirza Adityaswara menggantikan Halim Alamsyah sebagai anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* Bank Indonesia. Sementara itu, Mardiasmo menggantikan Anny Ratnawati sebagai anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* Kementerian Keuangan.

Excluding the Ex-Officio members, the seven members of the OJK Board of Commissioners were installed in accordance with Presidential Decree No. 67/P of 2012, dated 18th July 2012, concerning the Appointment of the Otoritas Jasa Keuangan Board of Commissioners. During the five-year tenure, the Ex-Officio members of the board were replaced. Accordingly, Mirza Adityaswara replaced Halim Alamsyah as the Ex-Officio member of the OJK BoC from Bank Indonesia and Mardiasmo superseded Anny Ratnawati as the Ex-Officio member of the OJK BoC from the Ministry of Finance.

IV.1.2 Rapat Dewan Komisioner

Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK diselenggarakan dalam rangka penetapan atau evaluasi atas kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui. Forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK ini diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif dan transparan.

IV.1.2 Board of Commissioners' Meeting

The BoC meeting is held regularly to determine and evaluate OJK strategic policies and/or to receive reports on salient policies. The highest OJK decision-making forum is organised in accordance with the principles of accountability, responsibility, fairness, effectiveness and transparency.

RDK menetapkan keputusan strategis dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah seperti penerbitan peraturan mengenai pendaftaran penilai pemerintah yang mendukung Paket Kebijakan Jilid V, aturan mengenai Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK-DIRE), Peraturan dalam rangka program pengampunan pajak (*tax amnesty*), Peraturan OJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat sebagai dukungan OJK terhadap Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan aturan-aturan lain dalam rangka pendalaman pasar industri jasa keuangan.

The BoC meeting takes strategic decisions to support government policy, including this year the promulgation of regulations concerning the registration of government evaluators to support the Government Fifth Policy Package, regulations on Collective Investment Contracts - Real Estate Investment Funds (KIK-DIRE), regulations relating to the Tax Amnesty, and OJK regulation on Raising Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Public to support the National Strategy on Financial Inclusion as well as other regulations to support financial market deepening in the financial services industry.

Selama 2016, Dewan Komisioner menyelenggarakan RDK sebanyak 61 kali dengan jumlah topik pembahasan sebanyak 226 topik yang sebagian besar mengenai kelembagaan industri jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan terutama terkait dengan proses perijinan.

A total of 61 BoC meetings were held in 2016, with 226 topics discussed, the majority of which concerned the institutional arrangements of the financial services industry. This is consistent with OJK's avowed commitment to provide prime services in the stakeholders' interest, particularly in terms of the licensing process.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Guna memberikan informasi terkini kepada anggota Dewan Komisioner terhadap kondisi industri jasa keuangan, Rapat Dewan Komisioner juga secara rutin menerima laporan mengenai kondisi perekonomian terkini baik global maupun domestik dan perkembangan terkini industri jasa keuangan.

IV.1.3 *Board Seminar*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di RDK, Dewan Komisioner juga menyelenggarakan forum *Board Seminar* (BS) yang merupakan pembahasan materi-materi yang akan diputuskan dalam RDK. Khusus materi yang bersifat pengaturan, sebelum diputuskan dalam RDK wajib terlebih dahulu dibahas dalam forum BS. Selama 2016, Dewan Komisioner menyelenggarakan BS sebanyak 36 kali membahas 80 topik.

IV.2 KOMITE-KOMITE OJK

Proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner yang efektif dan berkualitas perlu didukung oleh rekomendasi yang kredibel. Mempertimbangkan kebutuhan tersebut, OJK membentuk Komite yang beranggotakan pihak internal dan eksternal. Sampai akhir 2016, OJK memiliki delapan Komite yaitu (1) Komite Etik; (2) Komite SDM, Organisasi, dan Remunerasi; (3) Komite Manajemen Risiko; (4) Komite Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja; (5) Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan; (6) Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan; (7) Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah; dan (8) Komite Teknologi Informasi.

Seeking to provide the latest information on conditions in the financial services industry to the OJK BoC, the BoC meeting routinely receives reports on the latest global and domestic economic conditions along with the latest developments in the financial services industry.

IV.1.3 Board Seminar

To enhance decision-making effectiveness at the BoC meeting, the BoC also hosts Board Seminars (BS) to discuss the materials to be decided upon at the BoC meeting. Related to OJK Regulation, the materials must be discussed at the BS before submission to the BoC meeting. In 2016, Board Seminars were held 36 times and 80 topics were discussed.

IV.2 OJK COMMITTEES

An effective and high-quality decision-making process requires the backing of credible recommendations. Therefore, OJK established several committees, with external and internal parties as members. At the end of 2016, OJK had established eight committees as follows: (1) Ethics Committee; (2) Human Resources, Organisation and Remuneration Committee, (3) Risk Management Committee; (4) Strategic, Budget and Performance Management Committee; (5) Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee; (6) Adjustments to Mandatory Charges Committee, (7) Sharia Financial Services Development Committee, and (8) Information Technology Committee.

A. Komite Etik
Komite Etik dibentuk untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik OJK yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan pegawai OJK dan memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Dewan Komisioner atau Pejabat Pemutus yang berwenang. Komite Etik juga mengemban tugas sebagai *ethics advisor* dalam rangka edukasi, pencegahan dan penindakan pelanggaran Kode Etik OJK. Selama 2016, terdapat 14 kasus terkait pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Komite Etik level Manajemen.

B. Komite SDM, Organisasi, dan Remunerasi
Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi dibentuk untuk mendukung Dewan Komisioner dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan SDM, organisasi dan remunerasi, termasuk keselarasannya dengan arah strategis OJK, serta pengembangan kepemimpinan dan kompetensi SDM. Selama 2016, Komite menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait penyesuaian sistem remunerasi di OJK. Penyesuaian sistem remunerasi bertujuan menjaga prinsip pemberian remunerasi pegawai yang adil dan kompetitif.

C. Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisioner dalam menentukan arah kebijakan strategis, dan/atau rencana perlakuan Risiko tertentu kepada Dewan Komisioner OJK dan pengembangan arah kebijakan strategis Manajemen Risiko OJK kepada Dewan Komisioner OJK. Selama 2016, komite ini telah menyampaikan rekomendasi atas mitigasi profil risiko 2016 serta menyampaikan *assesment profile* risiko OJK 2017.

D. Komite Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK)
Komite MSAK bertugas mendukung Dewan Komisioner dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen strategi, manajemen anggaran dan manajemen kinerja, termasuk menjaga konsistensi dan keselarasan ketiganya.

Selama 2016, Komite MSAK menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner terkait Peta Strategi OJK 2016, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2017, Peta Strategi OJK 2017, perubahan anggaran 2016 dan penilaian Kinerja Organisasi OJK 2016.

E. Komite Pengawasan Terintegrasi
Dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap

A. Ethics Committee
The Ethics Committee investigates suspected violations of the OJK Code of Ethics by BoC members, officers and employees, while also providing recommendations for alleged violations of the Code to the BoC or Authorised Officers. The Committee, as an ethics advisor, also educates about the Code, while preventing and acting upon violations. In 2016, there were a total of 14 cases related to violations of the Code handled by the Ethics Committee at the management level.

B. Human Resources, Organisation and Remuneration Committee
The Human Resources, Organisation and Remuneration Committee was formed to support BoC decision-making in terms of human resources, the organisation and remuneration, including harmonisation with the OJK strategic direction as well as leadership development and HR competence training. In 2016, the Committee produced policy recommendations concerning adjustments to the OJK remuneration system, which aim to maintain fair and competitive employee remuneration.

C. Risk Management Committee
The Risk Management Committee was established to support the BoC formulate the direction of strategic policy and/or the planned treatment of certain risks, while developing the direction of strategic risk management policy. In 2016, the Committee submitted recommendations concerning risk profile mitigation as a risk profile assessment for 2017.

D. Strategic, Budget and Performance Management (MSAK) Committee
The MSAK Committee is tasked with supporting the BoC decision-making process in terms of strategic management, budget management and performance management, including maintaining consistency and synergy between all three.

In 2016, the MSAK Committee presented recommendations to the BoC relating to the OJK Strategy Map for 2016, OJK Work Plan and Budget for 2017, OJK Strategy Map for 2017, budget revisions in 2016 and Performance Appraisals in 2016.

E. Integrated Supervision Committee
The Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee was established to enhance the effectiveness, consistency, transparency and efficiency of the

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

konglomerasi keuangan maka dibentuk Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan (RKPT) ke-26, diputuskan untuk mengalihkan tugas dan fungsi Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan ke Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi (DPTI).

F. Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan
Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pengutan memiliki tugas antara lain melakukan analisis terhadap permintaan penyesuaian pungutan dari industri jasa keuangan dan merekomendasikan pemberian penyesuaian pungutan kepada pengambil keputusan sesuai kewenangan.

G. Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)
Komite ini beranggotakan pihak internal dan pihak eksternal OJK dan bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner dan/atau Anggota Dewan Komisioner mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah.

Selama 2016, KPJKS menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain perlu dipertimbangkan adanya kebijakan insentif pajak dari pemerintah kepada industri keuangan syariah Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan *review* atas aturan mengenai pemanfaatan dana *wakaf*, peningkatan kapasitas IT sehingga dapat setara dengan keuangan konvensional, serta memberi respons atas adanya potensi dana dari program *tax amnesty*. Industri keuangan syariah juga harus memberi dukungan terhadap pengembangan program studi spesifik di bidang syariah seperti ilmu kajian fiqih.

H. Komite Teknologi Informasi
Komite Teknologi Informasi dibentuk dengan tugas komite antara lain memberikan rekomendasi untuk mendukung kelancaran tugas OJK melalui integrasi SI dan TI yang handal, menjaga konsistensi pengembangan TI agar searah dengan Strategi dan Kebijakan SI dan TI OJK, dan memberikan rekomendasi mengenai penetapan prioritas proyek-proyek SI dan TI, termasuk penghentian atau penundaan proyek, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, perencanaan dan pengembangan serta pengakhiran aplikasi atau layanan SI serta memberikan rekomendasi.

decision-making process in terms of integrated risk-based supervision of financial conglomerates.

At the 26th Meeting of the Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee (RKPT), it was decided that the duties and function of the Committee would be transferred to the Integrated Supervision Work Unit (DPTI)

F. Adjustment to Mandatory Charges Committee
The Adjustment to Mandatory Charges Committee is tasked with analysing requests to adjust the charges levied against the financial services industry and recommend adjustments to assist the decision-making process.

G. Sharia Financial Services Development Committee (KPJKS)
The KPJKS Committee consists of internal and external parties and is tasked with recommending strategic and operational policy to the BoC in relation to sharia financial services development.

In 2016, the KPJKS Committee produced several recommendations, including the need to consider tax incentives from the Government for the sharia financial industry in Indonesia. In addition, a review was also required of the regulations concerning the use of waqf funds, the need to enhance IT capacity on par with the conventional financial industry, as well as providing a response to the potential inflow of funds from the tax amnesty. The Committee also confirmed that the sharia financial industry must support the development of specific studies, such as Islamic jurisprudence (Fiqih).

H. Information Technology Committee
The IT Committee was formed to offer recommendations that support OJK task continuity through reliable and integrated Information Systems (IS) and Information Technology (IT), while maintaining IT development consistency in line with the IS and IT Strategy and Policy of OJK and to offer recommendations concerning priority IS and IT projects, including the termination or postponement of projects, monitoring and evaluation, planning and development as well as the cancellation of applications and/or IS services.

IV.3 KODE ETIK

Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK memiliki kewajiban untuk mematuhi Kode Etik OJK yang diatur dalam PDK nomor: 01/017/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK sebagaimana telah diubah dua kali dengan perubahan terakhir PDK nomor 10/PDK.02/2013 tentang Kode Etik OJK.

Untuk mengawasi kepatuhan terhadap kode etik, Dewan Komisioner membentuk Komite Etik OJK yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Komite Etik OJK terdiri atas:

1. Komite Etik Level *Governance*
   Komite ini mengawasi kepatuhan anggota Dewan Komisioner terhadap Kode Etik OJK. Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level *Governance* yang berasal dari unsur profesi/ akademisi paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali.
2. Komite Etik Level Manajemen
   Komite ini bertugas mengawasi kepatuhan Pejabat dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level Manajemen tidak dibatasi.

Komite Etik menerima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang berasal dari Surat Pengaduan, Informasi dari masyarakat, dan informasi dari media massa kemudian memproses aduan tersebut sesuai dengan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.

Selain wajib mematuhi ketentuan Kode Etik OJK, seluruh Pegawai/ calon Pegawai, juga tunduk pada Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PDK.02/2013 Tentang Tata Tertib Dan Disiplin Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini merupakan ketentuan kepegawaian mengenai kewajiban dan larangan bagi Pegawai yang berupa sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan serta ucapan di dalam dan/atau di luar kantor, baik di dalam waktu kerja atau di luar waktu kerja serta pengenaan sanksi bagi Pegawai. Setiap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Pegawai OJK akan dibuktikan melalui proses klarifikasi dan/atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Sekretariat Komite Etik OJK dan akan ditindaklanjuti oleh Komite Etik Level Manajemen.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan internal untuk menjaga citra, martabat, integritas dan independensi anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK, Komite Etik

IV.3 CODE OF ETHICS

The OJK Code of Ethics represents the norms and principles of professional behaviour expected from all board members, officers and employees when executing their duties. All board members, officers and employees are required to comply with the OJK Ethics Code pursuant to BoC Regulation (PDK) No. 01/017/PDK/XII/2012, which has since been amended on two occasions, most recently by BoC Regulation (PDK) No. 10/PDK.02/2013.

Monitoring compliance to the Code, the BoC formed the OJK Ethics Committee, headed by the Vice Chairperson of the OJK BoC. The structure of the Ethics Committee is as follows:

1. Governance Level Ethics Committee
   The Committee monitors OJK board member compliance to the Code. Professionals and academics serve on the Committee for a tenure of two years, which can be extended a maximum of once.

2. Management Level Ethics Committee
   The Committee monitors compliance of OJK officers and employees to the Code. No restrictions are placed on the tenure of members of this Committee.

The Ethics Committee receives alleged violations of the Code in the form of complaint letters, information from the public and information from the mass media, which is subsequently processed in accordance with the appropriate mechanism.

In addition to compliance to the OJK Code of Ethics, all OJK employees/prospective employees are also required to adhere to BoC Regulation (PDK) No. 48/PDK.02/2013 concerning the Conduct and Discipline of OJK Employees. The regulation contains the obligations and responsibilities of all employees, including the attitudes, behaviours, actions, written and spoken conduct in and outside of the office, during and after office hours as well as the penalties that could be incurred. Any infractions will be proven through a clarification process and/or investigation, the results of which will be forwarded to the Secretariat of the Ethics Committee and followed up by the Management Level Ethics Committee.

Running the internal compliance oversight function to maintain the image, dignity, integrity and independence of the members of BoC, officers and employees in terms of executing their duties in accordance with the strategic values of the OJK organisation, the

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Level melakukan sidang sebanyak 13 kali selama 2016 dengan rincian Komite Etik Level *Governance* sebanyak lima kali dan Komite Etik Level Manajemen sebanyak delapan kali.

IV.4 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS

OJK memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka mewujudkan kredibilitasnya di mata industri jasa keuangan. Wujud komitmen tersebut tercermin dalam upaya OJK untuk terus menuju tata kelola yang baik. Implementasi *governance* OJK tidak hanya dalam rangka menjalankan amanat UU nomor 21 tahun 2011, namun juga merupakan sebuah kebutuhan agar OJK mampu mencapai tujuannya. Dalam mendorong penegakkan *governance* telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penguatan pengendalian internal di OJK dimulai dari penanganan dan pencegahan anti-fraud, pengelolaan risiko, pengendalian kualitas bisnis proses, dan pelaksanaan audit internal yang berfungsi untuk memastikan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan pengelolaan risiko atas proses bisnis yang dijalankan.

IV.4.1 Pelaksanaan *Combined Assurance* (CA)

Penerapan CA di OJK merupakan bagian dari pembangunan budaya tata kelola OJK untuk memastikan proses asurans dilakukan secara konsisten dan terukur sesuai dengan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola yang Baik di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mewujudkan budaya tata kelola, telah disusun pedoman CA yang dibangun berdasarkan lima prinsip dasar yaitu:

- Komitmen Organisasi.
  CA merupakan bentuk komitmen organisasi terhadap pembangunan budaya tata kelola dan penerapannya dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi;
- Bagian Tidak Terpisahkan dari Kegiatan Organisasi.
  CA merupakan bagian integral dari organisasi aktivitas yang tidak terpisah dari proses bisnis organisasi dan penerapannya menjadi tanggung jawab seluruh fungsi asurans;
- Menciptakan Nilai.
  CA menciptakan nilai tambah dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan asuransnya;
- Pendekatan Sistematis.
  CA menerapkan pendekatan sistematis yaitu terstruktur dan konsisten; dan
- Perbaikan Berkelanjutan.
  CA memerlukan reviu dan penyempurnaan berkesinambungan.

Ethics Committee assembled 13 times in 2016, with the Governance Level Ethics Committee assembling five times and the Management Level Ethics Committee eight times.

IV.4 INTERNAL AUDIT, RISK MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE

OJK is firmly committed to improving credibility in the eyes of the financial services industry. Such tangible commitment is reflected through OJK efforts to implement good governance. The implementation of OJK governance system is not merely executing the Act No. 21 of 2011 but also necessary for OJK to attain its goals. To promote good governance at OJK, several activities to strengthen internal control have been executed, starting from the prevention and handling of fraud to risk management, quality assurance of business processes along with internal audits to ensure the quality of OJK duties and function as well as risk management of the business processes.

IV.4.1 Combined Assurance (CA) Implementation

Combined Assurance (CA) implementation at OJK is part of developing a culture of governance to ensure the assurance process is consistent and measured in pursuance of BoC Regulation (PDK) No. 1 of 2015 concerning the Guidelines for Good Governance at OJK.

To realise a culture of governance, Combined Assurance guidelines were developed based on five fundamental principles as follows:

- Organisational Commitment
  Combined Assurance is a form of organisational commitment to the development of a culture of governance applicable to all levels of the organisation.
- Inseparable from Organisational Activities
  Combined Assurance is an integral part of all organisational activities, which is inseparable from the business processes and its implementation is the responsibility of all assurance functions.
- Creating Value
  Combined Assurance creates value added and contributes to the attainment of the organisation's goals through assurance activities.
- Systematic Approach
  Combined Assurance applies a structured and consistent systematic approach.
- Continuous Improvements
  Combined Assurance requires continuous reviews and refinements.

Pendekatan *Combined Assurance*

OJK mengembangkan model asurans terkombinasi merujuk pada pendekatan "*Three Line of Defense*". CA menekankan pada sinergi antara penyedia asurans di setiap *lines of defense* agar proses asurans dilakukan dengan lebih efisien.

Pendekatan "*Three Line of Defense*" OJK melibatkan satuan kerja dan penyedia asurans yang terbagi menjadi:

- *1st Line of Defense*
  Adalah semua Satuan Kerja pemilik dan kegiatan tata kelola, risiko, kontrol internal, dan kualitas.
- *2nd Line of Defense*
  adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi membangun kerangka kebijakan, metodologi manajemen risiko dan pengendalian kualitas; melakukan reviu dan validasi atas kegiatan tata kelola, risiko, kontrol internal, dan kualitas.
- *3rd Line of Defense*
  adalah Satuan Kerja Internal Audit yang berfungsi melakukan pemeriksaan atas kegiatan tata kelola, risiko, kontrol internal, kualitas, dan audit.

Profil risiko OJK *Wide* dan strategi asurans 2016 merupakan basis pelaksanaan CA di mana sebanyak 26 risiko telah ditetapkan sebagai profil risiko OJK yang perlu dilakukan *monitoring* secara berkala.

Pelaksanaan Reviu Kualitas

OJK dalam menjalankan proses bisnisnya menerapkan manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9001:2015. Penerapan sistem pengendalian kualitas bertujuan untuk menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan persyaratan dan harapan pemangku kepentingan OJK. Upaya untuk menjaga manajemen mutu atas *governance* OJK adalah dengan melakukan reviu kualitas.

Pelaksanaan reviu kualitas dilakukan atas tujuh tema yaitu pengaturan non konglomerasi yang selaras dan terintegrasi, pendalaman pasar, kesiapan OJK dalam rangka mendorong industri menghadapi globalisasi, pengawasan terintegrasi, pengawasan terhadap penerapan pinsip-prinsip perlindungan konsumen oleh PUJK, cakupan materi FKSSK terkait manajemen krisis dan program pengembangan SJK syariah.

IV.4.2 Penguatan *Governance*

***Whistle Blowing System* OJK**

Dalam rangka penguatan *governance* OJK, integritas pegawai harus terus dijaga. Hal tersebut perlu didukung dengan sistem pelaporan pelanggaran yaitu OJK *Whistle Blowing System* (OJK WBS). OJK WBS adalah sistem untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Internal OJK baik Anggota Dewan Komisioner, Pegawai,

Combined Assurance Approach

OJK developed a combined assurance model referring to the Three Lines of Defence approach. Combined assurance emphasises synergy between assurance providers at each line of defence to ensure greater efficiency.

The Three Lines of Defence approach, as applied by OJK, involves the following work units and assurance providers:

- 1st Line of Defence
  Includes all Work Units and the activities of governance, risk, internal control and quality assurance.
- 2nd Line of Defence
  The Risk Management Work Unit that builds policy frameworks, risk management methodologies and quality assurance; reviews and validates the activities of governance, risk, internal control and quality assurance.
- 3rd Line of Defence
  The Internal Audit Work Unit that inspects the activities of governance, risk, internal control and quality assurance.

The OJK-wide risk profile and assurance strategy for 2016 is the basis for Combined Assurance, where 26 risks have been determined as part of the OJK risk profile that must be monitored regularly.

Quality Review

As a practitioner of governance, OJK applies quality management in line with ISO 9001:2015 when implementing the business processes. Application of a quality assurance system aims to provide services that are consistent with the requirements and expectations of the stakeholders. Efforts to maintain quality management of OJK governance include quality reviews.

Quality reviews cover seven themes, namely aligned and integrated non-conglomerate regulation, market deepening, OJK preparations to help the industry face globalisation, integrated supervision, supervision of consumer protection at financial services providers, scope of materials for the Financial System Stability Coordination Forum (FSSCF) in relation to crisis management and sharia financial services sector development.

IV.4.2 Strengthening Governance

OJK Whistle Blowing System

Employee integrity must be maintained in order to strengthen governance at OJK, which requires the support of the OJK Whistle Blowing System (OJK WBS). OJK WBS is a mechanism to submit, manage and follow-up alleged infractions committed by OJK internal parties, including members of the board, employees, candidate employees and other manpower through Fixed-Term Employment

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Calon Pegawai, Tenaga Kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan/atau Tenaga Kerja *Outsourcing*. Pelaksanaan OJK WBS diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK (PDK) Nomor 33/PDK.02/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan PDK Nomor 3/PDK.02/2015 dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK (SEDK) Nomor 1/SEDK.06/2015 tentang Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di OJK. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam OJK WBS adalah:

- Korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Kecurangan (*fraud*), yaitu termasuk penipuan, penggelapan aset;
- Pencurian;
- Pembiaran melakukan pelanggaran;
- Benturan kepentingan; dan/atau
- Perbuatan melanggar hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal OJK.

Pihak Internal maupun Eksternal OJK dapat menyampaikan laporan pelanggaran kepada OJK terkait dugaan pelanggaran melalui OJK WBS baik menggunakan sarana elektronik (website: www.ojk.go.id/wbs dan e-mail: ojk.wbs@rsm.id) maupun sarana non-elektronik (PO BOX: ETIK OJK JKT 10000).

Sampai Desember 2016, OJK telah menerima 149 laporan melalui OJK WBS dengan rincian sebagai berikut:

Contracts and/or Outsourced Manpower. OJK WBS implementation is regulated pursuant to BoC Regulation (PDK) No. 33/PDK.02/2013 concerning the OJK Whistle Blowing System, as amended by BoC Regulation (PDK) No. 3/PDK.02/2015 and BoC Circular Letter (SEDK) No. 1/SEDK.06/2015 on the Whistle Blowing System at OJK. The types of infraction that can be reported through the OJK WBS are as follows:

- Corruption, collusion and nepotism;
- Fraud, including deceit, misappropriation of assets and information leaks;
- Theft;
- Failure to report an infraction;
- Conflicts of interest; and/or
- Violations of prevailing laws, regulations and internal rules.

Internal and external parties may report suspected violations to OJK through the OJK Whistle Blowing System electronically through the OJK website (www.ojk.go.id/wbs) and by email (ojk.wbs@rsm.id) as well as non-electronically by post (PO Box: ETIK OJK JKT 1000).

As of December 2016, OJK had received 149 reports of complaints through the OJK WBS as follows:

Statistik Laporan OJK WBS
OJK WBS Report Statistics

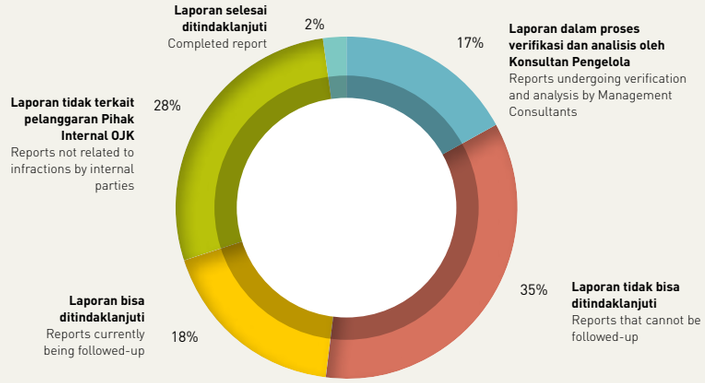

OJK juga melaksanakan survei persepsi *stakeholders* di 2016 yang bertujuan untuk mengetahui pandangan pemangku kepentingan atas pengelolaan OJK WBS. Parameter dalam survei ini dijadikan tolak ukur efektivitas pengelolaan dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap OJK. Responden survei ini adalah pemangku kepentingan OJK, seperti Asosiasi Lembaga Keuangan, Pihak Internal OJK, Kementerian/Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan OJK lainnya. Adapun hasil survei ini, antara lain:

a. 93% responden sudah mengetahui OJK memiliki WBS
b. 99,4% responden mendukung WBS OJK sedangkan 0,6% responden tidak mendukung.
c. 95% responden menyatakan bahwa bila mereka mengetahui ada insan OJK melakukan pelanggaran, mereka mau melaporkannya melalui WBS OJK.

OJK also conducted a perception survey of the stakeholders in 2016 to gauge the stakeholders' opinions regarding OJK WBS management. The survey parameters were subsequently applied as benchmarks concerning management effectiveness and the confidence level of the OJK stakeholders, such as Financial Institution Associations, OJK Internal Parties, Government Ministries/Institutions, Financial Services Institutions and other OJK stakeholders. The results of the survey are summarised as follows:

a. 93% of respondents were already aware that OJK has a Whistle Blowing System.
b. 99.4% of respondents supported the whistle Blowing System, while 0.6% did not.
c. 95% of respondents confirmed that they would report infractions to the OJK Whistle Blowing System

Program Pengendalian Gratifikasi OJK (PPG OJK)

OJK telah melakukan pengelolaan PPG sejak akhir 2015. Sampai akhir 2016, jumlah laporan penolakan dan penerimaan gratifikasi yang dikelola oleh UPG OJK sebanyak 212 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Gratification Control Program (OJK GCP)

OJK has implemented a Gratification Control Program (GCP) since the end of 2015. By the end of 2016, a total of 212 reports of rejecting and accepting gratification had been submitted to the program as follows:

Jumlah Laporan PPG selama 2016
The Number of PPG Reports in 2016

Tahun Year	Jumlah Laporan Total Reports		Total Laporan Total Reports
	Penolakan Rejections	Penerimaan Acceptances	
2015	0 Laporan | reports	8 Laporan | reports	8 Laporan | reports
2016	11 Laporan | reports	193 Laporan | reports	204 Laporan | reports
Total	11 Laporan | reports	201 Laporan | reports	212 Laporan | reports

Laporan gratifikasi disampaikan oleh Insan OJK dari berbagai level jabatan, baik dari kantor pusat maupun KR/KOJK. Pelaporan gratifikasi berdasarkan level jabatan didominasi oleh Kepala Bagian dan Deputi Direktur. Berdasarkan satuan kerja pelaporan gratifikasi didominasi oleh Kantor OJK dan Perbankan.

Gratification reports were submitted by various levels of human resources, from head office and regional offices. Most reports were submitted by department heads and deputy directors, while gratification reports were dominated by OJK offices and the banking industry.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Penerimaan Penghargaan Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2016 untuk kategori Kementerian dan Lembaga

OJK berhasil mendapatkan penghargaan dari KPK untuk Penghargaan Pengendalian Gratifikasi Terbaik 2016 untuk kategori Kementerian dan Lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penghargaan ini membuktikan bahwa OJK bersungguh-sungguh dalam menerapkan budaya OJK Anti-Gratifikasi.

Presentation of the Best Gratification Control Award 2016 for Government Ministries and Institutions

OJK was presented with an award by the Corruption Eradication Commission (KPK) for Best Gratification Control 2016 for a Government Ministry or Institution. The award demonstrates OJK's avowed commitment to a culture of Anti-Gratification.

Sistem Pengendalian Internal OJK dan *Control Self Assessment*

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Selama 2016 OJK melaksanakan *Control Self Assessment* (CSA). CSA merupakan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja atau Unit Kerja baik di Kantor Pusat maupun KR/KOJK untuk menilai efektivitas Pengendalian Internal yang dilakukan di Satuan Kerja atau Unit Kerjanya. Penilaian dilakukan secara mandiri berdasarkan kriteria dari komponen pengendalian internal COSO 2013, antara lain Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Kontrol, Informasi dan Komunikasi serta Aktivitas Pemantauan.

OJK Internal Control System and Control Self Assessment

In 2016, OJK conducted Control Self-Assessments (CSA) to support the Internal Control System (ICS). CSA is an assessment mechanism implemented by the heads of work units at head office and regional offices to assess the effectiveness of Internal Control in the Work Units. The assessments are performed independently based on the criteria from components of the COSO Internal Control 2013 framework, which covers Environmental Control, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication as well as Monitoring Activities.

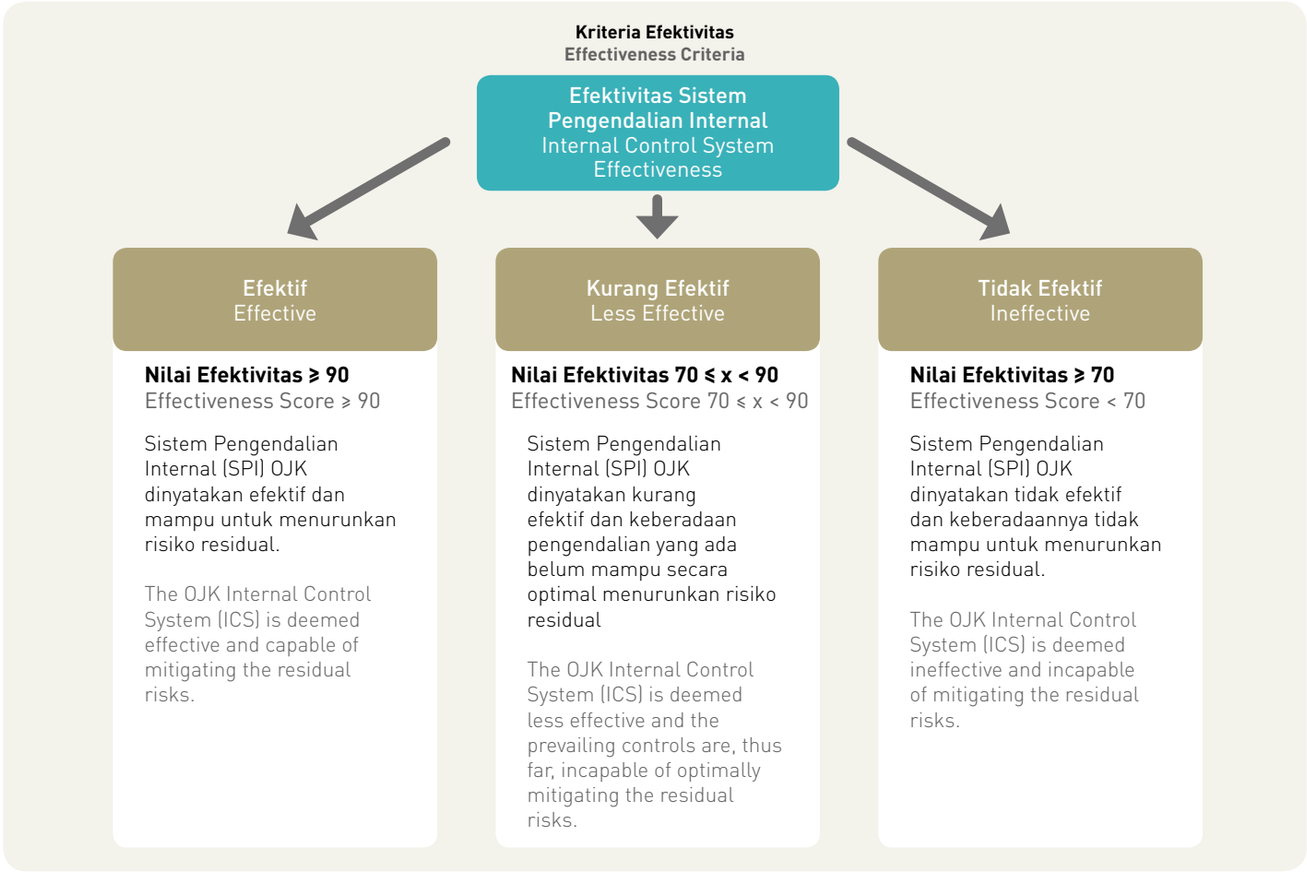

Hasil penilaian menunjukkan tingkat efektivitas pengendalian internal di OJK mendapatkan nilai 84,74. *Self Assessment* yang dilakukan oleh masing-masing *risk owner* kemudian akan diverifikasi oleh audit internal.

The assessments revealed an effectiveness score of 84.74 at OJK. The self-assessments conducted by each respective risk owner were subsequently verified by an internal audit.

Risk Governance Summit (RGS) 2016

RGS 2016 merupakan *event* tahunan yang dikemas dalam bentuk *workshop* yang mengundang perwakilan mahasiswa terbaik di Jakarta. Tema yang diusung dalam acara tersebut adalah Menyemai *governance* kaum muda. Pelaksanaan acara inti RGS 2016 mengambil tema "*Ethical Governance: The Soul of Sustainability*". Tema ini dipilih untuk meningkatkan kesadaran bersama bahwa penerapan *Good Governance* akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga nilai etik.

Risk and Governance Summit (RGS) 2016

The Risk and Governance Summit (RGS) is an annual event presented as a workshop to which the best college students are invited. The general theme of the workshops is sowing the seed of governance among the youth. In 2016, the theme was "Ethical Governance: The Soul of Sustainability", which was chosen to raise awareness that Good Governance is determined by the ability to maintain ethical values.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

***Audit Surveillance* ISO 9001: 2015**

Sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi asurans di OJK, kualitas *governance* OJK senantiasa diawasi oleh para pemangku kepentingan, baik internal OJK maupun eksternal OJK. Oleh karena itu diperlukan Sistem Pengendalian Kualitas yang andal demi memperkuat *governance* OJK sehingga kredibilitas OJK di mata industri jasa keuangan semakin baik.

Pada tahun 2015 dilaksanakan sertifikasi ISO 9001. Adapun bisnis proses di OJK yang telah disertifikasi adalah WBS, pengendalian kualitas, manajemen risiko dan audit internal. Sebagai bentuk evaluasi atas sertifikasi ISO 9001, dilakukan *audit surveillance* ISO 9001:2015 yang dilakukan di tahun 2015. Berdasarkan hasil audit tersebut yang dinyatakan lulus standar ISO 9001 adalah internal audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan WBS.

IV.5 MANAJEMEN STRATEGI, ANGGARAN DAN KINERJA

IV.5.1 Perencanaan Strategis

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No 11 tahun 2011, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien, OJK mengembangkan Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yaitu sistem perencanaan yang mengaitkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. Sistem MSAK menjadi acuan dalam mengatur proses formulasi strategi, penyelarasan alokasi sumber daya, *monitoring* pelaksanaan hingga evaluasi keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Proses tersebut dijabarkan dalam empat siklus sebagai berikut:

Surveillance Audit ISO 9001:2015

As the work unit performs the assurance function at OJK, the quality of governance is always supervised by internal and external stakeholders. Therefore, a reliable Quality Assurance system is required to strengthen OJK governance, thus improving OJK credibility in the eyes of the financial services industry.

ISO 9001 certification was implemented in 2015 and, thus far, the business processes with ISO 9001 accreditation include the Whistle Blowing System, quality control, risk management and the internal audit. An ISO 9001:2015 Surveillance Audit was conducted in 2015 to evaluate ISO 9001 certification, with the internal audit, risk management, quality control and the WBS all passing the ISO 9001 standard.

IV.5 STRATEGIC, BUDGET AND PERFORMANCE MANAGEMENT

IV.5.1 Strategic Planning

In accordance with Article 4, Act No. 11 of 2011, the OJK was established to ensure all financial services sector activities are measured, transparent and accountable; able to realise sustainable and stable financial system growth; and protect the interests of consumers and the public. To ensure the effective and efficient achievement of those goals, OJK developed a Strategic, Budget and Performance Management System (MSAK), namely a planning system that ties together formulation of the Proposed Work Plan and Budget with strategy implementation and OJK performance appraisals. The MSAK system is used as a reference to regulate the strategy formulation process, synergise the allocation of resources, monitor implementation and evaluate attainment of the strategic targets. The process can be described as four cycles as follows:

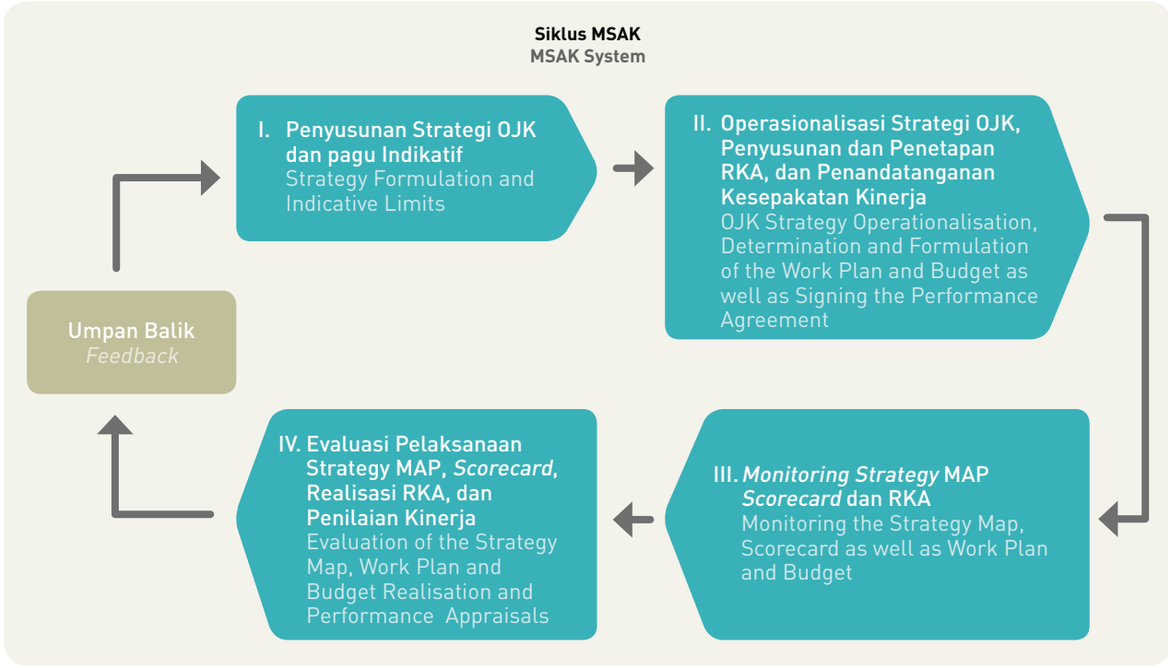

Selama 2016, OJK menetapkan Peta Strategi beserta Indikator Kinerja Utama. Penyusunan peta strategi tersebut mempertimbangkan beberapa aspek antara lain dukungan terhadap program ekonomi pemerintah, *Destination Statement* OJK 2017, hasil *Focus Group Discussion* dengan pemangku kepentingan serta hasil survei persepsi kinerja.

Penajaman Peta Strategi 2016 difokuskan pada upaya optimalisasi peran OJK dalam pembangunan sektor prioritas, peningkatan daya tahan SJK dalam mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta pemerataan pembangunan.

In 2016, OJK set the Strategy Map along with Key Performance Indicators, paying due consideration to several aspects, including support for the government's economic program, the OJK Destination Statement for 2017, the results of Focus Group Discussions (FGD) with stakeholders as well as the results of the performance perception survey.

The 2016 Strategy Map was honed with a focus on optimising OJK's role in terms of priority sector development, enhancing financial services sector resilience in order to create economic stability and support sustainable development, optimising the role of the financial services sector to expand financial access and improve financial independence of the public, as well as ensuring equitable development.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Peta Strategi 2016
Strategy Map 2016

IV.5.2 Perencanaan Sumber Daya

Selama 2016, OJK mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang mengatur perencanaan sumber daya, di antaranya fungsi perencanaan organisasi, perencanaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, strategi dan pengembangan sistem informasi, perencanaan logistik dan fungsi perencanaan keuangan. Selama 2016, telah dilaksanakan Forum Sumber Daya sebanyak dua kali. Hasil dari rapat koordinasi telah disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner dan data yang diperoleh dari rapat tersebut menjadi dasar penyusunan Buku Perencanaan Sumber Daya OJK 2016.

IV.5.2 Resources Planning

Throughout 2016, OJK coordinated the functions that manage resources planning, including human resources planning, human resources development, information systems strategy and development, logistics planning and financial planning. The Resources Forum was held twice in 2016, the outcome of which has been submitted to the Chairman of the Board of Commissioners and the data and information obtained from the meeting was used as the basis for preparing the OJK Human Resources Planning Book 2016.

IV.5.3 Pengelolaan Kinerja Organisasi 2016

Untuk memastikan bahwa setiap Sasaran Strategis OJK dapat tercapai, OJK telah memiliki mekanisme pengelolaan kinerja yang melibatkan Satuan Kerja yang diwakili oleh Manajer IKU dan Anggaran (MIA). Selama 2016, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kinerja, OJK menyelenggarakan *capacity building* untuk MIA dan pendampingan dalam melakukan *cascading* IKU ke level Satker, baik di kantor pusat maupun daerah. Selain itu OJK juga telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK yang dikaitkan dengan Indikator Kinerja Pegawai (IKI). Dengan *alignment* ini, diharapkan terjadi keselarasan antara apa yang menjadi target organisasi dengan target individu masing-masing pegawai melalui kontribusi IKU OJK pada IKI pegawai

IV.5.3 Organisation Performance 2016

To ensure that each OJK Strategic Target is met, OJK has put in place a performance management mechanism involving Work Units represented by KPI and budget managers. In 2016, to enhance performance management quality, OJK organised capacity building for KPI and budget managers (MIA) as well as mentoring by cascading KPI to the work unit level at head and regional offices. In addition, OJK has also developed the OJK Performance Management System (SIMPEL) that is linked to Employee Performance Indicators (EPI). Such alignment is expected to synergise organisational and individual targets through the contribution of KPI and EPI.

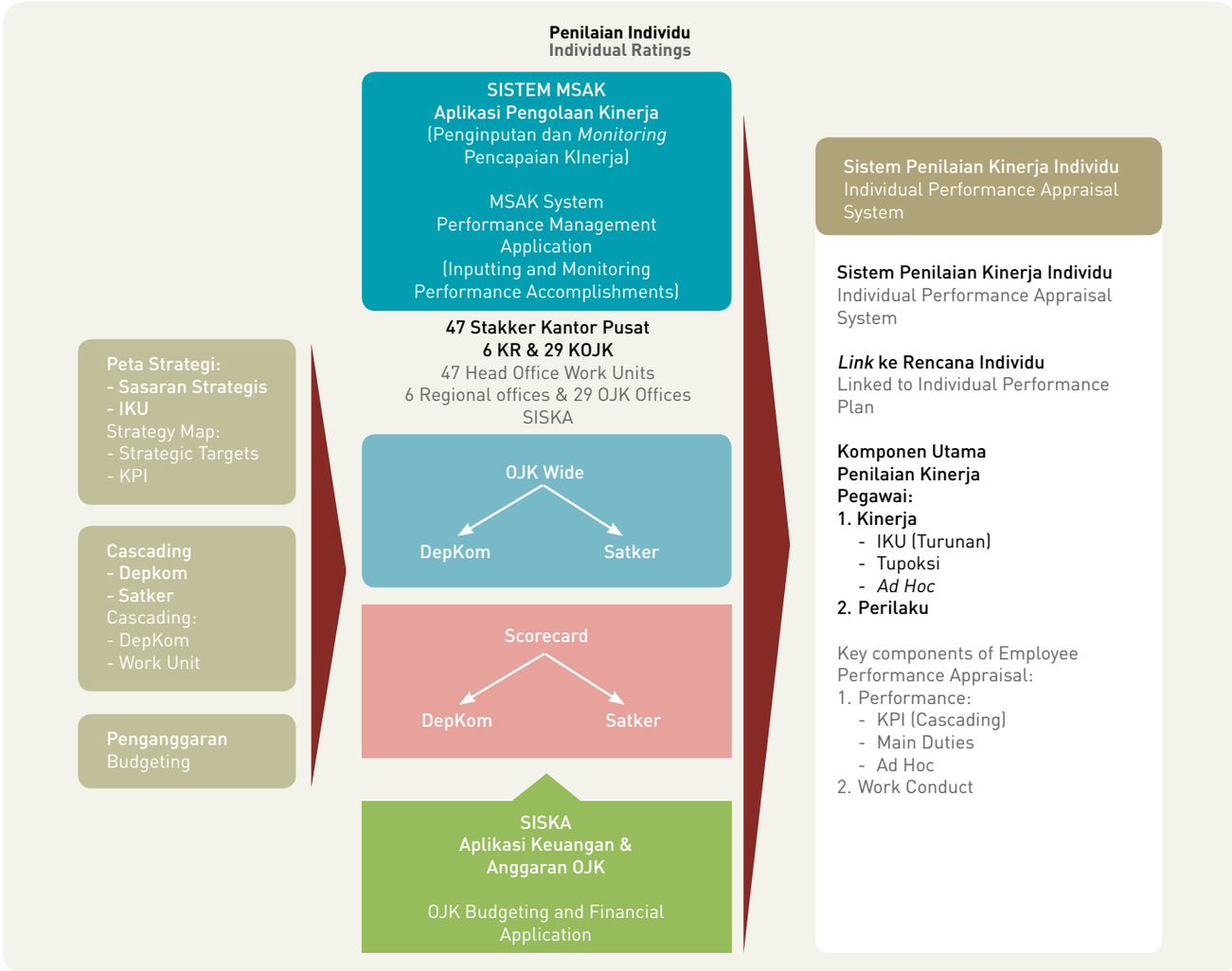

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Berdasarkan evaluasi kinerja pencapaian kinerja organisasi, Nilai kinerja OJK Wide 2016 adalah 105,07% atau lebih dari target yang ditetapkan. Nilai Kinerja ini lebih tinggi dari nilai kinerja 2015 yang sebesar 104,68%

Based on an assessment of organisation performance, the OJK-wide performance index stood at 105.07% in 2016, surpassing the target and the 104.68% achieved in 2015.

IV.5.4 Realisasi Anggaran dan Kebijakan Tata Kelola Keuangan

IV.5.4 Budget Realisation and Finance Management Policy

Sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dari keseluruhan anggaran OJK 2015, 53,65% berasal dari pungutan yaitu sebesar Rp2.020 miliar dan 46,35% berasal dari APBN yaitu sebesar Rp1.745 miliar. Pada 2016, anggaran OJK sebesar Rp3.938 miliar seluruhnya berasal dari pungutan.

In accordance with Article 34, Act Number 11 of 2011, OJK budget sources are from the State Budget and/or levies from parties carrying on activities in the financial services sector. Concerning OJK financing sources in 2015, a total of 53.65% originated from levies, to the tune of Rp2,020 billion, and 46.35% from the state budget, amounting to Rp1,745 billion. In 2016, however, the total OJK budget of Rp3,938 billion originated in full from levies.

Realisasi anggaran OJK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi anggaran 2013 mencapai 63,62% dan meningkat menjadi 82,72% di 2014. Realisasi anggaran 2016 mencapai 99,86%, meningkat realisasi dari 2015 sebesar 95,81%.

OJK budget realisation has increased annualy. From 2013 to 2014, budget realisation had increased from 63,62% to 82,72%. In 2016, budget realisation was recorded at 99.86%, up from 95.81% in 2015.

Realisasi Anggaran 2016
Budget Realisation 2016

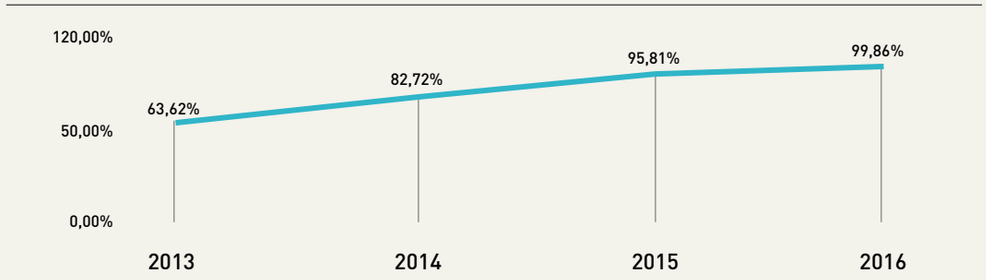

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan OJK yang akuntabel, efektif, dan efisien, telah dilakukan beberapa program kerja strategis antara lain Pengelolaan Pajak (*Tax Planning*), Pembangunan Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi OJK, Penyempurnaan Sistem Informasi Penerimaan Pungutan, Implementasi *Performance Based Budgeting*, Peningkatan fungsi *financial control*, serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan kepada seluruh pelaksana anggaran di lingkungan OJK.

Supporting accountable, effective and efficient financial management at OJK, several strategic work programs have been rolled out, including Tax Planning, development of the Integrated OJK Financial Application System, refining the Levy Receipt Information System, implementation of Performance-Based Budgeting, improvement of the financial control function as well as technical guidance concerning financial management for all budget officers at OJK.

IV.5.5 Survei Kinerja OJK (Eksternal dan Internal)

Dalam melakukan asesmen terhadap pencapaiannya, OJK juga mempertimbangkan persepsi pemangku kepentingan atas kinerjanya. Selama 2016, OJK menyelenggarakan survei persepsi kinerja terhadap 1.666 pemangku kepentingan sektor jasa keuangan di 35 Kota dan *Focus Group Discussion* (FGD) di 34 kota.

Survei tersebut dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dan mendapatkan masukan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK, dalam hal pengaturan, pengawasan, perizinan, perlindungan konsumen, dan kinerja Edukasi Literasi Keuangan. Hasil survei menunjukkan indeks kinerja OJK 2016 meningkat menjadi 4,52 dari sebelumnya 4,43 (2015).

IV.6 KOMUNIKASI

OJK di Media Cetak dan Media Sosial

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi OJK untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi dan edukasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, termasuk *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter, Facebook, Flickr, Youtube, Linkedin, Paperli,* dan *Flipboard*. Publikasi yang disampaikan antara lain berupa siaran pers, konferensi pers, laporan perkembangan industri keuangan terkini, regulasi, statistik, dan kegiatan OJK.

Sejalan dengan publikasi tersebut, selama 2016, terdapat 18.725 pemberitan OJK di media cetak, televisi, dan media *online*. Dari jumlah tersebut, *tone* media sebagian besar bersifat positif, dengan proporsi positif sebesar 54%, netral 46%, dan negatif kurang dari 1%.

IV.5.5 OJK Performance Survey (External and Internal)

OJK also takes stakeholder perception into consideration when assessing its achievements. In 2016, OJK conducted a performance perspective survey involving 1,666 stakeholders engaged in the financial services sector located in 35 cities as well as through Focus Group Discussions (FGD) held in 34 cities.

The survey aimed to measure stakeholder satisfaction, while simultaneously collecting inputs concerning OJK performance in terms of regulation, supervision, licensing, consumer protection and Financial Literacy Education performance. The survey revealed a performance index of 4.52 in 2016, improving from 4.43 in 2015.

IV.6 COMMUNICATION

OJK at Print Media and Social Media

In pursuance of the vision and mission to stimulate sound financial industry growth, OJK blends communication and education activities through print and electronic media, including the official OJK website and social media platforms, such as Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, LinkedIn, Paper.li and Flipboard, in the form of press releases, press conferences, up-to-date financial industry development reports, regulations, statistics and OJK activities.

In 2016, OJK featured in 18,725 reports in the print media, on television and online, of which the tone was mainly positive (54%), while 46% was neutral and less than 1% was negative.

Persebaran Berita berdasarkan *Tone*
News Reports based on Tone

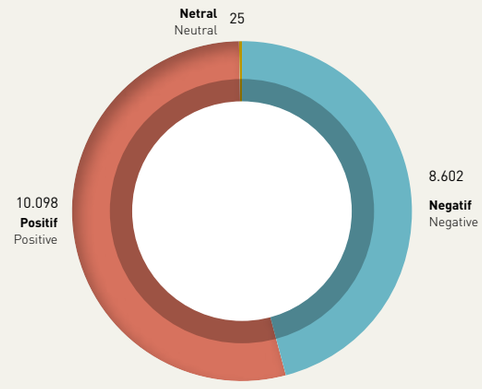

Persebaran Berita berdasarkan Jenis Media
News Reports based on Media Type

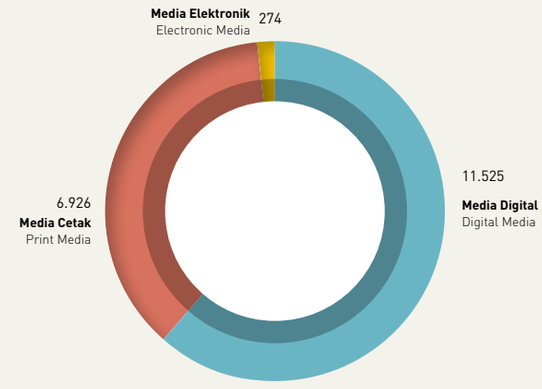

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Sementara, untuk media *online* jumlah halaman situs *website* OJK (www.ojk.go.id) yang dikunjungi selama 2016 sebanyak 9.332.334 *pageviews* atau meningkat 45% dari tahun sebelumnya. Dari sisi media sosial, jumlah *followers* akun *Twitter* OJK tercatat sebanyak 24.K *followers*, 3K *likes* pada akun *Facebook* OJK, 8K *followers* pada akun *Instagram*, serta 215K views pada *channel Youtube*.

In terms of online media, the official OJK website (www.ojk.go.id) received 9,332,334 page views in 2016, increasing 45% on the previous year. Concerning social media platforms, the OJK Twitter account has a total of 24K followers, while the Facebook page has accrued 3K likes. The OJK Instagram account has amassed 8K followers and the OJK YouTube Channel has received 215K views.

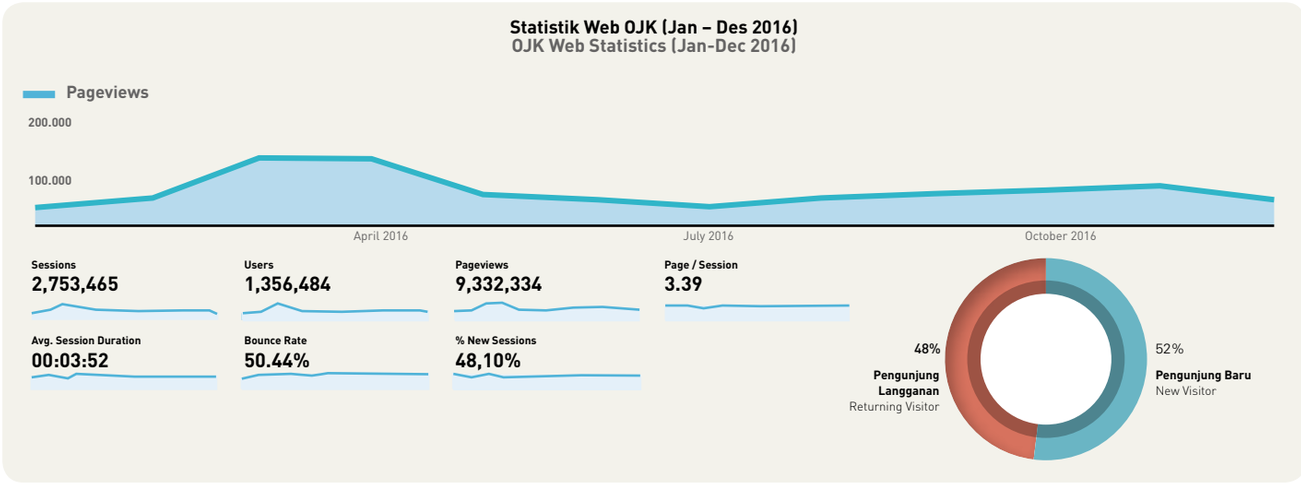

Media *Briefing* dan Siaran Pers

Dalam penyampaian informasi melalui media massa, OJK telah menerbitkan 137 siaran pers dan menyelenggarakan 41 konferensi pers dan media *briefing* selama tahun 2016. Materi siaran pers tersebut selengkapnya dapat diunduh di *website* OJK. OJK juga secara rutin mendiskusikan perkembangan industri jasa keuangan dan kebijakan OJK terkini kepada kalangan media massa melalui pertemuan dengan pemimpin redaksi dan redaksi media massa berskala nasional.

Media Briefings and Press Releases

Delivering information to the mass media, OJK issued 137 press releases in 2016, while also holding 41 press conferences and media briefings. Furthermore, the press releases were also uploaded in full to the OJK website. Moreover, OJK also routinely discussed the latest financial services industry developments and OJK policy with members of the national mass media through regular meetings with editors.

Kunjungan perguruan tinggi/instansi

Selama 2016, terdapat 43 kunjungan perguruan tinggi/instansi atau sekitar 3.895 orang melakukan kunjungan ke OJK. Dari jumlah tersebut mayoritas berasal dari pulau Jawa (94%) dan merupakan mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. Materi yang disampaikan beragam mulai dari OJK *Wide*, sampai per bidang industri jasa keuangan.

University and Institution Visits

In 2016, OJK received 43 visits from universities and institutions totalling approximately 3,895 visitors. Most visitors originated from Java (94%) and were students from private universities. Various materials were presented, from OJK-wide materials to industry-specific content.

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR

Dalam rangka pembuatan kebijakan strategis, OJK secara aktif mengadakan beberapa koordinasi antar lembaga, khususnya dengan DPR RI. Selama 2016, OJK menyelenggarakan serangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana berikut:

Meetings and Hearings with the People's Representative Council (DPR)

When formulating strategic policy, OJK actively coordinates with the People's Representative Council (DPR) of the Republic of Indonesia. In 2016, OJK organised a series of meetings as follows:

a. Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI sebanyak empat kali antara lain:

a. Four meetings with Commission XI of the DPR as follows

No	Tanggal Date	Keterangan Description
1	28/11/2016	1. Pengantara anggaran OJK | OJK Budget 2. Pembahasan masalah industri keuangan | Discussions on financial industry issues
2	05/12/2016	Pembahasan penerimaan anggaran OJK tahun 2017 | Discussions on OJK budget revenues for 2017
3	08/12/2016	Pembahasan pengeluaran anggaran OJK tahun 2017 | Discussions on OJK budget expenditures for 2017
4	14/12/2016	Pengambil keputusan anggaran OJK tahun 2017 | OJK Budget 2017 decision-making

b. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI sebanyak tiga) kali, antara lain:

b. Three hearings with Commission XI of the DPR as follows:

No	Tanggal Date	Keterangan Description
1	07/06/2016	Pembahasan daftar inventaris masalah RUU tentang pengampunan pajak | Discussions on inventory issues for the tax amnesty draft bill
2	20/07/2016	Kesiapan tindak lanjut pelaksanaan UU pengampunan pajak | Preparations of follow-up actions concerning tax amnesty implementation
3	29/09/2016	Masukan dalam rangka pemantauan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan | Inputs regarding implementation of Act No. 1 of 2016 on guarantees

Selain rapat tersebut, dalam rangka pengawasan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, OJK bersama dengan Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan, BI, LPS, Pemerintah Provinsi dan Industri Jasa Keuangan telah melakukan 43 kegiatan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

In addition to the aforementioned meetings, in conjunction with Commission XI of the DPR, Ministry of Finance, Bank Indonesia, Deposit Insurance Corporation (LPS), regional administrations and the financial services industry, OJK also undertook 43 work visits in various regions to oversee regional economic growth.

OJK TV

OJK TV merupakan satu media informasi baru OJK yang mendokumentasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang dikemas dalam bentuk video dokumentasi dan peliputan berita (*news video*) yang didiseminasikan melalui *Channel Youtube* Jasa Keuangan. Kebutuhan dokumentasi dan peliputan ini muncul seiring dengan banyaknya kegiatan OJK yang melibatkan pihak eksternal dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner, sehingga diperlukan bentuk dokumentasi visual dan metode komunikasi yang lebih formal.

OJK TV

OJK TV is a new form of media that documents various OJK policies, programs and activities, packaged as news videos and documentaries disseminated through the Financial Services Youtube channel. The need for such media emerged in line with the proliferation of OJK activities that involve external parties and are attended by members of the Board of Commissioners, thus requiring more formal visual documentation and communication methods.

Sejak dibentuk pada awal 2016, liputan OJK TV telah disaksikan oleh lebih dari 105.000 *viewers* melalui Kanal Youtube Jasa Keuangan. Terbentuknya OJK TV dapat meningkatkan sarana media komunikasi mengenai program dan kebijakan OJK yang strategis kepada masyarakat dan internal OJK, serta untuk mendokumentasikan setiap kegiatan penting OJK *wide*.

Since the channel began in 2016, OJK TV reports have been viewed by more than 105,000 viewers through the Financial Services Channel. Furthermore, OJK TV has expanded the means by which communication media can be delivered concerning strategic OJK policies and programs to the public as well as OJK employees and stakeholders, as well as to document the salient OJK-wide activities.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

IV.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

IV.7.1 Kerjasama Domestik

Pada Sektor Jasa Keuangan (SJK), koordinasi dalam hubungan kelembagaan merupakan kunci utama untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, *sustainable*, dan stabil. OJK melakukan koordinasi dan bekerjasama aktif dengan berbagai institusi negara dan pemerintah, lembaga dan organisasi, serta komponen masyarakat di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dengan tujuan memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK guna melindungi kepentingan masyarakat luas. Beberapa kerjasama yang dilaksanakan selama 2016 antara lain sebagai berikut:

IV.7 INSTITUTIONAL RELATIONSHIPS

IV.7.1 Domestic Cooperation

In the financial services sector, coordination through institutional relationships are the key to realising sound, sustainable and stable financial system growth. OJK actively coordinates and cooperates with various state apparatus and the government, institutions and organisations, as well as elements of the public to support task implementation, which aims to strengthen and enhance OJK's role in terms of regulating and supervising the financial services sector in order to protect the wider public interest. Some of the coordination and cooperation undertaken in 2016 was as follows:

No.	Kerjasama Domestik Domestic Cooperation	Ringkasan Kerjasama Summary
1.	Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai program Percepatan Pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan dan Konservasi Energi melalui Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan. Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) concerning the Program to Accelerate the Development of New Energy, Renewable Energy and Energy Conservation by Expanding the Role of financial services institutions.	Pelaksanaan koordinasi teknis dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi yang antara lain : a. Melakukan pertukaran informasi dan data; b. Mengkoordinasikan badan usaha dan pengelola yang bergerak di bidang Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Lembaga Jasa Keuangan; c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi; dan Implement technical coordination in order to expand the role of financial services institutions in the development of new energy, renewable energy and energy conservation, including: a. Exchange data and information; b. Coordinate businesses and managers engaged in new energy, renewable energy and energy conservation with financial services institutions; c. Provide education and socialisation activities.
2.	Nota Kesepahaman antara BI, MA dan OJK mengenai Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim. Memorandum of Understanding (MoU) between Bank Indonesia, MA and OJK on Strengthening Coordination and Cooperation to Improve Judiciary Insight.	Kerjasama untuk saling bertukar informasi, sosialisasi dan fasilitasi terkait aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun OJK. Koordinasi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan temu wicara kepada para hakim. Cooperate to mutually exchange information, provide socialisation activities and facilitate legal aspects related to task implementation at Bank Indonesia and OJK. Coordination and cooperation are realised through training activities and dialogue with judges.
3.	Nota Kesepahaman OJK dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai Kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and Nahdlatul Ulama regarding coordinated financial services sector development, increasing financial literacy and sharia microfinance institution development.	Pelaksanaan koordinasi teknis yang meliputi: a. Sosialisasi dan literasi produk dan layanan keuangan; b. Peningkatan akses dan distribusi produk-produk keuangan; c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan; d. Asistensi perizinan LKM syariah; dan e. Pengembangan jasa keuangan syariah. The technical coordination includes: a. Socialisation and literacy for financial products and services; b. Expanding access and improving distribution of financial products; c. Enhancing HR capacity in the financial services sector; d. Assisting the licensing of sharia microfinance institutions; and e. Developing sharia financial services.
4.	Nota Kesepahaman OJK dengan KPK mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Jasa Keuangan. Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Corruption Eradication Commission (KPK) concerning the Eradication of Corruption in the Financial Services Sector.	Pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, meliputi Pertukaran data dan/atau informasi, kerjasama dalam penerapan program pencegahan tindak pidana korupsi serta bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing, dan bantuan OJK sebagai ahli dalam Penanganan perkara tindak Pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Task implementation and the jurisdiction of each respective institution is in accordance with prevailing laws, including data and/or information exchange, cooperation to eradicate corruption as well as providing speakers for bilateral and unilateral activities as well as assigning experts to cases of corruption in the financial services sector.
5	Nota Kesepahaman OJK dengan Satgas Waspada Investasi Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Investment Watchdog	Tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi Concerning the coordinated prevention and handling of alleged illegal activity in terms of public fund accumulation and investment management

No.	Kerjasama Domestik Domestic Cooperation	Ringkasan Kerjasama Summary
6.	Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Koperasi dan UKM Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Ministry of Cooperatives and SMEs	Tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan: a. Koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan kapasitas dan akses keuangan pada sektor UMKM dan kerjasama antara Lembaga Jasa Keuangan dengan Koperasi; b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; c. Penyediaan layanan data dan tukar menukar informasi; d. Penelitian dan pengembangan; e. Sosialisasi dan edukasi; Concerning the coordinated prevention and handling of alleged illegal activity in terms of public fund accumulation and investment management. The scope of the MoU is as follows: a. Policy coordination to build capacity and expand financial access to the MSME sector as well as cooperation between Financial Services Institutions and Cooperatives; b. Enhance HR capacity and competence; c. Provide data services and exchange information; d. Research and development; e. Socialisation and education.
7.	OJK dan BNN Jalin Kerjasama Edukasi Keuangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika OJK and BNN cooperation for Financial Education and the Prevention of Narcotics Abuse	a. Koordinasi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika; b. Peningkatan literasi dan edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan dan narkotika; a. Policy coordination to improve financial literacy and education as well as prevent the abuse of narcotics; b. Improve financial literacy and education well as prevent the abuse of narcotics.
8.	UNDP Gandeng OJK Dukung Pencapaian SDGs di Indonesia UNDP Cooperation with OJK to Support Attainment of the SDGs in Indonesia	*The United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia menjalin kerjasama dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia melalui peningkatan peran lembaga jasa keuangan. The United Nations Development Programme (UNDP) in Indonesia cooperates to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia by expanding the role of financial services institutions.
9.	OJK dan BPS Menyepakati Kerjasama di Bidang Statistik dan Jasa Keuangan OJK and BPS-Statistics Indonesia agreed Cooperation in terms of Statistics and Financial Services	a Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan informasi. b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang statistik dan jasa keuangan. c. Sosialisasi dan edukasi sesuai tugas dan fungsi para pihak. d. Penelitian dan Pengembangan dalam bidang statistik dan jasa keuangan. a. Providing, exchanging and utilising data and information; b. Improving HR competences in terms of statistics and financial services; c. Providing socialisation and education activities in accordance with the duties and functions of each respective party; d. Conducting research and development in terms of statistics and financial services

IV.7.2 Kerjasama Internasional

Penandatanganan MoU OJK dengan Lembaga Internasional
Selama 2016, OJK melakukan penandatangan delapan MoU dengan lembaga internasional antara lain sebagai berikut:

a. *Banco Central de Timor Leste* (BCTL);
b. *Bank of Thailand*;
c. *State of Victoria Goverment*;
d. *Autralian Centre for Financial Studies Monash University*;
e. *Taiwan Financial Supervisory Commision*;
f. *Central Bank of Republic China*;
g. *Bank Negara Malaysia*;
h. *The Risk Management Economic Sustainability and Actuarial Science Development in Indonesia Project by the Government of Canada* (READI);
i. *United Nations Development Programme* (UNDP);
j. *Astana International Financial Centre* (AIFC) – Kazakhstan

IV.7.2 International Cooperation

Memorandums of Understanding (MoU) Signed between OJK and International Institutions
In 2016, OJK signed eight Memorandums of Understanding (MoU) with international institutions as follows:

a. Banco Central de Timor Leste (BCTL);
b. Bank of Thailand;
c. State Government of Victoria;
d. Australian Centre for Financial Studies, Monash University;
e. Taiwan Financial Supervisory Commission;
f. People's Bank of China (PBoC);
g. Bank Negara Malaysia;
h. The Risk Management Economic Sustainability and Actuarial Science Development in Indonesia Project by the Government of Canada (READI);
i. United Nations Development Programme (UNDP);
j. Astana International Financial Centre (AIFC) – Kazakhstan.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Kerjasama Regional
Pada kawasan ASEAN, OJK berpartisipasi aktif dalam penyusunan Protokol tujuh dalam Implementasi Komitmen Sektor Jasa Keuangan ASEAN (ASEAN Framework Agreement on Services), di mana terdapat peningkatan komitmen Indonesia, khususnya pada industri perasuransian.

Keanggotaan OJK di Forum/Lembaga/Organisasi Internasional
Sampai akhir 2016, OJK telah menjadi anggota pada 10 organisasi internasional antara lain:
a. *International Financial Reporting Standar* (IFRS);
b. *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO);
c. *International Capital Market Association* (ICMA);
d. *Islamic Financial Services Board* (IFSB);
e. *International Islamic Financial Market* (IIFM);
f. *International Associations of Insurance Supervisors* (IAIS);
g. *International Organizations of Pension Supervisors* (IOPS);
h. *The ASEAN Insurance Training and Research Institute* (AITRI);
i. *International Financial Consumer Protection* (FINCONET);
j. *International Network on Financial Education* (INFE).

Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dengan Lembaga Internasional
Selama 2016, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional antara lain:
a. Pembentukan OJK PROKSI - Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi
   OJK meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK PROKSI) sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia. OJK PROKSI akan mengembangkan pengetahuan dan terobosan model bisnis di bidang keuangan mikro dan inklusi keuangan yang implementatif dan dapat digunakan baik oleh para pelaku industri, ahli keuangan, akademisi, dan komunitas global.

b. *Workshop* Internasional Pengawasan Terintegrasi - kerjasama antara OJK, APRA, AIPEG, dan Toronto Center,
   OJK bekerja sama dengan APRA, AIPEG dan Toronto Center menyelenggarakan program pelatihan pengawasan terintegrasi yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan APRA dan OJK pada tahun sebelumnya.

c. Seminar *Islamic Finance Fintech* di Tokyo, Jepang
   Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan pada sektor pariwisata, energi, industri kreatif, dan berbagai sektor lainnya. OJK dan JFSA juga setuju untuk bekerjasama dalam hal *sharing knowledge* mengenai regulasi *Fintech*. Sebagaimana diketahui bahwa Jepang telah lebih dahulu membuat peraturan mengenai *Fintech*

Regional Cooperation
In the ASEAN region, OJK actively participated in Protocol seven preparations as part of the ASEAN Framework Agreement on Services, where Indonesia extended its commitment, particularly to the insurance industry.

OJK Membership at International Forums/Institutions/ Organisations
At the end of 2016, OJK was a member of 10 international organisations as follows:
a. International Financial Reporting Standard (IFRS);
b. International Organisation of Securities Commissions (IOSCO);
c. International Capital Market Association;
d. Islamic Financial Services Board (IFSB);
e. International Islamic Financial Market (IIFM);
f. International Association of Insurance Supervisors (ISIA);
g. International Organisation of Pension Supervisors (IOPS);
h. The ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI);
i. International Financial Consumer Protection (FINCONET);
j. International Network of Financial Education (INFE).

Expanding Institutional Cooperation with International Institutions
In 2016, OJK organised various activities to expand cooperation with international institutions as follows:

a. Formation of OJK PROKSI – The Centre for Microfinance Development and Inclusion
   OJK launched the Centre for Microfinance Development and Inclusion (OJK PROKSI) as a centre for microfinance development and inclusion in Indonesia. OJK PROKSI will build knowledge and develop breakthroughs concerning implementable business models in the areas of microfinance and financial inclusion applicable to industry players, financial experts, academia and the global community.

b. International Workshop on Integrated Supervision – Cooperation between OJK, APRA, AIPEG and the Toronto Center
   OJK collaborated with APRA, AIPEG and the Toronto Center to organise an integrated supervision training program as a follow-up to the APRA-OJK meeting held the year before.

c. Islamic Finance Fintech Seminar in Tokyo, Japan
   At the meeting, both parties agreed to develop infrastructure in the tourism sector, energy, creative industries as well as various other sectors. OJK and JFSA also agreed knowledge sharing terms concerning Fintech regulations. Japan has already promulgated various Fintech regulations.

d. Seminar International Financial Reporting Standards (IFRS)
OJK sebagai anggota dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) *Foundation* bekerja sama dalam menyelenggarakan rangkaian acara Seminar IFRS, antara lain (a) IFRS *In-house Training for* OJK *Officials*; (b) *Stakeholders Event*; (c) IFRS *9 Working Group Seminar*; dan (d) *Bilateral Meeting* OJK - IFRS.

e. Kunjungan Queen Maksima
OJK menerima kunjungan Ratu Belanda Queen Maxima dalam kapasitas sebagai *the* UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA), dan delegasi United Nations Development Program (UNDP)

Dalam rangkaian kunjungannya, Queen Maxima meninjau lokasi program inklusi keuangan OJK seperti Agen Laku Pandai, Laku Mikro, T-CASH dan Simpanan Pelajar. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral *high-level* tertutup terkait inklusi keuangan bagi pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

f. *Global Islamic Financial Awards*
OJK bersama dengan EdBiz menyelenggarakan Global Islamic Financial Awards (GIFA) keenam. Penyelenggaraan GIFA kali ini diawali dengan Konferensi Internasional Keuangan Syariah dengan tema "*Revitalizing Islamic Finance in the 'New Normal' Era.*" Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan strategi pengembangan keuangan syariah ke depan, yang diharapkan dapat memitigasi risiko dan tantangan industri serta membantu pemenuhan kebutuhan keuangan syariah dalam mendorong ekspansi, pertumbuhan dan pengembangan keuangan syariah pada era *new normal*.

g. *Focus Grup Discussion* "Menggali Potensi Sukuk Diaspora untuk Pembangunan Indonesia"
Diskusi mengenai sukuk diaspora dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mempersiapkan pendanaan untuk infrastruktur yang dapat menggerakan kegiatan ekonomi di masyarakat serta untuk memasyarakatkan sukuk sebagai alternatif investasi bagi diaspora Indonesia.

h. Seminar Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah
OJK bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman dan mendorong penguatan kompetensi SDM sejak dini dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sosialisasi dilakukan dengan bentuk *roadshow* ke beberapa universitas dengan tema "Strategi Penguatan Kompetensi SDM di bidang Keuangan Syariah pada Era MEA"

d. International Financial Reporting Standards (IFRS) Seminar
As a member of the International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, OJK organised the IFRS Seminar, consisting of: (a) IFRS In-House Training for OJK Officials; (b) Stakeholders' Event; (c) IFRS 9 Working Group Seminar; and (d) OJK-IFRS Bilateral Meeting.

e. Queen Máxima Visit
OJK received Queen Máxima of the Netherlands in her capacity as the UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development along with the delegation from the United Nations Development Programme (UNDP). During her visit, Queen Máxima reviewed OJK financial inclusion program locations, including branchless banking agents, microfinance institutions, T-Cash and the student savings program. Queen Máxima also attended a closed high-level bilateral meeting on financial inclusion to achieve sustainable development.

f. Global Islamic Financial Awards
In conjunction with EdBiz, OJK hosted the sixth Global Islamic Financial Awards (GIFA), which began with the International Conference on Sharia Finance, entitled "Revitalising Islamic Finance in the New Normal Era". The event aims to map the sharia financial development strategy moving forward, which is expected to mitigate the risks and overcome the industry challenges, while meeting the needs of sharia finance in terms of fostering sharia financial expansion, growth and development in the new normal era.

g. Focus Group Discussions "Exploring the Potential of Diaspora Sukuk for Development in Indonesia"
Discussions on diaspora sukuk were held to support the government's program to prepare infrastructure funding to stimulate economic activities as well as to socialise sukuk as an alternative investment instrument for diaspora Indonesia.

h. National Seminar on the Sharia Economic Community
OJK cooperated with the Sharia Economic Community to provide socialisation activities at universities, aiming to build HR understanding and strengthen competences early upon entering the ASEAN Economic Community (AEC). Socialisation activities took the form of a roadshow held at several universities entitled "Strategies to Strengthen HR Sharia Finance Competences in the AEC era".

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

IV.8 PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

IV.8.1 Komposisi SDM

Jumlah sumber daya manusia (SDM) OJK posisi Desember 2016 adalah berjumlah 4.286 orang, yang terdiri dari pegawai tetap OJK, pegawai penugasan Bank Indonesia (BI), pegawai penugasan dari lembaga lain (Kejaksaan, POLRI, BPK, BPKP, dan Kementerian Keuangan), calon pegawai, dan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

IV.8 ORGANISATIONAL AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

IV.8.1 Human Resource Composition

As of December 2016, human resources at OJK totalled 4,286 employees, consisting of permanent employees, Bank Indonesia employees (assigned to OJK), employees assigned from other institutions (Prosecutors Office, National Police, Audit Board of the Republic of Indonesia, Finance and Development Supervisory Agency and Ministry of Finance), candidate staff members and fixed-term contract employees.

Komposisi Pegawai berdasarkan Lembaga Asal
HR Composition by Institution

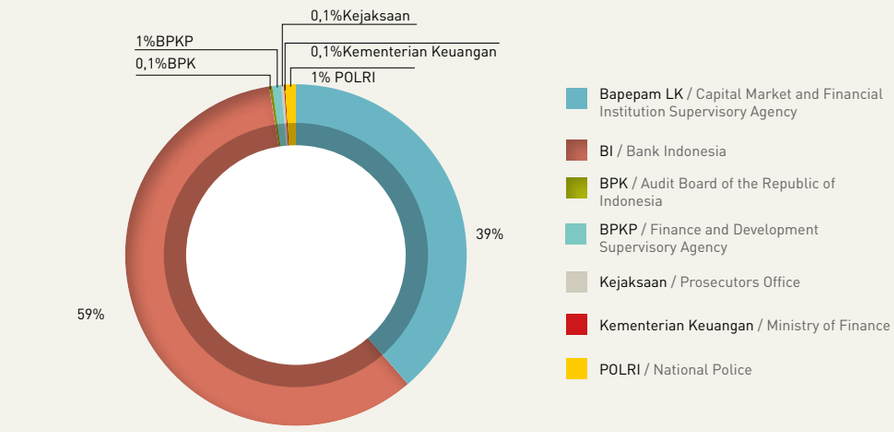

Dilihat dari latar belakang pendidikan, mayoritas SDM OJK memiliki latar belakang pendidikan strata-1 (S1), yaitu sebanyak 2.681 orang (62,6%). Selanjutnya 954 orang (22,3%) berlatar belakang strata-2 (S2), 412 orang (9,6%) berlatar belakang pendidikan D-III, dan 239 orang lainnya (5,5%) memiliki latar belakang pendidikan lainnya.

In terms of educational background, most human resources at OJK hold a bachelor's degree (S1), accounting for 62.6% or 2,681 employees, followed by 22.3% or 954 employees with a master's degree (S2), 9.6% or 412 employees with a doctoral degree (S3) and 5.5% or 239 employees with another form of qualification.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Employee Composition based on Education

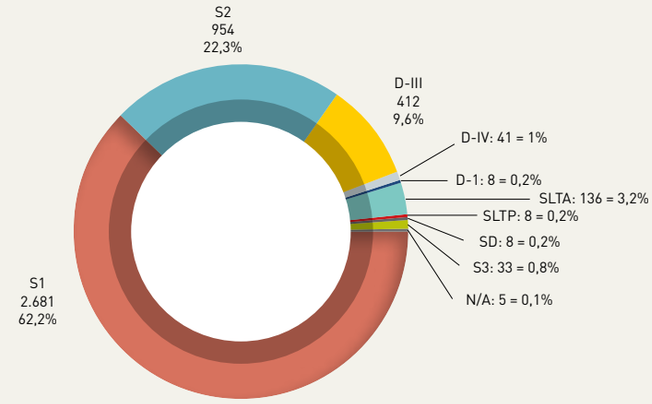

Berdasarkan kelompok usia, SDM OJK didominasi oleh kelompok usia 20-29 tahun, sebanyak 1.835 orang (43%); diikuti dengan kelompok usia 30-39 tahun sebanyak 1.240 orang (29%); kelompok usia 40-49 tahun sebanyak 685 orang (16%); kelompok usia 50-59 tahun sebanyak 519 orang (12%); serta kelompok usia ≥ 60 tahun (0,2%).

In terms of age, OJK human resources are dominated by those in the 20-29 age range, accounting for 43% or 1,835 employees, followed by 30-39 with 29% or 1,240 employees and 40-49 with 16% or 685 employees, while those in the 50-59 range total 519 (12%) and those over 60 account for just 0.2%.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur
Employee Composition based on Age Range

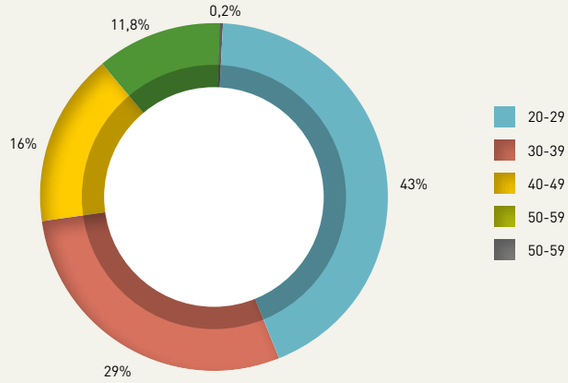

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

IV.8.2 Pengembangan Organisasi

Selama 2016, OJK melakukan penguatan strukutur organisasi OJK untuk mendukung pengaturan, pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen. Penguatan organisasi dilakukan melalui (1) Penguatan Kantor Regional dan Kantor OJK, (2) Penataan OJK *Institute*, (3) Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, (4) Pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi, (5) Pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan.

Penguatan Kantor Regional dan Kantor OJK (KOJK)
Strategi penguatan organisasi KR-KOJK, antara lain:
1. KR-KOJK menjadi menjadi sarana pendukung strategis pelaksanaan fungsi dan tugas pokok OJK secara Nasional.
2. Setiap provinsi di Indonesia memiliki Kantor OJK dengan tipe yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.
3. Penyusunan bentuk organisasi KR-KOJK disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi implementasi yang telah diputuskan oleh Dewan Komisioner.
4. Pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan nonbank (pengawasan pasar modal dan IKNB) akan diimplementasikan di masing-masing KR-KOJK secara bertahap.
5. Implementasi inisiatif penataan organisasi KR-KOJK dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan strategi di Kantor Pusat.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
OJK perlu berperan aktif dalam pencegahan TPPU-TPPT dengan tujuan melindungi LJK dan masyarakat secara keseluruhan. IMF memberi rekomendasi kepada OJK agar pengawasan terhadap aktivitas TPPU/TPPT dilakukan secara tersendiri (independen) dan mendapatkan porsi yang lebih besar, serta tidak menjadi bagian dari pengawasan risiko operasional. Menyikapi hal tersebut, maka OJK membentuk Satuan Kerja tersendiri yaitu Grup Penanganan APU-PPT

Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi
Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Bidang dan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi, antara lain:
1. Terdapat beberapa lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan yang berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga keuangan di dalam sistem keuangan dan menyebabkan peningkatan eksposur risiko.

IV.8.2 Organisational Development

OJK strengthened its organisational structure in 2016 to support financial services sector regulation, supervision and development as well as education and consume protection. The organisation was strengthened by: (1) reinforcing OJK regional and branch offices; (2) structuring the OJK Institute; (3) combatting money laundering and terrorism funding; (4) establishing the Integrated Supervision Work Unit; and (5) forming the Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee.

Strengthening OJK Regional and Branch Offices
The strategy to strengthen OJK regional and branch offices is as follows:
1. OJK regional and branch offices are strategic supports of national task and function implementation.
2. An OJK branch office is located in every province of Indonesia in accordance with the local conditions and needs.
3. The institutional arrangements of OJK regional and branch offices are established in line with needs and strategic implementation decided by the OJK Board of Commissioners.
4. Nonbank supervision (oversight of the capital market and nonbank financial industry) will gradually be implemented by each respective OJK regional and branch office.
5. The institutional arrangements of OJK regional and branch offices will be implemented gradually in line with strategy development at head office.

Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism
OJK plays an active role in anti-money laundering and combatting the financing of terrorism (AML-CFT) to protect financial services institutions and the public. The International Monetary Fund (IMF) submitted recommendations to OJK that AML-CFT activities should be conducted independently, account for a larger portion and be separate from the operational risk supervision. Addressing the recommendations, OJK established an independent work unit, namely the AML-CFT Group.

Integrated Supervision Work Unit
Several circumstances motivated the formation of the Integrated Supervision Work Unit as follows:
1. There are a number of financial services institutions that also have close ties with various other financial subsectors, which exacerbates the complexity of transactions and interactions between financial institutions in the financial system, while also intensifying exposure risk.

2. Siklus pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan memerlukan dukungan perangkat organisasi yang memadai termasuk adanya kejelasan tugas dan wewenang satuan kerja terkait.

Dengan dibentuknya satuan kerja pengawasan terintegrasi, maka diharapkan:
1. Pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan dapat dilaksanakan secara fokus, komprehensif, efektif dan efisien.
2. Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pengawasan individual dan pengawasan terintegrasi.
3. Mengefektifkan kinerja Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
4. Mencegah terjadinya *blind spot* dan *redundancy* pada kegiatan pengawasan terintegrasi.

IV.8.3 Pengelolaan SDM

Pemenuhan Pegawai

Seiring dengan pengembangan organisasi dan peningkatan fungsi Satuan Kerja di OJK juga sebagai akibat dari sejumlah pegawai penugasan BI di OJK memilih untuk kembali berkarir di BI, terdapat kekurangan pegawai di beberapa Satuan Kerja dan proses pemenuhannya telah dilakukan sebagai berikut:

a. Pemenuhan Internal
   Proses pemenuhan kebutuhan Pegawai yang dilakukan melalui pengisian lowongan jabatan oleh Pegawai dari internal atau eksternal Satuan Kerja
b. Pemenuhan Eksternal
   Selama 2016, telah dilakukan proses pemenuhan ekternal untuk level Jabatan Kepala Sub Bagian dan Staf. Jumlah pelamar yang masuk sejumlah 12.382 untuk level Jabatan Kepala Sub Bagian dan 100.243 orang dan untuk level Jabatan Staf. yang diterima menjadi Calon Pegawai sejumlah 598 orang yang terdiri atas 155 orang calon pegawai setingkat Kepala Sub Bagian, 443 calon pegawai setingkat Staf (429 rekrutmen umum dan 14 rekrutmen keterwakilan daerah).

IV.8.4 Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2016, telah dilakukan peluncuran Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan (SIMFOSIA). SIMFOSIA adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK berdasarkan sistem MSDM yang memenuhi kebutuhan perencanaan, pemenuhan, pemetaan, pengembangan, dan pemeliharaan Sumber

2. The integrated supervision cycle for financial conglomerates requires adequate organisational support, including clear duties and jurisdiction of the related work unit.

Formation of the integrated supervision work unit is expected to:
1. Ensure that the integrated supervision of financial conglomerates is focused, comprehensive, effective and efficient.
2. Provide a clear division of tasks and authority between individual supervision and integrated supervision.
3. Streamline the tasks and authority of the Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee.
4. Prevent blind spots and redundancy in terms of integrated supervision activities.

IV.8.3 Human Capital Management

Employee Fulfillment

Consistent with organisational development and the increased function of work units at OJK after Bank Indonesia employees assigned to OJK returned to their careers at Bank Indonesia, a number of work units were left understaffed, for which additional recruitment was required as follows:

a. Internal Recruitment
   The vacancies were filled by employees from within and external to the respective work units.

b. External recruitment
   In 2016, external applicants were recruited to fill the positions of Subdivision Head and Staff. A total of 12,382 applications were received for subdivision head and a further 100,243 applications for staff, of which 598 were selected as candidate employees, consisting of 155 prospective subdivision heads and 443 prospective staff members (429 through general recruitment and 14 through regional recruitment).

IV.8.4 Human Resource Information System

OJK launched the Human Resources Information System (SIMFOSIA) in 2016. SIMFOSIA is an information system to manage OJK organisation and HR data based on the MSDM system, which meets the needs for planning, recruitment, mapping, development and maintenance of human resources. SIMFOSIA was developed to create a simpler, transparent and efficient HR management process.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Daya Manusia. Tujuan dibangunnya SIMFOSIA adalah untuk menciptakan proses pengelolaan dan manajemen SDM yang lebih mudah, transparan, dan efisien. SIMFOSIA merupakan sistem yang berbasis data dan informasi yang akurat, terkini dan terpercaya serta dikelola secara terintegrasi.

SIMFOSIA is based on accurate data and information that is up-to-date and trusted and the management of which is integrated.

Sebagai langkah penyempurnaan SIMFOSIA, telah dilakukan *update* dan *cleansing database* SDM OJK di SIMFOSIA termasuk terkait status kepegawaian penugasan BI.

Honing the system, OJK updated and cleansed the HR database of SIMFOSIA, including the data and information concerning Bank Indonesia employees assigned to OJK.

IV.8.5 Pengembangan SDM dan OJK *Institute*

Sebagai upaya mewujudkan penguatan *service excellence* dalam mencapai transformasi OJK 2014-2017, OJK *Institute* menginisiasi berbagai program sebagaimana telah ditetapkan dalam Sistem Pengembangan SDM OJK yang meliputi: Program Pengembangan Kepemimpinan, Program Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Formal S2/S3, Program Pengenalan untuk Calon Pegawai, Program Internalisasi Kultur, Program Bimbingan, dan Program Penugasan Pegawai.

IV.8.5 Human Capital Development and the OJK Institute

Striving to strengthen service excellence in terms of achieving OJK Transformation 2014-2017, the OJK Institute initiated various programs under the OJK Human Resources Development System, including: Leadership Development Program, Competency Development Program, Post Graduate Program, Onboarding Program, Culture Internalisation Program, Mentoring Program and Employee Attachment/Secondment Program.

Selain itu, OJK *Institute* juga melaksanakan kegiatan Asesmen Kepemimpinan bagi pejabat OJK, pelaksanaan program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan OJK, *capacity building* Program Manfaat Balik (*recycling program*), serta Kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Keuangan.

In addition, the OJK Institute also conducted leadership assessment of OJK officers, the OJK Financial Services Sector Supervisor Certification Program, capacity building program for financial services sector as a recycling program and reviewed the National Work Competency Standards for the Financial Services Sector.

Selanjutnya dalam rangka mempersiapkan OJK *Institute* sebagai pusat pembelajaran SDM Sektor Keuangan Indonesia, OJK *Institute* juga melakukan *benchmarking* pendirian Perpustakaan dan Museum OJK, serta melakukan kerjasama internasional untuk kegiatan kepemimpinan dan meningkatkan kapasitas pengajar OJK.

In pursuit of becoming a centre of learning for human resources in the financial services sector, the OJK Institute also commenced benchmarking to prepare the establishment of OJK Library and Museum, while also made cooperations with international institutions through leadership development activities and the capacity building of OJK lectures.

Berikut ini beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang 2016.

Some of the activities undertaken in 2016 are as follows:

Program Pengembangan Kepemimpinan

- **Program Penyegaran Kepemimpinan**
  Program yang dirancang untuk memberikan penyegaran kepemimpinan dan mendukung peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pejabat OJK. Selama 2016, Program Penyegaran Kepemimpinan dengan tema *Leadership Change and Sharing Forum* telah dilaksanakan sebanyak tiga batch dan diikuti sebanyak 227 peserta serta kegiatan *Non In-House Training* Luar Negeri bagi pejabat setingkat Direktur ke atas diikuti sebanyak 44 peserta.

Leadership Development Program

- **Leadership Refreshment Program**
  The program was designed to provide leadership refreshment and enhance the leadership capacity of OJK officers. In 2016, the program was themed "Leadership Change and Sharing Forum" and was implemented in three batches and attended by 227 participants. Furthermore, 44 officers (Directors and above) was appointed to attend various leadership training abroad.

- **Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)**
  Program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan pegawai agar siap menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi ini, dilaksanakan untuk level jabatan Kepala Subbagian, Kepala Bagian, Deputi Direktur, dan Direktur/ setingkat. Pada tahun 2016, Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) diikuti sebanyak 223 peserta beserta 34 orang dari KR/KOJK untuk program kepemimpinan khusus.

- **Leadership Level Development Program**
  The program aims to enhance the leadership capacity of employees in preparation for more complex duties and higher degree of decision-making responsibilities, targeting four levels of officers, namely subdivision head, section head, deputy director and director. In 2016, a total of 223 participants attended the Leadership Level Development Program and 34 participants from OJK regional and branch offices attended leadership program specifically for head of OJK regional and branch offices

Realisasi Program Pengembangan Kepemimpinan
Leadership Development Program Realisation

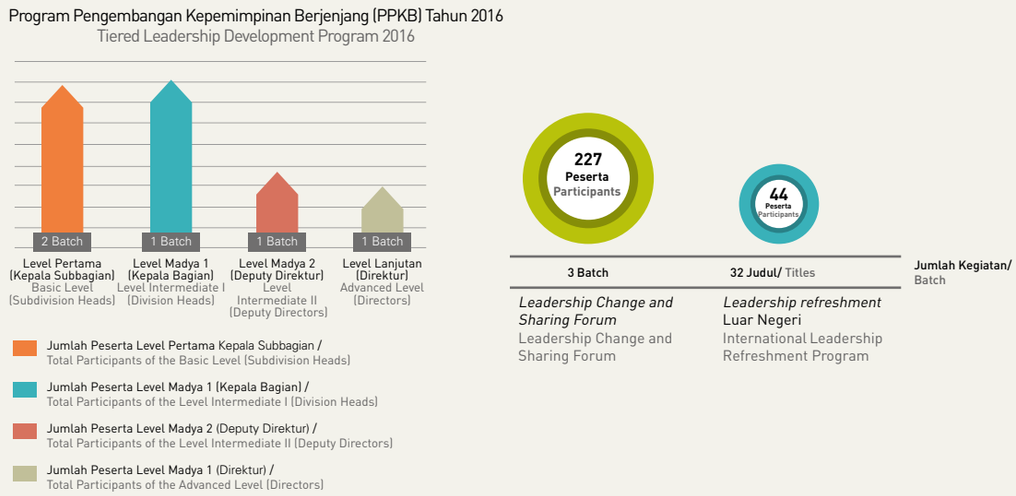

- **Program Kepemimpinan dalam rangka Kerjasama Internasional Victoria Indonesia Leadership Program (VILP)**
  Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara OJK dan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia mengenai kerjasama di bidang pengembangan kapasitas SDM, pengembangan lembaga keuangan mikro, membangun *business communication* dan *media relations*, serta pertukaran informasi ekonomi dan keuangan, dilaksanakan *Victoria Indonesia Leadership Program* (VILP) di Kampus Monash Business School.

  Australia Indonesia Financial Leaders Program (AIFLP)
  OJK bekerja sama dengan Australia-Indonesia Centre (AIC) menyelenggarakan Australia Indonesia Financial Leaders Program (AIFLP). AIFLP bertujuan untuk membangun jejaring antara regulator dan pelaku di sektor jasa keuangan pada kedua negara.

- **Leadership Program Victoria Indonesia Leadership Program (VILP)**
  As a follow-up action after signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and the Government of Victoria, Australia, on cooperation in developing human resources and microfinance institutions, building business communication and media relations, as well as exchanging economic and financial information, the Victoria Indonesia Leadership Program (VILP) was held at the Monash Business School.

  Australia Indonesia Financial Leaders Program (AIFLP)
  In conjunction with the Australia-Indonesia Centre (AIC), OJK organised the Australia Indonesia Financial Leaders Program (AIFLP), which aims to build a network between regulators and officers from the financial services sector in both countries.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Realisasi Program Kepemimpinan Dalam Rangka Kerjasama Internasional
International Leadership Program Realisation

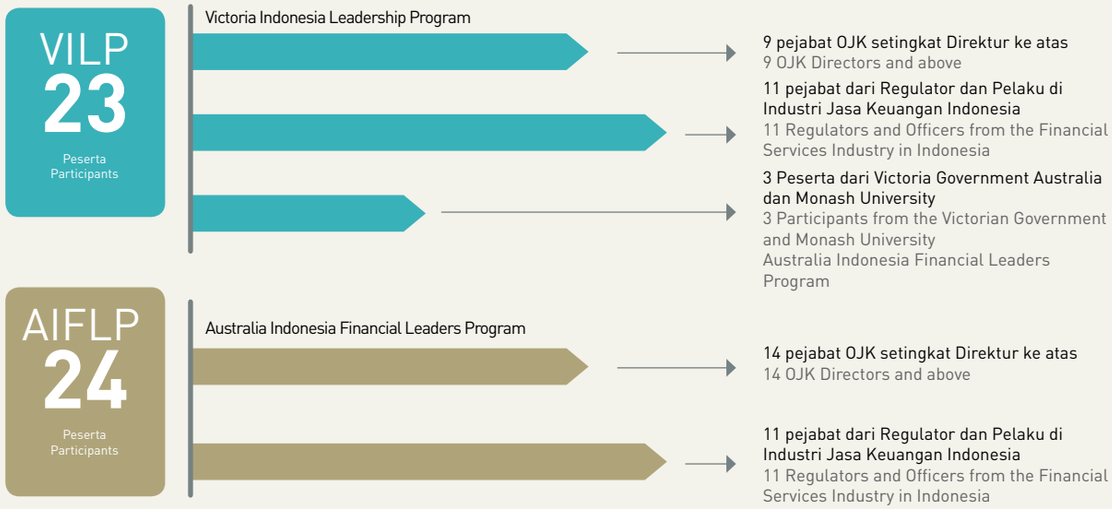

Program Pengembangan Kompetensi
Program Pengembangan Kompetensi (PPK) pegawai bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan perilaku SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas pada jabatannya dan/atau mengembangkan karir. Berdasarkan kebutuhannya PPK dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu; PPK *In-House* Dalam Negeri, PPK *Non In-House* Dalam Negeri, dan PPK *Non In-House* Luar Negeri.

Competency Development Program
The Competency Development Program aims to build technical and soft competencies to support the execution of duties and/or develop careers. The Competency Development Program is divided into three categories as follows: domestic in-house training, domestic non in-house training and international non in-house training.

Realisasi Program Pengembangan Kompetensi
Competence Development Program Realisation

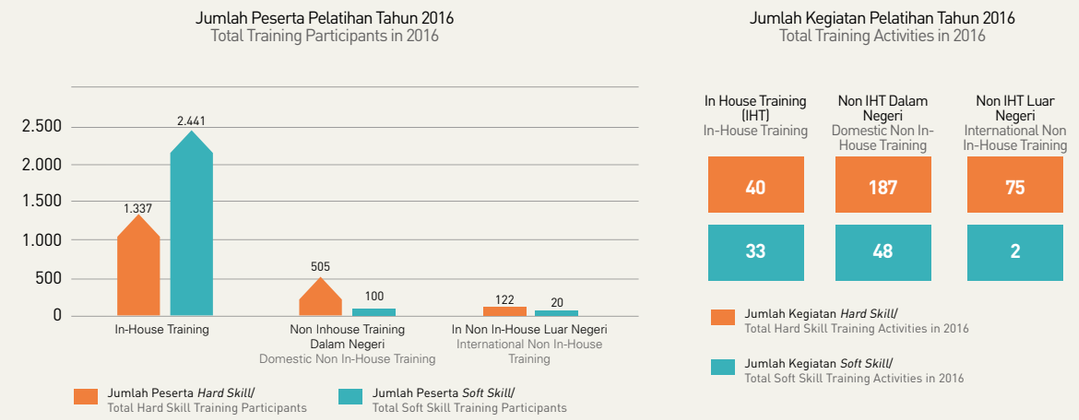

Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai OJK khususnya di bidang pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK). Program Sertifikasi Pengawas SJK dibagi dalam 3 level, yaitu Level I, Level II, dan Level III. Selama tahun 2016, telah dilaksanakan program sertifikasi Pengawas SJK sebanyak 14 *Batch* dengan total peserta sebanyak 519 pegawai.

Program Pendidikan Formal
Program Pendidikan Formal (PPF) merupakan bentuk pengembangan pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan S2 (*master degree*) maupun S3 (*doktoral*).

Sepanjang 2016 tercatat 11 orang pegawai OJK yang mengikuti program pendidikan formal, yaitu; untuk Skim-1 (dengan fasilitas bea siswa penuh dari OJK) sebanyak 10 orang yang mengikuti program S2 dan satu orang program S3. Untuk Skim-2 (mendapatkan bea siswa dari pihak eksternal dengan tambahan fasilitas dari OJK) terdiri dari tujuh orang Program S2 dan tiga orang program S3. Skim-3 (peserta yang mendapatkan bea siswa penuh dari pihak eksternal tanpa tambahan dari OJK) sebanyak dua orang pada program S3, dan Skim-4 (pendidikan mandiri atas inisiatif pegawai yang mendapatkan penggantian biaya pendidikan bagi pegawai yang menyelesaikan pendidikan) terdapat tiga orang yang menyelesaikan program S2 dan satu orang menyelesaikan program S3.

Financial Services Sector Supervisor Certification Program
This program aims to build OJK employee competence, specifically in the area of financial services sector supervision. The program is divided into three levels, namely Level I, Level II and Level III. In 2016, 14 batches were completed with 519 participants.

Post Graduate Program
The Post Graduate Program is offered to potential OJK employees who meet the requirement for post graduate program, including master's and doctoral degrees.

In 2016, 11 OJK employees participated in Scheme 1 (full scholarship from OJK) of the Post Graduate Program, consisting of 10 employees for master's degrees and one for a doctoral degree. A total of 10 employees granted for Scheme 2 (external scholarship with top-up facilities provided by OJK), comprised of seven employees studying for master's degrees and three for doctoral degrees. In addition, two employees entered Scheme 3 (full external scholarship) for doctoral degrees and 4 employees participated in Scheme 4 (independent scheme which OJK only reimburesed the cost of education for successful registered graduates), consisting of three employees for master's degrees and one for a doctoral degree.

Realisasi Program Sertifikasi Pengawasan SJK dan Pendidikan Formal
Financial Services Sector Supervisor Certification Program Realisation

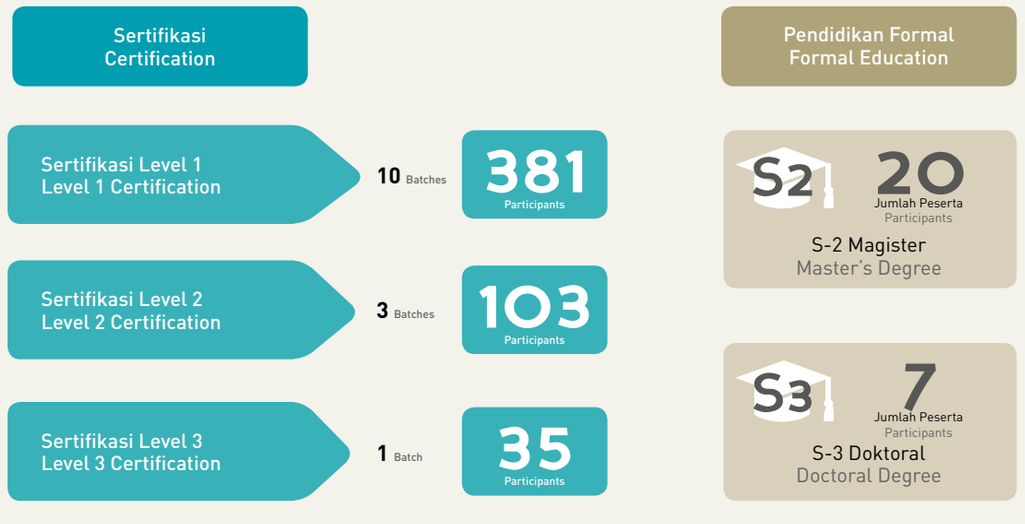

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Program Pengenalan Calon Pegawai
Dalam rangka membangun kader dan cikal bakal pemimpin di masa depan, secara berkala OJK merekrut calon pegawai baru. Sebelum bekerja, para calon pegawai mendapatkan pendidikan pembekalan melalui program pendidikan yang didesain khusus untuk membentuk kader pimpinan OJK yang kompeten dengan kemampuan teknis (*hard skill*) yang baik serta karakter (*soft skill*) yang terpuji sesuai nilai-nilai strategis OJK. Selama 2016, telah diselenggarakan program Pendidikan Calon Pejabat (PCP) Angkatan Ketiga untuk level setingkat Kepala SubBagian yang diikuti 155 peserta dengan durasi selama 6 bulan. Sedangkan program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan Ketiga untuk calon pegawai level staf diikuti sebanyak 443 peserta dengan durasi pendidikan selama 1 tahun.

Program *Mentoring*
Selama 2016, program *mentoring* yang dilaksanakan merupakan tahap pemberian "*awareness*" kepada pimpinan satuan kerja melalui kegiatan *Training for Mentor* yang diikuti oleh 35 orang pejabat dari berbagai satuan kerja Kantor Pusat, dan daerah.

Program Penugasan (*Attachment/Secondment*)
Program penugasan bertujuan memberikan kesempatan peningkatan pengalaman, kompetensi teknis dan kompetensi perilaku pada Pegawai Potensial melalui pemberian tanggung jawab pelaksanaan tugas tertentu atau penempatan posisi tertentu pada internal institusi maupun institusi eksternal dalam dan luar negeri.

Onboarding Program
To build a cadre of future leaders, OJK periodically recruits new prospective employees. Prior to starting work, new prospective employees must attend the onboarding program, designed specifically to build a cadre of competent OJK leaders with hard and soft skills in line with the strategic values of OJK. In 2016, a total of 155 participants attended Prospective Officer Onboarding Program (PCP) for subdivision heads for a duration of six months. Meanwhile, 443 candidate staff members attended Prospective Staff Onboarding Program (PCS) for a duration of one year

Mentoring Program
In 2016, the mentoring program was implemented to build awareness amongst work unit leaders through Training for Mentors, which was attended by 35 officers from various work units at head office and regional offices.

Attachment/Secondment Program
The Attachment/Secondment Program aims to broaden potential employee experience, technical competencies and behavioural competencies through specific job responsibilities or placements internally and at external domestic and international institutions.

Realisasi Program *Onboarding* dan Program Penugasan
Onboarding and Attachment/Secondment Program Realisation

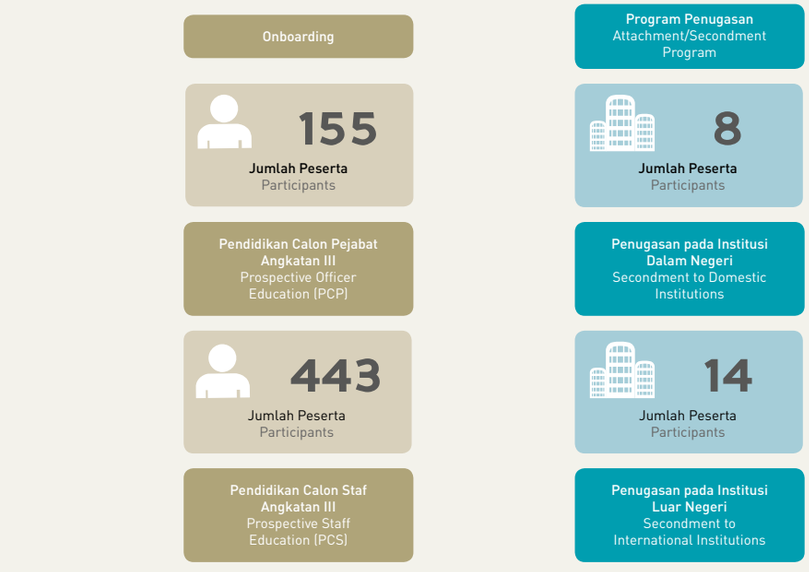

Program Asesmen
OJK melakukan asesmen untuk membangun profil pegawai yang akurat mengenai kompetensi dan potensi pegawai yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan pemetaan dan pengembangan pegawai.

Assessment Program
OJK conducts assessment to build accurate profiles of employee competencies and potential for the purpose of employee mapping and development.

Realisasi Program Asesmen Kepemimpinan
Leadership Assessment Program Realisation

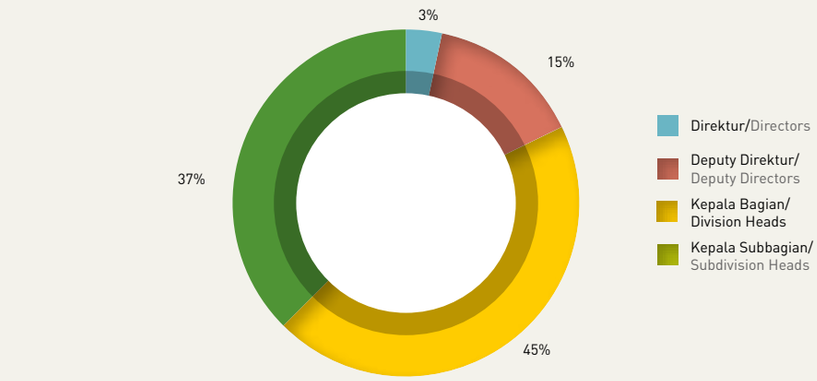

Perpustakaan dan Museum/Galeri
Untuk mewujudkan OJK *Institute* sebagai *Center Of Excellence* di bidang Jasa Keuangan, OJK akan mendirikan perpustakaan dan galeri sebagai pusat informasi, pendidikan dan pembelajaran industri keuangan Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Kerangka Perpustakaan dan Galeri, OJK Institute merasa perlu melakukan *benchmarking* ke *Monetary Authority of Singapore Gallery*, Bale Pustaka Bandung dan Perpustakaan Kota Surabaya untuk mendapatkan gambaran pengelolaan sebuah Perpustakaan dan Galeri OJK.

OJK Library and Museum/Gallery
To establish the OJK Institute as a Centre of Excellence in terms of Financial Services, OJK will set up a library and gallery as a centre of information, education and learning about the financial industry in Indonesia. In preparation for the Library and Gallery, OJK benchmarked the Gallery at the Monetary Authority of Singapore, Bale Pustaka in Bandung and the Library of Surabaya in order to gain valuable insight into how the OJK Library and Gallery shall be managed.

Program Kerja sama dengan Temasek Foundation Singapore
Program ini merupakan program kerjasama OJK dengan *Temasek Foundation CSC* Singapura yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas SDM pengajar dan fasilitator di lingkungan OJK.

Cooperation Program with the Temasek Foundation in Singapore
The Cooperation Program with the Temasek Foundation in Singapore aims to enhance the HR capacity of teachers and facilitators in the OJK.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari pelaku Industri SJK sehingga SDM SJK semakin profesional dan memberikan pemahaman kepada SJK mengenai tugas dan fungsi OJK. Program dikemas dalam bentuk pelatihan, *workshop*, sertifikasi dan *Training of Trainers* berkolaborasi dengan berbagai kompartemen terkait di OJK. 21 Program Pengembangan SDM SJK telah dilaksanakan pada 2016 dengan jumlah peserta mencapai 2.595 orang.

Financial Services Sector Human Resources Development Program
This program aims to build the competencies of players in the financial services industry, thus enhancing professionalism and providing greater understanding to the industry regarding the duties and functions of OJK. The program is organised in the form of training, workshops, certification and training of trainers in collaboration with various compartments in OJK. A total of 21 financial services sector HR development programs were organised in 2016, attended by 2,595 participants

Realisasi Program Pengembangan SDM Eksternal Sektor Jasa Keuangan
Financial Services Sector Human Resources Development Program Realisation

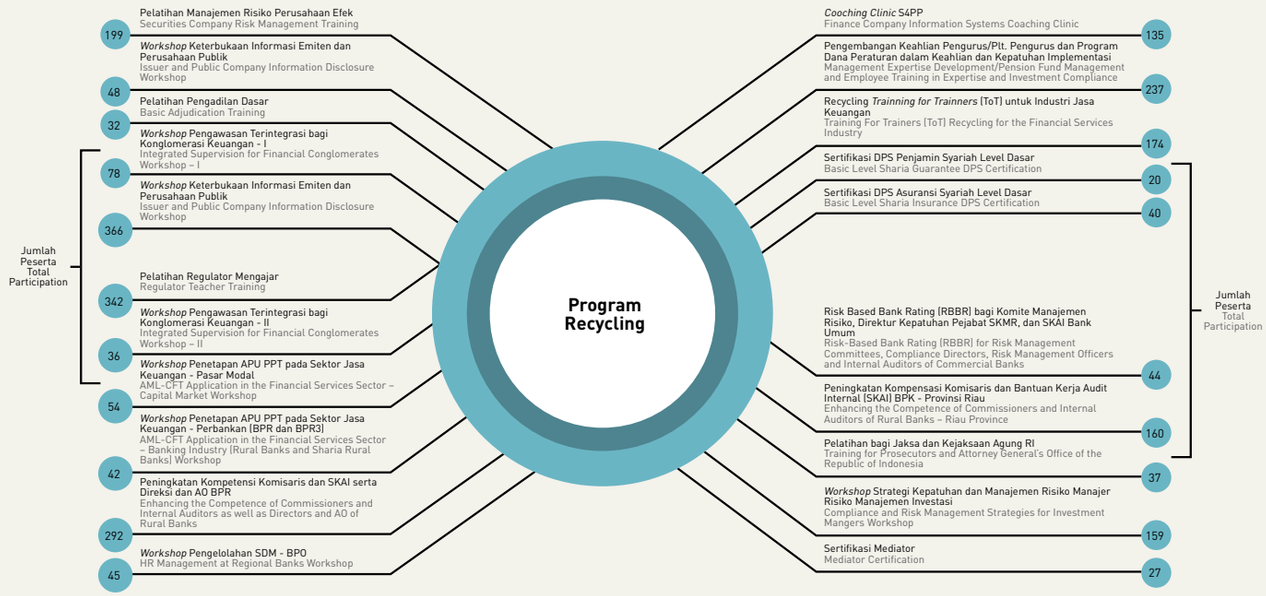

Kaji Ulang dan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

OJK sebagai instansi teknis di bidang sektor jasa keuangan perlu melakukan kaji ulang dan penyusunan SKKNI agar dapat memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah diterapkan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan, persyaratan pekerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama 2016, OJK *Institute* telah merumuskan Peta Kompetensi lima SKKNI Bidang Perbankan (Manajemen Risiko, *General Banking, Audit Intern Bank, Wealth Management* dan *Treasury Dealer Settlement and Money Broker*) untuk dikaji ulang dan tiga pelaksanaan kaji ulang SKKNI (BPR, BPRS dan Audit Intern Bank).

Review and Preparation of the Indonesia National Work Competency Standards (SKKNI)

OJK, as a technical institution in the financial services sector, was required to review and compile the Indonesia National Work Competency Standards (SKKNI) in order to maintain the validity and reliability of the existing SKKNI in line with the changing needs, work qualification and prevailing laws and regulations. In 2016, the OJK Institute formulated Five SKKNI Competencies for Banking (Risk Management, General Banking, Internal Audit, Wealth Management and Treasury Dealer Settlement and Money Broker) for review and reviewed three SKKNI (Rural Banks, Sharia Rural Banks and Bank Internal Audit).

IV.9 INSIATIF STRATEGIS

Untuk membantu pencapaian Sasaran Strategis, OJK meluncurkan delapan program Inisiatif Strategis (IS) yaitu program kerja lintas Satuan Kerja yang bersifat *multi-years*. Terkait fungsi pengelolaan Inisiatif Strategis (IS), Satuan Kerja koordinator dari masing-masing IS telah menyusun *Project Charter* IS yang ditandatangani pada semester I-2016 oleh anggota Dewan Komisioner selaku *Initiative Owner* IS dan para pimpinan satuan kerja selaku satuan kerja koordinator, sub-koordinator dan pelaksana IS.

IV.9 STRATEGIC INITIATIVES

OJK launched eight Strategic Initiatives (SI), namely multi-year work programs that pervade several work units, to facilitate achievement of the Strategic Targets. Concerning the SI management function, a work unit coordinator from each respective SI formulated an SI Project Charter, which was signed in the first semester of 2016 by members of the Board of Commissioners as SI Initiative Owners as well as the leaders of the work units as coordinators, sub-coordinators and executors.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Pelaksanaan IS secara umum telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam *Project Charter*. Untuk memantau progres pelaksanaan IS yang lebih efektif dan efisien, pelaksanaan *monitoring* atas masing-masing IS telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMPEL OJK. Selain itu, dalam rangka koordinasi yang lebih efektif antara satuan kerja pengelola IS dan satuan kerja koordinator, OJK telah menunjuk Manajer masing-masing IS. Adapun realisasi pencapaian program Inisiatif Strategis 2016 mencapai 99,78%.

In general, SI implementation has progressed as planned in line with the targets set in the Project Charter. The OJK SIMPEL application is used to more effectively and efficiently monitor the progress of SI implementation. In addition, OJK has also appointed managers for each Strategic Initiative to enable more effective coordination between SI managers and coordinators. Realisation of the Strategic Initiatives was 99.78% in 2016.

Untuk mendukung pelaksanaan IS, OJK juga menyusun Surat Edaran Dewan Komisioner (SE DK) Inisiatif Strategis yang mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (PDK MSAK). Adapun detail progres pelaksanaan program kerja untuk setiap IS selama 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

OJK also issued a Board of Commissioner's Circular Letter (SEDK) concerning the Strategic Initiatives, referring to the Board of Commissioners Regulation on Strategic, Budget and Performance Management (PDK MSAK). Implementation progress of each Strategic Initiative in 2016 is summarised as follows:

1. **Inisiatif Strategis 1 - Membangun Reputasi dan Kredibilitas Institusi Melalui Implementasi Program Manfaat Balik yang Diprioritaskan**
   Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) PDK dan SEDK mengenai Bantuan Operasionalisasi LAPS, (2) Pelaksanakan program sertifikasi/ *capacity building* di SJK dengan pelaksanaan 26 *Batch Capacity building*, (3) Peningkatan perlindungan konsumen melalui sertfikasi ISO 9001:2015 untuk layanan pengaduan konsumen dan pembentukan 38 Satgas Waspada Investasi, (4) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui terbentukanya delapan gerai Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM, dan (5) Mempercepat akses keuangan daerah dengan pembentukan 45 TPAKD di daerah.

1. **Strategic Initiative 1 – Build Institutional Reputation and Credibility through Implementation of the Recycling Program as a Priority**
   As of yearend 2016, several key activities had been completed, including: (1) BoC Regulation and BOC Circular Letter concerning LAPS Operational Assistance; (2) Capacity Building/ Certification Program implementation in the financial services sector, including 26 batches of the capacity building program; (3) Enhancing consumer protection through ISO 9001:2015 certification for consumer complaints services and formation of 38 Investment Watchdogs; (4) Increasing financial literacy and inclusion through the formation of eight Centres of Education, Consumer Services and MSME Financial Access; and (5) Accelerating local financial access through formation of 45 Regional Financial Access Acceleration Teams in rural areas.

2. **Inisiatif Strategis 2 - Memperkuat Organisasi dalam rangka** Mewujudkan Integrasi Pengaturan Sektor Jasa Keuangan (SJK)
   Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Penyusunan kriteria konsep pengaturan terintegrasi sektor jasa keuangan, (2) Inventarisasi ketentuan yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan, (3) Pembentukan Komite Pengaturan Terintegrasi beserta tugas, fungsi, keanggotaan, dan mekanisme kerjanya, (4) Peluncuran informasi terpadu ketentuan/peraturan yang ditujukan kepada pihak eksternal dalam dua versi, yakni versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

2. **Strategic Initiative 2 – Organisational Strengthening to realise Integrated Financial Services Sector Regulation**
   By the end of 2016, several key activities had been completed, including: (1) compiling the criteria for the concept of Integrated Financial Services Sector Regulation; (2) Inventorying prevailing regulations for all financial services sectors; (3) Forming the Integrated Regulation Committee along with defining the duties, function, members and work mechanisms; and (4) Launching bilingual Integrated Regulatory Information for external parties in Indonesian and English.

3. **Inisiatif Strategis 3 - Menyusun dan Menyelaraskan Rancangan Undang-Undang terkait OJK dan Aturan Pelaksanaannya**
   Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Penyusunan masukan terhadap RUU OJK dan RUU BI dengan memperhatikan UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU

3. **Strategic Initiative 3 – Compile and Harmonise the OJK Draft Bill and the Implementation Guidelines**
   By the end of 2016, several key activities had been completed, including: (1) Compiling inputs for the OJK Draft Bill and BI Draft Bill paying due consideration to Act No. 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK); and

PPKSK) dan (2) Tersedianya pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pelaksanaan dari UU PPKSK dan pemantauan tindak lanjut penyusunan peraturan pelaksanaan dimaksud.

4. **Inisiatif Strategis 4 - Mewujudkan Kantor Regional dan Kantor OJK sebagai Mitra Strategis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah**
   Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Program pengembangan *Leadership* pemimpin KR dan KOJK, (2) Penyediaan sarana/prasarana fisik untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Regional dan Kantor OJK, (3) Penguatan Kantor Regional dan Kantor OJK dalam pengawasan LJK (LKM), (4) Penguatan Fungsi Komunikasi Kantor Regional dan Kantor OJK di Daerah dan (5) Sosialisasi pola komunikasi terpadu di KR-KOJK dan contoh penerapannya di daerah.

5. **Inisiatif Strategis 5 - Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK.**
   Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Penyusunan *Roadmap* Implementasi Perizinan Terintegrasi, (2) Pengembangan Infrastruktur serta Aplikasi Sistem Informasi untuk mendukung Operasionalisasi Perizinan Solo di masing-masing Kompartemen, (3) *Go Live* Perizinan terintegrasi – *Bancassurance*, (4) *Go Live* Perizinan Terintegrasi - Pemasaran Reksadana oleh Bank selaku APERD, (5) *Go Live* Perizinan Terintegrasi – Pendaftaran Akuntan Publik

6. **Inisiatif Strategis 6 - Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK.**
   Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama telah diselesaikan antara lain (1) Usulan desain organisasi OJK terkait pengaturan, pengembangan, perizinan, dan pengawasan sektor jasa keuangan syariah, (2) Penerbitan POJK Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan prinsip Syariah dengan nomor POJK No.33/POJK.05/2016.

7. **Inisiatif Strategis 7 - Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK.**
   Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama sedang dalam proses penyelesaian antara lain (1) Roadmap Manajemen Keberlangsungan Keuangan OJK, (2) Penyusunan revisi PDK MSAK, (3) Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*).

(2) provide regulatory provisions for the PPKSK implementation guidelines and monitor the follow-up actions.

4. **Strategic Initiative 4 – Establish OJK Regional and Branch Offices as Strategic Stakeholder Partners in Regional Economic Development**
   By the end of 2016, several key activities had been completed, including: (1) OJK Regional and Branch Office Leadership Development Program; (2) Providing physical infrastructure and facilities to support the tasks and functions of the OJK Regional and Branch Offices; (3) Strengthening OJK Regional and Branch Offices to supervise financial services institutions and microfinance institutions; (4) Strengthening the communication function of OJK Regional and Branch Offices in rural areas; and (5) Socialising integrated communication at OJK Regional and Branch Offices as well as examples of application in the rural areas.

5. **Strategic Initiative 5 – Strengthening Infrastructure to support OJK Task Implementation**
   By the end of 2016, several key activities had been completed, including: (1) Preparing the Integrated Licensing Implementation Roadmap; (2) Developing Infrastructure and Information System Applications to support the operationalisation of Solo Licensing in each respective Compartment; (3) Go Live Integrated Licensing – Bancassurance; (4) Go Live Integrated Licensing – Marketing Investment Funds by Banks as Investment Fund Selling Agents (APERD); and (5) Go Live Integrated Licensing – Public Accountant Registration.

6. **Strategic Initiative 6 – Strengthening Infrastructure to support OJK Task Implementation**
   By the end of 2016, several key activities had been completed, including: (1) Proposing the OJK organisational design concerning regulation, development, licensing and supervision of the sharia financial services sector; and (2) Issuing OJK Regulation (POJK) No. 33/POJK.05/2016 on Organising a Sharia-Compliant Pension Fund Program.

7. **Strategic Initiative 7 – Strengthening Infrastructure to support OJK Task Implementation**
   By the end of 2016, several key activities had been completed, including: (1) OJK Financial Sustainability Management Roadmap; (2) Amendment to the Board of Commissioners Regulation on Strategic, Budget and Performance Management (PDK MSAK); and (3) Performance-Based Budgeting.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

8. **Inisiatif Strategis 8 - Mengembangkan Fungsi Penelitian dalam rangka Mewujudkan *Research-Based Policy***
   Sampai akhir 2016, beberapa kegiatan utama yang telah diselesaikan antara lain (1) Menyusun program kerja penelitian untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas penelitian sektoral dan lintas sektoral terhadap pengaturan, pengawasan, perizinan, literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen SJK yang terintegrasi, dan (2) Pelaksanaan program pelatihan bagi para peneliti OJK

8. **Strategic Initiative 8 – Developing the Research Function to realise Research-Based Policy**
   By the end of 2016, several key activities had been completed, including: (1) Preparing the research work program to increase the contribution and quality of sectoral and cross-sectoral research to integrated regulation, supervision, licensing, financial literacy and inclusion, as well as consumer protection in the financial services sector; and (2) Implementing training programs for OJK researchers.

IV.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi OJK serta Destination Statement tahun 2017, OJK menyelesaikan sejumlah program dan melaksanakan kegiatan terkait fungsi perencanaan sumber daya, manajemen perubahan dan budaya organisasi. Sesuai *Roadmap dan Action Plan* Program Transformasi Manajemen Perubahan 2014-2017, seluruh kegiatan difokuskan dalam rangka memenuhi tema "*Providing Service Excellence* dengan penguatan nilai Sinergi, Inklusif dan Visioner."

IV.10 CHANGE MANAGEMENT

Supporting achievement of the OJK vision and mission as well as the 2017 Destination Statement, OJK completed a number of programs and implemented resource planning, change management and organisational culture. In pursuance of the Change Management Transformation Program Roadmap and Action Plan for 2014-2017, all activities focused on "Providing Service Excellence by Strengthening the Synergic, Inclusive and Visionary Values".

IV.10.1 Program Budaya OJK

Beberapa kegiatan lintas sektoral dalam rangka mempercepat proses internalisasi kultur sebagai identitas baru yang dirumuskan ke dalam Nilai-nilai Strategis OJK yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner atau disingkat INPRESIV telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian integral yang membantu organisasi untuk fokus pada pencapaian strategi melalui perubahan sistem, pola pikir dan perilaku pegawai yang mengacu pada nilai-nilai strategis OJK. Secara garis besar, pengelolaan budaya kerja OJK mencakup tiga kategori yaitu Program, *Monitoring* dan Media Kampanye.

IV.10.1 OJK Culture Program

Several cross-sector activities were undertaken to accelerate the culture internalisation process as a new identity formulated in the OJK Strategic Values, namely Integrity, Professionalism, Synergic, Inclusive and Visionary, abbreviated as INPRESIV. The activities formed an integral part of helping the organisation focus on the strategic achievements through changes to the systems, mindset and behaviour of employees referring to the OJK Strategic Values. In broad terms, OJK work culture management encompasses three categories, namely Programs, Monitoring and Media Campaigns.

Sepanjang 2016, OJK menetapkan tiga program budaya nasional yaitu Program "OJK Cerdas", Program "OJK Sehat", dan Program "OJK Ramah" dan satu program budaya spesifik yaitu Program "OJK Gesit".

In 2016, OJK set three national culture programs, namely "OJK Cerdas", "OJK Sehat" and "OJK Ramah", as well as one culture specific program known as "OJK Gesit".

Dalam rangka meningkatkan kapasitas *Change Partners* dalam menyusun program, OJK menyelenggarakan *Change Partner Forum* 2016. Forum ini merupakan forum komunikasi transformasi yang melibatkan para *Change Partners* dari seluruh satuan kerja OJK. Selama 2016, telah dilaksanakan kegiatan *Change Partner Forum* (CPF). Forum I dan II bertujuan untuk memfasilitasi perancangan dan finalisasi program kerja OJKWay 2016 dengan membekalkan kemampuan teknis bagi para *Change Partners* dalam mengelola program, *monitoring* dan media komunikasi perubahan di masing-masing satuan kerja sesuai dengan tema besar program budaya 2016 yaitu "*Service Excellence*". Sementara itu, forum III bertujuan

To enhance the capacity of Change Partners in terms of preparing programs, OJK organised the Change Partner Forum 2016 as a transformation communication forum involving change partners from all OJK work units. Change Partner Forum (CPF) activities were implemented in 2016. Forum I and II aimed to facilitate OJKWay 2016 work program planning and finalisation by providing Change Partners the technical capabilities to manage the program, monitor and communicate with the media the changes in each respective work unit in line with the theme for 2016, namely Service Excellence. Meanwhile, Forum III was an evaluation forum for the Change Partners in terms of culture program implementation in 2016, as

sebagai forum evaluasi para Change Partners dalam pelaksanaan program budaya sepanjang 2016, serta memformulasikan program budaya dan metode *monitoring* yang akan dilaksanakan pada 2017.

Dalam pelaksanaan kegiatan budaya. *Change Partner* di bantu oleh masing-masing *Change Agent*. Untuk membekali para *Change Agent*, OJK mengadakan *Change Agent Forum*. Forum ini merupakan forum komunikasi internal yang mempertemukan perwakilan *Change Agents* dari seluruh satuan kerja untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan dan mengeksekusi program-program perubahan dan budaya di masing-masing satuan kerja. *Change Agent Forum* 2016 diselenggarakan sebanyak dua diskusi diikuti oleh perwakilan para *Change Agent* dari seluruh Satuan Kerja di OJK.

Selain membekali para *Change Partner* dan *Change Agent*, OJK juga menyelenggarakan pembekalan pada pimpinan Satuan Kerja melalui penyelenggaraan *Change Leader Forum – Directors' Class, Change Leader Forum – High Level, OJK Leadership & Change Sharing Forum. Change Leader Forum – Directors' Class* bertujuan untuk memberikan pembekalan strategis bagi para Direktur sebagai pimpinan unit kerja dalam memimpin pelaksanaan dan monitoring pencapaian program-program transformasi dan internalisasi nilai-nilai strategis OJK sesuai dengan tema program budaya 2016 yaitu *"Sevice Excellence"* yang dijalankan oleh *Change Partners* dan *Change Agents* di Satuan Kerja masing-masing. Sementara itu, *Change Leader Forum – High Level* merupakan forum transformasi budaya dan internalisasi nilai-nilai strategis yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisioner, Deputi Komisioner, Kepala Departemen dan Kepala Kantor Regional di lingkungan OJK. Pada forum ini para pemimpin Satker dan Anggota Dewan Komisioner melakukan penandatanganan Komitmen Program Budaya OJK untuk menegaskan bahwa sebagai *Change Leaders* mereka siap menjadi *role model* dalam mengimplementasikan dan memimpin pelaksanaan program budaya. OJK Leadership & *Change Sharing Forum* (LCSF) merupakan forum diskusi dan *knowledge sharing* bagi perwakilan Insan OJK dari seluruh satuan kerja di Kantor Pusat yang bertujuan untuk menumbuhkan inovasi dalam kepemimpinan. OJK LCSF dilakukan sebanyak tiga kali dengan tema "Transformasi Organisasi Untuk Kinerja yang Lebih Baik", "Jujur, Konsisten, Bijak dan Adil sebagai pemimpin Lembaga Negara", dan *"Towards Stronger Partnerships"*.

well as to formulate the culture program and monitoring methods for 2017.

When implementing change activities, Change Partners are assisted by the respective Change Agents. To brief the Change Agents, OJK organizes the Change Agent Forum. The Forum is an internal communication forum that brought together Change Agent representatives from all work units to assist them implement and execute the change and culture programs in their respective work units. The Change Agent Forum 2016 organised two discussions, attended by Change Agents from all work units at OJK.

Other than briefing the Change Partners and Change Agents, OJK also briefed work unit leaders through a Change Leader Forum – Directors' Class, Change Leader Forum – High Level and the OJK Leadership and Change Sharing Forum. The Change Leader Forum – Directors' Class aimed to provide a strategic brief for the Directors as leaders of the work units in terms of leading implementation and monitoring the achievements of the transformation and OJK strategic value internalisation programs in line with the theme of the culture program in 2016, namely Service Excellence, as implemented by Change Partners and Change Agents in their respective work units. Meanwhile, the Change Leader Forum – High Level was a culture transformation and OJK strategic value internalisation forum attended by members of the OJK Board of Commissioners, Department Heads and Regional Office Heads. At the forum, work unit leaders and members of the OJK Board signed a OJK Culture Program Commitment to stress that, as Change Leaders, they are ready to be role models in terms of implementing and leading the culture program. The OJK Leadership and Change Sharing Forum (LCSF) was a discussion and knowledge sharing forum for OJK HR representatives from all work units at Head Office, which aimed to foster leadership innovation. OJK LCSF was conducted three times under the following themes: "Organisational Transformation for Better Performance", "Honest, Consistent, Smart and Fair, as Leaders of State Institutions", and "Towards Stronger Partnerships".

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

Sebagai upaya meningkatkan kreativitas para *Change Partners* dan *Change Agents* dalam mensosialisasikan program perubahan, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. *Benchmarking* Program Perubahan
   Benchmarking program budaya dilakukan program perubahan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (PGN).
2. Induksi program budaya OJK kepada calon pegawai,
   OJK menyelenggarakan kegiatan Inisiasi Program Budaya OJKway kepada calon pegawai baru yang direkrut di 2016.
3. Lomba budaya OJK,
   Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi program budaya yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja sekaligus menetapkan Satuan Kerja Implementor Terbaik sebagai pemenang lomba budaya OJK.
4. *Culture Fair*
   OJK menyelenggarakan kegiatan *Culture Fair* yaitu kegiatan eksebisi yang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil pelaksanaan dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan Program Budaya OJK Way.
5. Pemilihan Insan OJK Terbaik 2016
   Dalam rangka mewujudkan Insan OJK yang dapat merepresentasikan lembaga (*brand ambassador*) secara holistik, diselenggarakan pemilihan Insan OJK Terbaik 2016. Pemilihan Insan OJK Terbaik didasarkan atas beberapa kriteria seperti memiliki prestasi kerja terbaik, berperilaku paling konsisten terhadap nilai-nilai strategis OJK, dan dapat menjadi teladan (*role model*) bagi insan OJK lainnya.
6. Buku Pedoman Perilaku Insan OJK.
   Buku Pedoman Perilaku Insan OJK diterbitkan dengan tujuan dapat menjadi panduan Insan OJK dalam melakukan tugasnya sehari-hari
7. Seminar Nasional 2016
   Seminar Nasional Manajemen Perubahan dilaksanakan dengan mengambil topik "Kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi". Dalam Seminar Nasional diluncurkan pula *Indonesia Change Management Forum* (ICMF) yaitu forum komunikasi antar-*Change Management Office* Sektor Jasa Keuangan Indonesia.

Striving to increase the creativity of Change Partners and Change Agents in terms of socialising the change program, the following activities were undertaken:

1. Change Benchmarking Program
   Culture program benchmarking was undertaken using the change program at PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (PGN).
2. OJK Culture Induction Program for Candidate Employees
   OJK initiated the OJKWay Culture Program for new prospective employees recruited in 2016.
3. OJK Culture Competition
   This activity aimed to evaluate the culture program implemented by each respective work unit, while also determining the Best Implementer Work Unit as the winner of the 2015 OJK Culture Competition.
4. Culture Fair
   OJK organised the Culture Fair to socialise the implementation results and show appreciation for the efforts undertaken to implement the OJKWay Culture Program.
5. Selection of the Best OJK Employee 2016
   Holistically creating a Brand Ambassador to represent OJK, the Best Employee 2016 was selected based on several criteria, including job performance, behaviour consistent with the OJK strategic values, and capable of acting as a role model for other OJK employees.
6. OJK Employee Behaviour Guidelines
   The OJK Employee Behaviour Guidelines were published as a guide for OJK employees about how to conduct their daily duties.
7. National Seminar 2016
   The National Change Management Seminar was implemented with the topic "Leadership to Improve Organisational Performance". The Indonesia Change Management Forum (ICMF) was launched at the National Seminar as a communication forum for Change Management Offices in the financial services sector of Indonesia.

IV.10.2 *Monitoring* Program Budaya

OJK menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau progress implementasi program-program perubahan dan budaya yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. *Self-Assessment Monitoring*
   OJK memberikan kesempatan kepada masing-masing satuan kerja untuk melakukan penilaian pelaksanaan program budaya melalui metode *self-assessment* yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program budaya) secara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system* (ojkway.com).

IV.10.2 Culture Program Monitoring

OJK implemented several activities to gauge the success level and monitor the progress of the ongoing transformation and culture programs as follows:

1. Self-Assessment Monitoring
   OJK provided an opportunity to each respective work unit to evaluate culture program implementation through self-assessment supported by evidence presented online through the dashboard monitoring system (ojkway.com).

2. *On-Site Monitoring*, *Cross monitoring*, dan Konsultansi
   Bekerja sama dengan lembaga eksternal, OJK melakukan kunjungan langsung (*on-site monitoring*) setiap triwulan ke seluruh Satuan Kerja. Pelaksanaan *on-site monitoring* ini merupakan bagian krusial untuk mengetahui validitas data laporan *Self Assessment* yang disampaikan Satuan Kerja terkait pelaksanaan program budaya.
   Cross monitoring juga dilakukan dengan mengundang Satker lain, terutama Satker yang program budaya kerjanya belum berjalan dengan maksimal, untuk menghadiri *on-site monitoring* di Satker tertentu
3. *Employee Opinion Survey*
   OJK menjalankan *Employee Opinion Survey* (EOS) untuk mengetahui tingkat keterikatan Insan OJK dengan OJK sebagai organisasinya.
4. Survei Budaya 2016
   Survei Budaya 2016 dilakukan oleh pihak independen dan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman dan akseptasi Insan OJK terhadap pelaksanaan program budaya selama 2016. Survei ini dilakukan secara *online* dan memperoleh tingkat respon sebesar 75,5% dari populasi pegawai. Adapun indeks Implementasi nilai strategis OJK Way adalah 5,06 dari skala 6.

IV.10.3 Media Kampanye Program Budaya

Di bidang media komunikasi, fungsi kultur dan manajemen perubahan melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye selama 2016, diantaranya:

1. Penerbitan Majalah Integrasi
   Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal OJK yang diterbitkan untuk mengkomunikasikan kegiatan terkait program perubahan dan budaya serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih OJK dalam periode penerbitan. Selama 2016, OJK menerbitkan delapan edisi regular dan empat edisi khusus. Majalah Integrasi menerima penghargaan dalam kategori majalah Lembaga Pemerintah Pusat dan keluar sebagai pemenang *"Silver Winner, The Best Government In-house Magazine* (InMA)".
2. *Minisite* dan Aplikasi *Mobile OJKWay*
   Website OJKWay (http://ojkway.ojk.go.id) dikembangkan sebagai *platform* kepada Insan OJK untuk berinteraksi dengan sesama pegawai, berkomunikasi dengan Dewan Komisioner, bertransaksi jual-beli dengan pegawai, *sharing* kegiatan budaya, dan membaca berita dan majalah Integrasi secara digital. *Website OJKWay* telah memiliki 491 pengguna per Desember 2016.

2. On-site Monitoring, Cross Monitoring and Consultation
   In conjunction with external institutions, OJK conducted quarterly on-site monitoring of all Work Units. On-site monitoring is a crucial part of validating self-assessment report data submitted by the respective work units in terms of culture program implementation.
   Cross monitoring was also undertaken by inviting other work units, particularly those where culture program implementation was not yet optimal, to attend the on-site monitoring of certain other work units.

3. Employee Opinion Survey
   OJK conducted an Employee Opinion Survey (EOS) to assess the level of employee engagement with the organisation (OJK).

4. Culture Survey 2016
   The Culture Survey 2016 was conducted by an independent party and aimed to interpret the level of understanding and acceptance among OJK employees concerning culture program implementation in 2016. The survey was conducted online and garnered a response rate of 75.5%. The Implementation Index of the OJKWay strategic values was recorded at 5.06 out of a possible 6.

IV.10.3 Culture Program Media Campaign

In terms of media communication, the culture and change management function developed and honed a media campaign in 2016 as follows:

1. Integrasi Magazine
   Integrasi Magazine is an internal communication medium published to communicate change and culture program activities as well as the accomplishments achieved. In 2016, OJK published eight regular editions of the Integration Magazine and four special editions. Furthermore, the Integrasi Magazine received a Silver Winner award in the Best Government In-House Magazine (InMA) category.

2. OJKWay Minisite and Mobile Application
   The OJKWay website was developed as a platform for OJK employees to interact with one another, communicate with the Board of Commissioners, trade with other employees, share cultural activities as well as read the news and Interaction Magazine online. The OJKWay website had a total of 491 subscribers in December 2016.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

3. Penerbitan Buku "Jejak Langkah Perjalanan Transformasi Budaya OJK 2016"
   Buku "Jejak Langkah Perjalanan Transformasi Budaya OJK 2016" diterbitkan untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan program budaya kerja OJKway dan pencapaian transformasi OJK selama 2016.
4. Pesan Ketua DK dan Pesan ADK
   Seperti periode sebelumnya, OJK melanjutkan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisioner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK secara periodik setiap bulannya.
5. Hymne OJK
   Pembuatan Hymne OJK bertujuan untuk meningkatkan kebanggaan dan keterikatan insan OJK terhadap Lembaga.

IV.11 SISTEM INFORMASI DAN LOGISTIK

IV.11.1 Sistem Informasi

OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan terus mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan tersebut, OJK mengembangkan sistem informasi baik yang mendukung pengawasan maupun meningkatkan kapasitas organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi yang Mendukung Pengawasan
   a. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul *Bancassurance*
      Sistem ini merupakan jenis perizinan interkoneksi antara bidang perbankan dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sistem dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan serta memudahkan pihak eksternal memantau permohonan perizinan.

   b. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
      Untuk mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan publik dalam memantau informasi kredit debitur serta mendukung LJK dalam mengendalikan risiko kredit yang diberikan oleh debitur, OJK mengembangkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

   c. Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA)
      Pemberlakuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) mewajibkan Lembaga keuangan (*Foreign Financial Institution*/FFI) dan lembaga non keuangan (*Non Financial Foreign Entities*/NFFE) di luar Amerika Serikat untuk melaporkan data dan informasi nasabah yang terindikasi sebagai United State (US) Person. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, OJK mengembangkan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA).

3. The OJK Culture Transformation Milestones 2016 Book
   The OJK Culture Transformation Milestones 2016 Book was published to document the journey and activities of OJKWay culture program activities and transformation achievements in 2016.
4. Messages from the Chairman of the Board and Messages from Members of the Board
   OJK continues to broadcast messages from the Chairman of the Board and messages from members of the Board through a monthly e-mail blast to all OJK employees.
5. OJK Hymn
   The OJK Hymn aims to increase pride and engagement among OJK employees.

IV.11 INFORMATION SYSTEMS AND LOGISTICS

IV.11.1 Information Systems

As the supervisory authority of the financial services industry, OJK constantly strives to realise the financial services industry as an exemplary pillar of the national economy that is internationally competitive and can advance public prosperity. Supporting that aim, OJK has developed information systems to support oversight and enhance organisational capacity as follows:

1. Information Systems supporting Oversight
   a. Bancassurance Module of the Integrated Licensing and Registration System (SPRINT)
      The system facilitates interconnected licensing between the banking sector and nonbank financial industry. The system was developed to improve transparency and licensing efficiency as well as facilitate external parties monitor licensing applications.

   b. Financial Information Services System (SLIK)
      Supporting the services offered to financial services institutions and the public in terms of monitoring borrower information and to support financial services institutions control credit risk from borrowers, OJK developed the Financial Information Services System (SLIK).

   c. Foreign Customer Information Submission System (SiPINA)
      Implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires Foreign Financial Institutions (FFI) and Non-Financial Foreign Entities (NFFE) located outside the United States to report data and information concerning customers indicated as a US person. To meet the requirements, OJK developed the Foreign Customer Information Submission System (SiPINA).

d. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
Pengembangan SIPT bertujuan membantu pengawas dalam melakukan analisa, menentukan keputusan terkait konglomerasi keuangan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan.

e. *E-Monitoring* Pengelolaan Investasi
Pengembangan *E-monitoring* Pengelolaan Investasi ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan keterbukaan informasi kepada publik terkait Industri Pengelolaan Investasi dan sebagai referensi informasi bagi publik atau pemangku kepentingan di Industri Pengelolaan Investasi serta sebagai media pengawasan bagi pengawas dalam memantau aktivitas Industri Pengelolaan Investasi.

f. Sistem Informasi Pelaporan *Tax Amnesty* (SITATY)
SITATY merupakan sistem informasi untuk memfasilitasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah ditunjuk Pemerintah RI sebagai *gateway* dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan dana repatriasi dan tebusan terkait *Tax Amnesty* secara *online*.

g. Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard* (BSD)
Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard* merupakan sistem informasi yang membantu dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyajikan data dan informasi secara agregat/makro terkait kondisi perbankan. Sistem ini bertujuan sebagai alat deteksi dini dalam mengidentifikasi risiko dan masalah potensial perbankan secara umum dan memberikan informasi perbankan terkini.

h. Sistem Aplikasi Pembukaan Rahasia Nasabah Perbankan (SI AKRAB)
SI AKRAB dikembangkan dalam rangka mempercepat penyelesaian perintah/izin tertulis pembukaan rahasia bank agar dapat diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

i. Sistem Informasi Pelaporan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
Sistem ini merupakan suatu media bagi Bank penyelenggara Laku Pandai untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan penyelenggara Laku Pandai setiap Triwulan secara *online*. Melalui sistem ini, pemantauan perkembangan program Laku Pandai dapat dilakukan setiap Triwulan.

d. Integrated Supervision Information System (SIPT)
SIPT assists supervisors to analyse and take decisions on financial conglomerates, while enhancing effectiveness and efficiency and standardising supervision.

e. Investment Management E-Monitoring
Investment management e-monitoring accommodates information disclosure to the public regarding the Investment Management Industry and serves as a reference for the public and stakeholders in the industry. The system is also an oversight medium for supervisors to monitor activities in the Investment Management Industry.

f. Tax Amnesty Reporting System (SITATY)
SITATY facilitates gateway financial services institutions, appointed by the Government of the Republic of Indonesia, to report repatriated funds online from the Tax Amnesty.

g. Banking Surveillance Dashboard (BSD)
The Banking Surveillance Dashboard is an information system that supports the decision-making process by presenting aggregate/macro data and information on banking conditions. BSD is an early detection system to identify risk and potential problems in the banking industry, while providing the latest banking information.

h. Bank Customer Confidentiality Application System (SI AKRAB)
SI AKRAB was developed to accelerate written requests for confidential information from the banking industry in a timely manner and pursuant to prevailing regulations.

i. Branchless Banking Reporting Information System
The system is a medium for banks offering Branchless Banking Services to fulfil their quarterly reporting commitments online. Through the system, Branchless Banking program development can be monitored on a quarterly basis.

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS
GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT

j. Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) Modul Pelaporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
SIPEDULI Modul Pelaporan LAPS merupakan modul pelaporan baru yang dikembangkan pada SIPEDULI untuk mengakomodir pelaporan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

k. Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SI-LKM)
SI-LKM merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang mendukung proses perizinan, pelaporan, perubahan kelembagaan, pengawasan dan informasi geografis yang telah dikembangkan sejak 2014. Pengembangan SI-LKM (modul Perizinan dan Analisis Laporan Keuangan) dilakukan untuk menyesuaikan peraturan baru terkait alur proses perizinan usaha dan substansi dokumen perizinan serta optimalisasi fungsi-fungsi yang telah tersedia dalam SI-LKM agar *performance* aplikasi berjalan dengan baik.

2. Sistem Informasi yang Mendukung Peningkatan Kapasitas Organisasi
   a. Sistem Informasi Pengendalian Gratifikasi OJK (SiPeGa)
   SiPeGa adalah aplikasi internal yang bertujuan sebagai sarana bagi pegawai OJK untuk melaporkan gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya SiPeGa, sarana pelaporan Gratifikasi menjadi elektronik dan dapat dipantau melalui sistem oleh Satker Pemiliknya.

   b. Sistem Aplikasi *Online* Survei Persepsi Kinerja Satuan Kerja OJK (SPKSO)
   Pembangunan Aplikasi Survei Persepsi Kinerja Satuan Kerja OJK diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan survei dengan target responden adalah pemangku kepentingan internal OJK baik Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK yang berhubungan dengan Satuan Kerja yang memberikan pelayanan internal di OJK sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

   c. Sistem Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIAMAN)
   Sistem ini dibangun untuk mendukung kegiatan penyidikan dan mempermudah pengelolaan proses kerja serta menjaga kerahasiaan data penyelidikan dan penyidikan.

   d. Sistem Informasi Pengendalian Kualitas (SIMETA)
   Sistem bertujuan mendukung kegiatan dalam mendapatkan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) mengenai kualitas produk/jasa, proses-proses, dan sistem *governance* dan manajemen OJK dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.

j. Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) Module of the Consumer Protection and Education Reporting System (SIPEDULI)
The LAPS module of SIPEDULI is a new reporting module developed to accommodate reporting by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS).

k. Microfinance Institution Information System (SI-LKM)
SI-LKM is a web-based information system that supports the licensing, reporting, institutional changes, supervision and spatial information developed since 2014. SI-LKM (Financial Statement Analysis and Licensing Module) was developed to harmonise new regulations on the business licensing and document substantiation process as well as to optimise the existing functions of SI-LKM to improve application performance.

2. Information Systems supporting Increased Organisational Capacity
   a. OJK Gratification Control Information System (SiPeGa)
   SiPeGa is an internal application that allows OJK employees to report gratification. SiPeGa has brought gratification reporting online and facilitates monitoring.

   b. OJK Work Unit Online Performance Perception Survey Application (SPKSO)
   SPKSO development was required to facilitate survey implementation, targeting internal stakeholders at head office, as well as regional and branch offices linked to work units providing internal services, while simultaneously increasing budget efficiency.

   c. Investigation Management and Administration System (SIAMAN)
   The system supports investigation activities and facilitates work process management, while maintaining data confidentiality.

   d. Quality Control Information System (SIMETA)
   The system supports reasonable assurance concerning product/service quality, the processes, and the OJK governance and management system to facilitate regulation and supervision of financial services activities.

IV.11.2 Logistik

Salah satu fokus kegiatan strategis OJK sepanjang 2016 adalah pada penyediaan fasilitas serta gedung kantor, baik di pusat maupun daerah. Sampai saat ini OJK masih menggunakan tiga lokasi kantor pusat yang terpisah, yaitu Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Gedung Bank Indonesia, dan Gedung Menara Merdeka. Selain itu, di beberapa daerah juga masih menggunakan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Pada akhir 2016, telah tercapai kesepakatan sewa untuk Gedung Kantor Pusat OJK Terpadu, dengan lokasi yang representatif. Seluruh Satuan Kerja di Kantor Pusat diharapkan akan menempati satu Kantor Pusat OJK Terpadu secara bertahap hingga 2018. Di daerah, Kantor Regional dan Kantor OJK yang menempati gedung kantor sendiri baik secara sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah provinsi sebanyak 24 Kantor, yakni:

IV.11.2 Logistics

One focus of OJK strategic activities in 2016 was to provide facilities and office space at head office as well as regional and branch offices. OJK head office is currently spread over three separate locations, namely Gedung Sumitro Djohohadikusumo, Gedung Bank Indonesia and Gedung Menara Merdeka. In addition, a number of regional offices continue to rely on office space provided by Bank Indonesia representative offices.

At the end of 2016, a leasing agreement had been reached for the Integrated OJK Head Office building. Therefore, all work units at head office will gradually be relocated to the Integrated OJK Head Office by 2018. Furthermore, a total of 24 independent OJK regional and branch offices had also been set up using office space provided by provincial administrations or by leasing office space as follows:

No	**Nama Kantor** | Name	No	**Nama Kantor** | Name
1	Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung)	13	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari);
2	Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang),	14	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu),
3	Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya),	15	Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon),
4	Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta),	16	Kantor OJK Prov. Papua (Jayapura),
5	Kantor OJK Solo (Solo),	17	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang),
6	Kantor OJK Tegal (Tegal),	18	Kantor OJK Provinsi Lampung (Bandar Lampung),
7	Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto),	19	Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi),
8	Kantor OJK Jember (Jember),	20	Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu),
9	Kantor OJK Kediri (Kediri),	21	Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar),
10	Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam),	22	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang),
11	Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh),	23	Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin),
12	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar),	24	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya).

Pada 2016, OJK memiliki Sistem Pengelolaan Pengamanan. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset, OJK menyempurnakan aplikasi Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS) untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK dari sisi aset tetap, aset tak berwujud dan persediaan. Penyempurnaan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa, diikuti dengan pengembangan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (*E-Procurement*)

In 2016, OJK implemented a Security Management System. In addition, to support asset management and administration, OJK refined the Asset Administration Information System (SIPUAS) to help prepare the OJK Financial Statements in terms of fixed assets, intangible assets and inventory. Amendments to the Procurement of Goods and Services regulation were followed by E-Procurement development.

OUTLOOK DAN ARAH STRATEGIS OJK 2017

OUTLOOK AND OJK STRATEGIC DIRECTION IN 2017

Perkembangan sektor jasa keuangan nasional 2017 diperkirakan bertumbuh positif dengan meningkatnya proyek infrastruktur pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang berjalan sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Seiring ekspansi perekonomian, tingkat inflasi akan meningkat namun dalam rentang target otoritas moneter. Kondisi ini mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK), terutama dengan tambahan dana repatriasi dari program Tax Amnesty. Terkait dengan sektor perdagangan, kenaikan harga komoditas akan meningkatkan nilai ekspor domestik. Menyikapi kondisi dan tantangan tersebut, kebijakan OJK akan berfokus pada peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata; serta memperkuat ketahanan dan stabilitas sektor jasa keuangan. *Detail* mengenai *Outlook* dan Arah Strategis OJK dijabarkan detail pada bab ini.

OJK predicted the financial services sector to perform well in 2017 in line with the proliferation of government-led infrastructure projects, thereby providing a concrete foundation for long-term national economic development. Congruent with economic expansion, inflation is expected to accelerate but remain within the target corridor set by the monetary authority. Such dynamics are predicted to drive credit and deposit growth, particularly as repatriated funds flow back into the country from the Tax Amnesty. Regarding the trade sector, rising commodity prices will boost the value of domestic exports. Addressing the conditions and challenges, OJK will focus policy on expanding the contribution of the financial services sector to support economic growth, increasing public purchasing power and ensuring equitable development, while strengthening financial services sector resilience and stability. More details on the outlook and strategic direction are presented in this chapter.

Rumah adat Tongkonan, Toraja, Sulawesi Selatan
Tongkonan Traditional House, Toraja, South Sulawesi

OUTLOOK DAN ARAH STRATEGIS OJK 2017

OUTLOOK AND OJK STRATEGIC DIRECTION IN 2017

V.1 *OUTLOOK* EKONOMI 2017

Pertumbuhan PDB Indonesia 2017 diperkirakan meningkat didukung penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Seiring ekspansi perekonomian, tingkat inflasi akan meningkat namun dalam rentang target otoritas moneter sebesar 3-5%. Kondisi ini mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) ke tingkat dua digit, terutama dengan tambahan dana repatriasi dari program *Tax Amnesty*.

Dari sektor perdagangan, *soft landing* pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan berlanjut selama 2017 sehingga membatasi peningkatan volume ekspor Indonesia. Namun demikian, kenaikan harga komoditas seperti batubara, kelapa sawit, dan minyak dunia akan meningkatkan nilai ekspor domestik. Secara umum, *outlook* ekonomi Indonesia 2017 dari OJK dan beberapa lembaga nasional dan internasional dijabarkan pada tabel di bawah:

V.1 ECONOMIC OUTLOOK 2017

GDP growth in Indonesia is predicted to increase in 2017 on household consumption and private investment. Congruent with the expected economic expansion, inflation is also predicted to increase but remain within the target corridor of 3-5%. Such conditions will drive double-digit credit and deposit growth, particularly due to the repatriated funds from the successful Tax Amnesty.

In terms of the trade sector, the soft landing in China is predicted to continue in 2017, thereby squeezing export volume gains in Indonesia. Nonetheless, rising commodity prices, including coal, crude palm oil (CPO) and international oil, will boost domestic exports. In general, the domestic economic outlook for 2017 from OJK and other national and international institutions is presented in Table 1 as follows:

***Outlook* Kondisi Perekonomian 2017** Economic Outlook in 2017		2017F
PDB | GDP	% yoy	5,2
Inflasi | Inflation	% yoy	4,3
Volume Kredit | Credit Volume	% yoy	9 – 11
DPK | Deposits	% yoy	10 – 12
Asumsi | Assumptions		
PDB Dunia* | Global GDP	% yoy	3,4
Harga Minyak* | Oil Price	USD/brl	51,6
Harga Komoditas Non-Oil* | Non-Oil Commodity Prices	% yoy	2,1
US Federal Funds Rate | US Federal Funds Rate (FFR)	% p.a.	1,4

*Catatan: WEO IMF, Januari 2017; The Federal Reserve Amerika Serikat.

*Notes: WEO IMF, January 2017; The Federal Reserve, United States

Proyeksi Antar Lembaga Institution Projections	2017F	
	PDB (yoy) GDP (yoy)	Inflasi (yoy) Inflation (yoy)
OJK | Indonesia Financial Services Authority	5,2%	4,3%
Kementerian Keuangan[1] | Ministry of Finance	5,1%	4,0%
Bank Indonesia[2] | Indonesia Central Bank	5,0% - 5,4%	3,0% – 5,0%
IMF[3] | International Monetary Fund (IMF)	5,3%	4,2%
ADB[4] | Asian Development Bank (ADB)	5,1%	4,0%
World Bank[5] | World Bank	5,3%	4,4%
OECD[6] | OECD	5,2%	4,9%

Catatan:
1 Asumsi makro APBN 2017.
2 Siaran pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 18/ 102 /DKom tanggal 15 Desember 2016.
3 WEO IMF (Oktober 2016).
4 *Asian Development Outlook 2016 Update* (September 2016). Proyeksi inflasi merupakan nilai rata-rata setahun.
5 *Indonesia Economic Quarterly Report* (Oktober 2016). Proyeksi inflasi World Bank merupakan nilai rata-rata setahun.
6 OECD Interim Economic Outlook (Juni 2016).

Notes:
1. State Budget Macro Assumptions 2017.
2. Bank Indonesia Board of Governors Press Release No. 18/102/DKom, dated 15th December 2016.
3. WEO IMF (October 2016).
4. Asian Development Outlook: 2016 Update (September 2016). Projected inflation is average annualised rate.
5. Indonesia Economic Quarterly Report (October 2016). WB projected inflation is average annualised rate.
6. OECD Interim Economic Outlook (June 2016).

V.2 ARAH STRATEGIS OJK 2017

Pada 2017, perekonomian Indonesia diprediksi bertumbuh positif dengan banyaknya proyek infrastruktur pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang berjalan sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan peluang bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, menurunkan tingkat pengggangguran dan angka kemiskinan, pemerataan pendapatan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dua fokus yang menjadi perhatian OJK, antara lain: (1) meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata; serta (2) memperkuat ketahanan dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Terkait dengan fokus pertama, OJK memiliki beberapa inisiatif, antara lain (1) Optimalisasi program kerja yang telah digagas bersama Industri; (2) Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyempurnakan skema pembiayaan di daerah; (3) Optimalisasi peran TPAKD yang sudah terbentuk; (4) Perluasan akses keuangan masyarakat melalui *financial technology*; (5) Mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor-sektor produktif; dan (6) Peningkatan peran SJK untuk menunjang pembangunan daerah terutama optimalisasi peran BPD; serta (7) Peningkatan peran Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Pelaksanaan inisiatif tersebut ditujukan untuk seluruh lini lapisan masyarakat.

V.2 OJK STRATEGIC DIRECTION IN 2017

In 2017, positive economic growth in Indonesia is predicted on the back of numerous central and regional government infrastructure projects, which will provide a solid foundation for long-term national economic growth. Infrastructure development will provide an opportunity for the financial services sector to contribute to local economic growth, while lowering unemployment and reducing poverty, balancing income inequality in rural areas and ameliorating public prosperity.

Consequently, OJK will focus on two areas in 2017 as follows: (1) increasing the contribution of the financial services sector to support economic growth, improve public purchasing power, and balance income distribution; and (2) strengthening financial services sector resilience and stability.

Regarding the first area of focus, OJK has several initiatives, as follows: (1) Optimise work programs initiated jointly with the Industry; (2) Cooperate with regional administrations and relevant parties to refine the local financing schemes; (3) Optimise the existing Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD); (4) Expand public financial access through Fintech; (5) Stimulate the growth of credit/financing towards productive sectors; (6) Expand the role of financial services sector to support local development by optimising regional banks; and (7) Expand the role of the Capital Market as a source of long-term financing. The initiatives aim to reach all social strata in Indonesia.

OUTLOOK DAN ARAH STRATEGIS OJK 2017
OUTLOOK AND OJK STRATEGIC DIRECTION IN 2017

Demi memperlancar pelaksanaan inisiatif, OJK melakukan program pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Program pendampingan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan industri jasa keuangan, khususnya terkait program sosialisasi dan edukasi keuangan masyarakat, penguatan pengawasan *market conduct*, termasuk juga menjaga agar investasi masyarakat di daerah terus meningkat.

Supporting implementation of the initiatives, OJK also runs a public mentoring program to enhance financial management and business management capacity. The mentoring program is important to raise financial literacy and inclusion, and is implemented with the active involvement of the financial services industry, particularly in terms of socialisation and education, as well as strengthening market conduct supervision, including stimulating local investment.

Terkait fokus kedua, OJK berencana melakukan beberapa kegiatan, antara lain: (1) Penerbitan kebijakan mengenai pengelolaan risiko likuiditas konglomerasi, manajemen permodalan konglomerasi, dan *intra-group transaction exposures* untuk melengkapi pengaturan kecukupan modal, manajemen risiko, dan tata kelola konglomerasi keuangan; (2) Penyediaan likuiditas yang cukup dalam pembiayaan pembangunan serta dengan seksama mengamati perkembangannya; (3) Penerbitan beberapa peraturan terkait Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), khususnya ketentuan mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi Bank Sistemik; serta (4) Penerbitan ketentuan yang mendorong bisnis industri keuangan non bank dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Concerning the second area of focus, OJK plans several activities as follows: (1) Issuing policy on conglomerate liquidity risk management, conglomerate capital management, and intra-group transaction exposures to complement the existing regulations on financial conglomerate capital adequacy, risk management and governance; (2) Providing adequate liquidity to finance development and carefully observing its progressions; (3) Issuing several provisions relating to the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act, specifically provisions concerning the recovery plans for Systemic Banks; and (4) Issuing regulations to stimulate healthy and sustainable business growth in the nonbank financial industry.

Terkait dengan perkembangan industri jasa keuangan syariah, OJK mendorong peran keuangan syariah agar berkontribusi lebih baik lagi bagi perekonomian nasional; dan mendorong berdirinya Jakarta *International Islamic Financial Center* (JI-IFC) yang merupakan pusat bisnis dan investasi syariah dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

In terms of sharia financial services industry development, OJK constantly seeks to expand the contribution of sharia finance to the national economy, while encouraging establishment of the Jakarta International Islamic Financial Centre (JI-IFC) as a sharia business and investment centre in the form of Special Economic Zones (SEZ).

V.3 PETA STRATEGIS OJK 2017

Mempertimbangkan *Outlook* 2017, analisis *Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law* (PESTEL), analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT), hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan hasil survei dari seluruh pemangku kepentingan dan program ekonomi pemerintah serta *Destination Statement* OJK 2017, OJK melakukan penajaman dan penguatan Sasaran Strategis OJK di 2017. Penajaman *Strategy Map* 2017 difokuskan pada pelaksanaan MPSJKI dan mendorong pertumbuhan SJK Syariah serta penguatan peraturan SJK yang selaras dan terintegrasi.

V.3 OJK STRATEGIC MAP 2017

OJK refined and strengthened its Strategic Targets for 2017, paying due consideration to the Outlook for 2017; Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental (PESTLE) analysis; SWOT analysis; Focus Group Discussions (FGD) with relevant stakeholders; government economic programs; and the OJK Destination Statement for 2017. Refinements to the Strategy Map 2017 focused on implementation of the Medium-Term Financial Services Sector Master Plan and accelerating sharia financial services sector growth, while also synergising integrated financial services sector regulations.

Peta Strategi OJK Wide 2017
Strategy Map OJK Wide 2017

Stakeholder

SS.1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Kontributif, Stabil dan Inklusif
SS.1. Realise a Contributive, Stable and Inclusive Financial Services Sector

IKU 1.1 Indeks Kinerja OJK
IKU 1.2 Indeks Inklusifitas Produk/Jasa Keuangan
IKU 1.3 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja OJK

IKU 1.1 Financial Services Sector Performance Index
IKU 1.2 Financial Services/Product Inclusiveness Index
IKU 1.3 Stakeholder Satisfaction in terms of OJK Performance

Internal Process

SS.2. Mengembangkan SJK yang Kontibutif
SS.2 Build a Contributive Financial Services Sector

IKU 2.1 Kontribusi SJK pada sektor Prioritas Pemerintah
IKU 2.2 Pengembangan *Sustainable Finance*
IKU 2.3 Peningkatan kualitas dan Peran Pelaku SJK

IKU 2.1 Financial Services Sector Contribution to Government Priority Sectors
IKU 2.2 Sustainable Financial Development
IKU 2.3 Increase Quality and Role of Financial Services Sector Players

SS.3. Mengembangkan SJK yang Stabil
SS.3. Build a Stable Financial Services Sector

IKU 3.1 Penguatan Protokol Manajemen Krisis
IKU 3.2 Tindak Pengawasan Dalam Rangka Menciptakan IJK yang *Resilient*
IKU 3.3 Pelayanan Perizinan Terintegrasi
IKU 3.4 Meningkatkan Kualitas *Surveillance* Sistem Keuangan

IKU 3.1 Strengthen Crisis Management Protocol (CMP)
IKU 3.2 Supervision to Create a Resilient Financial Services Industry
IKU 3.3 Integrated Licensing Services
IKU 3.4 Financial System Surveillance Quality

SS.4. Mengembangkan SJK yang Inklusif
SS.4. Build an Inclusive Financial Services Sector

IKU 4.1 Pengembangan Produk dan atau Layanan Keuangan dan Mikro
IKU 4.2 Tingkat Pelaksanaan Program Manfaat Balik kepada IJK dan *Stakeholder*
IKU 4.3 Peran OJK terhadap peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah

IKU 4.1 Develop Microfinance Products and Services
IKU 4.2 Recycling Program Implementation for the Financial Services Industry and Stakeholders
IKU 4.3 OJK Role in Local Economic Development

SS.5. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah
SS.5 Accelerate Sharia Financial Services Sector Growth

IKU 5.1 Tingkat Pelaksanaan Program Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah

IKU 5.1 Sharia Financial Services Sector Growth Acceleration Program Implementation

SS.6. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi
SS.6 Improve Integrated and Synergic Financial Services Sector Regulations

IKU 6.1 Penerbitan Peraturan yang Dapat Meningkatkan SJK yang Kontributif, Stabil dan Inklusif

IKU 6.1 Promulgate Regulations to Create a Contributive, Stable and Inclusive Financial Services Sector

Strategic Support

SS.7. Meningkatkan Tata Kelola yang Efektif
SS.7. Effective Governance

IKU 7.1 Efektivitas Fungsi Asuransi OJK
IKU 7.2 Efektivitas Penerapan *Governance* OJK

IKU 7.1 Effective OJK Assurance Function
IKU 7.2 Effective OJK Governance

SS.8. Mewujudkan Kemandirian Keuangan yang Akuntabel
SS.8 Realise Accountable Financial Independence

IKU 8.1 Kualitas Laporan Keuangan OJK
IKU 8.2 Pengelolaan Penerimaan Pengutan yang Optimal
IKU 8.3 Perencanaan Anggaran yang Optimal

IKU 8.1 OJK Financial Statement Quality
IKU 8.2 Optimal Levy Receipt Management
IKU 8.3 Optimal Budget Planning

SS.9. Meningkatkan Profesionalisme SDM dan Efektivitas Organisasi
SS.9. Enhance HR Professionalism and Organisational Effectiveness

IKU 9.1 Tingkat Pemenuhan SDM secara Kualitas
IKU 9.2 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Organisasi OJK

IKU 9.1 HR Recruitment Quality
IKU 9.2 OJK Organisational Effectiveness and Efficiency

SS.10 Mengembangkan Infrastruktur yang Handal
SS.10 Develop Reliable Infrastructure

IKU 10.1 Persentase Realisasi Program Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SI
IKU 10.2 Persentase Realisasi Penyediaan Gedung Kantor OJK di Daerah yang Mandiri

IKU 10.1 Realisation of the IS Infrastructure and Application Development Program
IKU 10.2 Realisation of Independent Regional and Branch Office Space

OUTLOOK DAN ARAH STRATEGIS OJK 2017
OUTLOOK AND OJK STRATEGIC DIRECTION IN 2017

Peta Strategis OJK 2017 terdiri dari 11 Sasaran Strategis yang terbagi menjadi tiga perspektif, yaitu Stakeholders Perspective, *Internal Process* dan *Strategic Support*.

Pada Stakeholders Perspective, Sasaran Strategis OJK adalah terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif. Indikator keberhasilan akan diukur dari indeks kinerja, tingkat inklusifitas produk jasa keuangan dan survei kepuasan pemangku kepentingan.

Pada perspektif *internal process*, Sasaran Strategis diselaraskan dengan implementasi *roadmap* MPSJKI dengan Sasaran Strategis antara lain: (1) Mengembangkan SJK yang kontributif; (2) Mengembangkan SJK yang stabil dan (3) Mengembangkan SJK yang inklusif. Selain itu, Sasaran Strategis juga mendorong pertumbuhan SJK syariah dan pengaturan SJK yang selaras.

Untuk mendukung pengembangan SJK yang kontributif, target kinerja diukur dari kontribusi SJK dalam kredit/pembiayaan sektor prioritas pemerintah, implementasi *roadmap Sustainable Finance* serta peningkatan kualitas dan peran SJK. Untuk mendukung pengembangan SJK yang Stabil, target kinerja diukur dari penguatan protokol manajemen krisis, tindak pengawasan dalam menciptakan IJK yang *resilient*, kualitas pelayanan perizinan terintegrasi dan peningkatan kualitas pengawasan sistem keuangan. Sementara itu, untuk mendukung pengembangan SJK yang inklusif, target kinerja diukur melalui pengembangan produk dan layangan keuangan mikro, tingkat pelaksanaan program manfaat balik dan peran OJK terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Sasaran Strategis level OJK *Wide* tersebut selanjutnya diturunkan (*cascade*) ke level Satuan Kerja (Satker) dengan memperhatikan prinsip keselarasan baik di level OJK maupun lintas Satker.

The OJK Strategy Map for 2017 consists of 11 Strategic Targets divided into three perspectives, namely Stakeholder, Internal Process and Strategic Support.

From a Stakeholder perspective, the Strategic Target is to create a contributive, stable and inclusive financial services sector. Success will be measured using the performance index, the financial products/services inclusiveness index, and stakeholder satisfaction survey.

Concerning the Internal Process perspective, the Strategic Targets are aligned with the roadmap for the Medium-Term Financial Services Sector Master Plan as follows: (1) build a contributive financial services sector; (2) build a stable financial services sector; and (3) build an inclusive financial services sector. In addition, the Strategic Targets also promote sharia financial services sector growth and synergic financial services sector regulations.

Supporting the development of a contributive financial services sector, the performance targets are measured using the contribution of the financial services sector to credit/financing for government priority sectors, implementation of the Sustainable Finance Roadmap as well as increasing the quality and role of the financial services sector. Supporting the development of a stable financial services sector, the performance targets are measured using the Crisis Management Protocol (CMP), supervision to create a resilient financial services industry, integrated licensing service quality, and financial system surveillance quality. Meanwhile, supporting the development of an inclusive financial services sector, the performance targets are measured using microfinance product and service development, recycling program implementation and OJK's role in terms of improving local economic conditions.

The OJK-wide Strategic Targets are cascaded down to the work unit level while paying due attention to the principles of synergy at the OJK and work unit levels.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016

OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Alat musik Pompang, Toraja, Sulawesi Selatan
Pompang Traditional Bamboo Flute, Toraja, South Sulawesi

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Posisi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan professional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijkaan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir 2.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 3.9 atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan belum adanya penetapan status atas Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 73b/LHP/XV/07/2017 dan Nomor 73c/LHP/XV/07/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 10 Juli 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Bahtiar Arif
Register Negara Akuntan Nomor RNA-14789

The Audit Board of the Republic of Indonesia

The Auditor's Report on OJK Financial Statements

Report on the Financial Statements

Pursuant to Act No. 15 of 2004 concerning the State Financial Management and Accountability Audit, Act No. 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia and Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), the Audit Board of the Republic of Indonesia has audited the Statement of Financial Position of the Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2016 and 2015 and the Statement of Cash Flows for the year then ended, as well as the Notes to the Financial Statements.

OJK's Responsibility for the Financial Statements

The Financial Services Authority is accountable for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Accounting Policy of the Financial Services Authority, including the maintenance of internal control deemed necessary by the Financial Services Authority (OJK) relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

The Auditor's responsibility is to express an opinion on these financial statements based on National Auditing Standards. Those standards require the Audit Board of the Republic of Indonesia to comply with the code of ethics as well as plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The audit involves performing procedures to obtain audit evidence concerning the amounts and disclosures in the financial statements. The audit, based on professional consideration, including a risk-assessment of the materials presented in the financial statements, assesses the relevant internal controls when preparing and presenting the OJK Financial Statements but the evaluation conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia does not express an opinion on the effectiveness of OJK internal control. The Audit Board also evaluates the appropriateness of the accounting principles used and the reasonableness of the significant accounting estimates made by the Financial Services Authority (OJK), evaluates compliance to prevailing regulations, evaluates the internal control system that influences the materials in the financial statements as well as evaluates the overall presentation of the financial statements.

The Audit Board of the Republic of Indonesia believes that sufficient and appropriate evidence has been obtained to provide a basis for an audit opinion.

Opinion

According to the opinion of the Audit Board of the Republic of Indonesia, the financial statements referred to above present fairly, in all materials respects, the financial position of the Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2016 and 2015, and the results of its operations and cash flows for the year then ended in accordance with the Accounting Policy of the Financial Services Authority as elucidated in point 2 of the Notes to the Financial Statements.

Explanatory Paragraph

The Audit Board of the Republic of Indonesia draws attention to Note 3.9 of the attached Financial Statements of the Financial Services Authority (OJK) that explains the absence of the status for Fixed Assets and Intangible Assets financed by State Budget Funds.

Others

As part of obtaining reasonable assurance about the financial statements, the Audit Board of the Republic of Indonesia also audited the internal control system and compliance to prevailing regulations. The report of the evaluation of the internal control system and report of compliance to prevailing regulations are presented in Report No. 73b/LHP/XV/07/2017 and No. 73c/LHP/XV/07/2017, dated 10th July 2017, as an integral part of this report.

Jakarta, 10th July 2017

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Person in Charge of Audit

signed

Bahtiar Arif
State Register Number RNA-14789

SURAT PERNYATAAN
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2016

STATEMENT OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF
THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY 2016

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 telah dimuat secara lengkap.
   b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2017

Wakil Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan,
Vice Chairman
OJK Board of Commissioners

Rahmat Walutanto

We, OJK Board of Commissioners find that:

1. We are accountable for the preparation and presentation of OJK Financial Statements 2016.
2. OJK Financial Statements 2016 have been prepared and presented in accordance with OJK accounting policy and standards.
3. a. All information presented in the OJK Financial Statements 2016 is complete.
   b. OJK Financial Statements 2016 do not contain incorrect information or material misstatement of facts nor omit information or material facts.
4. We are accountable for the OJK internal control system.

We hereby certify that the information contained therein this statement is correct.

Jakarta, 10th July 2017

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan,
Chairman
OJK Board of Commissioners

Muliaman D. Hadad

OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

STATEMENT OF OJK BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING
ACCOUNTABILITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIODS ENDING 31 DECEMBER 2016 AND 31 DECEMBER 2015

Jakarta, 10 Juli 2017 / 10th July 2017
Diketahui dan disetujui oleh: / Acknowledged and approved by:

Nelson Tampubolon sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Nelson Tampubolon as Executive Head of Banking Supervision and member of OJK Board of Commissioners	
Nurhaida sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida as Executive Head of Capital Market Supervision and member of OJK Board of Commissioners	
Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani as Executive Head of Non Bank Financial Industry Supervision and member of OJK Board of Commissioners	
Ilya Avianti sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti as Chairman of the Audit Board and member of OJK Board of Commissioners	
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono as member of OJK Board of Commissioners in charge of Consumer Education and Protection	
Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan Mardiasmo as Ex-Officio member of OJK Board of Commissioners from Ministry of Finance	
Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* Bank Indonesia Mirza Adityaswara as Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners form Bank Indonesia	

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2016 (Audited) dan 31 Desember 2015 (Audited)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31st December 2016 (Audited) and 31st December 2015 (Audited)

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Uraian | Description	Catatan Notes	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
ASET | ASSETS			
ASET LANCAR | CURRENT ASSETS			
Kas dan Setara Kas | Cash and Cash Equivalents	2.5, 3.1	9.745.118.859	59.850.625.535
Kas yang Dibatasi Penggunaannya | Restricted Cash	2.6, 3.2	4.570.587.520.254	1.633.701.504.957
Surat Berharga | Securities	2.7, 3.3	-	2.660.420.929.948
Piutang | Receivables	2.8, 3.4	41.734.411.503	25.144.547.797
Persediaan | Supplies	2.9, 3.5	22.136.480.553	7.735.387.289
Uang Muka Pembelian | Purchase Advances	2.10, 3.6	1.429.300.000	-
Beban Dibayar Dimuka | Prepaid Expenses	2.11, 3.7	722.792.177.281	209.667.635.790
JUMLAH ASET LANCAR | TOTAL CURRENT ASSETS		**5.368.425.008.450**	**4.596.520.631.316**
ASET TIDAK LANCAR | NON-CURRENT ASSETS			
Aset Tetap | Fixed Assets	**2.12, 3.8**		
Tanah | Land		137.397.349.139	7.500.000.000
Bangunan | Buildings		22.042.737.193	-
Peralatan dan Mesin | Equipment and Machinery		545.114.426.135	433.167.338.331
Aset Tetap Lainnya | Other Fixed Assets		40.643.345.210	26.106.430.932
Akumulasi Penyusutan | Accumulated Depreciation		(209.700.492.614)	(112.633.572.330)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan | Total Fixed Assets Less Accumulated Depreciation		535.497.365.063	354.140.196.933
Aset Takberwujud | Intangible Assets	**2.12, 3.9**		
Software | Software		243.555.495.445	141.087.928.838
Amortisasi *Software* | Software Amortisation		(65.360.970.639)	(30.337.667.875)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi | Total Intangible Assets Less Amortisation		178.194.524.806	110.750.260.963
Aset Lainnya | Other Assets	**2.13, 3.10**		
Aset Pajak Tangguhan | Deferred Tax Assets		378.704.945.750	238.419.480.250
Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang | Long-Term Employee Benefit Fund		180.715.820.995	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | TOTAL NON-CURRENT ASSETS		**1.273.112.656.614**	**703.309.938.146**
JUMLAH ASET | TOTAL ASSETS		**6.641.537.665.064**	**5.299.830.569.462**
LIABILITAS | LIABILITIES			
LIABILITAS JANGKA PENDEK | CURRENT LIABILITIES			
Utang Operasional dan Administratif | Operating and Administrative Liabilities	2.14, 3.11	13.681.413.737	64.490.754.225
Pendapatan Diterima Dimuka | Unearned Revenue	2.14, 3.12	21.647.754.921	14.510.361.627
Utang Setoran ke Kas Negara | Payable to State Treasury	2.14, 3.13	1.805.018.736	15.171.713.057
Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja | Current Liabilities of Long-term Employee and Post-Employment Benefit	2.14, 3.14	486.226.763.853	154.207.445.000
Utang Pajak Badan | Corporate Tax Payables	2.15, 3.15	892.470.720.403	237.639.924.462
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | TOTAL CURRENT LIABILITIES		**1.415.831.671.650**	**486.020.198.371**
LIABILITAS JANGKA PANJANG | NON CURRENT LIABILITIES			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja | Long-Term Employee and Post-Employment Benefits Obligation	2.14, 3.14	1.028.593.020.000	911.731.599.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | TOTAL NON CURRENT LIABILITIES		**1.028.593.020.000**	**911.731.599.000**
JUMLAH LIABILITAS | TOTAL LIABILITIES		**2.444.424.691.650**	**1.397.751.797.371**
ASET NETO | NET ASSETS			
Aset Neto Tidak Terikat | Unrestricted Net Assets	2.16, 3.16	4.197.112.973.414	3.902.078.772.091
JUMLAH ASET NETO | TOTAL NET ASSETS		**4.197.112.973.414**	**3.902.078.772.091**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements.

LAPORAN AKTIVITAS
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 (Audited) dan 31 Desember 2015 (Audited)
STATEMENT OF ACTIVITIES
Period Ending 31st December 2016 (Audited) and 31st December 2015 (Audited)

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Uraian | Description	Catatan Notes	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT | CHANGE IN UNRESTRICTED NET ASSETS			
PENDAPATAN | REVENUE	2.3, 3.17		
Pendapatan Pungutan | Levy Income		4.416.320.218.849	3.924.646.956.260
Pendapatan APBN | State Budget Income		-	1.730.626.337.451
Pendapatan Lainnya | Other Income		-	-
Jumlah Pendapatan | Total Revenue		**4.416.320.218.849**	**5.655.273.293.711**
BEBAN | EXPENSES	2.4, 3.18		
Beban Kegiatan Operasional | Operating Expenses		487.634.978.517	530.706.001.785
Beban Kegiatan Administratif | Administrative Expenses		3.501.911.870.740	2.948.045.303.050
Beban Kegiatan Pengadaan Aset | Asset Procurement Expenses		148.318.518.969	111.616.271.492
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya | Other Supporting Expenses		28.416.460.859	44.281.940.014
Jumlah Beban | Total Expenses		**4.166.281.829.085**	**3.634.649.516.341**
PERUBAHAN ASET NETO | CHANGES IN NET ASSETS		**250.038.389.764**	**2.020.623.777.370**
SALDO AWAL ASET NETO PER 31 DESEMBER 2015 | NET ASSET BEGINNING BALANCE AS OF 31st DECEMBER 2015		**3.902.078.772.091**	**1.826.082.487.224**
Penyesuaian Aset Neto | Net Asset Adjustments	2.15, 3.16	44.995.811.559	55.372.507.497
SALDO ASET NETO PER 31 DESEMBER 2016 | NET ASSET BALANCE AS OF 31st DECEMBER 2016		**4.197.112.973.414**	**3.902.078.772.091**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements.

LAPORAN ARUS KAS
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 (Audited) dan 31 Desember 2015 (Audited)
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF CASH FLOWS
Period Ending 31st December 2016 (Audited) and 31st December 2015 (Audited)

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Uraian | Description	Catatan Notes	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		**786.614.328.831**	**2.336.432.546.340**
Arus Masuk | Cash Inflow		**4.398.874.720.492**	**5.684.036.059.299**
Pendapatan Pungutan OJK | OJK Levy Income	3.19	4.397.069.701.756	3.953.409.721.848
Pendapatan APBN | State Budget Income		1.805.018.736	1.730.626.337.451
Pendapatan Lainnya | Other Income		-	-
Arus Keluar | Cash Outflow	**3.19**	**(3.612.260.391.661)**	**(3.347.603.512.959)**
Beban Kegiatan Operasional | Operating Expenses		(486.862.833.847)	(522.064.564.661)
Beban Kegiatan Administratif | Administrative Expenses		(3.052.379.543.527)	(2.644.923.571.144)
Beban Kegiatan Pengadaan Aset | Asset Procurement Expenses		(30.629.389.185)	(19.156.891.362)
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya | Other Supporting Expenses		(27.216.912.045)	(44.281.940.014)
Penyetoran ke Kas Negara Tahun Sebelumnya | State Treasury Deposit from Previous Year		(15.171.713.057)	(117.176.545.778)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi | Net Cash Flow from Operating Activities		**786.614.328.831**	**2.336.432.546.340**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		**(379.538.929.163)**	**(150.459.360.710)**
Arus Keluar | Cash Outflow	**3.19**	**(379.538.929.163)**	**(150.459.360.710)**
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud | Acquisition of Fixed and Intangible Assets		(379.538.929.163)	(150.459.360.710)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | Net Cash Flow from Investment Activities		**(379.538.929.163)**	**(150.459.360.710)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | NET INCREASE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		**407.075.399.668**	**2.185.973.185.630**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		**4.353.973.060.440**	**2.167.999.874.810**
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS DITAMBAH KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANYA 31 DESEMBER 2016 | TOTAL BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AS OF 31st DECEMBER 2016		**4.761.048.460.108**	**4.353.973.060.440**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

VI.1 UMUM

VI.1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Sementara berdasarkan pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan

VI.1 GENERAL

VI.1.1 Organization

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is an independent institution tasked with regulating, supervising, inspecting and investigating in accordance with the Act of Republic Indonesia (No. 21) of 2011 on Otoritas Jasa Keuangan established on the 22nd of November 2011. The regulation and supervision of financial services in the Capital Market and Nonbank Financial Industry were transferred to OJK from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) on 31st December 2012, while the Banking regulation and supervision function were transferred from Bank Indonesia to OJK on 31st December 2013.

In accordance with article 4 of the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK is established with the aim that all activities within the financial sector are executed in an organized manner, fair, transparant, accountable and capable of realizing a sustainable and stable financial system that protects the interests of consumers and society.

OJK functions as the organiser of integrated regulation and supervision system to the entire activities within the financial sector. In accordance with article 6 OJK Act (No. 11) of 2011, the main tasks of OJK is to implement regulation and supervision towards:

a. Financial activities in Banking sector
b. Financial activities in Capital Market sevtor
c. Financial activities in Non-Bank Financial Industry (NBFI) sector

Pursuant to the OJK Act (No 21) of 2011, the Board of Commissioners has prepared and stipulated the OJK Work Plan and Budget. The OJK Budget is sourced from the State Budget (APBN) and/or levy revenue from entities operating in the financial services sector. OJK Budget is used to finance operational, administrative, procurement, and other supporting activities. Budget and its utilization are set according to reasonable standards among the financial sector and excluded from general cost standard, goods and services procurement and remuneration system as regulated in legislation relating to the State Revenue and Expenditure Budget, procurement of Government goods and services, and remuneration system. The stipulation of OJK Budget requires the House of Representative consent.

OJK charges levy revenue from entities operating in the financial services sector. Entities operating in the financial services are obligated to pay levies imposed by OJK. The levies are revenues to OJK. OJK receives, manages and administers the levies accountably

mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

and independently. In the case of Levy Revenue received in the current year exceeds the OJK requirement for the following fiscal year, the surplus is deposited to the State Treasury

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

OJK is required to prepare financial reports every 6 and 12 months. Period of the report is from 1st Januari to 31st December. OJK is also required to prepare activity reports which consist of monthly activity report, quarterly ectivity report and annually activity report. OJK is required to submit the quarterly activity report to the House of Representatives as a form of public accountability. Meanwhile, the annually activity report is to be submitted to the President and the House of Representatives. A specific standard and accounting policies is set by the Board of Commisioner for annual report drafting.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pursuant to Board of Commissioner (BOC) Regulation (PDK) No. 01/13/PDK/XII/2012 concerning OJK Accounting Standard and Policies, the main purpose of OJK financial reporting is to ensure transparency and public accountability. This is because OJK is established based on OJK Act No. 21 of 2011. The law states that OJK is required to announce the financial report publication to the public through printed and electronic media. OJK Financial Report is audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) or public accounting firm appointed.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana pada Lampiran I.

OJK has made changes to its organisational structure as stipulated in the BOC Regulation No. 1/PDK.02/2016 as an amendment to BOC Regulation No. 12/PDK.02/2015 concerning Organisation Structure of OJK, applied retroactively from 22nd December 2015, as presented in Appendix I.

OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P tanggal 18 Juli 2012 dan Nomor 72/P tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK, dengan susunan Dewan Komisioner terdiri dari:

a. Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Rahmat Waluyanto sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
c. Nelson Tampubolon sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
d. Nurhaida sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
e. Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

OJK is led by a Board of Commissioners comprised of nine members appointed pursuant to RI Presidential Decree No. 67/P, dated 18th July 2012, and No. 72/P, dated 7th August 2012, concerning the Appointment of the OJK Board of Commissioners as follows:

a. Muliaman D. Hadad, as Chairman of the Financial Services Authority (OJK) and member of the Board of Commissioners;
b. Rahmat Waluyanto, as Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners and member of the Board of Commissioners;
c. Nelson Tampubolon, as Executive Head of Banking Supervision and member of the Board of Commissioners;
d. Nurhaida, as Executive Head of Capital Market Supervision and member of the Board of Commissioners;
e. Firdaus Djaelani, as Executive Head of NBFI Supervision and member of the Board of Commissioners;

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

f. Ilya Avianti sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/P Tahun 2014 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan menggantikan Anny Ratnawati;
i. Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* Bank Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner OJK menggantikan Halim Alamsyah.

VI.1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

VI.1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 11/KDK.02/2015 tentang Pembentukan Dewan Audit OJK Periode Tahun 2015-2017 terhitung sejak 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

a. Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner, yaitu Ilya Avianti;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
   1. Janto Hoesada;
   2. Poppy Sofia Koeswayo;
   3. Anis Baridwan; dan
   4. Zainal Arifin Mochtar.

VI.1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 10/KDK.02/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Komisioner Nomor 15/KDK.02/2013 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 1 Maret 2014. Susunan Komite Etik Level Governance di OJK terdiri dari:

f. Ilya Avianti, as Chairman of the Audit Board and member of OJK Board of Commissioner;
g. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, as member of OJK Board of Commissioner;
h. Mardiasmo, as Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance pursuant to RI Presidential Decree No. 143/P of 2014 concerning the replacement of Ex-Officio Members of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance, replacing Anny Ratnawati;
i. Mirza Adityaswara, as Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia pursuant to RI Presidential Decree No. 61 of 2015, dated 23rd July 2015, concerning the replacement of Ex-Officio Members of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia, replacing Halim Alamsyah.

VI.1.2 Audit Board and Ethics Committee

VI.1.2.1 Audit Board

The Audit Board was established in 2012 in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 04/PDK.02/2015, dated 5th March 2015, concerning the Audit Board of the OJK. In accordance with BOC Decree No. 11/KDK.02/2015, regarding the Appointment of the Audit Board for the period from 2015-2017, effective from 1st April 2015 until 31st March 2017, the members of the Audit Board are as follows:

a. Ilya Avianti, as Chairman of the Audit Board and member of OJK Board of Commissioner
b. Members of the Audit Board, namely:
   1. Janto Hoesada;
   2. Poppy Sofia Koeswayo;
   3. Anis Baridwan; and
   4. Zainal Arifin Mochtar.

VI.1.2.2 Ethics Committee

A supporting organ to the Board of Commissioners was established as the embodiment of integrity and independence as well as to prevent violations of the OJK Code of Ethics, charged with overseeing the compliance of the OJK BOC, officials and employees to the Code as stipulated in KDK No. 10/KDK.02/2014, as the third amendment to KDK No. 15/KDK.02/2013 concerning Establishment of the OJK Ethics Committee, dated 1st March 2014. The structure of the governance level Ethics Committee is as follows:

a. Ketua: Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
b. Anggota:
   1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
   2. Anggota Eksternal:
      (a) Mas Achmad Daniri;
      (b) Emmy Yuhassarie Ruru.

   Sekretariat Komite Etik Level Governance adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK.

a. Head: Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners
b. Members:
   1. Member of the OJK Board of Commissioners in charge of the Internal Audit and Risk Management
   2. External Members:
      (a) Mas Achmad Daniri; and
      (b) Emmy Yuhassarie Ruru.

   The Secretariat of the Governance Level Ethics Committee is the OJK Organisation and Human Resources Department.

VI.1.3 Jumlah Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Regional OJK dan 26 Kantor OJK.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 4.286 orang dengan komposisi sebagai berikut.

VI.1.3 Number of Offices and Employees of OJK

OJK is located in the capital of The Unitary State of the Republic of Indonesia and may have offices within and outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as needed. OJK is headquartered at the Sumitro Djohohadikusumo Building on Jalan Lapangan Banteng Timur Number 2-4 in Central Jakarta. Pursuant to BOC Regulation No. 1/PDK.02/2016 as an amendment to BOC Regulation No. 12/PDK.02/2015 concerning Organisation Structure of OJK, applied retroactively from 22nd December 2015, OJK has 36 (thirty six) offices consist of 1 Head Office, 9 Regional Offices and 26 Branch Offices.

In the execution of its duties, OJK is supported by 4,286 employees as follows:

No	Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
1.	Pegawai Tetap | Permanent Employees;	2.376	1.882
2.	Bank Indonesia (penugasan pada OJK) | Bank Indonesia Employees (assigned to OJK);	1.045	1.081
3.	Tertentu (PKWT) dan Pegawai Honorer | Fixed-Term Contract Employees and Honorary Employees;	244	449
4.	Calon Pegawai | Candidate Staff Members;	596	220
5.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK | Other Institution Employee Hired at OJK	25	19
Jumlah		**4.286**	**3.651**

Pembayaran gaji Pegawai Penugasan dari Bank Indonesia di OJK Tahun 2016 dilakukan oleh Bank Indonesia dan tunjangan kesetaraannya dibayar oleh OJK. Pada tanggal 1 Januari 2017 jumlah pegawai penugasan dari Bank Indonesia di OJK yang kembali ke Bank Indonesia sejumlah 347 orang, sehingga jumlah pegawai yang menentukan pilihan di OJK sejumlah 698 orang.

Remunerations for BI employees assigned to OJK in 2016 were paid by Bank Indonesia with allowances equivalent to those paid by Bank Indonesia. On 1st January 2017, 347 Bank Indonesia employees assigned to OJK returned, leaving 698 employees who decided to stay in OJK.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

VI.1.4 Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 sumber penerimaan OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 40/KDK.02/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2016 ditetapkan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2016 sebesar Rp3.934.100.000.000,00. Dalam realisasinya, penerimaan pungutan OJK Tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp4.627.312.947,00 yang selanjutnya berdasarkan Catatan Dinas Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor CD-1/MS.4/2017 digunakan sebagai tambahan pembayaran PPh Badan OJK tahun 2015. Selain itu, terdapat penerimaan jasa giro tahun 2015 sebesar Rp172.047.274,00 yang digunakan untuk pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner Nomor 165/KRDK/2016 tanggal 21 Desember 2016. Dengan demikian, realisasi dana pungutan yang digunakan untuk membiayai operasional OJK Tahun 2016 adalah sebesar Rp3.938.899.360.221,00.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

VI.1.4 OJK Sources of Funding

In accordance with Article 34, paragraph 2, of the OJK Act (No. 21) of 2011, Board of Commissioners prepare and stipulate OJK Work Plan and Budget. In the beginning of its establishment OJK Budget was sourced from the state budget. However, from 2016 onwards, OJK financing was sourced solely from the levy payments by entities operating in the financial services sector.

In accordance with BOC Regulation No. 40/KDK.02/2015 dated 21st December 2015, concerning OJK Work Plan and Budget for 2016, it is stated that OJK budget for 2016 was Rp3.934.100.000.000,00. In realization, the payment of OJK levy received in 2015 exceeds the target set amounting to Rp4.627.312.947,00 which then based on Catatan Dinas Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB No. CD-1/MS.4/2017 used as an addition to OJK Income Tax payment for 2015. Other than that there are penerimaan jasa giro in 2015 amounting to Rp172.047.274,00 which was used to pay taxes pursuant to KRDK No 165/KRDK/2016 dated 21st Desember 2016. Therefore, realized levy revenue which was used to fund OJK operational activities in 2016 is Rp3.938.899.360.221,00.

A summary of OJK funding sources from 2013 to 2016 are as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Tahun Anggaran | Fiscal Year	APBN | State Budget		Pungutan | Levy Income		Jumlah | Total
	Rp	%	Rp	%	Rp
2013	1.645.293.987.000	100	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46	2.009.326.213.485	54	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100	3.938.899.360.221

VI.2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

VI.2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

When compiling the OJK Financial Statements in accordance with Article 38, paragraph 7 of the OJK Act (No. 21) of 2011, the Board of Commissioners applied the Accounting Standards and Policy contained in PDK No. 01/13/PDK/XII/2012, dated 28th December 2012, regarding the OJK Accounting Standards and Policy, which was most recently amended by PDK No. 14/PDK.02/2014, dated 5th November 2014, as the second amendment to PDK No. 01/13/PDK/XII/2012 concerning the OJK Accounting Standards and Policy.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

a. Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) Nomor 10/SEDK.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, dan terakhir diubah dengan SEDK Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 3 Desember 2014 sebagaimana terakhir diubah menjadi SEDK Nomor 12/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016;
c. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud tanggal 9 Juli 2015;
d. SEDK Nomor 17/SEDK.02/2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 November 2015;
e. SEDK Nomor 19/SEDK.02/2016 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2016.

Further implementation rules are contained in the following regulations:

a. BOC Circular Letter (SEDK) No. 10/SEDK.02/2013, dated 25th June 2013, concerning OJK Accounting Policy, as amended by BOC Circular Letter (SEDK) No. 11/SEDK.02/2016, 23rd June 2016 as an amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 21/SEDK.02/2014 on OJK Accounting Policy. The Audited Financial Statements of 2015 were compiled in accordance with the aforementioned circulars.
b. BOC Circular Letter (SEDK) No. 4/SEDK.02/2016, dated 24th March 2016, as an amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 22/SEDK.02/2014, dated 3rd December 2014, on the OJK Accounting Guidelines.
c. BOC Circular Letter (SEDK) No. 12/SEDK.02/2016, as the second amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 22/SEDK.02/2014, dated 23rd June 2016, on the OJK Accounting Guidelines on Fixed Assets and Intangible Assets.
d. BOC Circular Letter (SEDK) No. 17/SEDK.02/2015, dated 18th November 2015, on Preparation of OJK Financial Statements
e. BOC Circular Letter (SEDK) No. 19/SEDK.02/2015, dated 6th October 2015, on the OJK Accounting Guidelines on Receivables

OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan secara akrual, kecuali yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi serta pelaporan OJK adalah Rupiah.

OJK records financial transactions and other economic events on an accrual basis in the Statements of Financial Position and Activities, except for those recorded in the Statement of Cash Flows. In general, all transactions and events that affect elements of the financial statements are based on acquisition value, unless otherwise stated in the accounting policy or the Notes to the Financial Statements. All transactions and OJK reports are presented in rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

The OJK Financial Statements consist of the Statement of Financial Position (balance sheet), Statement of Activities, Statement of Cash Flows as well as notes to the Financial Statements. The significant OJK Accounting Policies are as follows:

VI.2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
b. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, seperti Dana Pensiun OJK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK;
c. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.124/KRDK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK;

VI.2.1 Related Parties

Parties related to OJK include the following:

a. A person or immediate family member with significant influence over the OJK, or key management personnel;
b. Entities or companies under OJK control, such as the OJK Pension Fund and Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia (BRI) as administrator of the OJK Employee Pension Program;
c. OJK Employee Welfare Foundation (YKP), which was established pursuant to KRDK No. 124/KRDK/2015, dated 21st October 2015, concerning Establishment of the OJK YKP.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

d. Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

VI.2.2 Imbalan Kerja

Kebijakan terkait imbalan kerja (employee benefits) telah diputuskan melalui:
a. Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015 menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai Tahun 2015;
b. Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja mulai Tahun 2015.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris Projected Unit Credit. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:
1. Dana Pensiun OJK (DAPEN OJK)
   Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dana Pensiun dengan kriteria sebagai berikut.
   a. Mendirikan Dana Pensiun OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam–LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK;
   b. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

   Pendirian Dana Pensiun OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun OJK.

2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK)
   Pada Tahun 2015, OJK mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK). Yayasan tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

d. The Government, namely government ministries/agencies and state agencies, including the Ministry of Finance, Bank Indonesia (BI) and Deposit Insurance Corporation (LPS).

VI.2.2 Employee Benefit

Policy linked to employee benefits is tied to the following:

a. Commission XI of DPR-RI report, dated 16th December 2015, agreed that OJK would begin to provide employee benefits in 2015.
b. The Board of Commissioners meetings held on 16th and 23rd December 2015 determined that OJK would apply PSAK 24 on employee benefits beginning in 2015.

The total expenses and liabilities of employee benefits are calculated periodically by an independent actuary. The expenses and liabilities of employee benefits are determined separately for each respective program using Projected Unit Credits. The estimated liabilities of employee benefits are presented in the liabilities entry of the Statement of Financial Position.

Parties involved in managing OJK employment benefits are as follows:
1. OJK Pension Fund
   Pursuant to KRDK No. KRDK-91/MS.2/2014, dated 8th October 2014, the Board of Commissioners approved the provision of pension benefits to employees through a Pension Fund with the following criteria:
   a. Establishing the OJK Pension Fund to administrate the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia (BI) with more than three years of service remaining at OJK;
   b. Approving the appointment process of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) as the administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for new OJK employees and OJK employees with less than three years of service at OJK from their original organisation (civil servants from the Ministry of Finance and Bank Indonesia).

   The establishment of the OJK Pension Fund was authorised in accordance with OJK BOC Decree No. KEP-147/D.05/2014, dated 17th December 2014, concerning the Ratification of the OJK Pension Fund Regulations.

2. OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP)
   In 2015, OJK established the OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP) to fulfil the organisational responsibility to its employees in accordance with Ministerial Decree from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0032949.AH.01.04

Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

3. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.
1. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
2. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diukur sebesar nilai nominal;
3. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
4. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diukur dengan cara sebagai berikut.
   a. Menggunakan jasa dan teknik aktuaria untuk membuat estimasi andal berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK dari jumlah imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode lalu; dan
   b. Menentukan jumlah keuntungan/kerugian aktuaria dan jumlah beban yang diakui dalam Laporan Aktivitas.

Dana yang dialokasikan untuk Imbalan Kerja Jangka Panjang merupakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan disajikan pada kelompok Aset Lancar atau Aset Tidak Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

VI.2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari APBN, Pungutan, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, sedangkan Pendapatan Lainnya diakui pada saat OJK menerima hibah sesuai dengan dokumen serah terima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.
a. Pendapatan Pungutan kepada Sektor Jasa Keuangan adalah pendapatan yang diperoleh dari:
   1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
   2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;

of 2015 concerning Endorsement of the Establishment of the OJK Employee Welfare Foundation (22nd December 2015).

3. OJK cooperated with Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia (BRI) as administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for OJK employees based on OJK BOC Decree No. 28/D.02/2014, dated 30th November 2014, concerning the Establishment of the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Financial Institution Pension Fund.

The recognition and recording of employee benefits is based on the following:
1. Current portion of long-term and post-employment benefit liabilities are recognised at the end of the reporting period;
2. Current portion of long-term and post-employment benefit liabilities are recorded at nominal value;
3. Long-term and post-employment benefit liabilities are recognised at the end of the reporting period;
4. Long-term and post-employment benefit liabilities are recorded as follows:
   a. Using the techniques and services of actuaries to make a reliable estimation based on assumptions in accordance with OJK policy for the amount of benefits to be awarded to the employee in exchange for their services in the current and previous periods; and
   b. Stipulating the actuarial total profit/loss and total expenses recognised on the Statement of Activities.

Funds allocated for Long-Term Employment Benefits is recognized as Restricted Cash and recorded as Current Assets or Non-Current Assets in the Statement of Financial Position.

VI.2.3 Revenues

OJK revenues originated from the state budget, levies and other revenues. State budget revenues are recognised upon receipt of the disbursed funds, while levies are recognised upon becoming realisable and other revenues are recognised upon receipt of the grant in accordance with the supporting documents.

OJK Revenues are classified as follows:
a. Levy Revenue from the Financial Services Sector originates from:
   1. Licensing, approval, registration, ratification and review fee upon corporate action;
   2. Annual fee for regulation, supervision, examination and research;

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

3. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan (sebagai contoh antara lain penempatan dana pungutan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan berlaku); dan
4. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

b. Pendapatan APBN yaitu pendapatan yang diperoleh dari:
   1. Pendapatan APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi;
   2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

c. Pendapatan Lainnya
   Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diperoleh dari hibah.

   Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

VI.2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen;
b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul dari kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi;
d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3).

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau Liabilitas timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya dan khusus beban kegiatan pengadaan aset juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau alokasi sistematis terhadap Aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai wajar Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

3. The management, accumulation or utilisation of levies (for instance, levies placement in financial instrument pursuant to prevailing regulations); and
4. Administrative sanctions in the form of penalties for violation of laws and regulations in the Financial Services Sector.

b. State Budget Revenue originates from:
   1. State Budget Revenue, both for operational and investment expenses
   2. Other State Budget Revenues

c. Other Revenues
   Other revenues that originate from grants.

   Revenues are recorded at a fair value of accepted or acceptable economic benefits.

VI.2.4 Expense

OJK expenses consist of Operating Expenses, Administrative Expenses, Asset Procurement Expenses and Other Supporting Expenses as follows:

a. Operating Expenses are those incurred from implementing the function, tasks and authority of the OJK, including regulation, supervision, law enforcement as well as consumer education and protection;
b. Administrative Expenses are those incurred from office activities, remuneration, education and training, organisational development and human resources;
c. Asset Procurement Expenses are those incurred from the procurement of assets, including depreciation and amortisation expenses;
d. Other Supporting Expenses are those incurred while supporting implementation of the function, tasks and authority of OJK, excluding the categories mentioned in points 1) to 3).

Expenses are recognised when the cash is issued or as liabilities emerge in the execution of OJK activities, and/or in the case of asset procurement, the expense is recognised when the fixed/intangible asset is utilised.

The expense is the same as the cash issued or allocated systemically against the asset utilised over time or the fair value of the liabilities that emerge in the execution of OJK activities, operational and administrative, as well as other activities such as asset procurement and other supporting activities.

VI.2.5 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

VI.2.6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang antara lain terdiri dari:

a. Uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK;
b. Uang yang akan disetorkan ke kas negara; dan
c. Uang yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK). Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar atau Aset Tidak Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

VI.2.7 Surat Berharga

Surat Berharga adalah instrumen keuangan yang digunakan OJK sebagai upaya dalam mengelola uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan melalui deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun.

VI.2.5 Cash and Cash Equivalents

Cash includes cash in hand and/or the balance of deposits held at a bank that are readily accessible to fund OJK activities. Cash consists of cash on hand and cash at bank.

Cash equivalents are the most liquid Current Assets that are readily convertible into cash within three months and without significant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents are recognised upon receipt by OJK and recorded at nominal value upon receipt.

VI.2.6 Restricted Cash

Restricted cash includes restricted cash and cash equivalents received in a given period as follows:

a. Funds originating from OJK Levy Income in the current year used to fund OJK activities in the subsequent year pursuant to prevailing regulations;
b. Funds to be deposited to the state treasury; and
c. Funds earmarked at the BOC Meeting to finance certain activities.

Restricted cash is recognised upon receipt or when allocated for certain activities at the BOC Meeting. Restricted cash is recorded at nominal value upon receipt or when allocated for certain activities at the BOC Meeting.

Restricted cash is recorded as current asset or non-current asset in the Statement of Financial Position.

VI.2.7 Securities

Securities are financial instruments used by OJK to manage funds originating from Levy Income to increase OJK budget capacity.

Placements in the form of deposits held at a bank approved by OJK and/or securities issued and/or guaranteed by the central bank of the Republic of Indonesia or Government of the Republic of Indonesia with fixed or specified payments and a maturity date of between three months and one year.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Keputusan Dewan Komisioner Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Pengukuran Surat Berharga adalah sebagai berikut.

a. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka diperolehnya atau didapatkannya penempatan deposito dan/atau surat berharga. Untuk amortisasi Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo dilakukan menggunakan metode garis lurus;
b. Surat Berharga yang dimiliki tidak sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai wajar.

VI.2.8 Piutang

Piutang adalah hak yang timbul atas terutangnya uang oleh pihak lain dalam rangka kegiatan OJK. Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih dan nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK dari Piutang. Piutang terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang Lain-lain.

Berdasarkan SEDK Nomor 19/SEDK.02/2016 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan, piutang OJK diakui pada saat terdapat:

a. Hak untuk menagih pungutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Hak untuk menagih kelebihan pembayaran transaksi;
c. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan/atau
d. Nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal dan/atau jangka waktu pelunasan.

Pursuant to Article 22 of Government Regulation No 11 of 2014 concerning OJK Levies, revenues originating from the management, accumulation or utilisation of levies is part of OJK levy revenue. The Elucidation of the aforementioned Government Regulation stipulates that:

a. Revenues originating from management are those acquired through term deposits held at state-owned banks as well as securities issued and/or guaranteed by the central bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia.
b. Revenues originating from accumulation including interest current account and interest.
c. Revenues originating from utilization including fines for goods and services procurement default.

BOC Decree No. 43/KDK.02/2016 concerning OJK Levies Management regulates that placement of OJK levy funds in the form of Treasury Bills and or Time Deposits.

Securities are recognized upon the settlement date. Securities are recorded as follows:

a. Securities held to maturity are recorded at cost, incurred for the placement of the term deposit or security. Securities held to maturity are subject to straight-line amortisation;
b. Securities not held to maturity are valued based on the fair value.

VI.2.8 Receivables

Receivables are rights arising due to OJK activities. Receivables are recognised when realisable but prior to receiving payment, the value of which can be reliably estimated. Receivables are recorded at the carrying value, namely the value to be received by OJK from the receivables. Receivables consist of the levy receivables and other receivables.

In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) No. 19/SEDK.02/2016 concerning OJK Receivables Accounting, receivables are recognized upon the availability of:

a. The Rights to collect levy in accordance with the prevailing regulations
b. The rights to collect transaction excess payment
c. Consent or agreement from related parties; and/or
d. The value of claim rights which can be reliably estimated and/or repayment term.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah berdasarkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar akan dicatat secara *off-balance sheet*.

In the implementation, the value of receivables recognized in the Financial Report is based on the payers registered in the application of OJK Revenues Information System (SIPO), while the value of unregistered payers will be recorded off-balance sheet.

Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5/PDK/2016 pasal 12 tentang Manajemen Piutang dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

In accordance with BOC Regulation No. Nomor 5/PDK/2016 article 12 concerning Receivables Management, it is stated that Bad Receivables are unpaid obligation that has not been paid in over 1 (one) year which then the collection is submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN).

Dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEDK.02/2016 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan dalam RDK. Dalam hal RDK menyetujui usulan penghapusbukuan piutang, nilai piutang dikurangi sebesar nilai piutang yang dihapusbukukan dan dicatat pada rekening administratif di Laporan Komitmen sebagaimana pada Lampiran II. Pembayaran atas Piutang Pungutan OJK yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo kas dan pendapatan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai pendapatan pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran.

In BOC Circular Letter No. 19/SEDK.02/2016 concerning OJK Receivables Accounting, it is proposed that Bad Receivables whose collection have been submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN) to be written-off in BOC Meeting. If the write-off proposal is approved, the value of receivables will be deducted the amount of the receivables written off and recorded on an administrative account in Commitment Report as mentioned in Appendix II. Payment of the levy receivable that has been written-off may change the cash and revenue balance. Such receipts are recognized as revenue of the current year's levy upon receipt of the payment.

VI.2.9 Persediaan

VI.2.9 Inventory

Persediaan adalah aset lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Inventory includes current assets in the form of office stationery and computer equipment stored by logistics and unused for OJK activities.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Biaya perolehan persediaan antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan perlengkapan. Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan. Nilai tercatat persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan dengan biaya/harga perolehan terakhir.

Inventory is recognised upon receipt of the goods or when the ownership rights are transferred to OJK. Inventory is recorded at cost, including the purchase cost and other costs incurred until the inventory arrives at the location and is ready to use (present location and condition). The cost price of inventory includes the purchase price, transportation cost and other costs that can directly be attributed to the acquisition of the equipment. Discounts and other similar entries are deducted when determining the purchase cost. The recorded value of inventory is based on the quantity multiplied by the latest cost price.

Pengakuan beban persediaan dalam implementasinya diakui pada akhir pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan saldo persediaan.

Recognition of inventory expense in its implementation is recognized at the end of reporting based on physical stocktaking by taking into account the beginning balance of inventories plus purchases subtract the inventory balance.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

VI.2.10 Uang Muka Pembelian

Uang Muka Pembelian adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya. Uang Muka pembelian diakui pada saat pembayaran dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Uang muka pembelian barang berkurang pada saat barang diterima OJK.

VI.2.10 Advance Purchase

Advance Purchase is advance payment to supplier/partners on the purchase of goods or services which at the time of payment, goods or services have not been received by OJK. The Advance Payment of such Purchase shall be calculated as part of payment of goods delivered at the time of settlement of its payment. Advance purchases are recognized at the time of payment and are measured at nominal value paid. Advance purchase of goods is reduced when the goods received by OJK.

VI.2.11 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah aset berupa jasa/fasilitas yang telah dibayar oleh OJK tetapi belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat pembayaran hak memanfaatkan jasa/fasilitas dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

VI.2.11 Prepaid Expenses

Prepaid expenses are assets in the form of services/facilities paid in advance but not utilised before the date of the financial statements. Prepaid expenses are recognised upon payment for the right to utilise the services/facilities and recorded as a portion of the services/facilities already paid for but not used as per the date of the financial statements.

VI.2.12 Aset Tetap dan Aset Takberwujud

VI.2.12.1 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset Tetap diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.

Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan biaya perolehan tidak dapat dilakukan maka nilai Aset Tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

VI.2.12.2 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset Takberwujud diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.

Aset Takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

VI.2.12 Fixed Assets and Intangible Assets

VI.2.12.1 Fixed Assets

Fixed assets are tangible assets in the form of ready to use or previously built items for OJK activities, not intended for sale and with a useful life of more than one year.

Fixed assets are recognised upon transfer of ownership to OJK.

Fixed assets are recorded at their original cost. If a fixed asset cannot be valued at cost price, the value is based on a fair value at acquisition.

VI.2.12.2 Intangible Assets

Intangible assets are identifiable long-term (more than one year) assets that are not in physical form and are used for OJK activities but not intended for sale.

Intangible Assets is recognized as the ownership and/or control right of such asset has been transferred to OJK.

Intangible Assets is recorded at cost, that is, all expenditures which may be directly or indirectly attributable which can be allocated on a rational and consistent basis, issued to generate and prepare the asset for its intended use.

Dalam implementasinya, pengeluaran yang menambah nilai perolehan tanah dan bangunan dari biaya lainnya seperti biaya Legal Audit, biaya Notaris dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bangunan dan tanah.

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan dan masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud merujuk pada SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan Aset Tetap (*revenue expenditure*) dan kebijakan akuntansi untuk biaya renovasi, peremajaan, penambahan kapasitas yang menambah umur ekonomis dan atau nilai guna aset, yang berkaitan dengan Aset Tetap (*capital expenditures*) adalah sebagai berikut.

1) Biaya Selanjutnya Aset Tetap
   a) Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
      (1) dalam hal dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku;
      (2) dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah;
   b) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap;
   c) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya;
   d) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c), diakui sebagai beban tahun berjalan.
2) Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud
   a) Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi;
   b) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a), diakui sebagai beban berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

In its implementation, expenditures that add to the acquisition value of land and buildings from other costs such as Legal Audit fees, Notaries fees are proportionally divided based on the Value of Object of Tax (NJOP) for buildings and land

Accounting policy for repair costs and the useful lives of Fixed Assets and Intangible Assets are contained in BOC Circular Letter (SEDK) No. 8/SEDK.02/2015, dated 9th July 2015, concerning Fixed Asset and Intangible Asset Accounting.

Accounting policy for repair costs linked to Fixed Assets (revenue expenditure) and accounting policy for renovation and rejuvenation costs as well as additional capacity to extend economic life and/or utilisation value related to Fixed Assets (capital expenditure) are as follows:

1) Further Costs of Fixed Assets
   a. Expenditures after land acquisition are recorded as follows:
      (1) if intended to enhance economic utility by increasing performance, the expenditure is recorded as additional Book Value;
      (2) if intended to extend land rights, the expenditure is recorded as an Extension of Land Rights;
   b. Expenditures relating to Fixed Assets owned by OJK that extend the Useful Life or that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Fixed Asset Book Value;
   c. Expenditures relating to Fixed Assets not owned by OJK (leased or borrowed assets) that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional other Fixed Assets;
   d. Expenditures to Fixed Assets not referred to in points a) through c) are recognised as current year expenses.
2) Further Costs of Intangible Assets
   a. Expenditures recognised as additional Intangible Asset Book Value include expenditures to develop software/information technology application systems that are structural determined by the information technology work unit;
   b. Expenditures relating to Intangible Assets not referred to in point a) are recognised as ongoing expenses, including: maintenance and repairs, licensing costs of software/application systems for the period one year after acquisition.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesaian, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Straight-line amortisation/depreciation is used. In addition to land and construction in progress assets, all Fixed Assets depreciate in accordance with the nature and characteristics of the asset.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner MS IIB Nomor Kep-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK menjelaskan bahwa Masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

Pursuant to Deputy Commissioner of Strategic Management IIB Decree No.4/MS.4/2015 concerning the useful life of Fixed Assets and Intangible Assets, in terms of compiling the Financial Statements, is stipulated as follows:

Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

1) Kelompok Aset Tetap
   a. Bukan Bangunan dengan masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun
   b. Bangunan dengan masa manfaat 20 Tahun
   c. Dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak terdapat dalam lampiran Keputusan Deputi Komisioner, maka satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan Kelompok masa manfaat aset tersebut
2) Kelompok Aset Takberwujud dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, atau 20 tahun.

Classification of the Useful Lives of Fixed Assets and Intangible Assets

1) Fixed Assets Groups
   a. Non-property with a useful life of 4 to 8 years
   b. Property with a useful life of 20 years
   c. In the case of non-property Fixed Assets that can be capitalised but are not contained in the appendix of the Deputy Commissioner's Decree, the work unit responsible for the financial function and related work units determine the useful life of the asset
2) Intangible Asset with a useful life of 4 years, 8 years, 16 years or 20 years

VI.2.13 Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang. Aset Pajak Tangguhan yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
b. Akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi.

VI.2.13 Other Assets

Other assets are Deferred Tax Assets and Long-Term Employee Benefits. Deferred Tax Assets the amount of income tax recoverable in future periods due to:
a. Temporary differences that are deductible; and
b. Accumulated uncompensated tax losses.

Aset Lainnya diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dimanfaatkan. Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai tercatat.

Other Assets are recognized if it is probable that future taxable income will be adequately offset by the deductible temporary differences and the utilizable fiscal losses. Other Assets are measured at their carrying value.

Dalam implementasinya, aset pajak tangguhan dihitung menggunakan pendekatan neraca (*Asset Liability Method*). Pemulihan aset pajak tangguhan akan terlihat apabila terjadi penurunan saldo akun kewajiban yang terkait dengan koreksi fiskal temporer di neraca.

In its implementation, Deferred Tax Asset is calculated with balance sheet approach (Asset Liability Method). The Recovery of Deferred Tax Asset will be evident in the event of a decrease in the balance of liability accounts related to temporary fiscal correction in the balance sheet.

VI.2.14 Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

a. Utang Operasional dan Administratif, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan keuangan misalnya Utang Biaya dan Utang Pajak;
b. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK pada periode akuntansi berjalan;
c. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau Kontribusi ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan pungutan OJK yang harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang ditetapkan;
d. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja, yaitu Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja yang direklasifikasi menjadi Liabilitas Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
e. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a) sampai d) di atas.

VI.2.15 Perpajakan

Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

a. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
   1. Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan;
   2. Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
b. Surat Menteri Keuangan No S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK. Berdasarkan surat dimaksud ditegaskan bahwa:
   1. OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut maka OJK adalah subjek Pajak Penghasilan.
   2. Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

VI.2.14 Short-Term Liabilities

Short-term liabilities are OJK obligations to a third party that will mature or be settled within 12 months after the reporting period, including:

a. Operating and Administrative liabilities, namely the liabilities that emerge due to OJK activities as well as the costs that are incurred but not paid prior to the date of the financial statements, for example Cost Debt and Tax Debt.
b. Prepaid Revenues are revenues received in advance but not yet earned in the current accounting period;
c. Paid Up Debt to State Cash, namely liabilities that occur from residual state budget funds and/or Contributions to State Cash originating from surplus OJK levies that must be deposited to state cash pursuant to prevailing regulations;
d. Current Portion of Short-Term Employee and Post-Employment Benefits, namely the Value of Short-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities, which were reclassified as Short-Term Liabilities due to maturity within 12 months of the reporting date;
e. Other Short-Term Debt, namely debt that will mature within 12 months of the date of the Statement of Financial Position not referred to in points a) through d).

VI.2.15 Taxation

OJK Taxation status and Obligation are stipulated according to the following:

a. Directorate General of Taxation Letter No. S487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, concerning OJK Tax Status and Policy states that:
   1. OJK levy revenues from the financial services sector are subject to Income Tax;
   2. OJK revenues originating from state budget funds are not considered taxable income.

b. Ministry of Finance Letter No. S-1001/MK.03/2015, dated 10th December 2015, concerning OJK Tax Liability Status, which states that:
   1. OJK is classified as a legal entity, namely a group of people as a union not conducting business. OJK, however, does not meet the criteria as a government body that is exempt as the subject of Income Tax;
   2. Concerning OJK levies, the Directorate General of Taxation Letter No. S-487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, states that levies are a form of taxable income.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

VI.2.16 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan aset neto tidak terikat.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Perubahan Aset Neto Tidak Terikat diukur sebesar jumlah pendapatan sumber daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK.

VI.2.16 Net Assets

Net Assets is the residual value of total assets minus total liabilities. OJK Net Assets are unrestricted.

Net Assets are recognised on the Statement of Financial Position based on no external restrictions regarding their use or function and no expectation of repayment.

Changes to Unrestricted Net Assets are recorded as total unrestricted resources less OJK expenses.

VI.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

VI.3.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp9.745.118.859,00 dan Rp59.850.625.535,00 dengan rincian sebagai berikut.

VI.3 ELUCIDATION OF FINANCIAL STATEMENT ENTRIES

VI.3.1 Cash and Cash Equivalents

The balance of cash and cash equivalents per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp9,745,118,859.00 and Rp59,850,625,535.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Kas | Cash	-	-
Bank | Bank	9.745.118.859	59.850.625.535
Jumlah | Total	**9.745.118.859**	**59.850.625.535**

Saldo Kas Tahun 2016 pada Rekening Mandiri (rekening induk) sebesar Rp9.745.118.859,00 telah digunakan untuk menyelesaikan transaksi kegiatan OJK Tahun 2016 yang dibayarkan melalui pos susulan sampai dengan tanggal 16 Januari 2017.

Saldo Kas sebesar Rp9.745.118.859,00 merupakan bagian dari rekening pengeluaran OJK per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp24.982.308.445,00 dengan rincian sebagai berikut.

The cash balance in 2016 held in the parent account (*Rekening Mandiri*) totalling Rp9,745,118,859.00 was used to settle OJK activity transactions in 2016 paid through follow-up entries through to 16th January 2017.

The cash balance of Rp9,745,118,859.00 represents part of the OJK expense account per 31st December 2016 totalling Rp24,982,308,445.00 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Rekening | Account	Saldo per 31 Desember 2016 Balance as of 31st December 2016
1.	Rekening Induk | Parent Account	17.496.041.313
2.	Rekening Pelaksana Pencairan Dana (PPD) | Fund Disbursement Account	391.656.163
3.	Rekening Imbalan Kerja Jangka Panjang | Long-Term Employee Benefits Account	7.080.000.000
4.	Rekening Antara Gaji | Intermediate Payroll Account	14.610.969
Jumlah | Total		**24.982.308.445**

Rincian tersebut disajikan dengan pengelompokan sebagai berikut.

The entries are summarised as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Keterangan | Description	Saldo per 31 Desember 2016 Balance as of 31st December 2016	
1.	Kas dan Setara Kas | Cash and Cash Equivalents		9.745.118.859
2.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya | Restricted Cash		15.237.189.586
	a. Dana Pungutan | Levy Funds	1.226.958.996	
	b. Imbalan Pasca Kerja | Post-employment Benefits	7.080.000.000	
	c. Pembayaran Pajak | Tax Payments	5.125.211.854	
	d. Utang Setoran ke Kas Negara | Payable to State Treasury	1.805.018.736	
Jumlah | Total			**24.982.308.445**

VI.3.2 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.570.587.520.254,00 dan Rp1.633.701.504.957,00 dengan rincian sebagai berikut.

VI.3.2 Restricted Cash

The balance of restricted cash per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp4,570,587,520,254.00 and Rp1,633,701,504,957.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016		31 Desember 2015 31st December 2015	
Dana Pungutan | Levy Funds		4.402.885.242.389		1.292.988.791.900
a. Pungutan Tahun Berjalan | Current Year Levies	4.381.237.487.468		1.278.478.430.273	
b. Pendapatan Diterima Dimuka | Unearned Revenue	21.647.754.921		14.510.361.627	
Dana Imbalan Kerja | Employee Benefit Funds		341.315.820.995		325.541.000.000
Dana Setoran Kas Negara | State Treasury Deposits Fund		1.805.018.737		15.171.713.057
Dana Pembayaran PPh Badan | Corporate Tax Payable Fund		5.297.259.128		
Jumlah | Total		**4.751.303.341.249**		**1.633.701.504.957**
Reklas Dana Imbalan Kerja ke Aset Lainnya (Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang) | Reclassification of Employee Benefit Funds to Other Assets (Long-Term Employee Benefit Fund)		(180.715.820.995)		-
Jumlah | Total		**4.570.587.520.254**		**1.633.701.504.957**

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pungutan tahun 2016 yang dapat digunakan pada tahun 2017 sebesar Rp4.381.237.487.468,00.

Based on the table above, the levy funds received in 2016 for use in 2017 totalled Rp4,381,237,487,468.00.

VI.3.2.1 Dana Pungutan

Dana pungutan yang diperoleh pada tahun 2016 dan dapat ditempatkan adalah sebesar Rp4.402.885.242.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

VI.3.2.1 Levy Funds

The levy funds accrued and placed in 2016 totalled Rp4,402,885,242,389.00 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Keterangan | Description	Saldo | Balance	
1.	Giro Bank Indonesia | Bank Indonesia Checking Account		288.163.522.587
2.	Giro Bank Rakyat Indonesia (a+b+c) | Bank Rakyat Indonesia Checking Account (a+b+c)		490.847.145.950
	a. Dana Pungutan | Levy Funds	499.714.014.219	
	b. Reklas atas Imbal Hasil Pengelolaan dari Dana Imbalan Kerja yang direklas ke Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang | Reclassification of Management Yields from Employee Benefit Funds that was reclassified to Long-Term Employee Benefit Funds	(8.694.820.995)	
	c. Reklas atas Dana Pungutan ke Dana Pembayaran PPh Badan | Reclassification of Levy Funds to Corporate Tax Payment Funds	(172.047.274)	
3.	Giro Bank Mandiri atas Jasa Giro Dana Operasional, Wanprestasi, dan Retur | Bank Mandiri Checking Account on Operating Fund Interest, Income from Default Services and Returns		1.226.958.997
4.	Deposito Bank Rakyat Indonesia | Bank Rakyat Indonesia Term Deposit Account		1.063.639.212.282
5.	Deposito Bank Mandiri | Bank Mandiri Term Deposit Account		738.098.212.282
6.	Deposito Bank Negara Indonesia | Bank Negara Indonesia Term Deposit Account		1.063.639.212.282
7.	Deposito Bank Tabungan Negara | Bank Tabungan Negara Term Deposit Account		757.270.978.009
Jumlah Dana Pungutan | Total Levy Funds			**4.402.885.242.389**

Penempatan deposito pada Bank BUMN tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan bersifat perpanjangan secara otomatis.

Term deposit placements at state-owned banks have a maturity period of 1 month and are extended automatically.

Dalam saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp21.647.754.921,00 dengan rincian sebagai berikut.

The balance of restricted cash contains Unearned Revenue totalling Rp21,647,754,921.00 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Sektor | Sector	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
1.	Registrasi | Registration	53	16.802.078
2.	Biaya Tahunan | Annual Fee	20.843.437.943	14.429.877.349
3.	Sanksi | Penalties	667.361.523	29.292.200
4.	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Peruntukannya | Other Income	126.946.350	34.390.000
5.	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi pada Rekening Induk | Other Income in the Parent Account	10.009.052	-
Jumlah | Total		**21.647.754.921**	**14.510.361.627**

VI.3.2.2 Dana Imbalan Kerja

Dana Imbalan Kerja Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp160.600.000.000,00 dan Rp325.541.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

VI.3.2.2 Employee Benefit Funds

Current Employee Benefit Funds per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp160,600,000,000.00 and Rp325,541,000,000.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Pendanaan Tahun 2015 | 2015 Funding	325.541.000.000	325.541.000.000
Imbal Hasil Pengelolaan dari Dana Imbalan Kerja | Yields from Managing Employee Benefit Fund	8.694.820.995	-
Pendanaan Tahun 2016 | 2016 Funding	7.080.000.000	-
Jumlah Dana Imbalan Kerja | Total Employee Benefit Funds	341.315.820.995	325.541.000.000
Reklas ke Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang | Reclassification to Long-Term Employee Benefit Funds	(180.715.820.995)	-
Jumlah Dana Imbalan Kerja Lancar | Total Current Employee Benefit Funds	**160.600.000.000**	**325.541.000.000**

Hasil perhitungan Aktuaris PT Dayamandiri Dharmakonsilindo Nomor 0070/ST-RS-PSAK24-OJK/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 besarnya beban imbalan kerja OJK per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp641.604.226.000,00 terdiri dari imbalan kerja untuk kesehatan sebesar Rp64.897.325.000,00, Dana Pensiun sebesar Rp47.578.550.000,00, dan untuk karyawan aktif sebesar Rp529.128.351.000,00.

According to the actuary calculations made by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, Number 0070/ST-RS-PSAK24-OJK/I/2017, dated 25th January 2017, the expense of OJK employee benefits stood at Rp641,604,226,000.00, consisting of health benefits amounting to Rp64,897,325,000.00, pension funds totalling Rp47,578,550,000.00 and for active employees totalling Rp529,128,351,000.00.

Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 165/KRDK/2016 tanggal 21 Desember 2016 menyetujui bahwa sisa kelebihan anggaran per 21 Desember 2016 sebesar Rp7.080.000.000,00 dialokasikan untuk memenuhi kewajiban imbalan kerja jangka panjang tahun 2016.

Board of Commissioners Meeting Decree No. 165/KRDK/2016, dated 21st December 2016, agreed that the residual budget per 21st December 2016, totalling Rp7,080,000,000.00, would be allocated to meet the long-term employee benefit liabilities in 2016.

Keputusan Rapat Dewan Komisioner Nomor 104/KRDK/2016 tanggal 31 Agustus 2016 menetapkan bahwa dana cadangan program imbalan kerja yang telah dibentuk sebesar Rp325.541.000.000,00 digunakan untuk pembayaran imbalan kerja pegawai tahun 2017 sebesar Rp160.600.000.000,00. Pendanaan imbalan kerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah meningkat menjadi sebesar Rp341.315.820.995,00. Dari nilai tersebut yang disajikan dalam aset lancar sebesar Rp160.600.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp180.715.820.995,00 disajikan sebagai aset tidak lancar dengan subakun Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang dalam kelompok akun Aset Lainnya.

Board of Commissioners Meeting Decree No. 104/KRDK/2016, dated 31st August 2016, stated that the reserve funds for the employee benefit program, totalling Rp325,541,000,000.00, would be used to pay the employee benefits in 2017, totalling Rp160,600,000,000.00. The employee benefit fund has increased from 2015 to 2016, totalling Rp341,315,820,995.00. Of that total, Rp160,600,000,000.00 is presented as current assets, while the remaining Rp180,715,820,995.00 is presented as non-current assets with a Long-Term Employee Benefit subaccount in the Other Assets account.

VI.3.2.3 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran Ke Kas Negara sebesar Rp1.805.018.737,00 berasal dari penerimaan pengembalian belanja dan denda wanprestasi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN.

VI.3.2.3 State Treasury Deposit Fund

State Treasury Deposits totalling Rp1,805,018,737.00 originated from refunds and default fines from the state budget.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

VI.3.2.4 Dana Pembayaran PPh Badan

Utang PPh Badan sebesar Rp892.921.975.153,00 sampai pada tanggal 31 Desember 2016 telah dibayar secara angsuran dengan menggunakan sisa anggaran tahun 2016 sebesar Rp5.125.211.853,00 yang disetor pada tanggal 16 Januari 2017 dan sebesar Rp172.047.275,00 tanggal 1 Maret 2017.

VI.3.2.4 Corporate Tax Fund

Corporate Tax Payable, totalling Rp892,921,975,153.00 [rate as of 31st December 2016, was paid in instalments using the residual budget in 2016 totalling Rp5,125,211,853.00, which was paid on 16th January 2017 and Rp172,047,275.00 on 1st March 2017.

VI.3.3 Surat Berharga

Saldo Surat Berharga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.660.420.929.948,00.

Surat Berharga per 31 Desember 2015 dengan jumlah sebesar Rp2.660.420.929.948,00 seluruhnya telah jatuh tempo, dengan rincian sebagai berikut.

VI.3.3 Securities

The balance of securities per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp0.00 and Rp2,660,420,929,948.00 respectively

.

All the securities held per 31st December 2015, totalling Rp2,660,420,929,948.00, have reached maturity as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

No	Seri | Series	Nilai Perolehan Acquisition Value	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
1.	SPN 12160204	729.419.832.000	04/02/2016
2.	SPNNT20160401	1.309.000.361.968	01/04/2016
3.	SPNNT20160902	622.000.735.980	02/09/2016
Jumlah | Total		**2.660.420.929.948**	

Atas Surat Berharga yang telah jatuh tempo tersebut telah ditempatkan pada deposito yang dicatat dalam akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

The securities have been placed in term deposits recorded in the Restricted Cash account.

VI.3.4 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp41.734.411.503,00 dan Rp25.144.547.797,00.

VI.3.4 Receivables

The balance of Receivables per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp41,734,411,503.00 and Rp25,144,547,797.00 respectively.

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Piutang Pungutan | Levy Receivables	41.584.972.104	25.007.395.819
Piutang Lain-lain | Other Receivables	149.439.399	137.151.978
Jumlah | Total	**41.734.411.503**	**25.144.547.797**

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

OJK receivables per 31st December 2016 and 2015 are as follows:

VI.3.4.1 Piutang Pungutan

VI.3.4.1 Levy Receivables

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Sektor | Sector	Piutang Sebelum Penghapusan Receivables Before Write-Off	Penghapusan Piutang Pungutan Receivables Written-Off	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2016 Levy Receivables as of 31st December 2016	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2015 Levy Receivables as of 31st December 2015
I.	**Biaya Tahunan** | Annual Fee	**22.052.573.622**	**(725.578.745)**	**21.326.994.877**	**13.391.903.172**
1.	Perbankan | Banking Sector	2.755.720.916	(92.189.889)	2.663.531.027	2.732.004.995
2.	Pasar Modal | Capital Market	10.271.155.740	(633.388.856)	9.637.766.884	6.505.230.205
3.	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	9.025.696.966	-	9.025.696.966	4.154.667.972
II.	**Sanksi** | Sanction and Fines Receivables	**9.428.841.754**	**(2.748.580.910)**	**6.680.260.844**	**6.185.721.300**
1.	Perbankan | Banking Sector	1.374.159.900	-	1.374.159.900	1.660.446.500
2.	Pasar Modal | Capital Market	5.946.301.310	(2.748.580.910)	3.197.720.400	3.346.234.800
3.	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	2.108.380.544	-	2.108.380.544	1.179.040.000
III.	**Piutang Penggunaan Pungutan** | Other Receivables from Levy Funds	**13.577.716.383**	**-**	**13.577.716.383**	**5.429.771.347**
1.	Pengelolaan Dana Pungutan | Management of Levy Fund	10.979.567.726	-	10.979.567.726	-
2.	Pengelolaan Dana Imbalan Kerja | Management of Employee Benefit Fund	1.107.731.293	-	1.107.731.293	-
3.	Denda Wanprestasi Penataan Gedung | Building Layout Default Penalties	1.445.831.924	-	1.445.831.924	-
4.	Pengembalian Tiket Perjalanan Dinas | Official Travel Reimbursements	1.531.240	-	1.531.240	8.318.670
5.	Pengembalian Pengadaan Barang Pencetakan | Printing Procurement Refund	43.054.200	-	43.054.200	-
6.	Pengembalian Biaya Beban Asuransi dari Asuransi Equity | Insurance Refunds from Equity Insurance	-	-	-	5.007.237.530
7.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pembebanan PPh dan Denda Keterlambatan dari PT Eracomp Infonusa | Income Tax Overpayment Refund and Late Fine from PT Eracomp Infonusa	-	-	-	414.215.147
	Jumlah | Total	**45.059.131.759**	**(3.474.159.655)**	**41.584.972.104**	**25.007.395.819**

Pada tahun 2016, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp3.474.159.655,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.39/KRDK/2017 tanggal 2 Maret 2017. Hal ini sesuai dengan SEDK Nomor 19/SEDK.02/2016 tentang Akuntansi Piutang OJK yang menyatakan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke PUPN dapat dihapusbukukan dengan usulan dari satker yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan dalam RDK bersamaan dengan pengajuan Laporan Keuangan.

In 2016, levy receivables identified as uncollectible totalling Rp3,474,159,655.00 were referred to the State Receivables Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance and written off pursuant to Board of Commissioners Meeting Decree No. 39/KDRK/2017, dated 2nd March 2017. This was done in accordance with BOC Circular Letter (SEDK) No. 19/SEDK.02/2016 concerning OJK Receivables Accounting, which states that uncollectible receivables referred to PUPN may be written off per a proposal submitted by the work unit responsible for accounting and the financial statements at the Board of Commissioners meeting in conjunction with the submission of the Financial Statements.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Umur piutang pungutan adalah sebagai berikut.

The maturity of the levy receivables are detailed as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Belum jatuh tempo | Not Yet Due	16.846.687.914	14.502.026.693
Telah jatuh tempo | Past Due		
1 - 30 Hari | 1 - 30 Days	9.545.696.265	142.141.944
31 Hari - 3 Bulan | 31 Days – 3 Months	3.949.314.860	2.680.543.946
3 Bulan - 6 Bulan | 3 Months – 6 Months	1.821.808.992	2.564.136.371
6 Bulan - 1 Tahun | 6 Months – 1 Year	4.609.075.833	2.858.874.547
Lebih dari 1 Tahun | More than 1 Year	4.812.388.240	2.259.672.318
Jumlah | Total	**41.584.972.104**	**25.007.395.819**

Berdasarkan tabel di atas, per tanggal 31 Desember 2016, OJK memiliki piutang pungutan yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet namun penagihannya belum diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp4.812.388.240,00.

According to the table, per 31st December 2016, OJK had levy receivables with a maturity of more than 1 year, which were thus identified as uncollectible but have not yet been referred to the State Receivables Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, totalling Rp4,812,388,240.00.

OJK memiliki hak tagih kepada wajib bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Tagihan kepada wajib bayar yang belum registrasi dan belum diserahkan ke PUPN sebanyak 1.690 wajib bayar dengan potensi tagihan sebesar Rp9.230.513.145,00 (Lampiran V).

OJK has reserved the right to claim unregistered payments in the SIPO application since 2014. Such claims are irregular and thus recorded off-balance sheet. There were a total of 1,690 claims on unregistered payments that have not been referred to PUPN with a potential value of Rp9,230,513,145.00 (Appendix V).

Nilai piutang yang belum registrasi dan telah diserahkan ke PUPN sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp7.620.875.654,00.

The value of unregistered receivables referred to PUPN in 2016 totalled Rp7,620,875,654.00.

VI.3.4.2 Piutang Lain-lain

VI.3.4.2 Other Receivables

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp149.439.399,00 dan Rp137.151.978,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji pegawai.

Other receivables per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp149,439,399.00 and Rp137,151,978.00 respectively in the form of receivables from overpayment of employee salaries.

VI.3.5 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp22.136.480.553,00 dan Rp7.735.387.289,00, dengan rincian sebagai berikut.

VI.3.5 Inventory

The balance of Inventory per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp22,136,480,553.00 and Rp7,735,387,289.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Barang Konsumsi/Alat Tulis Kantor | Consumables/Office Stationary	22.115.366.853	7.671.181.329
Pita Cukai, Materai, Leges dan Bahan Baku/Perlengkapan Kantor | Office Supplies	21.113.700	64.205.960
Jumlah | Total	**22.136.480.553**	**7.735.387.289**

Mutasi Persediaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

The transfer of inventory in 2016 was as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	Jumlah | Total
Saldo per 31 Desember 2015 | Beginning Inventory as of 31st December 2015	**7.735.387.289**
Mutasi Tambah: | Additions:	
Pembelian Persediaan | Inventory Purchases	30.629.389.185
Mutasi Kurang: | Deductions:	
Beban Persediaan | Inventory Expense	16.228.295.921
Saldo per 31 Desember 2016 | Ending Inventory as of 31st December 2016	**22.136.480.553**

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

OJK inventory was located at the following offices:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Lokasi | Location	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Kantor Pusat | Head Office	19.784.697.442	6.103.427.059
Kantor Regional | Regional Offices	1.027.282.579	738.978.263
Kantor OJK | OJK Branch Offices	1.324.500.532	892.981.967
Jumlah | Total	**22.136.480.553**	**7.735.387.289**

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp22.136.480.553,00 terdiri dari:
- Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.625.402.930,00. Berdasarkan saldo tersebut, terdapat nilai persediaan sebesar Rp962.389.445,00 yang merupakan barang keperluan perkantoran sehari-hari yang tidak bisa digunakan lagi (Lampiran VI);
- Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp20.511.077.623,00.

The balance of inventory per 31st December 2016, totalling Rp22,136,480,553.00, consisted of:
- Inventory paid using the state budget totalling Rp1,625,402,930.00. Of that total, Rp962,389,445.00 was in the form of office consumables (Appendix (VI);
- Inventory paid using levy funds totalling Rp20,511,077,623.00.

VI.3.6 Uang Muka Pembelian

Saldo Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.429.300.000,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan uang muka atas pekerjaan paket pengadaan penataan dan penyediaan fasilitas penunjang Gedung Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Penataan dan Penyediaan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor SPJ-01/MS.43/PPK/PPKR8/2016 batas waktu pertanggungjawaban tanggal 6 Mei 2017.

VI.3.6 Advance Purchase

The balance of downpayments per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp1,429,300,000.00 and Rp0.00 respectively in the form of a procurement package and the provision of supporting warehouse facilities at the Bali and Nusa Tenggara regional offices. Pursuant to 01/MS.43/PPK/PPKR8/2016, the liability will terminate on 6th May 2016.

VI.3.7 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp722.792.177.281,00 dan Rp209.667.635.790,00 terdiri dari:

VI.3.7 Prepaid Expenses

The balance of prepaid expenses per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp722,792,177,281.00 and Rp209,667,635,790.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Sewa Kantor OJK | OJK Office Rentals	705.625.244.554	185.531.921.337
Sewa Rumah Jabatan | Official Residence Rentals	16.904.106.793	22.700.726.274
Premi Asuransi | Insurance Premiums	262.825.934	1.434.988.179
Jumlah | Total	**722.792.177.281**	**209.667.635.790**

Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2016 dikelompokkan sebagai berikut.

A summary of Prepaid Expenses in 2016 is categorised as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	Sewa Rumah Jabatan Official Residence Rentals	Sewa Kantor Office Rentals	Premi Asuransi Insurance Premiums	Jumlah Total
Kantor Pusat | Head Office	9.167.959.306	584.815.430.324*)	-	593.983.389.630
Kantor Regional | Regional Offices	2.542.870.371	83.840.769.969	66.399.920	86.450.040.260
Kantor OJK | OJK Branch Offices	5.193.277.116	36.969.044.261	196.426.014	42.358.747.391
Jumlah | Total	**16.904.106.793**	**705.625.244.554**	**262.825.934**	**722.792.177.281**

*) Pengadaan Kantor Pusat tersebut dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa dengan opsi membeli yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

*) Head office procurement is conducted through leasing agreements with an option to buy effective until 31st December 2018.

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Transfers of Prepaid Expenses in 2016 were as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	Jumlah | Total
Saldo per 31 Desember 2015 | Balance as of 31st December 2015	**209.667.635.790**
Mutasi Tambah: | Additions:	
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka Tahun 2016 | Prepaid Expenses Payments in 2016	662.316.682.175
Mutasi Kurang: | Deductions:	
Jumlah yang telah dimanfaatkan/beban | Total Utilised	125.936.140.684
Reklasifikasi ke Aset Tetap (Pembelian Tanah dan Bangunan) | Reclassification of Fixed Assets (Purchases of Land and Buildings)	23.256.000.000
Saldo per 31 Desember 2016 | Balance as of 31st December 2016	**722.792.177.281**

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

VI.3.8 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp535.497.365.063,00 dan Rp354.140.196.933,00.

Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

VI.3.8 Fixed Assets

The balance of Fixed Assets per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp535,497,365,063.00 and Rp354,140,196,933.00 respectively.

A summary of Fixed assets and transfers in 2016 is presented as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Harga Perolehan Aset Tetap | Fixed Asset Acquisition Cost	31 Desember 2015 31st December 2015	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2016 31st December 2016
Tanah | Land					
Tanah | Land	7.500.000.000	129.897.349.139	-	-	137.397.349.139
Gedung Kantor | Office Buildings		16.380.347.530	-	5.662.389.663	22.042.737.193
Total Tanah | Total Land	**7.500.000.000**	**146.277.696.669**	**-**	**5.662.389.663**	**159.440.086.332**
Peralatan dan Mesin: | Equipment and Machinery					
Kendaraan Bermotor Roda Dua | Two-wheeled vehicles	1.006.416.000	-	-	-	1.006.416.000
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | Four or more wheeled vehicles	150.917.860.639	-	-	-	150.917.860.639
Mesin Kantor | Office Machines	179.870.023	15.559.650	-	-	195.429.673
Mesin Pembangkit Tenaga | Power Plant Machines	5.617.863.552	2.509.065.950	-	-	8.126.929.502
Mesin Pendingin | Air Conditioning Unit	6.284.522.501	3.570.072.135	-	-	9.854.594.636
Mesin Pengolah Data | Data Processing Machines	151.018.281.395	74.660.982.395	-	-	225.679.263.790
Peralatan Keamanan | Security Equipment	514.580.000	599.620.340	-	-	1.114.200.340
Peralatan Telekomunikasi | Telecommunications Equipment	26.377.157.857	3.763.295.770	-	-	30.140.453.627
Peralatan Lainnya | Other Equipment	155.677.235	18.300.000	-	-	173.977.235
Peralatan Rumah Tangga | Household Equipment	46.039.934.623	15.617.840.695	-	-	61.657.775.318
Peralatan Studio | Studio Equipment	23.374.832.788	2.886.610.211	-	-	26.261.442.999
Peralatan/ Perlengkapan Kantor | Office Equipment	21.680.341.719	8.305.740.657	-	-	29.986.082.376
Total Peralatan dan Mesin | Total Equipment and Machinery	**433.167.338.332**	**111.947.087.803**	**-**	**-**	**545.114.426.135**
Aset Tetap Lainnya: | Other Fixed Assets:					
Aset Tetap Lainnya | Other Fixed Assets	26.106.430.932	21.630.046.065	1.430.742.124	(5.662.389.663)	40.643.345.210
Total Aset Tetap Lainnya | Total Other Fixed Assets	26.106.430.932	21.630.046.065	1.430.742.124	(5.662.389.663)	40.643.345.210
Jumlah | Total	**466.773.769.264**	**279.854.830.537**	**1.430.742.124**	**-**	**745.197.857.677**

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | Accumulated Depreciation of Fixed Assets	31 Desember 2015 31st December 2015	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2016 31st December 2016
Tanah | Land					
Tanah | Land	-	-	-	-	-
Gedung Kantor | Office Buildings	-	-	-	-	-
Total Tanah | Total Land	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Penyusutan Peralatan dan Mesin: | Depreciation of Equipment and Machinery					
Kendaraan Bermotor Roda Dua | Two-wheeled vehicles	503.208.000	251.604.000	-	-	754.812.000
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | Four or more wheeled vehicles	37.681.507.770	18.864.732.580	-	-	56.546.240.350
Mesin Kantor | Office Machines	48.885.241	47.116.137	-	-	96.001.378
Mesin Pembangkit Tenaga | Power Plant Machines	888.239.974	1.765.888.720	-	-	2.654.128.694
Mesin Pendingin | Air Conditioning Units	499.377.074	882.805.240	-	-	1.382.182.314
Mesin Pengolah Data | Data Processing Machines	39.177.035.959	39.009.200.648	-	-	78.186.236.607
Peralatan Keamanan | Security Equipment	2.452.083	114.787.750	-	-	117.239.833
Peralatan Telekomunikasi | Telecommunications Equipment	6.815.070.720	6.619.486.775	-	-	13.434.557.495
Peralatan Lainnya | Other Equipment	16.337.830	39.908.892	-	-	56.246.722
Peralatan Rumah Tangga | Household Equipment	11.479.346.229	10.206.844.927	-	-	21.686.191.156
Peralatan Studio | Studio Equipment	8.610.460.584	5.930.483.871	-	-	14.540.944.455
Peralatan/ Perlengkapan Kantor | Office Equipment	6.250.911.745	5.428.745.504	-	-	11.679.657.249
Total Penyusutan Peralatan dan Mesin | Total Depreciation of Equipment and Machinery	**111.972.833.209**	**89.161.605.044**	**-**	**-**	**201.134.438.253**
Penyusutan Aset Tetap Lainnya: | Depreciation of Other Fixed Assets:					
Aset Tetap Lainnya | Other Fixed Assets	660.739.121	7.905.315.240	-	-	8.566.054.361
Total Penyusutan Aset Tetap Lainnya | Total Depreciation of Other Fixed Assets	660.739.121	7.905.315.240	-	-	8.566.054.361
Jumlah | Total	**112.633.572.330**	**97.066.920.284**	**-**		
Jumlah Tercatat Aset Tetap | Total Recorded Fixed Assets	**354.140.196.933**	**182.787.910.254**	**-**	**-**	**535.497.365.063**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp535.497.365.063,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp175.159.973.817,00 (Lampiran III);
b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp360.279.391.246,00.

Atas Aset Tetap tersebut diketahui bahwa per 31 Desember 2016 terdapat Aset Tetap yang hilang senilai Rp63.918.090,84 sebagaimana pada Lampiran IV.

The balance of Fixed Assets, totalling Rp535,497,365,063.00 per 31st December 2016, consisted of:

a. The book value of the acquisition of Fixed Assets in 2013 and 2014 paid using Rp175,159,973,817.00 of the State Budget (Appendix III);
b. The book value of the acquisition of Fixed Assets in 2015 and 2016 paid using levy funds totalling Rp360,279,391,246.00.

Per 31st December 2016, Rp63,918,090.83 worth of fixed assets was deducted from the entry as presented in Appendix IV.

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Status Hak Kepemilikan Aset Tetap OJK per 31 Desember 2016 atas tanah Papua dan Bandung masih dalam proses penegasan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

The ownership status of OJK Fixed Assets per 31st December 2016 on land in Papua and Bandung remains under the confirmation process at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land agency of the Republic of Indonesia.

VI.3.9 Aset Takberwujud

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp178.194.524.806,00 dan Rp110.750.260.963,00.

VI.3.9 Intangible Assets

The balance of intangible assets per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp178,194,524,806.00 and Rp110,750,260,963.00 respectively.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

A summary of Intangible Assets and transfers in 2016 is presented as follows:

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Takberwujud | Intangible Asset	31 Desember 2015 31st December 2015	Penambahan Additions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2016 31st December 2016
Software | Software	141.087.928.838	102.467.566.607	-	243.555.495.445
Jumlah | Total	**141.087.928.838**	**102.467.566.607**	**-**	**243.555.495.445**

Amortisasi Aset Takberwujud | Amortisation of Intangible Assets	31 Desember 2015 31st December 2015	Penambahan Additions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2016 31st December 2016
Software | Software	30.337.667.875	35.023.302.764	-	65.360.970.639
Jumlah | Total	**30.337.667.875**	**35.023.302.764**	**-**	**65.360.970.639**
Jumlah Aset Takberwujud | Intangible Assets	**110.750.260.963**			**178.194.524.806**

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp178.194.524.806,00 terdiri dari:
- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp34.751.331.978,00 (Lampiran III);
- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp143.443.192.828,00.

The balance of Intangible Assets, totalling 178,194,524,806.00 per 31st December 2016, consisted of:
- The book value of the acquisition of Intangible Assets in 2013 and 2014 paid using Rp34,751,331,978.00 of the State Budget (Appendix III);
- The book value of the acquisition of Fixed Assets in 2015 and 2016 paid using levy funds totalling Rp143,443,192,828.00.

Berdasarkan KMK Nomor 2/KM.2/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran c.q Otoritas Jasa Keuangan Selaku Kuasa Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) dan KMK Nomor 69/KM.6/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran selaku Penguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) yang dipergunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa status Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang dibiayai menggunakan dana APBN merupakan Barang Milik Negara.

Pursuant to KMK No. 2/KM.2/2016, dated 8th March 2016, concerning the Status of State-Owned Assets at the Ministry of Finance, Directorate General of Budgeting, Financial Services Authority (OJK) acting as User of Assets from the Other Expenditure Budget (BA999.08) and KMK No. 69/KM.6/2016, dated 15th March 2016, concerning the Status of State-Owned Assets at the Ministry of Finance, Directorate General of Budgeting acting as User of Assets from the Other Expenditure Budget (BA999.08), which are used by the Financial Services Authority (OJK), stipulates that the status of Fixed Assets and Intangible Assets paid using the State Budget remain under the control of the State.

Pada tanggal 30 September 2015, OJK telah mengajukan permohonan penetapan status atas aset tersebut kepada Kementerian Keuangan, namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum ada berita acara serah terima atas aset dimaksud dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan kepada OJK.

On 30th September 2015, OJK submitted a request to the Ministry of Finance regarding the status of such assets. Per 31st December 2016, however, no handover of the assets from the government, Ministry of Finance, to OJK had taken place.

VI.3.10 Aset Lainnya

VI.3.10 Other Assets

VI.3.10.1 Aset Pajak Tangguhan

VI.3.10.1 Deferred Tax Assets

Saldo Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp378.704.945.750,00 dan Rp238.419.480.250,00.

The balance of Deferred Tax Assets per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp378,704,945,750.00 and Rp238,419,480,250.00 respectively.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

Transfers of Deferred Tax Assets per 31st December 2016 and 2015 are as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Saldo Awal | Opening Balance	238.419.480.250	28.227.043.277
Mutasi: | Transfers:		
Penambahan Tahun Berjalan | Current Year Additions	197.309.819.750	256.034.465.473
Pemulihan | Recovered	(57.024.354.250)	(45.842.028.500)
Saldo Akhir | Closing Balance	**378.704.945.750**	**238.419.480.250**

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

Entries relating to Taxation:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Beban (penghasilan) pajak kini | Current (Income) Tax Expense	342.879.801.250	237.639.924.462
Penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode lalu | Adjustments made in the current period originating from the previous period	-	-
Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya | Total Deferred (Income) Tax Expense originating from temporary differences and the reverse	(140.285.465.500)	(210.192.436.973)
Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru | Total Deferred (Income) Tax Expense relating to changes in tax tariffs or enforcement of new tax regulations	-	-
Beban pajak penghasilan badan | Corporate Income Tax Expense	**202.594.335.750**	**27.447.487.489**

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

VI.3.10.2 Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang

Kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp180.715.820.995,00 dan Rp00,00. Nilai Kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang pada Tahun 2016 merupakan sisa dana imbalan kerja jangka panjang yang belum direncanakan untuk direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2017.

VI.3.10.2 Long-Term Employee Benefits Fund

Long-term restricted cash per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp180,715,820,995.00 and Rp0.00 respectively. The value of long-term restricted cash in 2016 is the surplus of the unrealised long-term restricted cash through to the end of 2017.

VI.3.11 Utang Operasional dan Administratif

Saldo Utang Operasional dan Administratif per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp13.681.413.737,00 dan Rp64.490.754.225,00. Utang Operasional dan Administratif terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga yang timbul karena operasional OJK dan Utang Pajak Potong/Pungut yang belum diselesaikan penyetorannya per 31 Desember 2016 dan 2015.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dan Utang Pajak Potong/Pungut adalah sebagai berikut.

VI.3.11 Operating and Administrative Liabilities

The balance of Operating and Administrative Liabilities per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp13,681,413,737.00 and Rp64,490,754,225.00 respectively. Operating and Administrative Liabilities are obligations to a third party incurred through OJK operating and administrative activities as well as unsettled tax debt per 31st December 2016 and 2015.

A summary of obligations to a third party and tax debt is as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 / 31st December 2016	31 Desember 2015 / 31st December 2015
Utang kepada Pihak Ketiga | Third Party Payables	12.342.978.353	44.664.432.107
Utang Pajak Potong/Pungut | Withholding Tax Payable	1.338.435.384	19.826.322.118
Jumlah | Total	**13.681.413.737**	**64.490.754.225**

Atas Utang kepada Pihak Ketiga dimaksud diselesaikan dengan menggunakan anggaran Tahun 2016 melalui pos susulan sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp9.745.118.859,00.

Obligations to a third party were settled using the 2016 budget through to 10th January 2017, totalling Rp9,745,118,859.00.

VI.3.12 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp21.647.754.921,00 dan Rp14.510.361.627,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

VI.3.12 Unearned Revenue

The balance of Unearned Revenue per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp21,647,754,921.00 and Rp14,510,361,627.00 respectively. Unearned Revenue is surplus revenues from levy payments by entities operating in the financial services sector.

A summary of Unearned Revenue per 31st December 2016 and 2015 is as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Sektor | Sector	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
I	**Registrasi | Registration**	**53**	**16.802.078**
1.	Perbankan | Banking Sector	-	16.802.025
2.	Pasar Modal | Capital Market	53	53
3.	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	-	-
II	**Biaya Tahunan | Annual Fee**	**20.843.437.943**	**14.429.877.349**
1	Perbankan | Banking Sector	5.175.017.450	868.290.000
2	Pasar Modal | Capital Market	11.827.853.420	7.580.280.502
3	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	3.840.567.073	5.981.306.847
III	**Sanksi | Penalties**	**667.361.523**	**29.292.200**
1	Perbankan | Banking Sector	1.386.029	3.246.000
2	Pasar Modal | Capital Market	665.835.494	25.906.200
3	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	140.000	140.000
IV	**Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Peruntukannya | Other Income**	**125.984.313**	**34.390.000**
1	Renewable Power Indonesia | Renewable Power Indonesia	46.675.200	-
2	PT Hanson International Tbk | PT Hanson International Tbk	32.000.000	32.000.000
3	PT Bank Pembangunan Daerah NTT | PT Bank Pembangunan Daerah NTT	18.260.780	-
4	Dana Pensiun Karyawan Bank Mandiri | Bank Mandiri Employee Pension Fund	8.063.451	-
5	Violando Aloysisus Teguh-Bank CIMB | Bank CIMB – Violando Alysisus Teguh	6.700.000	-
6	Dana Pensiun Kartika Chandra | Kartika Chandra Pension Fund	2.500.000	-
7	Richard Budisetia | Richard Budisetia	2.446.237	-
8	PT BPR Kedung Arto | PT Kedung Arto Rural Bank	2.390.000	2.390.000
9	Dana Pensiun Avesta Continental Pack | Avesta Continental Pack Pension Fund	1.906.557	-
10	Charles Hermawan | Charles Hermawan	1.819.651	-
11	Penerimaan dari Panitia Urusan Piutang Negara | Income from PUPN	1.690.000	-
12	Oman Pieters Arifin | Oman Pieters Arifin	1.076.929	-
13	Erika Kartikawati | Erika Kartikawati	500.000	-
14	Drs. Muliadi Sunidja | Drs Muliadi Sunidja	454.545	-
15	PT. BPR Sarana Sukses | PT Sarana Sukses Rural Bank	140.000	-
16	Sinarahardja Djana | Sinarahardja Djana	108.000	-
17	Patuan Sinaga | Patuan Sinaga	100.000	-
18	Tatyana Inrati hasjim SH | Tatyana Inrati Hasjim SH	100.000	-
19	Taufiq H | Taufiq H	15.000	-
V	**Penerimaan yang Belum Teridentifikasi pada Rekening Induk | Unidentified Income from Parent Account**	**10.009.052**	**-**
1.	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi pada Rekening Induk | Unidentified Income from Parent Account	10.009.052	-
Jumlah | Total		**21.647.754.921**	**14.510.361.627**

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

VI.3.13 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.805.018.736,00 dan Rp15.171.713.057,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

VI.3.13 Payable to State Treasury

The balance of Payables to State Treasury per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp1,805,018,736.00 and Rp15,171,713,057.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
1.	Denda Wanprestasi Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Infrastruktur | Default Fines for Completion of Infrastructure Procurement	1.258.255.782	-
2.	Retur Pihak Ketiga Atas Pengadaan | Third Party Returns on Procurement	431.807.143	-
3.	Retur Atas Penggunaan Dana | Returns from use of Fund	81.595.187	12.533.777.450
4.	Denda Wanprestasi Pengadaan Jasa Konsultansi | Default Fines on Procurement of Consulting Services	33.360.624	-
5.	Pengembalian Kelebihan Gaji | Returns of Overpaid Salaries	-	69.652.250
6.	Penyetoran Jasa Giro APBN | Deposits of State Budget Current Account Services	-	2.568.283.357
Jumlah | Total		**1.805.018.736**	**15.171.713.057**

Atas Utang Setoran ke Kas Negara dimaksud telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara pada Tahun 2017.

All Payables to State Treasury were deposited into the State Treasury in 2017.

VI.3.14 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

1) Program Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:
   a) Program Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun
      i. Program Pensiun
         Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dana Pensiun OJK.
      ii. Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)
         TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK.
   b) Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya
      i. Uang Pesangon
         Uang pesangon diberikan pegawai sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.
      ii. Tunjangan Pasca Jabatan
         Pemberian penghargaan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu.

VI.3.14 Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities

1. The Post-Employment and other Long-Term Employee Benefit Programs consist of:
   a. Post-Employment Pension Program
      i. Pension Program
         The Defined Benefit Pension Program (PPMP) is applicable to ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia with more than three years of service remaining at OJK and is managed by the OJK Pension Fund;
      ii. Retirement Housing Allowance (TPHT) and Retirement Healthcare Allowance (TKHT)
         TPHT and TKHT are facilities offered to retired employees.
   b. Other Post-Employment Bene t Programs
      i. Severance Pay
         Severance pay is paid to an employee upon termination of service at OJK.
      ii. Post-Office Allowance
         Awarded to members of the Board of Commissioners and Permanent Employees after a specified length of service.

c) Program Imbalan Kerja Jangka Panjang
   i. Biaya Pakaian Dinas dan Kacamata
      OJK memberikan bantuan pembelian pakaian jabatan bagi pegawai dengan jabatan Kepala Subbagian ke atas atau yang setingkat dengan tarif biaya ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK, serta memberikan pakaian dinas bagi pegawai dengan jabatan tertentu antara lain pengemudi, pengamanan, protokol, ajudan, dan resepsionis. Selain itu, OJK juga memberikan bantuan pembelian kacamata kepada pejabat dan pegawai.
   ii. Cuti Besar
      OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus.
   iii. Penghargaan Masa Pengabdian
      Pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 untuk periode selanjutnya.

c. Long-Term Employee Benefits Program
   i. Clothing and Eyewear Allowance
      OJK subsidises the purchase of official work clothing for employees and sub-section heads or above at a rate decided by the OJK Board of Commissioners, while also providing uniforms for certain positions, including drivers, security guards, protocol, adjutants and receptionists. In addition, OJK also subsidises the purchase of eyewear for officials and employees.
   ii. Sabbatical Leave
      OJK provides a leave entitlement for employees who have worked for six years continuously.
   iii. (iii) Long Service Award
      Awarded to employees who have served a minimum of 15 consecutive years and in multiples of five for the subsequent periods.

2) Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja
   a) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja
      Nilai Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp486.226.763.853,00 dan Rp154.207.445.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

2. Reclassification of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits
   a) Current Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits
      The value of Current Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp486,226,763,853.00 and Rp154,207,445,000.00 respectively as follows:

(dalam ribuan Rupiah) / (in thousand Rupiah)

Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja | Current Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	**Program Pensiun** Pension Program	**TPHT** Retirement Housing Allowance	**TKHT** Retirement Healthcare Allowance	**Uang Pesangon** Severance Pay	**TPJ** Post-Office Allowance	**Cuti Besar** Sabbatical Leave	**Penghargaan Masa Pengabdian** Long Service Award	**Pakaian dan Kacamata** Clothing and Eyewear Allowance	**Jumlah** Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Aktiva (Kewajiban) 31 Desember 2015 | Balance of Assets/(Liabilities) per 31st December 2015	(33.858.514)	(13.295.695)	(40.861.003)	(7.316.496)	-	(36.044.404)	(22.831.333)	-	(154.207.445)
Beban Imbalan Kerja | Employee Benefits Expense	(146.961.503)	(95.597.108)	(107.975.584)	(17.954.538)	(61.221.264)	(46.240.310)	(61.980.937)	(22.185.491)	(560.116.735)
Pendanaan OJK | OJK Fund	51.540.969	32.163.834	83.825.670	-	-	-	-	-	167.530.473
Pembayaraan Manfaat | Benefits Payments	-	-	-	2.003.723	-	30.641.011	15.800.922	12.121.288	60.566.944
Saldo Aktiva (Kewajiban) 31 Desember 2016 | Balance of Assets/(Liabilities) per 31st December 2016	**(129.279.048)**	**(76.728.969)**	**(65.010.917)**	**(23.267.3110**	**(61.221.264)**	**(51.643.703)**	**(69.011.348)**	**(10.064.203)**	**(486.226.763)**

b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja
   Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.028.593.020.000,00 dan Rp911.731.599.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

b) Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits
   The value of Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp1,028,593,020,000.00 and Rp911,731,599,000.00 respectively as follows:

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja | Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	**Program Pensiun** Pension Program	**TPHT** Retirement Housing Allowance	**TKHT** Retirement Healthcare Allowance	**Uang Pesangon** Severance Pay	**TPJ** Post-Office Allowance	**Cuti Besar** Sabbatical Leave	**Penghargaan Masa Pengabdian** Long Service Award	**Pakaian dan Kacamata** Clothing and Eyewear Allowance	**Jumlah** Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Aktiva (Kewajiban) 31 Desember 2015 | Balance of Assets/(Liabilities) per 31st December 2015	(22.028.723)	(47.251.152)	-	(58.944.685)	(35.519.761)	(73.144.306)	(658637940)	(16.205.032)	(911.731.599)
Beban Imbalan Kerja | Employee Benefits Expense	99.382.953	49.547.365	43.078.259	(21.201.729)	42.879.003	(117.888.929)	(173.602.985)	(3.681.482)	(81.487.491)
Beban Imbalan Kerja OCI | OCI Employee Benefits Expense	19.002.760	(6.318.958)	(42.578.729)	(5.401.554)	(77.449)	-	-	-	(35.373.930
Pendanaan OJK | OJK Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaraan Manfaat | Benefits Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aktiva (Kewajiban) 31 Desember 2016 | Balance of Assets/(Liabilities) per 31st December 2016	**96.356.990**	**(4.022.745)**	**499.530**	**(85.547.968)**	**7.281.793**	**(191.033.235)**	**(832.240.925)**	**(19.886.460)**	**(1.028.593.020)**

3) Asumsi-Asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2016 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Laporan Aktuaris Nomor 0070/ST-RS-PSAK24-OJK/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

3) Actuarial Assumptions

The employee benefits per 31st December 2016 were calculated by an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo according to Actuary Report No. 0070/ST-RS-PSAK24-OJK/I/2017, dated 25th January 2017.

The main assumptions used by the actuary when determining the employee benefit liabilities are as follows:

Keterangan | Description	**31 Desember 2016** 31st December 2016	**31 Desember 2015** 31st December 2015
Asumsi Ekonomi | Economic Assumptions		
Tingkat diskonto | Discount Rate		
- Program Pensiun | Pension Program	9,47% per tahun | year	9,13% per tahun | year
- Tuperum | Housing Allowance	8,50% per tahun | year	8.32% per tahun | year
- Kesehatan | Healthcare Allowance	8,90% per tahun | year	9,94% per tahun | year
- Pesangon | Severance Pay	8,10% per tahun | year	8,88% per tahun | year
- Pasca Jabatan | Post-Office Allowance	6,00% per tahun | year	8,88% per tahun | year
- Cuti Besar (Pegawai) | Sabbatical Leave (employee)	8,10% per tahun | year	7,70% per tahun | year
- Cuti Besar (DK) | Sabbatical Leave (BoC)	6,00% per tahun | year	7,70% per tahun | year
- PMP (Pegawai) | Long Service (Employee)	8,10% per tahun | year	7,70% per tahun | year
- PMP (DK) | Long Service (BoC)	6,00% per tahun | year	7,70% per tahun | year
- Pakaian Pejabat | Clothing Allowance	8,10% per tahun | year	8,88% per tahun | year
- Kacamata | Eyewear Allowance	8,10% per tahun | year	8,88% per tahun | year
Tingkat kenaikan PhDP dan Gaji pokok | Increase Rate of PhDP and Basic Salary	9,00% per tahun | year	9,00% per tahun | year
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun | Increase Rate of Pension Benefits	5,00% per tahun | year	5,00% per tahun | year
Tingkat kenaikan biaya kesehatan (trend biaya) | Increase Rate of Health Cost (cost trend)	8,00% per tahun | year	8,00% per tahun | year
Faktor Demografis | Demographic Factors		
Tingkat Mortalita | Mortality Rate	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun Refers to the Indonesia Mortality Table for 2011 for the active period and Group Annuity Mortality of 1983 for the retirement period.	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun Refers to the Indonesia Mortality Table for 2011 for the active period and Group Annuity Mortality of 1983 for the retirement period.
Tingkat Cacat | Disability Rate	10% dari tingkat mortalita 10% of the mortality rate	10% dari tingkat mortalita 10% of the mortality rate
Pengunduran Diri | Resignation Rate	0,5% untuk seluruh usia 0.5% for all ages	0,5% untuk seluruh usia 0.5% for all ages
Pensiun | Pension	100% pada usia pensiun normal 100% of normal retirement age	100% pada usia pensiun normal 100% of normal retirement age

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Asumsi Lainnya | Other Assumptions		
	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp10,000,000/orang/tahun di usia 56 Average cost of healthcare was Rp10,000,000 per person performance annum at the age of 56.	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp10,000,000/orang/tahun di usia 56 Average cost of healthcare was Rp9,500,000 per person performance annum at the age of 56.
	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal. The basic calculation of eligibility for retirement healthcare facilities is 50 years old with 20 years of service for employees from the Ministry of Finance and 50 years old and 10 years of service for employees from Bank Indonesia. Duration of service includes time spent at original institution.	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal. The basic calculation of eligibility for retirement healthcare facilities is 50 years old with 20 years of service for employees from the Ministry of Finance and 50 years old and 10 years of service for employees from Bank Indonesia. Duration of service includes time spent at original institution.
Usia Pensiun Normal | Normal Retirement Age	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita). 56, 58 and 60 years old (male and female)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita). 56, 58 and 60 years old (male and female)
***Loading Pajak* | Tax Loading**		
Asumsi Pajak: | Tax Assumptions:		
- Program Pensiun | Pension Program	Pajak Individual dengan maksimum 26.3% Individual Tax with Maximum of 26.3%	mengikuti Pajak Individual Following Individual Taxes
- Perumahan | Housing	25%	25%
- Kesehatan | Healthcare	-	-
- Pesangon | Severance	15%	15%
- Pasca Jabatan | Post-Office	25%	15%
- Cuti Besar (Pegawai) | Sabbatical Leave (Employee)	25%	25%
- Cuti Besar (DK) |Sabbatical Leave (BoC)	25%	25%
- PMP (Pegawai) | Long Service (Employee)	25%	25%
- PMP (DK) | Long Service (BoC)	25%	25%
- Pakaian Pejabat | Clothing	15%	25%
- Kacamata | Eyewear	15%	25%

Aset program OJK pada Dana Pensiun dan YKP sebesar Rp378.778.341.000,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi.

Aset Program OJK per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut

The Asset Program for the OJK Pension Fund and OJK YKP totalled Rp378,778,341,000.00. The yield on the asset program refers to the investment policy.

The OJK Asset Program per 31st December 2016 is summarised as follows:

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	Aset Program | Assets of the Programs
DAPEN OJK | OJK Pension Fund	
a. Dana Pensiun | Pension Fund	**151.243.689.000**
Yayasan Kesehatan Pegawai OJK (YKP OJK) | OJK YKP	**227.534.652.000**
a Perumahan | Housing	45.910.396.000
b. Kesehatan | Healthcare	181.624.256.000
Jumlah | Total	**378.778.341.000**

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dana Pensiun (DAPEN) per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Asset program placements were allocated to the Pension Fund per 31st December 2016 as follows:

No	Penempatan pada DAPEN | Placements in the Pension Fund	Per 31 Desember 2016 Per 31st December 2016 %
1.	Deposito on call pada Bank | On-call Deposits in the Banking Industry	1,66
2.	Deposito berjangka pada Bank | Term Deposits in the Banking Industry	28,23
3.	Surat Berharga Negara | Tradeable Government Securities (SBN)	10,18
4.	Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia | Stocks Listed on the Indonesia Stock Exchange	4,8
5.	Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia | Corporate Bonds Listed on the Indonesia Stock Exchange	30,43
6.	Reksa Dana | Mutual Funds	
	a. Reksa Dana Pendapatan Tetap | Fixed-Income Funds	5,18
	b. Reksa Dana Campuran | Discretionary Funds	1,99
	c. Reksa Dana Saham | Equity Funds	14,41
7.	Efek Beragun Aset | Asset-Backed Securities	3,12
Jumlah | Total		**100,00**

Dana investasi YKP sebesar Rp237.922.586.197,00 yang merupakan kumpulan dana aset program dari OJK/BI dan dana operasional YKP ditempatkan pada beberapa instrumen keuangan dengan komposisi sebagai berikut.

The YKP investment fund, totalling Rp237,922,586,197.00, represents asset program funds from OJK/BI and YKP operating funds, which was placed in various financial instruments as follows:

No	Penempatan pada YKP | YKP Placements	Per 31 Desember 2016 Per 31st December 2016 %
1.	Deposito | Term Deposits	95,95
2.	Surat Utang | Debt Securities	1,26
3.	Reksadana | Mutual Funds	2,79
Jumlah		**100,00**

Sebagai informasi bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Bank Indonesia telah melakukan pembayaran kepada YKP-OJK untuk TPHT sebesar Rp10.669.118.697,00 dan TKHT sebesar Rp83.825.670.549,00 dengan jumlah Rp94.494.789.246,00.

Per 28th December 2016, Bank Indonesia had made OJK-YKP payments totalling Rp10,669,118,697.00 for housing and Rp83,825,670,549.00 for healthcare, totalling Rp94,494,789,246.00.

Selain itu, terdapat pula beban imbalan kerja atas iuran pasti sebesar Rp13.446.376.944,00 yang terdiri dari iuran pegawai sebesar Rp4.714.083.704,00 dan iuran OJK sebesar Rp8.732.293.240,00.

In addition, there was a defined contribution employee benefit expense of Rp13,446,376,944.00, consisting of the employees' contribution of Rp4,714,083,704.00 and OJK's contribution of Rp8,732,293,240.00.

VI.3.15 Utang Pajak Badan

VI.3.15 Corporate Tax Payable

Saldo Utang Pajak Badan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp892.470.720.403,00 dan Rp237.639.924.462,00 yang merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

The balance of Corporate Tax Payable per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp892,470,720,403.00 and Rp237,639,924,462.00 respectively in the form of Corporate Income Tax in accordance with Act No. 36 of 20078 concerning Income Tax.

Rincian Utang PPh Badan Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

A summary of Corporate Income Tax in 2016 and 2015 is as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Utang PPh Badan 2015 | 2015 Corporate Income Tax	237.639.924.462	-
Koreksi Utang PPh Badan 2015 (sesuai SKPKB) | Correction of 2015 Corporate Income Tax (pursuant to SKPKB)	254.471.553.038	-
Sanksi Administrasi (sesuai SKPKB) | Administrative Sanctions (pursuant to SKPKB)	118.106.754.600	
Utang PPh Badan Tahun Berjalan | Current Corporate Income Tax	342.879.801.250	237.639.924.462
Angsuran PPh Badan | Corporate Income Tax Instalments	(60.627.312.947)	-
Jumlah | Total	**892.470.720.403**	**237.639.924.462**

Perhitungan utang PPh Badan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

Corporate Income Tax per 31st December 2016 and 2015 were calculated as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Penghasilan Kena Pajak Tahun Berjalan | Current Taxable Income	1.371.519.205.762	950.559.697.849
Pajak Badan Terutang (25%*a) | Corporate Tax Payable (25% per annum)	342.879.801.250	237.639.924.250
Pembayaran Tahun Berjalan | Current Payments	-	-
Utang Pajak Badan | Corporate Tax Payable	342.879.801.250	237.639.924.250

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, utang PPh Badan Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp610.218.212.100,00 yang terdiri dari PPh terutang sebesar Rp492.111.477.500,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00. Atas SKPKB tersebut, utang PPh Badan Tahun 2015 yang semula diakui sebesar Rp237.639.924.462,00 telah dilakukan koreksi pada tahun berjalan sebesar Rp372.578.287.638,00. Sanksi administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00 saat ini dalam proses pengajuan penghapusan melalui Surat Nomor S-02/MS.4/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Permohonan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi.

Pursuant to SKPKB No. 00001/206/15/075/16, dated 23rd December 2016, issued by the Inland Revenue Service, Sawah Besar Dua, Jakarta, corporate income tax payable in 2015 was set at Rp610,218,212,100.00, consisting of income tax payable totalling Rp492,111,477,500.00 and administrative sanctions totalling Rp118,106,754,600.00. According to the SKPKB, corporate income tax recognised in 2015 at Rp237,639,924,462.00 has been corrected in the current year to Rp372,578,287,638.00. The administrative sanctions, totalling Rp118,106,754,600.00, are currently in the process of being written off pursuant to Letter No. S-02/MS.4/2017, dated 15th January 2017 concerning Requests to Reduce or Write-Off Administrative Sanctions.

OJK telah melakukan pembayaran angsuran PPh Badan Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

OJK paid the following corporate income tax instalments for 2015:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

No	Nomor NTPN | Number NTPN	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah Total
1.	75B5E16URU5TLUN8	30 Desember 2016 | 30th December 2016	60.627.312.947
2.	138775BMGNATA228	16 Januari 2017 | 16th January 2017	5.125.211.854
3.	299997NTRQ9QBPMO	1 Maret 2017 | 1st March 2017	172.047.275
Jumlah | Total			**65.924.572.076**

Dari jumlah pembayaran angsuran PPh sebesar Rp65.924.572.076,00 tersebut, terdapat pembayaran yang berasal dari kelebihan target penerimaan pungutan Tahun 2015 yang digunakan Tahun 2016 sebesar Rp4.627.312.947,00.

Of the corporate income tax instalments totalling Rp65,924,572,076.00, a payment was made using the excess levy receipts from 2015 for use in 2016 amounting to Rp4,627,312,947.00.

VI.3.16 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.197.112.973.414,00 dan Rp3.902.078.772.091,00.

Mutasi Aset Neto pada Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

VI.3.16 Net Assets

The balance of Net Assets per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp4,197,112,973,414.00 and Rp3,902,078,772,091.00 respectively.

Transfers of Net Assets in 2016 and 2015 were as follows:

(dalam Rupiah) / (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2015 | Balance of Net Asset as of 31 December 2015	3.902.078.772.091	1.826.082.487.224
Mutasi: | Transfers:		
Perubahan Aset Neto | Changes in Net Assets	250.038.389.764	2.020.623.777.370
Penyesuaian Aset Neto | Net Asset Adjustments	44.995.811.559	55.372.507.497
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2016 | Balance of Net Assets as of 31 December 2016	**4.197.112.973.414**	**3.902.078.772.091**

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

A summary of corrections to Net Assets is as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Keterangan | Description Perubahan Aset Neto | Changes to Net Assets	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
1.	Reklas Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya | Reclassification of Opening Balance of Unearned Revenue to Restricted Cash		10.568.268.678
2.	Koreksi Piutang Lain-lain | Correction to Other Receivables	(5.003.268.779)	(24.598.105)
3.	Koreksi Piutang Pungutan Tahun lalu | Correction to Levy Receivables in the Previous Year	-	(442.520.135)
4.	Pengembalian TAYL | Refund from Previous Year	-	(12.158.850)
5.	Mutasi Piutang Lain | Change of Other Receivables	-	(100.838.105)
6.	Mutasi Utang Operasional | Change of Operating Liabilities	-	(46.790.607)
7.	Koreksi Pajak Badan | Correction to Corporate Tax	-	61.938.480.094
8.	Koreksi Utang Setoran Ke Kas Negara | Correction to Payables to State Treasury	-	117.899.003
9.	Koreksi Saldo Awal Penyusutan | Correction to the Opening Balance of Depreciation	-	(1.453.521.330)
10.	Reklas Utang Setoran Ke Kas Negara | Reclassification of Payables to State Treasury	1.805.018.736	(15.171.713.057)
11.	Koreksi Pembukuan Pajak Satker | Correction to Work Unit Tax Bookkeeping	6.102.180	
12.	Pendapatan Other Comprehensive Income (OCI) atas Liabilitas Imbalan kerja | Other Comprehensive Income on Employee Benefit Liabilities	(35.373.930.000)	-
13.	Koreksi Nilai Tanah | Correction to Land Value	58.000.000	-
14.	Pembayaran TKHT pegawai | Healthcare Allowance Payments to Employees	83.825.670.000	-
15.	Koreksi Utang Pajak 2015 | Correction to Tax Payable in 2015	54.145.220	-
16.	Koreksi Beban Dibayar Dimuka | Correction to Prepaid Expenses	38.289.350	-
17.	Koreksi Piutang Pungutan Lain-lain Tahun 2015 | Correction to Other Levy Receivables in 2015	(414.215.147)	-
Jumlah | Total		**44.995.811.559**	**55.372.507.586**

VI.3.17 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.416.320.218.849,00 dan Rp5.655.273.293.711,00 yang terdiri dari:

VI.3.17 Revenue

OJK revenue per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp4,416,320,218,849.00 and Rp5,655,273,293,711.00, consisting of the following:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Pendapatan Pungutan | Levy Income	4.416.320.218.849	3.924.646.956.260
Pendapatan APBN | State Budget Income	-	1.730.626.337.451
Jumlah | Total	**4.416.320.218.849**	**5.655.273.293.711**

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut.

A summary of Levy Income per 31st December 2016 and 2015 is presented in the following table:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Sektor | Sector	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
I	**Registrasi | Registration**	**54.517.304.864**	**35.952.398.233**
1.	Perbankan | Banking Sector	593.893.591	1.850.025.000
2.	Pasar Modal | Capital Market	48.043.411.273	33.022.326.567
3.	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	5.880.000.000	1.080.046.666
II	**Biaya Tahunan | Annual Fee**	**4.140.038.895.326**	**3.812.624.977.549**
1.	Perbankan | Banking Sector	3.069.693.507.713	2.752.773.369.144
2.	Pasar Modal | Capital Market	455.032.137.257	480.968.704.519
3.	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	615.313.250.356	578.882.903.886
III	**Sanksi | Sanction**	**22.903.399.767**	**26.002.626.145**
1.	Perbankan | Banking Sector	9.160.541.900	12.088.930.554
2.	Pasar Modal | Capital Market	11.254.047.323	11.780.437.000
3.	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	2.488.810.544	2.133.258.591
IV	**Pengelolaan | Management**	**198.860.618.892**	**50.066.954.333**
1.	Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan | Levy Management Yield	147.322.246.808	23.224.329.772
2.	Jasa Giro Rekening Pungutan | Levy Current Account Services	42.115.515.702	26.485.748.427
3.	Imbal Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja| Yields from management of Employee Benefit Fund	8.694.820.994	-
4.	Denda Wanprestasi | Default Fines	465.111.340	139.495.128
5.	Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan | Returns of Levy Funds	262.921.648	217.351.005
6.	Setoran Uji Coba Sistem Host to Host | Deposits for Host-to-Host trials	2.400	30.001
Jumlah | Total		**4.416.320.218.849**	**3.924.646.956.260**

VI.3.18 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.166.281.829.085,00 dan Rp3.634.649.516.341,00 yang terdiri dari:

VI.3.18 Expenses

Total expenses per 31st December 2016 and 2015 stood at Rp4,166,281,829,085.00 and Rp3,634,649,516,341.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2016 31st December 2016	31 Desember 2015 31st December 2015
Beban Kegiatan Operasional | Operating Expenses	487.634.978.517	530.706.001.785
Beban Kegiatan Administratif | Administrative Expenses	3.501.911.870.740	2.948.045.303.050
Beban Kegiatan Pengadaan Aset | Asset Procurement Expenses	148.318.518.969	111.616.271.492
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya | Other Supporting Expenses	28.416.460.859	44.281.940.014
Jumlah | Total	**4.166.281.829.085**	**3.634.649.516.341**

1) Beban Kegiatan Operasional
Beban Kegiatan Operasional sebesar Rp487.634.978.517,00 dengan rincian:

1) Operating Expenses
Operating expenses totalled Rp487,634,978,517.00 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Beban Kegiatan Operasional | Operating Expenses	31 Desember 2016 31st December 2016
Fungsi Pengaturan | Regulatory Function	194.268.576.559
Fungsi Pengawasan | Supervisory Function	233.106.956.199
Fungsi Penegakan Hukum | Law Enforcement Function	21.217.564.893
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen | Consumer Protection and Education Function	39.041.880.866
Jumlah Beban Kegiatan Operasional | Total Operating Expenses	**487.634.978.517**

2) Beban Kegiatan Administratif
Beban Kegiatan Administratif sebesar Rp3.501.911.870.740,00 dengan rincian:

2) Administrative Expenses
Administrative Expenses totalled Rp3,501,911,870,740.00 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Beban Kegiatan Administrasi | Administrative Expenses	31 Desember 2016 31st December 2016
Beban Perkantoran | Office Expenses	261.157.171.097
Beban Remunerasi | Remuneration Expenses	1.901.821.422.584
Beban Pendidikan dan Pelatihan | Education and Training Expenses	17.802.768.956
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM | Organisational and HR Development Expenses	156.181.529.110
Beban Imbalan Pasca Masa Kerja | Post-Employment Benefit Expenses	589.776.335.605
Beban Pajak Badan | Corporate Tax Expenses	575.172.643.388
Jumlah Beban Kegiatan Administrasi | Total Administrative Expenses	**3.501.911.870.740**

3) Beban Kegiatan Pengadaan Aset
Beban Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp148.318.518.969,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi. dengan rincian:

3) Asset Procurement Expenses
Asset Procurement Expenses, totalling Rp148,318,518,969.00, are expenses that arise from the procurement of assets, including depreciation and amortisation expenses as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset | Asset Procurement Expenses	31 Desember 2016 31st December 2016
Beban Penyusutan | Depreciation Expenses	97.066.920.284
Beban Amortisasi | Amortisation Expenses	35.023.302.764
Beban Persediaan | Inventory Expenses	16.228.295.921
Jumlah Beban Kegiatan Pengadaan Aset | Total Asset Procurement Expenses	**148.318.518.969**

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

4) Beban Kegiatan Pendukung Lainnya
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp28.416.460.859,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK, misalnya Representasi dan Kekaryawanan dengan rincian:

4) Other Supporting Expenses
Other Supporting Expenses, totalling Rp28,416,460,859.00, are expenses that arise from other activities to support OJK task implementation, for example Representations and Employment, as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya | Other Supporting Expenses	31 Desember 2016 31st December 2016
Beban Representasi | Representation Expenses	21.855.294.349
Beban Kekaryawanan | Employment Expenses	6.540.344.510
Beban Lainnya | Other Expenses	20.822.000
Jumlah Beban Kegiatan Pendukung Lainya | Total Other Supporting Expenses	**28.416.460.859**

VI.3.19 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Tahun 2016

1. Kas masuk dari pendapatan pungutan OJK Tahun 2016 terdiri dari:

VI.3.19 Elucidation of Statement of Cash Flow Entries in 2016

1. Cash inflow from OJK levy income in 2016 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Decription	31 Desember 2016 31st December 2016
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya | Levy Receipts from the Previous Year	10.581.747.272
Penerimaan Tahun 2016 | Receipts in 2016	4.379.360.570.242
Penerimaan dari Pendapatan Diterima Dimuka | Receipts of Unearned Revenue	7.127.384.242
Jumlah | Total	**4.397.069.701.756**

2. Kas masuk dari pendapatan APBN

2. Cash inflow from State Budget income as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Decription	31 Desember 2016 31st December 2016
Denda Wanprestasi Tahun 2014 | Default Fines in 2014	1.258.255.782
Retur Tahun 2014 | Returns in 2014	431.807.143
Denda Wanprestasi Tahun 2015 | Default Fines in 2015	33.360.624
Retur Tahun 2015 dan Retur Tahun 2016 | Returns in 2015 and 2016	81.595.187
Jumlah | Total	**1.805.018.736**

Kas masuk dari pendapatan APBN merupakan pengembalian belanja atas beban APBN.

3. Arus Kas Keluar
   Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk pembayaran Pos Susulan Tahun 2016, pembayaran Utang Tahun 2015, perolehan Aset Tetap dan Aset TakBerwujud dan pengeluaran Beban Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Cash inflow from State Budget income represents procurement returns on State Budget expenses.

3. Cash Outflow
   Cash outflow from the Statement of Cash Flow is used for late entry payments in 2016, debt payments in 2015, procurement of fixed assets and intangible assets and expenses in 2016 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Decription	**31 Desember 2016** 31st December 2016
Pembayaran Pos Susulan Tahun 2016 | Subsequent Event Payments in 2016	9.431.391.585
Pembayaran Utang Tahun 2015 | Debt Payments in 2015	64.490.126.348
Perolehan Aset Tetap dan Aset TakBerwujud | Procurement of Fixed Assets and Intangible Assets	379.538.929.163
Beban Tahun 2016 | Expenses in 2016	3.538.338.873.728
Jumlah | Total	**3.991.799.320.824**

LAMPIRAN I

APPENDIX I

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

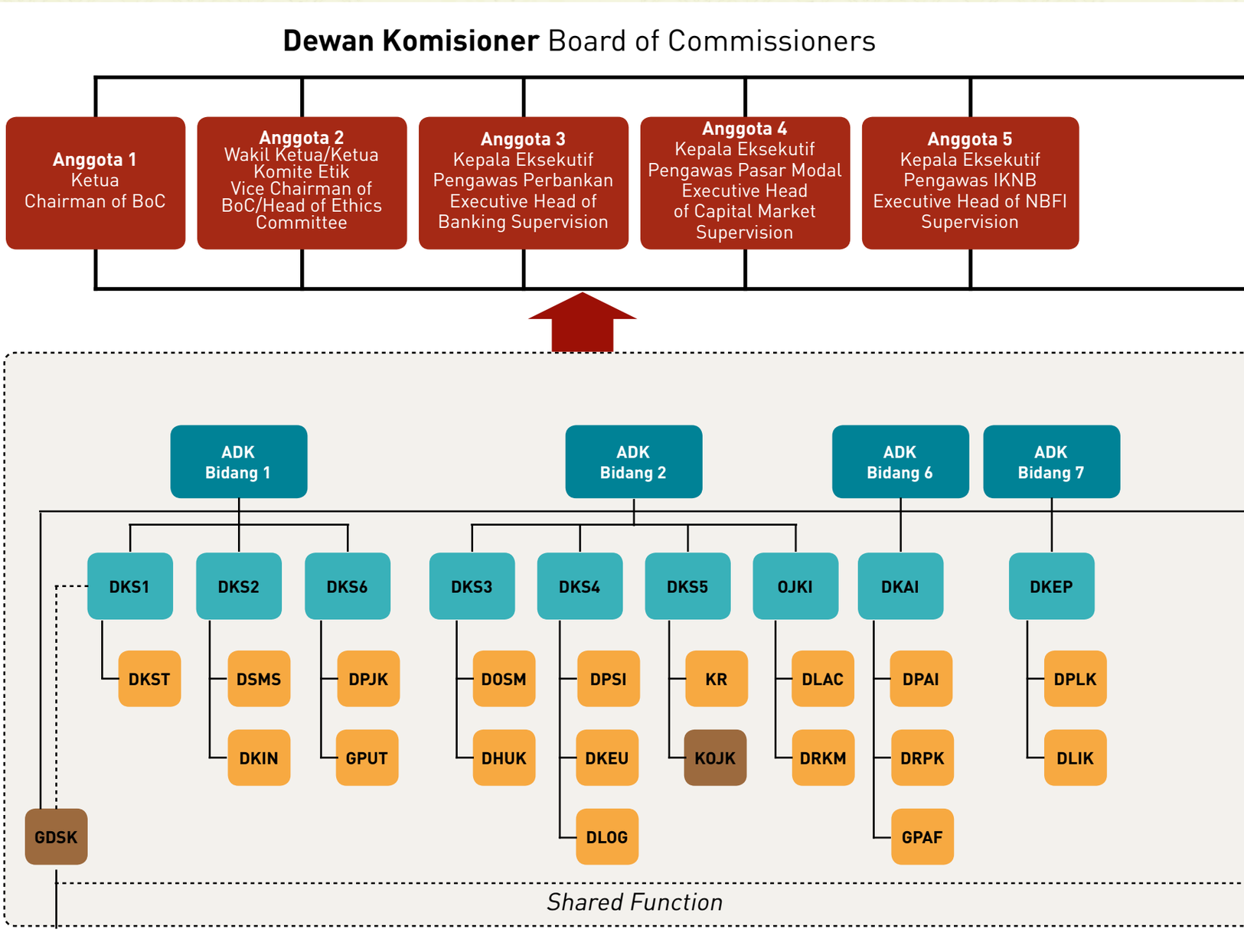

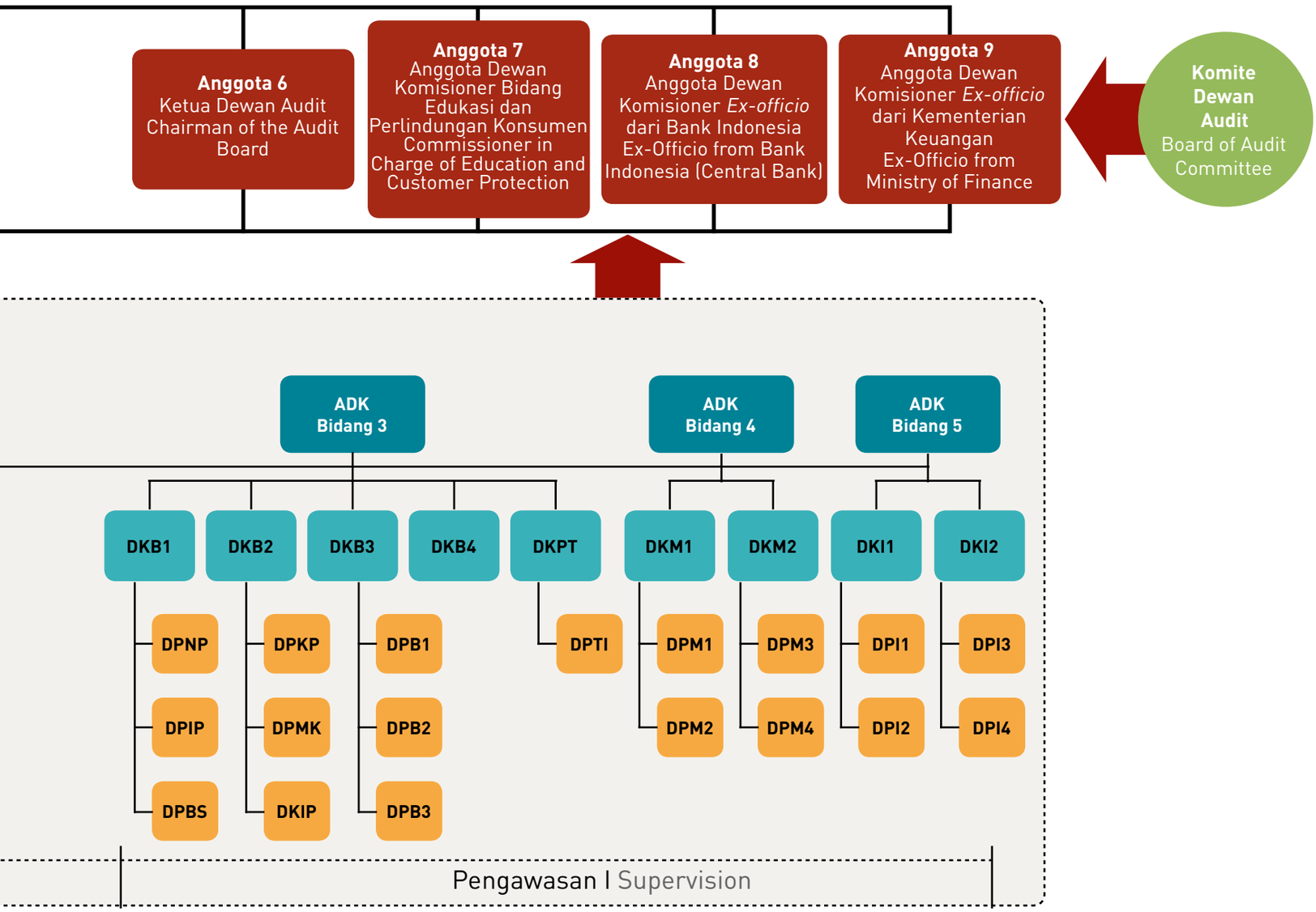
Anggota 6
Ketua Dewan Audit
Chairman of the Audit Board
Anggota 7
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioner in Charge of Education and Customer Protection
Anggota 8
Anggota Dewan Komisioner Ex-officio dari Bank Indonesia
Ex-Officio from Bank Indonesia (Central Bank)
Anggota 9
Anggota Dewan Komisioner Ex-officio dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio from Ministry of Finance
Komite Dewan Audit
Board of Audit Committee
ADK Bidang 3
ADK Bidang 4
ADK Bidang 5
DKB1
DKB2
DKB3
DKB4
DKPT
DKM1
DKM2
DKI1
DKI2
DPNP
DPIP
DPBS
DPKP
DPMK
DKIP
DPB1
DPB2
DPB3
DPTI
DPM1
DPM2
DPM3
DPM4
DPI1
DPI2
DPI3
DPI4
Pengawasan I Supervision

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

LAMPIRAN II

LAPORAN KOMITMEN
PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN PER 31 DESEMBER 2016

APPENDIX II

COMMITMENT REPORT OF RECEIVABLES WRITTEN OFF PER 31st DECEMBER 2016

No	Jenis Piutang | Receivable	Jumlah Total
I	**Biaya Tahunan | Annual Fee**	**725.578.745**
1.	Perbankan | Banking Sector	92.189.889
2.	Pasar Modal | Capital Market	633.388.856
3.	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	-
II	**Sanksi | Sanction**	**2.748.580.910**
1.	Perbankan | Banking Sector	-
2.	Pasar Modal | Capital Market	2.748.580.910
3.	Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	-
Jumlah | Total		**3.474.159.655**

Piutang Pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp3.474.159.655,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Rapat Dewan Komisioner pada tanggal 2 Maret 2017.

Accounts receivable identified as uncollectible and referred to the State Receivables Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, totalling Rp3,474,159,655.00, have been written off in accordance with the Board of Commissioners meeting held on 2nd March 2017.

LAMPIRAN III

DAFTAR ASET BARANG MILIK NEGARA

I. Aset Tetap

APPENDIX III

LIST OF STATE-OWNED ASSETS

I. Fixed Assets

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2015 31st December 2015	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Accumulated Depreciation of Fixed Assets	31 Desember 2016 31st December 2016
Peralatan dan Mesin | Equipment and Machinery			
Kendaraan Bermotor Roda Dua | Two-Wheeled Vehicles	503.208.000	251.604.000	251.604.000
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | Four or More Wheeled Vehicles	113.236.352.869	18.864.732.580	94.371.620.289
Mesin Kantor | Office Machines	118.733.783	41.474.493	77.259.290
Mesin Pembangkit Tenaga | Power Plant Machines	1.206.859.498	429.566.673	777.292.825
Mesin Pendingin | Air Conditioning Units	2.119.379.274	320.430.129	1.798.949.144
Mesin Pengolah Data | Data processing Machines	60.562.565.442	24.733.854.226	35.828.711.217
Peralatan Telekomunikasi | Telecommunications Equipment	14.638.450.241	5.356.125.728	9.282.324.512
Peralatan Lainnya | Other Equipment	20.891.700	7.068.450	13.823.250
Peralatan Rumah Tangga | Household Equipment	26.664.127.161	8.160.348.226	18.503.778.935
Peralatan Studio | Studio Equipment	12.898.861.920	5.334.846.683	7.564.015.238
Peralatan/ Perlengkapan Kantor | Office Equipment	10.729.946.429	4.039.351.311	6.690.595.118
Jumlah | Total	**242.699.376.317**	**67.539.402.499**	**175.159.973.817**

II. Aset Takberwujud

II. Intangible Assets

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan | Description	31 Desember 2015 31st December 2015	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Accumulated Depreciation of Fixed Assets	31 Desember 2016 31st December 2016
Aset Takberwujud | Intangible Assets			
Aset Takberwujud | Intangible Assets	56.165.996.655,02	21.414.664.677	34.751.331.978

LAMPIRAN IV

APPENDIX IV

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

LIST OF MISSING FIXED ASSETS

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Nama Barang | Asset	Merk/Tipe Brand/Model	Jumlah Barang No. of	Harga Perolehan Acquisition Value
Tahun Perolehan 2014 | Acquired in 2014				
1.	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	6.037.424,17
2.	Digital Camera	Sony DSC-WX350	1 unit	1.385.020,83
3.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	9.900.000,00
4.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	9.900.000,00
5.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	8.961.562,50
Tahun Perolehan 2015 | Acquired in 2015				
1.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	13.867.041,67
1.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	13.867.041,67
Jumlah | Total				**63.918.090,84**

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

LAMPIRAN V

Daftar Tagihan Kepada Wajib Bayar yang Belum Registrasi dan Belum Diserahkan ke PUPN

APPENDIX V

List of Claims on Unregistered Payments Not Yet Referred To PUPN

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Bidang | Sector	Wajib Bayar Claims	Potensi Tagihan Potential	
			2015	2016
I	**PERBANKAN | BANKING SECTOR**			
1.	Bank Perkreditan Rakyat | Rural Bank	1	NA	NA
2.	Lembaga Penunjang Perbankan | Supporting Institutions	53	NA	NA
3.	Profesi Penunjang Perbankan | Supporting Professions	22	159.324.000	126.324.000
II	**PASAR MODAL | CAPITAL MARKET**			
1.	Emiten | Issuers	5	NA	NA
2.	Perusahaan Efek | Securities Companies	5	NA	NA
3.	Manajer Investasi | Investment Managers	2	NA	NA
	Profesi Penunjang Pasar Modal | Capital market Supporting Professions			
4.	Akuntan Publik | Public Accountants	17	123.114.000	97.614.000
5.	Konsultan Hukum | Legal Consultants	387	2.802.654.000	2.212.103.996
6.	Notaris | Notaries	1.189	8.610.738.000	6.777.245.149
7.	Penilai | Appraisers	3	21.726.000	17.226.000
III	**IKNB | NONBANK FINANCIAL INDUSTRY**			
	Jasa Penunjang IKNB | Supporting Services			NA
1.	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi | Insurance Loss Appraisers	2	NA	NA
2.	Perusahaan Pialang Asuransi | Insurance Brokers	1	NA	
	Dana Pensiun | Pension Funds			NA
3.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan | Financial Institution Pension Funds	2	NA	
	Perasuransian | Insurance			NA
4.	Asuransi Jiwa | Life Insurance	1	NA	NA
Jumlah | Total		**1.690**	**11.717.556.000**	**9.230.513.145**

NA (Not Applicable): Potensi Piutang tidak dapat dihitung/diestimasi karena dasar pengenaan Aset/Pendapatan Usaha tidak diketahui

N/A: Not Applicable: Potential receivables cannot be calculated/estimated because the basis of calculating Assets/ Operating Income is unknown.

Nilai tagihan yang dapat diestimasi dan belum registrasi berasal dari profesi penunjang, Perbankan dan Pasar Modal. Nilai tagihan kepada selain profesi penunjang, perbankan, dan pasar modal tidak dapat diestimasi karena dasar pengenaan berupa aset, pendapatan usaha, atau nilai kontrak tidak diketahui.

The value of claims that can be estimated and not yet registered originates from the supporting professions, banking industry and capital market. The value of claims, excluding the supporting professions, banking industry and capital market, cannot be estimated because the basis of calculating assets, operating income and contract value is unknown.

LAMPIRAN VI

Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dapat Digunakan Lagi

APPENDIX VI

List of Obsolete Inventory

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Nama Barang | Item Name	Jumlah Barang Quantity. of Item	Nilai Persediaan 2016 Value of 2016 Inventories
1	Stempel a.n. Ketua (Warna) | Chairman's Stamp (Colour)	10	825.000
2	Stempel Pribadi | Personal Stamp	26	2.145.000
3	Buku Agenda Kerja | Work Agenda	2.520	243.936.000
4	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030) Typewriter Ribbon for Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500
5	Pita Epson LQ 2190/2180 | Ribbon for Epsom LQ 2190/2180	9	1.148.400
6	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200 | Typewriter Ribbon for Nakajima AX 200	8	269.280
7	Pita Mesin Tik Fullmark F 7155 BKSC | Typewriter Ribbon for Fullmark F 7155 BKSC	59	2.336.400
8	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop | Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180
9	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop | Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990
10	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop | Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500
11	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop | Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730
12	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop | Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500
13	Kop Surat OJK Garuda BW F4 | OJK - Garuda BW F4 Letterhead	26	1.573.000
14	Cover DIPA | DIPA Cover	100	1.430.000
15	Pin DK Kuningan | Brass BoC Pin	23	1.265.000
16	Huruf Timbul Kuningan | Brass Embossed Letters	6	1.980.000
17	Kop Surat External OJK Gdg. Bidakara | OJK - Bidakara External Letterhead	18	2.178.000
18	Memo DK OJK | OJK BoC Memo	60	2.640.000
19	Map Logo OJK Merah Bidakara | Red OJK Map Logo	1.000	8.800.000
20	Map LHP Dana Pensiun | Pension Fund LHP Map	400	3.960.000
21	Map Peraturan Dana Pensiun | Pension Fund Regulation Map	650	6.435.000
22	Roll Up Banner 60x160 | Roll-Up Banner 60x160	68	31.416.000
23	Buku Telepon | Telephone Book	700	96.250.000
24	Stiker Dilarang Merokok 20 x 25 cm | No Smoking Sticker 20x25cm	240	7.920.000
25	Stker Dilarang Merokok 7 x 26 cm | No Smoking Sticker 7x26cm	80	1.320.000
26	Kumpulan UU dan PP | UU and PP Groups	50	4.675.000
27	Buku Statistik LP 2012 dan Direktori LP 2013 | LP Statistics Book 2012 and LP Directory 2013	110	15.972.000
28	Buku Perasuransisn 2012 | Insurance Book 2012	66	13.794.000
29	Buku Direktori Perasuransian 2013 | Insurance Directory 2013	60	4.950.000
30	Buku Statistik DP 2012 dan Direktorat DP 2013 | DP Statistics Book 2012 and Directory 2013	30	4.620.000
31	Buku Statistik LKJL 2012 dan Direktori LKJK+L 2013 | LKJL Statistics Book 2012 and LKJL+L Directory 2013	107	18.564.500
32	Stiker Rahasia (Inggris) | Confidential Stickers (English)	7.500	29.700.000
33	CF 9,5 x 11 (3 ply) | CF 9.5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000
34	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR | CF 9.5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200
35	Blanko SSP | Blank SSP	4	2.200.000

LAPORAN KEUANGAN OJK 2016
OJK 2016 FINANCIAL REPORT

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Nama Barang | Item Name	Jumlah Barang Quantity of item	Nilai Persediaan 2016 Value of 2016 Inventories
36	Pita Epson S015505/S015384 (DFX 9000) | Ribbon for Epson S015505/S015384 (DFX 9000)	19	5.407.875
37	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black | Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500
38	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Colour | Cartridge HP Deskjet C 6656 A Colour	5	1.837.000
39	Toner Fax Panasonic KX-FA83A | Fax Toner - Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400
40	Toner Fax Panasonic UF 4100 | Fax Toner - Panasonic UF 4100	3	2.970.000
41	Toner HP LJ 2613 A | Toner HP LJ 2613 A	21	21.101.850
42	Toner HP LJ 5949 A | Toner HP LJ 5949 A	10	10.417.000
43	Toner HP LJ CB 380 A | Toner HP LJ CB 380 A	11	25.773.000
44	Toner HP LJ CB 381 A | Toner HP LJ CB 381 A	12	38.676.000
45	Toner HP LJ CB 382 A | Toner HP LJ CB 382 A	12	43.956.000
46	Toner HP LJ CB 383 A | Toner HP LJ CB 383 A	11	35.453.000
47	Toner HP LJ CB 387 A | oner HP LJ CB 387 A	13	28.671.500
48	Toner HP LJ CB 384 A | Toner HP LJ CB 384 A	15	20.295.000
49	Toner HP LJ CB 385 A | Toner HP LJ CB 385 A	14	30.877.000
50	Toner HP LJ CB 386 A |Toner HP LJ CB 386 A	13	28.671.500
51	Toner Fuji Xerox Phaser 30K | Toner Fuji Xerox Phaser 30K	5	15.785.000
52	Toner Fuji Xerox Phaser 40K | Toner Fuji Xerox Phaser 40K	5	20.573.440
53	Toner Xerox CT 200655 Black | Toner Xerox CT 200655 Black	4	5.632.000
54	Toner Xerox CT 200656 Cyan | Toner Xerox CT 200656 Cyan	5	19.387.500
55	Toner Xerox CT 200657 Magenta | Toner Xerox CT 200657 Magenta	5	19.387.500
56	Toner Xerox CT 200658 Yellow | Toner Xerox CT 200658 Yellow	5	19.387.500
57	Toner Fuji Xerox 200226 Black | Toner Fuji Xerox 200226 Black	30	27.390.000
58	CD Statistik LKJL 2012 dan Direktori LKJL 2013 | CD Statistik LKJL 2012 dan Direktori LKJL 2013	176	6.776.000
59	Drum Facsimile Toshiba DP 80F | Drum Facsimile Toshiba DP 80F	2	3.439.700
60	Drum Panasonic KX FA 412 F | Drum Panasonic KX FA 412 F	3	2.970.000
Jumlah | Total			**962.389.445**

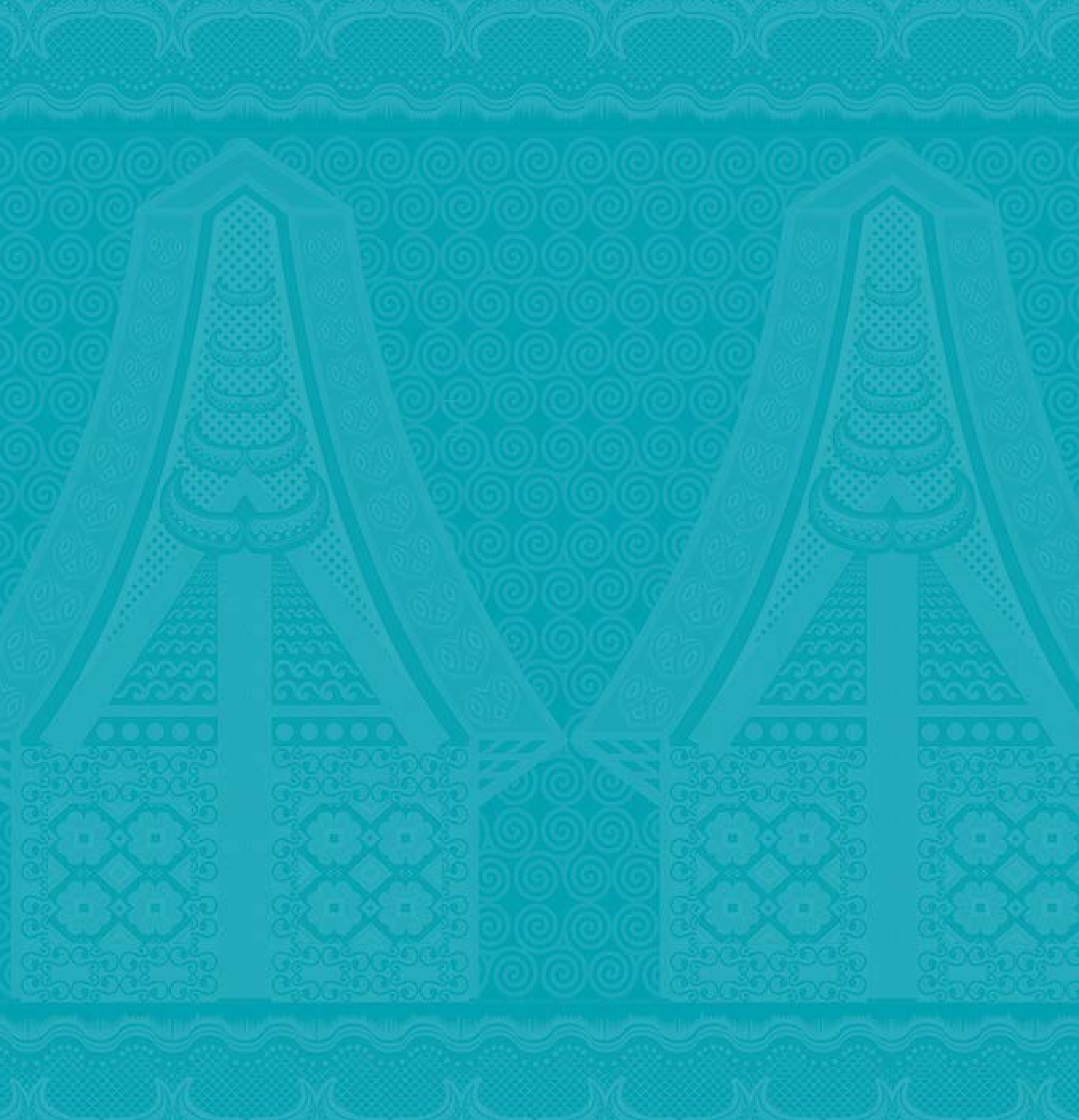

Laporan Tahunan

2016

Annual Report

MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

INCREASING CONTRIBUTION OF FINANCIAL SERVICES SECTOR IN SUPPORTING THE GOVERNMENT PRIORITY PROGRAMS

OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710
Tel. +6221-29600000

www.ojk.go.id